PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2018-2023

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4598);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program kepala daerah terpilih Tahun 2018-2023.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

(1) RPJMD Semesta Berencana memuat dan menjabarkan visi, misi dan program Gubernur.
(2) Penyusunan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(3) Materi muatan dan rincian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana berfungsi sebagai pedoman penyusunan perencanaan dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
i. BAB IX : Penutup.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali berkewajiban menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya dengan materi muatan dan rincian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Sistematika RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Maret 2019

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (3-77/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

I. UMUM

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Provinsi Bali merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional.

RPJMD Semesta Berencana merupakan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah: 1(satu) pulau, 1(satu) pola, dan 1(satu) tata kelola.

Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi,* meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu*

kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 3

DAFTAR ISI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7

1.3.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 ..... I-8

1.3.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Ke-3 (2015-2020) I-10

1.4 Maksud dan Tujuan I-11

1.4.1 Maksud I-11

1.4.2 Tujuan I-11

1.5 Sistematika Penulisan I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografi II-1

2.1.1 Letak, Luas Wilayah, dan Kondisi Geografis II-1

2.1.2 Topografi dan Geologi II-1

2.1.3 Hidrologi II-2

2.1.4 Iklim dan Suhu II-2

2.1.5 Penggunaan Lahan II-2

2.2 Aspek Demografi II-4

2.3 Kerangka Pengembangan Wilayah II-8

2.3.1 Kondisi Eksisting Kewilayahan II-8

2.3.2 Ketimpangan Antar Wilayah II-12

2.3.3 Ketimpangan Pertumbuhan Penduduk II-14

2.3.4 Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan II-19

2.3.5 Daya Dukung, Daya Tampung, dan Potensi Pengembangan II-21

2.3.6 Kewenangan II-24
2.3.7 Kesesuaian Tata Ruang II-27
2.3.8 Arah Pengembangan Wilayah II-28
2.3.9 Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tema (Pariwisata, Pertanian, Ekonomi Produktif, UMKM) II-29
2.3.10 Tema Pengembangan Wilayah II-33
2.3.11 Kerangka Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil II-39
2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-49
2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi II-49
2.4.2 Inflasi II-51
2.4.3 PDRB per Kapita Provinsi Bali II-52
2.4.4 Distribusi Pendapatan II-53
2.4.5 Persentase Kemiskinan II-55
2.4.6 Indeks Pembangunan Manusia II-57
2.4.7 Angka Melek Huruf (AMH) II-58
2.4.8 Rata-Rata Lama Sekolah II-59
2.4.9 Angka Usia Harapan Hidup II-60
2.4.10 Persentase Balita Gizi Buruk II-61
2.4.11 Prevalensi Balita Gizi Kurang II-61
2.4.12 Cakupan Desa Tangguh Bencana II-62
2.4.13 Angka Partisipasi Angkatan Kerja II-63
2.4.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-63
2.4.15 Tingkat Pengangguran Terbuka II-64
2.4.16 Rasio Penduduk Yang Bekerja II-64
2.4.17 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas II-65
2.4.18 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja .. II-66
2.4.19 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I II-66
2.4.20 Indeks Kepuasan Masyarakat II-67
2.4.21 Persentase PAD Terhadap Pendapatan II-67
2.4.22 Opini BPK II-68
2.4.23 Pecapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) II-69
2.4.24 Penguatan Cadangan Pangan II-70

2.5 Aspek Pelayanan Umum II-71
2.5.1 Layanan Urusan Wajib Dasar II-71
2.5.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-135
2.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-219
2.5.4 Penunjang Urusan II-250
2.6 Aspek Daya Saing II-271
2.6.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II-271
2.6.2 Nilai Tukar Petani II-272
2.6.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita II-273
2.6.4 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) II-273
2.6.5 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum II-274
2.6.6 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR II-274
2.6.7 Angka Kriminalitas Yang Tertangani II-275
2.7 Kerjasama Antar Daerah II-275
2.8 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga II-279
2.9 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah II-281
2.10 Standar Pelayanan Minimal II-283
2.11 Prediksi Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2018-2023 ..... II-286
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2013 - 2018) III-1
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 – 2017 ..... III-3
3.1.2 Dana Perimbangan III-5
3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah III-6
3.1.4 Perkembangan pertumbuhan realisasi belanja daerah III-7
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Dalam Periode 2013-2018) III-25
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-27
3.3 Kerangka Pendanaan III-34
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBD Bali 2019-2023 ..... III-34
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-35
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2 Lingkungan Strategis IV-21
4.3 Isu-Isu Strategis IV-22

4.3.1 Kesenjangan IV-26
4.3.2 Daya Saing IV-26
4.3.3 Nilai Tambah IV-27
4.3.4 Keberlangsungan/*Sustainability* IV-27
4.3.5 Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum IV-28
4.3.6 Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana IV-28
4.4 Penyelarasan Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Dengan RPJMN 2015-2019 ..... IV-29
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-5
5.3 Paradigma Pembangunan Bali V-7
5.3.1 Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala dan Niskala V-7
5.3.2 Pembangunan Bersifat Holistik V-8
5.3.3 Pembangunan Bersifat Integratif V-8
5.3.4 Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis V-8
5.3.5 Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural V-9
5.3.6 Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah V-9
5.3.7 Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali V-9
5.4 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 ..... V-9
5.5 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2015-2019 ..... V-11
5.6 Tujuan dan Sasaran V-13
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan VI-6
6.3 Program Pembangunan Daerah VI-16
6.4 Kegiatan Indikatif VI-29
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP.....XI-1
9.1 Pedoman Transisi IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen I-7
Gambar 1.2 Hubungan RPJMD Semesta Berencana dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali I-10
Gambar 2.1 Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2017 ..... II-3
Gambar 2.2 Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya II-3
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk II-4
Gambar 2.4 Komposisi Penduduk Provinsi Bali berdasarkan kelompok usia (Ribu Jiwa) II-6
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-7
Gambar 2.6 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota II-7
Gambar 2.7 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk per Tahun per Provinsi di Indonesia (Sensus Penduduk 2000 – 2010) II-15
Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Bali dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk per Tahun Sejak Tahun 1961 – 2010 ..... II-16
Gambar 2.9 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk per Tahun per Kabupaten/Kota II-16
Gambar 2.10 Piramida Penduduk Bali (Sensus Penduduk 2010) II-17
Gambar 2.11 Jumlah Penduduk dan Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota Sensus Penduduk Tahun 2010 ..... II-18
Gambar 2.12 TFR Secara Nasional dan Bali, 1991-2012 ..... II-18
Gambar 2.13 Persentase Wanita Usia Subur yang Sedang Mempergunakan Kontrasepsi Modern Tahun 2007, 2010 dan 2012, Provinsi Bali II-19
Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017 ..... II-20
Gambar 2.15 Kondisi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017 .. II-20
Gambar 2.16 Kondisi Jumlah Kejadian Kebaran II-38
Gambar 2.17 Kondisi Nusa Penida, Ceningan, dan Lembongan II-43
Gambar 2.18 Kondisi Pulau Serangan II-43
Gambar 2.19 Kondisi NusaDharma dan Penninsula II-44
Gambar 2.20 Kondisi Nusa Pudut di Kecamatan Kuta Selatan II-44
Gambar 2.21 Kondisi Pulau Penyu di Kecamatan Kuta Selatan II-44

Gambar 2.22 Kondisi Pulau Menjangan II-45
Gambar 2.23 Kondisi tutupan vegetasi Pulau Menjangan II-45
Gambar 2.24 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-49
Gambar 2.25 Nilai PDRB ADHB Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-50
Gambar 2.26 Kontribusi PDRB ADHB Provinsi Bali Menurut II-51
Gambar 2.27 Laju Inflasi Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (%) II-52
Gambar 2.28 Laju Inflasi Provinsi Bali Menurut Komoditas Tahun 2013-2017 ..... II-52
Gambar 2.29 PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-53
Gambar 2.30 Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-54
Gambar 2.31 Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-55
Gambar 2.32 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-55
Gambar 2.33 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-56
Gambar 2.34 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-56
Gambar 2.35 Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 II-57
Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-57
Gambar 2.37 Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-59
Gambar 2.38 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-59
Gambar 2.39 Angka Harapan Hidup di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-60
Gambar 2.40 Balita Gizi Buruk di Prvinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-61
Gambar 2.41 Prevalensi Balita Gizi Buruk II-61
Gambar 2.42 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-63
Gambar 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-63
Gambar 2.44 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-64
Gambar 2.45 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-65
Gambar 2.46 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas II-65
Gambar 2.47 Jumlah Angkatan Kerja Berusaha Sendiri dan Angkatan Kerja Pekerja Bebas Tahun 2013-2017 ..... II-66
Gambar 2.48 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Provinsi Bali .. II-67

Gambar 2.49 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat II-67
Gambar 2.50 Jumlah PAD dan Pendapatan di provinsi Bali Tahun 2013-2017.... II-68
Gambar 2.51 Skor PPH Ketersediaan II-70
Gambar 2.52 Pencapaian Skor PPH di Provinsi Bali Tahun 2015-2017..... II-70
Gambar 2.53 Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-71
Gambar 2.54 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-73
Gambar 2.55 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-73
Gambar 2.56 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan II-74
Gambar 2.57 Angka Partisipasi Murni Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-75
Gambar 2.58 Angka Partisipasi Murni Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-76
Gambar 2.59 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Provinsi Bali Tahun 2013-2017.. II-77
Gambar 2.60 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-77
Gambar 2.61 Angka Putus Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-78
Gambar 2.62 Angka Kelulusan di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-78
Gambar 2.63 Angka Melanjutkan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-79
Gambar 2.64 Fasilitas Pendidikan (Kondisi Ruang Kelas Baik) di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-80
Gambar 2.65 Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-81
Gambar 2.66 Rasio Guru Terhadap Murid di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-82
Gambar 2.67 Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-82
Gambar 2.68 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-83
Gambar 2.69 Angka Melek Huruf di Provinsi Bali Tahun 2013-2018..... II-83
Gambar 2.70 Angka Melek Huruf Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2013-2017... II-84
Gambar 2.71 Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf (tidak Buta Aksara) Tahun 2013-2017..... II-84
Gambar 2.72 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-85
Gambar 2.73 Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-85

Gambar 2.74 Angka Kematian Balita per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-86
Gambar 2.75 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-86
Gambar 2.76 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-87
Gambar 2.77 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provisni Bali Tahun 2013-2017 ..... II-87
Gambar 2.78 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Provisni Bali II-88
Gambar 2.79 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-88
Gambar 2.80 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2013 - 2017 ..... II-89
Gambar 2.81 Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 ..... II-89
Gambar 2.82 Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-90
Gambar 2.83 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-91
Gambar 2.84 Persentase Ibu Hamil Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2013-2017 ..... II-92
Gambar 2.85 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-92
Gambar 2.86 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-93
Gambar 2.87 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif II-93
Gambar 2.88 Jumlah Balita Ditimbang Tahun 2013-2017 ..... II-94
Gambar 2.89 Persentase Cakupan Imunisasi Campak Tahun 2013-2017 ..... II-95
Gambar 2.90 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di II-95
Gambar 2.91 Cakupan Balita Pneuminoa Yang Ditangani Tahun 2013-2017 ..... II-96
Gambar 2.92 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-96
Gambar 2.93 Jumlah Kasus TBC yang Dilaporkan Tahun 2013-2017 ..... II-97
Gambar 2.94 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-97
Gambar 2.95 Tingkat kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-98

Gambar 2.96 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang terdeteksi DOTS di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-99
Gambar 2.97 Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-99
Gambar 2.98 Cakupan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-100
Gambar 2.99 Kasus DBD yang Dilaporkan Tahun 2013-2017 ..... II-100
Gambar 2.100 Incidence Rate Kasus DBD per 100.000 Penduduk Tahun 2013-2017..... II-101
Gambar 2.101 Penderita Diare Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-101
Gambar 2.102 Angka Kejadian Malaria di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-102
Gambar 2.103 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari penduduk umur 15-49 tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-104
Gambar 2.104 Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan Tahun 1987-Juli 2017..... II-104
Gambar 2.105 Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan dari Tahun 1987-Juli 2017 Berdasarkan Faktor Risiko Penularan..... II-105
Gambar 2.106 Prevalensi (dalam %) HIV+ pada Wanita Penjaja Seks Langsung dan Wanita Penjaja Seks Tidak Langsung di Kota Denpasar per Tahun..... II-105
Gambar 2.107 Cascade pemakaian ARV pada MSM dan WPS yang dilayani di YKP, Denpasar 15 Sept 2015 – 30 Sept 2016..... II-106
Gambar 2.108 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Tahun 2013-2017 ..... II-107
Gambar 2.109 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS..... II-108
Gambar 2.110 Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia Tahun 2013-2017 ..... II-109
Gambar 2.111 Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia Tahun 2013-2017 ..... II-109
Gambar 2.112 Persentase Ibu Hamil Yang Memeriksakan Kehamilannya Minimal Satu Kali Tahun 2013-2017 ..... II-110
Gambar 2.113 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4..... II-111
Gambar 2.114 Cakupan Pelayanan Nifas II-111
Gambar 2.115 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani II-112

Gambar 2.116 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-112
Gambar 2.117 Cakupan Balita Pendek/Stunting Tahun 2013-2017 ..... II-113
Gambar 2.118 Jumlah Kepesertaan JKBM Tahun 2013-2016 ..... II-116
Gambar 2.119 Cakupan Konsumsi Garam Beryodium di Rumah Tangga..... II-120
Gambar 2.120 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap II-121
Gambar 2.121 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-122
Gambar 2.122 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Provinsi Bali II-122
Gambar 2.123 Persentase RT Berakses Sanitasi Layak Tahun 2013-2016..... II-123
Gambar 2.124 Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2018..... II-124
Gambar 2.125 Persentase Penduduk yang Berakses Air Minum Aman di Provinsi Bali Tahun 2015-2018 ..... II-125
Gambar 2.126 Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB di Provinsi Bali II-126
Gambar 2.127 Ketaatan Terhadap RTRW di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 .... II-126
Gambar 2.128 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali Tahun 2018 ... II-127
Gambar 2.129 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2013-2017..... II-128
Gambar 2.130 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-129
Gambar 2.131 Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2013-2017..... II-129
Gambar 2.132 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) II-130
Gambar 2.133 Persentase Penegakan Perda di Provinsi Bali Tahun 2013-2017II-130
Gambar 2.134 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-131
Gambar 2.135 Persentase PMKS Yang Tertangani..... II-131
Gambar 2.136 Persentase PMKS Skala Yang Memeproleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-132
Gambar 2.137 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 II-133

Gambar 2.138 Persentase WKBSM Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-133
Gambar 2.139 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-134
Gambar 2.140 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Bali II-134
Gambar 2.141 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-135
Gambar 2.142 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) II-136
Gambar 2.143 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan II-136
Gambar 2.144 Keselamatan dan Perlindungan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-137
Gambar 2.145 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Pekerja Jamsostek II-137
Gambar 2.146 Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Provinsi Bali II-138
Gambar 2.147 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan di Provinsi Bali II-138
Gambar 2.148 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Masyarakat, dan Kewirausahaan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-139
Gambar 2.149 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-140
Gambar 2.150 Capaian IPG di Provinsi Bali Tahun 2010-2017 ..... II-140
Gambar 2.151 Capaian IDG di Provinsi Bali Tahun 2011-2017 ..... II-141
Gambar 2.152 Rasio KDRT di Provinsi Bali II-144
Gambar 2.153 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-145
Gambar 2.154 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Bali II-146
Gambar 2.155 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-147
Gambar 2.156 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-147
Gambar 2.157 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-148
Gambar 2.158 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-149
Gambar 2.159 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 II-150
Gambar 2.160 Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Nonpertanian di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-154
Gambar 2.161 Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 II-155
Gambar 2.162 Pola Pemanfaatan Tanah Provinsi Bali II-157
Gambar 2.163 Peningkatan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Tahun 2014-2017 ..... II-173
Gambar 2.164 Volume Timbulan Sampah m^3/hari di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-176
Gambar 2.165 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-177
Gambar 2.166 Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kabupaten/Kota II-178
Gambar 2.167 Rasio Pasangan Berakte Nikah per Kabupaten/Kota II-179
Gambar 2.168 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-181
Gambar 2.169 Persentase LPM Berprestasi di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 . II-181
Gambar 2.170 Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 ..... II-182
Gambar 2.171 Persentase Posyandu Aktif di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ... II-184
Gambar 2.172 Posyandu Model/Integrasi yang Dibina di Provinsi Bali II-184
Gambar 2.173 Persentase Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 .. II-185
Gambar 2.174 Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah Dibina di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-186
Gambar 2.175 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-187

Gambar 2.176 Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-187
Gambar 2.177 Persentase KB Aktif dan DO KB di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-188
Gambar 2.178 Peserta KB Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 ..... II-189
Gambar 2.179 Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Layanan KB Mandiri di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-189
Gambar 2.180 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Provinsi Bali..... II-191
Gambar 2.181 Rasio Akseptor KB di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-191
Gambar 2.182 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 di Provinsi Bali Tahun 2013-2018..... II-192
Gambar 2.183 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-193
Gambar 2.184 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)* II-194
Gambar 2.185 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) . II-194
Gambar 2.186 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi.. II-195
Gambar 2.187 Cakupan Anggota BKB, BKR, dan BKL Ber-KB di Provinsi Bali Tahun 2014-2018..... II-196
Gambar 2.188 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2013-2018 .. II-196
Gambar 2.189 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri di Provinsi Bali Tahun 2013-2018..... II-197
Gambar 2.190 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2013-2017..... II-198
Gambar 2.191 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-199
Gambar 2.192 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-200
Gambar 2.193 Jumlah Pelabuhan dan Bandara di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-201
Gambar 2.194 Persentase Layanan Angkutan Darat Di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-201

Gambar 2.195 Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 II-202
Gambar 2.196 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan HP/Telepon Rumah Tahun 2013-2017 ..... II-205
Gambar 2.197 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Tahun 2013-2017 ..... II-206
Gambar 2.198 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-206
Gambar 2.199 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-208
Gambar 2.200 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-209
Gambar 2.201 Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-210
Gambar 2.202 Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga II-210
Gambar 2.203 Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 II-214
Gambar 2.204 Rasio Jumlah Pengunjung Tahun 2013-2017 ..... II-215
Gambar 2.205 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-215
Gambar 2.206 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun II-216
Gambar 2.207 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-217
Gambar 2.208 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-218
Gambar 2.209 Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Provinsi Bali II-218
Gambar 2.210 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-219
Gambar 2.211 Jumlah Daya Tarik Wisata II-219
Gambar 2.212 Jumlah DTW Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 ..... II-220
Gambar 2.213 Tingkat Kunjungan Wisatawan ke Bali Tahun 2013-2018 ..... II-220
Gambar 2.214 Rata-Rata lama tinggal wisatawan II-222
Gambar 2.215 Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata II-225
Gambar 2.216 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Tahun 2013-2017 II-226
Gambar 2.217 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-226
Gambar 2.218 Kontribusi Sektor Pertanian Pangan Terhadap PDRB II-227

Gambar 2.219 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Tahun 2013-2017 ..... II-228
Gambar 2.220 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB II-228
Gambar 2.221 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2013-2017 ..... II-229
Gambar 2.222 Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2013-2017 ..... II-229
Gambar 2.223 Jumlah Kelompok Ternak Pembibitan Tahun 2013-2017 ..... II-230
Gambar 2.224 Jumlah Kelompok Pengolah Pakan Ternak, Sarana Prasarana Ternak, dan Pasar Ternak Tahun 2013-2017 ..... II-230
Gambar 2.225 Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak Tahun 2013-2017 ..... II-231
Gambar 2.226 Rumah Potong Hewan dan Unggas Tahun 2013-2017 ..... II-232
Gambar 2.227 Jumlah Pemotongan Ternak Tahun 2013-2017 ..... II-232
Gambar 2.228 Jumlah Peternak Tahun 2013-2017 ..... II-236
Gambar 2.229 Jumlah Petugas Medik Veteriner Tahun 2013-2017 ..... II-237
Gambar 2.230 Jumlah Petugas Paramedik Tahun 2013-2017 ..... II-237
Gambar 2.231 Jumlah Tenaga IB, PKB, dan ATR tahun 2013-2017 ..... II-237
Gambar 2.232 Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ... II-240
Gambar 2.233 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB . II-241
Gambar 2.234 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2017 II-241
Gambar 2.235 Persentase Penambangan Liar Tahun 2013-2017 ..... II-242
Gambar 2.236 Nilai Perdagangan Tahun 2013-2016 ..... II-242
Gambar 2.237 Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... II-243
Gambar 2.238 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat Tahun 2015-2018 ..... II-244
Gambar 2.239 Nilai Perindustrian Tahun 2013-2016 ..... II-245
Gambar 2.240 Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU) Tahun 2013-2017 ..... II-247
Gambar 2.241 Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-248
Gambar 2.242 Nilai Tukar Nelayan II-250
Gambar 2.243 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD II-251
Gambar 2.244 Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW II-252
Gambar 2.245 Persentase SiLPA Tahun 2013-2018 ..... II-254
Gambar 2.246 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2013-2018 ..... II-256
Gambar 2.247 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2013-2018 ..... II-257

Gambar 2.248 Pesentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-260
Gambar 2.249 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-261
Gambar 2.250 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi Pemerintah di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-262
Gambar 2.251 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-263
Gambar 2.252 Jumlah Temuan BPK di provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-265
Gambar 2.253 Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev Tahun 2013-2017 ..... II-266
Gambar 2.254 Jumlah Sistem Peringatan Dini..... II-267
Gambar 2.255 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2013-2016..... II-272
Gambar 2.256 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2013-2016..... II-273
Gambar 2.257 Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-273
Gambar 2.258 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Tahun 2013-2017..... II-274
Gambar 2.259 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR Tahun 2013-2017..... II-274
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... III-3
Gambar 4.2 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2014-2016 ..... III-4
Gambar 4.3 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2016..... III-5
Gambar 4.4 Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2014-2018 ..... III-7
Gambar 4.5 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2013-2016..... III-7
Gambar 4.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2013-2016..... III-9

Gambar 4.7 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... III-9
Gambar 4.8 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... III-10
Gambar 4.9 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... III-11
Gambar 4.10 Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... III-12
Gambar 4.11 Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... III-12
Gambar 4.12 Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... III-13
Gambar 4.13 Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2016 ..... III-14
Gambar 4.14 Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... III-15
Gambar 4.15 Jumlah DTW di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... III-16
Gambar 4.16 Jumlah DTW Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 .. III-16
Gambar 4.17 Produktivitas Bahan Pangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... III-18
Gambar 4.18 Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2014-2016 ... III-19
Gambar 4.19 Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... III-20
Gambar 4.20 Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... III-22
Gambar 4.21 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali 2018-2013 ..... III-23
Gambar 4.22 Penyelarasan Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Dengan RPJMN 2015-2019 ..... III-30
Gambar 5.1 Keterkaitan Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 ..... V-10
Gambar 5.2 Keterkaitan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 ..... V-10
Gambar 5.3 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2005-2025 ..... V-12

Gambar 5.4 Keterkaitan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 dengan Nawa Cita RPJMN Tahun 2005-2025.....V-12

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali II-1
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Bali laki-laki dan perempuan II-5
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Bali Berdasarkan Kelompok Umur Laki-laki dan Perempuan II-6
Tabel 2.4 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-8
Tabel 2.5 Kawasan Lindung Bali II-10
Tabel 2.6 Kawasan Budidaya di Provinsi Bali II-10
Tabel 2.7 Perkiraan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020, Provinsi Bali II-17
Tabel 2.8 Kebutuhan air di Provinsi Bali dari Tahun 2013 sampai 2016 ..... II-22
Tabel 2.9 Jumlah Ketersediaan air di Provinsi Bali berdasarkan Asumsi Adanya Fenomena Iklim Dan Ketersediaan Air Tanah (CAT) II-22
Tabel 2.10 Status dan Daya Dukung Air Provinsi Bali dengan Asumsi Terkait II-23
Tabel 2.11 Jumlah Kejadian Kebakaran II-38
Tabel 2.12 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) II-39
Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2017 ..... II-58
Tabel 2.14 Cakupan Desa Tangguh Bencana II-62
Tabel 2.15 Opini BPK Tahun 2013-2017 ..... II-69
Tabel 2.16 Penguatan Cadangan Pangan II-70
Tabel 2.17 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013-2017 ..... II-80
Tabel 2.18 Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 ..... II-90
Tabel 2.19 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan II-91
Tabel 2.20 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunasi campak II-94
Tabel 2.21 Tingkat Kematian Akibat Malaria di Provinsi Bali Tahun 2016-2017 . II-102
Tabel 2.22 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-103
Tabel 2.23 Persen Darah Donor yang HIV+ per Kab/Kota tahun 2015 ..... II-106
Tabel 2.24 Persen Ibu Hamil yang HIV+ per Kab/Kota tahun 2016 ..... II-107
Tabel 2.25 Cakupan Puskesmas Pembantu II-110
Tabel 2.26 Cakupan Pemberian Makanan Pendampingan Asi II-113

Tabel 2.27 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat II-114
Tabel 2.28 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin II-114
Tabel 2.29 Saranan kesehatan II-115
Tabel 2.30 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB II-115
Tabel 2.31 Jumlah Alokasi Anggaran JKBM Tahun 2013-2016 ..... II-116
Tabel 2.32 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di PKM yang Ditanggung JKBM..... II-117
Tabel 2.33 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di RS yang Ditanggung JKBM II-117
Tabel 2.34 Jumlah Kunjungan Rawat Inap RS dan Puskesmas yang ditanggung JKBM Tahun 2013-2016 ..... II-118
Tabel 2.35 Kepesertaan JKN Tahun 2014-2017 ..... II-118
Tabel 2.36 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara ... II-119
Tabel 2.37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 ..... II-119
Tabel 2.38 Inventaris Bendung dan Panjang Saluran Irigasi Daerah Irigasi di Provinsi Bali II-124
Tabel 2.39 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2018 ..... II-128
Tabel 2.40 Tingkat Hubungan Industrial di Provinsi Bali Tahun 2013-2017..... II-135
Tabel 2.41 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintan di Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 ..... II-142
Tabel 2.42 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-142
Tabel 2.43 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta II-143
Tabel 2.44 Rasio APM Laki-Laki dan Perempuan di SD Tahun 2013-2017 ..... II-150
Tabel 2.45 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP di Bali Tahun 2013-2016 . II-151
Tabel 2.46 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA di Bali Tahun 2013-2016 . II-151
Tabel 2.47 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi di Bali II-152
Tabel 2.48 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-153
Tabel 2.49 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita..... II-155
Tabel 2.50 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan II-156
Tabel 2.51 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Tercatat Pada Buku Inventaris..... II-157
Tabel 2.52 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Yang Sudah Dan Belum Bersertipikat..... II-157
Tabel 2.53 Analisis Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD II-159
Tabel 2.54 Laporan Inventarisasi GRK Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-173

Tabel 2.55 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2014-2017 ..... II-178
Tabel 2.56 Rasio Bayi Berakte Kelahiran II-179
Tabel 2.57 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi II-179
Tabel 2.58 Kabupaten/Kota Mengoprasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-180
Tabel 2.59 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK II-180
Tabel 2.60 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran II-180
Tabel 2.61 Persentase Remaja (Umur 14 s.d 19 th) Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) II-198
Tabel 2.62 Rasio Ijin Trayek Provinsi Bali Tahun 2013-2016 ..... II-200
Tabel 2.63 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-202
Tabel 2.64 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum II-203
Tabel 2.65 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-204
Tabel 2.66 Cakupan Layanan Telekomunikasi II-204
Tabel 2.67 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet II-205
Tabel 2.68 Jumlah UMKM II-207
Tabel 2.69 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja II-208
Tabel 2.70 Kenaikan/Penurunan Nilai Realsiasi PMDN (Milyar Rupiah) II-208
Tabel 2.71 Buku Kabupaten Dalam Angka II-211
Tabel 2.72 Buku PDRB II-211
Tabel 2.73 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah II-211
Tabel 2.74 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Tahun 2013-2018 ..... II-212
Tabel 2.75 Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2013-2018 ..... II-213
Tabel 2.76 Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi II-213
Tabel 2.77 Jumlah Rata-rata Pengunjung 2013-2017 ..... II-215
Tabel 2.78 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk II-216
Tabel 2.79 Rasio Perpustakaan per-Satuan Penduduk II-216
Tabel 2.80 *the best 20 direct foreign tourist arrivals to bali in January - december 2017* II-220
Tabel 2.81 Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata II-223
Tabel 2.82 Jumlah Restotan dan Rumah Makan Tahun 2013-2017 ..... II-223
Tabel 2.83 Jumlah Bar di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-224

Tabel 2.84 Jumlah Pramuwisata II-224
Tabel 2.85 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB II-227
Tabel 2.86 Jumlah Penyakit Hewan II-233
Tabel 2.87 Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali Tahun 2013-2017 ..... II-233
Tabel 2.88 Pemasukan Bahan Asal Ternak ke Bali (kg) Tahun 2013-2017 ..... II-234
Tabel 2.89 Pengeluaran Ternak dari Bali Tahun 2013-2017 ..... II-234
Tabel 2.90 Pengeluaran Bahan Asal Ternak dari Bali Tahun 2013-2017 ..... II-235
Tabel 2.91 Kelas Kelompok Peternak II-236
Tabel 2.92 Pasar Hasil Peternakan Tahun 2013-2017 ..... II-238
Tabel 2.93 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali II-239
Tabel 2.94 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis di provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-239
Tabel 2.95 Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri Tahun 2013-2017 ..... II-243
Tabel 2.96 Kinerja Perlindungan Konsumen Tahun 2013-2017 ..... II-244
Tabel 2.97 Capaian Pengiriman Transmigrasi Tahun 2013-2017 ..... II-247
Tabel 2.98 Konsumsi Ikan II-248
Tabel 2.99 Cakupan Bina Kelompok Nelayan II-249
Tabel 2.100 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan II-249
Tabel 2.101 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman II-249
Tabel 2.102 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD II-252
Tabel 2. 103 Opini BPK Tahun 2013-2017 ..... II-253
Tabel 2.104 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana II-256
Tabel 2.105 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2018 ..... II-257
Tabel 2.106 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2013-2018 ..... II-258
Tabel 2.107 Penetapan APBD II-259
Tabel 2.108 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan II-259
Tabel 2.109 Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural II-261
Tabel 2.110 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah II-262
Tabel 2.111 Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah II-263
Tabel 2.112 Persentase Pelanggaran Pegawai II-265

Tabel 2.113 Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota II-266
Tabel 2.114 Fungsi Pegawasan, Pembentukan dan Fungsi Anggaran II-266
Tabel 2.115 Fungsi Pengawasan II-267
Tabel 2.116 Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali Tahun 201-2017 ..... II-268
Tabel 2.117 Jumlah Korban Bencana II-269
Tabel 2.118 Data Tertanganinya Bantuan Pasca Bencana (Semua Jenis Bencana) Tahun 2013-2016 ..... II-269
Tabel 2.119 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana II-269
Tabel 2.120 Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Tahun 201-2017 ... II-270
Tabel 2.121 Jumlah Kejadian Bencana II-271
Tabel 2.122 Data Lainnya II-271
Tabel 2.123 Nilai Tukar Petani II-272
Tabel 2.124 Banyaknya Perkara Pidana yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Negeri Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali, 2017 ..... II-275
Tabel 2.125 Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ..... II-283
Tabel 2.126 Prediksi Makro Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ..... II-288
Tabel 2.127 Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013-2017 ..... II-289
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali III-2
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah III-2
Tabel 3.3 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah III-3
Tabel 3.4 Struktur dan Perkembangan Pendapatan Asli daerah III-4
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada APBD Provinsi Bali III-4
Tabel 3.6 Struktur Realisasi Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah III-5
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer Pada APBD III-6
Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah III-7

Tabel 3.9 Perkembangan Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah III-9
Tabel 3.10 Struktur Realisasi Belanja Daerah III-11
Tabel 3.11 Perkembangan Kinerja Realisasi Belanja Daerah III-13
Tabel 3.12 Perkembangan Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Secara Triwulanan III-17
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada APBD Provinsi Bali Tahu 2013-2018 ..... III-19
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Pajak Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... III-19
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... III-20
Tabel 3.16 Neraca Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2016 dan 2017 ..... III-22
Tabel 3.17 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... III-26
Tabel 3.18 Proporsi Penggunaan Anggaran APBD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... III-27
Tabel 3.19 Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... III-29
Tabel 3.20 Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ..... III-31
Tabel 3.21 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2018 ..... III-31
Tabel 3.22 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2018 ..... III-32
Tabel 3.23 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah provinsi Bali Tahun 2019-2023 ..... III-38
Tabel 3.24 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023 ..... III-40
Tabel 4.1 Rumusan Permasalahan Kesenjangan IV-6
Tabel 4.2 Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup IV-8
Tabel 4.3 Rumusan Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran IV-10
Tabel 4.4 Rumusan Permasalahan Kualitas SDM IV-13
Tabel 4.5 Rumusan Permasalahan Sarana dan Prasarana IV-15
Tabel 4.6 Rumusan Permasalahan Pariwisata IV-17
Tabel 4.7 Rumusan Permasalahan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan IV-17
Tabel 4.8 Rumusan Permasalahan Bencana dan Perubahan Iklim IV-18

Tabel 4.9 Rumusan Permasalahan Rendahnya Produktivitas.....IV-20
Tabel 4.10 Rumusan Permasalahan Kebudayaan Bali IV-21
Tabel 4.11 Analisis Lingkungan Strategis IV-21
Tabel 4.12 Relasi Isu Strategis Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali.....IV-25
Tabel 5.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPJMD Semesta Berencana Visi *: "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"* V-20
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....VI-1
Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....VI-6
Tabel 6.3 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana VI-17
Tabel 6.4 Kegiatan Indikatif Sesuai Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....VI-30
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....VII-4
Tabel 7.2A Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....VII-5
Tabel 7.2B Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....VII-28
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Bali VIII-3
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali VIII-6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan mulai dari tingkat nasional sampai daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 merupakan penjabaran RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 yang telah disempurnakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005 – 2025. Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005 – 2025.

Provinsi Bali telah memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru hasil Pilkada serentak 2018 yang telah resmi dilantik pada tanggal 5 September 2018.

I Wayan Koster sebagai Gubernur dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati sebagai Wakil Gubernur untuk memimpin Bali lima tahun ke depan, 2018-2023.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang telah resmi dilantik pada tanggal 5 September 2018. Visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali"* dengan 22 misi diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Penyelenggaraan pembangunan Semesta Berencana Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi 7 (tujuh) prinsip:

1. Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala*, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.
2. Pembangunan bersifat Holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota se-Bali;
3. Pembangunan bersifat integratif; Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota, bukan membangun di Kabupaten/Kota secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Membangun Kabupaten/Kota artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah Provinsi harus lebih

banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasiltator; bukan sebagai operator langsung;

5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan bersifat Kultural. Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarkhi dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pembangunan dengan pendekatan Satu Kesatuan Wilayah. Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola;
7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali. Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya,* prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin* Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara *Genuine* Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 149 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068 Tahun 2009);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4598);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara tahun 2018 Nomor 1540);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

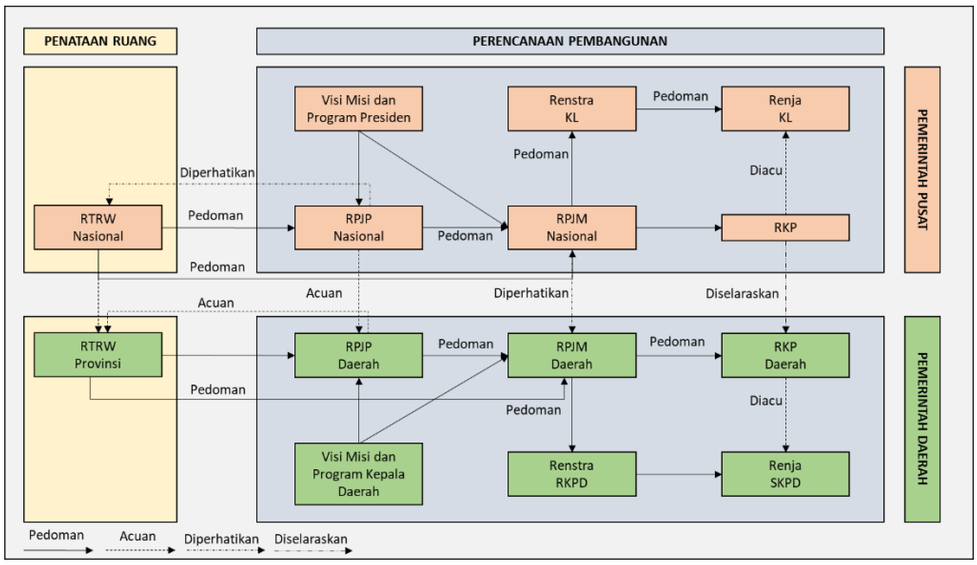

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2018-2023 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dan RTRW Provinsi Bali dengan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 juga mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan evaluasi RPJMD sebelumnya, serta memperhatikan pula RPJMD Provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Bali. Selanjutnya, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

1.3.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah memiliki pentahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, jangka menengah lima tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan pentahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.

Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu **"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila 1 Juni 1945.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki

jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.

7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelengarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.

19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.

20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.

21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.

22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPJMD Provinsi Bali akan memasuki periode 2018-2023. Secara ringkas, hubungan antara RPJMD Semesta Berencana dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.2

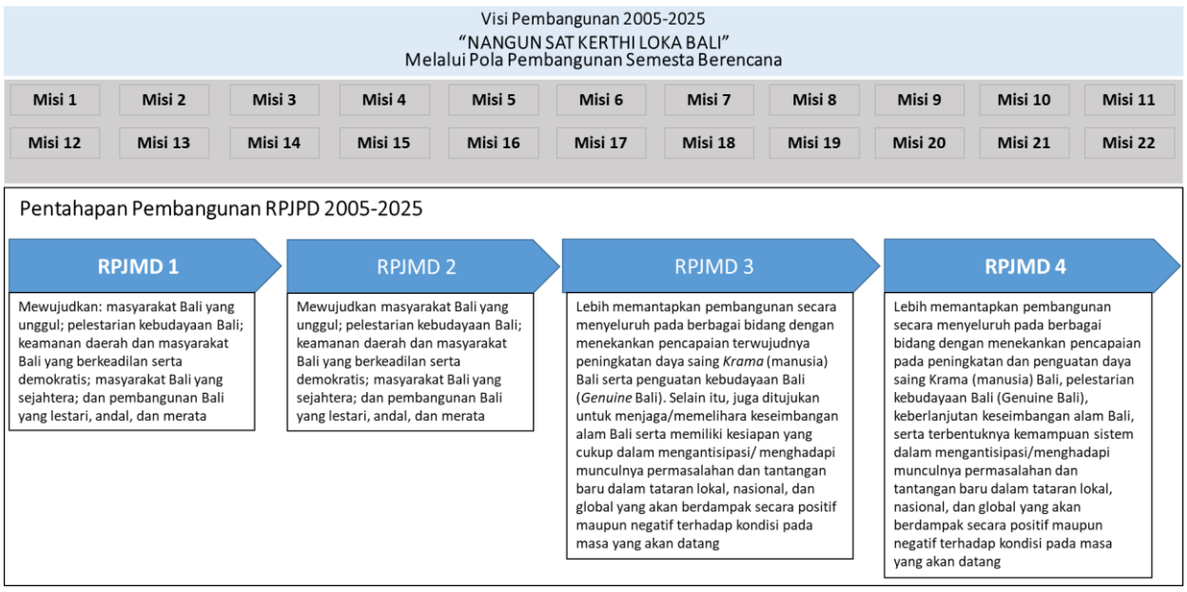

Gambar 1.2 Hubungan RPJMD Semesta Berencana dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali

1.3.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Ke-3 (2015-2020)

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025, maka diperlukan pentahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah (RPJMD) Semesta Berencana. Skala prioritas dalam setiap tahapnya berbeda-beda, namun tetap memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk tahapan ketiga dan keempat. Tahapan ketiga dan keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

1) Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif;
2) Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

1) Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan Renstra OPD, Renja OPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan–pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangka forum musyawarah pembangunan daerah secara berjenjang.
2) Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
3) Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5) Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindak-lanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator.
6) Meningkatkan efektivitas, efisiensi penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan terkait dengan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah ini akan menguraikan terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini akan menguraikan terkait dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang diprediksikan akan berkembang selama lima tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini akan memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi

2.1.1 Letak, Luas Wilayah, dan Kondisi Geografis

Provinsi Bali adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08003'40'' – 08050'48'' Lintang Selatan dan 114025'53'' – 115042'40'' Bujur Timur. Provinsi Bali memiliki beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km2 atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia, yang secara administratif dibagi menjadi delapan kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.493 desa adat/desa pakraman, 1.596 subak sawah, dan 1.130 subak abian dengan total 2.726 subak/subak swah pada tahun 2018. Luas dan proporsi luas wilayah masing-masing kabupaten dan kota tersebut disajikan dalam Tabel 2.1. Ibu kota provinsi Bali adalah Denpasar.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Dibandingkan Luas Provinsi Bali (%)
1	Jembrana	841,80	14,93
2	Tabanan	839,33	14,89
3	Badung	418,52	7,42
4	Gianyar	368,00	6,53
5	Klungkung	315,00	5,59
6	Bangli	520,81	9,24
7	Karangasem	839,54	14,89
8	Buleleng	1.365,88	24,23
9	Denpasar	127,78	2,27
Bali		**5.636,66**	**100,00**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.1.2 Topografi dan Geologi

Berdasarkan relief dan topografinya, di bagian-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur. Diantara bentangan pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yaitu Gunung Agung (3.142 m) dan Gunung Batur (1.717 m) yang ada di Provinsi Bali. Selain itu, terdapat gunung yang tidak berapi

antara lain Gunung Merbuk (1.356 m), Gunung Patas (1.414 m), dan Gunung Seraya (1.058 m), dan lain sebagainya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Provinsi Bali terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama. Bagian pertama, adalah Bali Utara yang memiliki dataran rendah yang sempit dan kurang landai Sementara bagian kedua, adalah Bali Selatan, yang memiliki dataran rendah yang luas dan landai . Kemiringan lahan yang ada di Provinsi Bali, yaitu lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol. Hanya sebagian kecil terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol secara keseluruhan meliputi 44,90 persen dari luas Provinsi Bali. Jenis tanah Regusol meliputi sekitar 39,93 persen dari luas Provinsi Bali. Jenis tanah Andasol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49 persen dari luas Provinsi Bali.

2.1.3 Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat buah danau sebagai sumber air utama yaitu Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Selain sumber air danau, potensi kesediaan air di Provinsi Bali dapat berasal dari mata air, air sungai dan air tanah. Jumlah mata air di Bali mencapai 570 buah dengan total debit air yang dikeluarkan mencapai 442,39 juta m3 per tahun. Mata air tersebut merupakan sumber air dari 315 buah sungai dengan panjang total mencapai 3.756 km.

Total tampungan air danau dan waduk di Provinsi Bali mencapai 1,036 juta m3 yang digunakan untuk keperluan irigasi dan konsumsi penduduk. Untuk air tanah, Provinsi Bali memiliki potensi yang mencapai 8.000 juta m^3.

2.1.4 Iklim dan Suhu

Provinsi Bali umumnya beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angina musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi dengan musim pancaroba di Provinsi Bali. Pada tahun 2016 rata-rata suhu berkisar antara $26,9^0$C – $28,4^0$C. Kelembaban udara berkisar antara 78 persen – 84 persen. Curah hujan tertinggi tahun 2016 yaitu 3.570 mm yang ada di Kabupaten Bangli.

2.1.5 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Bali didominasi oleh penggunaan lahan bukan sawah tahun 2017 yaitu sebesar 273.965 ha atau 48,60 persen dari total luas lahan yang ada di Bali. Total penggunaan lahan untuk lahan sawah sebesar 79.526 ha atau 14,11 persen dari total luas lahan yang ada di Bali. Luas lahan bukan pertanian seluas 210.175 ha atau 37,29 persen dari total luas lahan yang ada di Bali (Gambar 2.1).

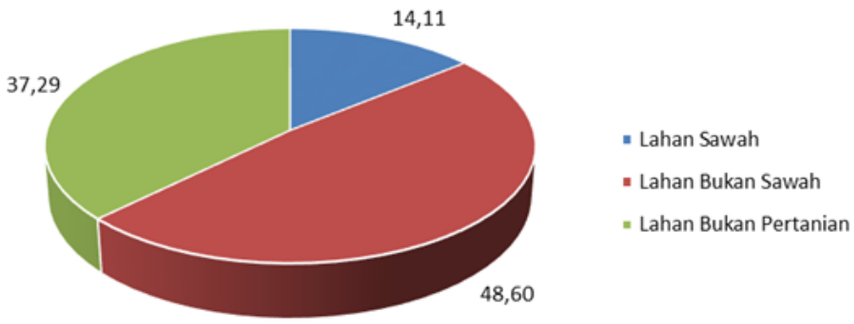

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.1 Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2017

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017 penggunaan lahan sawah terus berkurang. Tahun 2013 luas lahan sawah sebesar 81.360 hektar terus mengalami penurunan menjadi 79.526 hektar pada tahun 2017. Penggunaan lahan bukan sawah tahun 2013 sebesar 112.167 hektar terus mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 273.739 hektar. Namun, lahan bukan sawah kembali meningkat di tahun 2017 menjadi 273.965 hektar. Lahan bukan pertanian terus mengalami peningkatan dari 208.099 hektar pada tahun 2013 meningkat menjadi 210.175 hektar pada tahun 2017 (Gambar 2.2).

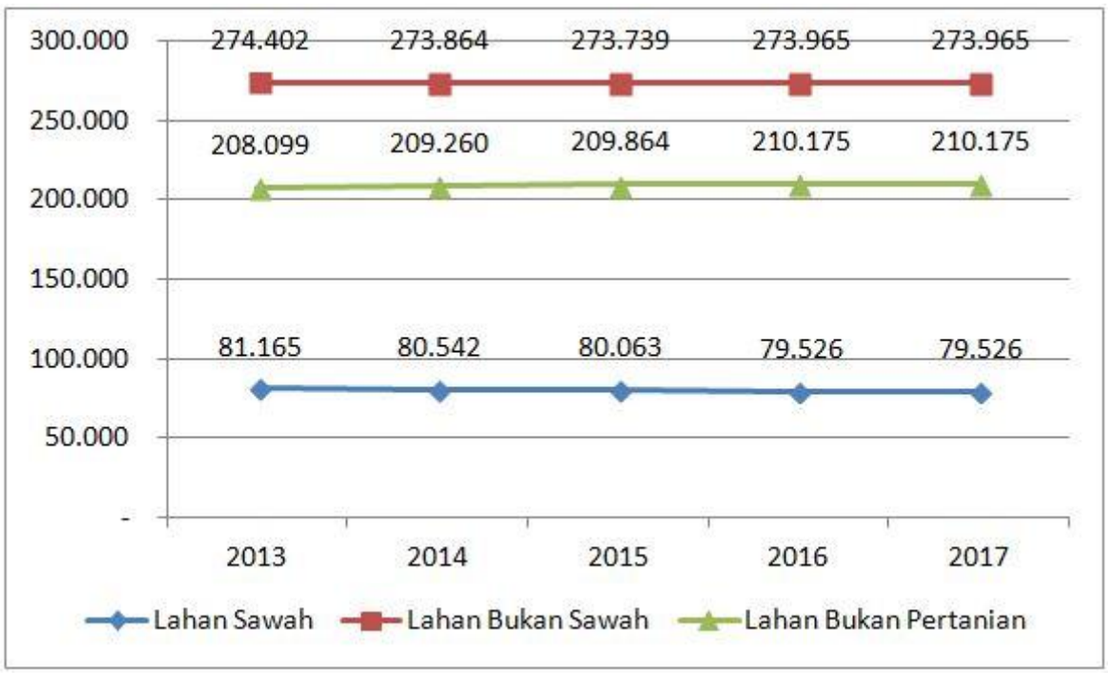

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali 2017

Gambar 2.2 Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (Hektar)

2.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Tahun 2013 jumlah penduduk Provinsi Bali sebesar 4,05 juta jiwa terus mengalami peningkatan mencapai 4,24 juta jiwa pada tahun 2017. Periode 2013 sampai 2015 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,17 persen kemudian menurun menjadi 1,10 persen pada tahun 2017.

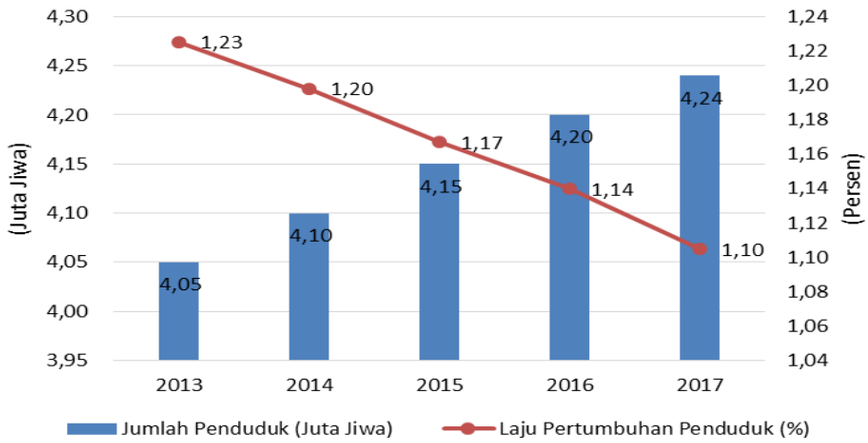

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Jumlah penduduk Bali pada tahun 2016 sebesar 4.217.442 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 2.115.221 jiwa atau 50,15% dan perempuan sebesar 2.102.221 jiwa atau 49,89% (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Bali laki-laki dan perempuan

KELOMPOK UMUR	LK	PR	JUMLAH
00-04	126.511	116.715	243.226
05-09	172.554	160.708	333.262
10-14	178.041	167.360	345.401
15-19	180.302	169.022	349.324
20-24	164.550	157.064	321.614
25-29	145.041	145.840	290.881
30-34	159.013	161.726	320.739
35-39	166.104	168.468	334.572
40-44	177.653	181.791	359.444
45-49	164.079	160.916	324.995
50-54	130.497	132.555	263.052
55-59	100.426	104.412	204.838
60-64	81.869	84.071	165.940
65-69	59.493	64.607	124.100
70-74	47.193	52.800	99.993
75+	61.895	74.166	136.061
TOTAL PROVINSI	**2.115.221**	**2.102.221**	**4.217.442**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Proporsi penduduk laki-laki di Bali masih lebih besar dari pada penduduk perempuan pada Tahun 2017. Jumlah penduduk laki-laki adalah 2.115.137 jiwa atau 50,10%, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2.106.307 jiwa atau 49,90% (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Bali Berdasarkan Kelompok Umur Laki-laki dan Perempuan

KELOMPOK UMUR	LK	PR	JUMLAH
00-04	125.516	115.968	241.484
05-09	173.581	161.734	335.315
10-14	178.784	168.387	347.171
15-19	182.439	171.235	353.674
20-24	166.034	156.223	322.257
25-29	143.708	144.567	288.275
30-34	147.296	151.574	298.870
35-39	165.301	169.726	335.027
40-44	169.800	174.951	344.751
45-49	174.902	171.251	346.153
50-54	133.258	134.320	267.578
55-59	104.098	107.359	211.457
60-64	81.221	84.497	165.718
65-69	63.256	67.020	130.276
70-74	41.860	49.977	91.837
75+	64.083	77.518	141.601
TOTAL PROVINSI	**2.115.137**	**2.106.307**	**4.221.444**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

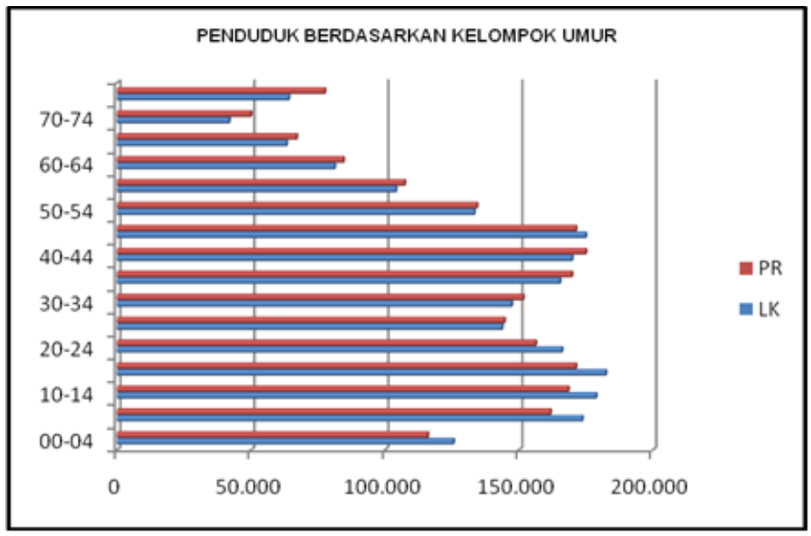

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.4 Komposisi Penduduk Provinsi Bali berdasarkan kelompok usia (Ribu Jiwa)

Jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2013-2017. Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2013 sebesar 846,2 ribu jiwa terus mengalami peningkatan hingga mencapai 914,3 ribu jiwa pada tahun 2017. Kabupaten Klungkung memiliki

jumlah penduduk terendah diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Jumlah penduduk tahun 2013 di Kabupaten Klungkung sebesar 173,9 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 sebesar 177,4 ribu jiwa.

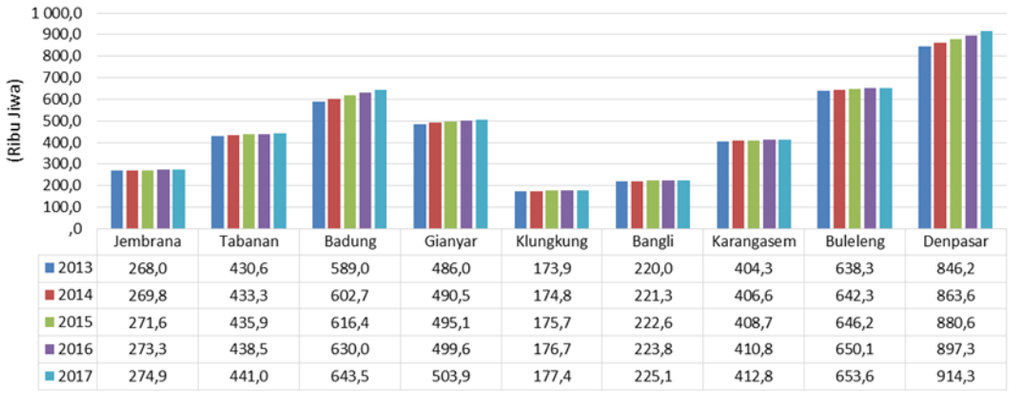

	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
2013	268,0	430,6	589,0	486,0	173,9	220,0	404,3	638,3	846,2
2014	269,8	433,3	602,7	490,5	174,8	221,3	406,6	642,3	863,6
2015	271,6	435,9	616,4	495,1	175,7	222,6	408,7	646,2	880,6
2016	273,3	438,5	630,0	499,6	176,7	223,8	410,8	650,1	897,3
2017	274,9	441,0	643,5	503,9	177,4	225,1	412,8	653,6	914,3

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Kepadatan penduduk di Provinsi Bali mencapai 753 jiwa/km^2 pada tahun 2017. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kota Denpasar, dimana selama kurun waktu 2013 sampai 2017 kepadatan penduduk Kota Denpasar terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7.155 jiwa/km^2. Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Jembrana yaitu 327 jiwa/km^2 pada tahun 2017 (Gambar 2.6).

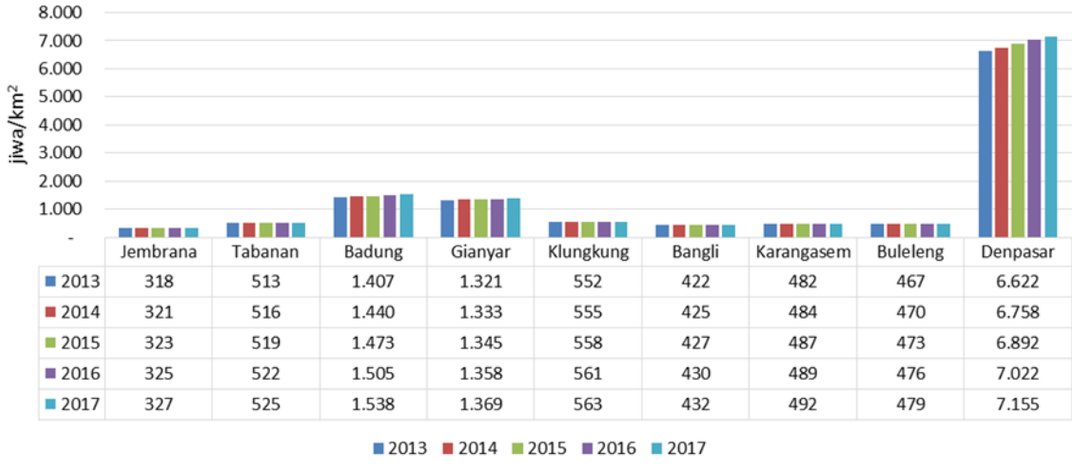

	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
2013	318	513	1.407	1.321	552	422	482	467	6.622
2014	321	516	1.440	1.333	555	425	484	470	6.758
2015	323	519	1.473	1.345	558	427	487	473	6.892
2016	325	522	1.505	1.358	561	430	489	476	7.022
2017	327	525	1.538	1.369	563	432	492	479	7.155

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.6 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (jiwa/km^2)

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017 penduduk usia kerja di Provinsi Bali terus meningkat hingga mencapai 3,23 juta jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan bukan angkatan kerja. Tahun 2013 jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 75,35 persen. Persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 74,91 persen pada tahun

2014. Tingkat partisipasi angkatan kerja kembali meningkat di tahun 2015 dan 2016 hingga mencapai 77,24 persen. Disisi lain tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama kurun waktu 2013 sampai 2017 mengalami tren yang fluktuatif, kondisi tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan yaitu dari 1,79 persen menjadi 1,99 persen. Sedangkan di tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami tren penurunan dari 1,89 persen di tahun 2016 turun menjadi 1,48 persen di tahun 2017 (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk Usia Kerja	3.073.019	3.092.880	3.141.285	3.189.018	3.235.563
2	Angkatan Kerja	2.315.379	2.316.758	2.372.015	2.463.039	2.434.450
a	Bekerja	2.273.897	2.272.632	2.324.805	2.416.555	2.398.307
b	Pengangguran Terbuka	41.482	44.126	47.210	46.484	36.143
3	Bukan Angkatan Kerja	757.640	776.122	769.270	725.979	801.113
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,93	74,91	75,51	77,24	75.24
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,79	1,90	1,99	1,89	1.48

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.3 Kerangka Pengembangan Wilayah

2.3.1 Kondisi Eksisting Kewilayahan

Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 563.666 Ha dan merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Pesatnya pengembangan pariwisata di Provinsi Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali terutama pada wilayah Bali selatan, baik yang berasal dari wilayah Bali maupun luar wilayah Bali. Perkembangan

pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung dan daya tampung seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi wilayah; meningkatnya instrusi air laut kedaratan, menurunnya debit air dan air permukaan, meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali. Hal tersebut menyebabkan kerentanan ekologi Bali semakin tinggi yang bermuara pada makin rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Bali.Jika keseimbangan ekosistem tersebut terganggu, maka keunggulan bersaing Bali dari sektor pariwisata akan menurun, dan Bali akan ditinggalkan.

Neraca lahan atau penatagunaan tanah di Provinsi Bali belum pernah dihitung, namun dapat diperkirakan bahwa tutupan lahan hutan, perkebunan, persawahan terus mengalami penurunan.Target kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) berdasarkan arahan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,belum bisa terpenuhi. Kebijakan minimal alih fungsi lahan pertanian sawah sebesar10% dari luas sawah yang ada sesuai arahan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, kecendrungan sulit terpenuhi, terlebih belum ditetapkannya sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai arahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sesuai Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali rencana pola ruang terdiri dari:

a. Kawasan lindung mencakup :
    - kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
    - kawasan perlindungan setempat;
    - kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
    - kawasan rawan bencana alam;
    - kawasan lindung geologi; dan
    - kawasan lindung lainnya.
b. Kawasan budidaya terdiri atas :
    - kawasan peruntukan hutan produksi;

- kawasan peruntukan hutan rakyat;
- kawasan peruntukan pertanian;
- kawasan peruntukan perikanan;
- kawasan peruntukan pariwisata;
- kawasan peruntukan industri;
- kawasan peruntukan permukiman;
- kawasan peruntukan pertambangan; dan/atau
- kawasan peruntukan lainnya.

Tabel 2.5 Kawasan Lindung Bali

KAWASAN LINDUNG	LUAS (Ha)	% BALI
Kawasan Hutang Lindung	97.598,15	73,64
Kawasan Resapan Air	25.824,00	4,58
Kawasan Cagar Alam	1.762,80	1,33
Taman Nasional Bali Barat (TNBB)	19.002,89	14,34
Taman Hutan Raya (TAHURA)	1.141,38	0,86
Taman Wisata Alam (TWA)	4.154,40	3,14
Sempadan Pantai	6.289,00	1,12
Sempadan Sungai	4.058,00	0,72
Sekitar Danau/Waduk	2.525,00	0,45
Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	14,73	0,00
Kawasan Rawan Bencana Gn. Berapi	11.795,00	2,09
Waduk	511,80	0,09
JUMLAH	175.557,18	31,15

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.6 Kawasan Budidaya di Provinsi Bali

No	KAWASAN LINDUNG	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	8.626,00	1,53
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	9.959,00	1,77
3	Kawasan Peruntukan Pertanian	298.214,00	52,91
	- Budidaya Tanaman Pangan	76.337,10	13,54
	- Budidaya Holtikultura	108.510,66	19,25
	- Budidaya Perkebunan	113.366,41	20,11
	- Budidaya Peternakan	tdk dpt dihitung	
4	Kawasan Peruntukan Perikanan	tdk dpt dihitung	
5	Kawasan Peruntukan Pariwisata		
	- Kawasan Efektif Pariwisata	12.626,38	2,24
6	Kawasan Peruntukan Industri		
	- Kaw. Peruntukan Aneka Industri	2.387,00	0,42
	- Sentra Industri Kecil	tdk dpt dihitung	
7	Kawasan Pemukiman	53.192,97	9,44
8	Kawasan Pertambangan	3.082,92	0,55
9	Kawasan Pertanahan dan Keamanan	tdk dpt dihitung	
JUMLAH		**388.088,82**	**68,85**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Komposisi rencana pola ruang secara umum adalah :

a. Kawasan Lindung : 175.577,18 ha atau 31,15 persen.
b. Kawasan Budidaya : 388.088,82 ha atau 68,85 persen
c. Kawasan Hutan Penetapan : 130.685,65 atau 23,18 persen
d. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung: 288.943,59 Ha atau 51,26 persen
e. Kawasan dengan Tutupan Lahan yang Baik: 261.250,06 Ha atau 46,34 persen dikurangi jumlah Hutan Penetapan dalam Kondisi Kritis 85.558,59 ha atau 15,17 persen, maka Kawasan dengan Tutupan Lahan yang Baik sejumlah 175.691,47 ha atau 31,17 persen.

Komponen kawasan budidaya yang banyak menghabiskan tutupan lahan adalah kawasan permukiman, kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan peruntukan perindustrian, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan sarana pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, rekreasi, peribadatan, sarana transportasi dan lainnya).Komposisi kawasan permukiman adalah 53.192,97 ha atau 9,44 persen dari luas wilayah meliputi permukiman perkotan dan permukiman perdesaan. Komposisi peruntukan kawasan pariwisata adalah 12.626,38 ha atau 2,24 persen dari luas wilayah, dan peruntukan ini adalah rancangan untuk kawasan efektif pariwisata. Peruntukan untuk kawasan industri sebanyak 2.387 ha atau 0,42 persen.

Arahan peruntukan untuk kawasan permukiman, kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan peruntukan perindustrian merupakan proyeksi pengembangan rencana pola ruang terbangun di Provinsi Bali yang pada gilirannya akan terkait dengan pemusatan intensitas aktivitas. Pemusatan intensitas aktivitas pada umumnya terdiri dari pemusatan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari kawasan lainnya yang pada gilirannya juga membutuhkan lahan dan sumberdaya air minum yang lebih tinggi pula. Peraturan zonasi kawasan merupakan perangkat lanjut untuk mengendalikan arahan peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, tata masa bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana minimal yang harus dipenuhi di setiap kawasan pengembangan.

Di sisi lain, kawasan budidaya non terbangun seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai pendukung ketahanan pangan, sosial budaya kawasan serta pelestarian lingkungan juga membutuhkan lahan yang tidak sedikit dan dialokasikan sebanyak 298.214,00 ha atau 52,91 persen dari luas wilayah Provinsi Bali. Namun demikian keberlanjutan kegiatan budidaya pertanian juga sangat tergantung pada ketahanan terhadap alih fungsi dan ketersediaan air baku untuk pertanian. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas kesehimbangan proporsi rencana pola ruang yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya harus tetap

dipertahankan untuk mewujudkan daya dukung lahan secara oftimal.Berkuranganya tutupan lahan hutan, perkebunan dan lainnya juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya air.

2.3.2 Ketimpangan Antar Wilayah

Program pembangunan yang dilakukan selama ini telah menimbulkan ketimpangan pembangunan antara Bali bagian selatan dan Bali bagian utara, timur dan barat. Untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah di Provinsi Bali beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dikembangkan dan dibangun antara lain:

1. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, mencakup:
   a. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan-kawasan Perkotaan Seririt sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kawasan-kawasan Perkotaan Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sawan, Kubutambahan, Tejakula dan Kintamani yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   b. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Amlapura dan Kawasan Perkotaan Bangli yang berfungsi sebagai PKL serta Kawasan-kawasan Perkotaan Kubu, Selat, Sidemen, Bebandem, Rendang, Manggis, Dawan, Tembuku, Banjarangkan, Abang, Susut, Sampalan, yang berfungsi sebagai PPK.
   c. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat pelayanan inti didukung Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan dan Jimbaran sebagai pusat pelayanan sub sistem metropolitan dan Kawasan Perkotaan Mengwi, Kerobokan, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh, dan Ubud sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Sarbagita, serta Kawasan Perkotaan di luar Kawasan Metropolitan Sarbagita terdiri atas Kawasan Perkotaan Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Petang, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, yang berfungsi sebagai PPK.
   d. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Negara yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh

wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Mendoyo, Melaya, Gilimanuk dan Pekutatan yang berfungsi sebagai PPK.

2. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara mencakup :
   a. Rencana pengembangan 11 (sebelas) jalan bebas hambatan antar kota dan dalam kota mencakup: Kuta-Tanah Lot-Soka; Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama; Tohpati-Kusamba-Padangbai; Pekutatan-Soka; Negara-Pekutatan; Gilimanuk-Negara; dan Mengwitani-Singaraja; Serangan-Tanjung Benoa; Serangan-Tohpati; Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai; dan Kuta-Denpasar-Tohpati.
   b. Rencana pengembangan pelabuhan laut : Pelabuhan Benoa, sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan; Pelabuhan Celukan Bawang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang; dan Pelabuhan Tanah Ampo, sebagai pelabuhan untuk pelayanan kapal *cruise* dan *yatch*.
   c. Rencana pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai bandar udara umum setelah melalui kajian.
   d. Rencana pengembangan/peningkatan kapasitas dan perlindungan sumber daya air secara berkelanjutan melalui pembangunan bendungan/waduk dan embung.
   e. Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan pengembangan SPAM pada kawasan yang mengalami kritis air serta pengelolaan sistem layanan regional air minum.
   f. Rencana pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dengan layanan regional.
   g. Rencana pengelolaan persampahan khususnya di TPA Regional dengan teknologi waste to energy yang ramah lingkungan.
3. Pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah mencakup:
   a. Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah.
   b. pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan investasi, diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota.
   c. Pengembangan kawasan budidaya tanaman pertanian yang berupa pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah) dan tanaman pakan, diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dan menekan alih fungsi lahan yang ada;

d. Pengembangan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
e. Pengembangan investasi pariwisata diprioritaskan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat.
f. Pengembangan sektor industri diarahkan pada pengembangan sentra-sentra, industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
g. Pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis: pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* yang ditunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menekan urbanisasi.
h. Mendorong pengembangan kawasan andalan di Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, aneka industri, pertanian, dan perikanan;
i. Mendorong pengembangan kawasan andalan di Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, industri kecil, pertanian dan perikanan;
j. Mendorong pengembangan kawasan andalan Laut Bali dan sekitarnya (Bali Barat) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, perikanan dan pertambangan lepas pantai; dan
k. Mendorong pengembangan kawasan andalan Bali Timur sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.

4. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan daya tarik wisata khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa peraturan daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

2.3.3 Ketimpangan Pertumbuhan Penduduk

Sensus penduduk dilaksanakan tiap 10 tahun. Untuk Provinsi Bali terakhir dilaksanakan pada tahun 2010 sehingga sensus penduduk berikutnya akan

dilaksanakan tahun 2020, analisis permasalahan kependudukan dalam hal ini mempergunakan acuan Sensus Penduduk 2010. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Bali berjumlah 3.890.757 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada Sensus Penduduk 2000 adalah 3.146.999. Dengan demikian dalam 10 tahun jumlah penduduk Bali bertambah sebanyak 743.758 jiwa atau hampir sama dengan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2010 yang berjumlah 788.589 jiwa. Secara rata-rata pertumbuhan penduduk Bali dalam periode tahun 2000-2010 adalah 2,15% per tahun dan termasuk rangking 13 tertinggi di Indonesia dan jauh diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional sebesar 1,49% (Gambar 2.7). Bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Bali sejak tahun 1961, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 adalah paling tinggi.

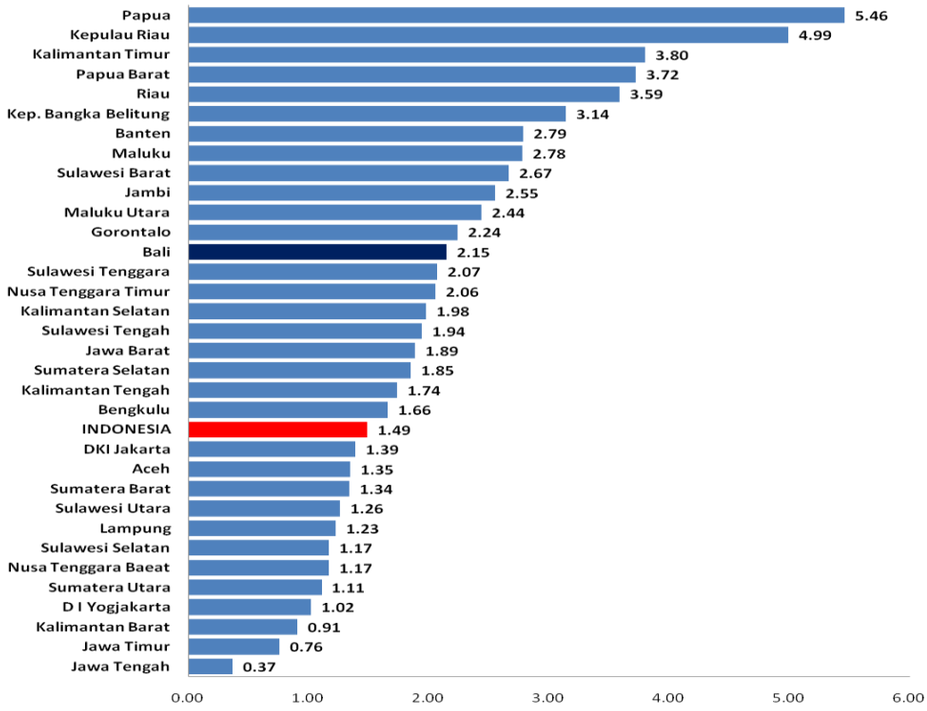

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.7 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk per Tahun per Provinsi di Indonesia (Sensus Penduduk 2000 – 2010)

Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang didukung oleh kualitas SDM akan memberikan dampak positif bagi Bali dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan, baik dari aspek ekonomi, penyediaan lapangan kerja, sarana prasarana (sekolah, kesehatan, jalan, dll), perumahan, alih fungsi lahan, air bersih, kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

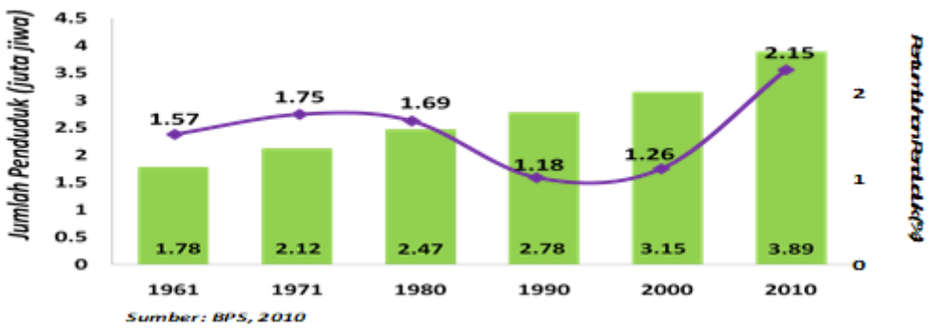

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Bali dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk per Tahun Sejak Tahun 1961 – 2010

Berdasarkan uraian per kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Gambar 2.9, laju pertumbuhan penduduk (2000-2010) kondisinya terlihat sangat timpang, ditunjukkan di Kabupaten Badung (4,62%) dan Kota Denpasar (4,01%) kondisinya sangat tinggi sedangkan di kabupaten lain kondisinya rendah pada angka kisaran 1-1,5% per tahun. Bila laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Bali masih tetap sama dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010, maka diperkirakan jumlah penduduk Bali di tahun 2020 akan mencapai 4.727.270 jiwa, dimana penduduk Kota Denpasar diprediksi akan melampaui dari target yang ditentukan mencapai 1 juta jiwa (Tabel 2.5). Ketimpangan pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota juga amat lebar, disebabkan karena terpusatnya sentra-sentra ekonomi di Bali bagian Selatan.

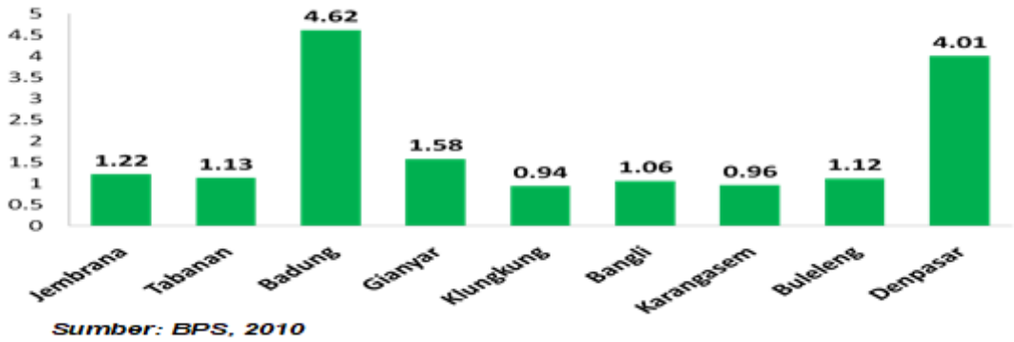

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.9 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk per Tahun per Kabupaten/Kota (Sensus Penduduk 2000 – 2010)

Tabel 2.7 Perkiraan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020, Provinsi Bali

Kab/kota	Pertumbuhan penduduk th 1990-2000	Pertumbuhan penduduk th 2000-2010	Jumlah penduduk tahun 2010	Perkiraan jumlah penduduk tahun 2020 bila pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 sama dengan th 2000-2010
Jembrana	0,64	1,22	261.638	293.558
Tabanan	0,73	1,14	420.913	468.897
Badung	2,33	4,64	543.332	795.438
Denpasar	3,20	4,02	788.589	1.105.602
Gianyar	1,56	1,80	469.777	554.337
Klungkung	0,31	0,95	170.543	186.745
Bangli	0,94	1,07	215.353	238.396
Karangasem	0,49	0,96	396.487	434.550
Buleleng	0,34	1,13	624.125	694.651
Prov Bali	**1,26**	**2,15**	**3.890.757**	**4.727.270**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Piramida penduduk Bali hasil Sensus Penduduk 2010 adalah seperti Gambar 2.10, dimana penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Dari segi ekonomi, kondisi yang perlu dicermati adalah komposisi penduduk menurut umur yaitu penduduk umur 0-14, 15-64 dan 65 tahun keatas. Penduduk umur 0-14 dan umur 65 tahun keatas secara ekonomi biasanya tergantung pada penduduk umur 15-64 tahun. Pada Gambar 2.11 terlihat bahwa Kota Denpasar mempunyai rasio ketergantungan paling rendah yaitu 39,31, yang artinya setiap 100 penduduk produktif di Kota Denpasar menanggung sekitar 40 orang penduduk non produktif. Kondisi ini jauh berbeda dengan Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem yang mempunyai rasio ketergantungan relatif tinggi. Kondisi ini adalah akibat dari arus urbanisasi dimana penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem banyak yang mencari nafkah di Kota Denpasar sedangkan yang tinggal di daerah asalnya kebanyakan penduduk usia anak-anak (0-14) dan penduduk usia tua (65 tahun keatas).

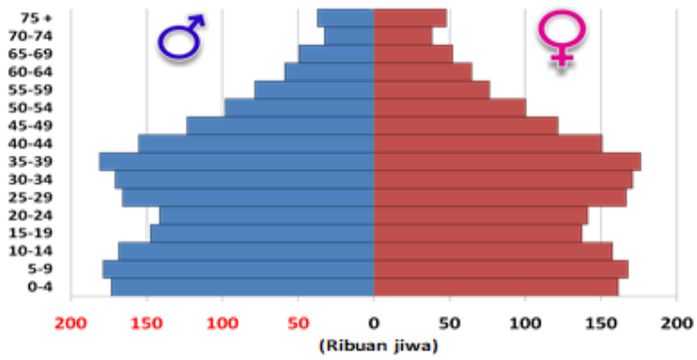

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.10 Piramida Penduduk Bali (Sensus Penduduk 2010)

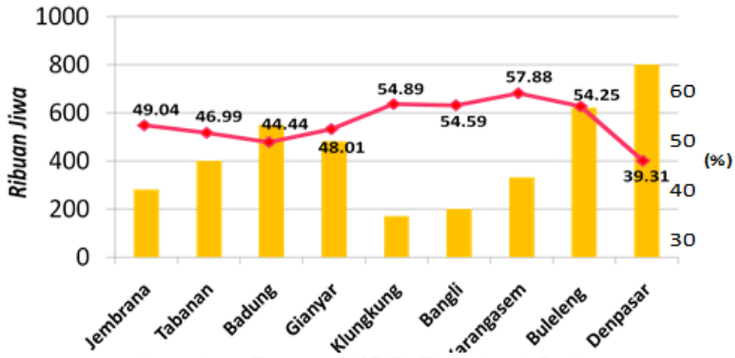

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.11 Jumlah Penduduk dan Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota Sensus Penduduk Tahun 2010

Capaian *Fertility Rate* (TFR) atau Tingkat Kelahiran Total nasional, pada tahun 1991 mencapai 3,0 (SDKI 1991), kemudian menurun menjadi 2,9 pada tahun 1994 (SDKI 1994), menjadi 2,8 pada tahun 1997 (SDKI 1997), menjadi 2,6 pada tahun 2002 (SDKI 2002) dan 2,6 pada tahun 2012 (SDKI 2012). Berdasarkan data pada gambar 2.12 terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir TFR secara nasional tetap pada tingkat 2,6 (SDKI 2012). Dibandingkan capaian Provinsi Bali pada angka 2,22 (1991), 1,89 (1997), 2,10 (2002) dan 2,30 (2012). Dari data ini terlihat bahwa dalam 10 tahun TFR (tingkat kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Bali dalam 10 tahun dari tahun 1990-2000 adalah 1,26% sedangkan pada tahun 2000-2010 adalah 2,15%. Selain karena tingginya migrasi masuk, tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali juga disebabkan karena meningkatnya tingkat kelahiran (TFR). Meningkatnya tingkat kelahiran (TFR) disebabkan karena menurunnya pemakai kontrasepsi (peserta KB), semakin berkurangnya pemakai kontrasepsi jangka panjang dan meningkatnya tingkat kelahiran pada wanita usia remaja.

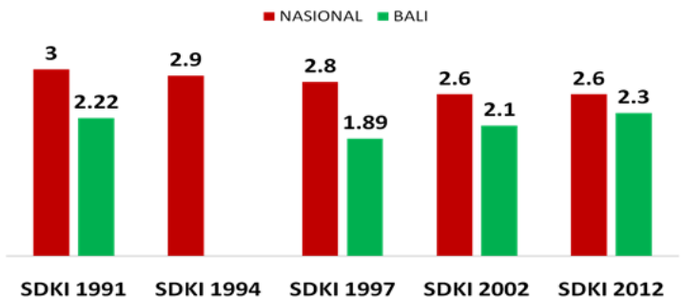

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.12 TFR Secara Nasional dan Bali, 1991-2012

Sejalan dengan menetapnya TFR dalam 10 tahun (2002-2012), proporsi pasangan usia subur (PUS) yang sedang memakai kontrasepsi modern pada saat survei *(current contraceptive use)* di Bali cendrung menurun. Pada SDKI tahun 2007 (Gambar 2.12), pasangan usia subur (PUS) yang sedang memakai kontrasepsi pada saat survei sebesar 67,2%, pada tahun 2010 menurun menjadi 64,3% (Riskesdas 2010) dan pada tahun 2012 menurun kembali menjadi 59,6% (SDKI 2012).

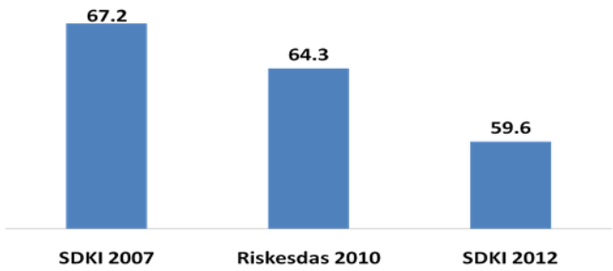

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.13 Persentase Wanita Usia Subur yang Sedang Mempergunakan Kontrasepsi Modern Tahun 2007, 2010 dan 2012, Provinsi Bali

2.3.4 Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Secara keseluruhan kinerja perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2017 tercatat mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Bali mengalami peningkatan dari sebesar 6,03% pada tahun 2015, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.57%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,02%. Kondisi tersebut dipengaruhi dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan didorong oleh peningkatan kinerja ekspor luar negeri dan PMTB. Sementara dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha utama Provinsi Bali, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan dan minum.

Dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi tertinggi dijumpai di Kabupaten Badung sebesar 6,11% diikuti Kota Denpasar sebesar 6,08%. Sedangkan pertumbuhan terendah terdapat di Kabupaten Karangasem dan Jembrana masing-masing sebesar 5,08% dan 5,31%. Rincian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota din Provinsi Bali, ditunjukkan dalam gambar dibawah.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebanyak 180.13 ribu orang (4,25%), menurun dari tahun 2015 sebesar 4,74%; jauh berada dibawah angka nasional sebesar 10,70%. Adapun garis kemiskinan yang menjadi dasar penentuan kemiskinan sebesar 346.398 rupiah. Penurunan jumlah penduduk miskin di Bali merupakan salah satu cerminan keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan dan mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan.

Angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 6,55%, diikuti oleh Kabupaten Klungkung, Buleleng, Jembrana dan Bangli dengan angka berturut-turut sebesar 6,29%; 5,74%; 5,38% dan 5,23%. Sedangkan angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar masing-masing sebesar 2,06% dan 2,27%. Kondisi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017 ditunjukkan seperti gambar berikut.

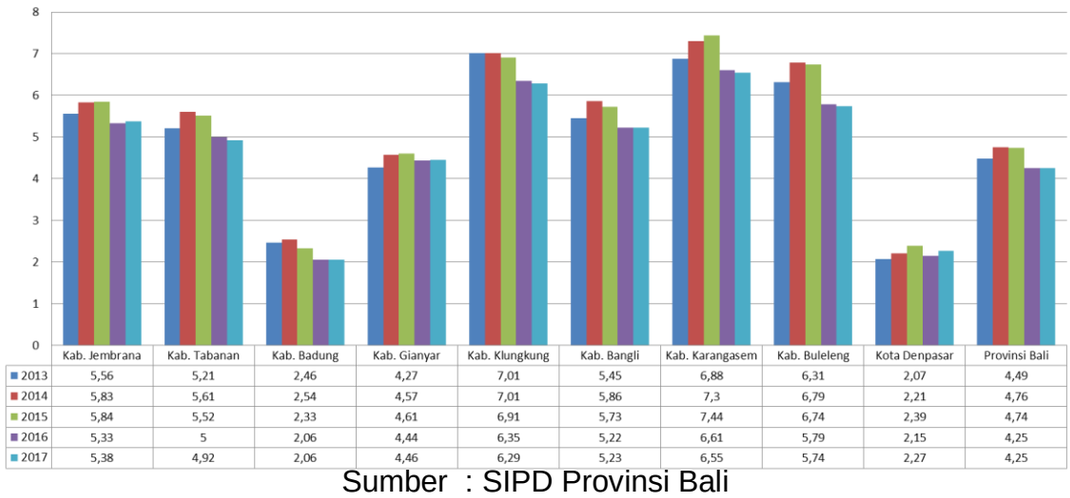

	Kab. Jembrana	Kab. Tabanan	Kab. Badung	Kab. Gianyar	Kab. Klungkung	Kab. Bangli	Kab. Karangasem	Kab. Buleleng	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2013	5,56	5,21	2,46	4,27	7,01	5,45	6,88	6,31	2,07	4,49
2014	5,83	5,61	2,54	4,57	7,01	5,86	7,3	6,79	2,21	4,76
2015	5,84	5,52	2,33	4,61	6,91	5,73	7,44	6,74	2,39	4,74
2016	5,33	5	2,06	4,44	6,35	5,22	6,61	5,79	2,15	4,25
2017	5,38	4,92	2,06	4,46	6,29	5,23	6,55	5,74	2,27	4,25

Sumber : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.15 Kondisi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017

2.3.5 Daya Dukung, Daya Tampung, dan Potensi Pengembangan

Kajian yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara untuk menghitung daya dukung air menunjukkan estimasi kebutuhan air sektor pertanian tahun 2009 untuk irigasi diperkirakan mencapai 1.592,24 juta m^3, sawah sekitar 2.080,60 juta m^3/tahun, kehutanan sebesar 1.031,20 juta m^3/tahun; kebutuhan air domestik 107,65 juta m^3/tahun; kegiatan industri sekitar 22,08 juta m^3/tahun; kegiatan hotel dan restoran sekitar 16,58 juta m3/tahun; dan kebutuhan fasilitas pemerintahan dan umum sekitar 25,12 juta m^3/tahun. Kebutuhan air di Provinsi Bali berdasarkan kebutuhan setiap sektor adalah sekitar 4.239,71 juta m^3/tahun (Unud, 2009). Kebutuhan air domestik di atas meningkat dua kali lipat tahun 2014 menjadi sebesar 284.674.815 m^3/tahun.

Berdasarkan hasil Perhitungan neraca air yang dilakukan Departemen Kimpraswil tahun 2003 menunjukkan bahwa Pulau Jawa dan Bali telah mengalami defisit air sebesar 38,4 milyar m^3 dan diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2020 sebesar 44,1 milyar m3, apabila tidak dilakukan pengelolaan sumberdaya air yang tepat. Mindset sumberdaya air merupakan benda sosial (public good) yang menyebabkan perilaku boros air masyarakat harus diubah. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan hutan, ketidakakuratan penataanruang dan/ atau pelanggaran tata ruang, over eksploitasi air tanah, dan perubahan iklim merupakan isu penting di Provinsi Bali yang menuntut penanganan terpadu antarsektor, karena mempengaruhi stok atau kontinyuitas sumberdaya air. Begitu juga pencemaran air permukaan karena mempengaruhi kelayakan pakainya.

Kabupaten yang memiliki nilai surplus air di Provinsi Bali hanya Kabupaten Jembrana pada semua tahun dan asumsi yang digunakan, sedangkan Kabupaten Tabanan secara normal memiliki defisit air, akan tetapi memiliki air yang berlebih saat kejadian La Nina atau saat air tanah diinput sebagai salah satu sumber air saat perhitungan. Sedangkan wilayah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng mengalami surplus air saat kejadian La Nina dan ketersediaan air dari CAT dimasukkan dalam perhitungan. Sedangkan pada Kabupaten/kota yang lain mengalami kondisi defisit air setiap tahun, baik pada kondisi normal ataupun saat asumsi-asumsi fenomena iklim dan ketersediaan air tanah dimasukkan dalam proses perhitungan. Kota Denpasar adalah yang paling tinggi defisitnya dan diikuti oleh Kabupaten Badung. Secara lengkap berikut Tabel yang menyajikan kebutuhan air di Provinsi Bali dari Tahun 2013 sampai 2016, dan Tabel mengenai ketersediaan air di Provinsi Bali dan daya dukung air Provinsi Bali.

Tabel 2.8 Kebutuhan air di Provinsi Bali dari Tahun 2013 sampai 2016

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Air Per Tahun (miliar m^3)			
	2013	2014	2015	2016
Kab. Jembrana	0,43	0,43	0,44	0,44
Kab. Tabanan	0,69	0,69	0,70	0,71
Kab. Badung	0,94	0,96	1,01	1,04
Kab. Gianyar	0,78	0,78	0,80	0,81
Kab. Klungkung	0,28	0,28	0,28	0,28
Kab. Bangli	0,35	0,35	0,36	0,36
Kab. Karangasem	0,65	0,65	0,66	0,66
Kab. Buleleng	1,02	1,03	1,04	1,05
Kota Denpasar	1,35	1,38	1,44	1,48
Provinsi Bali	6,49	6,57	6,72	6,84

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.9 Jumlah Ketersediaan air di Provinsi Bali berdasarkan Asumsi Adanya Fenomena Iklim Dan Ketersediaan Air Tanah (CAT)

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Air per Tahun (miliar m^3)					
	Berdasarkan Air Permukaan	Berdasarkan Air Permukaan Saat El Nino	Berdasarkan Air Permukaan Saat La Nina	Berdasarkan Air Permukaan dan Air dari CAT	Berdasarkan Air Permukaan dan Air dari CAT Saat El Nino	Berdasarkan Air Permukaan dan Air dari CAT Saat La Nina
Kab. Jembrana	0,71	0,50	1,08	0,79	0,57	1,15
Kab. Tabanan	0,68	0,47	1,03	0,99	0,78	1,34
Kab. Badung	0,19	0,13	0,28	0,35	0,29	0,45
Kab. Gianyar	0,35	0,24	0,53	0,51	0,40	0,69
Kab. Klungkung	0,12	0,09	0,19	0,24	0,20	0,30
Kab. Bangli	0,15	0,11	0,23	0,35	0,30	0,43
Kab. Karangasem	0,21	0,14	0,31	0,44	0,38	0,55
Kab. Buleleng	0,54	0,38	0,82	0,83	0,66	1,11
Kota Denpasar	0,12	0,08	0,18	0,17	0,13	0,23
Provinsi Bali	3,07	2,13	4,64	4,65	3,72	6,23

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.10 Status dan Daya Dukung Air Provinsi Bali dengan Asumsi Terkait

Kabupaten/Kota	Daya Dukung Air							
	2013	2014	2015 (El Nino)	2016 (La Nina)	2013 dan Ditambah Air dari CAT	2014 dan Ditambah Air dari CAT	2015 (El Nino) dan Ditambah Air dari CAT	2016 (La Nina) dan Ditambah Air dari CAT
Kab. Jembrana	1,66	1,65	1,13	2,44	1,84	1,83	1,31	2,62
Kab. Tabanan	0,99	0,98	0,67	1,46	1,43	1,42	1,11	1,89
Kab. Badung	0,20	0,19	0,13	0,27	0,37	0,36	0,29	0,43
Kab. Gianyar	0,45	0,44	0,30	0,65	0,65	0,65	0,50	0,85
Kab. Klungkung	0,44	0,44	0,30	0,65	0,85	0,85	0,71	1,05
Kab. Bangli	0,43	0,43	0,30	0,64	0,99	0,98	0,84	1,18
Kab. Karangasem	0,32	0,32	0,22	0,47	0,68	0,68	0,57	0,83
Kab. Buleleng	0,53	0,53	0,36	0,78	0,81	0,81	0,64	1,05
Kota Denpasar	0,09	0,08	0,06	0,12	0,12	0,12	0,09	0,15
Provinsi Bali	0,47	0,47	0,32	0,68	0,72	0,71	0,55	0,91

Ket: Kolom warna biru mengidikasikan status daya dukung air surplus

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pembangunan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan aspek lingkungan akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, nilai budaya, dan daya tarik Bali itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada implementasi prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang bersifat holistik, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan mengintegrasikannya dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi.

Mengacu pada arahan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali untuk mendukung ketersediaan air secara berkelanjutan, arahan peraturan zonasi kawasan resapan air mencakup: pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; danpenerapan prinsip ’tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai’ atau disebut zero delta Q policy’ adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungaiterhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya. Sehingga dengan penerapan sonasi tersebut akan bisa menabung arir pada saat musim hujan dan memanen air pada saat musim kemarau.

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 19, UU No. 32 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sangat penting sekali di dalam menjaga kelestarian upaya pelindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

2.3.6 Kewenangan

Mengacu ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya diuraikan dalam ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.Lebih lanjut dalam Pasal 13 disebutkan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau; urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah provinsi yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan,kelautan, energi dan sumber daya mineral.

a. Kehutanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah pengelolaan taman hutan raya yang sebarannya mencakup lebih dari 1 wilayah kabupaten/kota.

b. Energi dan sumber daya mineral

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi: Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi; Penerbitan izin pengeboran,

izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi; Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi; Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu)Daerah provinsi danwilayah laut sampai dengan 12 mil; Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; Penerbitan izin pertambangan rakyatuntuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama; Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

c. Kelautan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan sumber daya kelautan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi: pengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayah provinsi meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;pengaturan administratif;pengaturan tata ruang;ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.Pengelolaan sumber daya alam di laut kewenangan provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.Pengelolaan sumberdaya alam laut dan pulau-pulau kecil harus disusu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) oleh pemerintah provinsi.

d. Tata Ruang

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Komplementer dimaksudkan bahwa penataanruang wilayah nasional, penataan ruang

wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Sesuai ketentuan Pasal 7 disebutkan negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Sedangkan kewenangan dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi: perencanaan tata ruang wilayah provinsi; pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi pemerintah provinsi melaksanakan: penetapan kawasan strategis provinsi; perencanaan tata ruang kawasan strategisprovinsi; pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Dalam pelaksanaan wewenang penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah daerah provinsi:

- Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; danpetunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
- Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029, sebagai pengendalian pemanfaatan ruang serta memastikan bahwa pemanfaatan ruang sudah sesuai rencana tata ruang, memastikan pembangunan dapat dilaksanakan berdasarkan asas pembangunan berkerlanjutan. Sebagai turunan dari rencana tata ruang wilayah provinsi beberapa dokumen rencana tata ruang kawasan strategis provinsi sudah tersusun namun belum ada yang sampai ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun arahan peraturan zonasi sistem provinsi sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, sebagai penjabaran

2.3.7 Kesesuaian Tata Ruang

Kualitas kesesuaian Rencana Tata Ruang harus didukung oleh kelengkapan data, informasi dan proses penyusunannya serta peta dasar, peta tematik dan peta rencana yang memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta. Untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antara Bali Utara, Timur dan Barat arahan pembangunan sesuai rencana tata ruang antara lain: mendorong pembangunan jalan bebas hambatan menuju kearah barat dan tengah dari Denpasar berupa jalan bebas hambatan antar kota yaitu: ruas Gilimanuk–Negara; Negara–Pekutatan; Pekutatan–Soka; Kuta–Tanah Lot–Soka; Mengwitani–Singaraja; dan Canggu–Beringkit–Batuan–Purnama. Serta mempercepat proses penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Baru di Bali Utara di Kecamatan Kubu Tambahan.

Meningkatkan fungsi jalan kolektor primer ruas Cekik–Seririt–Singaraja–Kubutambahan–Amed–Amlapura–Angantelu untuk menumbuhkan kawasan di bali utara barat dan timur. Mendorong pertumbuhan kawasan industri Celukang bawang dan pelabuhan celukan Celukang bawang sebagai pelabuhan utama berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang. sedangkan pada kawasan timur selain meningkat fungsi penyeberangan Padangbai-lombok juga memaksimalkan Pelabuhan Tanah Ampo, sebagai pelabuhan untuk pelayanan kapal cruise dan yatch.Disamping rencana pembangunan transportasi darat tersebut juga alternatif mode transportasi yang akan direncanakan adalah perkeretaapian yang melingkari pulau Bali sebagai rencana Sistranas dan Sistrawil.

2.3.8 Arah Pengembangan Wilayah

Isu utama pengembangan wilayah saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Bali bagian Selatan dengan Bali Utara, Timur dan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah provinsi difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan (strategic development regions) dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertubuhan seperti PKN, PKLW dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi.Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan.Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut kebijakan pembangunan sektor transportasi khususnya teransportasi darat harus dilakukan secara merata yang menembus semua kawasan/wilayah. Sesuai arahan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, beberapa pembangunan jalan bebas hambatan dan peningkatan jalan arteri primer dan kolektor primer 1 yang menghubungkan antar kota kabupaten dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai ibu kota provinsi dan outlet antar provinsi dan internasional. Sistem transportasi darat tersebutakandapat membuka pusat-pusat pertumbuhan dan sentra-sentra produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk pertanian pada kawasan yang dilintasinya.

Rencana pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah antara lain:pembangunan bandara

Baru Bali Utara, Pembangunan Kawasan Industri Pengambengan dan Kawasan Industri Celukan Bawang, pembangunan kawasan pariwisatadan pelabuhan celukan bawang dalam rangka mendorong pusat-pusat pertumbuhan. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan di Provinsi Bali khususnya Jalan Bebas Hambatan Antar Kota, mencakup: Gilimanuk–Negara; Negara–Pekutatan; Pekutatan–Soka(ruas bagian barat); Mengwitani–Singaraja (ruas tengah-utara); Kuta–Tanah Lot–Soka; dan Canggu–Beringkit–Batuan–Purnama (ruas selatan-timur). Peningkatan jalan kolektor primer, mencakup ruas jalan: Cekik–Seririt–Singaraja–Kubutambahan–Amed–Amlapura– Angantelu (ruas utara-ampenan); dan Mengwitani–Singaraja; Soka–Seririt (ruas tengah);

Keterpaduan pembangunan antarsektor juga sangat penting untuk memperkecil ketimpangan melalui perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, keterpaduan perencanaan daratan, pesisir dan lautan dapat mendorong kinerja pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah satu fokus pemerintahan kedepan.

2.3.9 Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tema (Pariwisata, Pertanian, Ekonomi Produktif, UMKM)

a. Kepariwisataan

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Bali. trend pariwisata dunia saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek Keamanan dan kenyamanan. Disamping itu, Bali juga menghadapi berbagai tantangan penting antara lain:

- Pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- Rendahnya kapasitas untuk mempertahankan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, industri, pariwisata dan perumahan;
- pencemaran lingkungan; dan
- kemacetan yang semakin buruk.

Sebagai Sektor ekonomi utama di Bali, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut

untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 dimana Pembangunan kepariwisataan merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi antara lain :

- Pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- Pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
- Pembangunan industri pariwisata daerah; dan
- Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

Dalam upaya mewujudkan pariwisata budaya yang berkualitas dan berkelanjutan serta memiliki daya saing yang berlandaskan Tri Hita Karana yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dengan mengedepankan kekayaan dan keragaman potensi daya tarik wisata berwawasan lingkungan berdasarkan budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu berlandaskan Tri Hita Karana;

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

1. Pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. Pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
3. Pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
4. Pengembangan dtw berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
5. Pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

b. Pertanian

Pengembangan kawasan Pertanian, Peternakan dan perkebunan diarahkan di beberapa lokasi di Provinsi Bali antara lain:

1. Padi sebagai komoditas Tanamam Pangan dikembangkan di 9 kabupaten/kota se - Bali
2. Jagung sebagai komoditas Tanamam Pangan dikembangkan di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng
3. Bawang Merah sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Tabanan, Buleleng, Karangasem dan Bangli
4. Cabai sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Bangli, Tabanan, Buleleng, Klungkung dan Gianyar.
5. Jeruk sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Banglidan Bulleleng
6. Kopi sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Buleleng, Badung, Bangli dan Tabanan
7. Kakao sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Jembrana
8. Jambu Mete merupakan komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem
9. Cengkeh sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana
10. Sapi Potong sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Badung, Klungkung, Karangasem dan Buleleng
11. Kambing sebagai komoditas peternakan dikembangkan di KabupatenTabanan
12. Babi komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Gianyar.

c. Kelautan dan Perikanan

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sekiranya perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan. Dan pengembangan kegiatan terpadu tersebut diarahkan di beberapa lokasi di Provinsi Bali antara lain :

1. Untuk di Kabupaten Klungkung Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan, sedangkan Kawasan Minopolitan Perikanan tangkap di pusatkan di PPI Kusamba.

2. Kabupaten Bangli Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku
3. Kabupaten Tabanan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Kecamatan Penebel, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Marga, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemaeg Barat dan Kecamatan Pupuan.
4. Kabupaten Jembrana Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap diarahkan di PPN Pengambengan.
5. Kabupaten Buleleng Kawasan Minapolitan Perinanan tangkap diarahkan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Gerokgak.

d. Industri

Adapun industri yang sekiranya dapat dijadikan industri unggulan Di Provinsi Bali adalah :

1. Industri pangan diantaranya
   - industri pengolahan biji kakao,
     lokasi pengembangannya dilakukan di Kabupaten Jembrana dengan kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Badung, Karangasem dan Bangli.
   - industri pengolahan buah-buahan,
     lokasi pengembangannya di Kabupaten Buleleng dan Karangasem, dengan seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali sebagai kabupaten penyangganya.
   - industri pengolahan biji kopi,
     lokasi pengembangannya di Kabupaten Tabanan dan Buleleng, dengan kabupaten Bangli sebagai kabupaten penyangganya.
   - industri pengolahan mente,
     lokasi pengembangannya di Kabupaten Karangasem dengan kabupaten bangli, Buleleng dan Gianyar sebagai kabupaten penyangganya.
   - industri pengolahan kelapa,
     lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana, dengan kabupaten Tabanan sebagai Kabupaten penyangganya
   - industri pengolahan ikan,
     lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dengan kabupaten Buleleng, Badung dan Klungkung sebagai kabupaten penyangganya.
   - industri pengolahan daging.

lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dan Tabanan dengan Kabupaten Badung sebagai kabupaten penyangganya

2. Industri Farmasi dan Kosmetik berupa industri dan kosmetik farmasi berbahan herbal.

Industri tersebut berpotensi menjadi industri unggulan dengan menjalin kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen/pelaku usaha; melakukan inovasi produk/peningkatan kapasitas produksi produk herbal; upaya perlindungan produk herbal melalui hak cipta/paten; pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan pengendalian mutu; dan penguatan jaringan pasar dan promosi produk.

3. Industri tekstil dan aneka industri berupa industri kerajinan kayu, tekstil dan produk tekstil.

industri kerajinan kayu perlu didukung dengan adanya kelancaran pengadaan bahan baku kayu; adanya kontinyuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kayu dengan konsentrasi kepada desain modern dan sistem produksi berwawasan lingkungan; peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran dari SDM industri serta peningkatan pertumbuhan undustri kresatif dan nilali kontribusi ekonomi.

4. Industri elektronika dan telematika/ICT.

Didukung dengan pembentukan IT centre serta kelompok-kelompok pengembang software; peningkatan jumlah unit usaha yang menghasilkan piranti lunak, animasi, maupun game; serta penguatan produk dengan mengembangkan ciri khas Bali

2.3.10 Tema Pengembangan Wilayah

Mengacu pada Perda RTRW Provinsi Bali Nomor: 16 Tahun 2009, lampiran Materi Teknis RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029, potensi pengembangan wilayah di Provinsi Bali dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti diuraikan di bawah ini:

a. Sistem pengembangan wilayah perkotaan berdasarkan fungsi

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan Perkotaan Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan (Sarbagita) yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Denpasar sebagai Kota Inti (sebagai ibukota Provinsi Bali) beserta kota-kota disekitarnya yaitu kawasan perkotaan Badung, Gianyar dan Tabanan (sebagai ibu kota kabupaten), dan kawasan perkotaan kecil diantaranya yang membentuk sistem metropolitan, yang berfungsi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan sebagai pusat pelayanan utama nasional dan wilayah Provinsi Bali.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan Singaraja, kawasan perkotaan Semarapura, dan kawasan Negara (sekaligus ibu kota kabupaten) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan untuk satu atau lebih kabupaten serta wilayah belakangnya.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan Bangli, Amlapura (sebagai Ibukota Kabupaten), Seririt (sebagai ibukota Kecamatan) dan Gilimanuk (pusat kegiatan pelabuhan), merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan satu kabupaten atau beberapa wilayah kecamatan yang berdekatan/bersebelahan.
4. Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) terdiri dari tiga kawasan seperti di bawah ini.
    - Seluruh ibu kota kecamatan yang berfungsi melayani wilayah di kecamatannya masing-masing.
    - Kawasan perkotaan lainnya yang mempunyai fungsi khusus sebagai pusat pelayanan transportasi dan pariwisata yang telah berkembang yaitu Padangbai, Pancasari-Candikuning dan Nusa Dua.
    - Kawasan perkotaan lainnya yang berpotensi berkembang dari kawasan perdesaan dengan fungsi khusus yaitu Celukan Bawang dan Pengambengan.

b. Sistem pengembangan wilayah perkotaan berdasarkan wilayah pelayanan

Pusat utama pelayanan wilayah Provinsi Bali adalah Kota Inti Kawasan Metropolitan Sarbagita (Kota Denpasar) yang sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Bali. Selanjutnya pelayanan perkotaan dikembangkan untuk melayani wilayah belakangnya secara merata dan berhirarki. Berdasarkan karakter geografis dan struktur jaringan prasarana utama wilayah, maka wilayah pelayanan sistem perkotaan dibagi dalam empat sistem pelayanan perkotaan, seperti diuraikan di bawah ini.

1. Sistem Perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja.
2. Sistem Perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura.
3. Sistem Perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan atau Kawasan Metropolitan Sarbagita.

4. Sistem Perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Negara.

c. Pengembangan wilayah kawasan budidaya

Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Bali Nomor: 16 Tahun 2009, pengembangan kawasan budidaya mencakup: (a) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (b) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan (c) pengembangan kawasan budidaya prioritas.

Dalam pengembangan kawasan budidaya prioritas tersebut di atas, antara lain ditujukan pada empat andalan seperti diuraikan di bawah ini.

1. Pengembangan kawasan andalan di Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, aneka industri, pertanian, dan perikanan.
2. Pengembangan kawasan andalan di Kawasan Denpasar–Ubud–Kintamani (Bali Selatan) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, industri kecil, pertanian dan perikanan.
3. Pengembangan kawasan andalan Laut Bali dan sekitarnya (Bali Barat) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, perikanan dan pertambangan lepas pantai.
4. Pengembangan kawasan andalan Bali Timur sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.

d. Wilayah Rawan Bencana

Mengacu pada Perda RTRW Provinsi Bali Nomor: 16 Tahun 2009, wilayah atau kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Dalam lampiran Materi Teknis RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 tersebut, kawasan rawan bencana alam terdiri dari 6 (enam) kawasan seperti diuraikan di bawah ini.

1. Kawasan rawan tanah longsor

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran (dengan kondisi kemiringan lereng lebih curam dari 40º). Sebaran lokasi kawasan rawan tanah longsor terdiri dari kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang terletak pada daerah lereng bukit/perbukitan, lereng gunung/pegunungan, dan tebing/lembah sungai yang

berada di kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng.

2. Kawasan rawan gelombang pasang

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer/jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Sebaran kawasan rawan gelombang pasang terdapat di kawasan sepanjang pantai Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan kota Denpasar.

3. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Sebaran kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan sedang–tinggi terletak di Kawasan Denpasar Selatan, Kawasan Kuta Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Singaraja Kabupaten Buleleng, Kab. Jembrana dan Kab. Karangasem, Kab. Klungkung dan Kab. Tabanan.

4. Kawasan rawan bencana gunung berapi

Sebaran kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung dan kawasan gunung berapi Gunung Batur di Kabupaten Bangli beserta alur-alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar.

5. Kawasan rawan gempa bumi

Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang berada pada daerah/kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah/sering terjadinya gempa bumi. Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasikan mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut:

- Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak,
- Daerah yang dilalui oleh patahan aktif,
- Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 Skala Richter,
- Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, dan
- Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan Skala VII sampai XII Modified Mercally Intencity (MMI). Sumber gempa yang mempengaruhi kawasan Pulau Bali dan sekitarnya dibagi 2 (dua) zone, yaitu zone subduksi di selatan Bali dan zone patáhan busur belakang di bagian utara Bali. Kedua zone ini diakibatkan oleh adanya zone sesar naik busur belakang Flores.

Menurut peta kawasan rawan bencana gempa bumi di Bali yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ada 4 (empat) pusat gempa bumi di wilayah Bali yaitu 1 (satu) di Utara Seririt, 1 (satu) di Timur Pulau Bali dan 2 (dua) di Selatan Pulau Bali yang berlokasi diantara Pulau Bali dengan Pulau Nusa Penida, dan di Selatan Pulau Bali. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi ada 3 (tiga) yaitu:

- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tinggi penyebarannya berada di kawasan Bali Barat (koridor kawasan Sumberkima, Gerokgak, Seririt Busungbiu, Pupuan, Tista, Pekutatan, Mendoyo dan Kab. Karangasem;
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah penyebarannya berada pada kawasan pantai barat Gilimanuk sampai ke selatan Negara dan Bali selatan dari Kota Denpasar, Kuta, Tanah Lot ke utara sampai pantai utara Singaraja, Kubutambahan, Tejakula, dan Kabupaten Bangli;
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Rendah penyeberannya adalah di kawasan Kediri/Tabanan, memanjang sampai kawasan Gianyar ke utara.

6. Kawasan Rawan Abrasi dan Erosi

Kawasan rawan abrasi ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Sebaran kawasan rawan abrasi dan erosi pantai tersebar pada beberapa tempat sepanjang pantai Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan.

7. Kawasan Rawan Tsunami

Tsunami merupakan gelombang laut dengan periode panjang dan amplitude besar yang ditimbulkan oleh gangguan implusif dari dasar laut. Gangguan implusif tersebut dapat berasal dari gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran. Ancaman terhadap bencana Tsunami di Provinsi Bali dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni ancaman tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan identifikasi karakteristik dan historis kejadian bencana di Provinsi Bali, hampir seluruh wilayah

Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki ancaman tinggi terhadap Tsunami kecuali Kabupaten Bangli.

8. Cakupan Pelayanan Bencanan Kebakaran di Kabupaten/Kota

Berikut adalah data kebakaran yang terjadi di kabupaten/kota se-Bali selama rentang tahun 2013 s.d 2017 yang dihimpun oleh BPBD Provinsi Bali. Kebakaran yang terjadi meliputi kebakaran lahan, hutan, rumah fasilitas umum yang dijumlah dari kabupaten/kota se-Bali dengan rata – rata jumlah kejadian tertinggi umumnya terjadi di kota denpasara denga pekembangan berpluktuasi.

Tabel 2.11 Jumlah Kejadian Kebakaran

KEJADIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Kebakaran	335	500	597	345	311

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

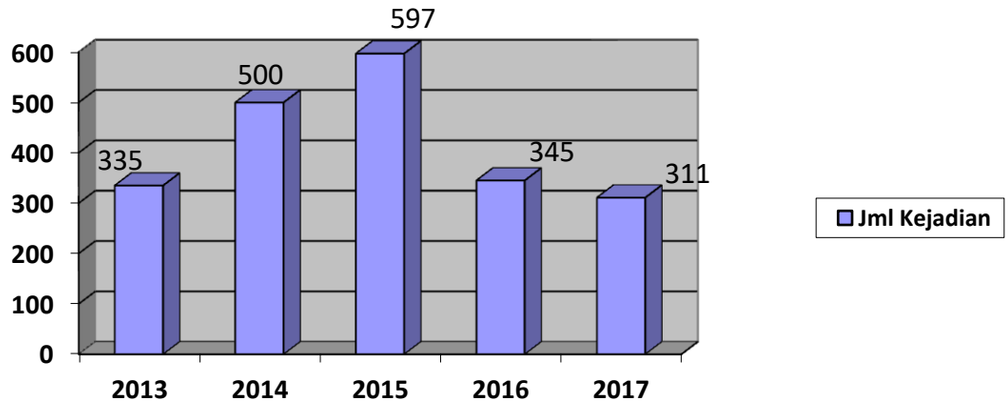

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.16 Kondisi Jumlah Kejadian Kebaran

9. Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan Wilyaha Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap bencana kejadian kebakaran di Provinsi Bali sejak tahun 2013 s.d 2017 direspon atau dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang memiliki armada pemadaman kebakaran.

Tabel 2.12 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013	2014	2015	2016	2017
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.3.11 Kerangka Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.3.11.1 Pendahuluan

Provinsi Bali terdiri atas Pulau Bali dan beberapa pulau kecil memiliki luas wilayah daratan 5.636,66 km2 dan luas laut wilayah lebih kurang 9.500 km^2.Total panjang garis pantai Pulau Bali dan pulau-pulau kecil mencapai 610 km (BLH Provinsi Bali, 2015). Secara ekologis, Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau (relatif kecil) dikelola berdasar prinsip satu pulau, satu perencanaan, dan satu pengelolaan (one island, one plan, one management).Berdasarkan atas prinsip di atas, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali dengan wilayah interlandnya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konsep nyegara gunung.Bali memiliki beberapa pulau kecil yakni: Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Pulau Serangan, Pulau Penyu, Pulau Pudut, Pulau Nusa Dharma, Peninsula Nusa Dua, dan Pulau Menjangan.

Ditinjau dari aspek geo-ekonomi, wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengandung sumberdaya hayati dan non-hayati serta jasa-jasa lingkungan yang berperan penting sebagai tumpuan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. Sumberdaya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil memasok kebutuhan pangan (protein), bahan baku industri dan produk-produk ornamental yang menghidupi ribuan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya. Keindahan, keunikan keanekaragaman hayati laut serta bentang alam pantai (beachscape), pulau-pulau kecil (small ilands) dan laut (seascape) berperan penting dalam menunjang kemajuan industri pariwisata Daerah Bali.Selain itu, wilayah pesisir dan laut bagi masyarakat Bali dipercaya mengandung nilai-nilai budaya dan spiritual yang mutlak dipertahankan kelestariannya.

2.3.11.2 Dasar Pemikiran

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya merupakan salah satu jenis kawasan lindung dari enam jenis kawasan lindung yang ada di Provinsi Bali.Kedalam kawasan ini termasuk: kawasan suaka alam, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman nasional dan taman nasional laut, kawasan taman hutan raya, kawasan taman wisata alam (TWA) dan taman wisata alam laut, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Terkait dengan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdapat kawasan pantai berhutan bakau yakni di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas total 625 ha. Sebaran lokasi kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut terkait dengan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di TWA laut Nusa Lembongan seluas 300 ha dan TWA laut Pulau Menjangan (Ps. 42 dan 45 Perda Bali 16 Tahun 2009). Jika dilihat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup TWA Bawah Laut Nusa Lembongan dan TWA Bawah Laut Pulau Menjangan merupakan kawasan strategis Provinsi Bali.

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah konservasi bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tetentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berekelanjutan. Sasaran pengaturan kawasan konswrvasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perli Dungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilserta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Sebagian besar pulau-pulau kecil di Provinsi Bali termasuk kedalam kawasan pariwisata yakni Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida, Pulau Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Nusa Dua dan Tanjung Benoa di kecamatan Kuta Selatan.Sebagai kawasan pariwisata, pulau-pulau kecil tersebut telah berkembang pesat dan mengalami peningkatan dari sisi pengelolaannya.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini telah didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai, seperti Undang-Undang pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pariwisata, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain

itu, Bali telah memiliki Perda RTRWP (Perda No 16 Tahun 2009) yang berperan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.3.11.3 Kondisi dan Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Keberadaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berhadapan langsung dengan laut lepas akan sangat dipengaruhi oleh dinamika laut. Selain fenomena akresi dan abrasi fenomena perubahan iklim akan sangat mempengaruni keberadaan pulau-pulau kecil. Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan pemanasan global sebagai akibat dari meningkatnya akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir telah meningkatkan suhu permukaan air laut, dan terjadinya cuaca ekstrim.

Kondisi dan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bali sebagaimana tertuang pada dokumen IKPLHD Provinsi Bali(2017) dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Potensi sumberdaya ikan.

Potensi lestari sumberdaya ikan di perairan laut wilayah Bali diperkirakan sebesar 147.278,75 ton per tahun yang terdiri dari ikan pelagis 123.906,0 ton/tahun dan ikan demersal 23.372,75 ton/tahun. Potensi yang dimanfaatkan (tahun 2009) baru mencapai 56,05%. Selain ikan, terdapat pula potensi biota non-ikan sebagai target penangkapa/pemanfaatan yaitu rumput laut, krustase, binatang berkulit lunak (moluska), binatang berkulit tebal (ekinodermata) dan ikan hias.

b. Potensi ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun.

Luas terumbu karang yang telah diindentifiasi di Bali mencapai 7.765 ha, tersebar pada tujuh Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Badung, Gianyar, Kota Denpasar, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Ekosistem terumbu karang Bali mengandung 406 jenis karang hermatifik yang telah teridentifikasi, dimana 367 jenis terdapat di Pulau Bali dan 296 jenis di Nusa Penida. Terdapat 13 jenis karang hasil survei yang masih perlu ditelaah jenisnya sehingga secara total terdapat 419 jenis karang hermatifik Scleractinia di Bali. Jumlah jenis ikan karang di Bali diprediksi mencapai 1.118 jenis sedangkan jumlah jenis yang telah diidentifikasi sebanyak 972 jenis.

Luas hutan mangrove di Provinsi Bali adalah 2.215,5 ha, tersebar pada lima Kabupaten/Kota yaitu Jembrana, Badung, Denpasar, Klungkung dan Buleleng. Hutan mangrove yang berada di dalam kawasan hutan luasnya mencapai 2004,5 ha dan yang berada di luar kawasan hutan luasnya 211 ha.Luas sebaran padang lamun di Provinsi Bali mencapai 1.196,5 ha, tersebar pada enam

Kabupaten/Kota, yaitu Jembrana, Badung, Denpasar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Lamun yang ada di Bali termasuk memiliki keanekaragaman jenis tinggi yaitu terdiri dari 10 jenis, di dalamnya berasosiasi berbagai jenis ikan yang potensial sebagai target penangkapan.

c. Daya tarik pariwisata, pesona alam, dan potensi wisata bahari.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali memiliki nilai-nilai pariwisata tinggi.Sebanyak 15 kawasan pariwisata berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memanfaatkan jasa-jasa lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai daya tarik pariwisata.Sedangkan objek wisata pantai di Bali berjumlah 62 buah yang berperan penting dalam pengembangan wisata bahari.

d. Potensi pulau-pulau kecil.

Daerah Bali memiliki empat pulau kecil berpenduduk dan beberapa pulau-pulau kecil tidak berpenduduk.Pulau-pulau kecil dan kesatuan ekosistem darat dan perairannya memiliki poteni sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang belum dikelola secara optimal.

- Jasa-jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil

  Wilayah pesisir dan dan pulau-pulau kecil mengandung jasa-jasa lingkungan yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata, pelayaran, konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim dan lain sebagainya.

- Sumber energi konvensional.

  Kondisi oseanografi perairan pesisir Daerah Bali yang berhadapan dengan Samudera Hindia dan dilalui oleh arus *The Indonesian Through Flow* menyebabkan wilayah ini kaya akan potensi energi konvensional. Sumberdaya energi yang potensial berasal dari sumberdaya kelautan meliputi Konversi Energi Panas Samudera/*Ocean Thermal Energy Converstion* (OTEC), Energi Ketetik Gelombang dan Arus.

Gambar 2.17 sampai 2.23 adalah gambar pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Bali. Gambar tersebut diambil dari Google Earth dan Google Map. Dengan demikian diharapkan lebih mudah pemahamannya,

Kawasan pertanian rumput laut di Nusa Penida menghasilkan rumput laut yang berkualitas baik sehingga perlu dikembangkan dan ditingktkan produktivitasnya.Dari sisi sumberdaya hayati, Nusa Penida memiliki keunikan. Di kawasan perairan laut Nusa Penida terdapat ikan mola-mola; sedangkan di Nusa Penidi juga terdapat

sumberdaya plasma nutfah yang harus dilindungi seperti kakatua jambul kunig, sapi bali, dan jalak bali yang telah berkembang pesat

Nusa Penida selain merupakan kawasan strategis, juga merupakan salah satu kawasan pariwisata (Gambar 2.16). Berbagai kebijakan dan program daerah dan nasional telah ditujukan di Nusa Penida. Dengan luasan pulau yang terbatas sangat diperlukan kebijakan pengembangan yang terfokus pada beberapa aspek pembangunan strategis untuk menghindari kebijakan atau program yang tumpang tindih misalnya sebagai tempat pemurnian sapi bali dan pariwisata.

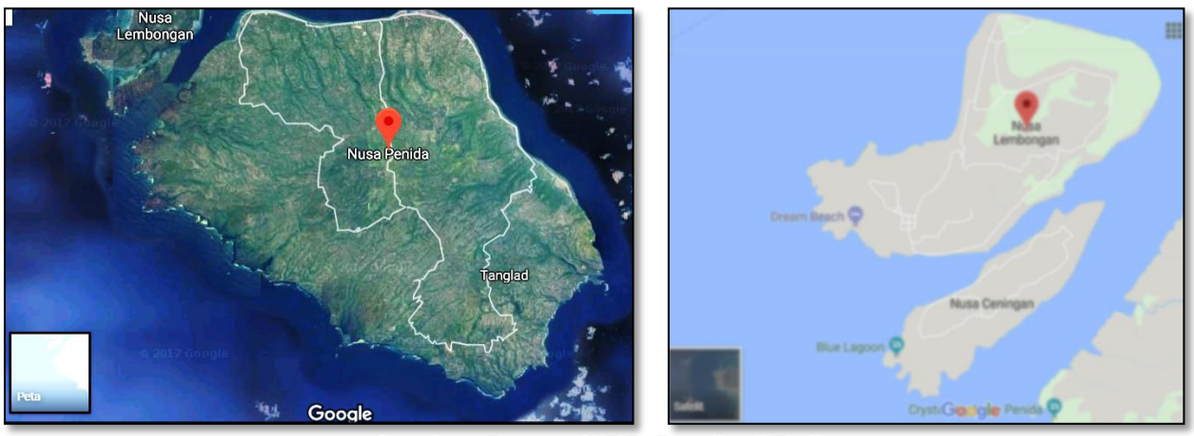

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.17 Kondisi Nusa Penida, Ceningan, dan Lembongan

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.18 Kondisi Pulau Serangan

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.19 Kondisi NusaDharma dan Penninsula

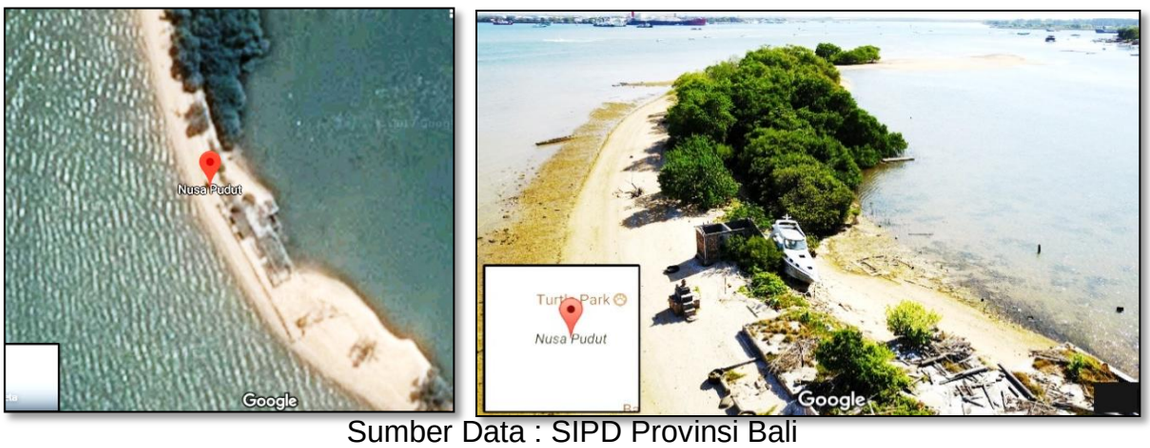

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.20 Kondisi Nusa Pudut di Kecamatan Kuta Selatan

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.21 Kondisi Pulau Penyu di Kecamatan Kuta Selatan

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.22 Kondisi Pulau Menjangan

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.23 Kondisi tutupan vegetasi Pulau Menjangan

2.3.11.4 Pendekatan Pengembangan Kewilayahan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Bali memiliki adat istiadat yang masih dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku pada desa-desa berupa nilai budaya, sistem norma dan kebiasaan yang dihormati dan disepakati oleh setiap warga, baik yang tertulis berupa awig-awig ataupun ketentuan yang tidak tertulis (pararem). Sedangkan kearifan lokal masyarakat Bali pada umumnya dalam hubungannya dengan lingkungan alamnya dilandasi oleh tatanan adat istiadat dan pola kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun serta nilai-nilai kepercayaan. Adat istiadat dan pola kebiasaan serta ajaran agama yang dianut merupakan tataran nilai dari suatu kearifan lokal masyarakatnya yang diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas sehari-hari dan aktivitas ritual.

Dalam konteks pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bali untuk kawasan Pulau Menjangan misalnya dapat diangkat pendekatan yang berbasis kepada kearifan lokal dan budaya setempat. Namun sebagai sebuah kawasan lindung Pulau Menjagan dalam pengelolaannya juga harus mengikuti kaedah-kaedah konservasi yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pendekatan holistik-tematik: adalah penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Pulau Menjangan Selain merupakan Kawasan TWA Bawah Laut, juga memiki kawasan padang rumput yang sering digembalai oleh rusa atau kijang yang populasinya cukup bamyak.. Selain zona terumbu karang yang sangat indah Pulau Menjangan di kedalaman perairannya juga terdapat bangkai kapal kayu yang beumur ratusan tahun. Saat ini juga sudah ada beberapa Pura yang dibangun di Pulau Menjangan.Kidang yang sering memanfaatkan lahan di daratan Pulau Menjangan untuk menggembala harus ditingkatkan kualitas tanaman padang gembalanya sehingga hewan-hewan tersebut betah hidup disana dan menambah nilai estitika Pulau Menjangan. Semua aktivitas yang ada di Pulau Menjangan harus terjamah melalui sebuah focus program “pariwisata berbasis sumberdaya keanekaragaman hayat”.

Terintegrasi: Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional. Dalam konteks integasi semua aktivitas yang ada hendaknya dapat terlaksana dengan baik dan tetap mengarusutamakan kelestarian sumberdaya keanekaragaman yahati, baik di laut maupun di daratan Pulau Menjangan.

Pendekatan Spasial: Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan. Penetapan zonasi menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta kepastian terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada.

2.3.11.5 Skenario Pengembangan Kewilayahan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kompleksitas ekologis dan permasalahan lingkungan serta besarnya nilai ekonomi wilayah yang sekaligus pula rentan berkembangnya konflik maka wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola dengan pendekatan secara terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Management, ICM) merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil secara berkelanjutan meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; antar-Pemerintah Daerah; antar-sektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Sesuai dengan amanat UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dimaksud, Pemerintah Provinsi Bali wajib menyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan merespon isu-isu pengelolaan serta isu-isu lingkungan pesisir di daerah. Rencana Strategis tersebut adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali: “Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali yang berdayaguna, lestari, dan mandiri, berlandaskan Tri Hita Karana”

Maknanya melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu berlandaskan nilai-nilai,norma,tradisi dan kearifan local Tri Hita Karana mengarah pada pencapaian terwujudnya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas daerah (kelembagaan dan sumberdaya manusia).

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan beberapa Misi pada aspek ekologi,ekonomi,social,budaya,dan kelembagaan yaitu:

a. Ekologi

- Memelihara dan mengembangkan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Menata pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
- Meningkatkan dan memelihara kualitas serta daya dukung lingkungan hidup
- Meningkatkan upaya mitigasi bencana

b. Ekonomi

- Mengembangkan data potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Meningkatkan sarana dan prasarana
- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan
- Meningkatkankesejahteraanmasyarakatpesisirdanpulau-pulaukecil
- Mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Meningkatkan peran sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan lapangan kerja

c. Sosial Budaya

- Meningkatkan kualitas SDM masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Melestarikan nilai-nilai budaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan:

a. Melaksanakan sosialisasi tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
b. Memastikan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan kedalam pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
c. Melaksanakan misi yang tertuang pada Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
d. Melaksanakan identifikasi dan evaluasi flora fauna yang ada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Daya dukung sektor pertanian, pariwisata dan sektor jasa-jasa pendukung pariwisata adalah modal dasar dalam menggerakan pembangunan di Provinsi Bali. Data menunjukan bahwa lebih dari 60% aktivitas ekonomi Bali disumbangkan oleh industri pariwisata dan lebih dari 80% oleh ekspor. Kontribusi sektor pertanian kurang dari 20%.

Kondisi perekonomian Provinsi Bali berfluktuasi selama periode 2013-2016. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan mencapai 6,73 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 6,03 persen, namun kembali meningkat menjadi 6,32 persen pada tahun 2016. Angka tersebut kembali turun menjadi 5,57 pada tahun 2017. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun selama kurun waktu 2015 dan 2017 pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang telah ditetapkan.

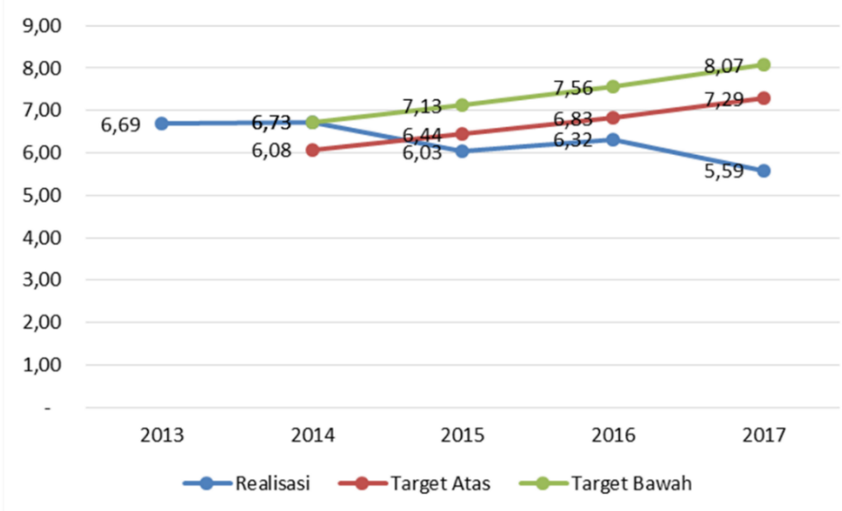

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.24 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Kinerja ekonomi Bali selama periode tahun 2013-2017 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang dihasilkan pada masing-masing lapangan usaha/sektor ekonomi. Pada tahun 2013, total nilai tambah yang tercipta (PDRB atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai 134,407 triliun rupiah terus meningkat menjadi 195,376 triliun rupiah pada tahun 2016. Nilai tambah yang tercipta di Bali termasuk

dalam katagori cukup besar untuk ukuran provinsi kecil yang tidak memiliki sumberdaya alam dan migas.

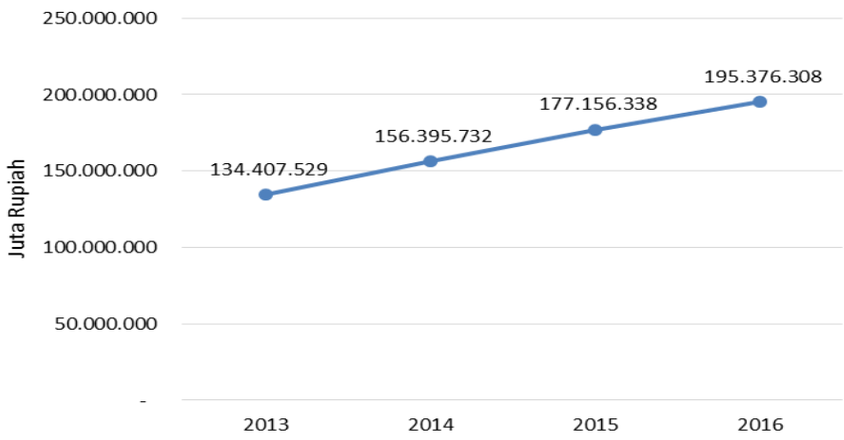

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.25 Nilai PDRB ADHB Provinsi Bali Tahun 2013-2016

Struktur perekonomian Provinsi Bali masih ditunjang oleh sektor tersier (pariwisata). Hal tersebut terlihat dari kategori yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu kategori penyediaan akomodasi makan dan minum. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2013-2017 berturut-turut yaitu 21,53 persen, 23,10 persen, 22,89 persen, dan 22,82 persen. Segmentasi wilayah sektor tersier ini berada di wilayah Bali bagian selatan atau biasa disebut “Sarbagita” (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), karena di wilayah tersebut terkonsentrasi aktivitas ekonomi pendukung pariwisata, seperti: hotel, villa, agen dan biro perjalanan wisata, restoran, rumah makan, cafe, dan lain sebagainya.

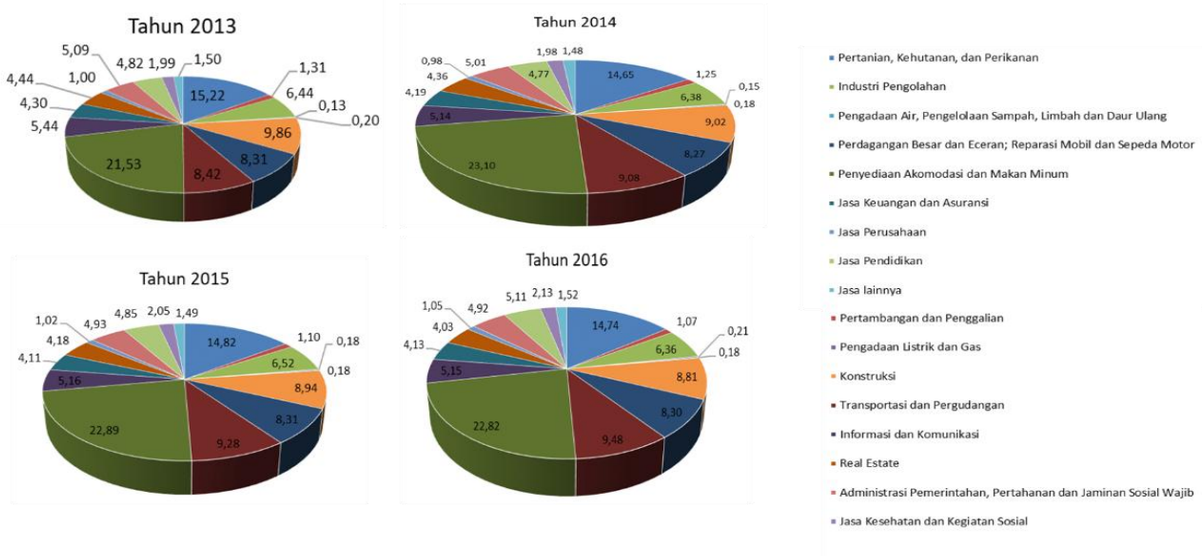

Tahun 2017

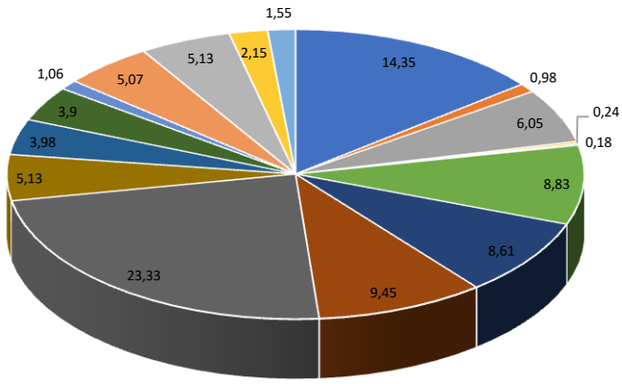

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.26 Kontribusi PDRB ADHB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

2.4.2 Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bali (Kota Denpasar) berfluktuasi selama 2013-2017. Laju inflasi Provinsi Bali pada tahun 2014 sebesar 8,03 persen, nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dan ada di atas target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2015 laju inflasi dapat ditekan hingga mencapai 2,70 persen dan ada di bawah target yang ditetapkan. Tahun 2016 inflasi meningkat menjadi 2,94, namun ada di bawah target yang ditetapkan. Selama kurun waktu 2014 sampai 2016 laju inflasi Provinsi Bali masih ada di bawah laju inflasi Nasional. Inflasi Provinsi Bali (Kota Denpasar) pada tahun 2016 banyak disumbangkan oleh inflasi dari kelompok makanan jadi (7,70%),

kelompok sandang (5,41%), dan kelompok bahan makanan (4,51%). Kelompok yang lain diluar dari ketiga kelompok tersebut rata-rata mengalami inflasi di bawah empat persen.

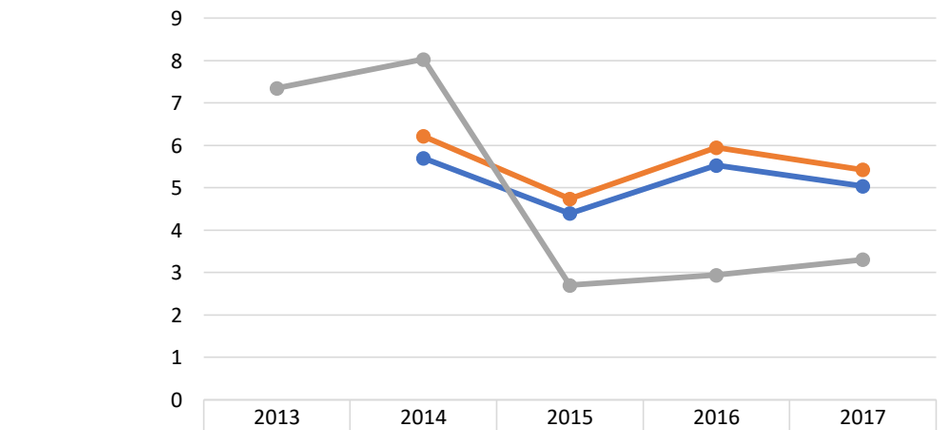

	2013	2014	2015	2016	2017
Target Bawah		5,70	4,4	5,53	5,04
Target Atas		6,22	4,74	5,95	5,43
Realisasi	7,35	8,03	2,70	2,94	3,31

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.27 Laju Inflasi Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (%)

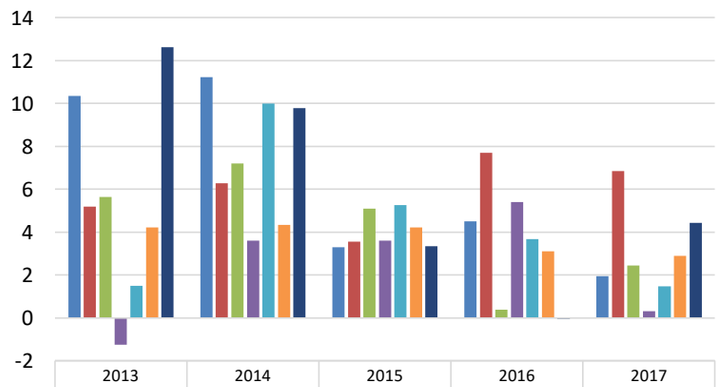

	2013	2014	2015	2016	2017
Bahan Makanan	10,36	11,23	3,31	4,51	1,96
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	5,19	6,29	3,55	7,70	6,85
Perumahan	5,64	7,20	5,09	0,39	2,45
Sandang	-1,24	3,60	3,61	5,41	0,32
Kesehatan	1,49	9,99	5,26	3,68	1,48
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	4,22	4,34	4,23	3,10	2,89
Transpor & Komunikasi	12,62	9,78	3,35	-0,03	4,44

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.28 Laju Inflasi Provinsi Bali Menurut Komoditas Tahun 2013-2017

2.4.3 PDRB per Kapita Provinsi Bali

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk

memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun. Dalam konteks Bali, selama periode 2013 sampai 2017 PDRB per kapita terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 PDRB per kapita sebesar 33,13 juta rupiah terus meningkat menjadi 50,71 juta rupiah pada tahun 2017. Realisasi PDRB per kapita tersebut telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

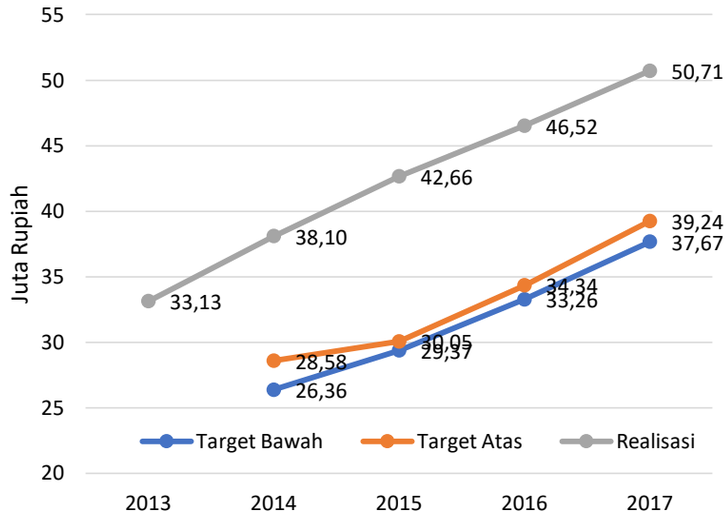

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.29 PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.4 Distribusi Pendapatan

Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan, umumnya digunakan Indeks Gini atau Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Kedua indikator tersebut, menghitung berapa persen bagian dari total pendapatan penduduk suatu wilayah yang diterima oleh penduduk pada masing-masing golongan pendapatan.

Gini rasio Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2016 cenderung mengalami penurunan. Meskipun nilai gini rasio pada tahun 2014 sebesar 0,415 meningkat dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi 0,377 pada tahun 2016. Nilai gini rasio tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai gini rasio yang mengalami penurunan tersebut berarti semakin mengecilnya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Bali. Nilai gini rasio Provinsi Bali selama periode 2013 sampai 2015 tersebut termasuk dalam kategori sedang. Pada tahun 2016, Kabupaten Karangasem memiliki gini rasio terendah yaitu 0,293 dan Kabupaten Klungkung memiliki angka gini rasio tertinggi yaitu 0,360.

Berdasarkan hitungan menggunakan kriteria Bank Dunia, 20% penduduk berpendapatan tinggi mengalami penurunan mulai tahun 2014 sebesar 47,98 persen menurun menjadi 43,96 persen di tahun 2016. Namun, 40% penduduk berpendapatan sedang dan rendah mengalami peningkatan mulai tahun 2014 sampai 2016. Tahun 2014, 40% penduduk berpendapatan sedang sebesar 36,54 persen meningkat menjadi 37,96 persen di tahun 2016. Pada tahun 2014, 40% penduduk berpendapatan rendah sebesar 15,49 persen meningkat menjadi 18,07 persen.

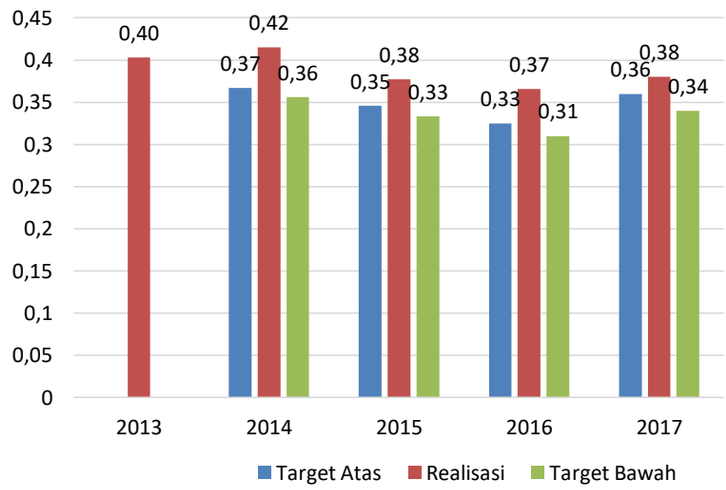

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.30 Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2013-2017

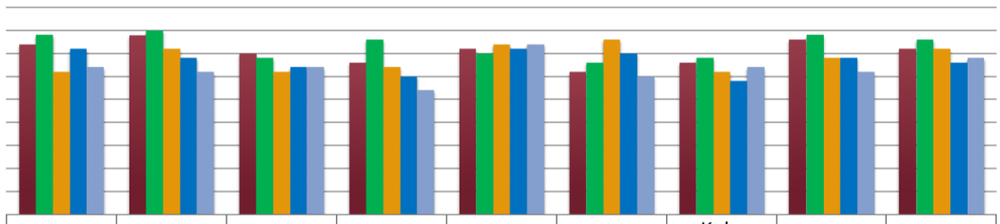

	Kab. Jembrana	Kab. Tabanan	Kab. Badung	Kab. Gianyar	Kab. Klungkung	Kab. Bangli	Kab. Karangasem	Kab. Buleleng	Kota Denpasar
Tahun 2013	0.37	0.39	0.35	0.33	0.36	0.31	0.33	0.38	0.36
Tahun 2014	0.39	0.4	0.34	0.38	0.35	0.33	0.34	0.39	0.38
Tahun 2015	0.31	0.36	0.31	0.32	0.37	0.38	0.31	0.34	0.36
Tahun 2016	0.36	0.34	0.32	0.3	0.36	0.35	0.29	0.34	0.33
Tahun 2017	0.32	0.31	0.32	0.27	0.37	0.3	0.32	0.31	0.34

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.31 Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

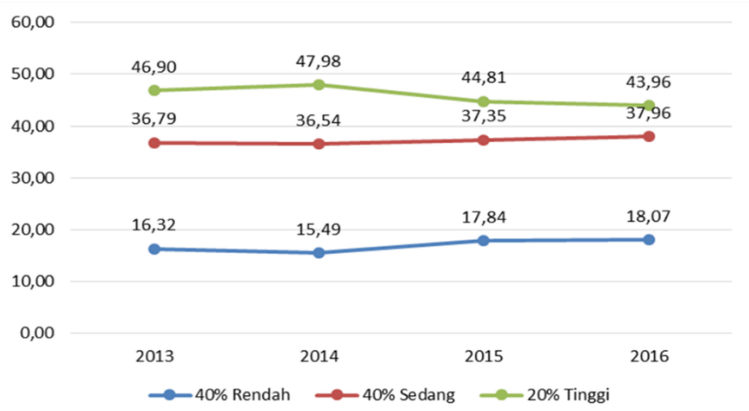

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.32 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.4.5 Persentase Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali berfluktuasi. Tahun 2013 persentase penduduk miskin sebesar 4,49 persen, angka tersebut mengalami kenaikan sampai tahun 2015 menjadi 5,25 persen. Namun, di tahun 2016 persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 4,15 persen. Selama kurun waktu 2014 sampai 2016, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi persentase penduduk miskin di Provinsi Bali masih di bawah realisasi persentase penduduk miskin Nasional. Pada tahun 2016, persentase jumlah penduduk miskin terendah ada di Kabupaten Badung yaitu 2,06 persen dan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Klungkung dengan 6,35 persen.

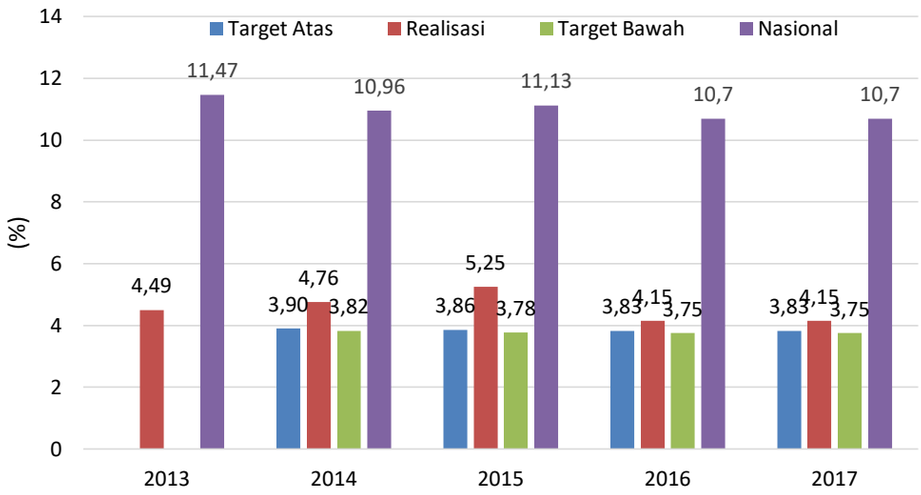

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.33 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

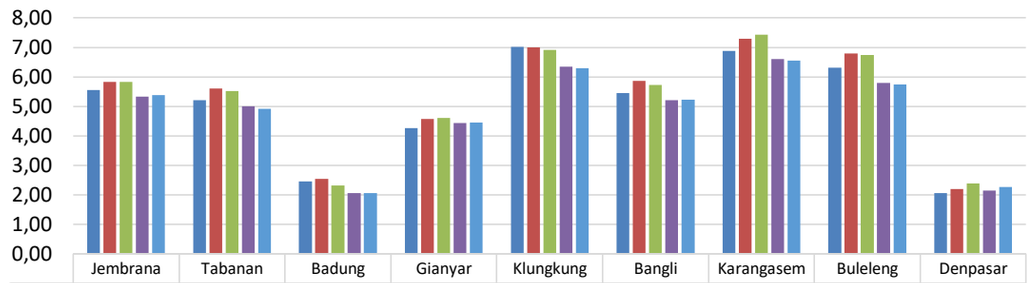

	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
2013	5,56	5,21	2,46	4,27	7,01	5,45	6,88	6,31	2,07
2014	5,83	5,61	2,54	4,57	7,01	5,86	7,30	6,79	2,21
2015	5,84	5,52	2,33	4,61	6,91	5,73	7,44	6,74	2,39
2016	5,33	5,00	2,06	4,44	6,35	5,22	6,61	5,79	2,15
2017	5,38	4,92	2,06	4,46	6,29	5,23	6,55	5,74	2,27

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.34 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Rasio kesenjangan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,16 pada tahun 2013 menjadi 0,26 pada tahun 2015. Namun, cenderung menurun sampai dengan tahun 2017 sebesar 0,09.

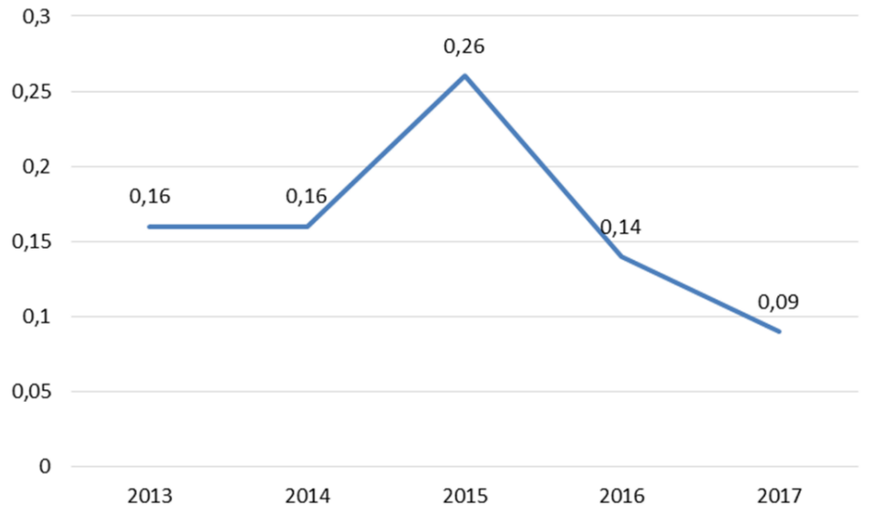

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.35 Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.6 Indeks Pembangunan Manusia

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali selama kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Realisasi IPM Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 73.49 dan terus meningkat menjadi 73.27 pada tahun 2016. Nilai IPM tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Selama kurun waktu 2014 sampai 2016, realisasi IPM belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi IPM provinsi Bali masih di atas realisasi IPM Nasional.

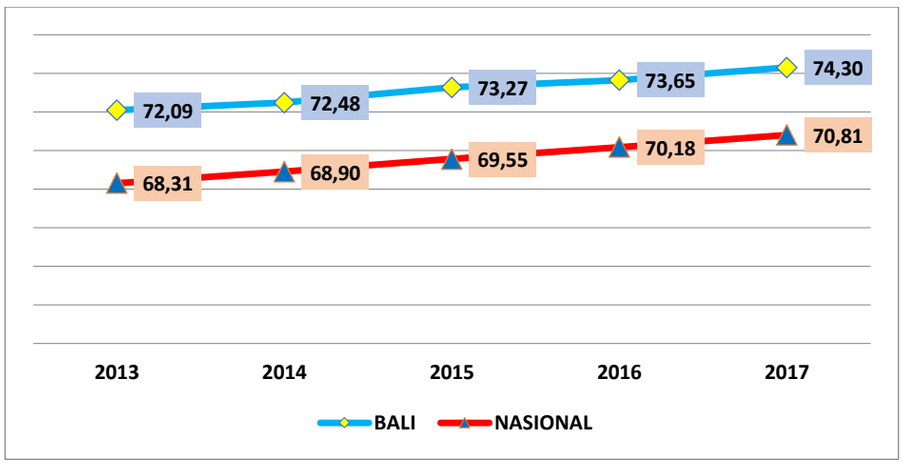

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2017

Kabupaten / Kota	AHH	HLS	RLS	Pengeluaran	IPM
Jembrana	71.70	12.40	7.62	11.468	70.72
Tabanan	73.03	12.95	8.43	13.923	74.86
Badung	74.53	13.94	9.99	17.063	80.54
Gianyar	73.06	13.37	8.87	14.222	76.09
Klungkung	70.45	12.94	7.46	11.005	70.13
Bangli	69.83	12.30	6.80	10.956	68.24
Karangasem	69.85	12.38	5.52	9.833	65.57
Buleleng	71.14	12.62	7.03	12.995	71.11
Denpasar	74.17	13.97	11.15	19.364	83.01
2017	71.46	13.21	8.55	13.573	74.30
2016	71.41	13.04	8.36	13.279	73.65
2015	71.35	12.97	8.26	13.078	73.27
2014	71.20	12.64	8.11	12.831	72.48
2013	71.11	12.40	8.10	12.738	72.09
Keterangan **:**					
Perhitungan IPM dengan Menggunakan Metode Baru					
AHH = Angka Harapan Hidup					
HLS = Harapan Lama Sekolah					
RLS = Rata-rata Lama Sekolah					
Pengeluaran = Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan					

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.4.7 Angka Melek Huruf (AMH)

Perkembangan angka melek huruf (AMH) Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2013-2017. Angka melek huruf (AMH) tahun 2013 yaitu 91,03 terus meningkat menjadi 92,90 pada tahun 2017. Angka melek huruf selama tahun 2014-2017 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Kota Denpasar pada tahun 2016 memiliki AMH tertinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu 98,68, sedangkan nilai AMH terendah ada di Kabupaten Karangasem yaitu 81,74.

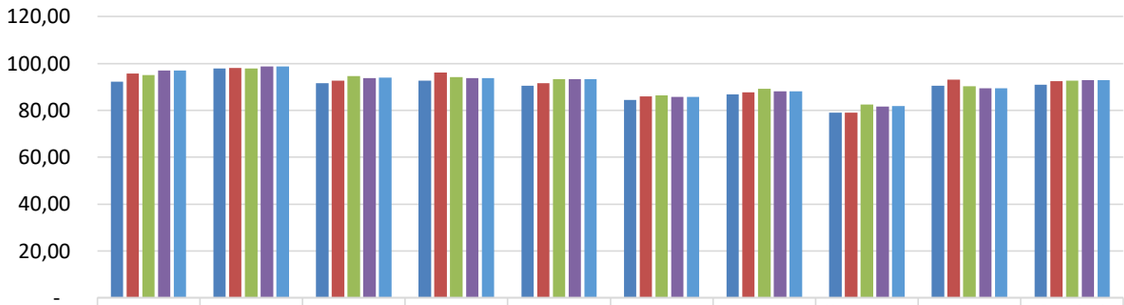

	Badung	Denpasar	Tabanan	Jembrana	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Provinsi Bali
TAHUN	92,30	97,95	91,64	92,65	90,44	84,47	86,85	79,15	90,53	91,03
TAHUN	95,71	98,01	92,65	96,12	91,61	86,04	87,78	79,11	93,19	92,56
TAHUN	95,13	97,96	94,54	94,14	93,43	86,32	89,21	82,52	90,34	92,77
TAHUN	97,05	98,68	93,88	93,74	93,27	85,82	88,09	81,74	89,41	92,82
TAHUN	97,10	98,70	94,00	93,80	93,30	85,80	88,20	81,80	89,50	92,90

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.37 Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.8 Rata-Rata Lama Sekolah

Selama kurun waktu 2013-2017 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Tahun 2013, rata-rata lama sekolah yaitu 8,10 dan meningkat menjadi 8,55 pada tahun 2017. Selama kurun waktu 2013-2017, rata-rata lama sekolah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kota Denpasar memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar tahun 2013 yaitu 10,90 dan meningkat menjadi 11,15 pada tahun 2017. Kabupaten Karangasem adalah kabupaten dengan rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Bali yaitu 5,34 pada tahun 2013 meningkat menjadi 5,52 pada tahun 2017.

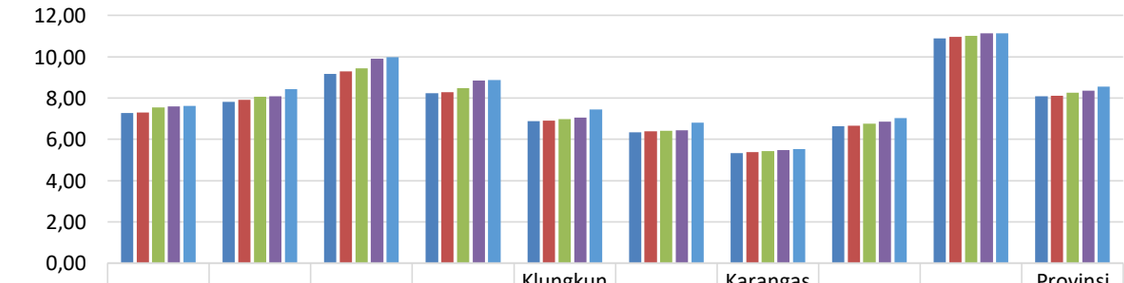

	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar	Provinsi Bali
TAHUN	7,27	7,83	9,18	8,24	6,88	6,35	5,34	6,63	10,90	8,10
TAHUN	7,30	7,91	9,29	8,28	6,90	6,38	5,39	6,66	10,96	8,11
TAHUN	7,54	8,07	9,44	8,49	6,98	6,41	5,42	6,77	11,02	8,26
TAHUN	7,59	8,10	9,90	8,86	7,06	6,44	5,48	6,85	11,14	8,36
TAHUN	7,62	8,43	9,99	8,87	7,46	6,80	5,52	7,03	11,15	8,55

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.38 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.9 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS.

Angka harapan hidup di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2013-2017. Angka harapan hidup pada tahun 2013 sebesar 71,11 terus meningkat menjadi 71,46 pada tahun 2017. Kabupaten Badung menjadi Kabupaten dengan angka harapan hidup tertinggi di Provinsi Bali. Pada tahun 2013, angka harapan hidup Kabupaten Badung sebesar 74,19 dan meningkat menjadi 74,53 di tahun 2017. Kabupaten Karangasem menjadi Kabupaten dengan angka harapan hidup terendah yaitu 69,12 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 69,85 pada tahun 2017.

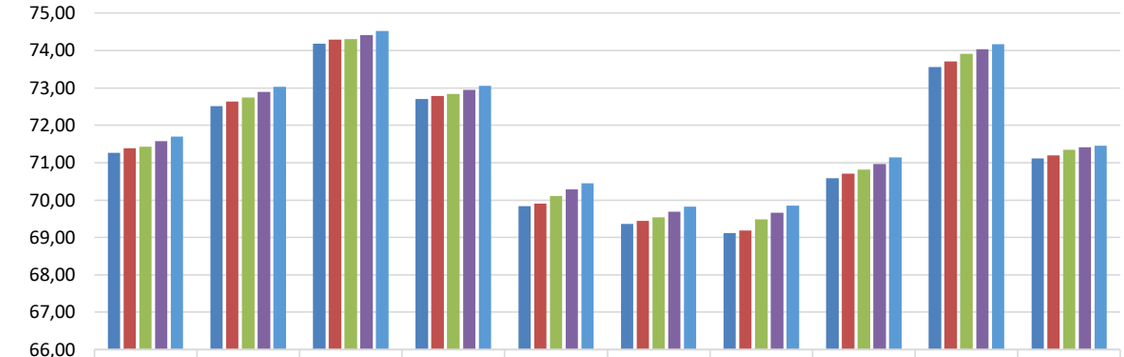

	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar	Provinsi Bali
TAHUN	71,26	72,52	74,19	72,71	69,84	69,36	69,12	70,58	73,56	71,11
TAHUN	71,39	72,64	74,30	72,78	69,91	69,44	69,18	70,71	73,71	71,20
TAHUN	71,43	72,74	74,31	72,84	70,11	69,54	69,48	70,81	73,91	71,35
TAHUN	71,57	72,89	74,42	72,95	70,28	69,69	69,66	70,97	74,04	71,41
TAHUN	71,70	73,03	74,53	73,06	70,45	69,83	69,85	71,14	74,17	71,46

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.39 Angka Harapan Hidup di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.10 Persentase Balita Gizi Buruk

Jumlah balita gizi buruk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Pada tahun 2013, jumlah balita gizi buruk sebesar 86 balita terus meningkat menjadi 106 balita pada tahun 2017.

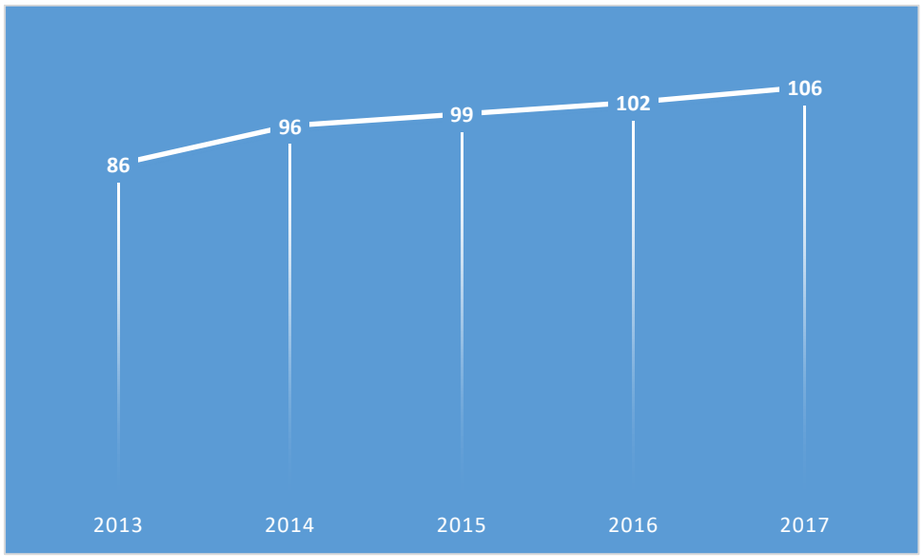

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.40 Balita Gizi Buruk di Prvinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.11 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Bali selama periode 2013 sampai 2017, yaitu 13,2 persen, 13,2 persen, 9 persen, 9,1 persen, dan 8,6 persen. Prevalensi balita gizi kurang tertinggi pada tahun 2017 ada di Kabupaten Buleleng dengan 14,4 persen. Prevalensi balita gizi kurang terendah pada tahun 2017 ada di Kota Denpasar yaitu 3,5 persen.

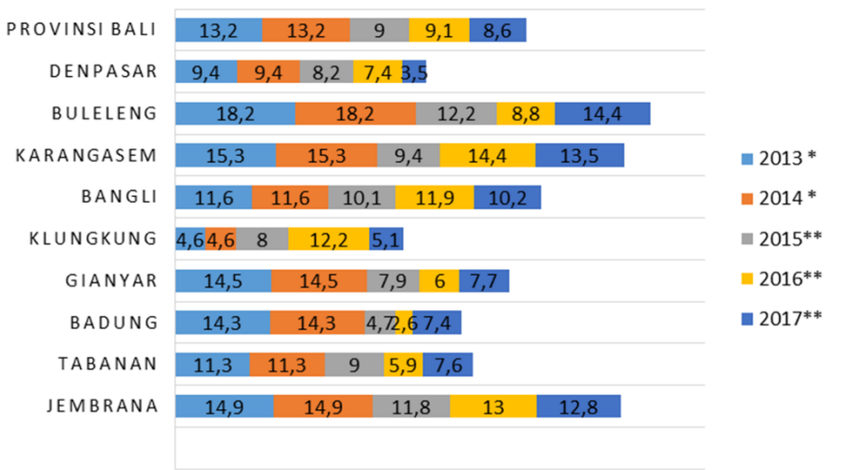

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.41 Prevalensi Balita Gizi Buruk

2.4.12 Cakupan Desa Tangguh Bencana

Tabel 2.14 Cakupan Desa Tangguh Bencana

No	Desa/kelurahan	Kabupaten /kota	Tahun	Besar Anggaran	Sumber Anggaran
1	Desa Tanjung Benoa	Badung	2012	Rp 280.000.000	APBN
2	Desa Kuta	Badung			
3	Desa Lebih	Gianyar	2013	Rp 386.000.000	APBN
4	Desa Medahan	Gianyar			
5	Desa Lemukih	Buleleng	2014	Rp 870.000.000	APBN
6	Desa Galungan	Buleleng			
7	Desa Sudimara	Tabanan	2016	Rp 800.000.000	APBN
8	Desa Tibu Biu				
9	Pengembangan Desa Tangguh Bencana Desa Sudimara Dan Desa Tibu Biu	Tabanan	2018	Rp 400.000.000	APBN
10	Desa Sangkidu	Karangasem	2015	Rp 669.609.000	APBN
11	Desa Ulakan	Karangasem			
12	Desa Sanur Kauh	Kota Denpasar			
13	Desa Serangan	Kota Denpasar			
14	Desa Plaga	Badung	2016	Rp 658.606.000	APBN
15	Desa Sulangai	Badung			
16	Desa Ketewel	Gianyar	2016	Rp 200.000.000	APBD II Gianyar
17	Desa Saba	Gianyar			
18	Desa Gitgit	Buleleng	2018	Rp 90.000.000	APBD II Buleleng
19	Desa Beraban	Tabanan	2014	Rp 235.700.000	APBD I Bali
20	Jimbaran	Badung	2014	Rp 182.897.550	APBD II Badung
21	Kedonganan	Badung			
22	Legian	Badung	2015	Rp 92.970.650	APBD II Badung
23	Seminyak	Badung			
24	Desa Bunutan	Karangasem	2015	Rp 275.000.000	APBD I Bali
25	Desa Purwakerti	Karangasem			
26	Desa Bebandem	Karangasem	2015	Rp 105.000.000	APBD II Karangasem
27	Desa Kusamba	Klungkung	2016	Rp 220.000.000	APBD I Bali
28	Desa Pangsan	Badung	2016	Rp 206.541.500	APBD II Badung
29	Desa Petang	Badung			
30	Desa Beloksidan	Badung			
31	Desa Dadu Timur	KARANGASEM	2016	Rp 105.000.000	APBD II Karangasem
32	Desa Sangkan Gunung	Karangasem	2017	Rp 105.000.000	APBD II Karangasem

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.4.13 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2013, angka partisipasi angkatan kerja sebesar 2.283.896 meningkat menjadi 2.463.039 pada tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja yang tertinggi yaitu yang berusaha sendiri sebesar 353.830.

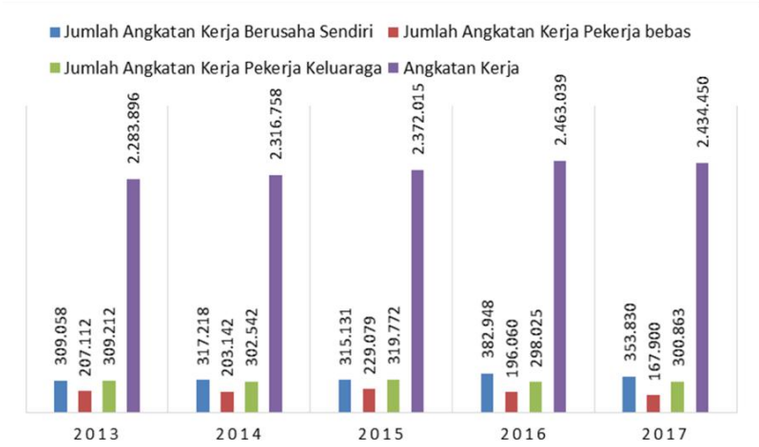

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.42 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali pada tahun 2014 sebesar 74,91 persen, angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja mulai meningkat pada tahun 2015 sebesar 75,51 persen dan kembali meningkat di tahun 2016 sebesar 77,24 persen. Namun, kembali mengalami penurunan menjadi 75,24 pada tahun 2017. Tingkat partisipasi angkatan kerja selama 2014-2017 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.15 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 1,79 persen mengalami peningkatan sampai tahun 2015 sebesar 1,99 persen. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan pada tahun 2016 mencapai 1,89 persen. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka belum mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2015 dan 2016 tingkat pengangguran terbuka telah menacapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka telah mencapai 1,48 dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 mencapai 1,37.

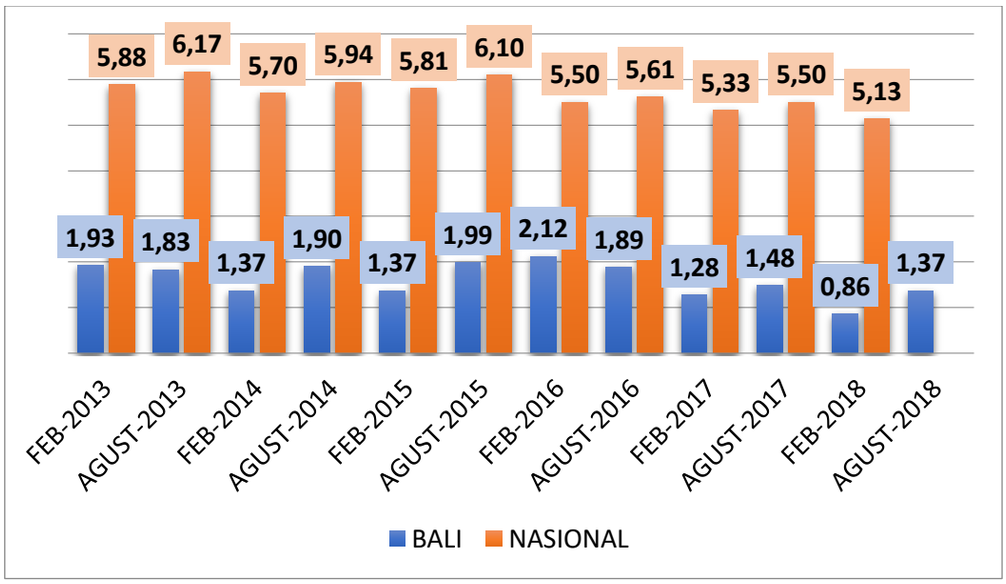

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.44 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.4.16 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi Bali cenderung tetap selama kurun waktu 2013 sampai 2016. Rasio penduduk yang bekerja tahun 2013 sampai 2016, yaitu 98,11 persen; 98,11 persen; 98,01 persen; dan 98,11 persen. Capaian rasio penduduk yang bekerja selama kurun waktu 2013 sampai 2016 di Provinsi Bali belum mencapai target yang telah ditetapkan.

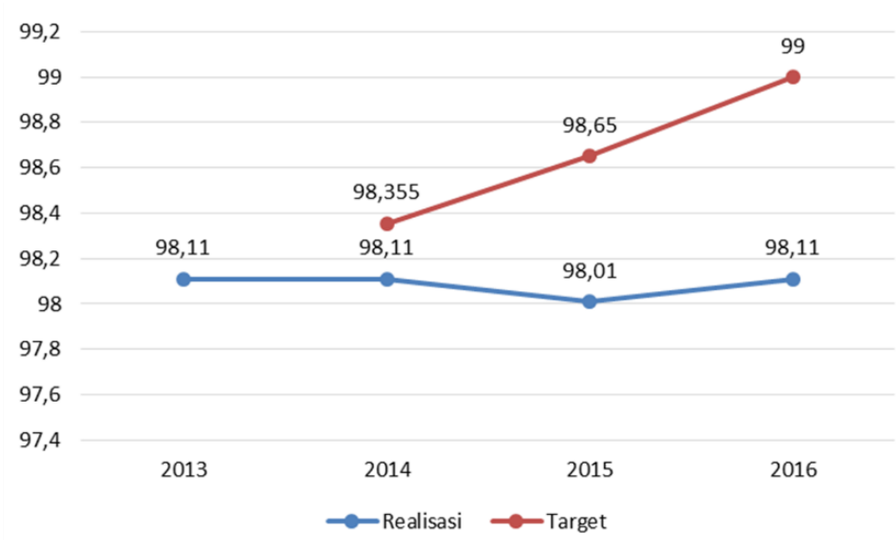

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.45 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.4.17 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Bali tahun 2014 sebesar 73,45 persen, angka tersebut turun dari tahun sebelumnya. Namun, rasio kesempatan kerja mulai meningkat dari 74 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 75,88 persen pada tahun 2017.

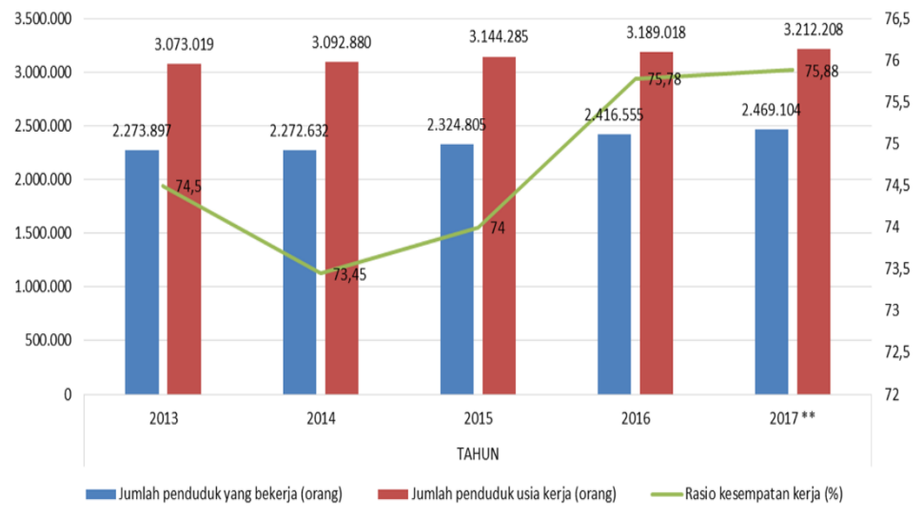

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.46 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.18 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja berusaha sendiri selama kurun waktu 2013 sampai 2017, sebesar 309.058; 317.218; 315.131; 382.948; dan 353.850. angkatan kerja pekerja bebas cenderung menurun dari 207.112 pada tahun 2013 menjadi 167.900.

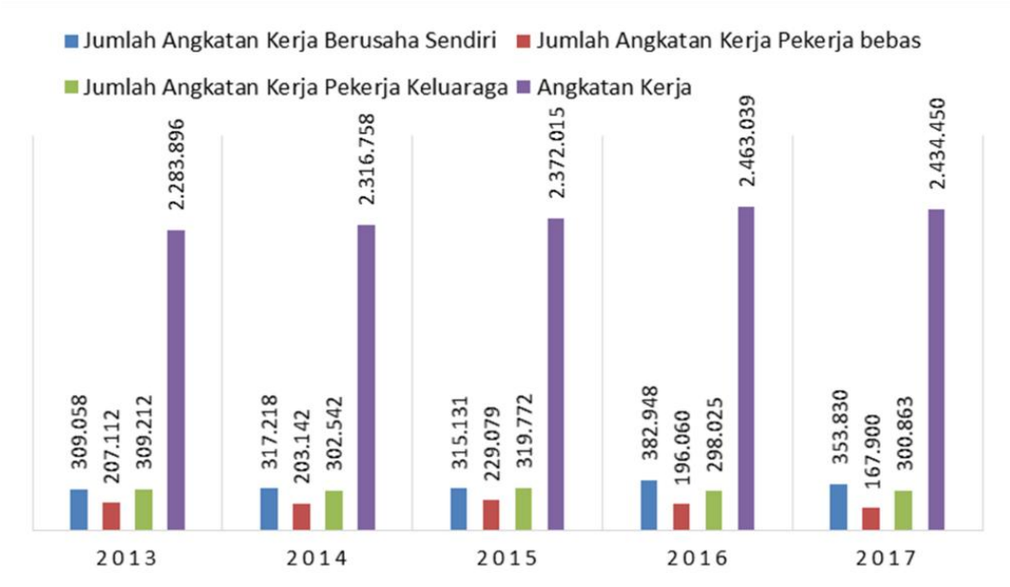

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.47 Jumlah Angkatan Kerja Berusaha Sendiri dan Angkatan Kerja Pekerja Bebas Tahun 2013-2017

2.4.19 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Tahun 2013, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 17,39 persen cenderung menurun menjadi 14.2 persen pada tahun 2017. Selam kurun aktu 2013 sampai 2017, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I belum mencapai target yang telah ditetapkan.

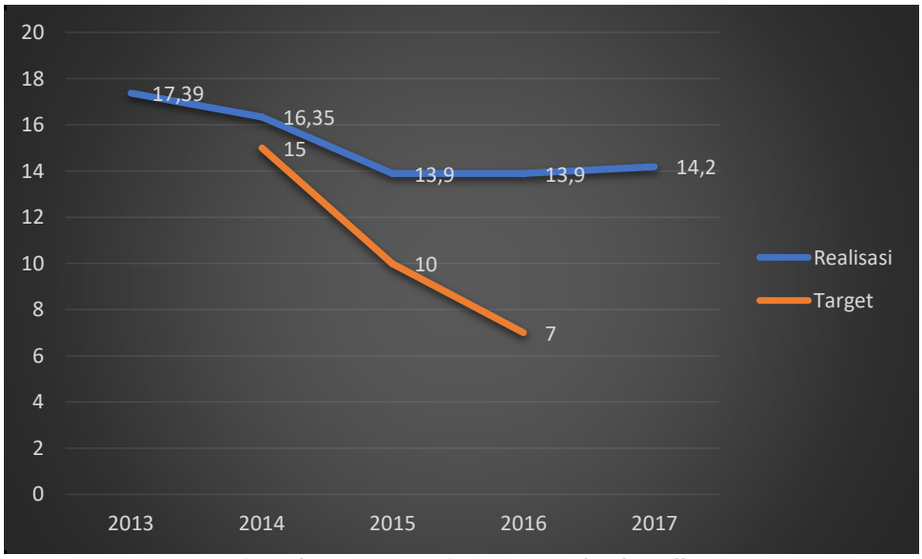

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.48 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.4.20 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat yang terdapat di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 72,48. Indeks kepuasan masyarakat Provinsi Bali lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan NTB, bahkan lebih tinggi dari indeks kepuasan masyarakat nasional.

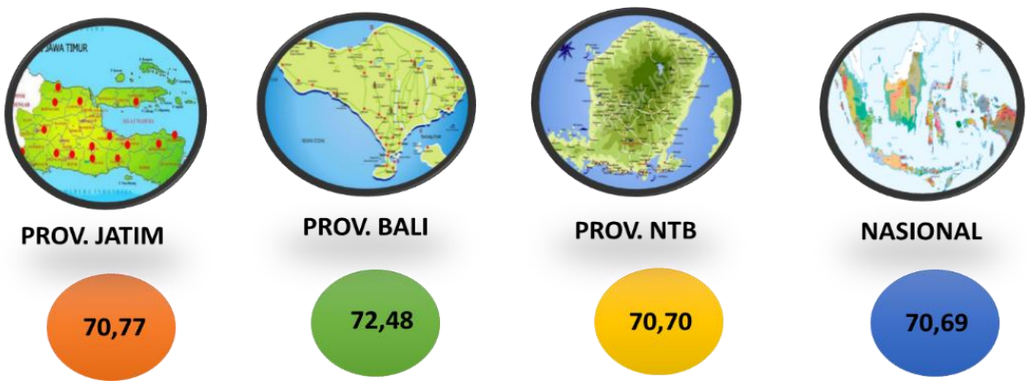

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.49 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat

2.4.21 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Jumlah PAD cenderung meningkat dari 2.529 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 3.055 triliun pada tahun 2017. Jumlah pendapatan terus mengalami peningkatan dari 4.109 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 5.255 triliun rupiah pada tahun 2017.

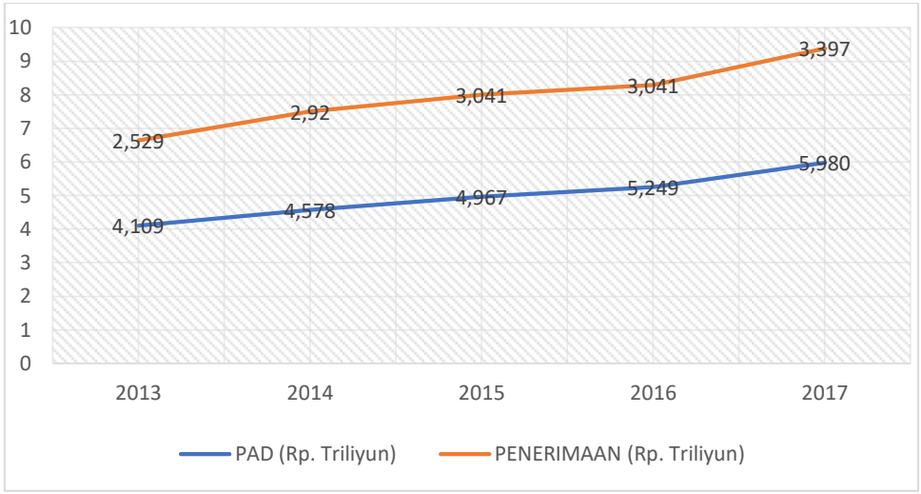

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.50 Jumlah PAD dan Pendapatan di provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.4.22 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Bali semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Berikut disampaikan capaian opini BPK dari tahun 2003-2017.

Tabel 2.15 Opini BPK Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP.DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Capain Opini WTP BPK selama 4 kali berturut-turut bukan tanpa kekurangan, masih ada permasalahan yang masih menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Bali konsen dalam mengurangi jumlah temuan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksanaan tersebut. Opini WTP merupakan wujud dari kinerja dan komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik. Oleh karena itu, komitmen dan semangat untuk terus menunjukkan kinerja yang positif tersebut harus terus dipupuk agar pencapaian ini tetap dapat dipertahankan.

2.4.23 Pecapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai 2017 kondisi pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Bali mengalami kecendrungan meningkat dimana nilai skor PPH dari tahun 2013 sampai tahun 2017 berturut-turut 94, 40, 94, 40, 94, 57, 95, 30 dan pada tahun 2017 sebesar 95,60 namun belum mencapai nilai ideal yaitu sebesar 100. Untuk mencapai konsumsi yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi enrgi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energy masyarakat masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.

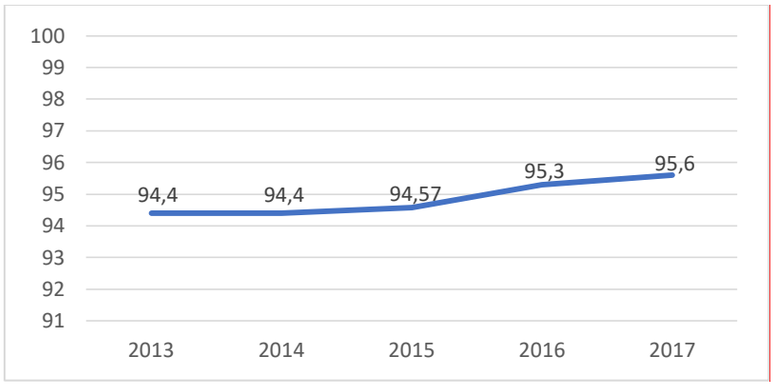

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.51 Skor PPH Ketersediaan

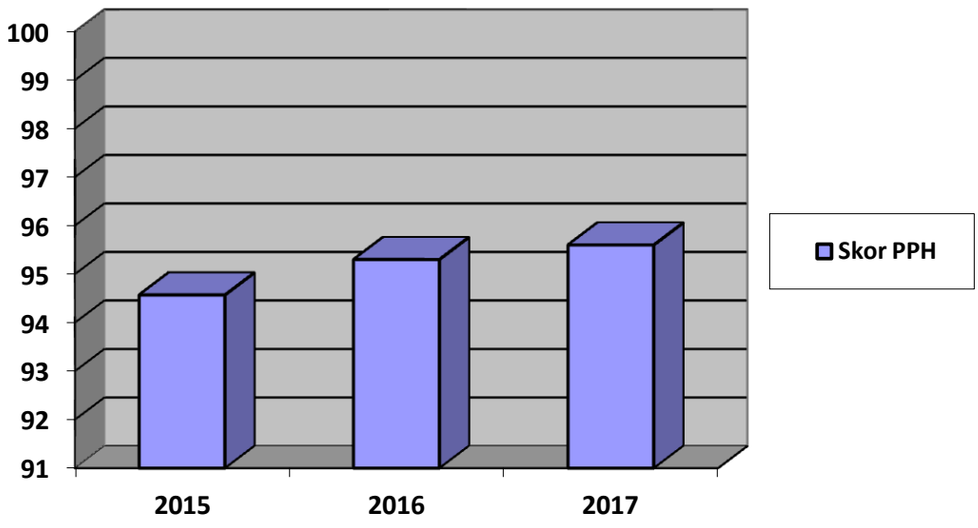

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.52 Pencapaian Skor PPH di Provinsi Bali Tahun 2015-2017

2.4.24 Penguatan Cadangan Pangan

Tabel 2.16 Penguatan Cadangan Pangan

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Beras (Ton)	200	200	200	200	200

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat merupakan amanat UU. Untuk bisa mewujudkan terpenuhinya pangan masyarakat maka perlu ada penguatan cadangan pangan khususnya cadangan beras. Pemerintah provinsi Bali melalui cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog setiap tahun melakukan pengadaan cadangan pangan (beras)

sebanyak 200 ton. Cadangan pangan beras digunakan untuk menanggulangi pangan pada saat becana alam yang terjadi di daerah.

2.5 Aspek Pelayanan Umum

2.5.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.5.1.1 Pendidikan

2.5.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perkembangan pendidikan anak usia dini terus mengalami peningkatan selama periode 2013-2016. Pendidikan anak usia dini tahun 2013 sebesar 58,64 terus mengalami peningkatan menjadi 75,10 pada tahun 2017.

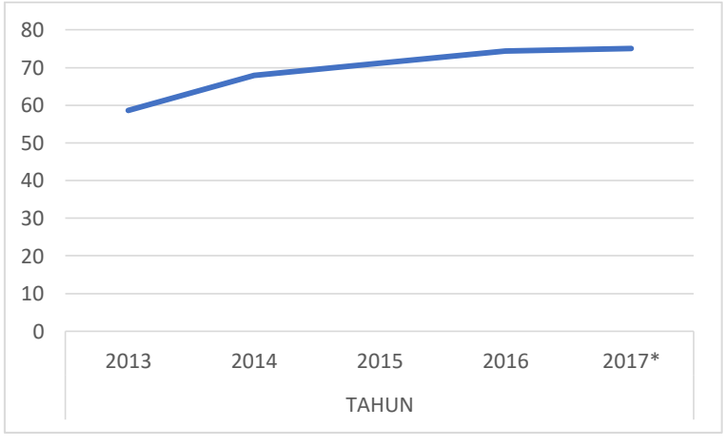

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.53 Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI/Paket A dari tahun 2013-2017 yaitu 107,89; 107,97; 104,35; 109,84; dan 107,99. Angka partisipasi kasar tingkat SD/MI/Paket A masih di bawah

target yang ditetapkan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B dari tahun 2013-2017, yaitu 106,73; 106,74; 106,64; 113,75; dan 113,37. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B telah melebihi target yang ditetapkan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMA/SMK/MA/Paket C selama kurun waktu 2013-2017, yaitu 92,40; 101,40; 100,30; 100,89; dan 104,42. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMA/SMK/MA/Paket C telah melebihi target yang ditetapkan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI/Paket A tertinggi tahun 2017 di Provinsi Bali ada di Kota Denpasar sebesar 113,2 dan yang terendah ada di Kabupaten Tabanan yaitu 102,43. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B tertinggi tahun 2017 di Provinsi Bali ada di Kabupaten Klungkung sebesar 126,45 dan yang terendah ada di Kabupaten Karangasem sebesar 108,3. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMA/SMK/MA/Paket C tertinggi tahun 2017 di Provinsi Bali ada di Kabupaten Klungkung sebesar 140,82 dan terendah ada di Kabupaten Karangasem yaitu 85,88.

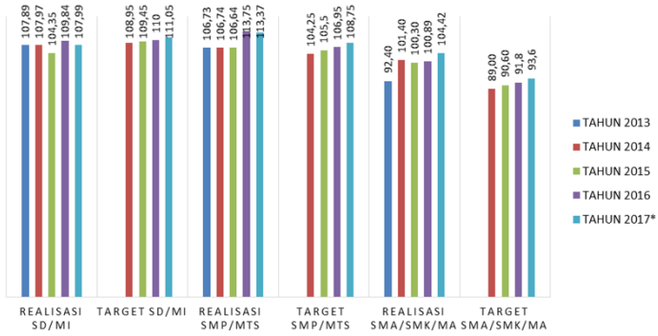

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

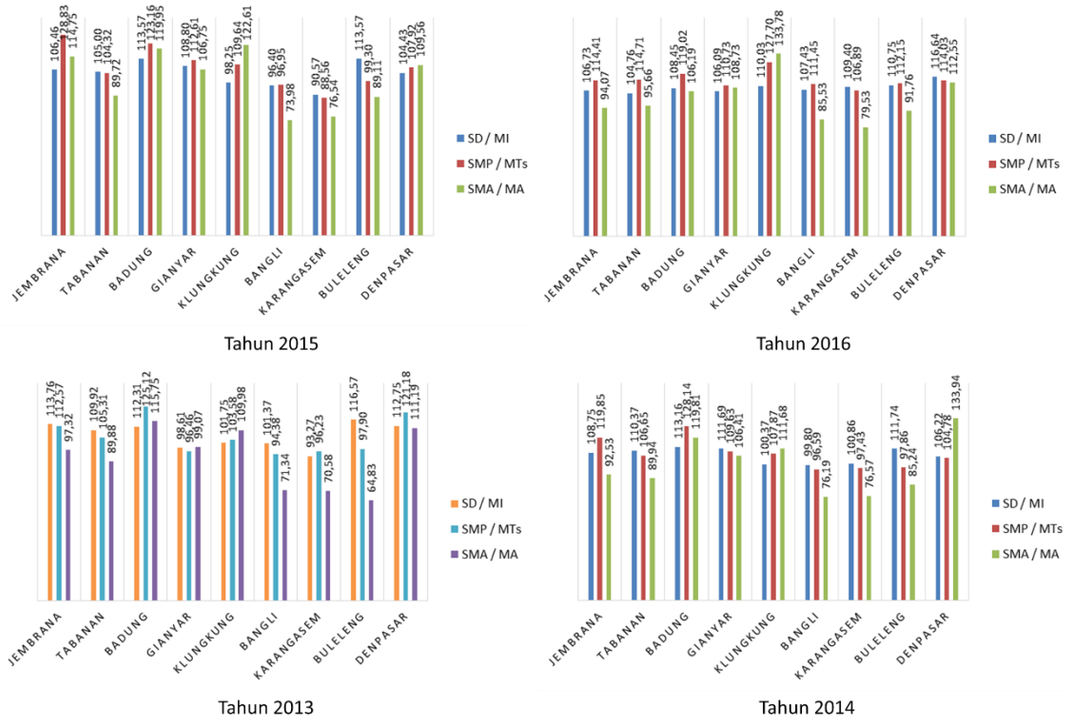

Gambar 2.54 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

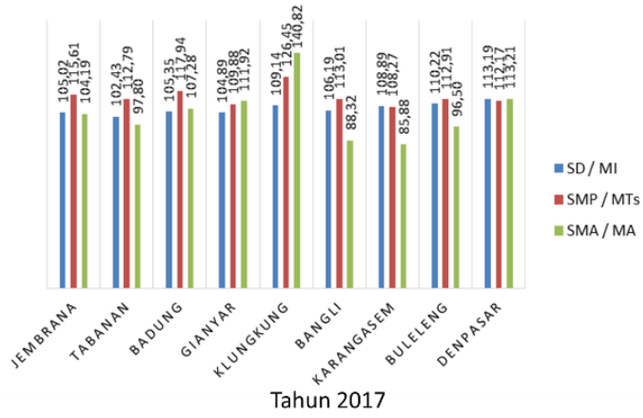

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.55 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.1.3 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan berdasarkan tingkat SD/MI mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2013-2016 sebesar 24,36; 26,68; 25,7; dan 26,63. Angka tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SMP/MTS selama kurun waktu 2013-2016 yaitu 10,93; 11,86; 11,7; dan 11,75, angka tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Angka

pendidikan yang ditamatkan tingkat SMA/SMK/MA menunjukkan peningkatan dari 21,76 pada tahun 2013 menjadi 23,35 pada tahun 2016. Angka tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

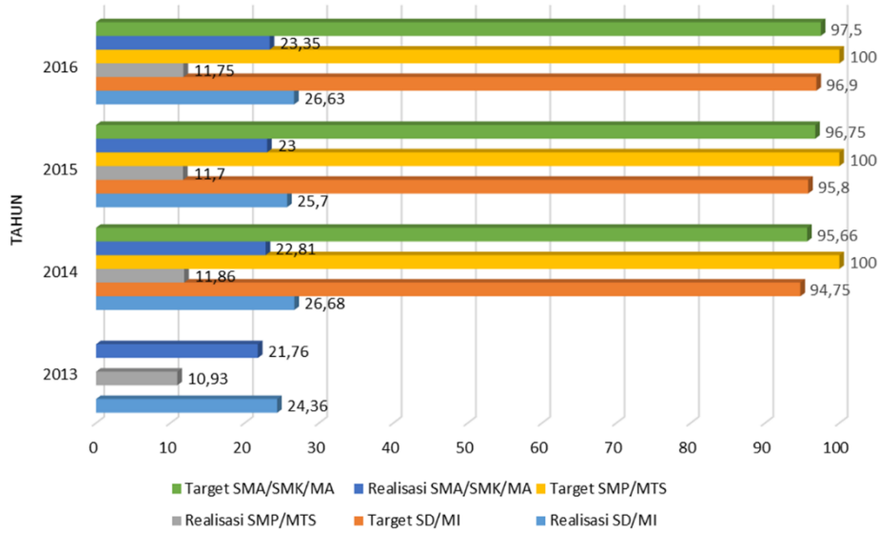

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.56 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

2.5.1.1.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partispasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A yaitu 95,29; 97,21; 92,70; 97,24; dan 95,70. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A belum mencapai target yang telah ditetapkan. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, yaitu 85,24; 86,85; 86,91; 84,87; dan 84,36. Angka tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2014 sampai 2016, namun belum mencapai target pada tahun 2017. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA/Paket C mengalami

penurunan dari 77,51 pada tahun 2013 menjadi 69,45 pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 meningkat menjadi 72,61. Angka tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A tertinggi pada tahun 2017 di Provinsi Bali ada di Kota Denpasar sebesar 100,62 dan yang terendah ada di Kabupaten Tabanan sebesar 90,98. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B tertinggi pada tahun 2017 di Provinsi Bali ada di Kabupaten Klungkung sebesar 90,17 dan yang terendah ada di Kabupaten Badung sebesar 80,53. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA/Paket C tertinggi pada tahun 2017 di Provinsi Bali ada di Kabupaten Klungkung sebesar 85,29 dan terendah ada di Kabupaten Bangli sebesar 63,16.

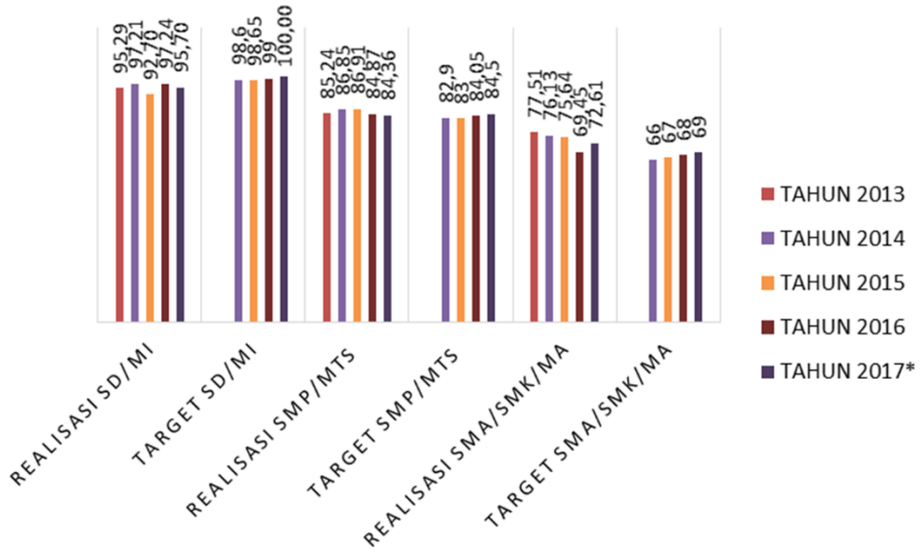

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.57 Angka Partisipasi Murni Provinsi Bali Tahun 2013-2017

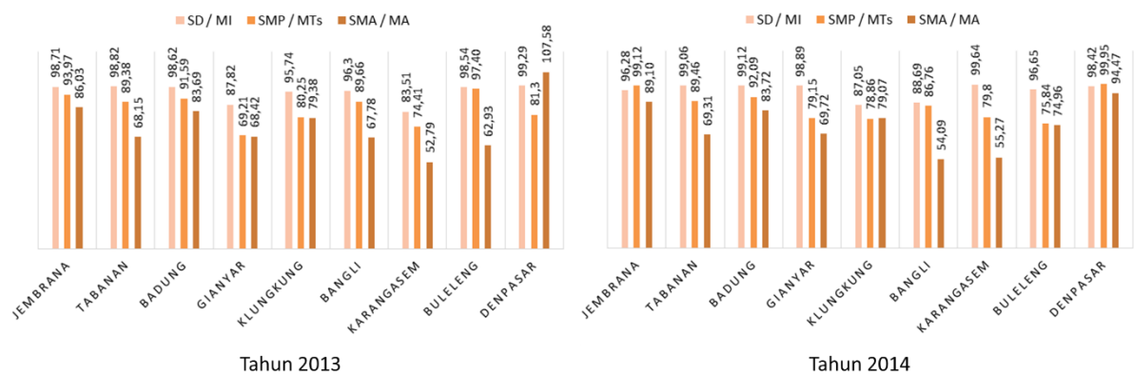

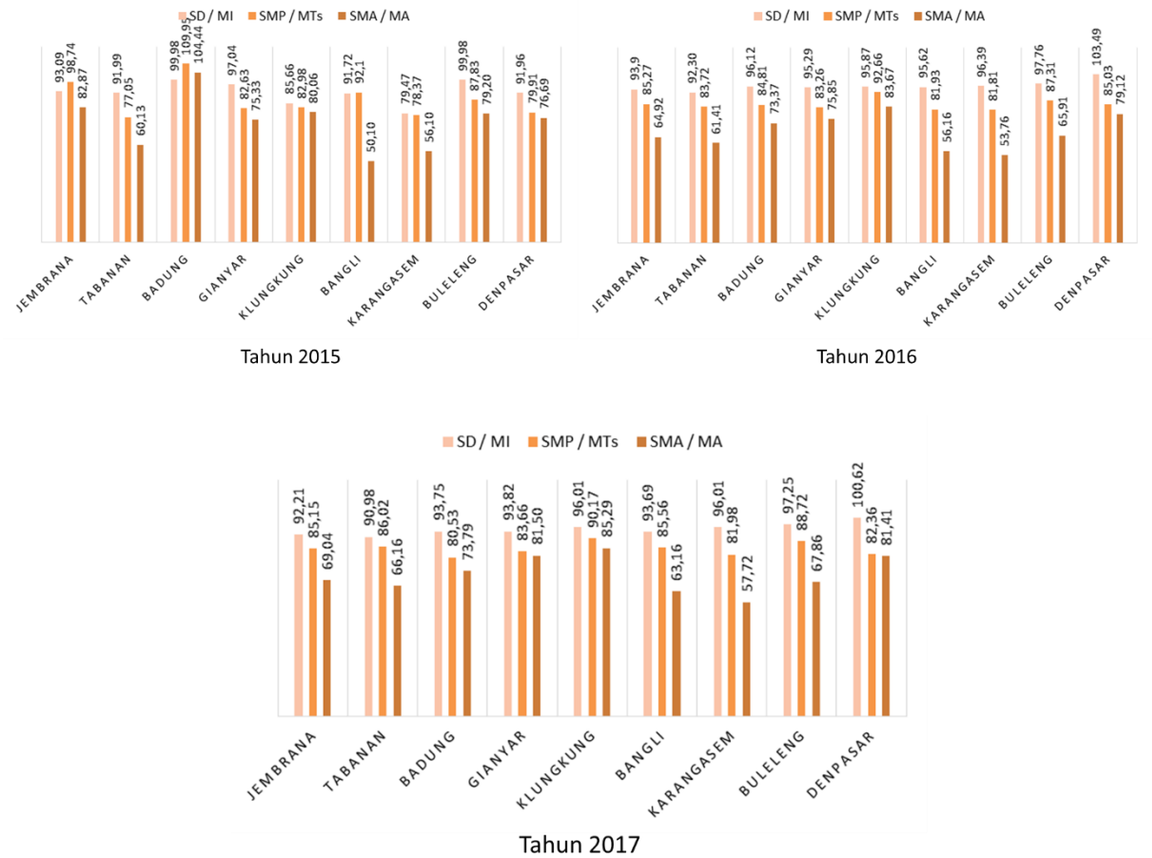

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.58 Angka Partisipasi Murni Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.1.5 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah untuk tingkat SD/MI Provinsi Bali berfluktuasi selama kurun waktu 2013- 2017. Pada tahun 2014, angka partisipasi sekolah SD/MI sebesar 103,85. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 mecapai 100,74. Angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 sebesar 108,7 dan kembali turun menjadi 108,14 pada tahun 2017. Selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017, angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI telah melebihi target yang ditetapkan dan lebih tinggi dari angka nasional.

Angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMP/MTs Provinsi Bali juga berfluktuasi selama kurun waktu 2013-2016. Pada tahun 2014, angka partisipasi sekolah SD/MI sebesar 120,91. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 mecapai 107,59. Angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2016 sebesar 114,52 dan kembali turun menjadi 112,57 pada tahun 2017. Selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017, angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI telah melebihi target yang ditetapkan dan lebih tinggi dari angka nasional.

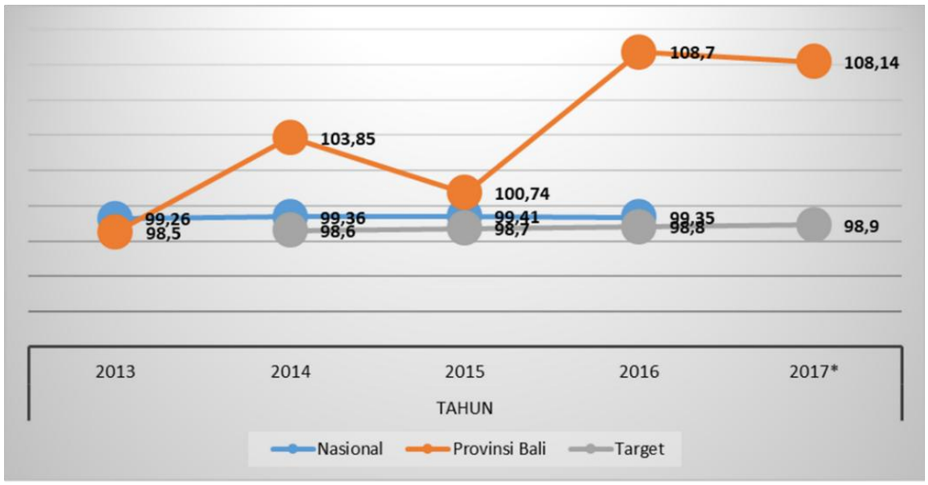

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.59 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Provinsi Bali Tahun 2013-2017

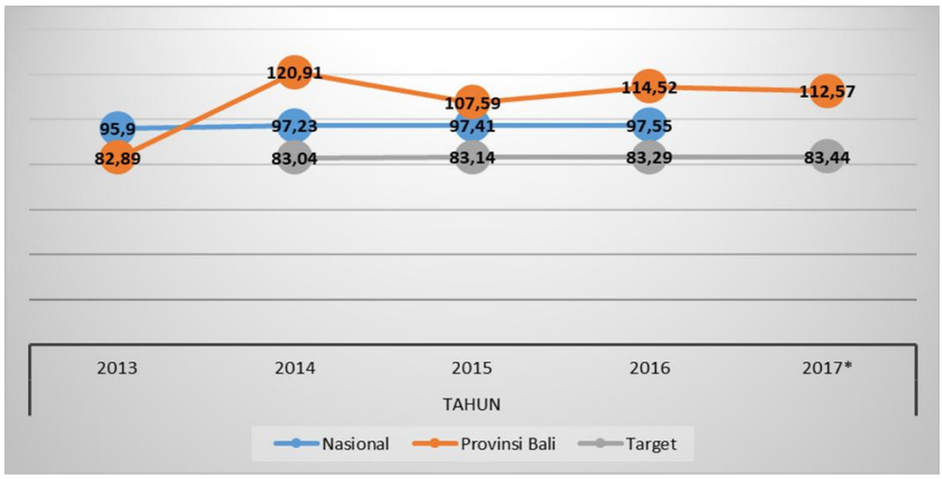

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.60 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.1.6 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah tingkat SD/MI cenderung mengalami penurunan dari 0,09 persen pada tahun 2013 turun menjadi 0,06 persen pada tahun 2016. Angka tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Angka putus sekolah tingkat SMP/MTS juga cenderung mengalami penurunan dari 0,17 persen pada tahun 2013 turun menjadi 0,11 persen pada tahun 2016. Angka tersebut juga telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 0,46 persen, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 sampai 2016 angka putus sekolah SMA/SMK/MA mulai mengalami penurunan mencapai 0,26 persen. Selama periode 2013-2016, angka putus sekolah SMA/SMK/MA belum mencapai target yang ditetapkan.

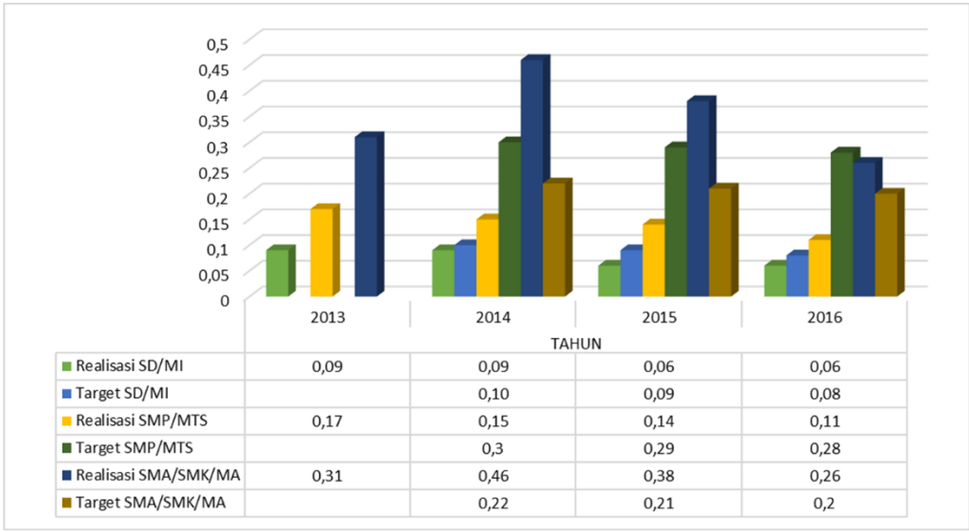

	2013	2014	2015	2016
Realisasi SD/MI	0,09	0,09	0,06	0,06
Target SD/MI		0,10	0,09	0,08
Realisasi SMP/MTS	0,17	0,15	0,14	0,11
Target SMP/MTS		0,3	0,29	0,28
Realisasi SMA/SMK/MA	0,31	0,46	0,38	0,26
Target SMA/SMK/MA		0,22	0,21	0,2

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.61 Angka Putus Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.5.1.1.7 Angka Kelulusan

Angka kelulusan tingkat SD/MI selama periode 2013-2016 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 persen. Tahun 2014 angka kelulusan tingkat SMP/MTS sebesar 99,61 persen, angka ini turun dari tahun sebelumnya yaitu 99,75 persen. Namun, mulai tahun 2015 sampai 2016 menunjukkan peningkatan mencapai 99,99 persen dan telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi angka kelulusan tingkat SMA/SMK/MA berfluktuasi selama periode 2013-2016 yaitu 99,95 persen, 99,97 persen, 99,82 persen, dan 99,99 persen. Target angka kelulusan belum mencapai target pada tahun 2015, namun tahun 2014 dan 2016 telah mencapai target yang ditetapkan.

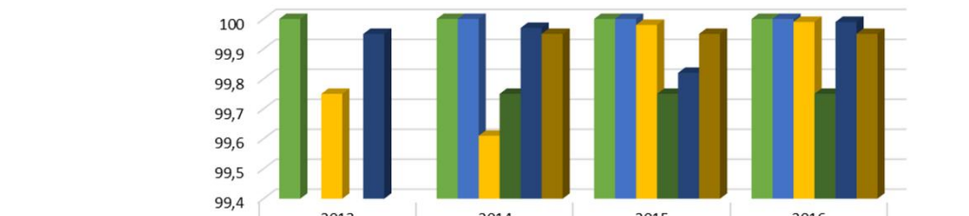

	2013	2014	2015	2016
Realisasi SD/MI	100	100	100	100
Target SD/MI		100	100	100
Realisasi SMP/MTS	99,75	99,61	99,98	99,99
Target SMP/MTS		99,75	99,75	99,75
Realisasi SMA/SMK/MA	99,95	99,97	99,82	99,99
Target SMA/SMK/MA		99,95	99,95	99,95

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.62 Angka Kelulusan di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.5.1.1.8 Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS mengalami fluktuasi. Tahun 2013 angka melanjutkan sebesar 80 persen meningkat menjadi 103,2 persen pada tahun 2014, namun sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 96,49 persen. Angka melanjutkan mulai meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 97,11 persen. Selama tahun 2014 sampai dengan 2017 angka kelulusan telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA juga mengalami fluktuasi. Selama periode 2013 sampai 2015 angka melanjutkan mengalami peningkatan mencapai 96,2 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016, namun kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 96,88 persen. Selama periode 2014 sampai 2017 angka melanjutkan telah melampui target yang ditetapkan.

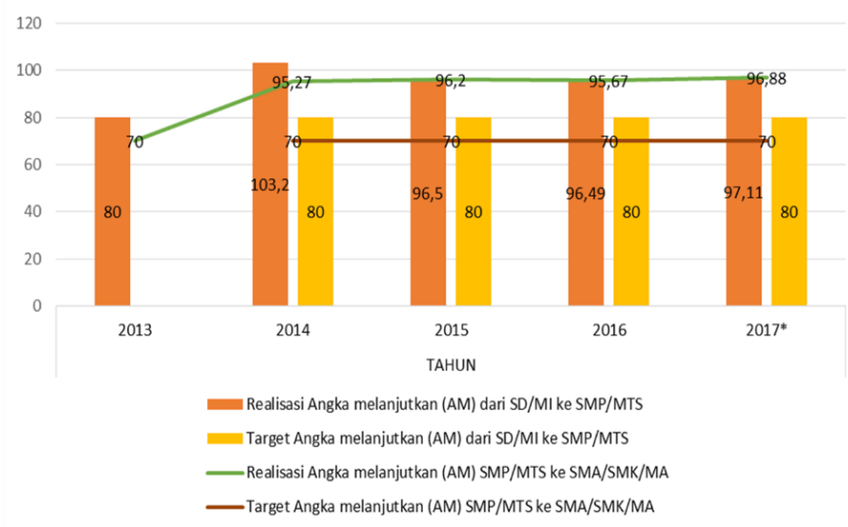

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.63 Angka Melanjutkan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.1.9 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan (kondisi ruang kelas baik) untuk tingkat SD/MI menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dari 56,03 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 77,57 persen pada tahun 2016. Pada tingkat SMP/MTS kondisi fasilitas pendidikan berfluktuasi selama 2013 sampai 2016, yaitu 84,23 persen; 68,24 persen; 85,80 persen; dan 68,24 persen. Kondisi fasilitas pendidikan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 50,58 persen dan meningkat menjadi 94,16 persen pada tahun 2015. Namun, mengalami penurunan menjadi 92,94 pada tahun 2016.

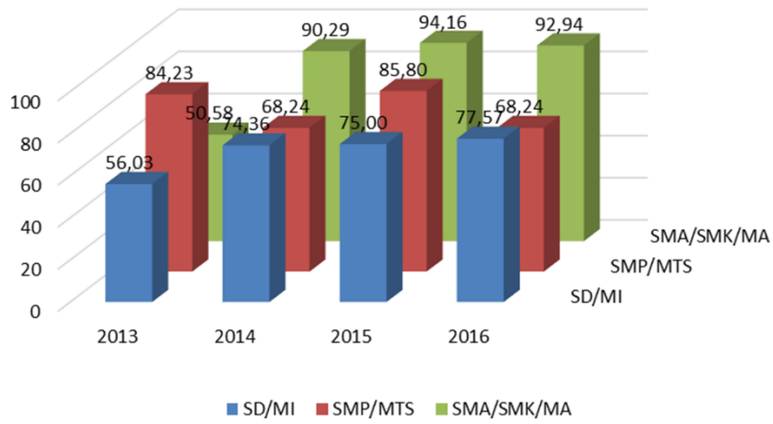

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.64 Fasilitas Pendidikan (Kondisi Ruang Kelas Baik) di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.5.1.1.10 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Jumlah SD/MI cenderung meningkat dari 2,478 pada tahun 2013 menjadi 2,503 pada tahun 2017. Jumlah SMP/MTs juga mengalami peningktan dari 429 pada tahun 2013 menjadi 439 pada tahun 2017. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun berfluktuasi selama lima tahun terakhir, yaitu 409,241; 393,156; 414,902; 385,62; dan 389,041. Sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun menunjukkan peningkatan dari 181,216 pada tahun 2013 menjadi 189,19 pada tahun 2015. Namun, mengalami penurunan menjadi 181,816 pada tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 183,302.

Tabel 2.17 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013-2017

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah SD/MI	2,478	2,478	2,484	2,496	2,503
Jumlah SMP/MTs	429	429	430	438	439
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	409,241	393,156	414,902	385,62	389,041
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	181,216	181,729	189,19	181,816	183,302

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.1.11 Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI selama kurun waktu 2013 sampai 2017 berfluktuasi sebesar 60,55; 63,03; 59,87; 64,73; dan 64,34. Realisasi tersebut pada tahun 2015 belum mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2014, 2016, dan 2017 telah mencapai target yang

ditetapkan. Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 hingga mencapai 22,73. Angka realisasi tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi 24,09, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai 23,95. Selama kurun waktu 2014 sampai 2017 angka realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA selama periode 2013 sampai 2017 berfluktuatif sebesar 20,07; 21,15; 20,69; 20,11; dan 20,04. Realisasi rasio ketersediaan sekolah belum mencapai target yang ditetapkan selama tahun 2015 sampai 2017.

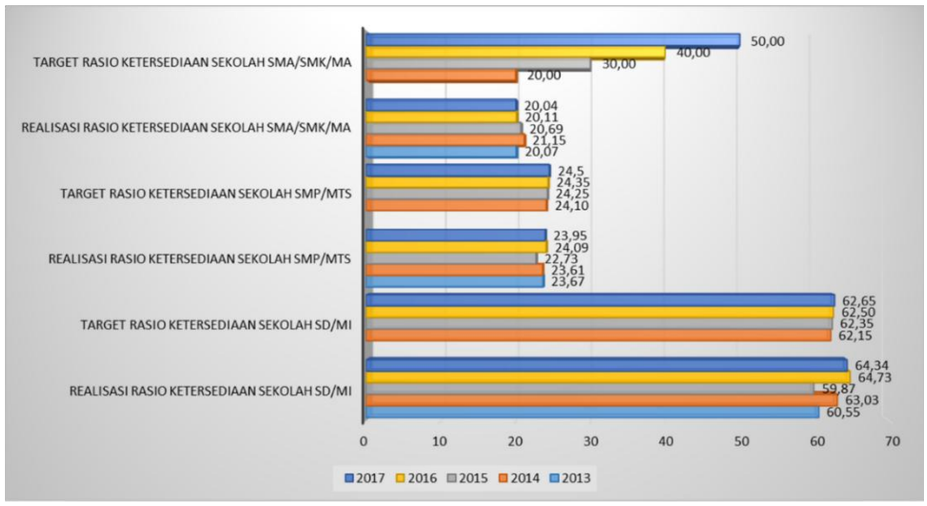

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.65 Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.1.12 Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid untuk tingkat SD/MI terus meningkat dari 58,38 pada tahun 2013 menjadi 66,09 pada tahun 2017. Selama kurun waktu 2013 sampai 2015 rasio guru terhadap murid tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan mencapai 67,17, namun cenderung menurun menjadi 65,37 pada tahun 2017. Rasio guru terhadap murid untuk tingkat SMA/SMK/MA mengalami penurunan dari 97,10 pada tahun 2013 menjadi 80,07 pada tahun 2017.

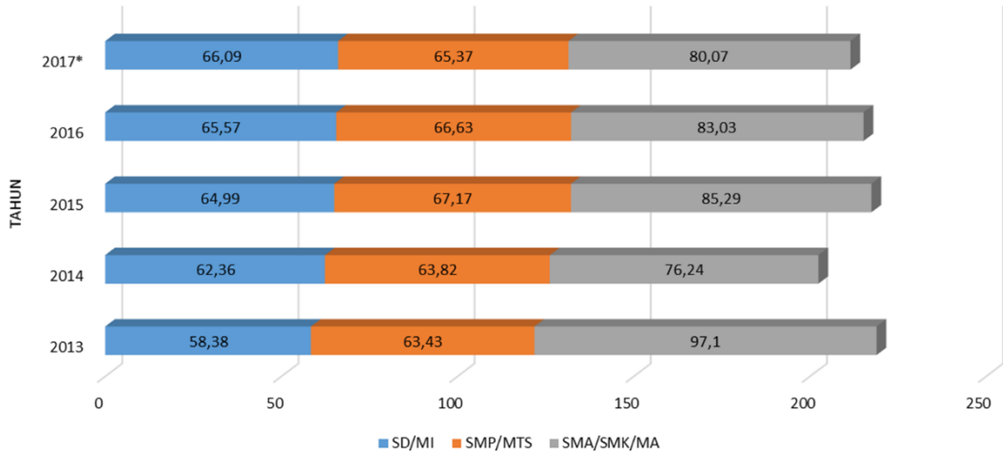

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.66 Rasio Guru Terhadap Murid di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Rasio guru murid per kelas rata-rata untuk tingkat SD/MI pada tahun 2013 yaitu 0,05 persen cenderung turun menjadi 0,04 persen selama tahun 2014 sampai 2017. Untuk tingkat SMP/MTS, rasio guru murid per kelas rata-rata berfluktuatif selama 2013 sampai 2017 yaitu 0,14 persen, 0,11 persen, 0,13 persen, 0,13 persen dan 0,09 persen. Rasio guru murid untuk tingkat SMA/SMK/MA selama tahun 2013 sampai 2017, yaitu 0,20 persen, 0,17 persen, 0,19 persen, 0,17 persen, dan 0,16 persen. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar mengalami fluktuasi selama 2013 sampai 2016, yaitu 83,90 persen, 79,50 persen, 93,41 persen, dan 91,06 persen.

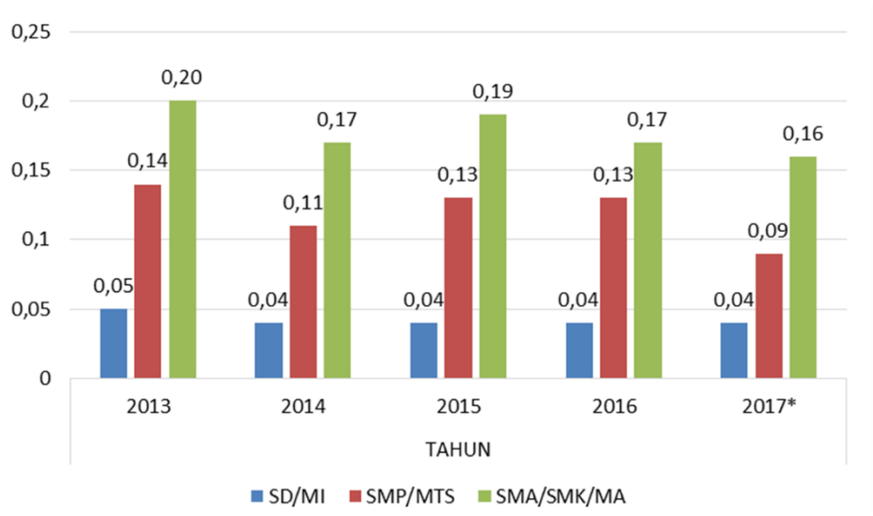

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.67 Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

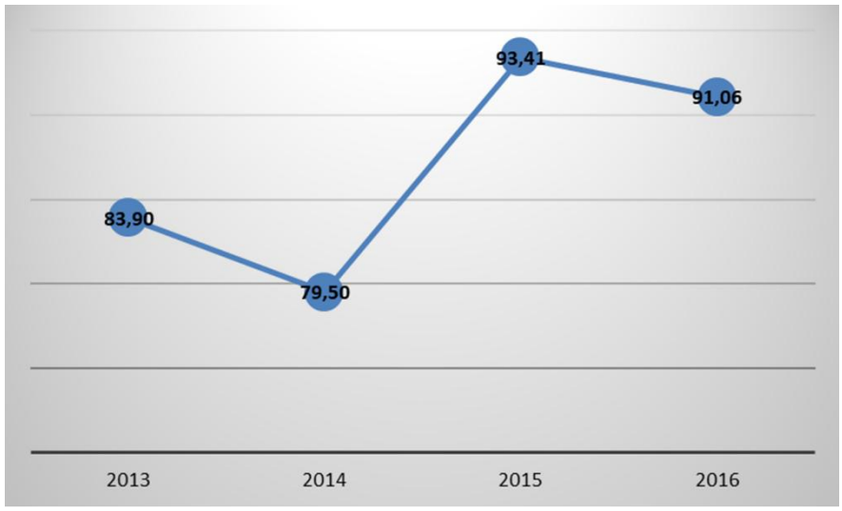

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.68 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.5.1.1.13 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Provinsi Bali cenderung meningkat dari 91,03 pada tahun 2013 menjadi 92,98 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2018, angka melek huruf tertinggi ada di Kota Denpasar sebesar 98,02. Sedangkan, angka melek huruf terendah pada tahun 2018 ada di Kabupaten Karangasem sebesar 84.91.

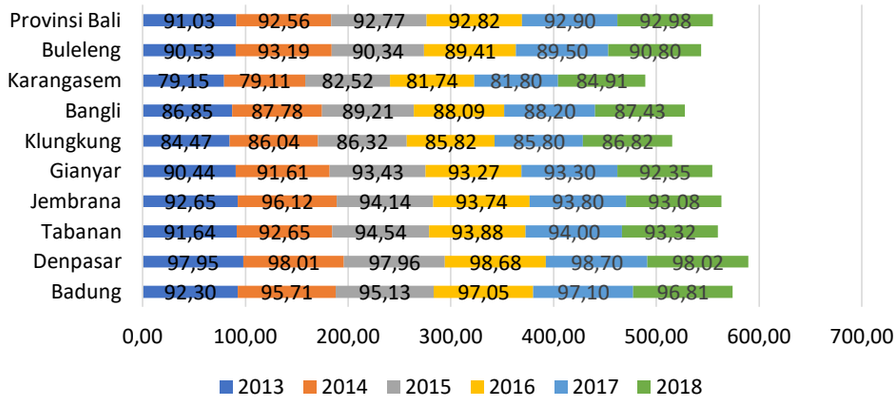

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.69 Angka Melek Huruf di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Dari tren angka melek huruf tahun 2013-2018 dapat dilihat bahwa angka melek huruf perempuan masih berada dibawah angka melek huruf laki-laki. Tercatat pada tahun 2016, angka melek huruf laki-laki sebesar 99,88 dan perempuan sebesar 99,81. Hal ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam hal baca dan tulis di Provinsi Bali antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebannya adalah belum meratanya

akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Provinsi Bali. Namun, pada tahun 2017 tercatat angka melek huruf laki-laki dan perempuan telah setara yaitu 99,83.

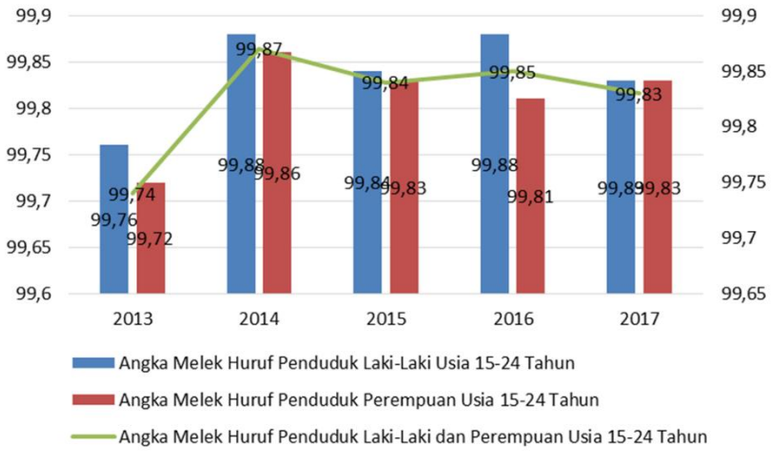

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.70 Angka Melek Huruf Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2013-2017

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) menunjukkan peningkatan dari 91,03 pada tahun 2013 menjadi 92,90 pada tahun 2017 hal ini disebabkan oleh gencarnya pembinaan pendidikan ke desa – desa.

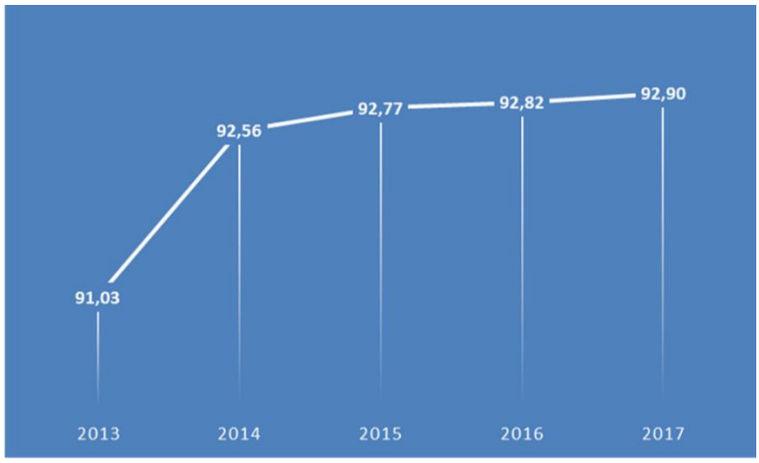

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.71 Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf (tidak Buta Aksara) Tahun 2013-2017

2.5.1.1.14 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 terus meningkat dari 26,56 pada tahun 2013 menjadi 73,81 pada tahun 2017. Kecenderungan peningkatan juga terjadi pada guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 untuk tingkat SD/MI yaitu dari 73,31 pada tahun 2013 menjadi 92,23 pada tahun 2017. Pada tahun 2013 guru SMP/MTs yang

memenuhi kualifikasi S1/D4 yaitu 89,52 terus meningkat menjadi 95,07 pada tahun 2017. Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D4 juga meningkat dari 94,24 pada tahun 2013 menjadi 97,06 pada tahun 2017.

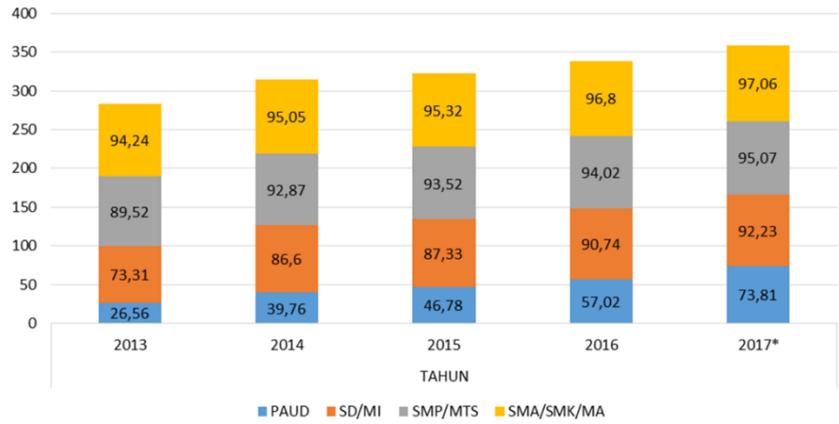

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.72 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2 Kesehatan

2.5.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH) di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017 yaitu 5,5; 5,9; 5,70; 6,01 dan 4,8. Pada tahun 2017, Jumlah kematian bayi absolut tertinggi ada di Kabupaten Gianyar sebesar 60, sedangkan terendah ada di Kota Denpasar yaitu 11.

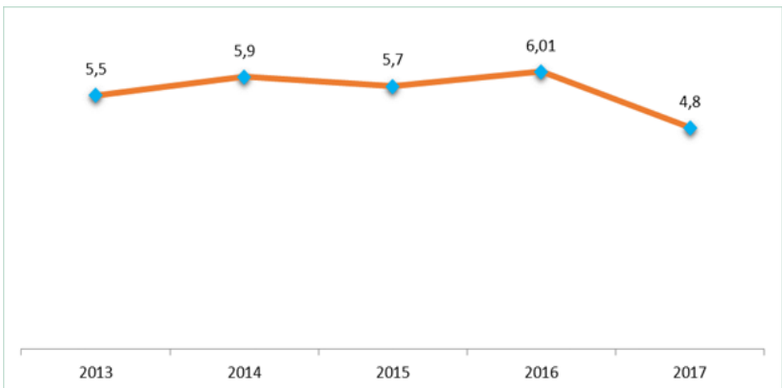

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.73 Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.2 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017 yaitu sebesar 5,97; 6,67; 6,4 6,83 dan 5,6. Jumlah kematian

balita tertinggi pada tahun 2017 yaitu ada di Kabupaten Gianyar sebesar 74. Sedangkan, jumlah kematian balita terendah ada di Kota Denpasar yaitu 15.

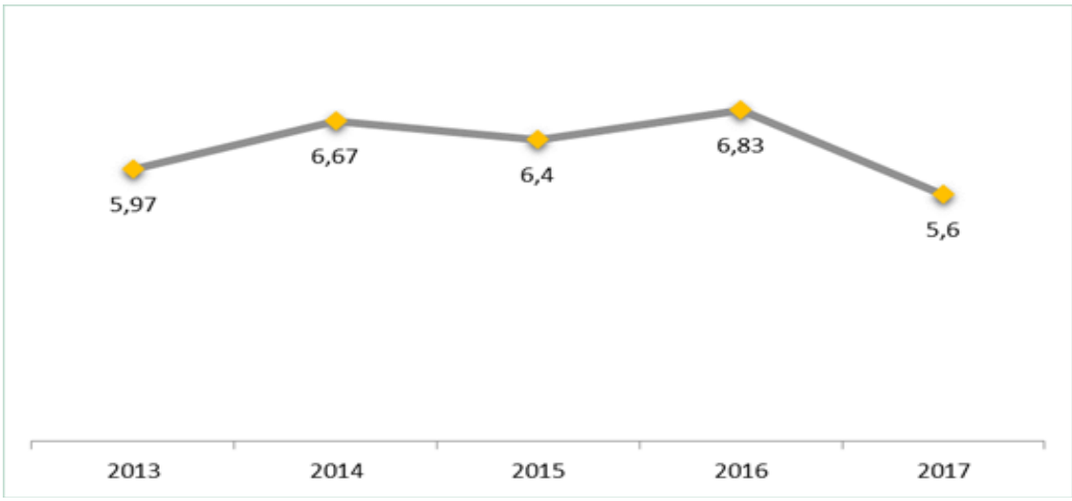

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.74 Angka Kematian Balita per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.3 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 3,47. Angka tersebut meningkat menjadi 4,50 pada tahun 2015 dan mengalai penurunan menjadi 4,41, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 4,22 dan di tahun 2017 kembali menurun menjadi 3,19.

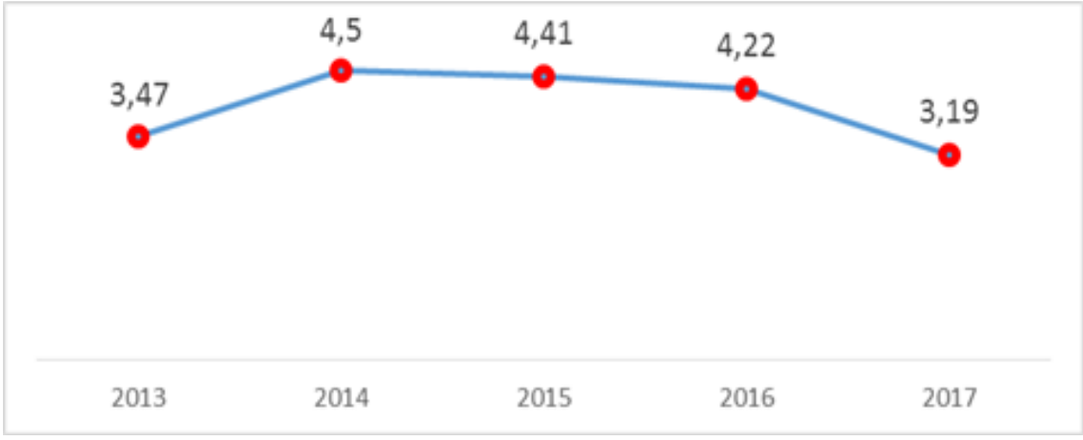

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.75 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, angka kematian ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali berfluktiasi yaitu 72,1;70,05 83,41; 78,72 dan 68,60. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2017 yaitu 9. Sedangkan, jumlah kematian ibu terendah pada tahun 2017 ada di Kabupaten Klungkung yaitu 2.

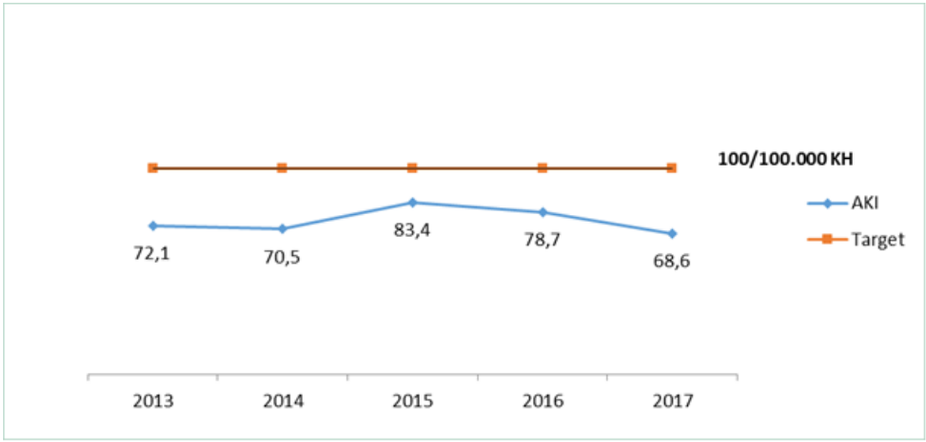

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.76 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio posyandu per balita pada tahun 2013 sebesar 14,038, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 1,46. Rasio tersebut cenderung meningkat menjadi 1,47 pada tahun 2016. Namun, mengalami penurunan menjadi 1,45 pada tahun 2017.

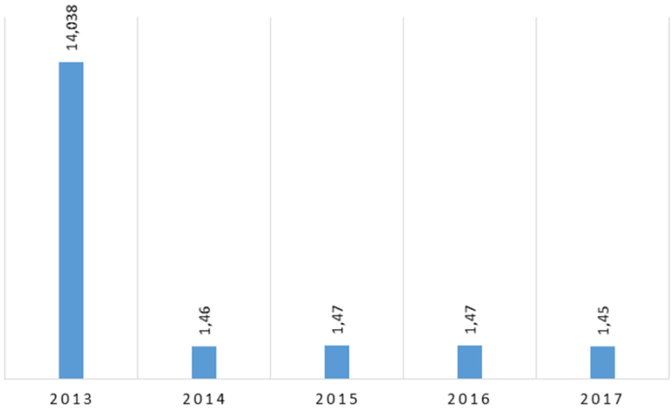

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.77 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provisni Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.6 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 Penduduk

Rasio puskesmas per 1000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 0,03 dan selama tahun 2014 sampai 2017 sebesar 0,029. Pada tahun 2013, rasio poliklinik per 1000 penduduk sebesar 0,032 dan mengalami penurunan menjadi 0,011 pada tahun 2014. Namun, meningkat menjadi 0,021 selama kurun waktu 2015 sampai 2017. Rasio pustu per 1000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 0,13 dan selama kurun waktu 2014 sampai 2017 sebesar 0,125.

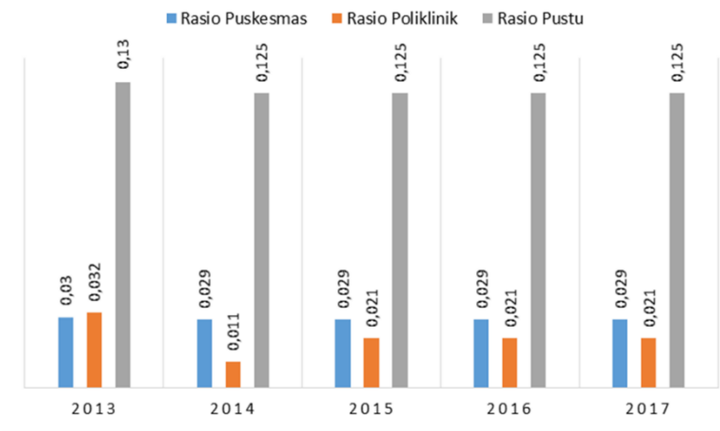

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.78 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Provisni Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.7 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 79,463. Rasio tersebut turun menjadi 74,635 pada tahun 2014. Namun, selama kurun waktu 2015 sampai 2017, rasio rumah sakit per satuan penduduk terus mengalami peningkatan hingga mencapai 77,21.

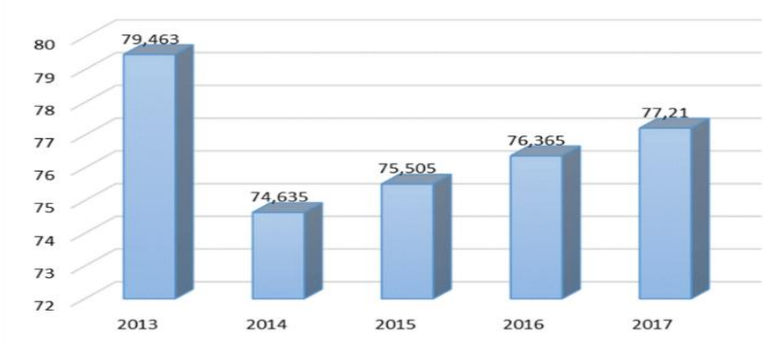

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.79 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.8 Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk mengalami penurunan dari 2.568 pada tahun 2013 menjadi 2.192 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, rasio dokter sebesar 3.621 mengalami peningkatan menjadi 4.102 pada tahun 2016. Namun, rasio dokter per satuan penduduk mengalami penurunan menjadi 2.991 pada tahun 2017. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah dokter terbesar pada tahun 2017 yaitu Kota

Denpasar sebesar 419 dokter dan yang terendah yaitu Kabupaten Klungkung sebesar 34 dokter.

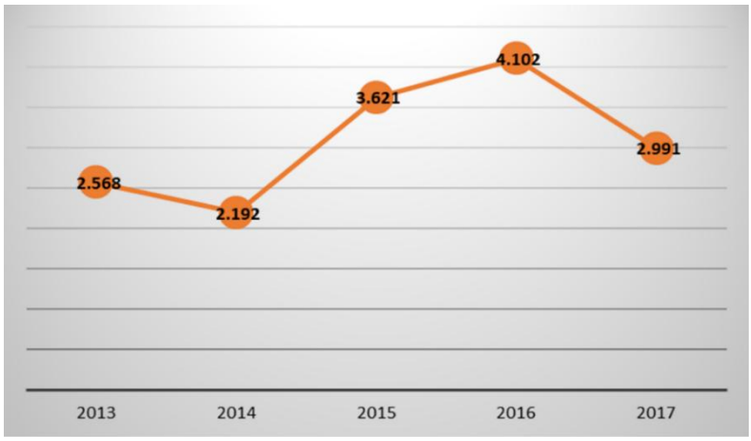

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.80 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2013 - 2017

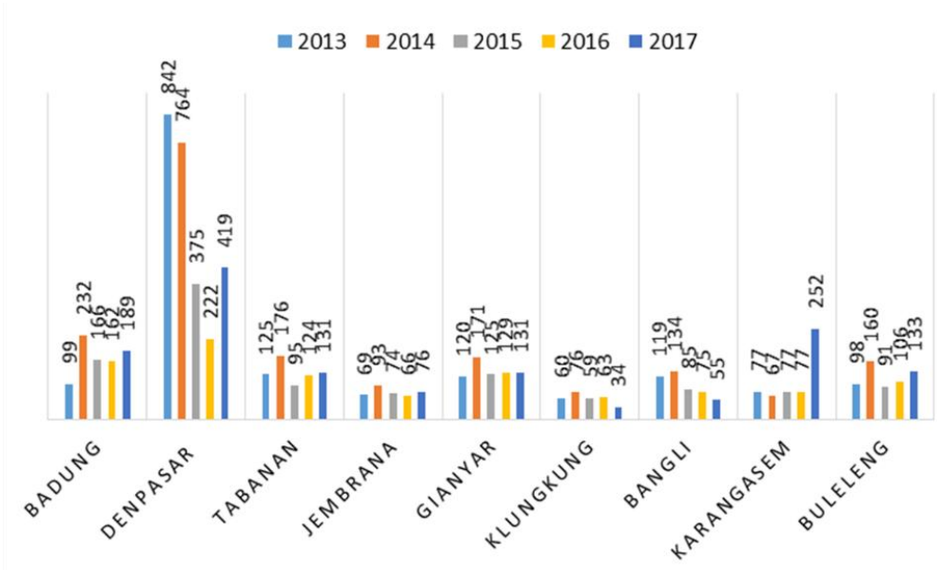

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.81 Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

2.5.1.2.9 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga perawat selama kurun waktu 2013 sampai 2017 terus mengalami penurunan. Rasio tenaga perawat tahun 2013 sebesar 832 terus mengalami penurunan menjadi 544 pada tahun 2017. Rasio tenaga bidan mengalami peningkatan dari 1.441 tahun 2013 menjadi 1.473 pada tahun 2014. Namun, rasio tenaga bidan terus mengalami penurunan mencapai 947 pada tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah perawat terbesar ada di Kota Denpasar yaitu 2.444 perawat dan yang terendah ada di Kabupaten Jembrana yaitu 302 perawat. Tenaga bidan terbesar pada tahun 2017 ada

di Kota Denpasar yaitu 916 bidan dan yang terendah ada di Kabupaten Klungkung yaitu 248 bidan.

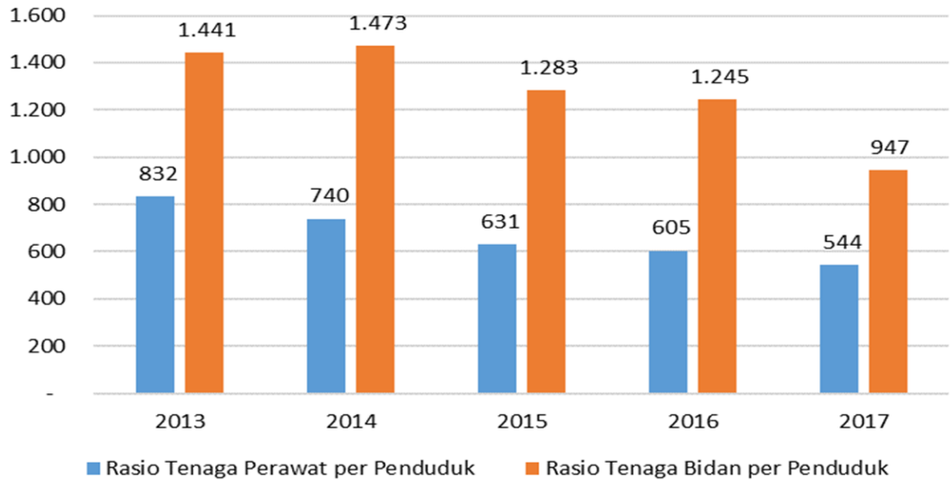

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.82 Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Tabel 2.18 Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

Kab/Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
	Perawat	Bidan	Perawat	Bidan	Perawat	Bidan	Perawat	Bidan	Perawat	Bidan
Badung	374	233	383	255	906	273	593	273	1022	365
Denpasar	1.745	520	2.057	529	2.302	668	2.850	680	2.444	916
Tabanan	598	449	649	330	649	420	739	319	838	553
Jembrana	170	205	167	222	320	262	246	257	302	302
Gianyar	330	307	716	369	669	459	526	499	840	505
Klungkung	302	217	275	199	325	225	336	253	349	248
Bangli	500	240	523	267	571	293	563	289	362	287
Karangasem	306	313	220	210	278	255	343	313	1.052	818
Buleleng	640	383	560	405	565	383	752	490	600	492

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2013 sebesar 75,60 persen. Cakupan tersebut meningkat menjadi 76,40 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 74,96 persen. Namun, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai 77,60 persen. Selama kurun waktu 2013 sampai 2016, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 80 persen.

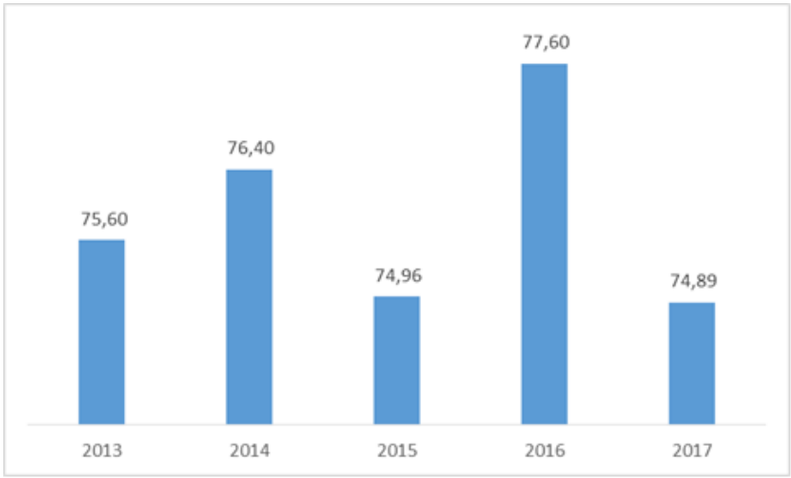

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.83 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.11 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Tabel 2.19 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

KAB/KOTA/PROV	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	95,7	99,7	94,2	95,7	80,1
Bangli	94,9	92,1	92,8	94,2	89,5
Buleleng	95	100,7	98,6	96,7	93,5
Denpasar	100	100	99,9	101	99,6
Gianyar	93,4	89,3	94,8	94,6	92,8
Jembrana	94,9	103	102,9	97,8	91,9
Karangasem	95,6	93,9	95,3	92,6	101
Klungkung	94,9	93,9	95,8	93,2	104,7
Tabanan	97,7	96,4	99,3	94,4	92,7
Provinsi Bali	96,52	97,54	97,49	96,40	93,6

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Ibu hamil yang ditolong tenaga kesehatan berfluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2017, yaitu 96,52 persen, 97,54 persen, 97,49 persen, 96,40 persen dan 93,6 persen. Pada tahun 2017, ibu hamil yang ditolong persalinannya oleh tenaga kesehatan tertinggi ada di Kabupaten Klungkung yaitu 104,7 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Badung yaitu 80,1 persen.

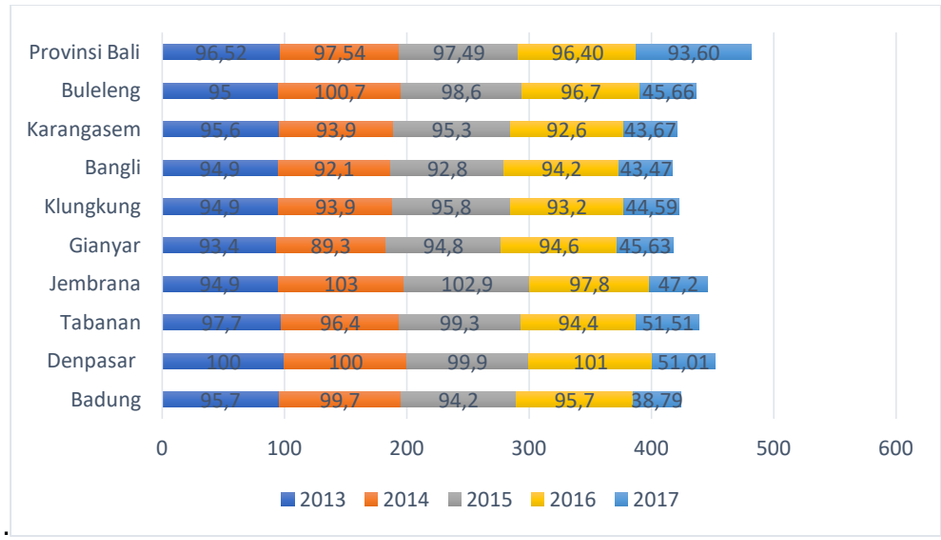

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.84 Persentase Ibu Hamil Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2013-2017

2.5.1.2.12 Cakupan Desa/Keluharan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI cenderung mengalami peningkatan selama periode 2013 sampai 2017. Pada tahun 2013, cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 95,9 persen meningkat menjadi 99 persen pada tahun 2017. Selama kurun waktu 2013 sampai 2017 cakupan desa/kelurahan UCI belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 persen.

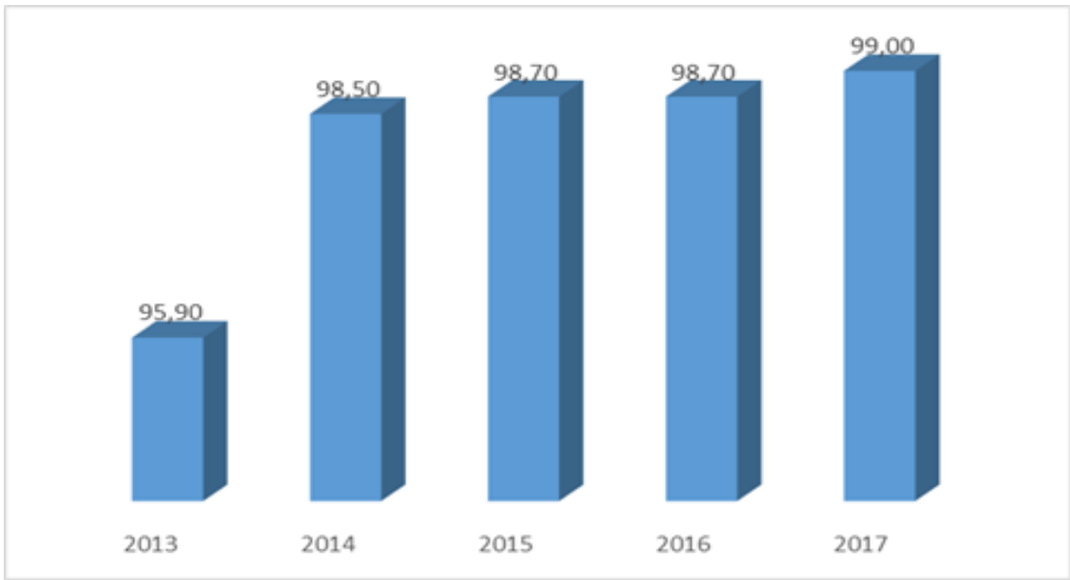

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.85 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.13 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di provinsi bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017 telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

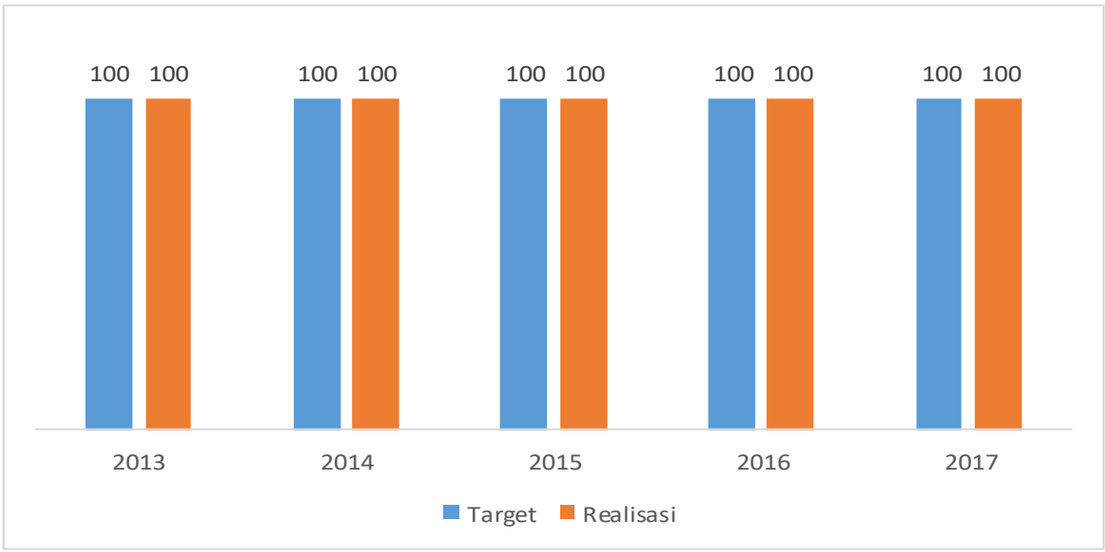

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.86 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.14 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

Persentase balita usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif meningkat dari 33,8 persen pada tahun 2013 menjadi 60 persen pada tahun 2016. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 59,7 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, balita usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif terbesar yaitu 69,5 persen di Kabupaten Badung dan terendah sebesar 47,6 persen di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana.

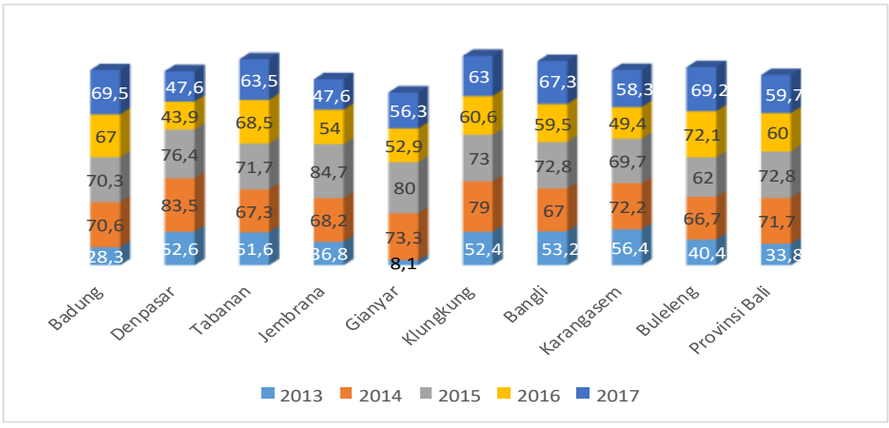

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.87 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2013-2017

2.5.1.2.15 Jumlah Balita Ditimbang

Jumlah balita yang ditimbang mengalami peningkatan dari 156,575 pada tahun 2013 menjadi 209,206 pada tahun 2017. Jumlah balita yang ditimbang terbesar pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Buleleng sebesar 53,550 dan yang terendah yaitu Kabupaten Klungkung sebesar 10,684.

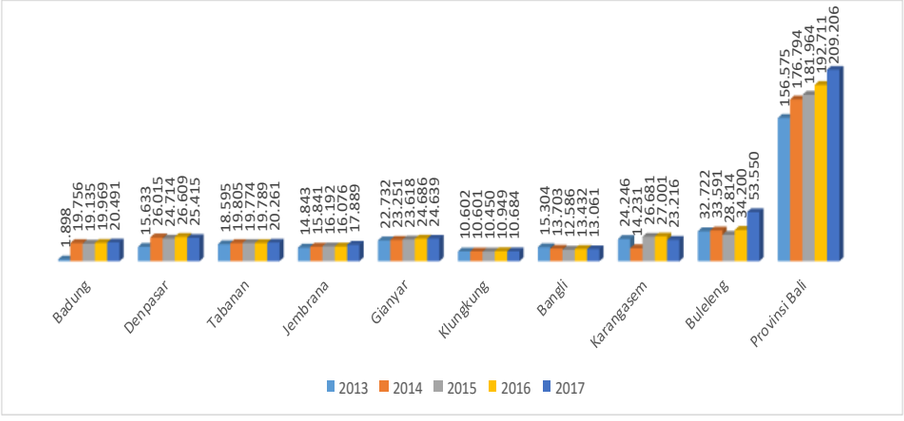

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.88 Jumlah Balita Ditimbang Tahun 2013-2017

2.5.1.2.16 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Tabel 2.20 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunasi campak

KAB/KOTA/PROV	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	109,4	109,9	104,9	103,9	96,4
Bangli	98,7	100,4	97,3	99,9	96,3
Buleleng	98,2	103,2	101,2	102,1	94,9
Denpasar	108,4	101,1	95,6	94,6	94,1
Gianyar	96,2	97,6	99,4	101,6	102,2
Jembrana	102,8	102,3	110,8	103,8	98,7
Karangasem	98,5	97,4	100.8	95,8	103,98
Klungkung	101,2	98,1	100,4	103,8	62,9
Tabanan	94,7	104,6	101,6	104,6	94,0
Provinsi Bali	99,09	101,85	100,55	99,98	95,50

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Persentase cakupan imunisasi campak selama kurun waktu 2013 sampai 2016 sebesar 99,09 persen, 101,85 persen, 100,55 persen, dan 99,98 persen. Kabupaten Jembrana menjadi Kabupaten dengan cakupan imunisasi campak terbesar tahun 2017 yaitu sebesar 69,2 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Gianyar dengan 51 persen.

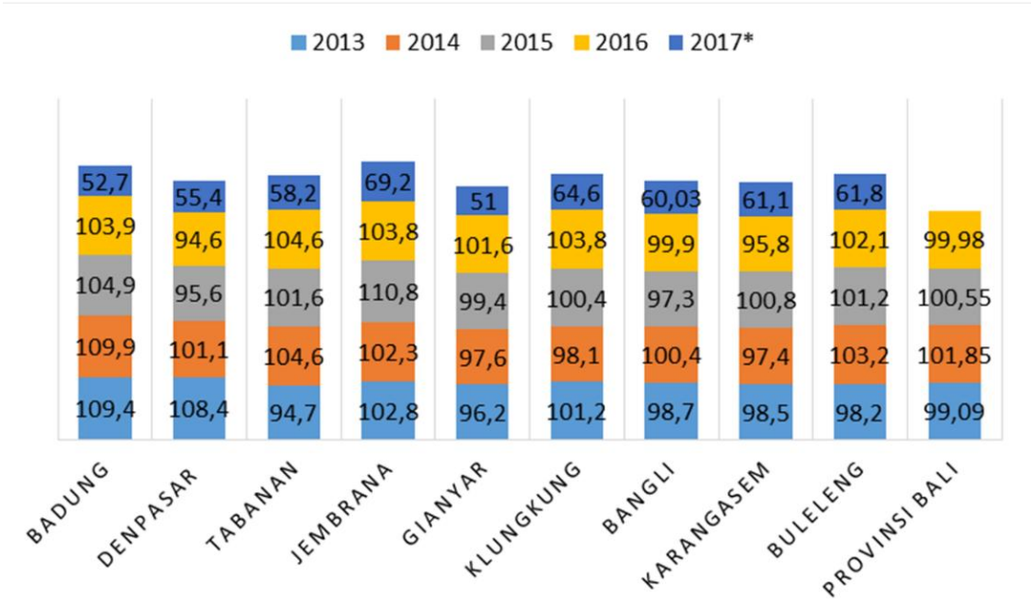

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.89 Persentase Cakupan Imunisasi Campak Tahun 2013-2017

2.5.1.2.17 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk berfluktuatif selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Tahun 2013, non polio AFP Rate per 100.000 penduduk sebesar 3,9 dan meningkat menjadi 4,1 pada tahun 2014. Namun, menurun menjadi 3,2 pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 3,7 pada tahun 2016. Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk kembali mengalami penurunan menjadi 2,4 pada tahun 2017.

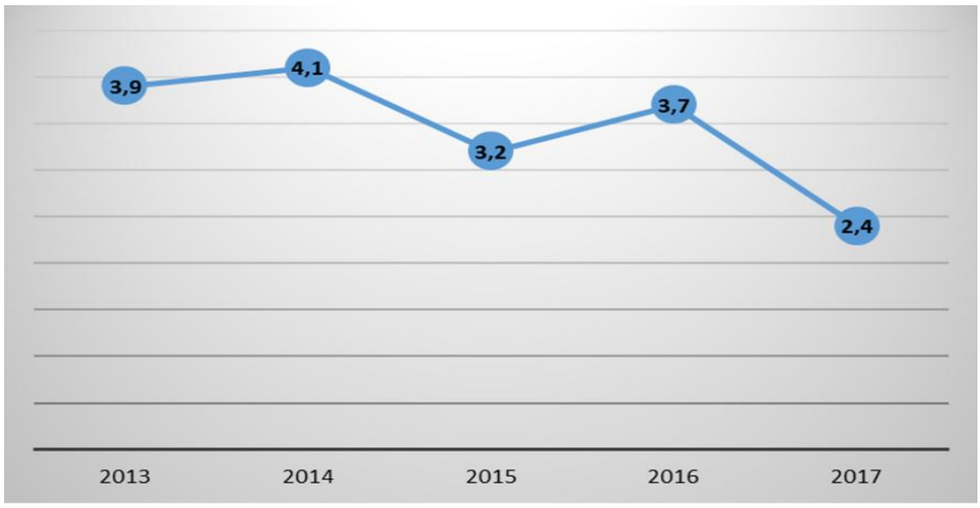

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.90 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.18 Cakupan Balita Pneuminoa Yang Ditangani

Cakupan balita pneuminoa yang ditangani selama tahun 2013 sampai 2017 berfluktuatif, yaitu 13,63, 12,44, 5,32, 96,68 dan 14,30. Cakupan terbesar pada tahun 2017 ada di Kabupaten Gianyar mencakup 28,80 dan yang terendah ada di Kabupaten Bangli yaitu 2,60.

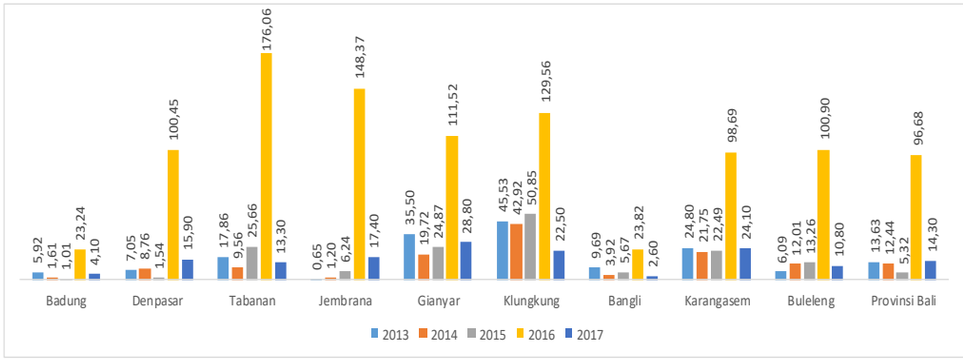

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.91 Cakupan Balita Pneuminoa Yang Ditangani Tahun 2013-2017

2.5.1.2.19 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 11,82. Cakupan tersebut mengalami penurunan menjadi 11,38 pada tahun 2014. Namun, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA mengalami peningkatan sampai tahun 2017 hingga mencapai 32,89. Kabupaten Karangasem menjadi Kabupaten dengan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA terendah di Provinsi Bali pada tahun 2017 yaitu 2,17 atau tidak ada penemuan dan penanganan penderita TBC BTA. Kota Denpasar menjadi kota dengan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 55,20.

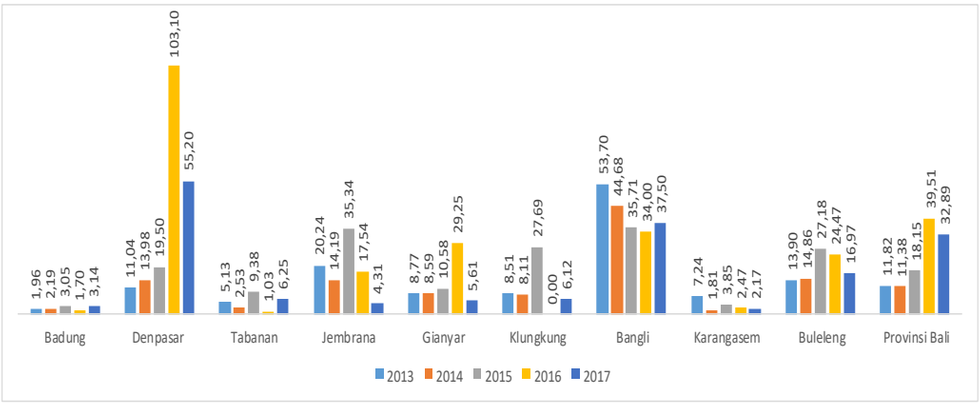

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.92 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Jumlah kasus TBC yang dilaporkan di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017 berfluktuasi, sebesar 2.999 kasus, 3.034 kasus, 2.878 kasus, 3.133 kasus dan 3,499 kasus. Pada tahun 2017, jumlah kasus TBC yang dilaporkan yang terbesar ada di Kota Denpasar sebesar 1.251 kasus dan yang terendah ada di Kabupaten Bangli sebesar 67 kasus.

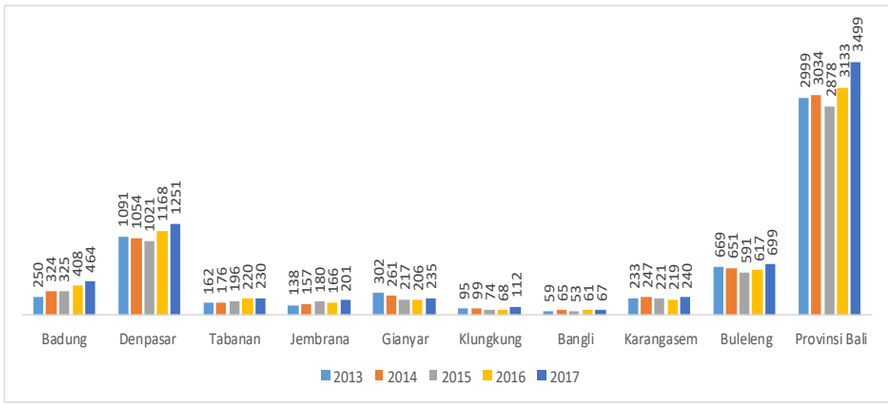

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.93 Jumlah Kasus TBC yang Dilaporkan Tahun 2013-2017

2.5.1.2.20 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013-2016 tahun 2014 sebesar 73,91 per 100.000 penduduk, angka tersebut meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 72,58 persen. Pada tahun 2015 tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk di Provinsi Bali mengalami penurunan mencapai 69,30, namun kembali meningkat sebesar 74,59 pada tahun 2016. Sedangkan di Tahun 2017 kembali meningkat dari tahun 2016 yaitu mencapai 82,40 per 100.000 penduduk. Kabupaten yang memiliki tingkat prevalensi tuberkulosis terendah tahun 2017 yaitu di Kabupaten Bangli sebesar 27,26 persen. Tingkat prevalensi tuberkulosis tertinggi pada tahun 2017 ada di Kota Denpasar dengan 130,17 persen.

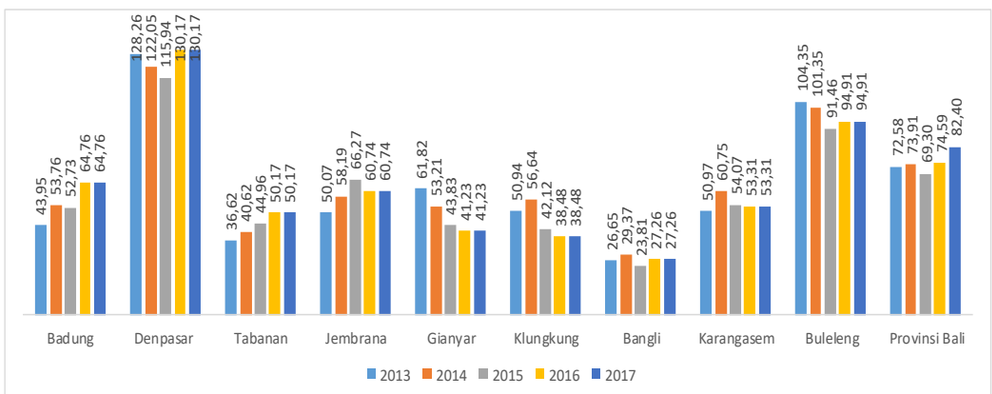

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.94 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.21 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Tingkat kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk di Provinsi Bali cenderung menurun dari 3,17 per 100.000 Penduduk tahun 2013 menjadi 2,14 per 100.000 Penduduk pada tahun 2015. Namun, tingkat kematian karena tuberkulosis meningkat menjadi 4,6 per 100.000 Penduduk pada tahun 2017. Kabupaten Klungkung menjadi kabupaten dengan tingkat kematian karena tuberkulosis terendah di Provinsi Bali tahun 2017 yaitu 1,13 per 100.000 Penduduk. Kabupaten Jembrana menjadi kabupaten dengan tingkat kematian karena tuberkulosis tertinggi di Provinsi Bali tahun 2017 yaitu 4,37 per 100.000 Penduduk.

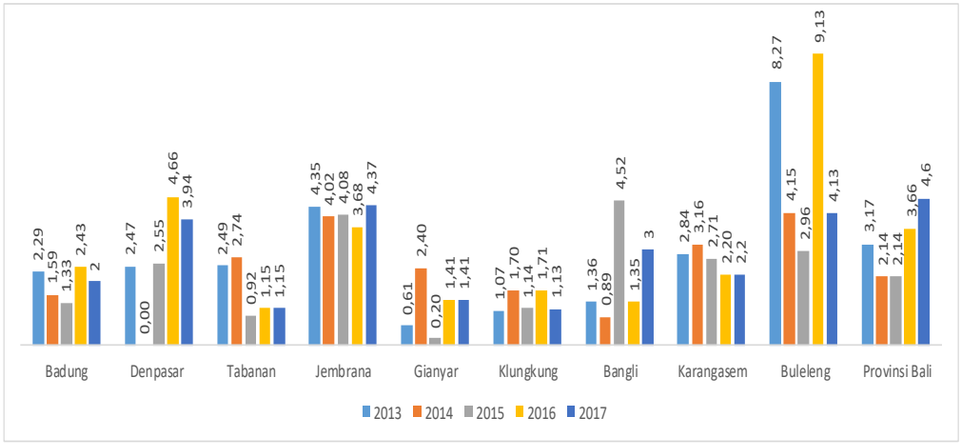

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.95 Tingkat kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.22 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Provinsi Bali tahun 2014 sebesar 11,38 persen, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebesar 11,82 persen. Namun, sampai dengan tahun 2016 jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami peningkatan hingga mencapai 39,51 persen. Kota Denpasar memiliki proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi pada tahun 2016 yaitu 103,10 persen. Namun, Klungkung memiliki proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah pada tahun 2016 yaitu 0,00 persen.

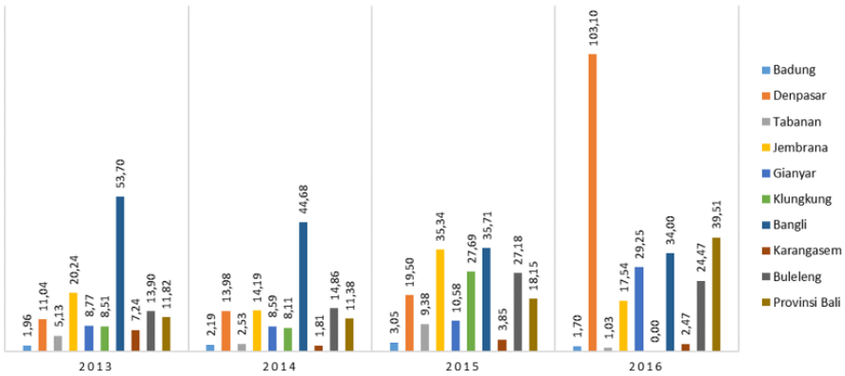

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.96 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang terdeteksi DOTS di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.5.1.2.23 Proporsi Kasus TBC Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2016 berfluktuasi, yaitu sebesar 74,97 persen, 76,12 persen, 70,37 persen, dan 77,59 persen. Kabupaten Badung menjadi Kabupaten tertinggi untuk proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS pada tahun 2016 yaitu sebesar 94,32 persen. Sedangkan, Kabupaten Bangli menjadi kabupaten terendah untuk proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS pada tahun 2016 yaitu sebesar 30,00 persen.

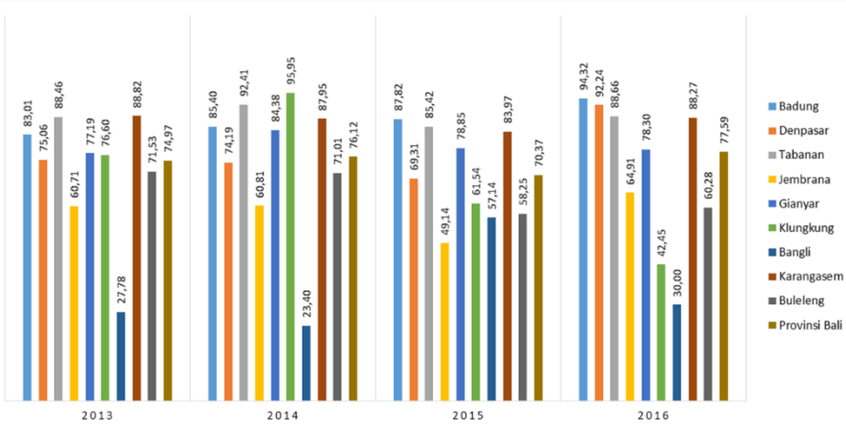

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.97 Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.5.1.2.24 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kasus DBD yang dilaporkan di Provinsi

Bali meningkat dari 7.077 kasus pada tahun 2013 menjadi 21.668 kasus pada tahun 2016. Namun, mengalami penurunan menjadi 3.524 kasus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, kasus DBD yang dilaporkan terbesar terjadi di Kota Denpasar sebesar 835 kasus dan yang terendah terjadi di Kabupaten Jembrana yaitu 101 kasus. Incidence rate kasus DBD per 100.000 penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 515,9.

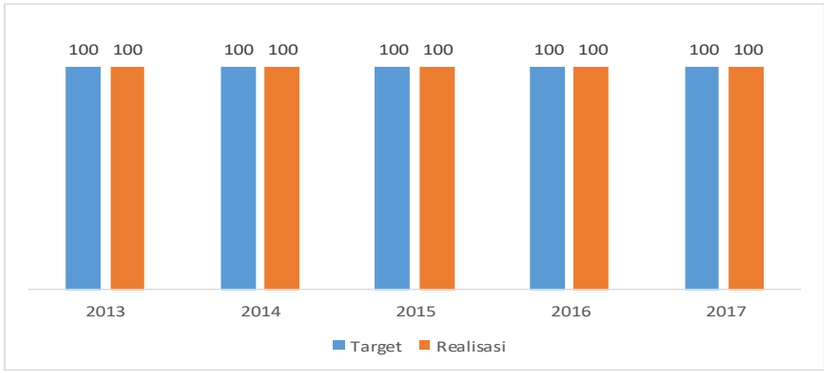

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.98 Cakupan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

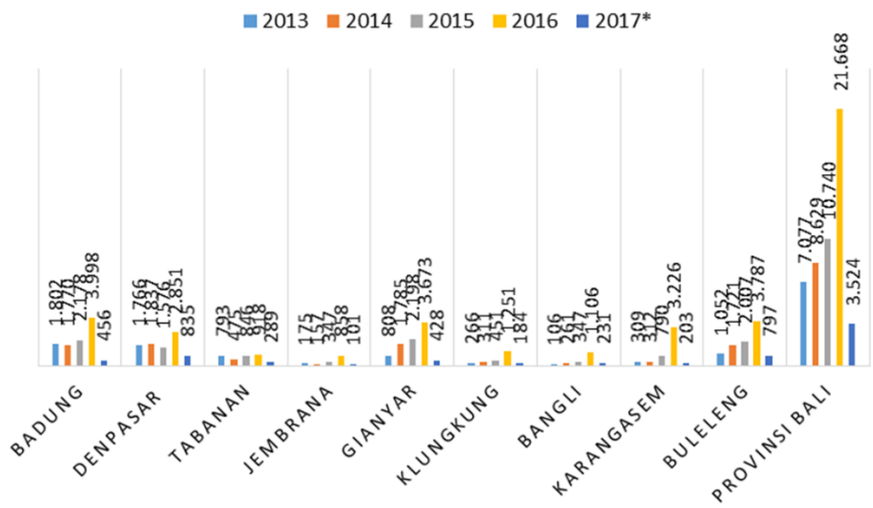

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.99 Kasus DBD yang Dilaporkan Tahun 2013-2017

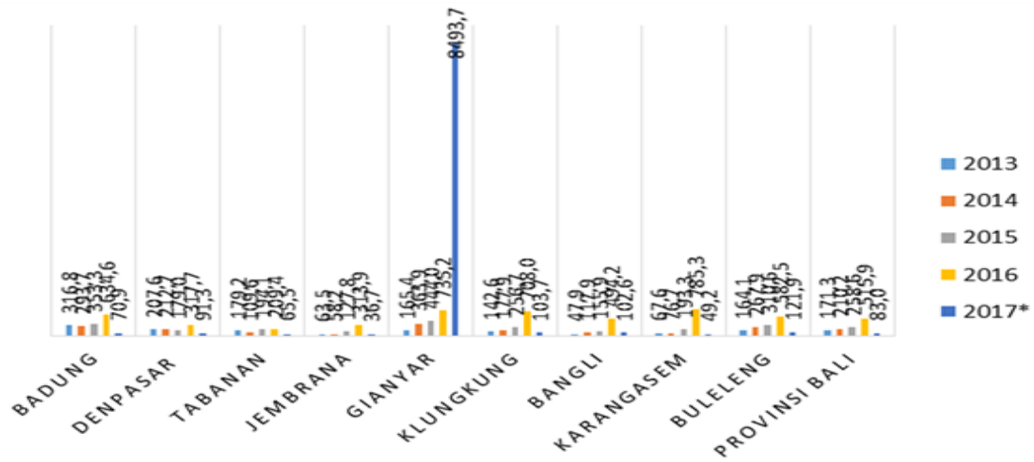

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.100 Incidence Rate Kasus DBD per 100.000 Penduduk Tahun 2013-2017

2.5.1.2.25 Penderita Diare Yang Ditangani

Penderita diare di Provinsi Bali yang telah ditangani selama kurun waktu 2013 sampai 2017 yaitu sebesar 109,40; 79,48; 89,18; 62,67 dan 55. Kabupaten Tabanan pada tahun 2017 berhasil menangani penderita diare sebesar 81 dan Denpasar berhasil menangani penderita diare sebesar 43.

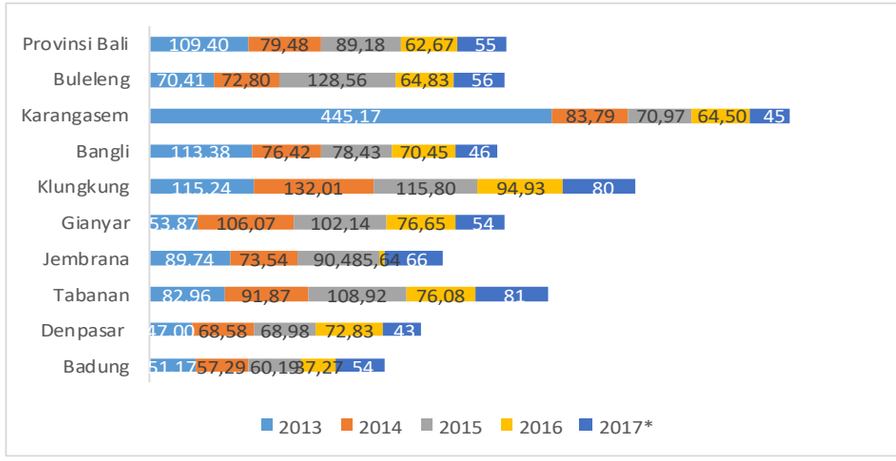

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.101 Penderita Diare Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.26 Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2017, yaitu 0,24; 0,54; 0,17; 0,24; dan 0,60. Angka kejadian malaria terendah pada tahun 2017 ada di Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem yaitu 0,00. Angka kejadian malaria tertinggi tahun 2017 ada di Kabupaten Gianyar yaitu 1.601.

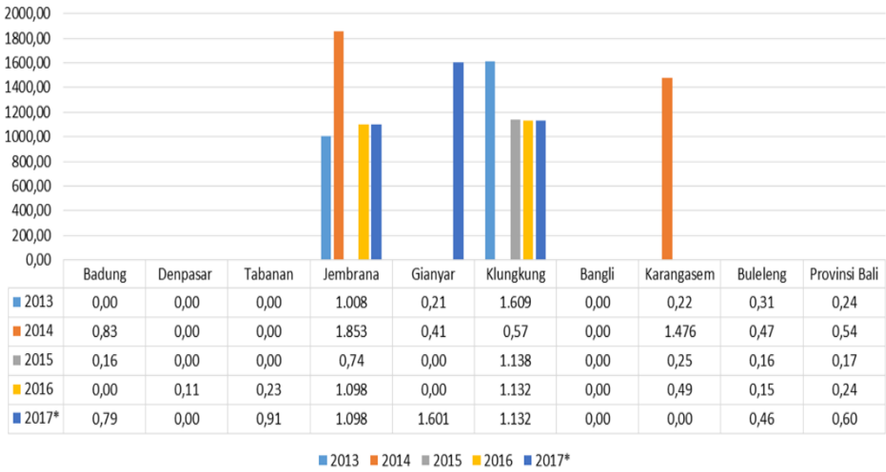

	Badung	Denpasar	Tabanan	Jembrana	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Provinsi Bali
2013	0,00	0,00	0,00	1.008	0,21	1.609	0,00	0,22	0,31	0,24
2014	0,83	0,00	0,00	1.853	0,41	0,57	0,00	1.476	0,47	0,54
2015	0,16	0,00	0,00	0,74	0,00	1.138	0,00	0,25	0,16	0,17
2016	0,00	0,11	0,23	1.098	0,00	1.132	0,00	0,49	0,15	0,24
2017*	0,79	0,00	0,91	1.098	1.601	1.132	0,00	0,00	0,46	0,60

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.102 Angka Kejadian Malaria di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.27 Tingkat Kematian Akibat Malaria

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017 tingkat kematian malaria di Provinsi Bali tercatat hanya 1, yaitu pada tahun 2016. Tingkat kematian malaria pada tahun 2016 tersebut ada di Kabupaten Bangli.

Tabel 2.21 Tingkat Kematian Akibat Malaria di Provinsi Bali Tahun 2016-2017

KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kematian akibat malaria				
	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denpasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jembrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gianyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klungkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangli	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Karangasem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buleleng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinsi Bali	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.28 Proporsi Anak Balita Yang tidur Dengan Kelambu Berinsektisida

Kelambu berinsektisida diperlukan untuk mencegah kejadian malaria pada daerah endemis. Provinsi Bali sejak tahun 2012 sudah tidak ada kasus indigenous atau kasus penularan setempat. Pada tahun 2014 semua kabupaten/kota di Bali sudah

diberikan sertifikat bebas malaria, sehinggga tidak ada data proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida.

2.5.1.2.29 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat malaria yang tepat di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Capaian proporsi tersebut ada di Kabupaten Karangasem.

Tabel 2.22 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

KABUPATEN/KOTA	Proporsi anak balita dg demam yg diobati dg obat anti malaria				
	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denpasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jembrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gianyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klungkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karangasem	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Buleleng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinsi Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.30 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari penduduk umur 15-49 tahun cenderung mengalami penurunan dari 0,50 persen pada tahun 2013 menjadi 0,44 persen pada tahun 2017. Jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan terus meningkat dari tahun ketahun. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan oleh klinik-klinik voluntary testing & counceling (VCT) dan rumah sakit sejak tahun 1987 sampai dengan 31 Desember 2012 berjumlah 7.170 kasus (Gambar 2.83). Sekitar 40% dari kasus-kasus ini dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan 60% dari 8 kabupaten di Bali. Sampai dengan tahun 1999, jumlah kasus yang dilaporkan

kebanyakan penularannya melalui hubungan seks sejenis (homosexual). Sejak tahun 2000 sampai dengan 2007 penularan HIV terutama terjadi pada pemakai narkoba suntik atau injecting drugs user (IDU), dan sejak tahun 2003 sampai saat ini penularan melalui hubungan seks lawan jenis (heterosexual) meningkat dengan tajam. Jumlah kasus perempuan lebih sedikit dibanding jumlah kasus laki-laki tetapi pola kenaikannya sama dengan kenaikan jumlah kasus laki-laki (Gambar 2.84). Kebanyakan dari kasus-kasus perempuan tersebut adalah ibu rumah tangga yang pada umumnya tertular dari suaminya. Bila ibu rumahtangga tersebut hamil maka sekitar 30-50% bayi-bayinya juga akan tertular HIV.

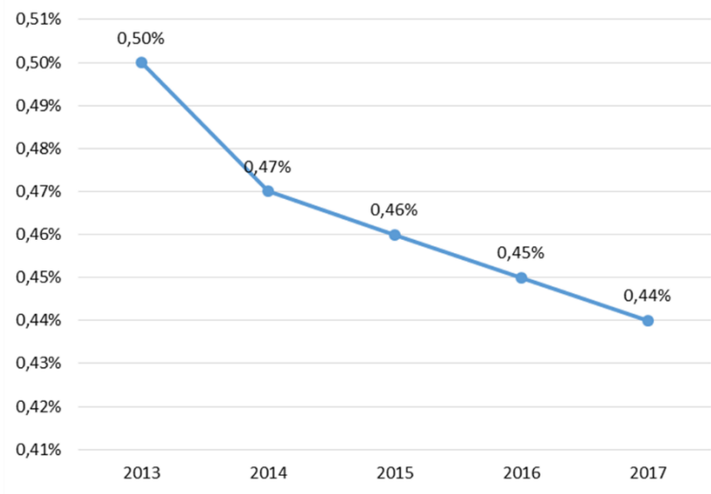

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.103 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari penduduk umur 15-49 tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

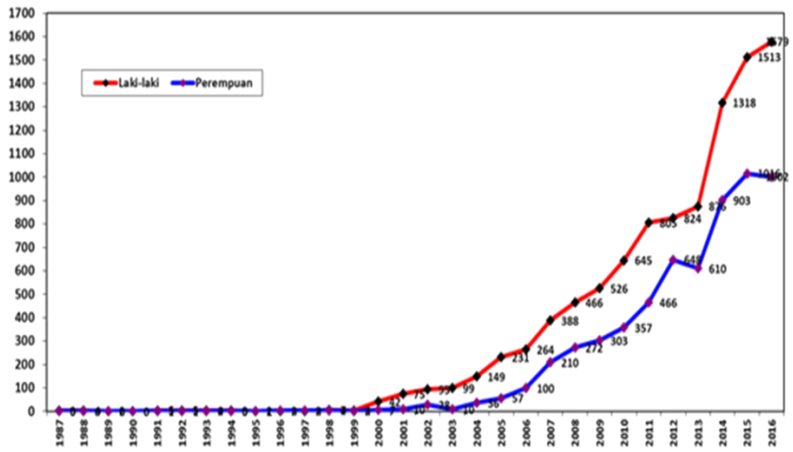

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.104 Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan Tahun 1987-Juli 2017

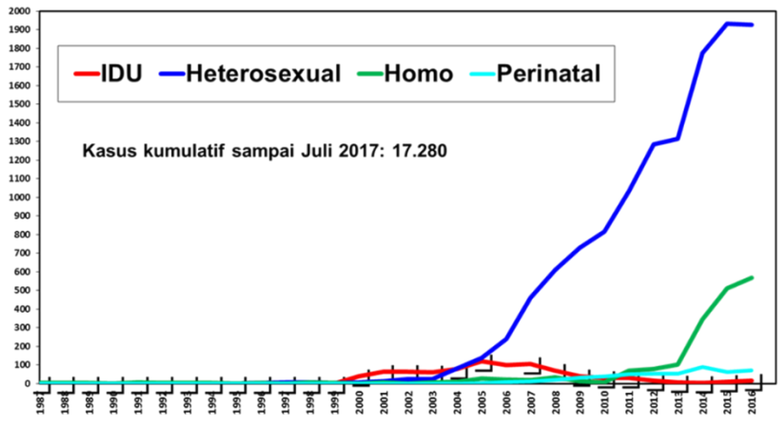

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.105 Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan dari Tahun 1987-Juli 2017 Berdasarkan Faktor Risiko Penularan

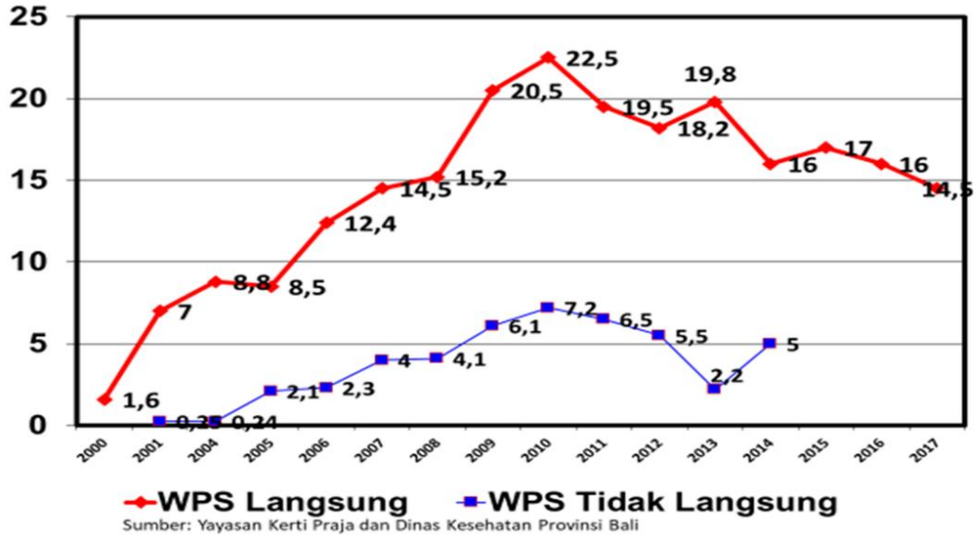

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.106 Prevalensi (dalam %) HIV+ pada Wanita Penjaja Seks Langsung dan Wanita Penjaja Seks Tidak Langsung di Kota Denpasar per Tahun

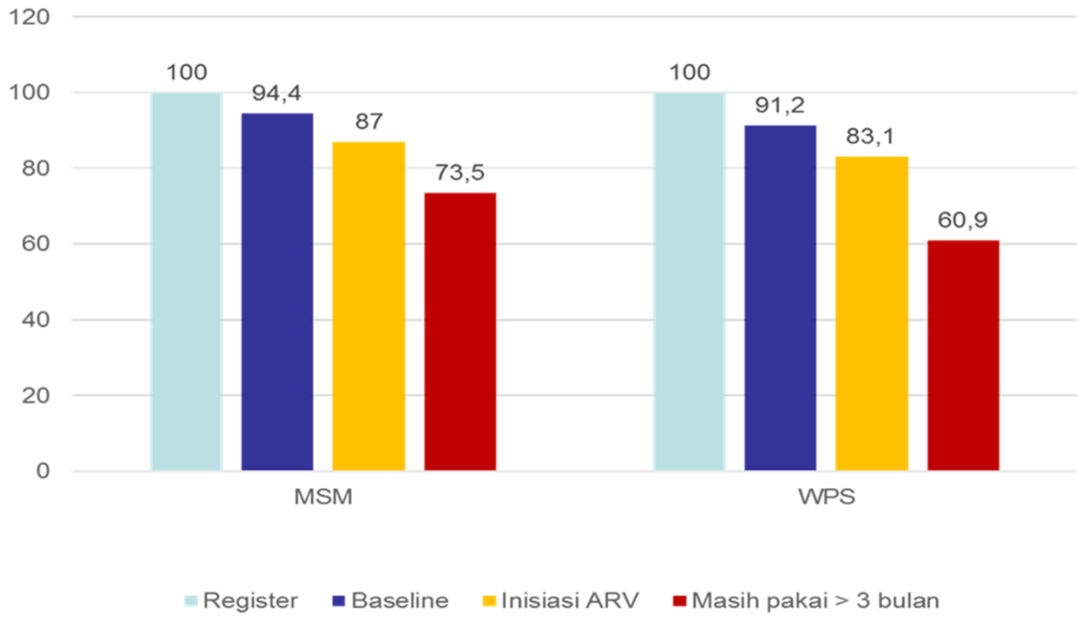

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.107 Cascade pemakaian ARV pada MSM dan WPS yang dilayani di YKP, Denpasar 15 Sept 2015 – 30 Sept 2016

Tabel 2.23 Persen Darah Donor yang HIV+ per Kab/Kota tahun 2015

KABUPATEN/KOTA	Jml Pendonor	Jml Sampel	HIV+	% Positif
Badung	4.597	4.597	28	0,6
Denpasar	3.800	3.800	15	0,4
Tabanan	4.583	4.583	21	0,5
Jembrana	1.887	1.887	3	3
Gianyar	1.576	1.576	2	2
Klungkung	3.483	3.483	5	5
Bangli	238	238	4	4
Karangasem	2.607	2.607	5	5
Buleleng	9.412	9.412	36	36
Jumlah	32.183	32.183	119	0.4

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.24 Persen Ibu Hamil yang HIV+ per Kab/Kota tahun 2016

KABUPATEN/KOTA	Jml yang test	Jml yang HIV+	%
Badung	5.521	24	0.43
Denpasar	9.675	22	0.23
Tabanan	3.996	13	0.33
Jembrana	3.918	11	0.28
Gianyar	2.103	17	0.36
Klungkung	2.103	3	0.14
Bangli	1.707	9	0.53
Karangasem	4.541	5	0.11
Buleleng	7.759	35	0.45
Jumlah	**44.003**	**139**	**0.32**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.31 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir mengalami peningkatan dari 55 persen pada tahun 2013 menjadi 57,50 persen pada tahun 57,50 persen.

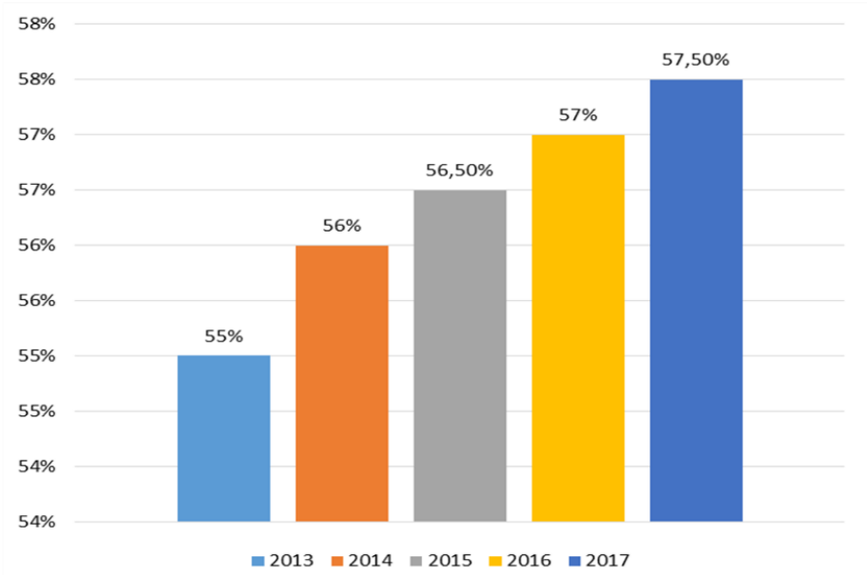

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.108 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Tahun 2013-2017

2.5.1.2.32 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS mengalami peningkatan dari 20,90 persen pada tahun 2013 menjadi 22,20 persen pada tahun 2017, peningkatan ini disebabkan oleh upaya peningkatan di sekolah – sekolah melalui kelompok siswa peduli AIDS (KSPAW) pada sekolah dijenjang SMP dan SMA.

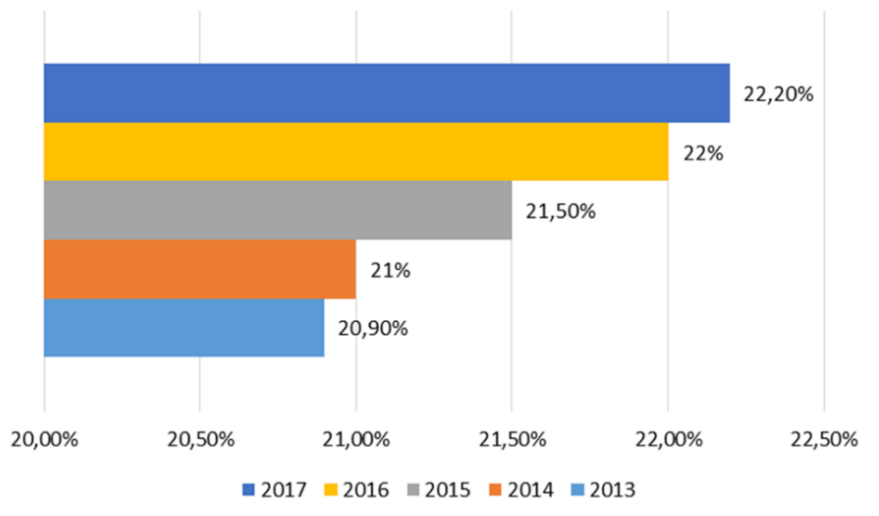

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.109 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

2.5.1.2.33 Kasus Rabies Pada Manusia

Jumlah kasus rabies pada manusia di Provinsi Bali berfluktuasi mulai dari 37.117 kasus pada tahun2013; 36.669 tahun 2014; 40.587 tahun 2015; 26.144 tahun 2015 dan 14.171 tahun 2017. Berdasarkan tren fluktuatif dalam periode 2013 – 2017, diketahui Jumlah kasus rabies pada manusia terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan lokasi di Kota Denpasar sebanyak 2.854 kasus dan yang terendah terjadi di Kabupaten Karangasem dengan 159 kasus.

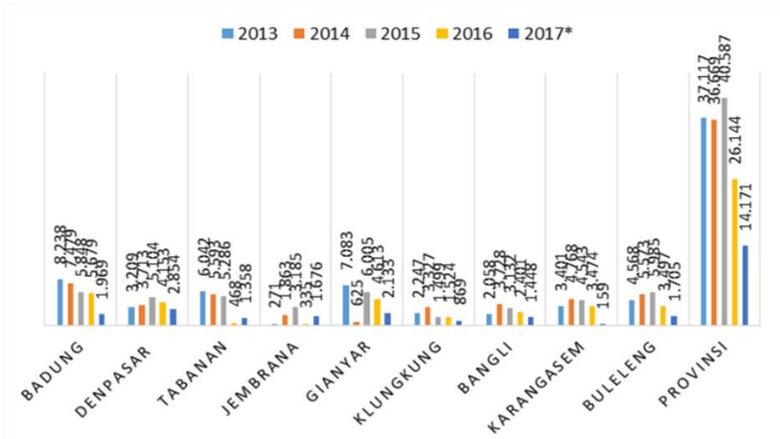

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.110 Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia Tahun 2013-2017

2.5.1.2.34 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin selama kurun waktu 2013 sampai 2018 telah mencapai 100 persen.

2.5.1.2.35 Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Provinsi Bali selama tahun 2013 sampai 2017, yaitu 97,36 persen, 100,03 persen, 99,01 persen, 96,17 persen dan 97,50 persen. Cakupan kunjungan bayi tertinggi tahun 2017 ada di Kabupaten Karangasem yaitu 108,50 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Badung dengan 79,50 persen.

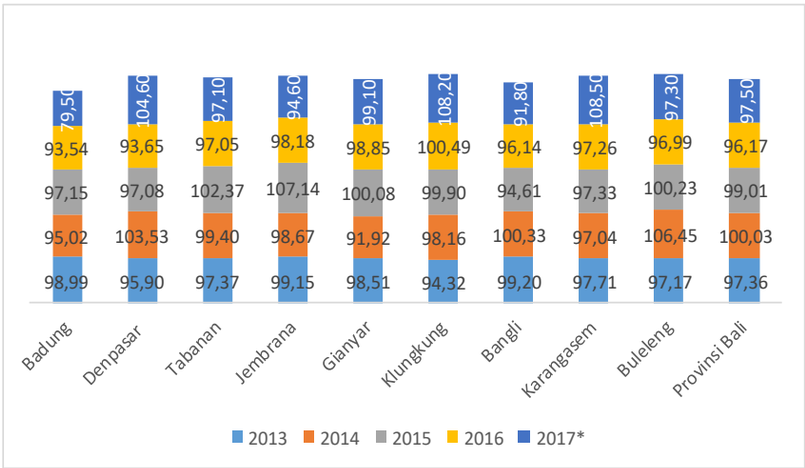

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.111 Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia Tahun 2013-2017

2.5.1.2.36 Cakupan Puskesmas Pembantu

Tabel 2.25 Cakupan Puskesmas Pembantu

KAB/KOTA/PROV	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	85,48 %	87,10 %	87,10 %	87,10 %	87,10 %
Bangli	81,94 %	81,94 %	81,94 %	81,94 %	81,94 %
Buleleng	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
Denpasar	58,14 %	58,14 %	58,14 %	58,14 %	58,14 %
Gianyar	94,29 %	92,86 %	92,86 %	92,86 %	92,86 %
Jembrana	88,27 %	86,27 %	86,27 %	86,27 %	86,27 %
Karangasem	89,74 %	91,03 %	91,03 %	91,03 %	91,03 %
Klungkung	89,83 %	89,83 %	89,83 %	89,83 %	89,83 %
Tabanan	58,65 %	58,65 %	58,65 %	58,65 %	58,65 %
Prov Bali	73,04 %	73,04 %	73,04 %	73,04 %	73,04 %

Cakupan kunjungan puskesmas di Provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 62,35 persen. Namun, selama kurun waktu 2014-2017 cakupan kunjungan puskesmas telah mencapai 100 persen.

2.5.1.2.37 Persentase Ibu Hamil Yang Memeriksakan Kehamilannya Minimal Satu Kali

Persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya minimal 1 kali berfluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2017, yaitu 97,1 persen, 98,6 persen, 98,4 dan persen, 96,2 persen. Pada tahun 2017, persentase ibu yang memeriksakan kehamilannya minimal 1 kali yang tertinggi ada di Kabupaten Tabanan sebesar 51,79 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Badung yaitu 41,1 persen.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.112 Persentase Ibu Hamil Yang Memeriksakan Kehamilannya Minimal Satu Kali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.38 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 berfluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2017, sebesar 93,1; 94,1; 93; 91,4; dan 35,37. Pada tahun 2017, cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi ada di Kota Denpasar yaitu sebesar 49,85 dan yang terendah ada di Kabupaten Badung yaitu 35,7.

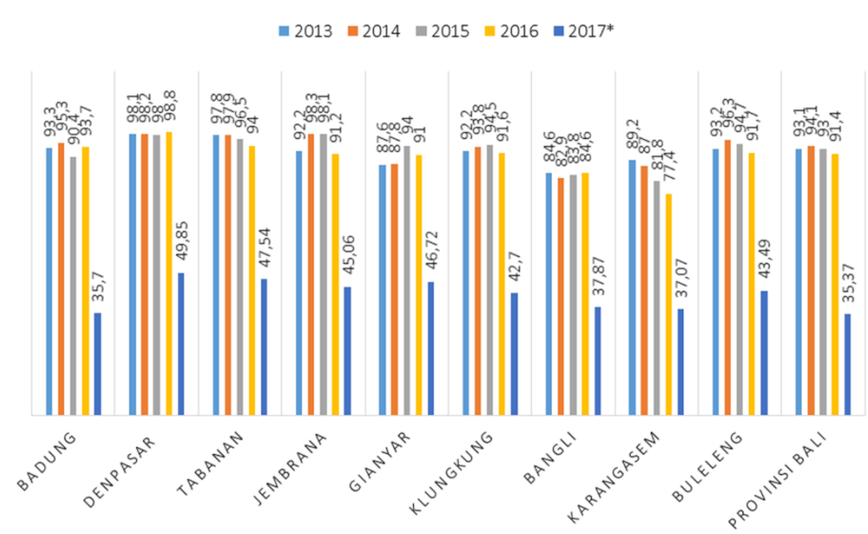

Sumber : Data SIPD Tahun 2017

Gambar 2.113 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

2.5.1.2.39 Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2013 sampai 2017, yaitu 95,33 persen, 96,51 persen, 95,92 persen, 94,71 persen dan 91,90 persen. Pada tahun 2017, cakupan pelayanan nifas tertinggi ada di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 104,30 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan terendah pada tahun 2017 ada di Kabupaten Badung yaitu 76,10 persen.

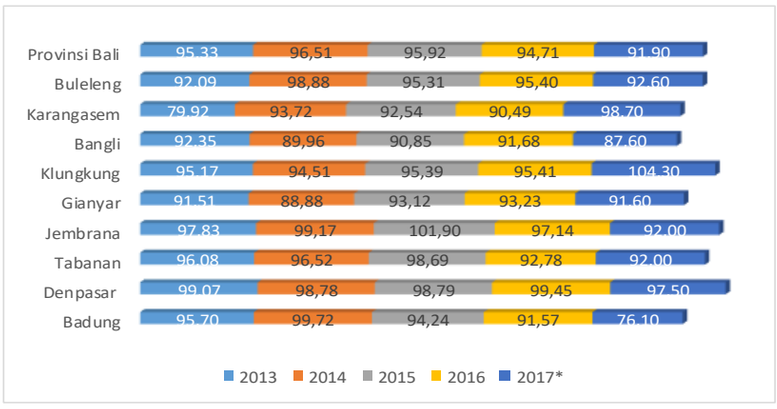

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.114 Cakupan Pelayanan Nifas

2.5.1.2.40 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2017, yaitu 70,82 persen, 69,43 persen, 69,67 persen, 66,79 persen dan 62,60 persen. Cakupan neonatus terendah di Provinsi Bali tahun 2017 ada di Kabupaten Badung dengan 36,40 persen. Sedangkan, cakupan neonatus tertinggi di Provinsi Bali tahun 2017 yaitu di Kabupaten Tabanan dengan 91,20 persen.

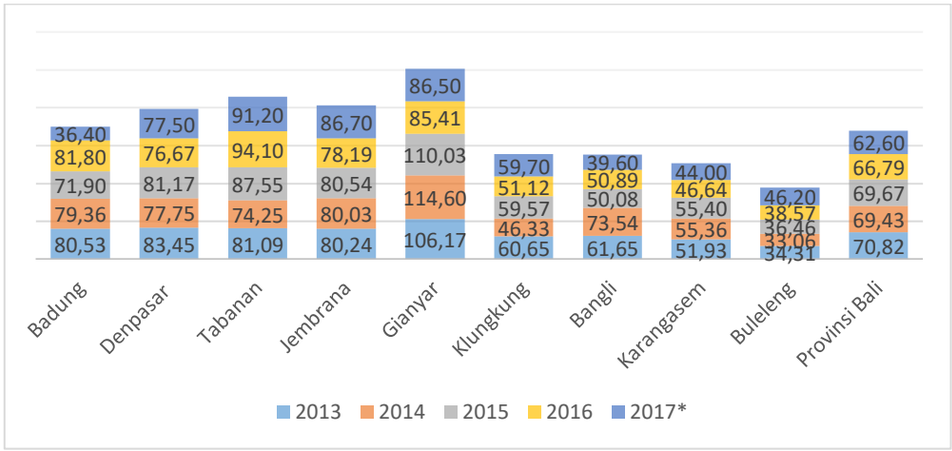

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.115 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.5.1.2.41 Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak Balita di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017, yaitu 81,94 persen, 94,99 persen, 94,18 persen, 96,28 persen dan 117 persen. Pada tahun 2017, cakupan pelayanan anak balita terendah ada di Kabupaten Karangasem yaitu 87,40 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan balita tertinggi ada di Kota Denpasar dengan 179,00 persen.

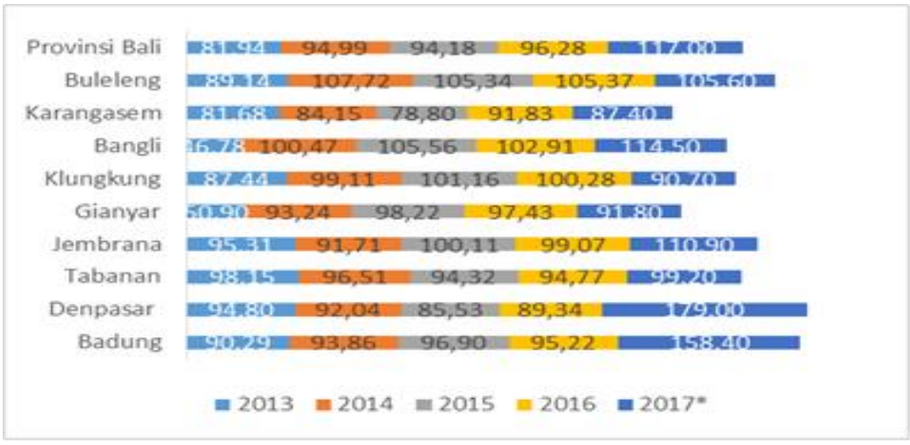

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.116 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.2.42 Cakupan Balita Pendek/Stunting

Cakupan balita pendek/stunting cenderung mengalami penurunan dari 32,6 persen pada tahun 2013 menjadi 19 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2017, cakupan balita pendek/stunting terbesar ada di Kabupaten Buleleng yaitu 28,9 persen dan terendah ada di Kota Denpasar yaitu 9,6 persen.

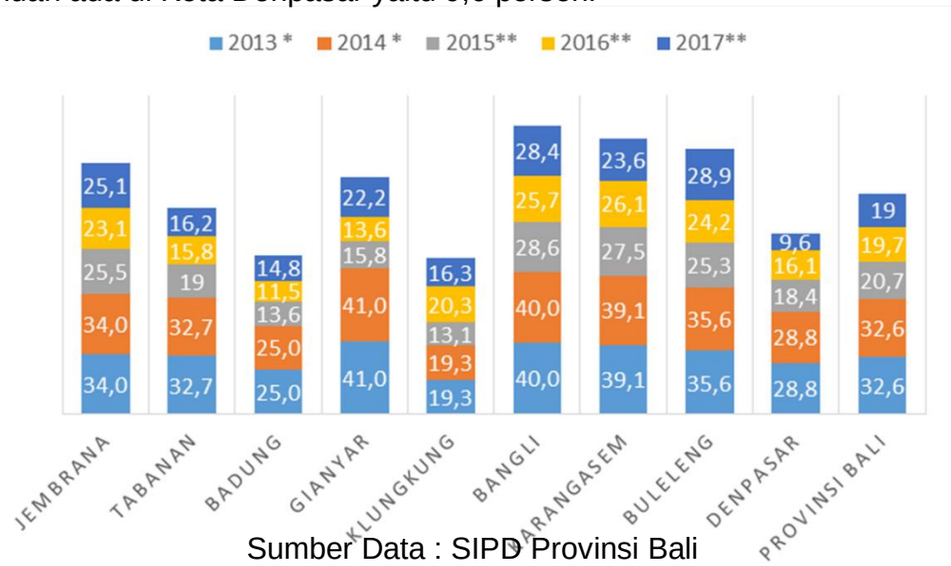

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.117 Cakupan Balita Pendek/Stunting Tahun 2013-2017

2.5.1.2.43 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan keluarga Miskin

Tabel 2.26 Cakupan Pemberian Makanan Pendampingan Asi

KAB/KOTA/PROV	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	100	100	100	100	100
Bangli	100	100	100	100	100
Buleleng	100	100	100	100	100
Denpasar	100	100	100	100	100
Gianyar	100	100	100	100	100
Jembrana	100	100	100	100	100
Karangasem	100	100	100	100	100
Klungkung	100	100	100	100	100
Tabanan	100	100	100	100	100
Prov Bali	100	100	100	100	100

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin telah mencapai 100 persen selama kurun waktu 2013 sampai 2017.

2.5.1.2.44 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Tabel 2.27 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

KAB/KOTA/PROV	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	105,4	100	100	100	100
Bangli	93,5	98,2	97,2	97,2	99,9
Buleleng	70,4	100	100	96,1	95,4
Denpasar	96	99	100	99,4	99,3
Gianyar	97,8	99,1	100	100	96,5
Jembrana	111,9	100	100	96,2	98,4
Karangasem	100	100	99	100	97
Klungkung	95	96,9	99,7	100	100
Tabanan	97,2	100	100	99,1	100
Provinsi Bali	97,7	99,5	99,7	98,4	98,2

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Provinsi Bali berfluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2016, yaitu 97,7 persen, 99,5 persen, 99,7 dan persen, 98,4 persen. Pada tahun 2017, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan tingkat Provinsi Bali yang yang tertinggi Kabuapten Badung, Klungkung dan Tabanan sebesar 100 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Buleleng sebesar 95,4 persen.

2.5.1.2.45 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Tabel 2.28 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

KAB/KOTA/PROV	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	100	100	100	100	100
Bangli	100	100	100	100	100
Buleleng	100	100	100	100	100
Denpasar	100	100	100	100	100
Gianyar	100	100	100	100	100
Jembrana	100	100	100	100	100
Karangasem	100	100	100	100	100
Klungkung	100	100	100	100	100
Tabanan	100	100	100	100	100
Provinsi Bali	100	100	100	100	100

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin selama kurun waktu 2013 sampai 2018 di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen.

2.5.1.2.46 Persentase Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I

Tabel 2.29 Saranan kesehatan

SARANA KESEHATAN	2013	2014	2015	2016	2017
RS Umum	97,22	100	100	100	100
RS Khusus	85,71	100	100	-	100
Jumlah Kab/Kota	97,53	100	100	83,33	100

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Persentase Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I berfluktuasi dari tahun 2013 yaitu 97,53 dan 100 persen ditahun 2014, 2015, 2017 dan tahun 2016 sebesar 83,33 persen.

2.5.1.2.47 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Tabel 2.30 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB

KAB/KOTA/PROV	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	100	100	100	100	100
Bangli	100	100	100	100	100
Buleleng	100	100	100	100	100
Denpasar	100	100	100	100	100
Gianyar	100	100	100	100	100
Jembrana	100	100	100	100	100
Karangasem	100	100	100	100	100
Klungkung	100	100	100	100	100
Tabanan	100	100	100	100	100
Provinsi Bali	100	100	100	100	100

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.48 Jumlah Kepesertaan JKBM

Jumlah kepesertaan JKBM meningkat dari 2.061.698 di tahun 2013 menjadi 2.460.477 di tahun 2014. Namun, kepesertaan JKBM mulai menurun pada tahun 2015 dan 2016 hingga mencapai 1.465.912. pada tahun 2016, kepesertaan JKBM terbesar ada di Kabupaten Gianyar sebesar 254.273 dan terendah yaitu 2.319 di Kabupaten Tabanan.

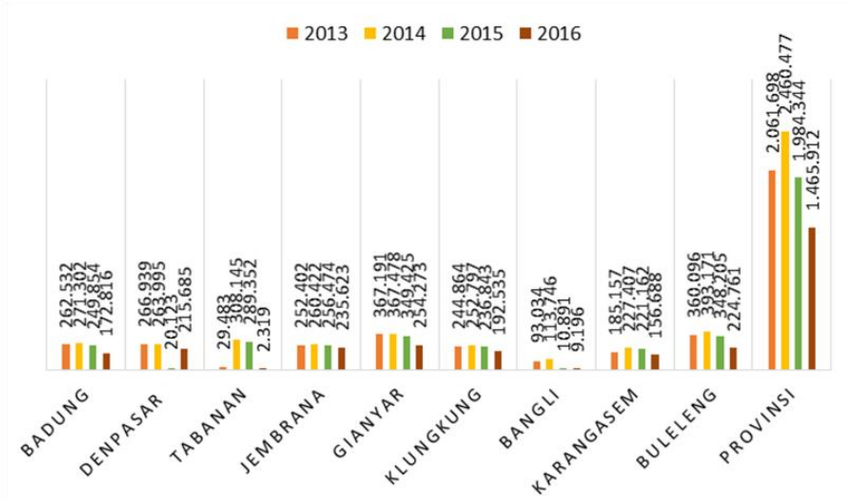

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.118 Jumlah Kepesertaan JKBM Tahun 2013-2016

2.5.1.2.49 Jumlah Alokasi Anggaran JKBM

Alokasi anggaran untuk JKBM mengalami penurunan dari 280.622.502.000 rupiah pada tahun 2013 menjadi 163.844.239.644 rupiah pada tahun 2016. Alokasi anggaran JKBM tertinggi pada tahun 2016 ada di Kabupaten Buleleng sebesar 26.703.578.796 rupiah dan yang terendah ada di Kabupaten Klungkung yaitu 13.463.981.784 rupiah.

Tabel 2.31 Jumlah Alokasi Anggaran JKBM Tahun 2013-2016

Kabupaten/ Kota	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Badung	40.374.558.000,00	23.314.997.051,01	23.159.163.132,00	15.016.241.688,00
Denpasar	42.342.750.000,00	29.843.925.727,50	24.881.347.125,00	15.706.152.504,00
Tabanan	33.893.988.000,00	25.326.188.697,51	20.289.559.572,00	16.311.567.360,00
Jembrana	28.285.518.000,00	30.591.810.987,21	25.214.320.825,00	19.702.920.192,00
Gianyar	30.213.726.000,00	22.506.076.032,48	18.808.364.898,00	16.303.439.136,00
Klungkung	16.221.468.000,00	20.904.858.675,66	17.968.297.456,00	13.463.981.784,00
Bangli	22.285.674.000,00	30.527.850.166,66	23.046.203.292,00	22.899.894.780,00
Karangasem	30.990.762.000,00	27.292.325.978,75	20.727.736.805,00	17.736.463.404,00
Buleleng	36.014.058.000,00	29.765.784.360,95	33.482.823.551,00	26.703.578.796,00
Provinsi Bali	280.622.502.000,00	240.073.817.677,73	207.577.816.656,00	163.844.239.644,00

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.50 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Yang Ditanggung JKBM

Jumlah kunjungan rawat jalan di PKM yang ditanggung JKBM selama tahun 2013 sampai 2016 terbesar yaitu 1.774.982 pada tahun 2014. Sementara selama tahun 2013 sampai 2016, jumlah kunjungan rawat jalan di RS yang ditanggung JKBM terbesar terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 393.243. Jumlah Kunjungan Rawat Inap RS dan Puskesmas yang Ditanggung JKBM terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 99,911.

Tabel 2.32 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di PKM yang Ditanggung JKBM Tahun 2013-2016

Kabupaten/ Kota	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Badung	189,727	192,252	182,692	107,848
Denpasar	256,105	254,637	202,182	120,115
Tabanan	199,317	211,288	204,261	171,224
Jembrana	197,931	195,015	197,344	182,676
Gianyar	275,268	273,638	267,552	188,433
Klungkung	188,23	188,339	178,533	141,975
Bangli	55,53	65,445	62,712	43,371
Karangasem	103,273	129,019	127,607	96,094
Buleleng	250,511	265,349	248,931	170,676
Provinsi Bali	1.715.892	1.774.982	1.671.814	1.222.412

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Jumlah kunjungan rawat jalan diPKM yang ditanggung JKBM tahun 2013 fluktuatif, tahun 2013-2014 meningkat, sedangkan tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan. Tahun 2013 tertinggi dikabupaten Gianyar sedang teredah diKabupaten Bangli. Tahun 2016 kembali Kabupaten Bangli terendah sedangkan yang tertinggi kembali di raih Kabupaten Ginayar.

Tabel 2.33 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di RS yang Ditanggung JKBM Tahun 2013-2016

Kabupaten/ Kota	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Badung	32,181	38,647	39,62	34,366
Denpasar	121,795	115,814	78,336	65,268
Tabanan	49,675	43,592	36,856	31,627
Jembrana	16,532	17,956	15,389	14,974
Gianyar	35,47	38,992	35,899	32,16
Klungkung	25,402	28,819	28,253	25,956
Bangli	32,535	39,82	31,078	30,551
Karangasem	20,156	24,967	27,369	25,388
Buleleng	44,782	44,636	33,307	27,451
Provinsi Bali	378,528	393,243	326,107	287,741

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Jumlah kunjungan rawat jalan rumah sakit yang ditanggung JKBM tahun 2013 – 2016 mengalami tren fluktuatif, ditahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan sedangkan tahun 2015 – 2016 mengalami tren menurun. Tahun 2013 terendah di Kabupaten Jembrana sebanyak 16.532 sedangkan tertinggi di Kota Denpasar sebanyak 121,795. Ditahun 2017 kembali Kabupaten Jembrana terendah sebanyak 14,974 sedangkan yang tertinggi di kota Denpasar sebanyak 65,268.

Tabel 2.34 Jumlah Kunjungan Rawat Inap RS dan Puskesmas yang Ditanggung JKBM Tahun 2013-2016

Kabupaten/ Kota	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Badung	3,988	6,258	6,114	9,514
Denpasar	12,908	13,924	11,536	9,625
Tabanan	6,254	9,184	8,564	8,177
Jembrana	4,54	8,246	8,568	8,344
Gianyar	6,247	9,757	9,227	8,683
Klungkung	3,622	6,497	5,864	5,22
Bangli	5,713	9,299	8,943	7,897
Karangasem	5,089	12,393	11,115	11,649
Buleleng	11,38	24,353	17,192	11,353
Provinsi Bali	59,741	99,911	87,123	80,462

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.51 Kepesertaan JKN

Kepesertaan JKN tertinggi pada tahun 2017 ada di Kabupaten Badung yaitu 611.998 dan yang terendah ada di Kabupaten Jembrana yaitu 142.935. Sementara untuk kepesertaan JAMKESDA tertinggi tahun 2016 ada di Kota Denpasar yaitu 369.629 dan yang terendah ada di Kabupaten Klungkung yaitu 87.126. pada tahun 2017 cakupan kepesertaan JKN yaitu sebesar 73,07 persen.

Tabel 2.35 Kepesertaan JKN Tahun 2014-2017

Kabupaten/Kota	TOTAL JKN				JAMKESDA		
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016
Tabanan	175.520	196.581	211.151	294.638	257.780	239.319	227.349
Badung	164.717	320.041	336.918	611.998	437.983	296.359	293.082
Denpasar	317.773	499.458	527.671	605.604	545.827	381.142	369.629
Gianyar	203.589	249.476	266.878	344.096	286.911	245.624	232.722
Klungkung	78.251	84.124	89.574	163.826	96.549	91.576	87.126
Bangli	85.870	95.576	100.119	155.273	135.430	127.024	123.681
Karangasem	166.338	181.791	192.121	300.718	240.262	226.909	218.679
Jembrana	81.300	90.082	94.180	142.935	188.500	181.518	179.120
Buleleng	321.483	355.521	378.469	523.009	320.817	290.679	271.631

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.52 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit mata bali mandara pada tahun 2017 yang terbesar yaitu untuk pelayanan poli mata sebesar 21,306. Sementara untuk cakupan pelayanan RS Mata Bali Mandara yang terbesar yaitu Kota Denpasar sebesar 10,843.

Tabel 2.36 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2013-2017

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Pelayanan Poli Mata	44,222	44,14	45,036	43,146	21,306
Tindakan Operasi	3,703	4,68	3,962	4,011	1,212
Pelayanan Poli THT	4,156	4,91	3,106	4,475	4,204
Pelayanan Poli Kulit	13,055	15,004	10,835	13,298	7,503
Tindakan / Operasi kulit	284	35	0	0	0
Fisioterapi	898	914	530	423	16
UGD	981	1,114	1,09	1,131	525
Anastesi			346	409	170

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017*
Badung	8,942	7,382	7,225	1,865
Denpasar	24,9	20,798	20,479	10,843
Tabanan	4,944	5,06	4,749	1,072
Jembrana	1,769	1,513	1,61	358
Gianyar	7,762	6,957	6,94	1,472
Klungkung	2,43	2,988	3,212	1,077
Bangli	1,895	1,733	1,642	417
Karangasem	2,737	2,268	2,719	728
Buleleng	1,484	1,463	1,539	617

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.2.53 Cakupan Konsumsi Garam Beryodium di Rumah Tangga

Konsumsi garam beryodium di rumah tangga mengalami peningkatan dari 70,82 persen pada tahun 2013 menjadi 79,40 persen pada tahun 2016 dan di Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 73,90. Pada tahun 2017, cakupan terbesar terjadi di

Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 96,10 persen dan terendah ada di Kabupaten Gianyar yaitu 66,50 persen.

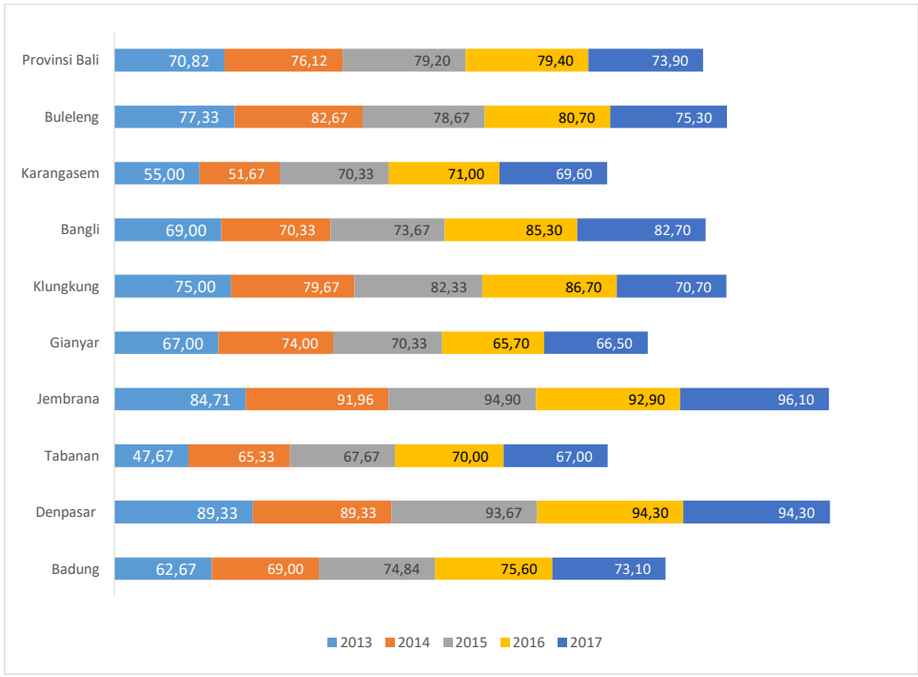

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.119 Cakupan Konsumsi Garam Beryodium di Rumah Tangga Tahun 2013-2017

2.5.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Pekerjaan Umum

2.5.1.3.1 Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 79,5%. Kondisi ini mengalami penurunan dan peningkatan hingga di akhir tahun 2018 menjadi 80,81%. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas pendanaan yang mendukung peningkatan kualitas jalan dan jembatan baik dari APBD maupun APBN dipandang belum memadai ditambah lagi dengan potensi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh volume/beban yang ditimbulkan oleh kendaraan yang melintas di jalan dan jembatan serta kontribusi penurunan kualitas jalan dan jembatan oleh penyedia layanan utilitas yang jaringannya dibawah jalan.

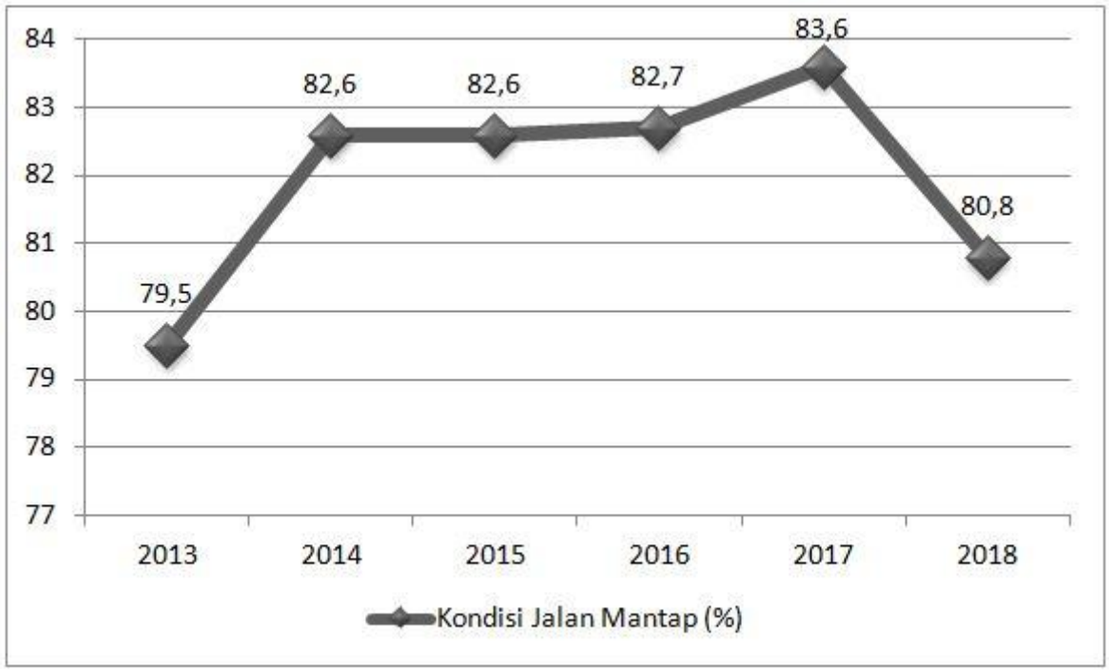

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.120 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2018

2.5.1.3.2 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Provinsi Bali cenderung menurun dari tahun 2013 sebesar 0,00209 hingga tahun 2018 sebesar 0,00198. Hal ini diukur berdasarkan ruas jalan dan panjang jalan yang ditetapkan sesuai kewenangan dalam bentuk Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota yang periode penetapannya berlaku selama 5 (lima) tahun volumenya tetap dengan panjang jalan 8.490,15 Km. Sedangkan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana jumlah penduduk tahun 2013-2018 yang dipublish oleh BPS setelah sensus penduduk bersifat proyeksi. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan rasio ini adalah belum adanya pembangunan jalan baru yang secara signifikan menambah volume jalan dan belum akuratnya pendataan jalan hingga ke tingkat jalan lingkungan akibat pesatnya perkembangan akses hunian dan usaha.

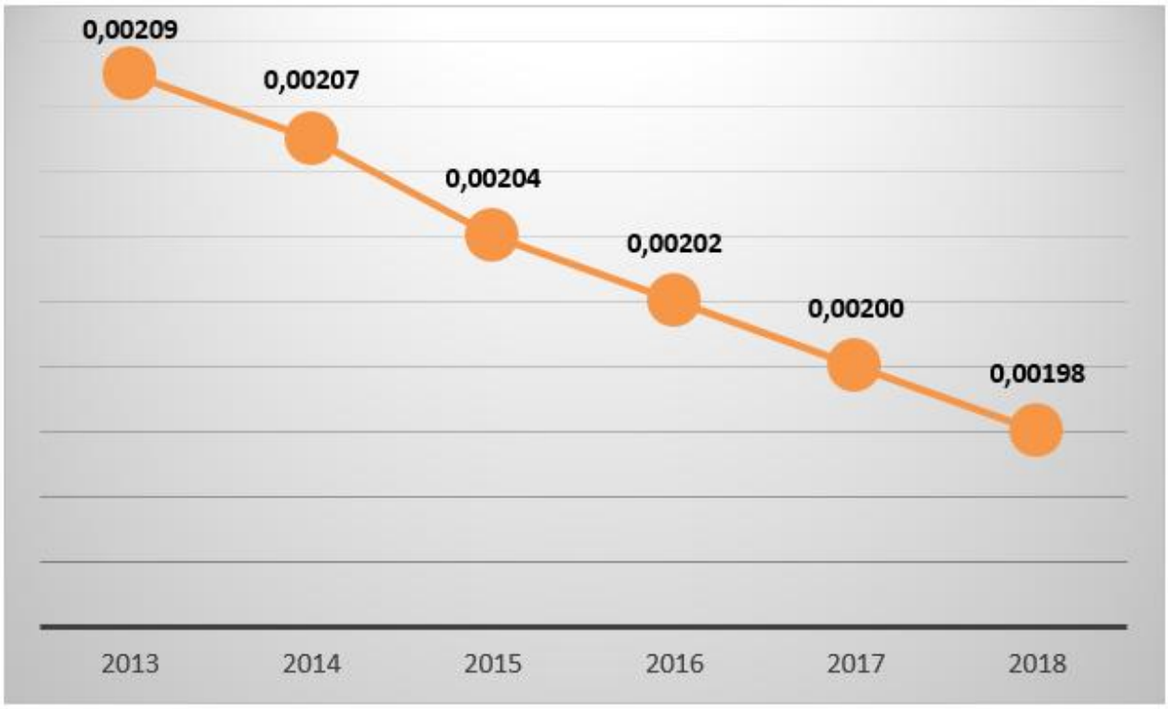

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.121 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.1.3.3 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan dari 62,41 persen pada tahun 2013 menjadi 91,07 persen pada tahun 2017. Selama kurun waktu 2014 sampai 2017, persentase rumah tinggal bersanitasi telah mencapai target yang ditetapkan.

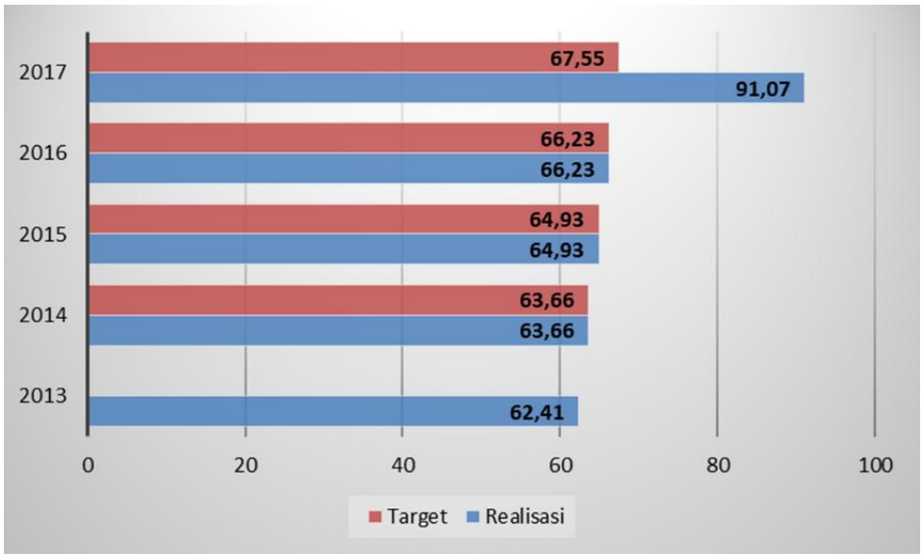

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.122 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Rumah tinggal berakses sanitasi layak sesuai data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas tahun 2016) menunjukkan peningkatan dari 80,14 persen pada tahun 2013 menjadi 86,55 persen pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 84,86 persen. Kabupaten Jembrana menjadi Kabupaten dengan persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak tertinggi yaitu sebesar 94,35 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Karangasem yaitu 74,57 persen.

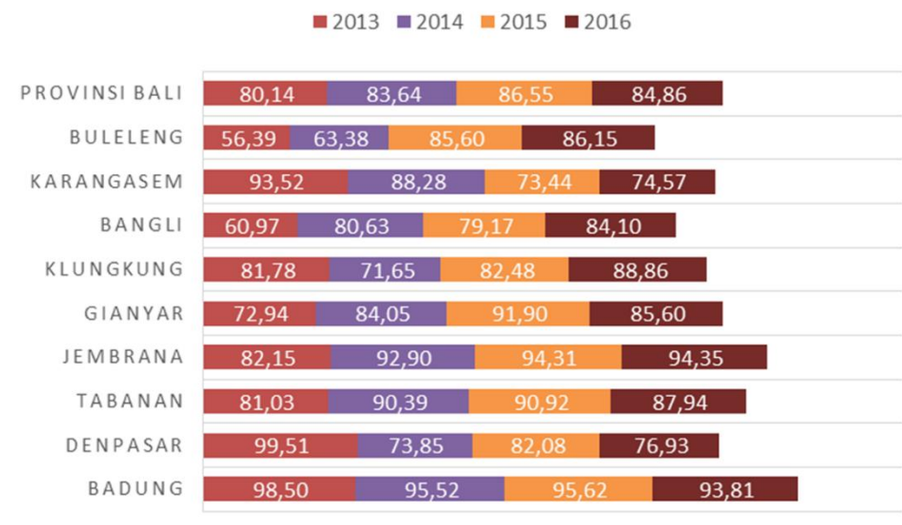

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.123 Persentase RT Berakses Sanitasi Layak Tahun 2013-2016

2.5.1.3.4 Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik

Dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Provinsi Bali dibagi sesuai dengan kewenangan diantaranya pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap daerah Irigasi dengan luasan lebih dari 3000 ha, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pada sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap daerah Irigasi dengan luasan kurang dari 1000 ha.

Tabel 2.38 Inventaris Bendung dan Panjang Saluran Irigasi Daerah Irigasi di Provinsi Bali

NO	KEWENANGAN	LUAS BAKU (HA)	LUAS FUNGSIONAL (HA)	JARINGAN IRIGASI						
				BENDUNG/PENGAMBILAN	BANGUNAN AIR	SALURAN PEMBAWA		SALURAN PEMBUANG	SALURAN TERSIER	TOTAL SALURAN
						PRIMER	SEKUNDER			
				(BH)	(BH)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)
1	PUSAT	42,589	42,589	112	-	251,562	447,242	15.78	369,813	1,068,633
2	PROVINSI	9,271	6,808	19	1,727	-	-	1,865	260,077	261,942
KABUPATEN/KOTA										
3	BULELENG	12,036	12,036	177	993	87,913	143,196	7,030	367,071	605,210
4	JEMBRANA	7,875	7,875	75	372	61,249	59,999	4,085	235,670	361,003
5	TABANAN	16,749	16,749	278	1016	158,556	168,065	5,898	509,731	842,250
6	BADUNG	2,285	2,285	21	132	60,624	289,628	1,860	95,445	447,557
7	DENPASAR	1,566	1,566	15	19	24,128	4,689	0	57,665	86,482
8	GIANYAR	4,222	4,222	129	387	139,148	89,395	0.050	348,851	577,394
9	KLUNGKUNG	2,306	2,306	24	189	63,260	31,201	0.405	312,507	406,969
10	BANGLI	3,243	3,243	32	181	49,265	15,761	2,850	70,751	138,627
11	KARANGASEM	5,476	5,476	129	446	225,867	124,401	112,300	346,074	808,642
JUMLAH		**107,618**	**105,155**	**1,011**	**5,462**	**1,121,572**	**1,373,577**	**135,904**	**2,973,655**	**5,604,708**

Rasio jaringan irigasi yang ada di Provinsi Bali sebesar 52,079 (dalam 1 ha sawah memiliki panjang saluran irigasi 52,079 km). Untuk Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi, kondisi jaringan irigasi terus diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dalam kurun waktu tertentu terdapat penurunan angka yang diakibatkan oleh penurunan kondisi jaringan irigasi yang signifikan serta bersifat tidak terduga. Pada tahun 2013-2018, persentase kondisi jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik berturut-turut : 53,2% 57,84%, 61,53%, 66,57%, 68,62%, dan meningkat menjadi 71,51% pada tahun 2018.

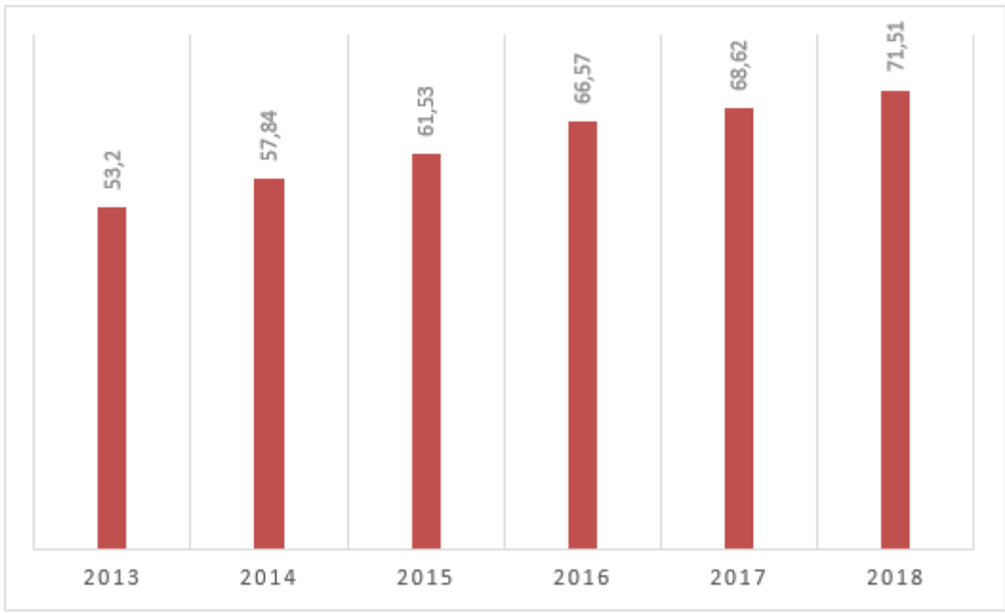

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.124 Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2018

2.5.1.3.5 Persentase Penduduk yang Berakses Air Minum Aman di Provinsi Bali

Persentase Penduduk yang Berakses Air Minum Aman di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung meningkat dari 68,48 % hingga 86 persen. Hal ini disebabkan oleh terbangunnya SPAM regional yaitu: SPAM Petanu, SPAM Penet, dan SPAM Telaga Waja serta perampungan pembangunan SPAM Regional Burana Titab yang akan memenuhi kebutuhan air bersih/air minum di Kabupaten Buleleng dan Jembrana serta SPAM Skala Perdesaan.

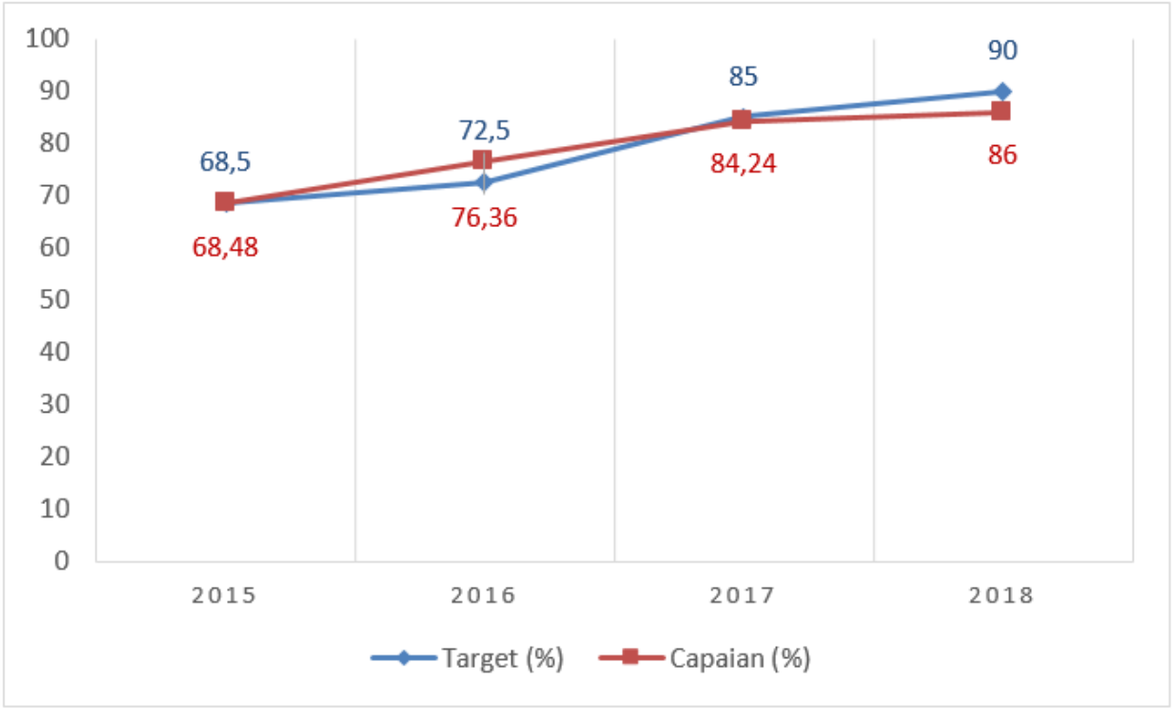

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.125 Persentase Penduduk yang Berakses Air Minum Aman di Provinsi Bali Tahun 2015-2018

B. Penataan Ruang

2.5.1.3.6 Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB cenderung meningkat dari 20 pada tahun 2013 menjadi 21 pada tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan adanya komitmen Kabupaten/Kota untuk mendorong pencapaian rasio minimal 30 %, untuk itu kedepan perlu dimantapkan lagi dengan dukungan regulasi menyeluruh.

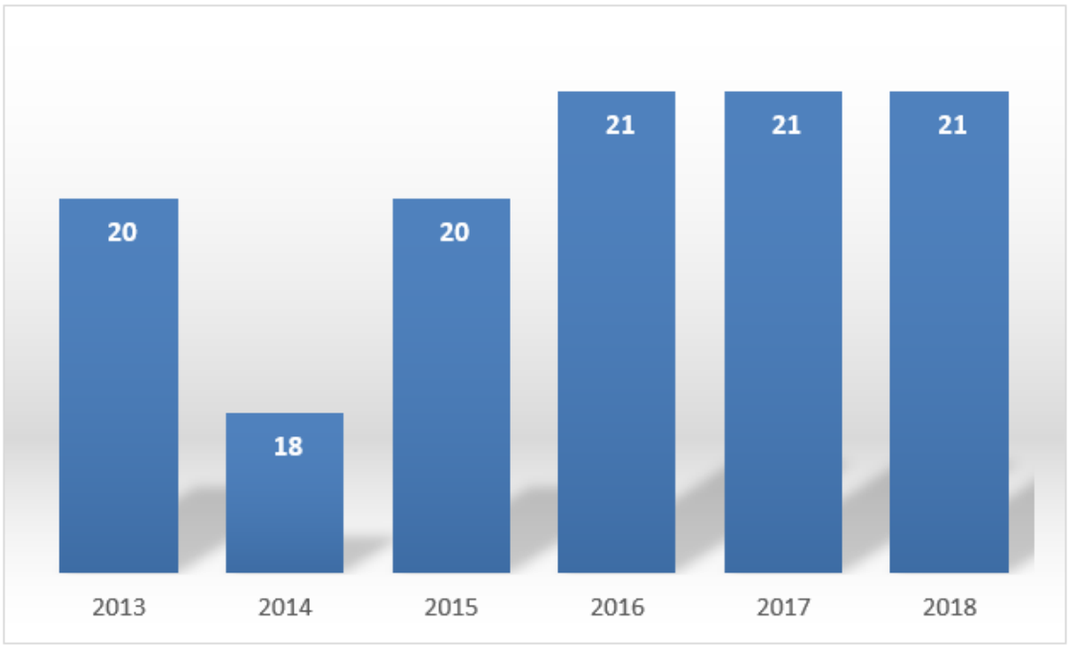

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.126 Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.1.3.7 Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW di Provinsi Bali selama kurun aktu 2013 sampai 2017 cenderung meningkat dari 22 persen menjadi 68 persen.

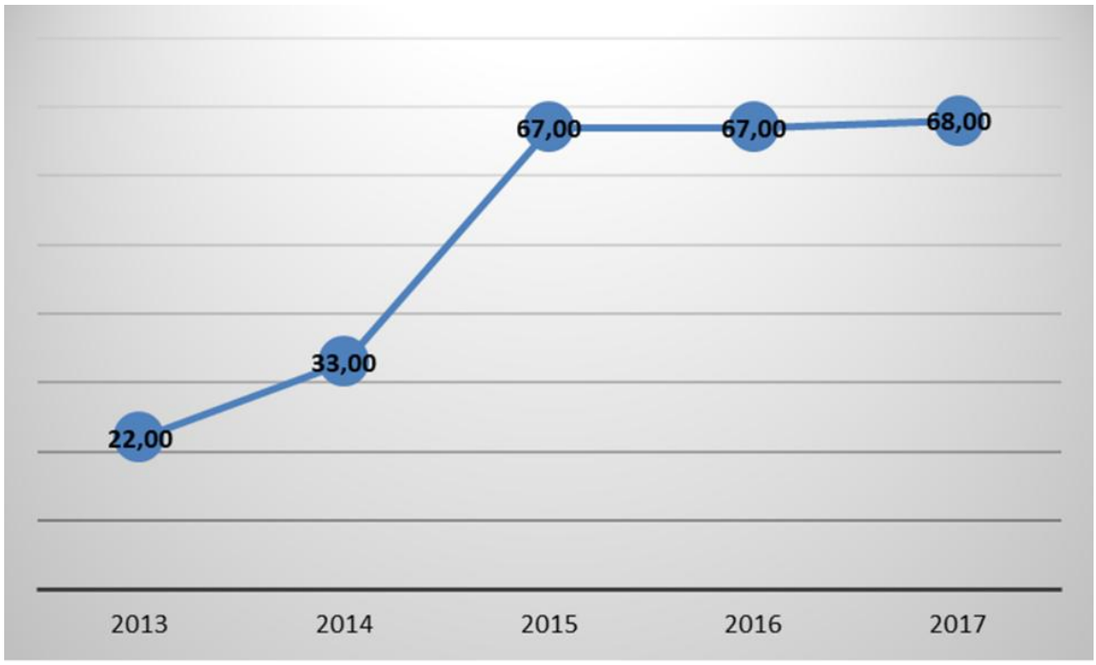

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.127 Ketaatan Terhadap RTRW di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.5.1.4.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Provinsi Bali terus berpaya untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kabupaten/Kota se-Bali pada tahun 2018 masih terdapat rumah tidak layak huni sejumlah 52.425 unit. Rumah tidak layak huni tertinggi berada di Kabupaten Buleleng sedangkan jumlah terendah berada di Kota Denpasar.

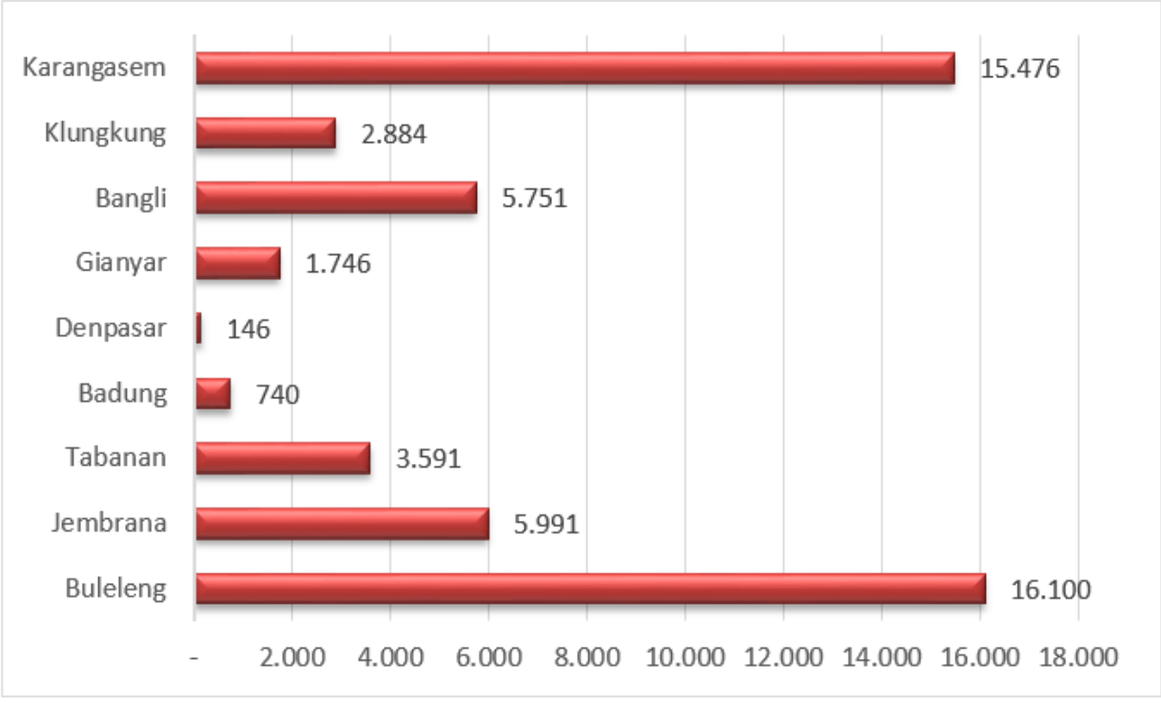

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.128 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali Tahun 2018

2.5.1.4.2 Luas Kawasan Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota se-Bali, terdapat 784,8659 Ha luas kawasan kumuh yang tersebar di Kabupaten/Kota selain Kabupaten Badung. Sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kawasan kumuh kewenangan pusat (>15 Ha) seluas 478 Ha, kewenangan provinsi (10-15 Ha) seluas 70,9126 Ha, dan kewenangan kabupaten seluas 235,6123 Ha sehingga, total kawasan kumuh di provinsi bali seluas 784,8659 Ha. Untuk tahun 2018, kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 2216,57 Ha.

Tabel 2.39 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2018

Kewenangan	Kawasan Kumuh berdasarkan SK Bupati/Wali Kota(Ha)	Tertangani (Ha)	Belum tertangani (Ha)
Nasional	478	92,4955	385,8455
Prov	70,9126	30,7596	40,153
Kab/Kota	235,6123	75,3149	160,1984
Total	**784,8659**	**198,5700**	**586,1969**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.5.1.5.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 3,49 pada tahun 2013 menjadi 3,44 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 rasio mengalami peningkatan menjadi 4,04, namun kembali mengalami penurunan menjadi 3,96. Rasio tersebut kembali meningkat menjadi 4,24 pada tahun 2017.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.129 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2013-2017

2.5.1.5.2 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Jumlah petugas Linmas pada tahun 2014 sebesar 23.391 petugas, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, selama tahun 2014 sampai 2017 tidak ada penambahan jumlah petugas Linmas. Hal tersebut menyebabkan turunnya cakupan petugas linmas terhadap jumlah penduduk dari 0,57 persen pada tahun 2015 turun menjadi 0,56 persen pada tahun 2016.

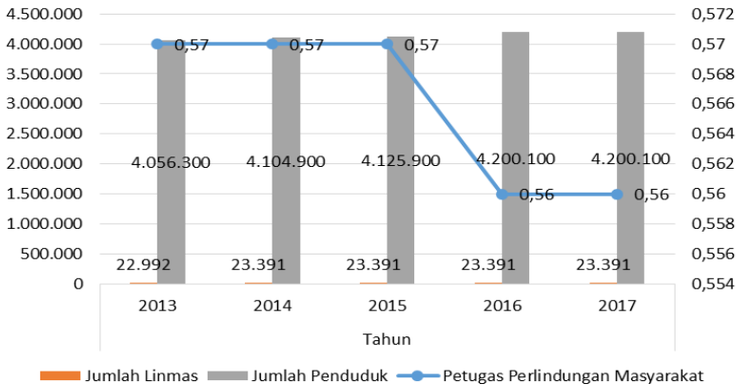

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.130 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.5.3 Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan selama kurun waktu 2013 sampai 2017 yaitu 2,45.

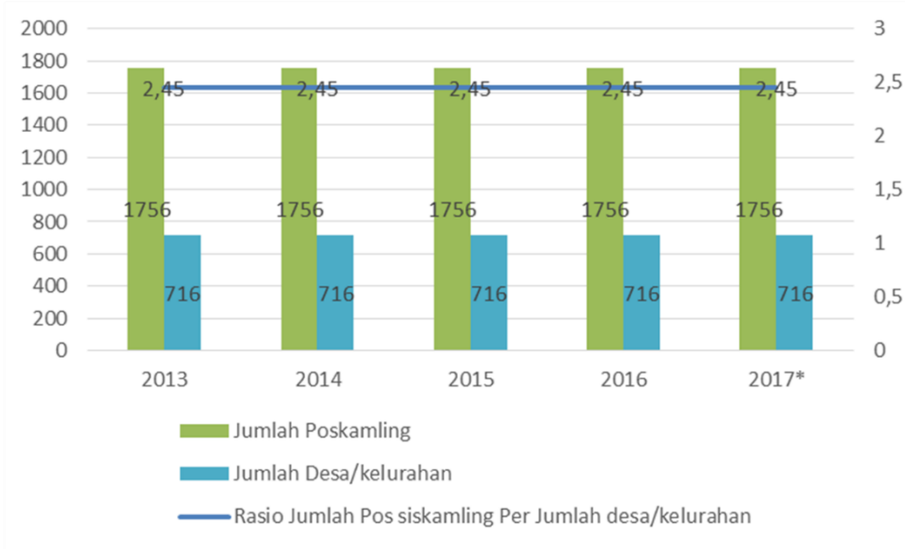

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.131 Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2013-2017

2.5.1.5.4 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Selama tahun 2013 sampai 2017, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) telah mencapai 100 persen. Hal tersebut berarti seluruh jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2013 sampai 2017 telah dapat diselesaikan.

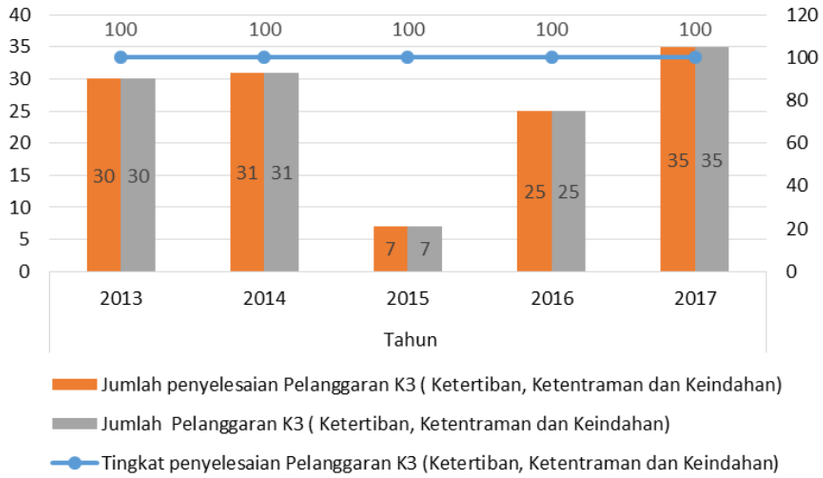

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

**Gambar 2.132 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
di Provinsi Bali Tahun 2013-2017**

2.5.1.5.5 Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan perda di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017 telah mencapai 100 persen. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa jumlah seluruh pelanggaran perda yang terjadi telah dapat diselesaikan.

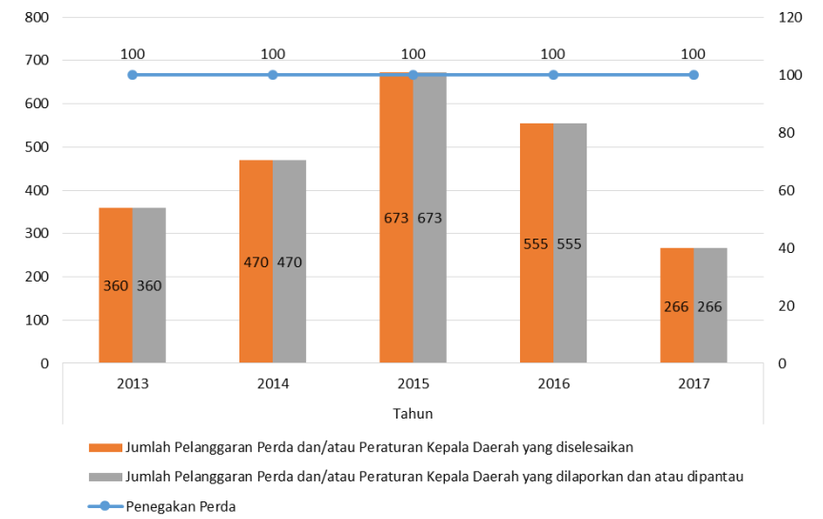

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.133 Persentase Penegakan Perda di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.6 Sosial

2.5.1.6.1 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami penurunan selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Pada tahun 2013, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 3,81 persen. Persentase tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 persen pada tahun 2017.

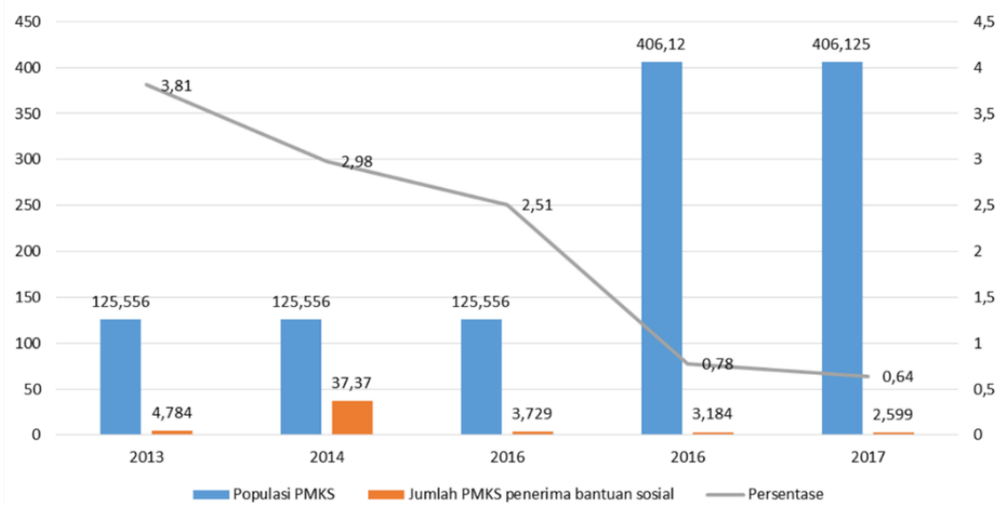

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.134 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.6.2 Persentase PMKS Yang Tertangani

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, persentase PMKS yang tertangani mengalami penurunan. Persentase PMKS yang tertangani sebesar 5,42 persen pada tahun 2013. Persentase tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,9 persen pada tahun 2017.

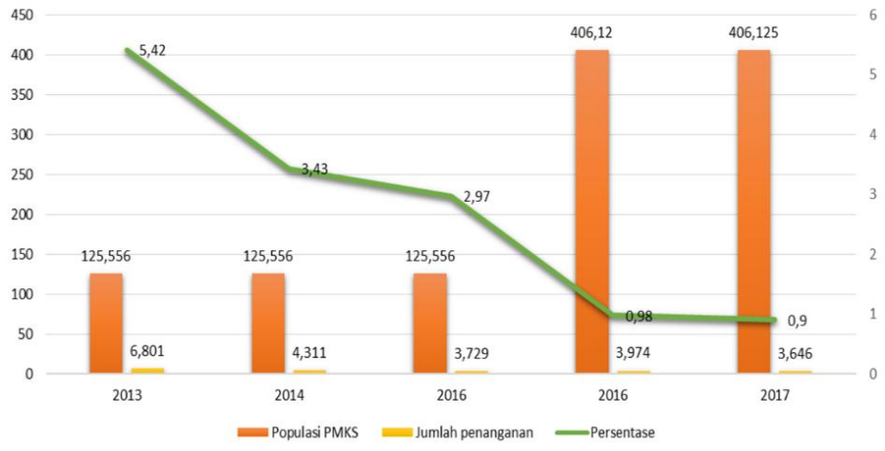

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.135 Persentase PMKS Yang Tertangani di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.6.3 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 201, persentase sebesar 3,81 persen dan cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 0,78 persen pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 persentase meningkat menjadi 6,64 persen.

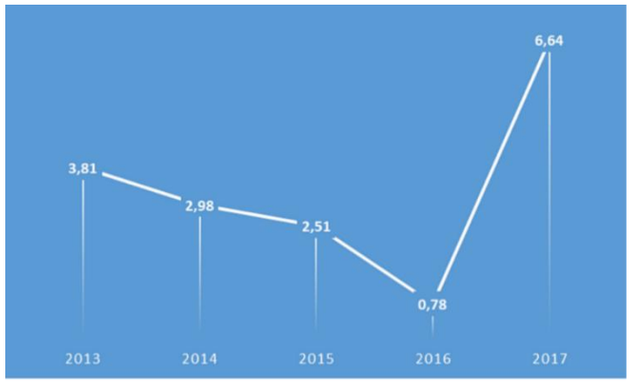

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.136 Persentase PMKS Skala Yang Memeproleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.6.4 Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 0,96 persen. Jumlah panti yang bergerak dibidang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Bali sebanyak 78 panti namun yang diberdayakan melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) hanya 1 panti pada tahun 2013 yang bersumber dari dana APBN.

2.5.1.6.5 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Selama kurun waktu 2013 sampai 2015, persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial cenderung datar yaitu 5 persen. Namun, sampai dengan tahun 2017 persentase tersebut cenderung turun mencapai 3,8 persen.

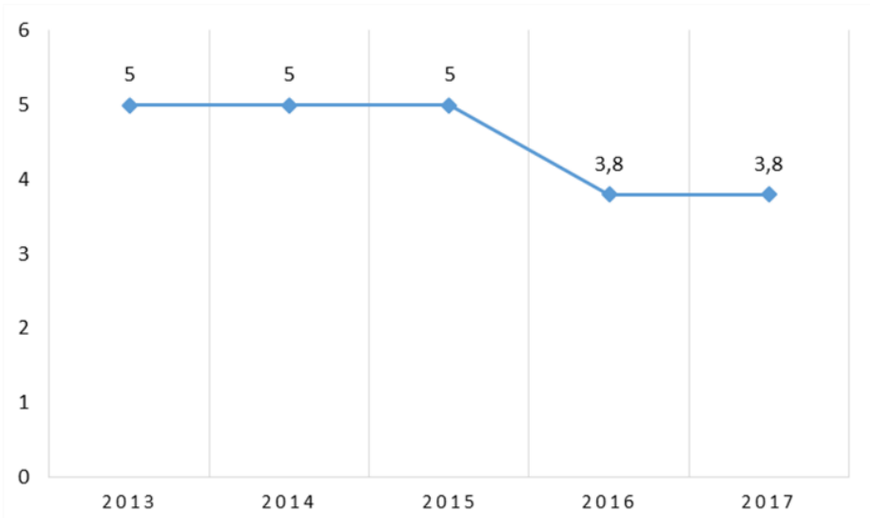

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.137 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.6.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2017 cenderung datar yaitu sebesar 25 persen.

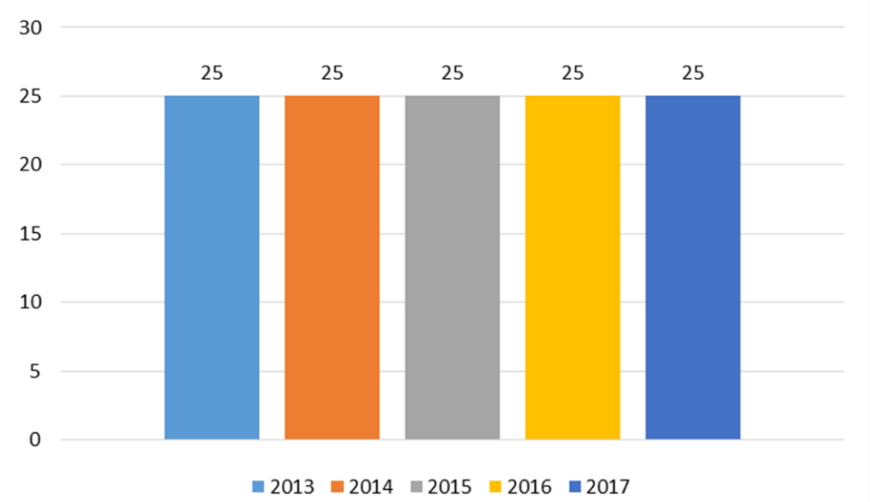

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.138 Persentase WKBSM Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.6.7 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Selama kurun waktu 2013 sampai 2014, capaian korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen.

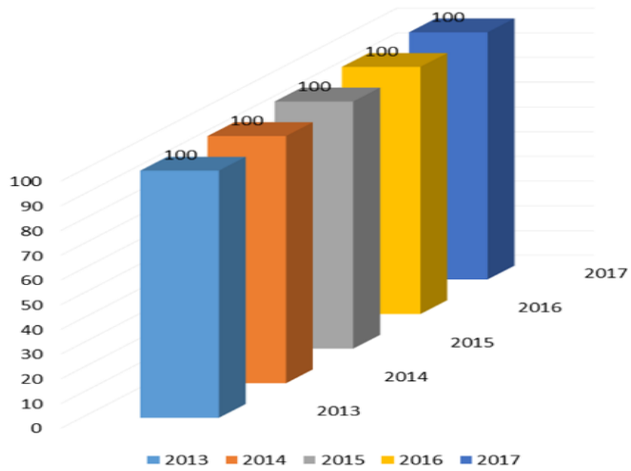

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.139 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.1.6.8 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, Provinsi Bali memiliki persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 67,6 persen.

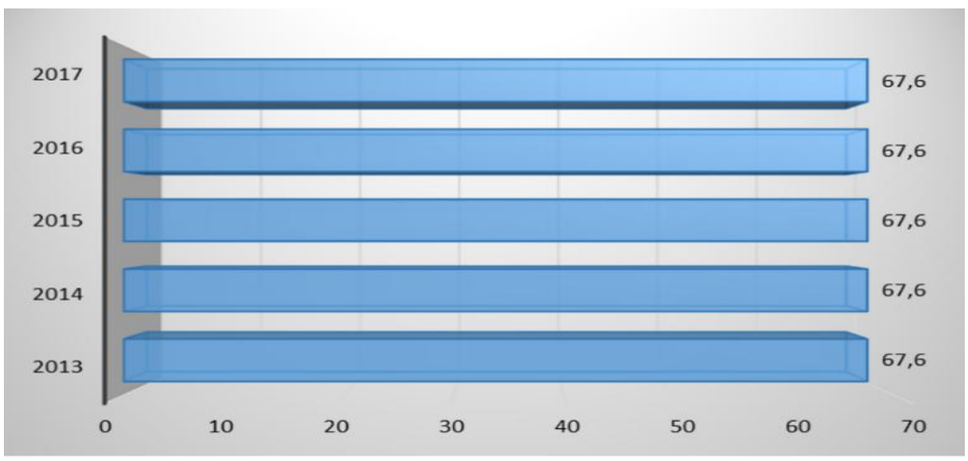

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.140 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.5.2.1 Tenaga Kerja

2.5.2.1.1 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha pekerja pada tahun 2014 sebesar 232, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 194 pada tahun 2013. Selama tahun 2015 sampai dengan 2017, angka sengketa pengusaha pekerja mengalami penurunan dari 55 menjadi 46.

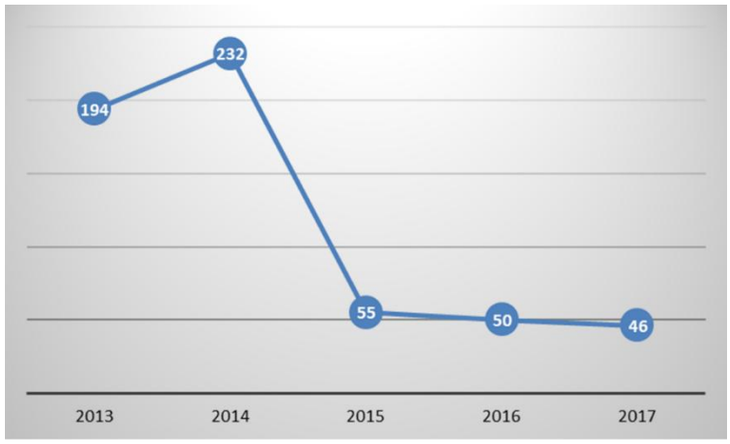

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.141 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Tabel 2.40 Tingkat Hubungan Industrial di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus	50	40	56	50	36
2	Status	PB : 40	PB : 30	PB : 34	PB : 21	PB : 13
		Anjuran : 10	Anjuran : 10	Anjuran : 22	Anjuran : 29	Anjuran : 22

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.1.2 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Pada tahun 2013, besaran kasus yang diselesaikan dengan PB sebesar 94, angka tersebut meningkat menjadi 155 pada tahun 2014. Namun, besaran kasus yang diselesaikan dengan PB mengalami penurunan dari 26 pada tahun 2015 menjadi 21 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, besaran kasus yang diselesaikan dengan PB meningkat kembali menjadi 22.

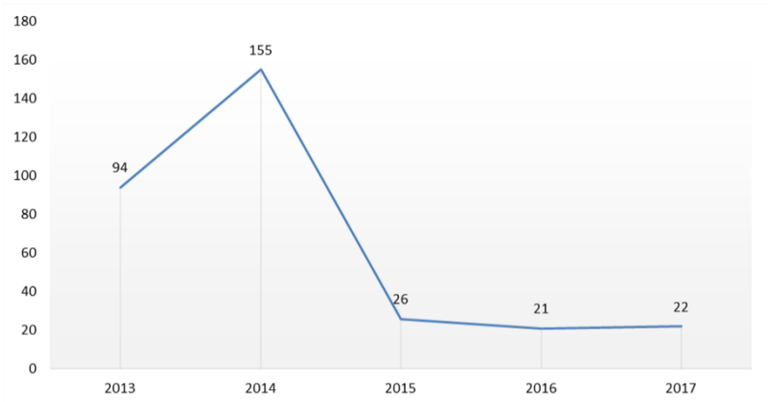

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.142 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

2.5.2.1.3 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar di Provinsi Bali mengalami penurunan dari 22.285 pada tahun 2014 menjadi 10.195 pada tahun 2017. Tahun 2014, pencari kerja yang ditempatkan di Provinsi Bali sebesar 4.113 dan meningkat menjadi 9.977 pada tahun 2015. Namun, sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.621.

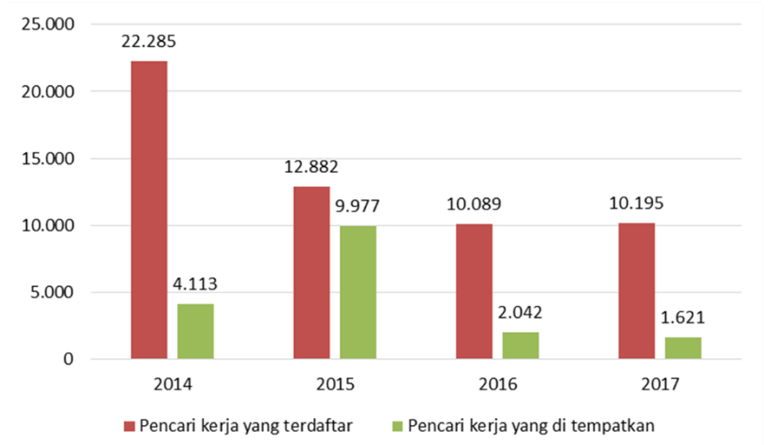

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.143 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan di Provinsi Bali Tahun 2014-2017

2.5.2.1.4 Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017. Pada tahun 2013, keselamatan dan perlindungan sebesar 123 dan meningkat menjadi 350 pada tahun 2017.

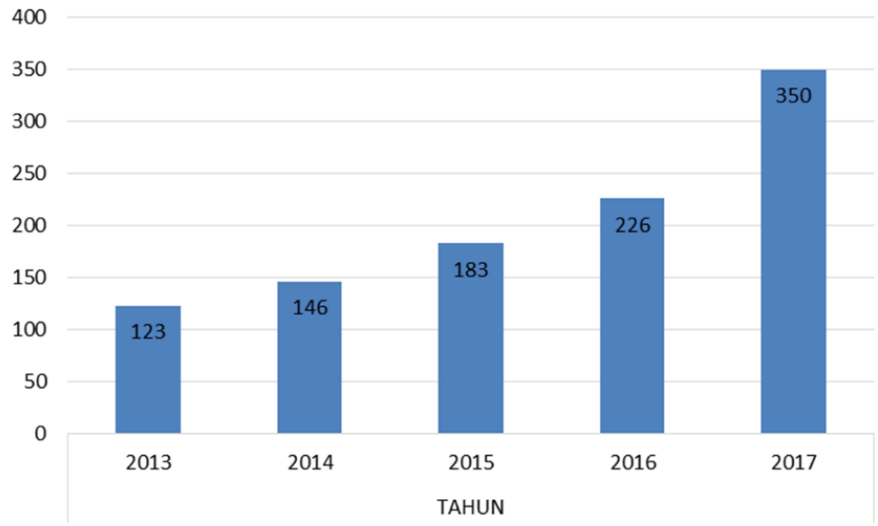

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.144 Keselamatan dan Perlindungan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.1.5 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Pekerja Jamsostek

Pekerja/buruh yang bekerja menjadi pekerja Jamsostek terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pekerja/buruh yang bekerja menjadi pekerja Jamsostek sebanyak 89.506 pada tahun 2013, meningkat menjadi 116.922 pada tahun 2017.

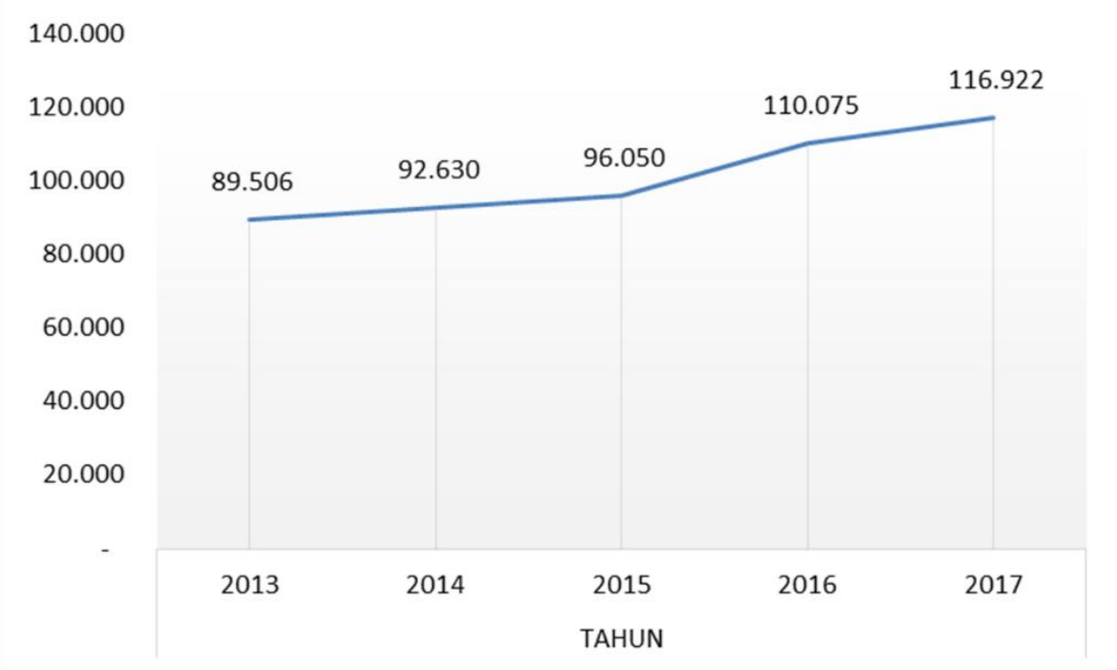

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.145 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Pekerja Jamsostek di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.1.6 Besaran Pemeriksanaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan perusahaan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017. Besaran pemeriksaan perusahaan pada tahun 2013 sebesar 440, meningkat menjadi 920 pada tahun 2017.

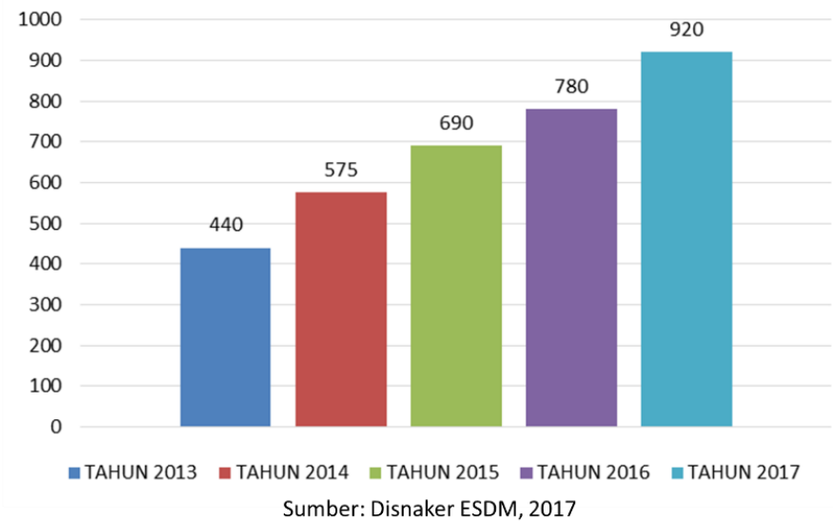

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.146 Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.1.7 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan di perusahaan pada tahun 2013 sebesar 145 dan meningkat menjadi 226 pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 besaran pengujian peralatan di perusahaan turun menjadi 216.

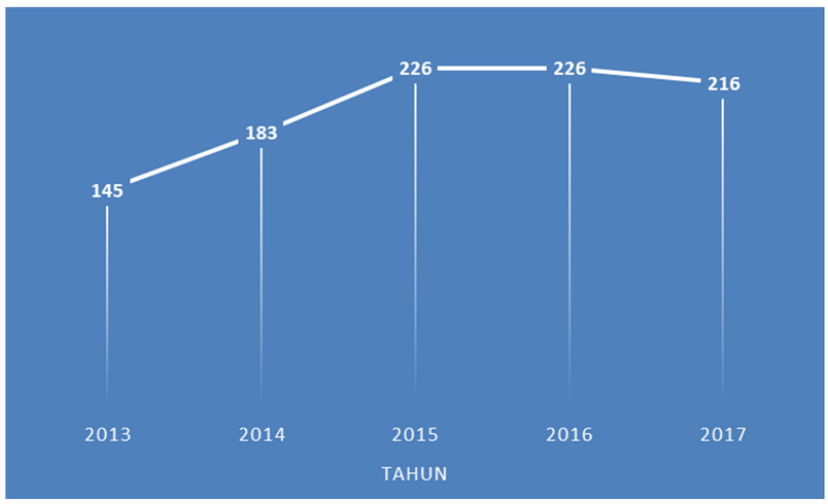

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.147 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.1.8 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2013 sebesar 280 dan meningkat menjadi 368 pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 mengalami penurunan mencapai 32. Tahun 2016, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi meningkat menjadi 540. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 100.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat sebesar 200 pada tahun 2013 dan mengalami penurunan menjadi 75 pada tahun 2014. Tahun 2015, mengalami peningkatan menjadi 90, namun sampai pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 30. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 70 pada tahun 2013 dan terus mengalami peningkatan menjadi 350 pada tahun 2016. Namun, mengalami penurunan menjadi 42 pada tahun 2017.

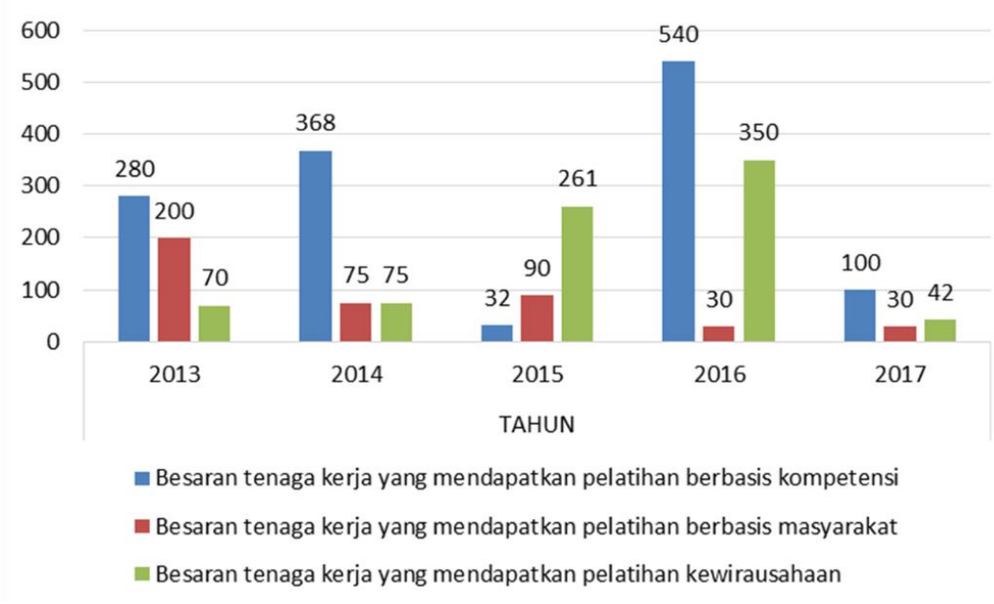

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.148 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Masyarakat, dan Kewirausahaan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.1.9 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 selama kurun waktu 2013 yaitu sebesar 7,13, tahun 2015 sebesar 7,73, tahun 2016 sebesar 7,92, dan 7,31 pada tahun 2017.

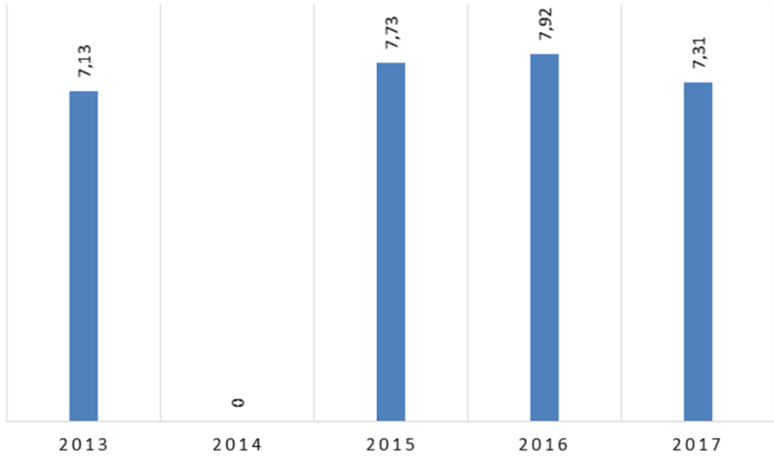

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.149 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.5.2.2.1 Capaian IPG dan IDG di Provinsi Bali

Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Perempuan (IDG). Indikator ini dapat dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Tahun 2015 capaian IPG Provinsi Bali mencapai 92,71 hal ini menunjukan capaian IPG yang cukup bagus. Jika diperbandingkan dengan provinsi se Pulau Jawa, maka Bali di atas Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, akan tetapi masih berada dibawah DKI Jakarta dan D I Jogjakarta.

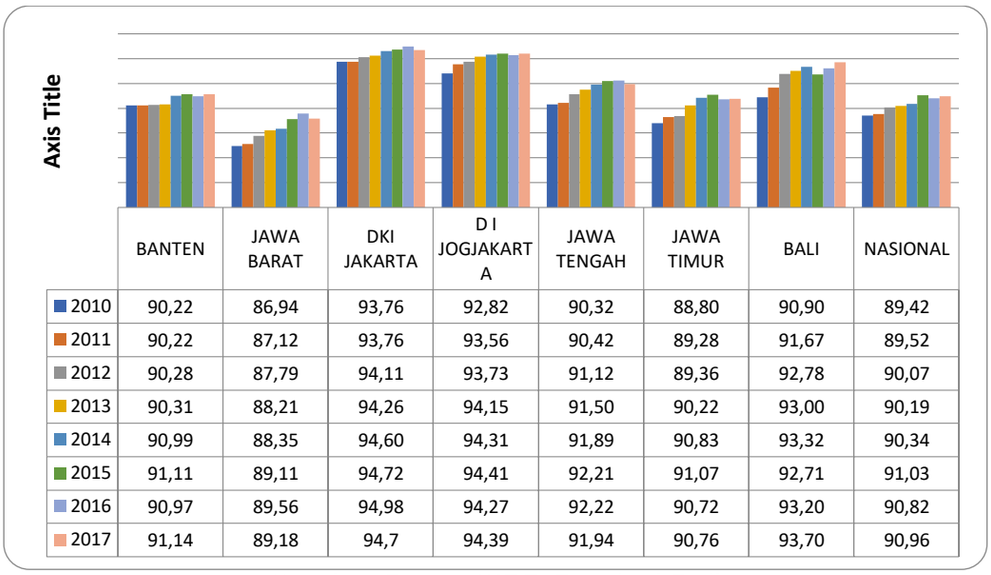

	BANTEN	JAWA BARAT	DKI JAKARTA	D I JOGJAKARTA	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	BALI	NASIONAL
2010	90,22	86,94	93,76	92,82	90,32	88,80	90,90	89,42
2011	90,22	87,12	93,76	93,56	90,42	89,28	91,67	89,52
2012	90,28	87,79	94,11	93,73	91,12	89,36	92,78	90,07
2013	90,31	88,21	94,26	94,15	91,50	90,22	93,00	90,19
2014	90,99	88,35	94,60	94,31	91,89	90,83	93,32	90,34
2015	91,11	89,11	94,72	94,41	92,21	91,07	92,71	91,03
2016	90,97	89,56	94,98	94,27	92,22	90,72	93,20	90,82
2017	91,14	89,18	94,7	94,39	91,94	90,76	93,70	90,96

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.150 Capaian IPG di Provinsi Bali Tahun 2010-2017

Selain IPG indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Dengan capaian IDG Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 63,76 hal ini menunjukan hasil yang kurang menggembirakan, masih berada dibawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi se Pulau Jawa dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat, bahkan sempat turun pada tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Jika diperbandingkan dengan beberapa Provinsi se Pulau Jawa, maka nampak posisi Provinsi Bali berada paling bawah dan jaraknya cukup jauh. Artinya para perempuan Bali dalam hal kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih di bawah dari para perempuan di provinsi se Pulau Jawa.

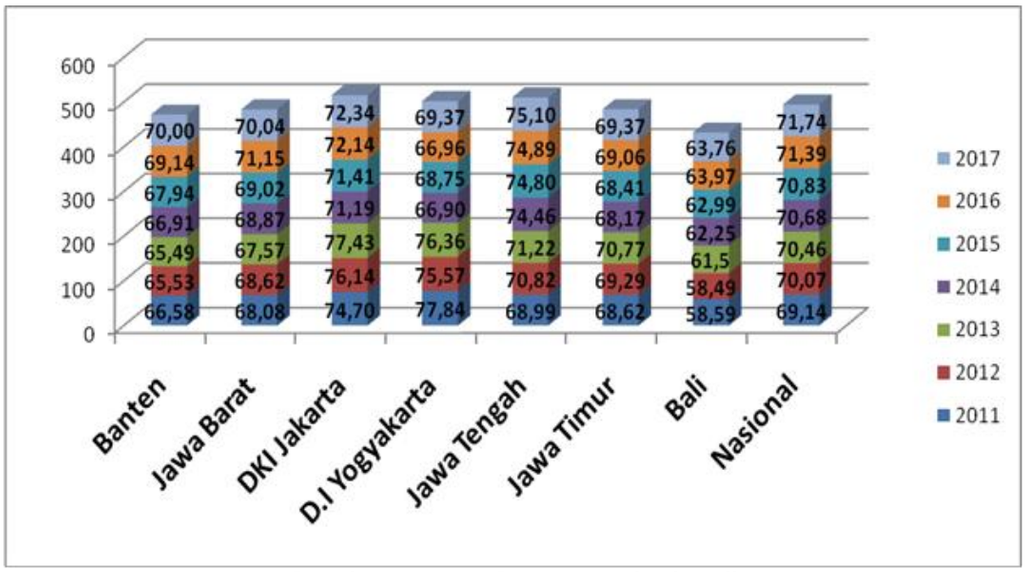

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.151 Capaian IDG di Provinsi Bali Tahun 2011-2017

2.5.2.2.2 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan pada tahun 2013 mencapai 43,73% dan terus meningkat sampai dengan 2016 dengan realisasinya mencapai 45,22. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan dimana realisasinya mencapai 41.70% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 46,03%. Kondisi ini menunjukan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan masih berada di bawah laki–laki yang mencapai 58,30%.

Kondisi ini menunjukan bahwa ideologi gender yang meletakkan peran perempuan di ranah domistik masih mempengaruhi eksistensi perempuan di dunia publik. Namun demikian perempuan boleh berbangga karena sudah diberi kesempatan menduduki posisi di pemerintahan, meskipun belum sepadan dengan laki-laki, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.41 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintan di Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018

URAIAN	T A H U N					
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	43,73	43,75	44,15	45,22	41,70	46,03

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.2.3 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR

Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh proporsi keanggotaan legislatif. Hasil Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014 menunjukan bahwa jumlah perempuan yang terpilih dan duduk di lembaga Legislatif jumlahnya masih sangat minim dan jauh dari harapan. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2013 keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif hanya mencapai 7,27 persen dan pada Pemulihan Umum Legislatif tahun 2014 meningkat menjadi 7,90 persen. Walaupun tahun 2017 terjadi peningkatan, namun masih jauh dari 30 persen kuota yang di tetapkan dalam Undang–Undang Pemilu. Namuan Demikian perempuan sudah mampu mengakses dunia politik yang selama ini di identifikasi dengan dunianya laki-laki. Angka ini menunjukan bahwa masih adanya kesenjangan gender yang cukup tinggi di lembaga Legislatif.

Tabel 2.42 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

T A H U N				
2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
7,27%	7,90%	9.09%	9.09%	9.09%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali Tahun 2015

2.5.2.2.4 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Sejak lama perempuan diidentikkan dengan aktivitas domestik dibandingkan dengan aktivitas publik seiring dengan transformasi sosial, perempuan yang

beraktivitas di ruang publik dan berperan pada ranah produktif semakin terlihat, akibatnya peran perempuan dalam proses pembangunan semakin nyata. Pada tahapan pembangunan di era industrialisasi, perempuan akan lebih banyak di pekerjakan sebagai angkatan kerja formal. Profesionalitas tenaga kerja perempuan di Provinsi Bali semakin terlihat dari banyaknya keterlibatan perempuan bekerja di lembaga swasta maupun di organisasi sosial lainnya yang mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir.

Momentum peningkatan tersebut perlu di pertahankan sehingga terjadi keseimbangan antara profesionalitas tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta pada kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik dimana pada tahun 2013 mencapai 96,9% dan tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 97,11%. Hal ini menunjukan bahwa perempuan lebih dominan bekerja di lembaga swasta.

Tabel 2.43 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pekerja Perempuan	1.031.341	1.027.908	1.024.044	1.108.416	1.123.807	1.209.274
Jumlah Pekerja Perempuan di	999.369	994.137	991.734	1.076.482	2.437.494	2.584.943
Persentase	45,5	44,39	45,05	45,7	46,1	46,78

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.2.5 Rasio KDRT

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya diibaratkan seperti fenomena gunung es. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat dan tidak terungkap sehingga kasus kekerasan ini tidak terdata dengan baik. Banyak kasus dimasyarakat yang tidak dilaporkan karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kasus KDRT merupakan aib keluarga dan masalah keluarga sehingga orang lain tidak perlu tahu. Pendekatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan dilakukan dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Memberikan wawasan yang benar kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak positif terhadap penurunan jumlah kasus KDRT di Provinsi Bali. Dilihat dari data korban yang melapor dan tercatat di lembaga pemberi layanan yang tersebar di provinsi Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2013 sebanyak 715 kasus (rasio : 0.070); sedangkan pada tahun 2014 kembali

menurun menjadi 549 kasus (rasio : 0,053). Pada tahun 2015, kasus KDRT mengalami kenaikan hingga 584 kasus (rasio : 0,057). Pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 489 kasus (ratio : 0,048). Pada tahun 2017 mengalami kenaikan kasus menjadi 507 kasus (ratio: 0,049). Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kasus menjadi 571 kasus dengan rasio 0,056.

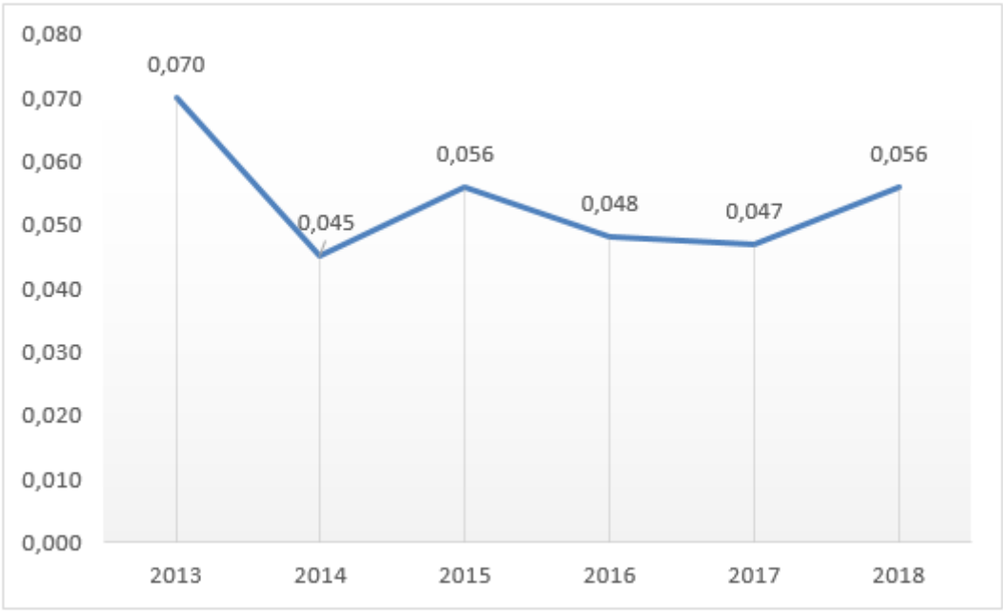

Sumber: SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.152 Rasio KDRT di Provinsi Bali

2.5.2.2.6 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Sesuai amanat Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 pada pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Namun demikian mengacu pada pasal 69, 70 dan 71 juga diatur tentang pengecualian bagi anak usia 13–15 tahun diijinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental dan sosial. Dari data yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali menunjukan bahwa masih ada anak usia 15–19 yang bekerja. Jumlah anak yang bekerja paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,64 persen dan setiap tahun jumlahnya semakin menurun dan pada tahun 2016 mencapai 3,70 persen.

Berdasakan data hasil survey angkatan kerja nasional sebagaimana dirilis BPS Provinsi Bali tahun 2018, jumlah tenaga kerja dibawah umur pada tahun 2017 sebanyak 133.763 orang atau 5,49 % dari keseluruhan angkatan kerja sebanyak 2.434.450 orang. Persentase ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh :

- Diijinkannya mempekerjakan anak usia 15 tahun keatas

- Data BPS tidak didasarkan pada batasan usia anak 0-18 tahun tetapi kelompok umur 15-19 tahun sehingga ada kemungkinan besar anak usia di atas 18 tahun yang cukup banyak.

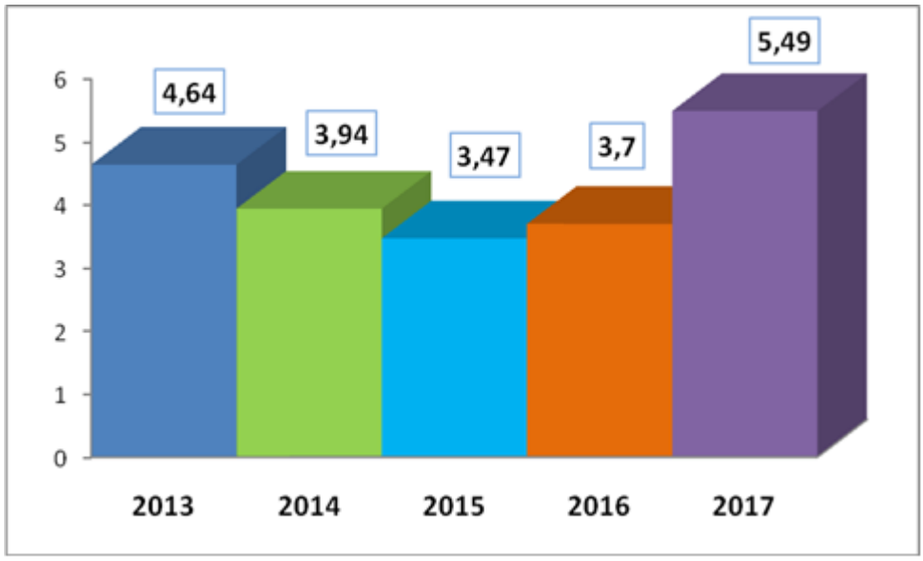

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.153 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.2.7 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Angkatan kerja perempuan di Provinsi Bali selama tiga (3) tahun terakhir terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 66,52 persen menjadi 67,24 persen pada tahun 2015. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari data jumlah angkatan kerja ini dapat diindikasikan masih adanya kesenjangan gender dimana angkatan kerja perempuan di Provinsi Bali jumlahnya masih di bawah laki–laki. Angkatan kerja perempuan ini bekerja di berbagai sektor pembang unan seperti sebagai PNS, pegawai swasta, perdagangan dan lain–lain.

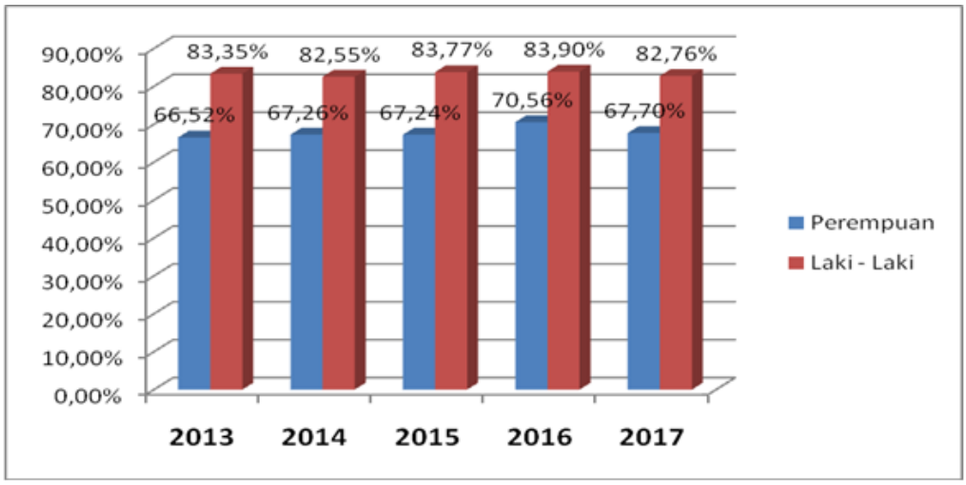

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.154 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.2.8 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Pada prinsipnya semua laporan pengaduan di unit pelayanan terpadu (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali ditangani secara keseluruhan. Untuk tahun 2013 terdapat adanya 25 kasus, tahun 2014 terdapat 28 kasus, tahun 2015 terdapat 59 kasus, tahun 2016 terdapat 34 kasus. Sementara untuk tahun 2017 sebanyak 30 kasus. Kasus dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat secara khusus di tahun 2015 walaupun kemudian menurun tahun berikutnya.

Seluruh pengaduan kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Provinsi Bali, mendapat penanganan atau yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu sehingga cakupan penanganan kasusnya 100%.

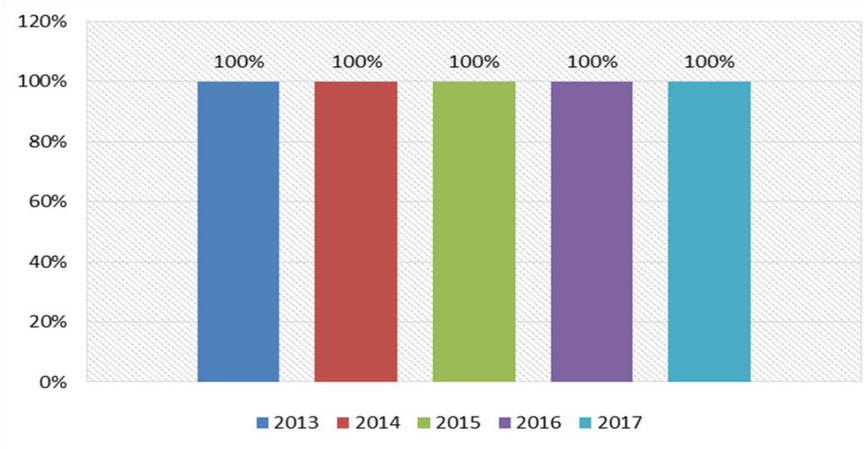

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.155 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.2.9 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Dinas Sosial Provinsi Bali, dapat kami sampaikan bahwa data cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut: tahun 2013 sebanyak 59 kasus, tahun 2014 sebanyak 60 kasus, tahun 2015 sebanyak 100 kasus, tahun 2016 sebanyak 84 kasus, dan pada tahun 2017 sebanyak 69 kasus.

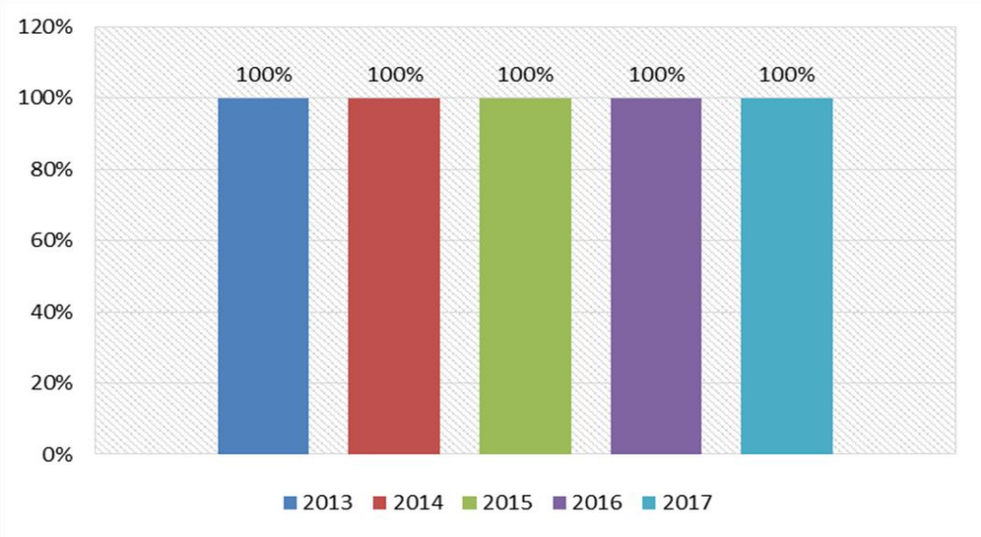

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.156 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.2.10 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Pengadilan Negeri Provinsi Bali, dapat kami sampaikan bahwa jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan diputuskan oleh Pengadilan atas dasar Perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan, dimana data yang diperoleh yaitu tahun 2013 sebanyak 444 kasus, tahun 2014 sebanyak 462 kasus, tahun 2015 sebanyak 432 kasus, tahun 2016 sebanyak 339 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 280 kasus. Pada 5 (lima) tahun terkahir dapat dilihat pada tabel dibawah, putusan pengadilan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak pada tahun 2014.

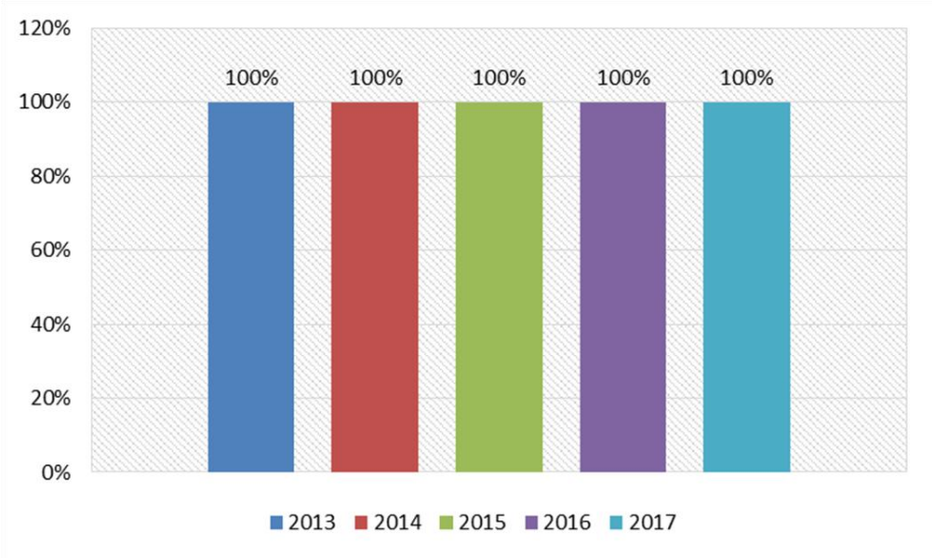

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.157 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.2.11 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan POLDA Bali dan Pengadilan Tinggi, jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2013 terdapat 20 kasus, tahun 2014 terdapat 30 kasus, tahun 2015 sebanyak 60 kasus, tahun 2016 sebanyak 38 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 20 kasus. Layanan bantuan hukum

yang diberikan sesuai dengan banyaknya korban yang membutuhkan bantuan hukum, sehingga cakupan layanan adalah 100%.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.158 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.2.12 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi Bali tahun 2013-2017 yang ditangani P2TP2A Provinsi Bali yaitu,pada tahun 2013 dari kasus yang masuk dan tertangani berjumlah 67 kasus dan terdapat 59 (88%) kasus yang mendapatkan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Pada tahun 2014 dari kasus yang masuk dan tertangani berjumlah 70 kasus dan terdapat terdapat 60 (86%) kasus yang mendapatkan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Pada tahun 2015 dari kasus yang masuk dan tertangani berjumlah 125 kasus dan terdapat 100 (80%) kasus yang mendapatkan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Pada tahun 2016 dari kasus yang masuk dan tertangani berjumlah 96 kasus dan terdapat 7,50 kasus yang mendapatkan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Sedangkan pada tahun 2017 dari kasus yang masuk dan tertangani berjumlah 78 kasus sampai saat ini dan terdapat 69 (88,5%) kasus yang mendapatkan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

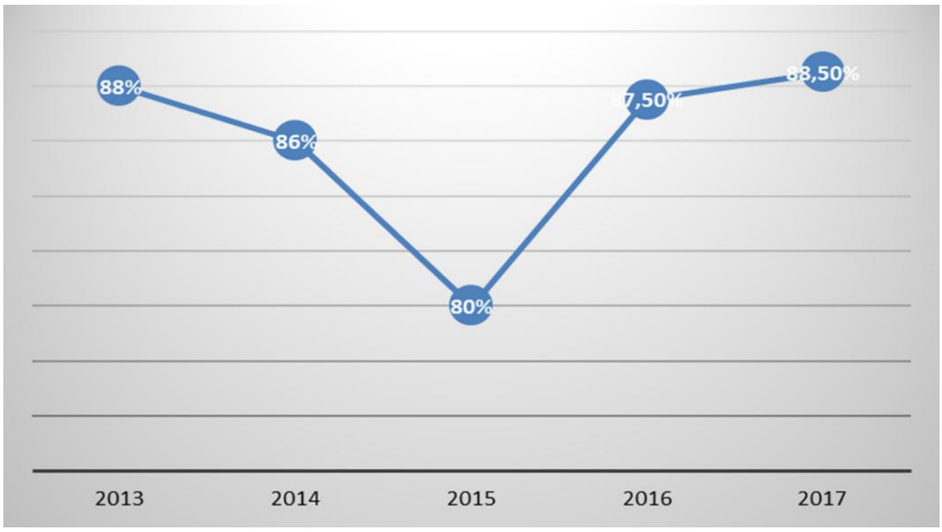

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.159 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.2.13 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD

Rasio APM mengalami peningkatan dari 0,98 pada tahun 2013 menjadi 1,01 pada tahun 2017. Rasio APM perempuan juga cenderung meningkat dari 93,39 pada tahun 2013 menjadi 96,56 pada tahun 2017. Namun, rasio APM perempuan selama kurun aktu 2013-2016 masih di bawah rasio APM laki-laki, Sedangkan tahun 2017 rasio perempuan mulai meningkat, hal ini disebabkan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar.

Tabel 2.44 Rasio APM Laki-Laki dan Perempuan di SD Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	T A H U N				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APM Laki-Laki	95,1%	96,23%	96,61%	97,1%	95,66%
2	APM Perempuan	93,39%	94,31%	94,66%	94,38%	96,56%
3	Ratio APM Laki / Perempuan	0,98	0,98	0,98	0,97	1,01

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.2.14 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk dengan usia yang sama. APM menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merukan indicator daya serap sekolah karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standard di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standard tersebut. APM SMP adalah penduduk usia 12 – 14 tahun yang

sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 12 – 14 tahun. Pada tahun 2013 APM tingkat SMP/sederajat sebesar 80,69% dan meningkat menjadi 85,32% pada tahun 2017. Walaupun APM SMP/Sederajat terjadi peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi masih ada ketimpangan antara Laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 APM perempuan mencapai 83,99% lebih rendah dari pada APM Laki-laki yang mencapai 86,55%.

Tabel 2.45 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP di Bali Tahun 2013-2016

NO	URAIAN	T A H U N				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APM Laki-Laki	78,78%	83,37%	85,60%	86,15%	86,35%
2	APM Perempuan	82,53%	85,80%	83,92%	83,84%	83,99%
3	Ratio APM Laki / Perempuan	1.05	1.03	0.98	0.97	0.97

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali Tahun 2016

2.5.2.2.15 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMA

APM SMA adalah penduduk usia 15 – 17 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMA dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 – 17 tahun. Pada tahun 2013 APM tingkat SMA/sederajat sebesar 67,10% dan meningkat menjadi 71,71% pada tahun 2016. Walaupun APM SMA/Sederajat terjadi peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi masih ada ketimpangan antara Laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2016 APM perempuan mencapai 67,76% lebih rendah dari pada APM Laki-laki yang mencapai 74,80%.

Tabel 2.46 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA di Bali Tahun 2013-2016

NO	URAIAN	T A H U N				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APM Laki-Laki	71,15%	74,64%	77,58%	74,80%	74,44%
2	APM Perempuan	62,48%	66,66%	64,16%	67,76%	70,34%
3	Ratio APM Laki + Perempuan	0,88	0,89	0,83	0,91	0,94

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.2.16 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di Perguruan Tinggi

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir APM tingkat Perguruan Tinggi/sederajat walaupun kecil akan tetapi mengalami peningkatan setiap tahunnya. APM tahun 2016 sebesar 21,78% lebih tinggi dari tahun 2015 yaitu sebesar 21,61%. Walaupun APM tingkat Perguruan Tinggi/sederajat terjadi peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi masih ada ketimpangan antara Laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2016 APM

perempuan mencapai 20,87% lebih rendah dari pada APM Laki-laki yang mencapai 22,69%. Namun demikian kondisi ini bisa diartikan sebagai suatu kemajuan bagi perempuan diamana mereka bersama laki- laki sudah mampu mengisi peluang di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.47 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi di Bali Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	T A H U N				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APM Laki-Laki	19,81%	23,32%	22,81%	22,69%	23,53%
2	APM Perempuan	15,67%	19,56%	20,41%	20,87%	21,98%
3	Ratio APM Laki + Perempuan	0,79	0,84	0,89	0,92	0,93

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.2.17 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia, karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Indicator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan baik dalam indek pembangunan manusia maupun indek pembangunan gender salah satunya adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun keatas, yang mampu membaca dan menulis. Dapat diartikan sebagai kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan, tertulis yang menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media. Hal ini dapat digunakan untuk melihat potensi intelektual masyarakat, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah.

Dari tren angka melek huruf tahun 2013-2017 dapat dilihat bahwa angka melek huruf perempuan sedikit lebih cepat dibandingkan angka melek huruf laki-laki yang meningkat tipis. Tercatat dari periode 2013 sampai 2016, peningkatan angka melek huruf perempuan mampu mecapai 3,18% sementara untuk laki- laki hanya sekitar 0,37%. Pada tahun 2016 terlihat bahwa angka melek huruf Provinsi Bali sudah mencapai level diatas 90%, dimana 96,37% penduduk laki-laki dan 89,23% untuk perempuan, dengan kata lain pada tahun 2016 sebanyak 3,63% penduduk laki-laki dengan 10,77% penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas yang masih buta huruf. Hal ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam hal baca dan tulis di Provinsi Bali antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebannya adalah belum meratanya

akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Provinsi Bali.

Tabel 2.48 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	T A H U N				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf Laki-Laki	96,00%	88,85%	88,94%	89,23%	89,40%
2	Angka Melek Huruf Perempuan	86,05%	96,28%	96,57%	96,37%	96,40%
3	Ratio Melek Huruf Laki + Perempuan	0,90	0,92	0,92	0,93	0,93

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali Tahun 2016

2.5.2.2.18 Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian

Secara umum perkembangan kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian mengalami fluktuasi pada rentang periode tersebut. Pada tahun 2014 kontribusinya paling tinggi dengan capaian 25,60%. pada tahun 2016 kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian mencapai 25,53% atau meningkat 0,53% dari Tahun 2015. Berdasarkan data sakernas BPS menunjukkan bahwa proporsi perempuan pekerja bebas non pertanian Provinsi Bali pada tahun 2016 sebatas 25,53% dari total 129.932 orang pekerja bebas non pertanian. Artinya penduduk laki-laki masih mendominasi pekerja bebas non pertanian di Provinsi Bali.

Hal ini dapat berpengaruh pada sumbangan pendapatan perempuan lebih kecil. Jika kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian meningkat tentu akan menurunkan proporsi kontribusi laki-laki. Akibatnya proporsi sumbangan pendapatan perempuan akan meningkat dan mempersempit gap dengan proporsi sumbangan pendapatan laki-laki.

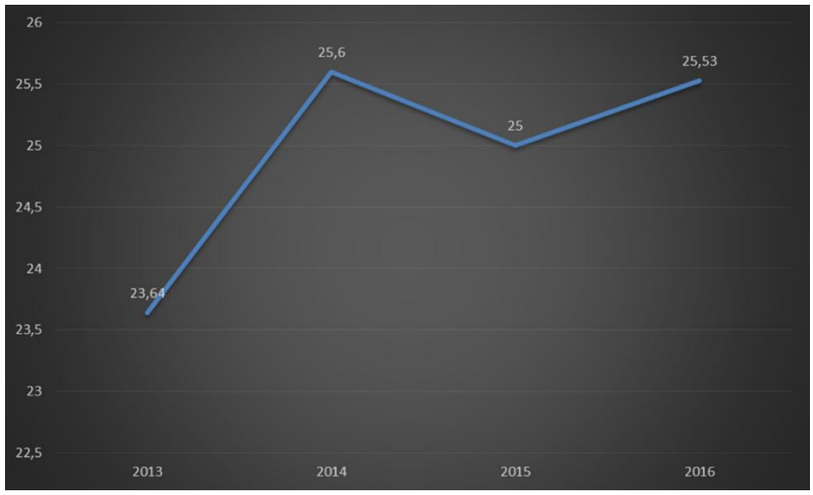

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali Tahun 2016

Gambar 2.160 Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Nonpertanian di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

2.5.2.3 Pangan

2.5.2.3.1 Ketersediaan Pangan Utama

Realisasi ketersediaan beras selama kurun waktu 2013 sampai 2017, berturut-turut yaitu 539.640 ton, 549.638 ton, 542.221 ton, 489.217 ton dan 470.080 ton tahun 2017. Realisasi ketersediaan tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi ketersediaan jagung cendrung mengalami penurunan dari 57.950 ton pada tahun 2013 menjadi 45.310 ton pada tahun 2017. Realisasi ketersediaan jagung belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 dan 2016 telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi ketersediaan kedelai selama kurun waktu 2014 sampai 2016, sebesar 8.188 ton, 7.259 ton, dan 6.784 ton. Selama kurun waktu 2014 sampai 2016, ketersediaan kedelai belum mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi ketersediaan ubi kayu selama tahun 2014 sampai 2016, sebesar 142.067 ton, 86.070 ton, dan 87.599 ton. Selama kurun waktu tersebut, realisasi ketersediaan ubi kayu belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi ketersediaan ubi jalar mengalami penurunan mulai dari 55.362 ton pada tahun 2014 menjadi 30.478 ton pada tahun 2016. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

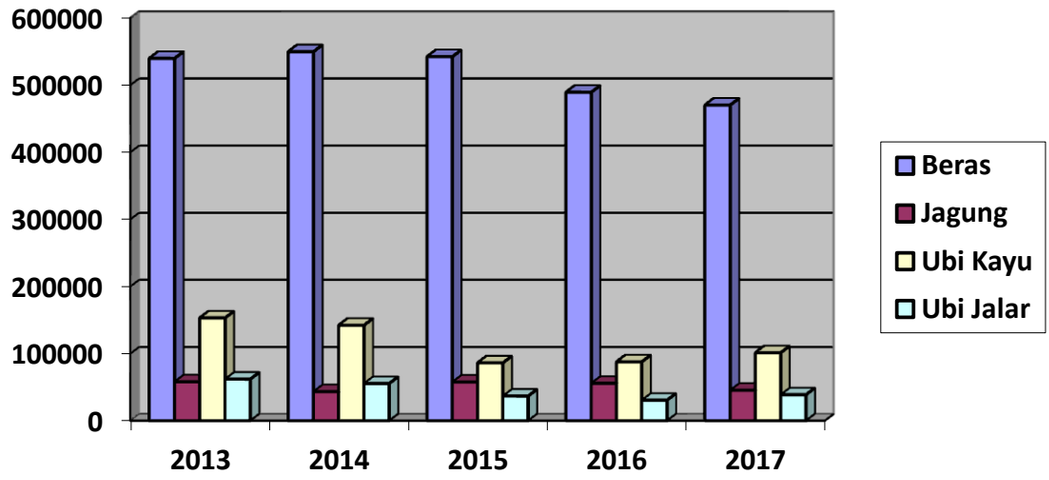

Gambar 2.161 Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.3.2 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Tabel 2.49 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Energi (kkal/kap/hari)	2.514	2.553	2.607	2.591	2.591
Protein (grkal/kap/hari	73	73	76	60	60

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Ketersediaan energi mengalami peningkatan dari tahun 2013, dimana ketersediaan energi sebesar 2.514 kkal/kap/hari pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 2.591 kkal/kap/hari pada tahun 2017. Realisasi ini sudah melebihi standar kebutuhan energy nasioanl (WNPG) yaitu sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Dari total ketersediaan energi lebih didominasi oleh pangan nabati sebesar 2.108 kkal/kap/hari atau 79,70 %, sedangkan pangan hewani hanya sebesar 537 kkal/kap/hari atau sebesar 20,30%. Begitu juga ketersediaan protein untuk Bali sudah memenuhi angka kecukupan protein. Ketersediaan protein pengalami peningkatan, dimana tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 76 grkal/kap/hari dan selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 60 grkal/kap/hari. Walaupun terjadi penurunan ketersediaan protein sudah mencukupi kebutuhan.

2.5.2.3.3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.50 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	92,79	93,40	94,32	95,27	96,43

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Kegiatan pengawasan pangan, penataan kelembagaan dan penyampaian informasi keamanan pangan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dari pusat, provinsi dan Kabupaten telah memberikan hasil yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan keamanan pangan yang aman dikonsumsi bagi masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sebesar 92,79 % menjadi 96,43 % tahun 2017.

Namun dengan adanya peningkatan keamanan pangan bukan berarti tugas dinas Ketahanan Pangan sudah berakhir, karena masih ada beberapa pangan yang masih tercemar residu baik cemaran pestisida, formalin maupun cemaran oleh mikroorgnisme beredar dipasaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

2.5.2.4 Pertanahan

2.5.2.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Jumlah tanah yang tercatat di Provinsi Bali yaitu sebanyak 4.592 bidang tanah dengan luas 2.856,9 ha dan senilai 2,879 triliun rupiah. Dari total tanah tersebut, sebanyak 1.675,3 ha sudah bersertipikat dan 1.181,6 ha belum bersertipikat. Jumlah bidang tanah terbesar Provinsi Bali ada di Kabupaten Badung dengan 1.042 bidang tanah. Dari jumlah bidang tersebut, tercatat 1.027 bidang tanah telah bersertipikat dan 15 bidang tanah belum bersertipikat. Dari sisi luas tanah terbesar ada di Kabupaten Karangasem yaitu 5.611.030,40 m^2. Dari sisi nilai tanah terbesar ada di Kota Denpasar dengan nilai 1,696 triliun rupiah. Pola pemanfaatan tanah yang paling banyak di Provinsi Bali yaitu dengan pola pinjam pakai sebanyak 416. Sedangkan, untuk sewa sebanyak 185 dan kerjasama pemanfaatan sebanyak 10.

Tabel 2.51 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Tercatat Pada Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Bali

No	Kab / Kota	Jumlah Bidang	Luas (m^2)	Nilai (Rp)
1	Karangasem	579	5.611.030,40	59.250.455.678,00
2	Klungkung	964	2.433.146,65	70.476.380.800,00
3	Bangli	208	1.774.686,20	22.167.997.457,50
4	Gianyar	433	2.033.172,14	139.062.849.224,00
5	Badung	1.042	2.841.239,00	267.739.851.625,00
6	Denpasar	403	2.625.681,13	1.696.072.096.246,00
7	Tabanan	490	3.638.144,80	112.435.947.045,00
8	Buleleng	241	5.522.924,75	352.615.408.285,00
9	Jembrana	222	2.083.657,10	157.310.661.700,00
10	Luar Bali (AsramaMahasiswa dan Kantor. Perwakilan)	10	6.148,00	2.724.725.268,00
Jumlah		**4.592**	**28.569.830,17 (2.856,9 Ha)**	**2.879.856.373.328,50 (2,879 Triliyun)**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.52 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Yang Sudah Dan Belum Bersertipikat

No	Kab / Kota	Sudah Sertipikat		Belum Sertipikat	
		Jumlah Bidang	Luas (m^2)	Jumlah Bidang	Luas (m^2)
1	Karangasem	545	4.215.770.00	34	1.395.260,40
2	Klungkung	947	2.302.183,55	17	130.963,10
3	Bangli	165	399.264,00	43	1.375.422,20
4	Gianyar	403	1.015.331,14	30	1.017.841,00
5	Badung	1.027	2.258.602,00	15	582.637,00
6	Denpasar	340	1.624.499,13	63	1.001.182,00
7	Tabanan	451	1.736.519,80	39	1.901.625,00
8	Buleleng	207	1.365.844,75	34	4.157.080,00
9	Jembrana	205	1.829.669,00	17	253.988,10
10	Luar Bali (AsramaMahasiswa dan KantorPerwakilan)	9	5.471,00	1	677
Jumlah		**4.299**	**16.753.154,37 (1.675,3 Ha)**	**293**	**11.816.675,80 (1.181,6 Ha)**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

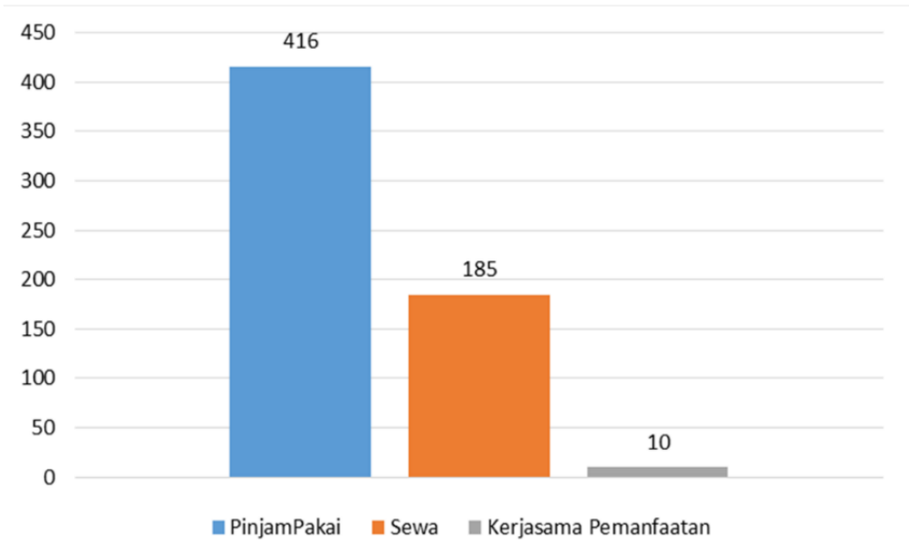

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.162 Pola Pemanfaatan Tanah Provinsi Bali

2.5.2.5 Lingkungan Hidup

2.5.2.5.1 Tersedianya dan Tersusunnya Dokumen RPPLH Provinsi

Dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bali selama tahun 2013 sampai 2015 belum tersedia. Namun, pada tahun 2015 telah dilakukan kajian akademis dan pada tahun 2016 telah dilakukan penyusunan Ranperda RPPLH Provinsi Bali. Pada tahun 2017 telah tersedia Perda RPPLH Provinsi Bali yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017. Lebih lanjut pada tahun 2018 rencananya akan disusun kembali RPPLH tersebut.

2.5.2.5.2 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi

Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bali telah dintergrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang termuat dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 sebagaimana uraian tabel 2.51 Analisis Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD.

Tabel 2.53 Analisis Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD

No	Outline RPJMD	Perlu Isian		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Ket.
		Ya	Tidak		
Bab I	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang	Y		a) Memasukkan skenario pembangunan daerah yang berasas berkelanjutan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.	
1.2	Dasar Hukum Penyusunan		Tidak		
1.3	Hubungan Antar Dokumen		Tidak		
1.4	Maksud dan Tujuan		Tidak		
1.5	Sistematika Penulisan		Tidak		
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah				
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	Y		a) Memasukkan permasalahan/tantang an, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	

				b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek geografi dan demografi.	
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Y		a) Memasukkan permasalahan/tantang an, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi kesejahteraan masyarakat eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek kesejahteraan masyarakat.	

2.3	Aspek Pelayanan Umum	Y		a) Memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian layanan umum kepada masyarakat. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek pelayanan umum.	

2.4	Aspek Daya Saing Daerah	Y		a) Memberikan gambaran terkait kondisi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi eksisting daya saing daerah, usaha peningkatan, dan pencapaian target pembangunan berlandaskan asas berkelanjutan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek daya saing daerah.	
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.3	Kerangka Pendanaan		Tidak		
Bab IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah				

4.1	Permasalahan Pembangunan	Y		a) Memberikan analisis atas permasalahan utama pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari permasalahan pembangunan di daerah.	

4.2	Isu Strategis	Y		a) Menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	

				b) Memasukkan isu utama hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari isu strategis dalam pembangunan di daerah.	
Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
5.1	Visi	Y		Disesuaikan dengan visi kepala daerah. Memastikan asas pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan salah satu visi kepala daerah terpilih, jika dari semua visinya belum ada yang menyebutkan pembangunan berkelanjutan.	
5.2	Misi	Y		Disesuaikan dengan visi kepala daerah dan penjabaran misinya oleh tim penyusun dokren daerah. Memastikan dokren daerah sudah mencakup program sebagai penjabaran misi yang mendukung asas pembangunan berkelanjutan.	
5.3	Tujuan dan Sasaran	Y		Memastikan dokren daerah sudah mencakup pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	

Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah				
6.1	Strategi	Y		Menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	Y		Menjelaskan serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan juga dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
6.3	Program Pembangunan Daerah	Y		a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi;	

				energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan.	

				b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program pembangunan di daerah, di sertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja.	
Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah				
7.1	Program Perangkat Daerah	Y		a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur,	

				peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, daninklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan.	

				b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program perangkat daerah, di sertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja. c) Memasukkan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program perangkat daerah.	
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tidak		
Bab IX	Penutup		Tidak		

2.5.2.5.3 Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) yang telah tersusun pada Tahun 2013 yaitu sebesar 6 dokumen, yaitu KLHS Sumber Daya Air, KLHS RTR Kawasan Pariwisata Air, KLHS RTR Kawasan Pariwisata Candi Dasa, KLHS RTR Kawasan Pariwisata Soka, KLHS KDTWK Bedugul-Pancasari-Kintamani, dan KLHS RPJMD. Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen (KLHS RTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida) dan tahun 2015 sebanyak 2 dokumen (KLHS RTR Kawasan Suci Pura Agung Sebsakih dan KLHS RTR Kawasan Suci Pura Goa Lawah). Tahun 2017 sebanyak 3 dokumen, yaitu KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, KLHS Revisi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, dan KLHS Kawasan Sepanjang Arteri Primer Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padangbai.

2.5.2.5.4 Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

KLHS tersebut telah digunakan untuk Kebijakan Rencana Program tingkat daerah Provinsi Bali. KLHS Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 digunakan sebagai dasar untuk KRP tingkat Provinsi.

2.5.2.5.5 Peningkatan Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas lingkungan hidup Bali pada akhir RPJMD 2013-2018 menunjukan angka yang cukup baik yaitu sebesar 62,48, hal ini dapat dilihat dari penjumlahan indeks kualitas air sebesar 62,10, indeks kualitas udara sebesar 88,14, dan tingkat tutupan lahan sebesar 37,20. Namun capaian Tahun 2018 ini belum lah dapat mencapai target Bali Green Province yaitu sebesar 70 yang disebabkan karena tingkat tutupan lahan yang masih relatif kecil dan hal ini akan dapat tercapai pada RPJMD Tahun 2019-2023.

Bila dilihat dari target pencapaian program IKLH pada RPJMD 2013-2018 setiap tahunnya telah melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk itu tahun berikutnya akan dioptimalkan pengembangan penanaman tanaman keanekaragaman hayati (*bio diversity*), tanaman produksi, pemantapan ruang terbuka hijau, taman kota dan pedesaan serta pengembangan kebun arboritum. Permasahan yang dihadapi dalam pencapaian target RPJMD di bidang lingkungan hidup masih ada beberapa yang belum tuntas dapat diselesaikan seperti capaian tingkat tutupan lahan yang disebabkan karena adanya alih fungsi lahan yang masih cukup tinggi serta kondisi lahan kritis yang berbatu dan kritis air, hal ini disebabkan karena laju percepatan kematian pohon yang ditanam lebih besar dari tingkat tanaman yang hidup.

Solusi yang diambil dalam rangka meningkatkan tingkat tutupan lahan antara lain meliputi penanaman tanaman keanekaragaman hayati, pengembangan ruang terbuka hijau kota (RTHK) , penanaman tanaman arboritum dan lain-lain, namun hal ini masih perlu ditingkatkan melalui kewajiban kabupaten/kota untuk memiliki tanaman keanekaragaman hayati (*bio diversity*) minimal 8 (delapan) hektar per masing-masing Kabupaten/kota dan mendorong pengembangan taman-taman baik di perkotaan maupun di pedesaan.

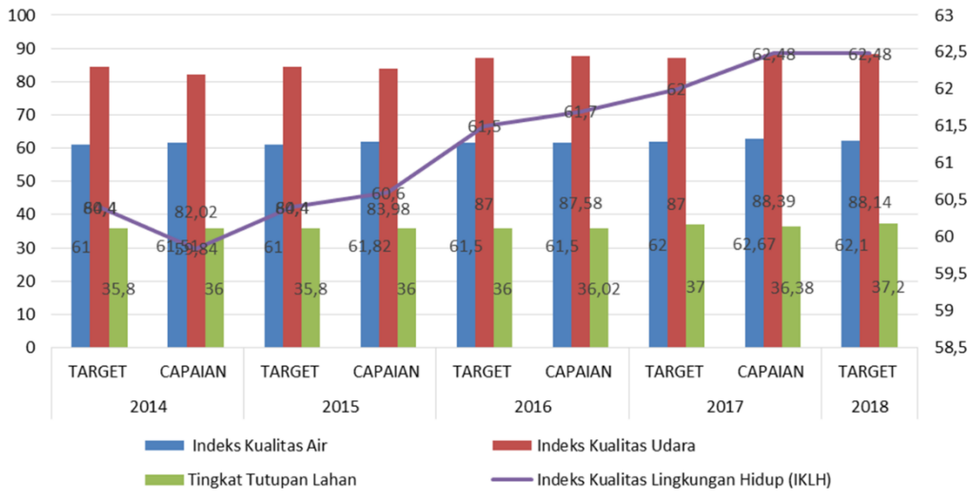

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.163 Peningkatan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Tahun 2014-2017

2.5.2.5.6 Laporan Inventarisasi GRK

Berdasarkan laporan data dari Dinas Lingkungan Hidup, GRK yang berhasil diturunkan selama kurun waktu 2013 sampai 2017 yaitu sebesar 2 persen.

Tabel 2.54 Laporan Inventarisasi GRK Provinsi Bali Tahun 2013-2017

No	Tahun	BAU (tonCO2-eq)	Penurunan Emisi GRK (Gg CH4)			Σ Penurunan Emisi		
			Mitigasi-2	Mitigasi-3	Mitigasi-6	(Gg CH4)	(tonCO2-eq)	(%)
1	2013	541.755	0,31	1,05	0,11	1,46	30.587	5,65
2	2014	576.909	0,55	1,44	0,11	2,10	44.060	7,64
3	2015	607.107	0,92	1,85	0,11	2,88	60.502	9,97
4	2016	633.973	1,42	2,71	0,11	4,24	89.127	14,06
5	2017	658.613	2,07	3,42	0,11	5,60	117.688	17,87

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.5.7 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi

Hingga saat ini belum tersusun Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi dikarenakan tidak adanya kegiatan tersebut di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Namun DISLH Provinsi Bali telah melakukan pengusulan untuk Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Tahun 2013 hingga 2018. pada Tahun 2013 diusulkan 2 Desa di Buleleng dan Gianyar dan telah mendapat Sertifikat Proklim. Tahun 2014 terdapat 19 (sembilan belas) usulan Proklim, Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) Desa Proklim, Tahun 2016 terdapat 14 (empat belas) usulan dan Tahun 2017 terdapat 12 (dua belas) usulan, namun di Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak setujui untuk Proklim.

2.5.2.5.8 Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali tidak mengelola limbah B3 akan tetapi melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan dan mengelola limbah B3. Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan yaitu 50 perusahaan, 29 perusahaan, 30 perusahaan, 30 perusahaan, dan 27 perusahaan.

2.5.2.5.9 Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Yang Ditandatangani Gubernur

Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan di Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, DISLH hanya rekomendasi izin pengumpulan limbah B3.

2.5.2.5.10 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah pengawasan dan pengendalian izin lingkungan tahun 2013 yaitu 90 kawasan dan 164 dokumen izin lingkungan, tahun 2014 sampai dengan 2017 yaitu 18 kawasan dan 50 dokumen izin lingkungan. Tahun 2017 terdapat 47 perusahaan yang telah diberikan pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan/izin PPLH oleh Provinsi Bali.

2.5.2.5.11 Peningkatan Kapasitas Dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi

Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1 (satu) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), hal ini memang belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Solusi yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan kinerja ASN Dinas Lingkungan Hidup dan pemerhati lingkungan dalam melakukan pengawasan, pemberian informasi dan pengaduan terhadap para pelaku yang terindikasi membuang limbah/ sampah ke lingkungan.

2.5.2.5.12 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Di Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan pelatihan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Lingkungan Hidup. Selama tahun 2013 sampai tahun 2017 terdapat pelatihan kepada 80 orang, 40 orang, 40 orang, 40 orang, dan 30 orang.

2.5.2.5.13 Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pelatihan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 570/03-X/HK/2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia, Narasumber dan Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Selama tahun 2013 sampai tahun 2017 terdapat pelatihan kepada 80 orang, 40 orang, 40 orang, 40 orang, dan 30 orang.

2.5.2.5.14 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Jumlah peserta evaluasi Adipura, Adiwiyata, Kalpataru pada tahun 2013 yaitu Adipura di 9 kab/kota dan 44 Sad Kertih. Selama 2014 sampai 2016, yaitu 3 Adipura di 9 kab/kota dan 30 Sad Kertih. Pada Tahun 2017, melalui kegiatan Desa Sadar Lingkungan telah dilaksanakan Lomba Desa Unit Percontohan Pengelolaan Sampah, dan telah ditetapkan dalam Keputusan GUbernur Bali Nomor 1517/03-X/HK/2017 tentang Pemenang Lomba Desa Unit Percontohan Pengelolaan Sampah, dengan pemenang sebagai berikut:

1. Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
2. Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
3. Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem

Selain itu pada Tahun 2017 juga melaksanakan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Bali, melalui kegiatan Kemitraan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1894/03-X/HK/2017 tentang Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Bali. Terdapat 4 Adipura di 9 kab/kota dan 30 Adiwiyata pada tahun 2017.

2.5.2.5.15 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Lokasi Usaha Dan Dampak Lintas Kabupaten/Kota Yang Ditangani

Melalui kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan telah dilaksanakan tindak lanjut dari pengaduan adanya dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan. Selama kurun waktu 2013 sampai 2017 telah ditindaklanjuti 157 kasus, 20 kasus, 20 kasus, 10 kasus, dan 20 kasus dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan.

2.5.2.5.16 Tersedianya Data Dan Informasi Penanganan Sampah Di Wilayah Provinsi

Data timbulan sampah Provinsi Bali tersedia dari tahun 2013 – 2016, namun penanganan sampah (pengelolaan sampah) baru dilakukan pendataan pada Tahun 2017 antara lain yaitu volume sampah yang masuk ke TPA, volume sampah yang didaur ulang dan volume sampah yang dikompos. Volume timbulan sampah selama kurun waktu 2013 sampai 2016 yaitu 9.809,64 m^3/hari, 10.005,84 m^3/hari, 10.266,40 m^3/hari, dan 12.892,12 m^3/hari.

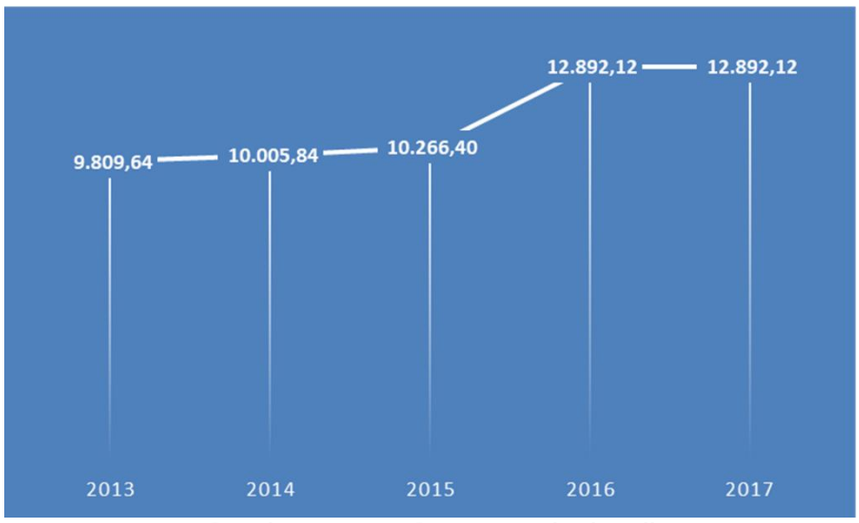

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.164 Volume Timbulan Sampah m^3/hari di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.5.17 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Pada Kondisi Khusus Di Provinsi

Penanganan sampah pada TPA Regional di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. Pada tahun 2014, penanganan sampah sebesar 68 persen meningkat menjadi 75 persen pada tahun

2016 dan tahun 2017, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 73 persen.

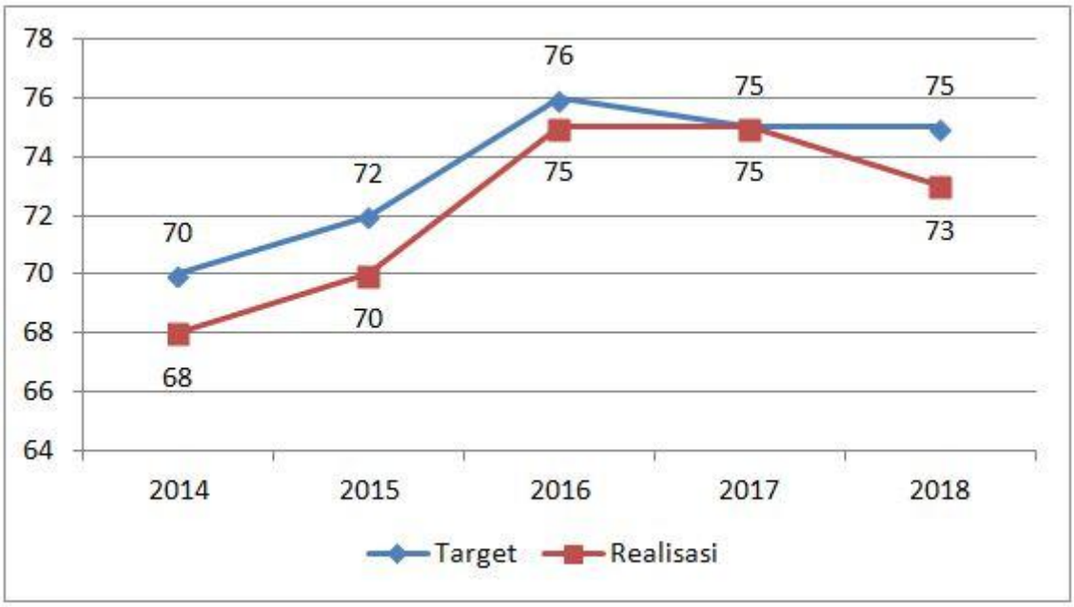

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.165 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.5.18 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Untuk jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 52 persen pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 65 persen pada tahun 2018.

2.5.2.5.19 Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang ditetapkan tanggal 24 Oktober 2017, sehingga Tahun 2017 baru dimulai perhitungan untuk jumlah sampah yang terkurangi melalui program 3 R (reduce, reuse, recycle) yaitu sebanyak 17%.

2.5.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.5.2.6.1 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP selama tahun 2014 sampai 2017, yaitu 0,49, 0,73, 0,80, dan 0,93. Kabupaten Klungkung pada tahun 2017 memiliki persentase kepemilikan KTP tertinggi yaitu sebesar 85,56 persen. Kabupaten Badung menjadi Kabupaten dengan persentase kepemilikan KTP terendah yaitu 50,34 persen.

Tabel 2.55 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio/Persentase Penduduk Ber-KTP	-	0,49/49%	0,73/73%	0,80/80%	0,93/93%
2	Persentase kepemilikan KTP-EL di Provinsi Bali	-	49,63%	73,01%	80%	912%
3	Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	8,50%	10,32%	18,49%	34,83%	33,64%
4	Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Provinsi Bali	-	-	900.197	758.114	947.153
5	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Provinsi Bali	2,75%	3,44/3,14%	0,5/14,59%	0,17/ 17,90%	0,31/31,7%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

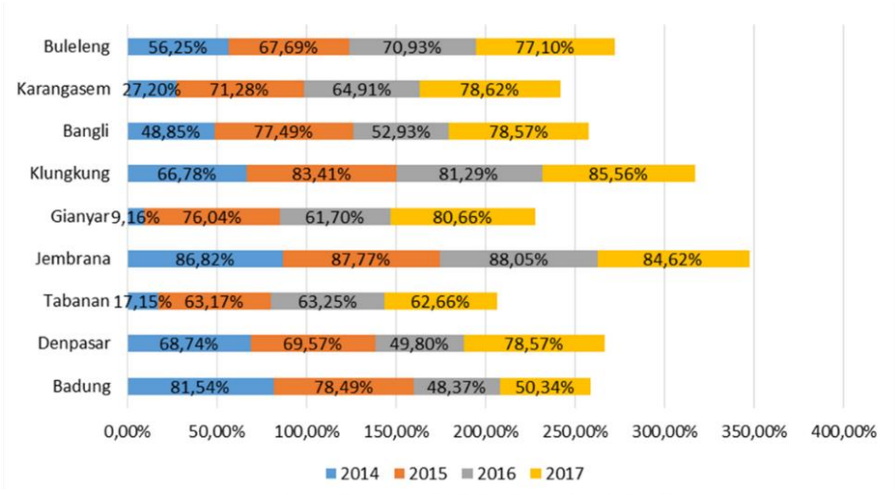

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.166 Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2017

2.5.2.6.2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Tabel 2.56 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Bayi Berakte	7,50%	10,32%	18,49%	43,80%	81,30%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.6.3 Rasio Pasangan Berakte Nikah

Pada tahun 2017, rasio pasangan berakte nikah tertinggi di Provinsi Bali ada di Kabupaten Bangli dengan rasio 0,28. Sedangkan, Kabupaten Gianyar memiliki rasio pasangan berakte nikah terendah pada tahun 2017 dengan rasio 0,1.

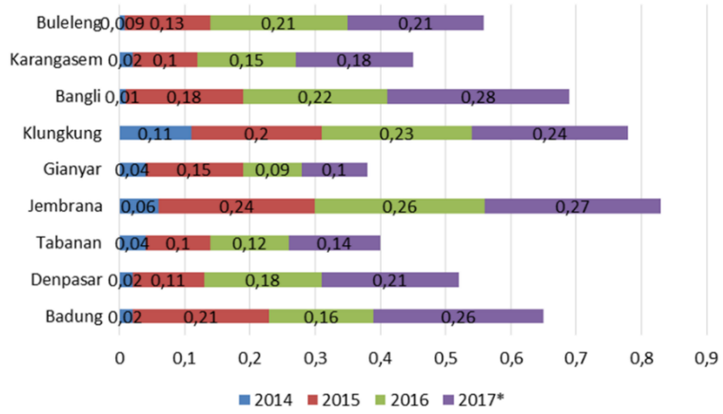

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.167 Rasio Pasangan Berakte Nikah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2017

2.5.2.6.4 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Tabel 2.57 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Database Kependudukan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017 seluruh Kabupaten/Kota di Bali telah mengoprasikan SIAK. Pada tahun 2017, 6 Kabupaten/Kota telah mengoprasikan SIAK versi 6 dan 3 Kabupaten/Kota mengoprasikan SIAK versi 5.7.

Tabel 2.58 Kabupaten/Kota Mengoprasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	Badung	Ada Versi 3	Ada Versi 4	Ada Versi 4	Ada Versi 5	Ada Versi 6
2	Denpasar	Ada Versi 2	Ada Versi 3	Ada Versi 3	Ada Versi 5	Ada Versi 6
3	Tabanan	Ada Versi 3	Ada Versi 3	Ada Versi 4	Ada Versi 5	Ada Versi 6
4	Jembrana	Ada Versi 3	Ada Versi 4	Ada Versi 4	Ada Versi 5	Ada Versi 5.7
5	Gianyar	Ada Versi 3	Ada Versi 3	Ada Versi 4	Ada Versi 5	Ada Versi 5.7
6	Klungkung	Ada Versi 3	Ada Versi 4	Ada Versi 4	Ada Versi 5	Ada Versi 6
7	Bangli	Ada Versi 3	Ada Versi 4	Ada Versi 4	Ada Versi 5	Ada Versi 5.7
8	Karangasem	Ada Versi 3	Ada Versi 4	Ada Versi 5	Ada Versi 5	Ada Versi 6
9	Buleleng	Ada Versi 3	Ada Versi 4	Ada Versi 4	Ada Versi 5	Ada Versi 6

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.6.5 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.59 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
KTP Berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.6.6 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel 2.60 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Akte Kelahiran	8,50%	10,32%	18,49%	34,83%	33,64%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.5.2.7.1 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Jumlah LPM yang dilatih tiap tahun adalah 57 orang (kecuali tahun 2018 hanya 28 orang, karena adanya rasionalisasi), sehingga tiap tahun terdapat peningkataan sebesar 57 orang, yakni di tahun 2014 sebanyak 114 orang, di tahun 2015 sebanyak 171 orang dan di tahun 2016 sebanyak 228 orang , serta 2017 sebanyak 285. Jadi dari 716 LPM di Provinsi Bali, baru hanya terbina 313 LPM sampai dengan tahun 2018, sehingga sangat diperlukan untuk melaksanakan pelatihan bagi pengurus LPM.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.168 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.7.2 Persentase LPM Berprestasi

Setiap tahun dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan dengan melibatkan LPM sebagai pendukung, mengacu kepada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Desa dan Kelurahan. Persentase LPM berprestasi di Provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 2,37 persen dan meningkat menjadi 14.24 persen tahun 2018.

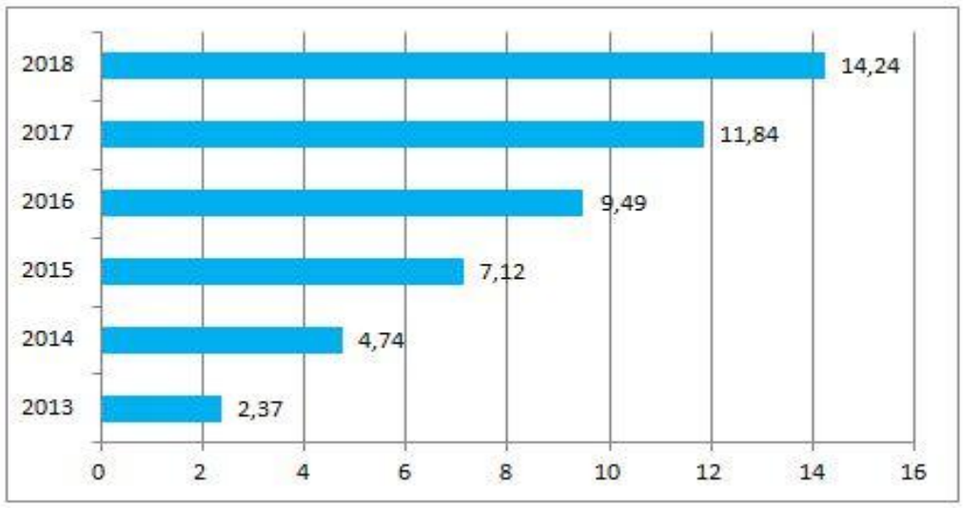

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.169 Persentase LPM Berprestasi di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.7.3 Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan

Tim Penggerak PKK Provinsi Bali adalah mitra kerja Pemerintah Provinsi Bali bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Bali. Gerakan PKK dengan 10 Program Pokok PKK telah dirasakan secara nyata mampu menurunkan angka kematian ibu/bayi, meningkatkan perekonomian keluarga melalui UP2K PKK, pelestarian lingkungan dan berbagai keberhasilan lainnya. Jejaring gerakan PKK dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa, aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan efektif dan efisien dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi program.

Peningkatan kualitas dan mutu kader PKK di Provinsi Bali harus dilaksanakan secara berjenjang untuk menjaga terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui pembinaan dari jenjang diatasnya yaitu TP-PKK Provinsi ke jenjang dibawahnya yaitu TP-PKK Kabupaten/Kota dan nantinya diteruskan ke tingkat Desa atau Kelurahan. Pembinaan mencakup penguatan dan penyelarasan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, penyampaian informasi-informasi baru dan kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan isu terbaru.

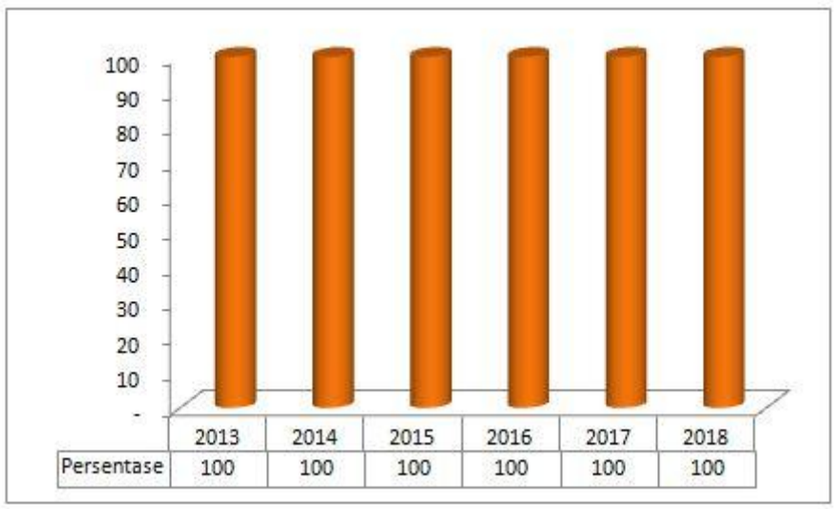

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.170 Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan di Provinsi Bali Tahun 2014-2018

2.5.2.7.4 Persentase Posyandu Aktif

Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, telah melakukan pemantauan dan sekaligus mengevaluasi terhadap keberadaan dan perkembangan Kelompok posyandu, terutama kelompok – kelompok posyandu Strata Pratama dan Strata

Madya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap sehingga desa yang dapat dibina sekitar 34 desa 242 Posyandu di seluruh Kabupaten / Kota se Bali.

Berdasarkan dari hasil kegiatan tersebut, hampir seluruh Posyandu yang kita bina dan kita pantau, sudah dapat dikatakan aktif tiap bulan buka dan dapat dikatagorikan Strata Madya yang mana dapat dilihat dari belum Optimalnya perhatian Pemerintah desa terhadap Lembaga Posyandu khususnya terhadap Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Posyandu yang belum optimal.

Permasalahan dari semua posyandu yang di bina adalah masih banyak yang berstatus Madya yang akan menuju Posyandu Purnama, hal ini mengacu pada aktivitas bulannya serta Posyandu tersebut rata – rata belum punya Dana Sehat sesuai dari kriteria dari Posyandu Purnama.

Namun Demikian Posyandu yang ada di seluruh Bali sudah menunjukan peningkatan dari tahun ketahun yang mana sudah terbukti peningkatan dari Strata Posyandu yang pada tahun sebelumnya menunjukan Perubahan pada masing – masing Strata. Posyandu dikatakan aktif apabila minimal Posyandu yang ada di Desa atau Kelurahan 25 % sudah mencapai tingkat Posyandu Purnama, yaitu posyandu yang telah melakukan penimbangan lebih dari 8 (delapan) kali dalam setahun dengan rerata kader yang bertugas 5 orang atau lebih, cakupan sasaran yang ditimbang kegiatan KIA, KB, dan imunisasi sudah 50 % atau lebih, sudah memiliki kegiatan tambahan, namun sasaran yang berpartisipasi dalam dana sehat kurang dari 50 %. Jadi sesuai dengan uraian diatas yang termasuk Posyandu Aktif adalah Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri.

Dengan diadakan berbagai macam usaha Pembinaan ke Kabupaten/Kota sudah dapat di lihat bahwa dari Tahun ke Tahun Posyandu yang aktif (Strata Purnama + Strata Mandiri) sudah mengalami peningkatan baik dari segi kwantitas maupun kwalitas.

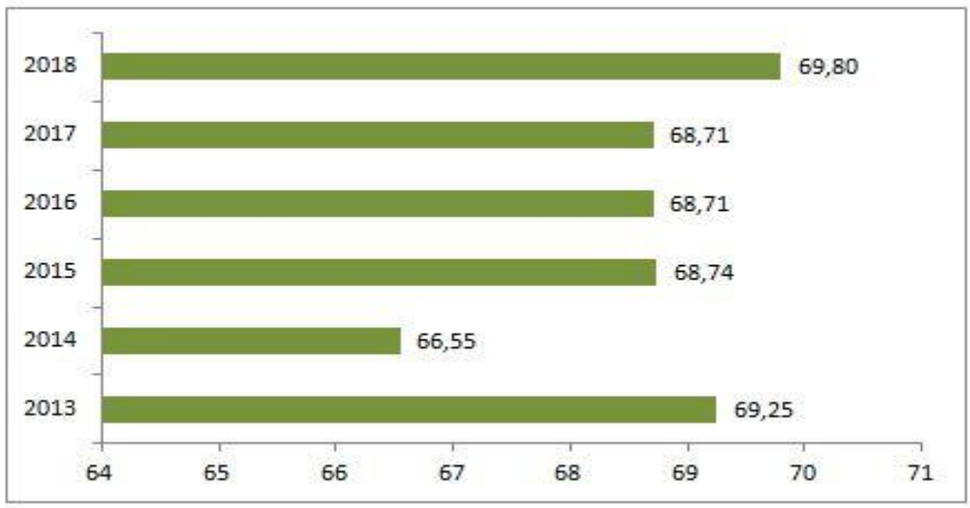

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.171 Persentase Posyandu Aktif di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Jumlah posyandu terus mengalami peningkatan dari 4.783 posyandu pada tahun 2013 menjadi 4.800 posyandu pada tahun 2017. Dari 4.800 posyandu di tahun 2017, terdiri atas 49 posyandu pratama, 1.412 posyandu madya, 3.140 posyandu purnama, dan 158 posyandu mandiri.

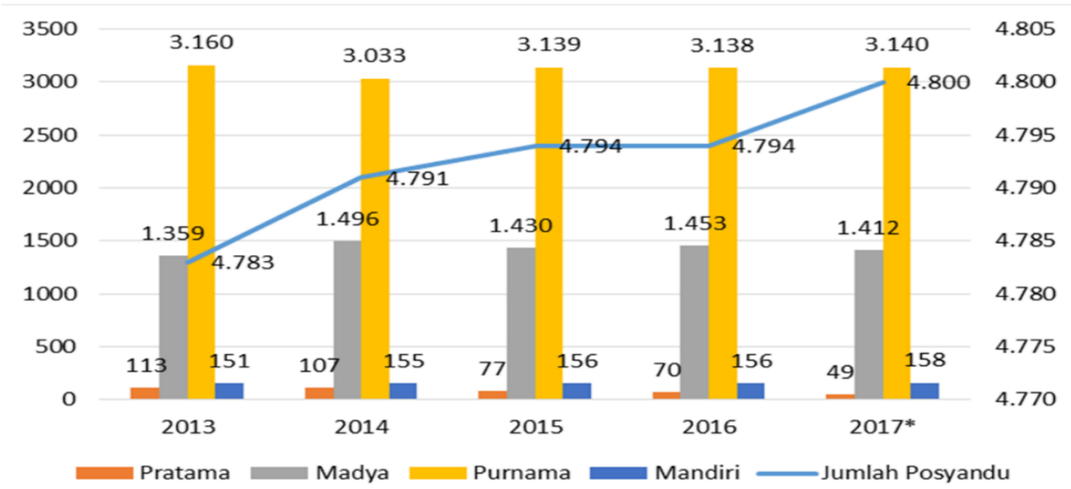

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.172 Posyandu Model/Integrasi yang Dibina di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.7.5 Persentase Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Persentase perbandingan antara jumlah swadaya murni masyarakat terhadap jumlah bantuan penunjang termasuk program-program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2013 s/d 2018 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013 persentase sebesar 85,39 persen yang berarti jumlah swadaya murni masyarakat

adalah 0,8 kali daripada jumlah bantuan penunjang. Pada tahun 2014 persentase sebesar 91,25 persen yang berarti jumlah swadaya murni masyarakat adalah 0,9 kali daripada jumlah bantuan penunjang. Pada tahun 2015 persentase sebesar 176,19 persen yang berarti bahwa swadaya murni masyarakat adalah 1,76 kali lebih besar daripada bantuan penunjang. Pada tahun 2016 persentase sebesar 176,88 persen yang berarti jumlah swadaya murni masyarakat adalah 1,77 kali lebih besar daripada bantuan penunjang. Pada tahun 2017 persentase sebesar 833,14 persen yang berarti bahwa swadaya murni masyarakat adalah 8,33 kali lebih besar daripada bantuan penunjang , serta pada tahun 2018 persentase sebesar 526,28 persen yang berarti bahwa swadaya murni masyarakat adalah 5,26 kali lebih besar daripada bantuan penunjang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai persentase di bawah 100 persen berarti jumlah swadaya murni masyarakat lebih rendah daripada jumlah bantuan penunjang. Hal ini berarti partisipasi masyarakat dan gotong royong untuk berswadaya dalam proses pembangunan di Provinsi Bali masih kurang. Sedangkan nilai persentase di atas 100 persen berarti bahwa swadaya murni masyarakat lebih tinggi daripada jumlah bantuan penunjang di Provinsi Bali. Hal ini berarti partisipasi masyarakat dan gotong royong untuk berswadaya dalam proses pembangunan di Provinsi Bali sudah tinggi.

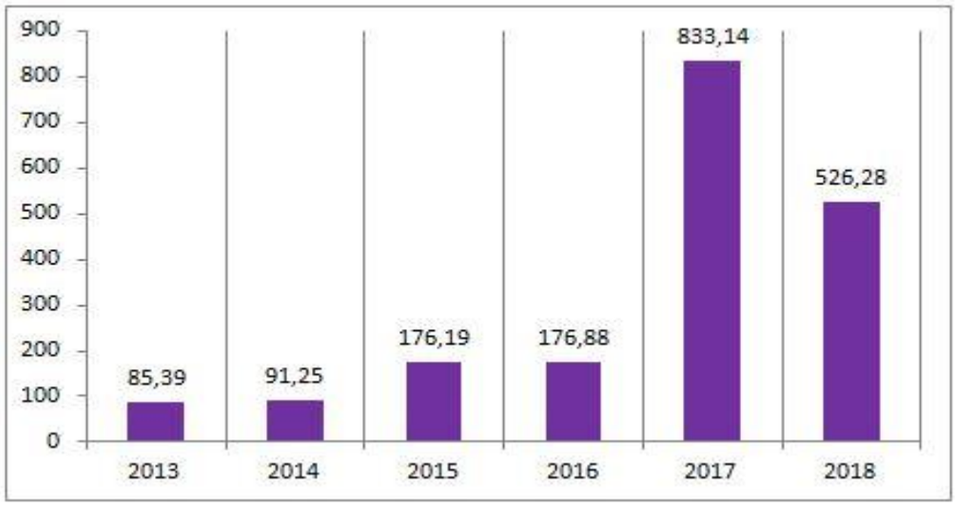

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.173 Persentase Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.7.6 Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah Dibina

Gerakan PKK dengan 10 Program Pokok PKK yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK mulai dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Tingkat Desa telah mampu menunjukkan trend peningkatan derajat kehidupan masyarakat Bali diantaranya penurunan angka kematian ibu/bayi, peningkatan jumlah kelompok UP2K PKK, dan masih banyak keberhasilan di bidang lainnya.

Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK terus dilaksanakan untuk penyempurnaan program dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui Lomba Kegiatan PKK (Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan, HKG dan Jambore) Tingkat Provinsi Bali. Pelaksanaan Lomba selain bertujuan untuk mengevaluasi, juga sebagai bentuk penghargaan kepada Tim Penggerak PKK Desa yang telah berkomitmen dan menghasilkan inovasi - inovasi baru dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Provinsi Bali adalah Pembinaan kepada pemenang Lomba Kegiatan PKK Desa di sembilan Kabupaten/Kota, yaitu 9 jenis Lomba Kegiatan PKK dan 7 jenis Lomba Jambore Tingkat Provinsi Bali.

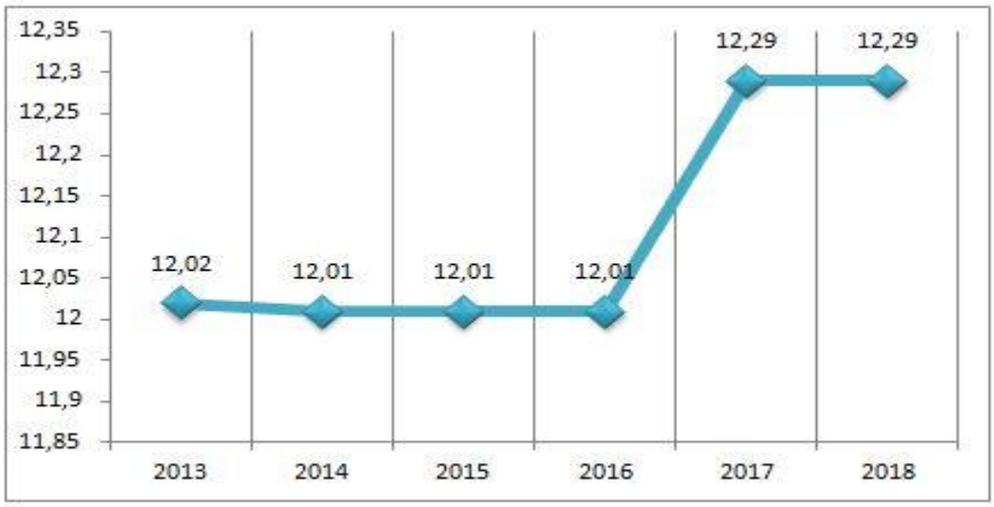

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.174 Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah Dibina di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.5.2.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Provinsi Bali selama kurun aktu 2013 sampai 2018 yaitu sebesar 2,15 persen.

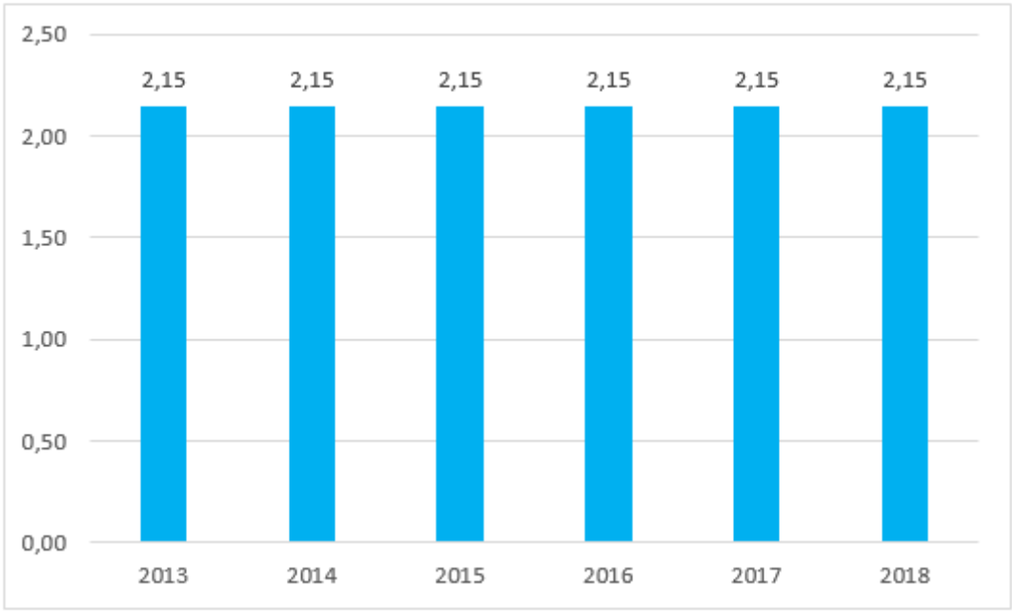

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.175 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.2 Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2013 di Provinsi Bali sebesar 2,3. Pada tahun 2014 dan 2015 TFR di Provinsi Bali sebesar 2,2. Tahun 2016 TFR di Provinsi Bali sebesar 2,3. Pada tahun TFR di Provinsi Bali sebesar 2,21 dan pada tahun 2018 TFR di Provinsi Bali sebesar 2,1.

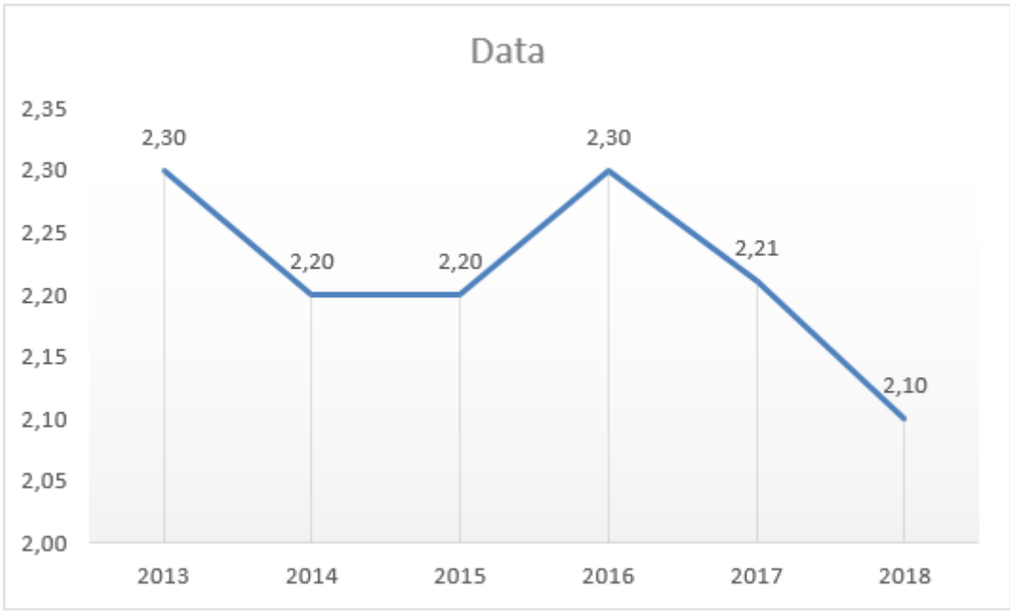

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.176 Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2016 sebesar 30,95 persen. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 25,49 persen pada tahun 2017. Program kampung KB dimulai tahun 2016, dari target 57 unit sudah terbentuk 64 unit pada tahun 2017.

2.5.2.8.4 Persentase KB Aktif dan Drop Out (DO) KB di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Persentase KB aktif mengalami penurunan dari 85,11 persen pada tahun 2013 menjadi 80,98 persen pada tahun 2016. Namun, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 81,04 persen. Peserta KB aktif tertinggi pada tahun 2017 ada di Kabupaten Buleleng sebesar 110,24 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 30,173 persen. Persentase DO KB cenderung meningkat dari 11,69 persen pada tahun 2013 menjadi 15,08 persen pada tahun 2015. Namun, mengalami penurunan mencapai 5,29 persen pada tahun 2017. Peserta KB mandiri cenderung mengalami penurunan dari 379,959 pada tahun 2013 menjadi 331,707 pada tahun 2017. Prevalensi akseptor KB juga mengalami penurunan dari 583,279 pada tahun 2013 menjadi 532,053 pada tahun 2017.

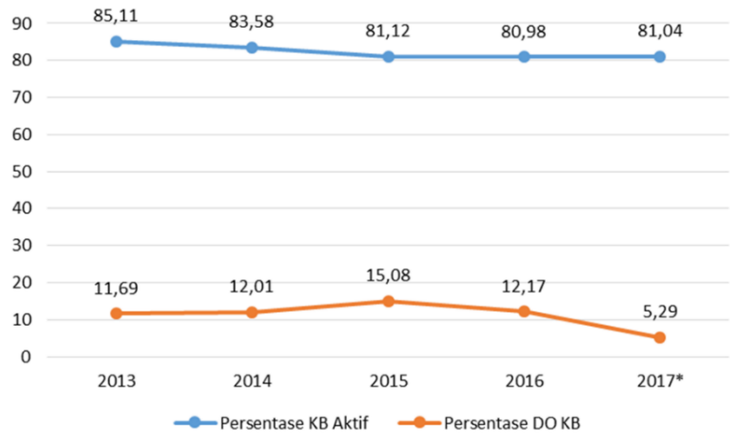

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.177 Persentase KB Aktif dan DO KB di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

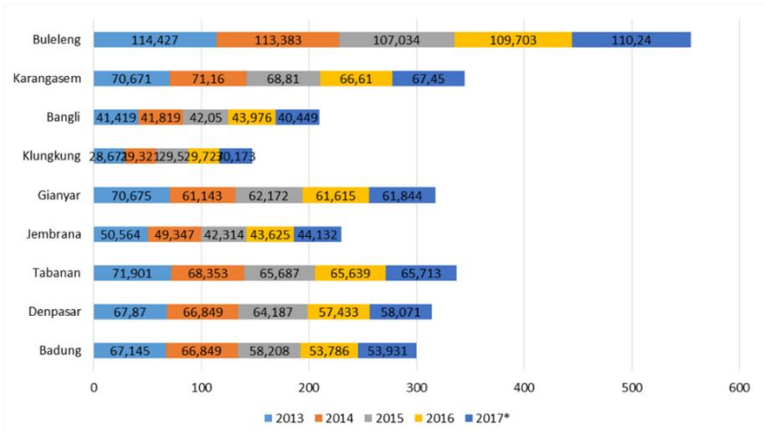

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.178 Peserta KB Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

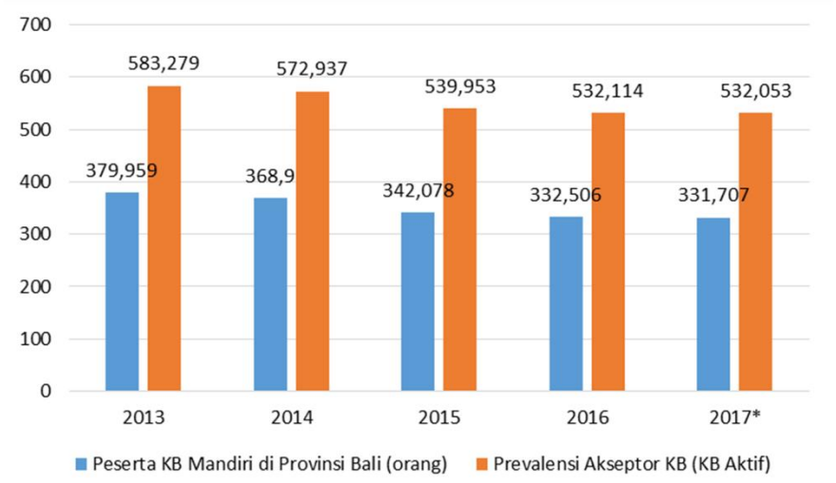

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.179 Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Layanan KB Mandiri di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.8.5 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk selama kurun aktu 2013 sampai 2018 sebesar 1 persen. Telah dilakukan filterisasi penduduk, masuk wilayah Provinsi Bali di pantau melalui pintu-pintu masuk pelabuhan meliputi Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Pelabuhan Padang Bai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar

2.5.2.8.6 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk

Belum ada kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Namun, telah dilakukan filterisasi penduduk Pengendalian Kependudukan menggunakan UU, PP dan Permen terkait tahun 2010. melalui Perda no 7/2010 tentang Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

2.5.2.8.7 Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Belum ada sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Namun selama kurun waktu 2014 sampai 2017 OPD yang sudah memanfaatkan data Profil Perkembangan Penduduk sebagai berikut:

1. BAPPEDA Litbang Prov. Bali
2. Dinas Kesehatan Prov. Bali
3. Dinas Pendidikan Prov. Bali
4. BKKBN Prov. Bali
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Bali
6. Dinas Tenaga Kerja dan Energi, Sumber Daya Mineral Prov. Bali
7. Dinas Sosial Prov. Bali

Kedepannya akan didorong lebih banyak OPD yang menggunakan data Penduduk.

2.5.2.8.8 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Pada tahun 2013, rata-rata jumlah anak pe keluarga di Provinsi Bali sebesar 2,14. Angka tersbeut meningkat menjadi 2,3 pada tahun 2014. Namun, mengalami penurunan mencapai 2,02 persen pada tahun 2018.

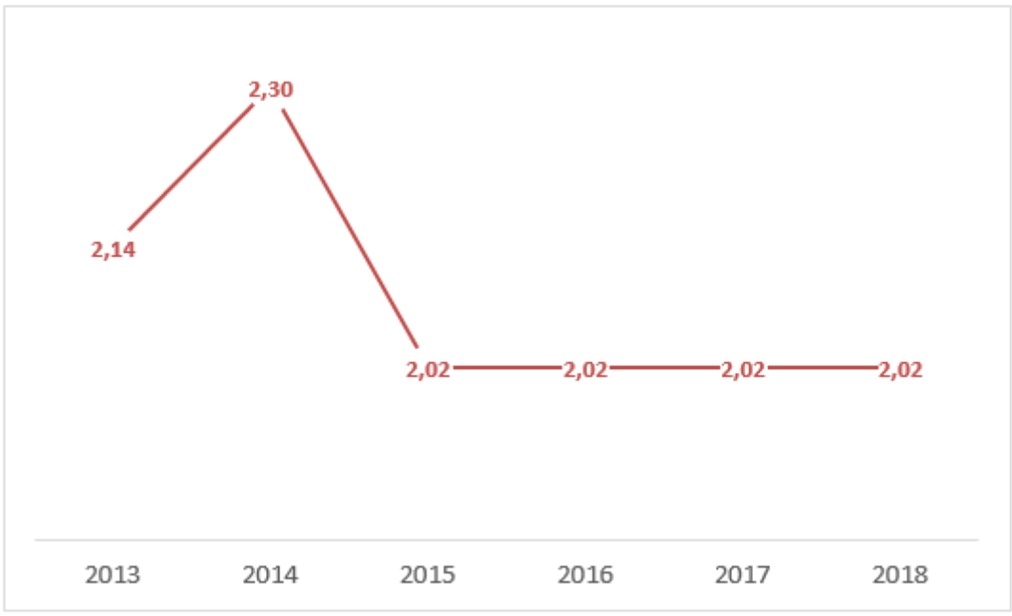

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.180 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.9 Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB di Provinsi Bali sebesar 85,11 pada tahun 2013 dan mengalami penurunan mencapai 81,12 pada tahun 2015. Namun, rasio tersebut meningkat menjadi 116,36 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 97,4. Rasio akseptor KB kembali mengalami penurunan menjadi 83,11 pada tahun 2018.

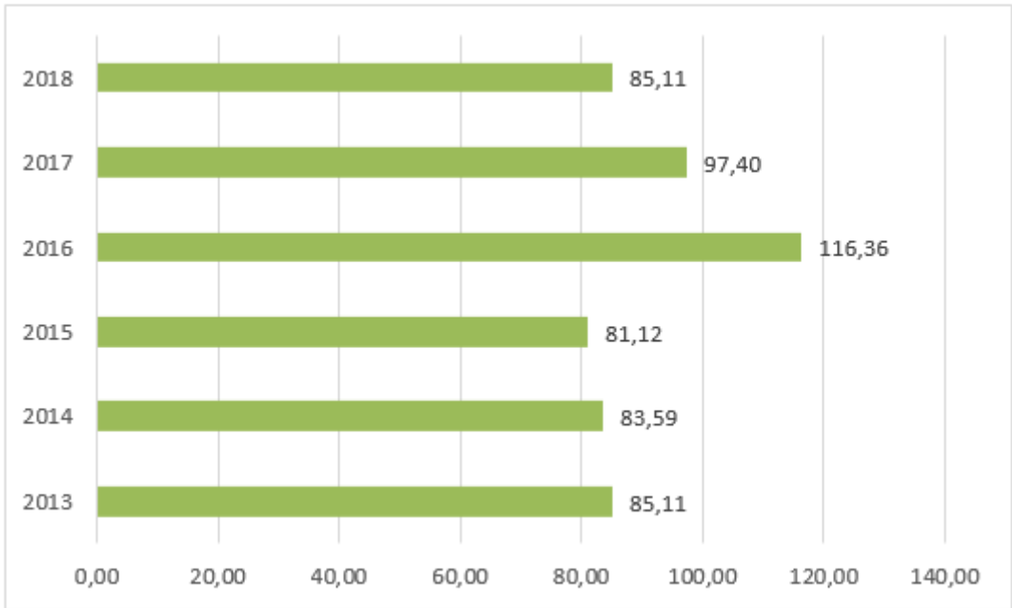

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.181 Rasio Akseptor KB di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.10 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Pada tahun 2013, angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49 sebesar 57,9 dan meningkat menjadi 79,95 pada tahun 2014. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016, yaitu sebesar 67,76 dan 67,07. Pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 81,44 pada tahun 2017 dan 8,13 pada tahun 2018.

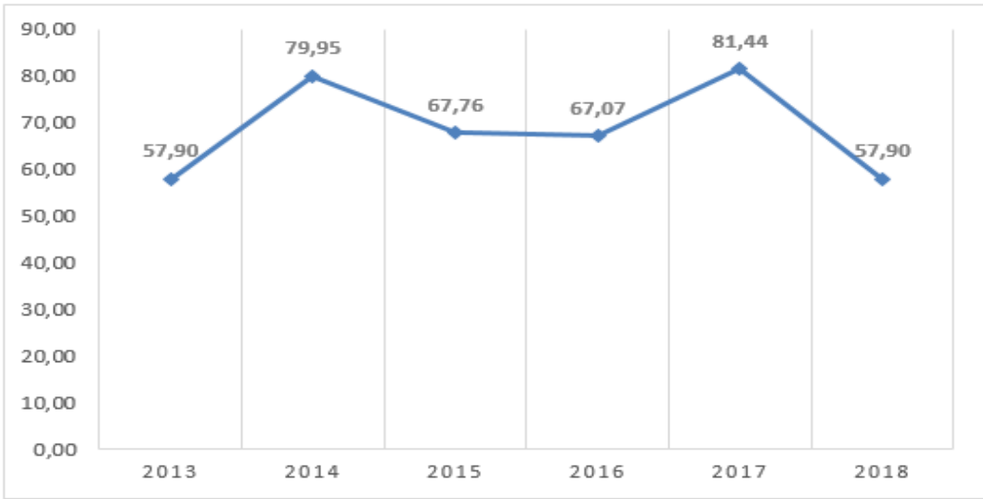

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.182 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.11 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) di provinsi Bali selama tahun 2013 sampai 2016 mengalami penurunan dari 48 menjadi 19,48. Namun, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 23,87. Sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 22.

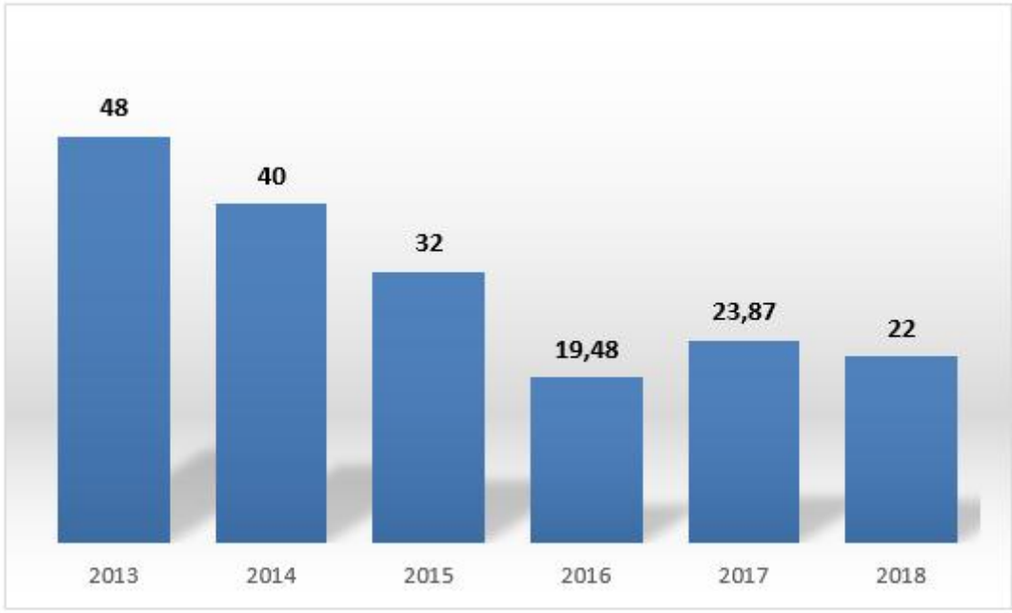

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.183 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di provinsi Bali pada tahun 2015 sebesar 36,42 persen dan pada tahun 2018 sebesar 35,12 persen.

2.5.2.8.13 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) di provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 3,99 persen dan mengalami peningkatan menjadi 5,69 persen pada tahun 2016. Namun, cakupan tersebut mengalami penurunan menjadi 5,61 persen pada tahun 2017.

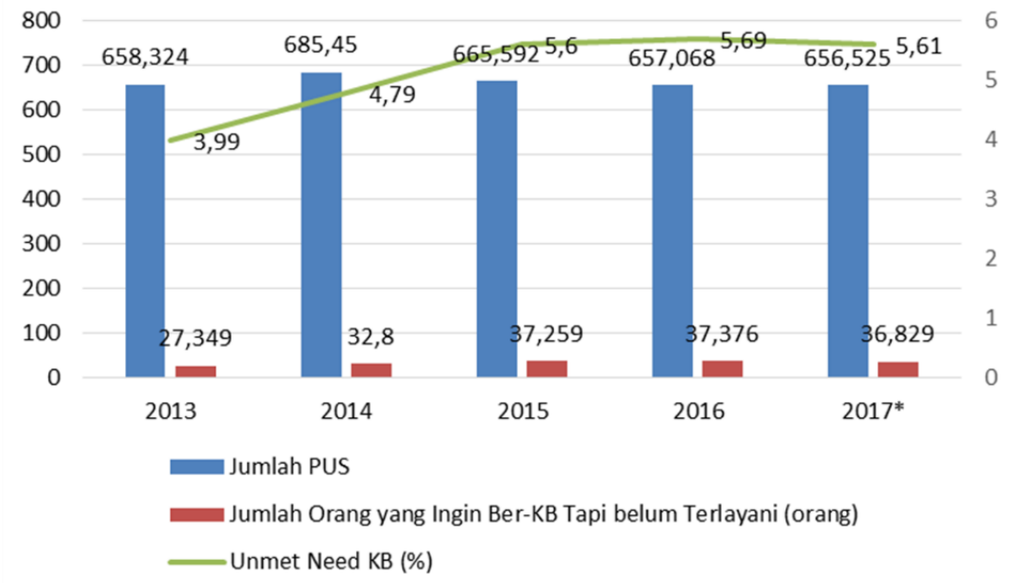

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.184 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.8.14 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada tahun 2013 sebesar 25,3 persen dan meningkat menjadi 50,86 persen pada tahun 2014. Persentase tersebut mengalami fluktuasi selama tahun 2015 sampai 2017, yaitu 40,62 persen, 48,1 persen, 47,49 persen. Pada tahun 2018 menjadi 43,46.

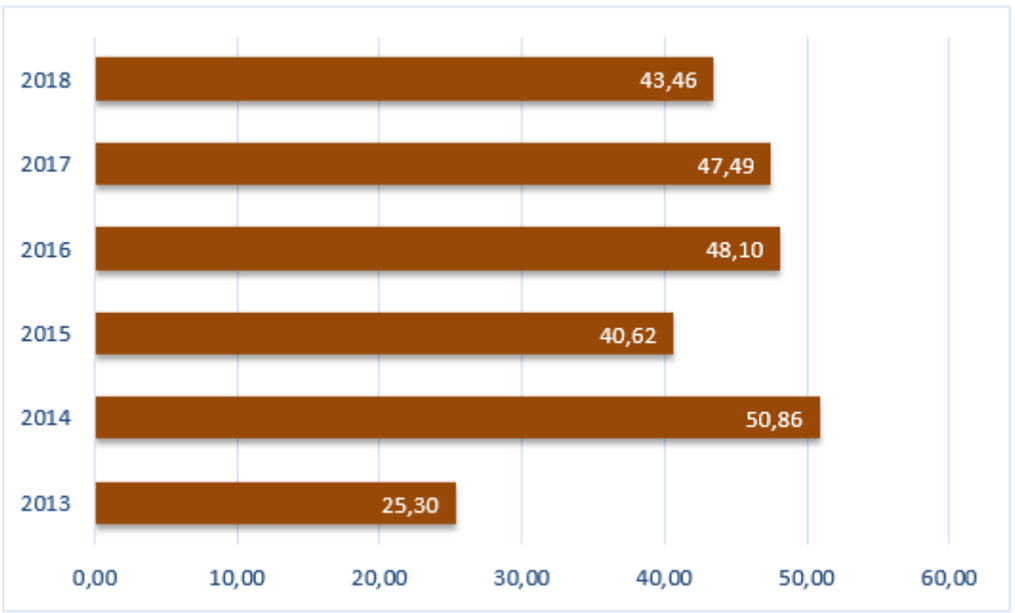

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.185 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.15 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Provinsi Bali mengalami penuruna dari 85,11 persen pada tahun 2013 menjadi 79,95 persen pada tahun 2015. Persentase tersebut mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 menjadi 92,39 persen. Namun persentase tersebut mengalami penurunan tahun 2018 menjadi 90,20.

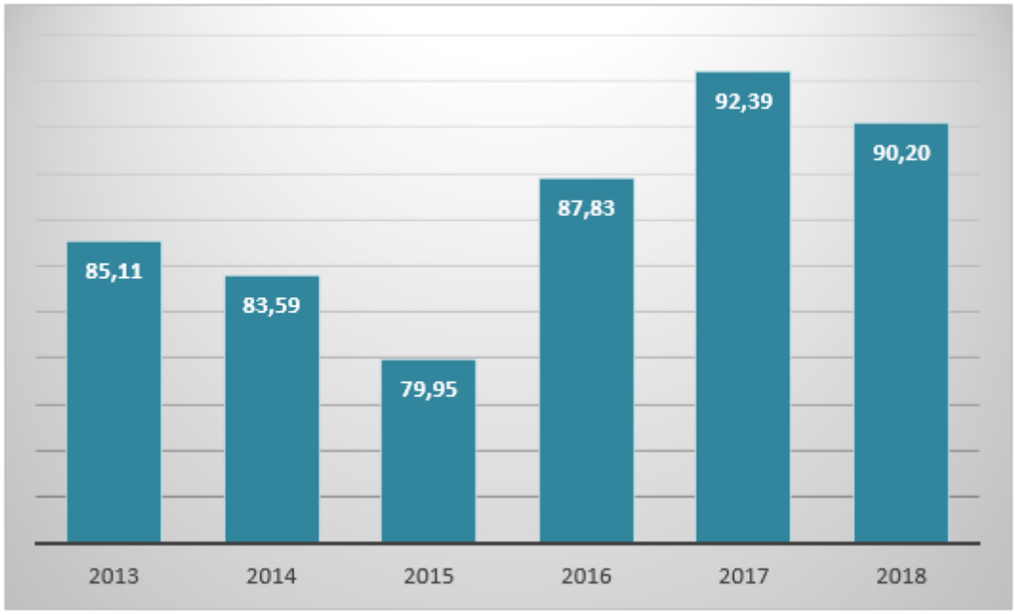

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.186 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.16 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB mengalami peningkatan dari 71,70 persen pada tahun 2014 menjadi 91,42 persen pada tahun 2016. Namun, mengalami penurunan menjadi 88,90 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalamu penurunan kembali menjadi 87,7. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB pada tahun 2014 sebesar 72,07 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 53,40 persen. Namun, kembali meningkat sebesar 65,67 persen pada tahun 2016 dan 81,70 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 85,2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Provinsi Bali pada tahun 2014 sebesar 70,48 persen dan mengalami penurunan menjadi 34,82 persen pada tahun 2015. PAda tahun 2016, cakupan tersebut meningkat menjadi 62,64 persen, tahun 2017 meningkat kembali menjadi 84,60 dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 70,48.

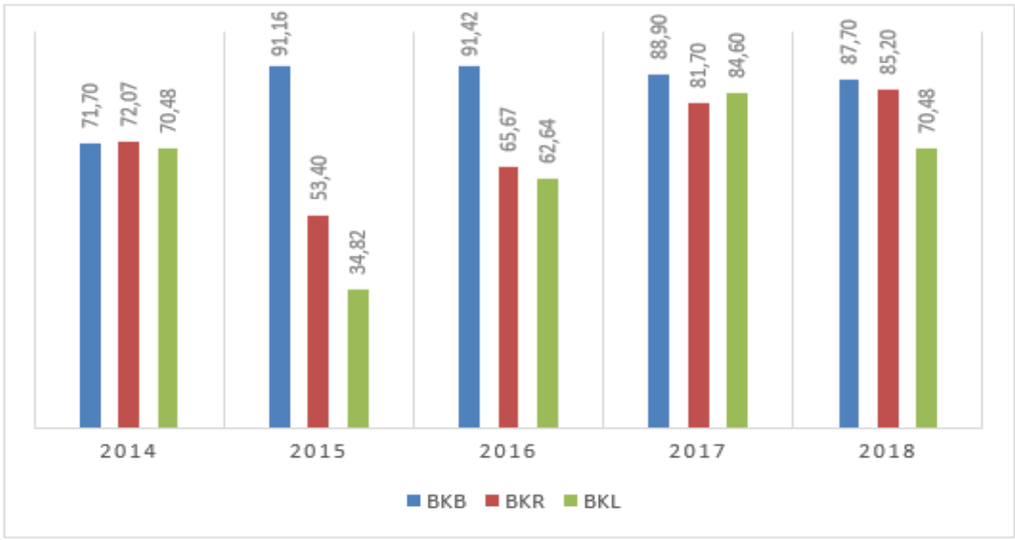

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.187 Cakupan Anggota BKB, BKR, dan BKL Ber-KB di Provinsi Bali Tahun 2014-2018

2.5.2.8.17 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk selama kurun waktu 2013 sampai 2018, yaitu 614; 592; 557; 567; 539; 100.

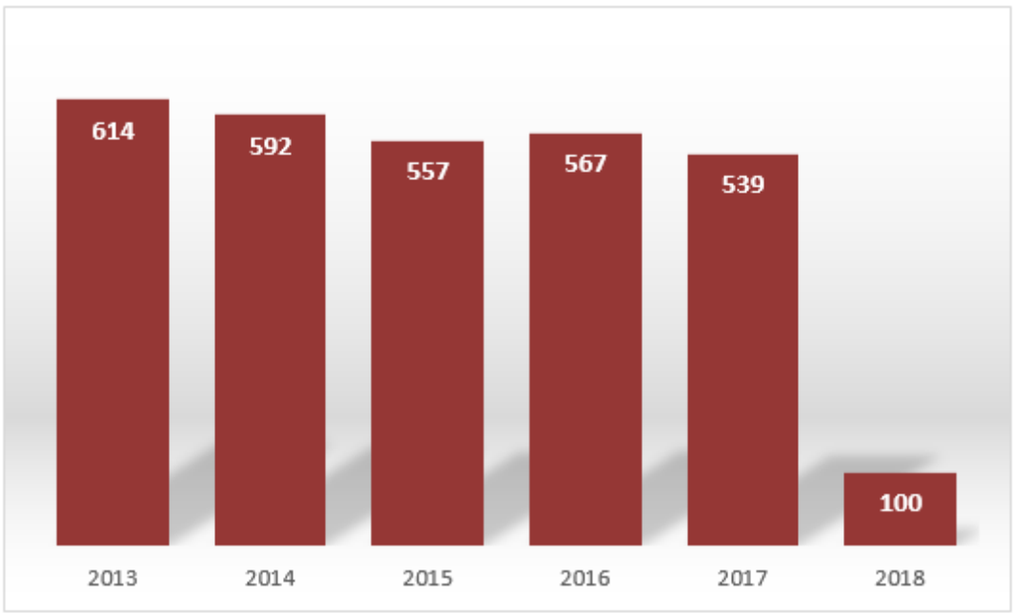

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.188 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2013-2018

2.5.2.8.18 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri selama kurun waktu 2013 sampai 2018, yaitu 88,82 persen, 89,44 persen, 88,51 persen, 82,83 persen, 88,60 persen, dan 88,60.

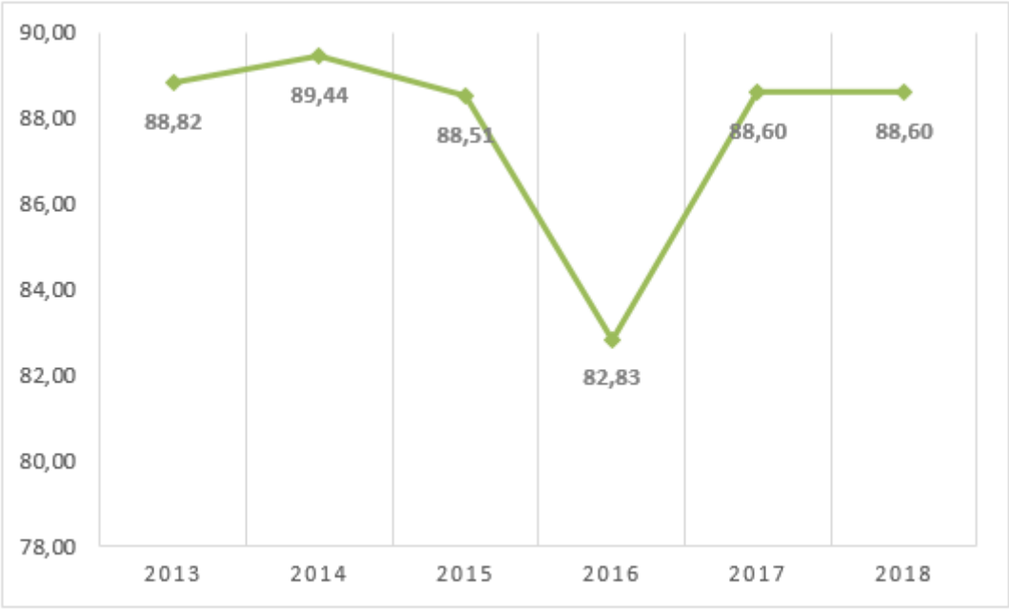

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.189 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.8.19 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Terdapat 1 petugas PPKBDdi setiap desa/kelurahan selama kurun waktu 2013 sampai 2017.

2.5.2.8.20 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat selama kurun waktu 2013-2017, sebesar 157.094; 288.920; 265.218; 128.215; dan 219.681. Total dari semua jenis alat dan obat kontrasepsi (IUD, Pil, Kondom, Suntikan, Implant)

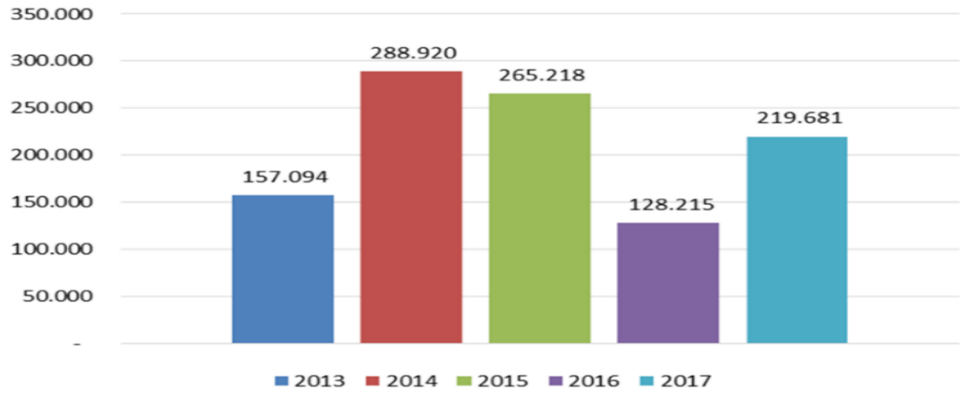

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.190 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2013-2017

2.5.2.8.21 Persentase Remaja (Umur 14 s.d 19 th) Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Tabel 2.61 Persentase Remaja (Umur 14 s.d 19 th) Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Kab/kota/prov	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	N/A	N/A	36	66	40
Bangli	N/A	N/A	0	0	NA
Buleleng	N/A	N/A	25	47	17
Denpasar	N/A	N/A	158	94	83
Gianyar	N/A	N/A	3	33	57
Jembrana	N/A	N/A	1	0	1
Karangasem	N/A	N/A	0	0	NA
Klungkung	N/A	N/A	0	0	1
Tabanan	N/A	N/A	0	0	1
Prov Bali	N/A	N/A	223	240	200

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.8.22 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita di Provinsi Bali tahun 2014 sebesar 22,7, tahun 2017 sebesar 21,64, dan pada tahun 2018 sebesar 22,7.

2.5.2.9 Perhubungan

2.5.2.9.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Selam kurun waktu 2013 sampai 2017, jumlah arus penumpang angkutan umum terbesar yaitu untuk angkutan udara dan yang terendah untuk angkutan darat. Pada tahun 2017, jumlah penumpang angkutan udara sebesar 14.481.013, untuk angkutan laut sebesar 6.358.176, dan angkutan darat sebesar 851.464.

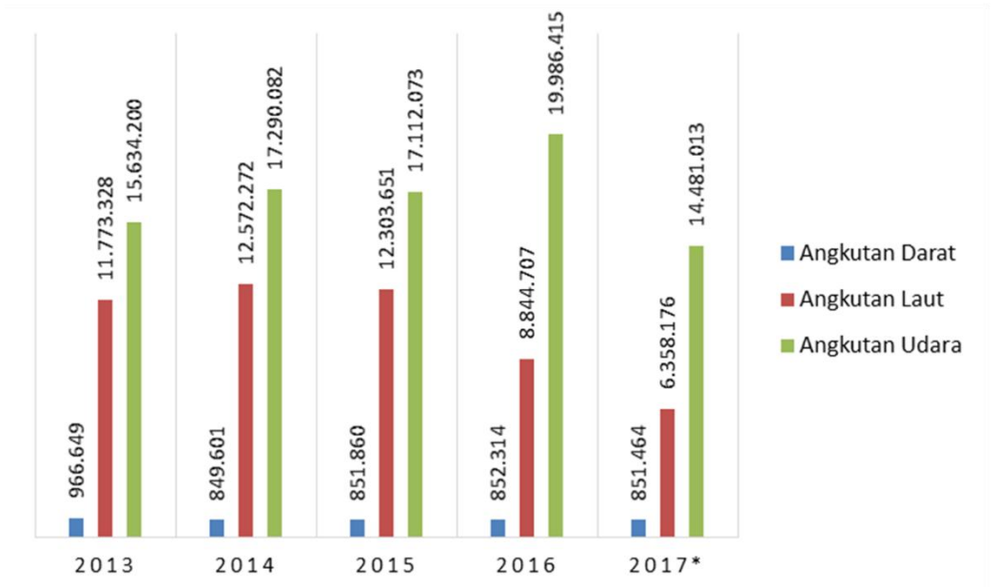

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.191 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.9.2 Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2016, yaitu 1:12.072,32; 1:12.216,96; 1:12.359,52; dan 1:12.500,30.

Tabel 2.62 Rasio Ijin Trayek Provinsi Bali Tahun 2013-2016

No	URAIAN	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Ijin Trayek	336	336	336	336
2	Jumlah Penduduk	4.056.300	4.104.900	4.152.800	4.200.100
Rasio		1 : 12,072.32	1 : 12,216.96	1 : 12,359.52	1 : 12,500.30

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.9.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah uji Kir angkutan umum pada tahun 2013 yaitu 86.745 dan meningkat menjadi 107.299 pada tahun 2014. Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 104.483 pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 113.858 pada tahun 2017.

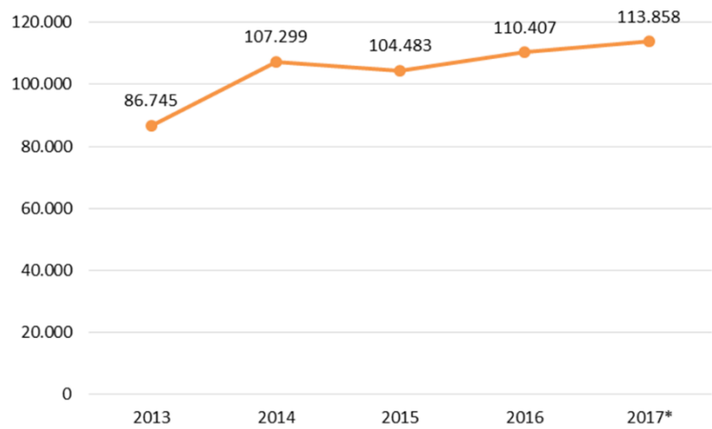

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.192 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah rencana pelabuhan di Provinsi Bali menurut RIPNAS adalah 28 pelabuhan akan tetapi jumlah pelabuhan yang sudah ditetapkan selama kurun waktu 2013-2018 yaitu sebanyak 8 pelabuhan. Jumlah bandara di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2018 yaitu sebanyak 1 bandara dan untuk jumlah terminal bis di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 yaitu sebanyak 20 Terminal.

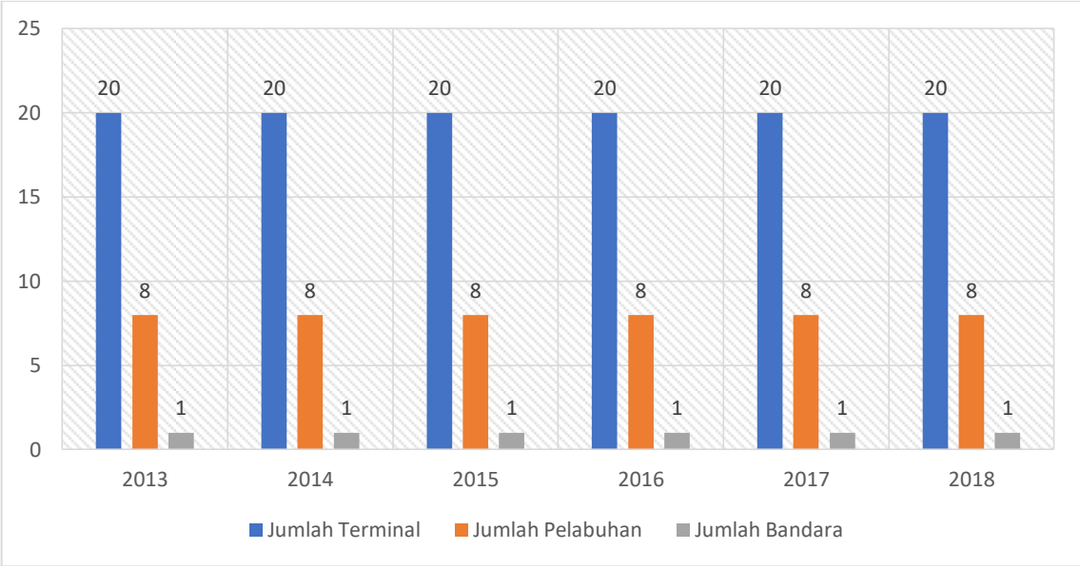

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.193 Jumlah Pelabuhan dan Bandara di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.9.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari 14.914 di tahun 2013 menjadi 21.780 pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penumpang mengalami penurunan dari 966.649 pada tahun 2013 menjadi 849.601 pada tahun 2014. Namun, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 851.860 dan terus meningkat menjadi 852.895 pada tahun 2017. Persentase layanan angkutan darat selama 2013 sampai 2015 relatif tetap yaitu 0,02 persen, angka tersebut meningkat menjadi 0,03 persen pada tahun 2016 dan 2017.

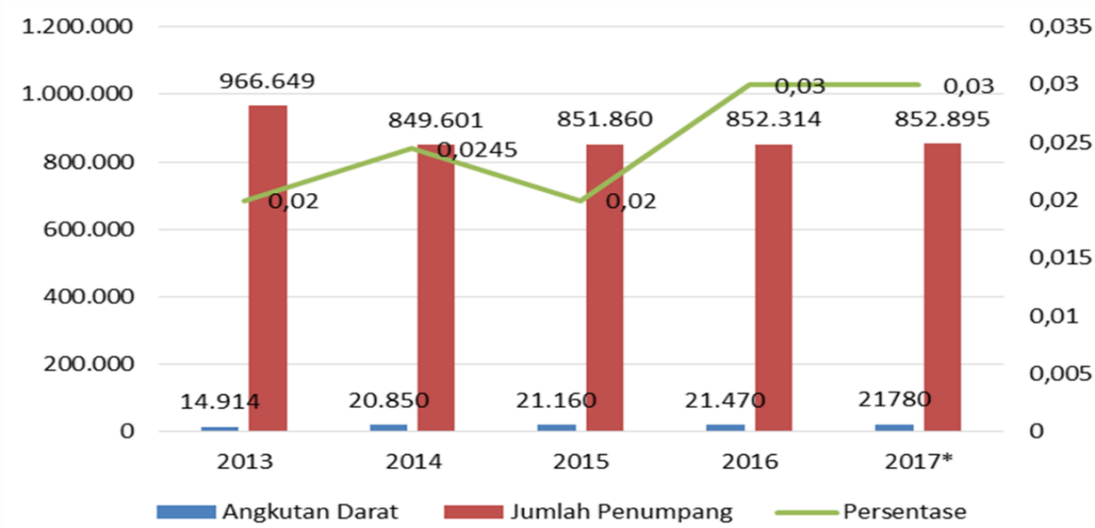

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.194 Persentase Layanan Angkutan Darat Di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.9.6 Pemasangan Rambu-Rambu

Persentase pemasangan rambu-rambu di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 sampai 2018, yaitu 0,262 persen; 0,034 persen; 0,094 persen; 0,017 persen; 0,048 persen; dan 25,41 persen.

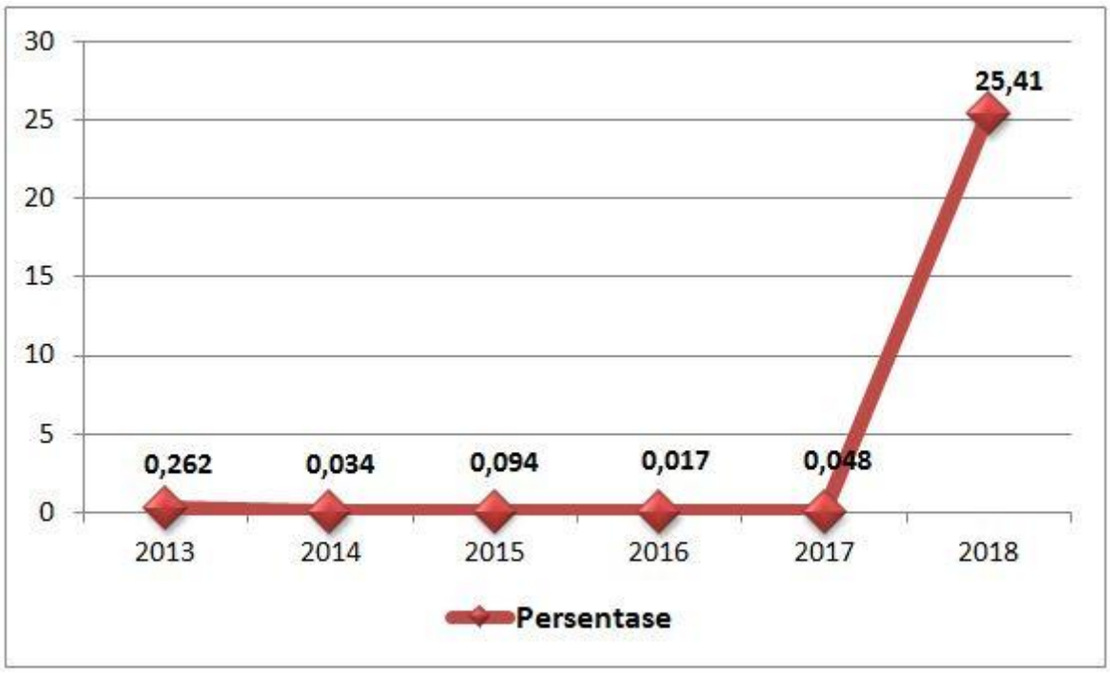

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.195 Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.9.7 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Bali selama tahun 2013 sampai 2018, yaitu 1:396,99; 1:416,63; 1:412,95; 1:460,19; dan 1:470,20.

Tabel 2.63 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di provinsi Bali Tahun 2013-2017

NO	URAIAN		TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pajang Jalan	7.566	7.844	494.136,78	494.136,78	494.136,78	8.490,15
2	Jumlah Kendaraan	3.003.688	3.268.112	3.505.984	3.725.392	3.907.094	3.922.068
RASIO		1:396,99	1:416,63	1:412,95	1:438,79	1:460,19	1:470,20

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.9.8 Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut dengan angkutan darat meningkat dari 81.456 orang pada tahun 2013 menjadi 115.865 orang pada tahun 2018. Pada tahun 2014, jumlah barang yang terangkut dengan angkutan darat yaitu 146.738 barang dan meningkat menjadi 151.429 barang pada tahun 2015. Namun, mengalami penurunan menjadi 121.818 pada tahun 2016. Jumlah orang yang terangkut dengan angkutan laut paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 6.145.932 orang. Jumlah tertinggi untuk barang yang terangkut dengan angkutan laut terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 475.727.259 barang. Jumlah orang tertinggi yang terangkut dengan angkutan udara terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 23.644.307 orang dan untuk jumlah barang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 73.379.502 barang.

Tabel 2.64Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angkutan Darat						
	Orang	81.456	107.114	110.215	113.065	115.865	115.865
	Barang		146.738	151.429	121.818	121.818	121.818
2	Angkutan Laut						
	Orang	5.769.326	6.145.932	6.100.596	5.789.098	2.152.043	2.152.043
	Barang	475.727.259	22.217.802	4.403.570	4.368.215	2.758.093	2.758.093
3	Angkutan Udara						
	Orang	4.243.722	4.516.553	8.501.343	10.010.772	10.085.537	23.644.307
	Barang	6.271.733	5.522.961	18.276.474	32.912.181	41.850.386	73.379.502

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.9.9 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

Pada tahun 2018, jumlah orang yang melalui dermaga sebesar 6.358.176 orang dan jumlah barang sebesar 8.291.379 barang. Jumlah orang yang melalui bandara pada tahun 2018 sebesar 23.644.307 orang dan jumlah barang mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 73.379.5022 barang. Jumlah orang/barang yang melalui terminal sebesar 851,464 pada tahun 2018.

Tabel 2.65 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dermaga						
	Orang	11.773.328	12.575.272	12.303.651	8.844.707	6.358.176	6.358.176
	Barang	483.238.509	168.975.121	12.366.418	11.622.564	8.291.379	8.291.379
2	Bandara						
	Orang	15.634.200	17.290.082	17.112.073	19.986.415	14.481.013	23.644.307
	Barang	185.504.351	175.391.334	176.185.683	202.366.091	148.610.379	73.379.502
3	Terminal						
	Orang/Barang	966.649	849.601	851.560	852.314	851.464	351.739

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.10 Komunikasi dan Informatika

2.5.2.10.1 Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi selama kurun waktu 2013 sampai 2018 sebesar 48,50; 49,05; 49,20; 49,35; 49,50 dan 50,00.

Tabel 2.66 Cakupan Layanan Telekomunikasi

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan layanan telekomunikasi	48.50	49.05	49.20	49.35	49.50	50.00

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.10.2 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Persentase rumah tangga yang menggunakan HP selama kurun waktu 2013 sampai 2018, sebesar 91,43; 91,22; 92,64; 92,36; 93,43; dan 93,62. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan telepon rumah cenderung mengalami penurunan dari 10,23 pada tahun 2013 menjadi 5,34 pada tahun 2018.

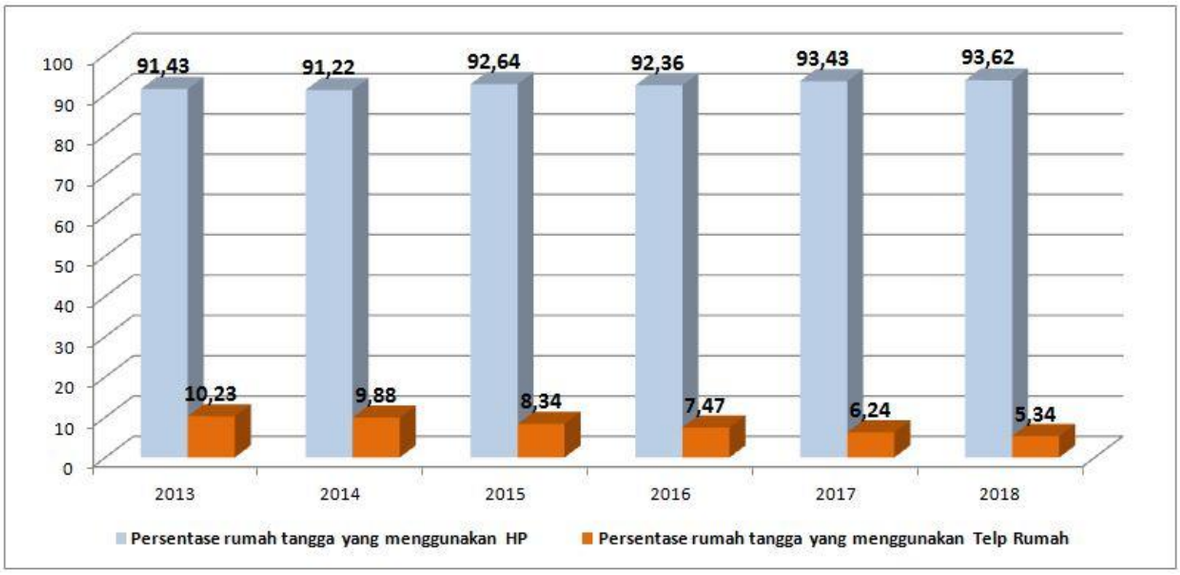

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.196 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan HP/Telepon Rumah Tahun 2013-2017

2.5.2.10.3 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Penduduk dengan akses internet selama empat tahun terakhir yaitu sebesar 28,78 pada tahun 2015, 33.87 pada tahun 2016, 39,49 pada tahun 2017 dan 46.42 pada tahun 2018.

Tabel 2.67 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	-	-	28,78	33,87	39,49	46,42

2.5.2.10.4 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi cenderung meningkat dari 23,16 pada tahun 2013 menjadi 32,25 pada tahun 2018.

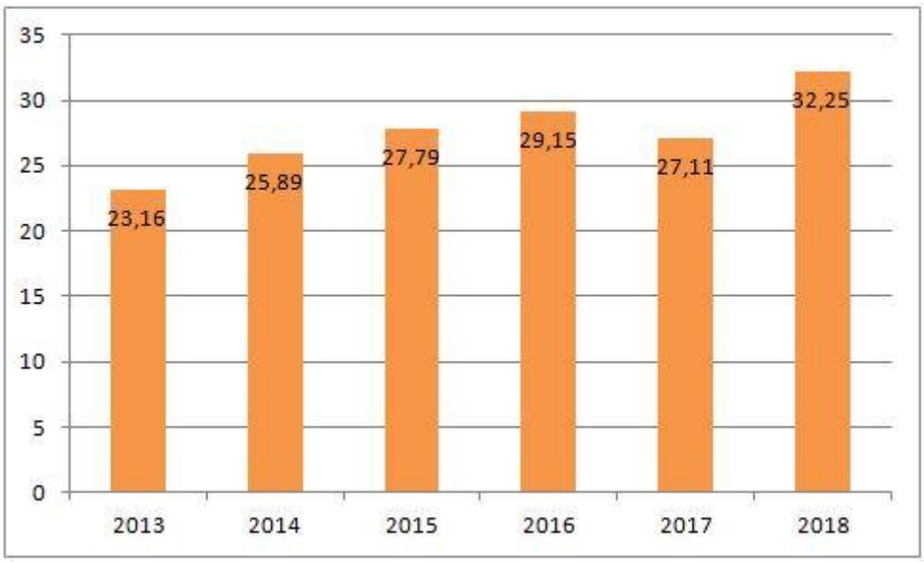

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.197 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Tahun 2013-2017

2.5.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.5.2.11.1 Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 90,29 persen, angka tersebut mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 menjadi 88,18 persen. Kenaikan persentase koperasi aktif terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 89,53 persen. Namun, mengalami penurunan kembali menjadi 86,79 persen pada tahun 2017. Mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 87,42 persen.

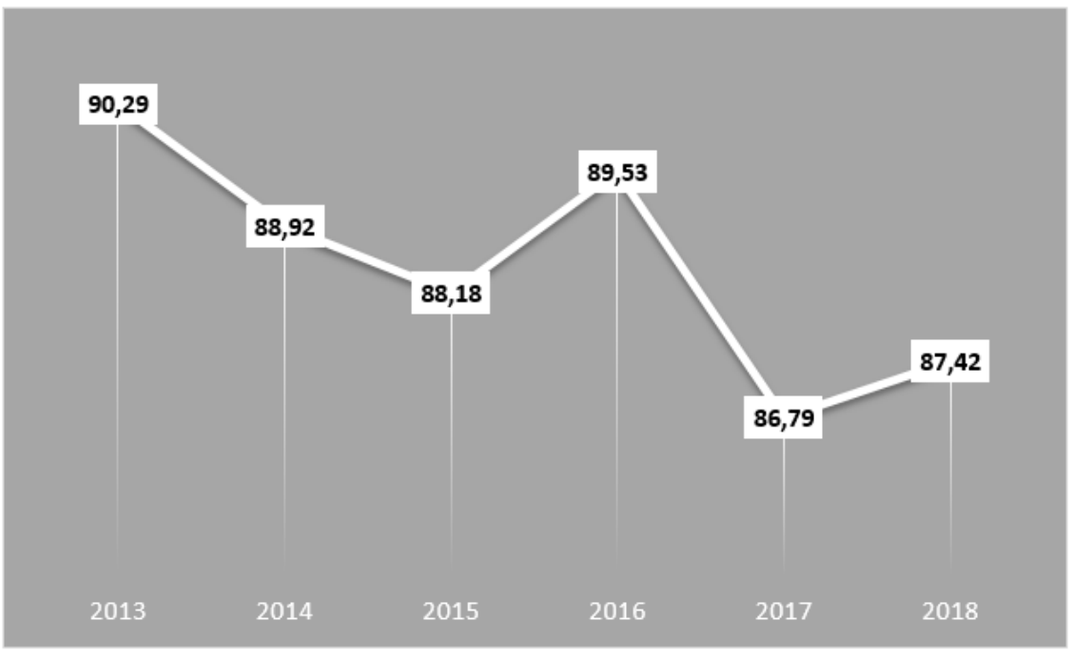

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.198 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.11.2 Jumlah UMKM

Tabel 2.68 Jumlah UMKM

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah UMKM	261.411	265.558	265.558	265.558	300.650	312.967

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Perkembangan UKM di Provinsi Bali dari tahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan dan akhirnya jumlah tersebut tetap sampai dengan tahun 2016 kemudian meningkat kembali di tahuan 2017. Perkembangan jumlah UKM tersebut disebabkan karena program penumbuhan kewirausahaan telah digaungkan melalui dunia pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan informal dengan perubahan pola pikir setelah tamat dari Perguruan Tinggi tidak harus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. Untuk mewujudkan pembentukan wirausaha baru berbagai jalur yang ditempuh antara lain melalui pelaksanaan pelatihan, magang, studi banding, temu usaha, promosi, studi banding, dan penyebaran publikasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

2.5.2.12 Penanaman Modal

2.5.2.12.1 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2013 sebanyak 110 investor dengan nilai investasi sebesar Rp 2.273.977.380, sedangkan pada Tahun 2014 jumlah investor sebanyak 171 investor dan jumlah nilai investasi sebesar Rp. 6.750.890.900.000. Pada tahun 2015, jumlah investor berskala nasional sebanyak 86 investor dan jumlah investasi sebesar. Rp. 3.813.717.150.000 jumlah investor berskala nasional pada tahun 2016 sebesar 136 investor dan jumlah investasi sebesar Rp. 6.971.675.200.000 dan tahun 2017 jumlah investor berskala Nasional sebanyak 100 investor dan jumlah nilai investasi sebesar Rp. 5.556.102.230.000,- sedangkan pada tahun 2018 jumlah investasi nasional sebanyak 166 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.4.468.574.800.000,-

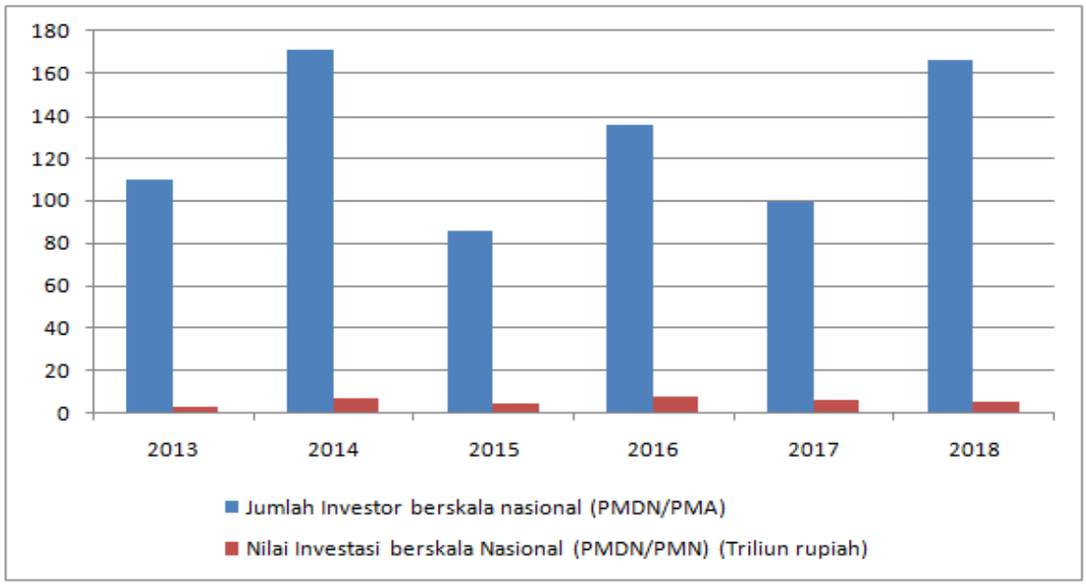

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.199 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.2.12.2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.69 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio daya serap tenanga kerja	36,10	25,51	57,79	41,44	42,43	34,16

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Untuk rasio daya serap tenaga kerja setiap pada tahun 2013 sebesar 36,10 dengan jumlah perusahaan PMDN sebanyak 110 investor dan yang tertinggi terlihat pada tahun 2015 sebesar 57,79 dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN sebanyak 86 investor.

2.5.2.12.3 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.70 Kenaikan/Penurunan Nilai Realsiasi PMDN (Milyar Rupiah)

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	2,2	-88,3	1.505,7	-1.313,1	-181,8	130,7

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Dalam periode tahun 2013-2018 terdapat kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kenaikan nilai realisasi investasi PMD yang tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 1.505,7.

2.5.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.5.2.13.1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda

Persentase organisasi pemuda yang aktif selama kurun waktu 2013 sampai 2017 yaitu sebesar 75,27 persen. Sedangkan persentase wirausaha muda sebesar 0,81 persen selama tahun 2013 sampai 2017.

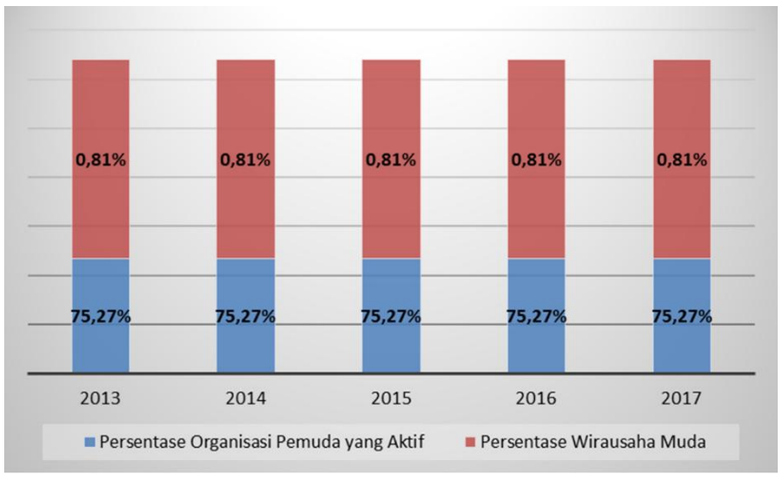

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.200 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.13.2 Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan dari 25,61 persen pada tahun 2013 menjadi 48,83 persen pada tahun 2017. Cakupan pelatih yang bersertifikat pada tahun 2013 sebesar 22,22 persen meningkat menjadi 38,76 persen pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 38,46 persen. Cakupan pembinaan atlet muda mengalami penurunan dari 6,58 persen pada tahun 2013 menjadi 2,58 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, cakupan tersebut mengalami peningkatan menjadi 2,66 persen dan kembali meningkat menjadi 3,11 persen pada tahun 2017.

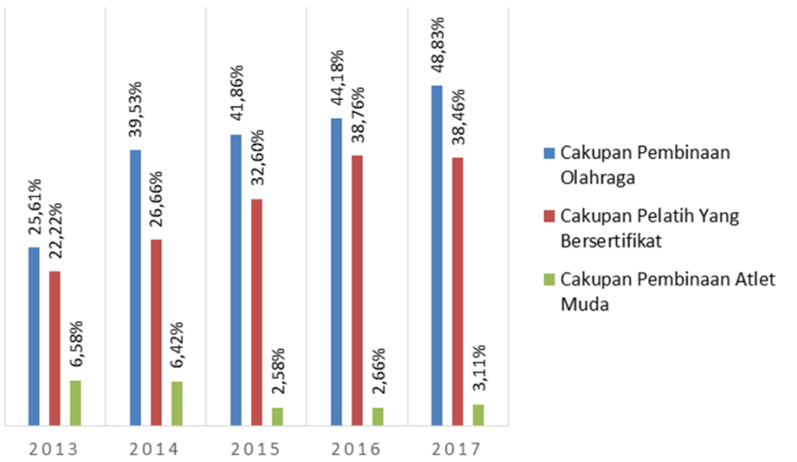

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.201 Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.13.3 Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah atlet berprestasi mengalami fluktuasi selama kurun aktu 2013 sampai 2017, yaitu 148 orang, 152 orang, 146 orang, 148 orang, dan 168 orang. Jumlah prestasi olahraga yang diraih selama kurun waktu 2013 sampai 2017, adalah 15; 18; 16; 17; dan 18.

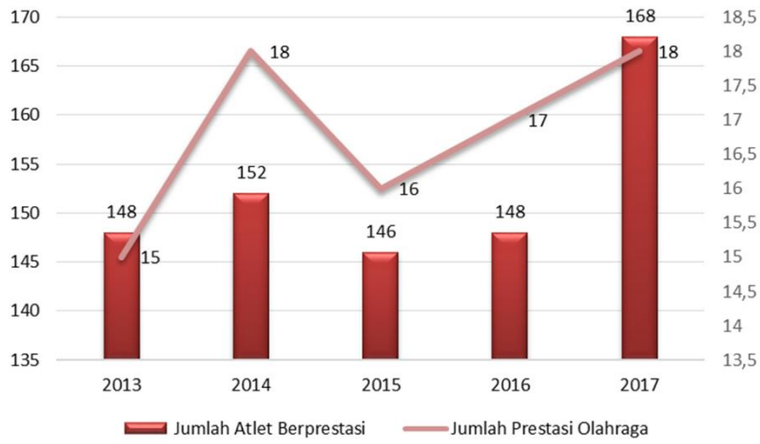

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.202 Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.14 Statistik

2.5.2.14.1 Buku ”Kabupaten Dalam Angka”

Kabupaten di Provinsi Bali setiap tahunnya membuat buku Kabupaten dalam Angka yang bekerjasama dengan Statistik Kabupaten yang mencapai 100 persen.

Tabel 2.71 Buku Kabupaten Dalam Angka

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buku "Kabupaten dalam angka"	9	9	9	9	9	9

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.14.2 Buku "PDRB"

Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat pembuatan buku PDRB oleh Pemerintah Provinsi Bali yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Pada tahun selanjutnya yaitu 2016 sampai dengan tahun 2018 kerjasama penyusunan buku PDRB tersebut tidak dilanjutkan lagi, tetapi BPS secara kontinyu sudah mempublikasikan hasil perhitungan PDRB setiap tahun.

Tabel 2.72 Buku PDRB

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buku "PDRB"	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali Tahun 2018

2.5.2.15 Persandian

2.5.2.15.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebesar 80,95%, 83,33%, 85,71%, 88,09%, 89,13% dan 91,30%.

Tabel 2.73 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN					
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat Daerah	80,95	83,33	85,71	88,09	89,13	91,30

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.16 Kebudayaan

2.5.2.16.1 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Untuk mengimplementasikan semangat berkesenian masyarakat Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2018 telah menyelenggarakan 3 (tiga) festival seni budaya yaitu Pesta Kesenian Bali, Pesona Budaya Provinsi Bali (Bali Mandara Nawanatya), serta Peragaan dan Pementasan Seni Budaya (Bali Mandara Mahalango), sebagai ruang terhadap hasil karya seni dan bentuk presentasi serta ekspresi seni masyarakat Bali. Kreatifitas budaya dan ekonomi kreatif dalam perhelatan ketiga event seni budaya tersebut dapat mengeksplorasi, mengolah, mengemas dan mentransformasikan keragaman dari produk warisan budaya secara profesional dan modern, serta sebagai modal dalam meningkatkan pendapatan Nasional melalui pariwisata budaya demi kesejahteraan masyarakat. Ketiga *event* kebudayaan tersebut diselenggarakan di Taman Budaya Art Center Denpasar, selain bertujuan untuk melestarikan budaya juga untuk mengoptimalkan fungsi Taman Budaya sebagai pusat berkesenian dan berkebudayaan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya cenderung mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2013 hanya ada 1 (satu) event yaitu Pesta Kesenian Bali menjadi 3 (tiga) event di tahun 2018.

Tabel 2.74 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Tahun 2013-2018

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	1	2	2	3	3	3

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Pulau Bali karena sejarah perkembangannya, banyak memiliki cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah pulau Bali.

Cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 17.595 pada tahun 2013 s.d 2014, sebanyak

19.790 pada tahun 2016, 20.168 pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 sebanyak 20.377.

Tabel 2.75 Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2013-2018

URAIAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cagar Budaya	-	17.595	17.595	19.790	20.168	20.377
***Benda**	-	17.053	17.053	18.796	19.150	19.336
***Bangunan**	-	-	-	95	96	97
***Situs**	-	537	537	582	599	611
***Kawasan**	-	5	5	5	5	5
***Struktur**	-	-	-	312	318	328

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.16.3 Jumlah Karya Budaya Yang Diinventarisasi

Jumlah karya budaya yang telah diinventarisasi sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 78 karya budaya, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 206 karya budaya di tahun 2017 dan 233 karya budaya tahun 2018. Dari total 206 karya budaya tersebut sebanyak 37 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Tabel 2.76 Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi

URAIAN	TAHUN					
	s.d. 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi	78	80	121	162	206	233

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.17 Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu Bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Dilihat dari luas pulau Bali kurang lebih sekitar 5.633 km2 dengan jumlah Penduduk pada tahun 2016 sebanyak kurang lebih 4.200.000 jiwa.Kehadiran Perpustakaan sebagai penyedia Informasi sangat dibutuhkan Masyarakat, dengan kemajuan Teknologi Informasi yang telah berkembang dewasa ini mendorong Perpustakaan untuk lebih bertransformasi dalam rangka pengembangan dibidang Pendidikan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Transformasi Perpustakaan dilakukan melalui keterbukaan akses Informasi bagi masyarakat dengan

mempergunakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan penyediaan fasilitas Teknologi Informasi yang dapat dimanfaatkan Masyarakat. Dalam perkembangan peran Perpustakaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita ketahui bahwa potensi Provinsi Bali tentang Pengelolaan Perpustakaan dapat disajikan data terlampir.

2.5.2.17.1 Perkembangan Perpustakaan

Perkembangan perpustakaan di Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal tersebut terlihat dari jumlah perpustakaan pada tahun 2013 sebesar 2.837 meningkat menjadi 3.346 pada tahun 2017. Jumlah anggota perpustakaan juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Pada tahun 2013, jumlah anggota perpustakaan sebesar 53.834 anggota meningkat menjadi 58.092 anggota pada tahun 2017.

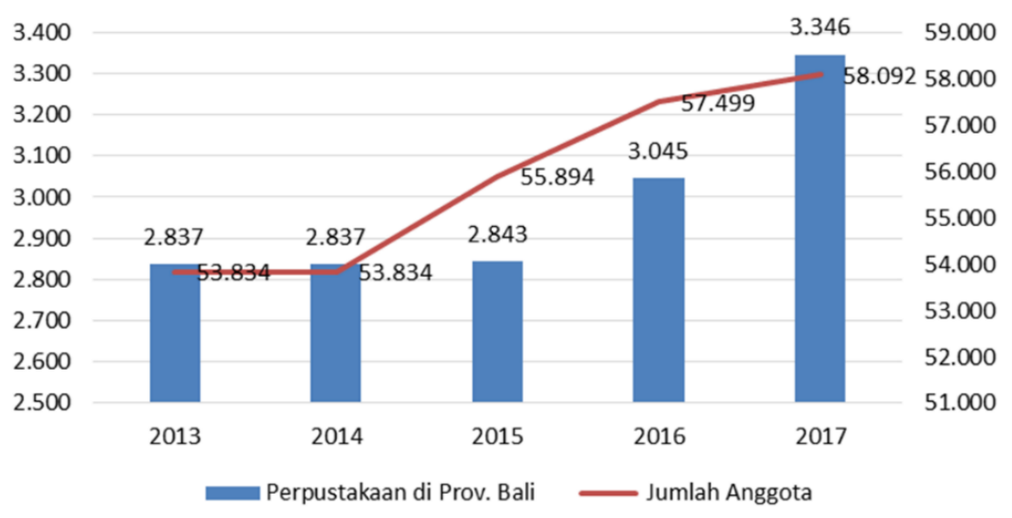

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.203 Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.17.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Bali selama tahun 2013-2017 berfluktuasi. Pada tahun 2013 rasio pengunjung sebesar 0,127 dan meningkat menjadi 0,144 pada tahun 2014. Namun, mengalami penurunan menjadi 0,132 pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadui 0,149 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, rasio pengunjung kembali mengalami penurunan menjadi 0,114 untuk jumlah pengunjung dari tahun 2013-2017 sesuai perkembangan tabel terlampir.

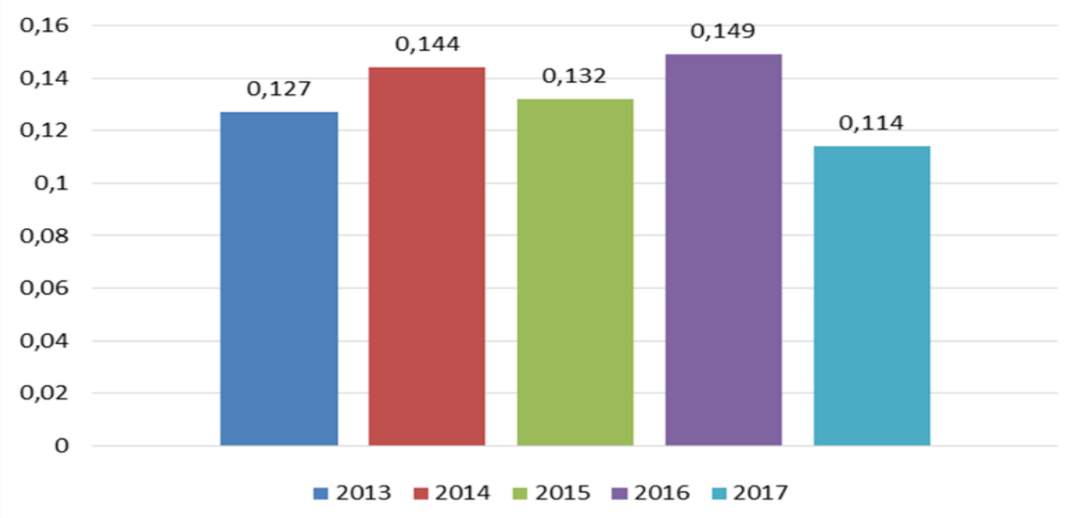

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.204 Rasio Jumlah Pengunjung Tahun 2013-2017

Tabel 2.77 Jumlah Rata-rata Pengunjung 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rata-Rata Pengunjung	49.660	56.248	54.965	62.868	62.110

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.17.3 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan di Provinsi Bali terus meningkat dari 735.602 buku pada tahun 2013 menjadi 1.149.120 buku pada tahun 2017.

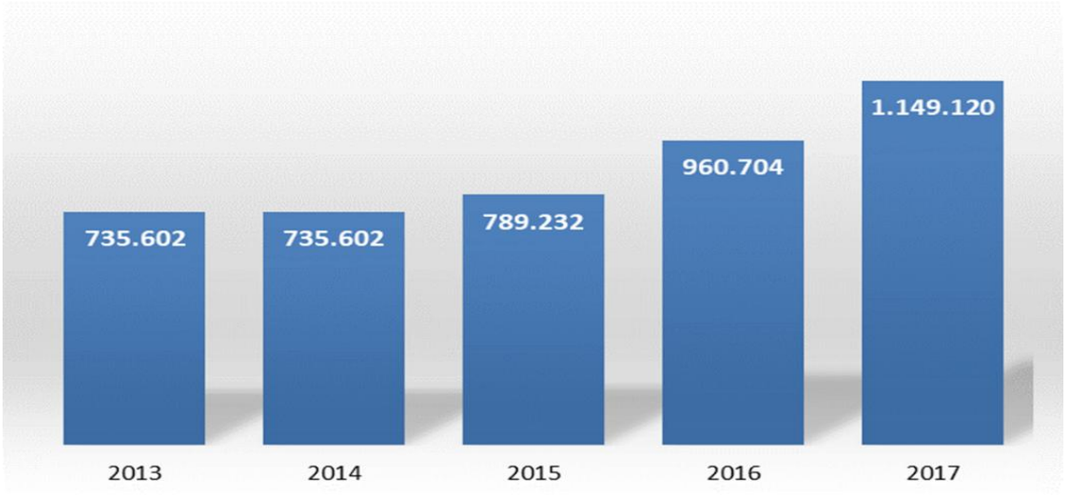

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.205 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.17.4 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Pengembangan Perpustakaan di Provinsi Bali sampai saat ini berkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan tabel

Tabel 2.78 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Perkembangan Perpustakaan	3.044	3.051	3.487	3.700	3.863

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan pengunjung di Provinsi Bali maka rasio yang ada sesuai dengan tabel terlampir.

Tabel 2.79 Rasio Perpustakaan per-Satuan Penduduk

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Perpustakaan per-Satuan Penduduk	0,72	0,72	0,82	0,87	0,91

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.17.5 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun

Jumlah pengunjung rata-rata perpustakaan di Provinsi Bali tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 62.868 pengunjung.

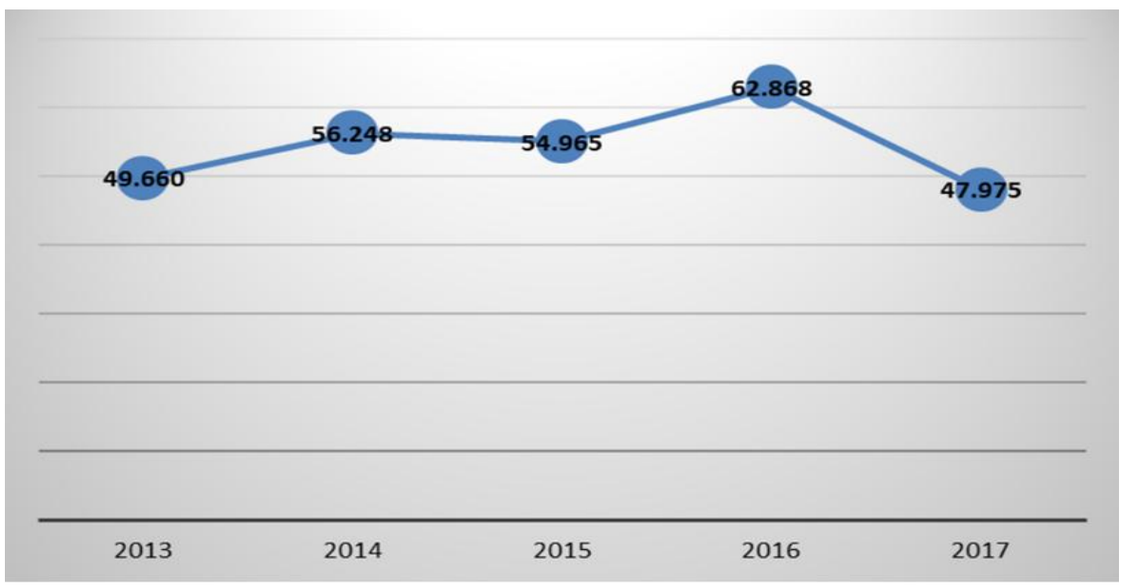

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.206 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.17.6 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan se-Provinsi Bali	735.602	735.602	789.232	960.704	1.149.120

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.2.17.7 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat terus meningkat dari 140 orang menjadi 177 orang.

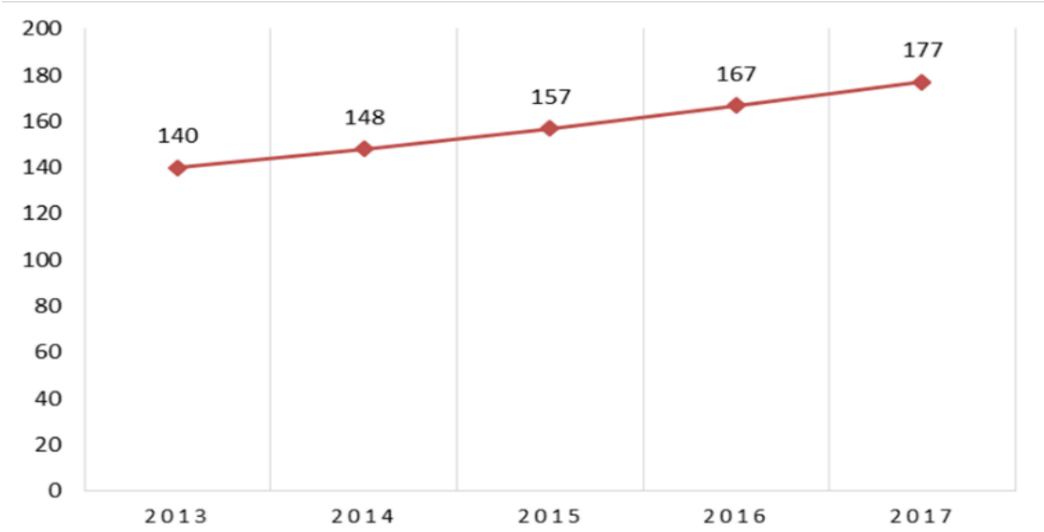

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.207 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.2.18 Kearsipan

Sesuai Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Ruang Lingkup penyelenggaraan Kearsipan meliputi keseluruhan Penetapan Kebijakan, Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip dalam suatu Sistem Kearsipan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Sumber Daya lainnya. Ruang Lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Perseorangan, serta Lembaga Kearsipan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Kearsipan selama periode 2013 s.d 2018 berbagai upaya dilakukan secara optimal, namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga capaiannya belum sesuai dengan harapan.

Sebagai gambaran umum Pengembangan Kearsipan di Provinsi Bali perkembangannya dari 2013-2017 dapat diinformasikan sesuai data tabel 2.127.

2.5.2.18.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Jumlah arsip perangkat daerah yang dikelola meningkat dari 3.000 box pada tahun 2013 menjadi 6.500 box pada tahun 2017. Jumlah arsip yang dilestarikan juga menunjukkan peningkatan dari 187 box pada tahun 2013 menjadi 1.787 box pada tahun 2017.

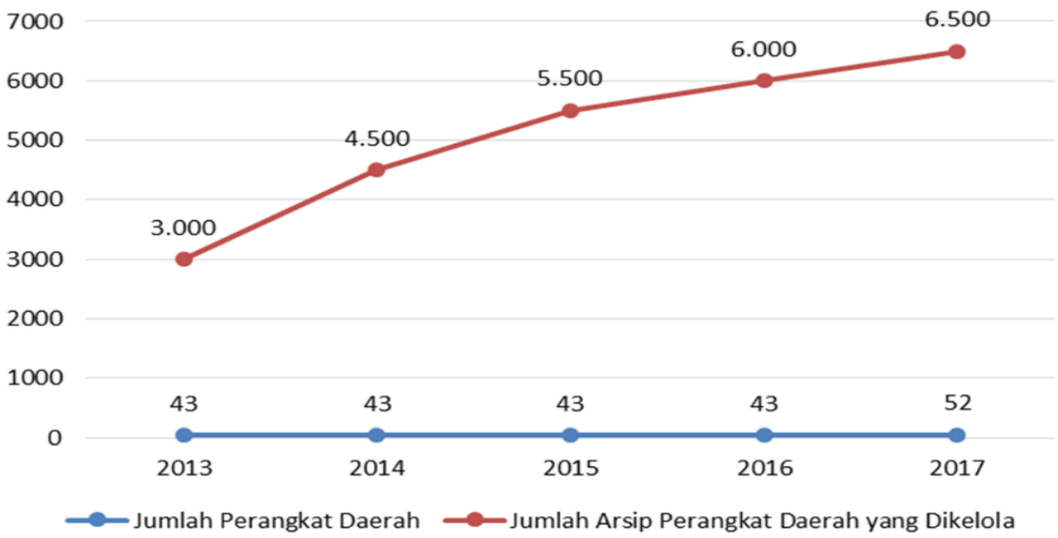

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.208 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

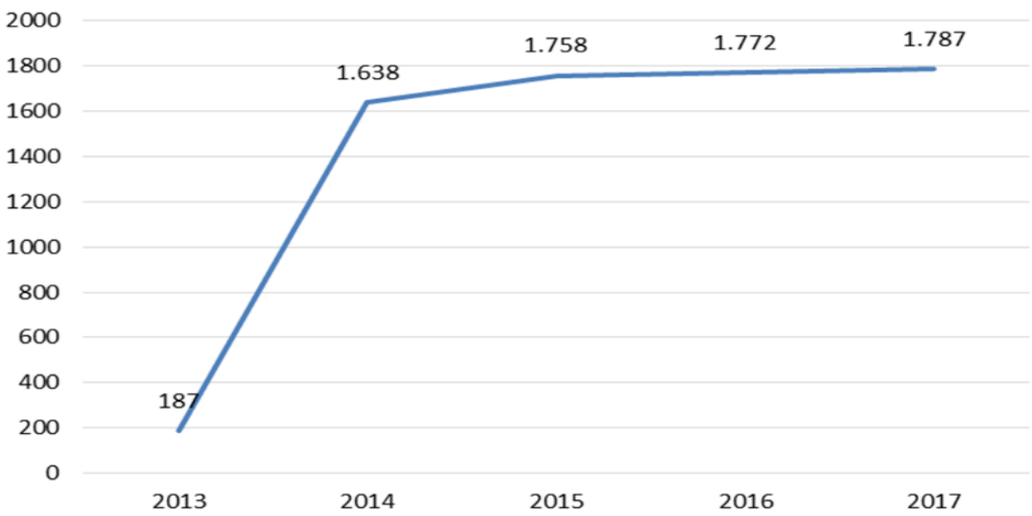

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.209 Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Provinsi Bali

2.5.2.18.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan mengalami penurunan dari 38 pada tahun 2013 menjadi 37 pada tahun 2014. Namun, menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2015 sampai 2017 hingga mencapai 54.

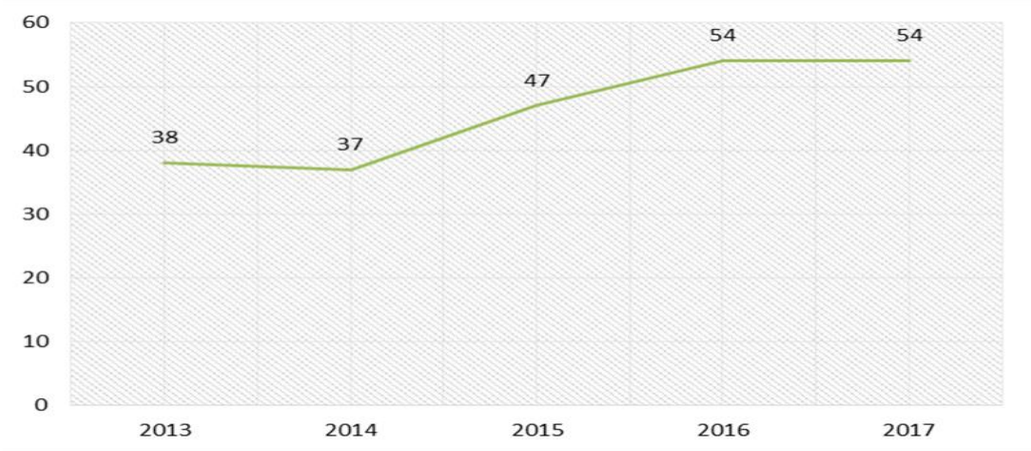

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.210 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.5.3.1 Pariwisata

2.5.3.1.1 Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)

Jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali sempat mengalami penurunan dari 216 pada tahun 2013 menjadi 197 tahun 2014. Namun, mengalami peningkatan mencapai 233 pada tahun 2017. Jumlah DTW terbanyak menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2017 yaitu ada di Kabupaten Gianyar dengan 61 DTW dan yang terendah ada di Kota Denpasar yaitu 10 DTW.

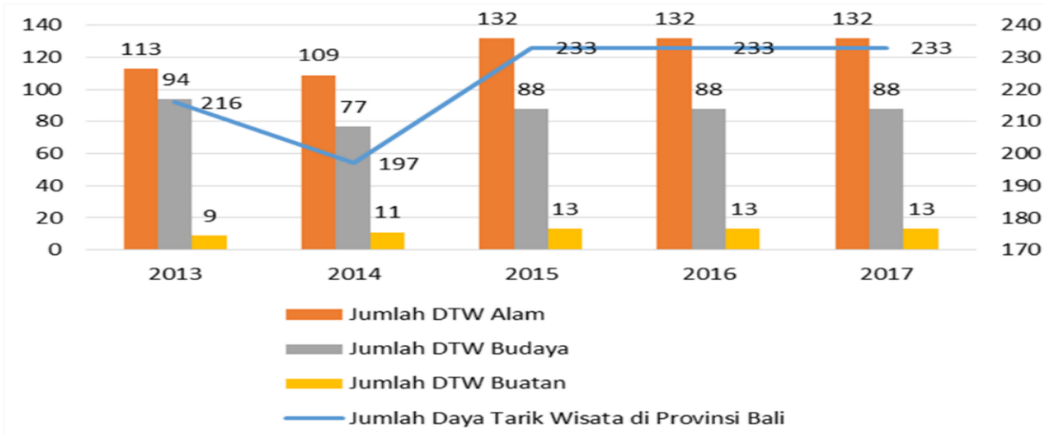

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.211 Jumlah Daya Tarik Wisata

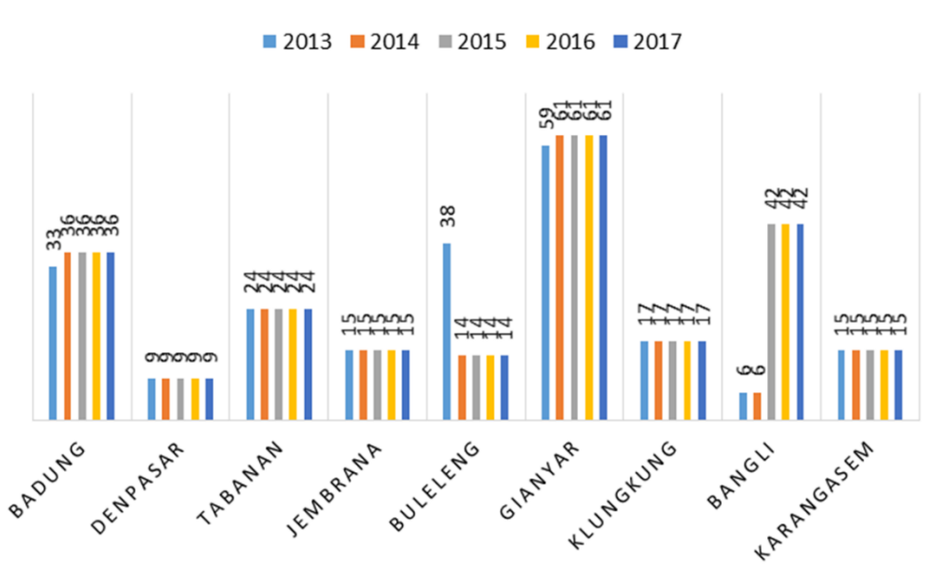

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.212 Jumlah DTW Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

2.5.3.1.2 Kunjungan Wisatawan

Selama kurun waktu 2013 sampai 2018, jumlah kunjungan wisatawan nusantara lebih banyak dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 9.757.911 wisatawan. Jumlah wisatawan mancanegara tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 6.070.473 wisatawan.

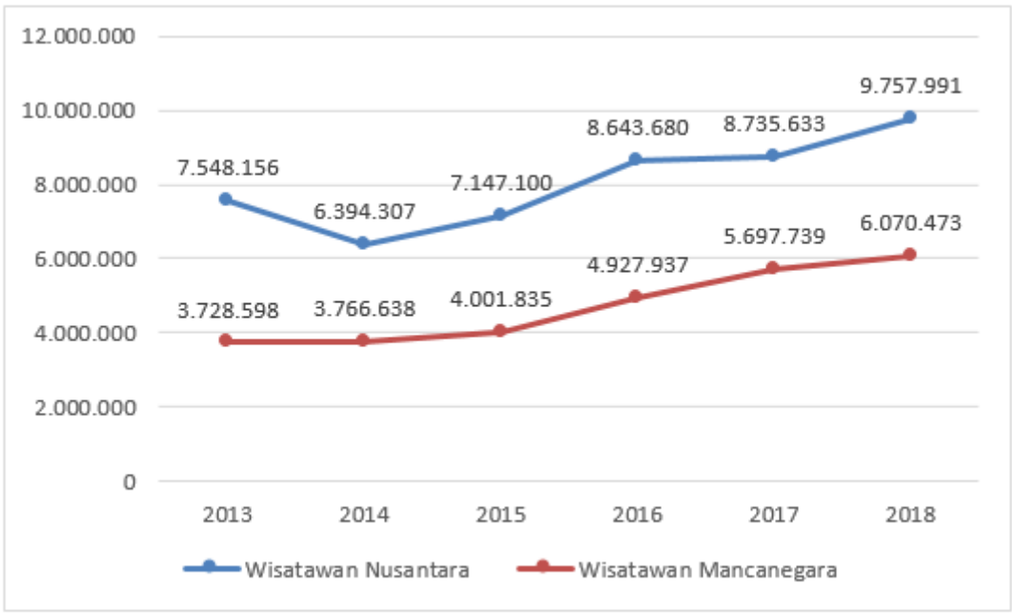

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.213 Tingkat Kunjungan Wisatawan ke Bali Tahun 2013-2018

Tabel 2.80 ***the best 20 direct foreign tourist arrivals to bali in January - december 2017***

NATIONALITY	2016	2017
CHINESE	990,771	1,385,850
AUSTRALIAN	1,143,157	1,094,974
INDIAN	187,351	272,761
JAPANESE	235,009	252,998
BRITISH	221,521	243,827
AMERICAN	170,457	191,106
FRENCH	165,291	177,864
GERMAN	153,925	177,184
SOUTH KOREAN	151,440	174,842
MALAYSIAN	179,721	170,459
TAIWANESE	136,514	129,921
SINGAPOREAN	136,448	125,934
DUTCH	95,707	102,235
RUSSIAN	66,967	94,898
NEW ZEALAND	84,330	86,463
CANADIAN	53,756	63,385
PHILIPINE	49,166	57,826
ITALIAN	41,689	50,045
SPAIN	37,612	44,690
THAILAND	32,721	42,070
TOTAL	**4,333,553**	**4,939,332**
OTHER NATIONALITIES	**594,384**	**758,407**
TOTAL ARRIVAL	**4,927,937**	**5,697,739**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.1.3 Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara sebesar 9,60 hari tahun 2013, 9,11 hari tahun 2014, 9,87 tahun 2015, 10,08 tahun 2016, 10,45 tahun 2017 dan 10,45 tahun 2018. Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara cenderung meningkat dari 3,70 hari pada tahun 2013 menjadi 4,00 hari pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan menjadi 3,80 hari pada tahun 2016, namun meningkat kembali menjadi 4,30 hari pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 4 hari.

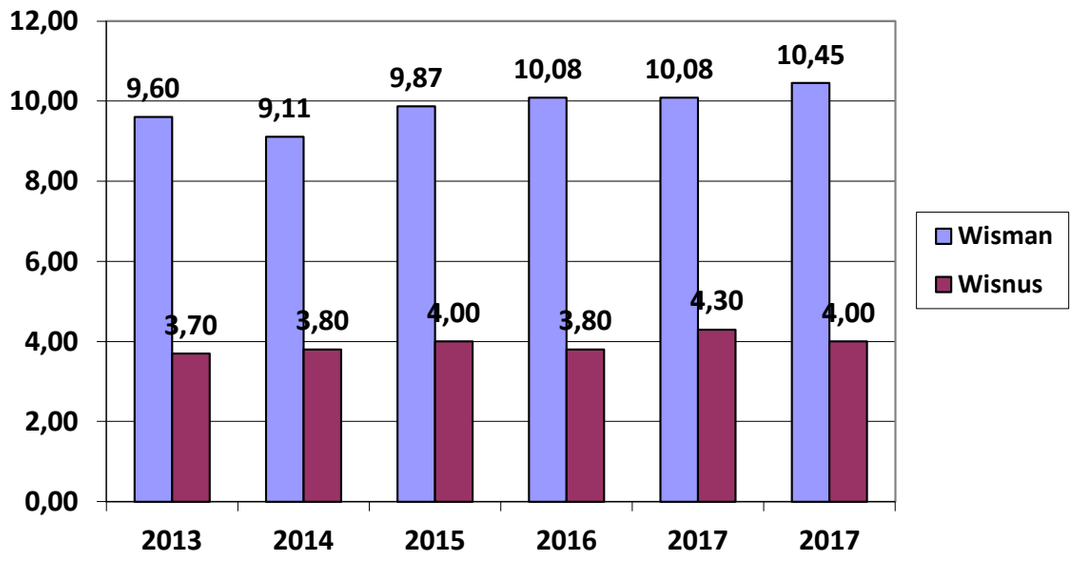

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.214 Rata-Rata lama tinggal wisatawan

2.5.3.1.4 Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata

Jumlah akomodasi pariwisata di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 2.573 akomodasi pada tahun 2013 menjadi 4.883 akomodasi pada tahun 2016. Namun, jumlah akomodasi mengalami penurunan hingga mencapai 4.290 akomodasi pada tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah akomodasi terbanyak ada di Kabupaten Gianyar dengan 1.294 akomodasi yang terdiri atas 16 hotel bintang, 199 hotel melati, dan 1.079 pondok wisata. Sedangkan jumlah akomodasi terendah ada di Kabupaten Bangli dengan 28 akomodasi yang terdiri atas 6 hotel melati dan 22 pondok wisata.

Tabel 2.81 Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Badung	378	957	1.022	1.279	1.278
1. Hotel Bintang	144	154	154	157	156
2. Hotel Melati	115	362	427	406	406
3. Pondok wisata	119	441	441	716	716
Denpasar	290	293	290	309	320
1. Hotel Bintang	28	26	26	26	34
2. Hotel Melati	197	200	197	211	214
3. Pondok wisata	65	67	67	72	72
Tabanan	128	139	139	201	208
1. Hotel Bintang	4	4	4	4	4
2. Hotel Melati	30	36	36	72	74
3. Pondok wisata	94	99	99	125	130
Jembrana	60	84	84	84	84
1. Hotel Bintang	0	0	0	0	0
2. Hotel Melati	42	63	63	63	63
3. Pondok wisata	18	21	21	21	21
Buleleng	220	378	461	514	461
1. Hotel Bintang	13	11	11	11	11
2. Hotel Melati	117	175	187	187	187
3. Pondok wisata	90	192	263	316	263
Gianyar	999	731	1.289	1.289	1.294
1. Hotel Bintang	21	14	14	14	16
2. Hotel Melati	193	142	198	198	199
3. Pondok wisata	785	575	1.077	1.077	1.079
Klungkung	47	45	197	197	197
1. Hotel Bintang	2	1	1	1	1
2. Hotel Melati	30	29	181	181	181
3. Pondok wisata	15	15	15	15	15
Bangli	16	16	16	18	28
1. Hotel Bintang	0	0	0	0	0
2. Hotel Melati	6	6	6	6	6
3. Pondok wisata	10	10	10	12	22
Karangasem	435	396	396	992	420
1. Hotel Bintang	11	7	7	9	9
2. Hotel Melati	361	165	165	187	187
3. Pondok wisata	63	224	224	796	224
Total	**2.573**	**3.039**	**3.894**	**4.883**	**4.290**

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2017

2.5.3.1.5 Jumlah Restoran dan Bar

Tabel 2.82 Jumlah Restotan dan Rumah Makan Tahun 2013-2017

KAB/KOTA	2013		2014		2015		2016		2017	
	Rest/RM	Seat	Rest/RM	Seat	Rest/RM	Seat	Rest/RM	Seat	Rest/RM	Seat
Denpasar	75	6975	449	24740	449	24740	438	23957	455	24864
Badung	96	7836	833	60305	825	59639	823	46103	823	46103
Bangli	17	3610	17	3610	17	3610	22	2760	30	2760
Buleleng	53	2117	145	3792	173	4947	173	4947	173	4947
Gianyar	378	13955	405	10513	504	17425	504	17425	505	17595
Jembrana	136		76		76		76	88	76	88
Klungkung	31	951	31	951	31	951	31	951	31	951
Karangasem	246	6229	70	2135	70	2135	118	2829	118	2829
Tabanan	40	470	32	1440	32	1440	32	1598	40	1723
TOTAL	**1072**	**42143**	**2059**	**107494**	**2177**	**114895**	**2217**	**100658**	**2251**	**101860**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.83 Jumlah Bar di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

KAB/KOTA	2013	2014	2015	2016	2017
Denpasar	126	126	126	133	133
Badung	316	319	366	370	371
Bangli	-	-	-	-	-
Buleleng	30	79	104	81	81
Gianyar	96	96	127	127	127
Jembrana	6	6	6	6	6
Klungkung	10	9	17	17	17
Karangasem	11	52	52	62	62
Tabanan	-	-	-	-	-
TOTAL					

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.1.6 Jumlah Pramuwisata

Jumlah pramuwisata mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 8.327 pramusiwata pada tahun 2013 menjadi 9.740 pramuwisata pada tahun 2017. Jumlah pramuwisata terbesar yaitu untuk Inggris sebesar 2.980 pada tahun 2017.

Tabel 2.84 Jumlah Pramuwisata

NO	SPESIALISASI BAHASA	SEJAK TH 1988 S/D TH 2013			SEJAK TH 1988 S/D TH 2014			SEJAK TH 1988 S/D TH 2015			SEJAK TH 1988 S/D TH 2016			SEJAK TH 1988 S/D TH 2017		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	INGGRIS	2,561	132	2,693	2,561	132	2,693	2,561	132	2,693	2,621	138	2,759	2813	167	2,980
2	JEPANG	2,084	155	2,239	2,084	155	2,239	2,084	155	2,239	2,087	156	2,243	2112	157	2,269
3	ITALIA	272	7	279	272	7	279	272	7	279	272	7	279	272	8	280
4	BELANDA	72	26	98	72	26	98	72	26	98	85	26	111	98	28	126
5	JERMAN	444	23	467	444	23	467	444	23	467	452	23	475	469	25	494
6	SPANYOL	135	10	145	135	10	145	135	10	145	139	11	150	152	14	166
7	PERANCIS	221	25	246	221	25	246	221	25	246	255	35	290	321	51	372
8	MANDARIN	799	249	1,048	799	249	1,048	799	249	1,048	832	301	1,133	1151	434	1,585
9	KOREA	489	193	682	489	193	682	489	193	682	529	198	727	549	227	776
10	SWEDIA	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	3	0	3
11	ARAB	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	0	1
12	RUSIA	98	22	120	98	22	120	98	22	120	104	22	126	105	24	129
13	INDONESIA	255	52	307	255	52	307	255	52	307	333	57	390	448	105	553
14	DENMARK	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6	1	7	6		6
	TOTAL	7,439	895	8,334	7,439	895	8,334	7,439	895	8,334	7,718	975	8,693	8,500	1,240	9,740

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.1.7 Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata

Jumlah kelompok sadar wisata cenderung meningkat dari 136 kelompok pada tahun 2013 menjadi 185 kelompok pada tahun 2017. Jumlah desa wisata juga mengalami peningkatan dari 11 desa wisata pada tahun 2013 menjadi 100 desa wisata pada tahun 2017. Jumlah asosiasi/lembaga pariwisata selama lima tahun terakhir sebesar 26 lembaga.

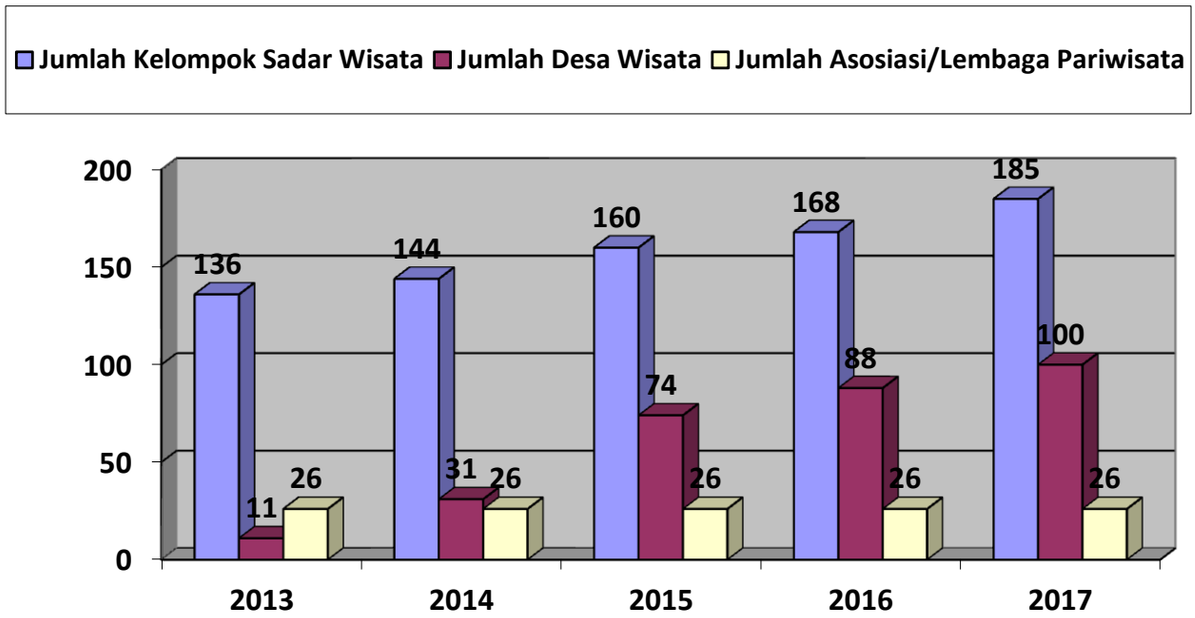

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.215 Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata
Tahun 2013-2017

2.5.3.1.8 PAD Sektor Pariwisata

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan untuk memungut pajak sektor pariwisata (Pajak Hotel dan Restoran/PHR) dilaksankan oleh Kabupaten/Kota melalui Bada Pendapan Daerah.

2.5.3.1.9 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 48,51 persen dan meningkat menjadi 51,92 persen pada tahun 2014. Namun, mengalami penurunan menjadi 49,72 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 57,95 persen pada tahun 2016 dan kembali meningkat menjadi 58,90 pada tahun 2017.

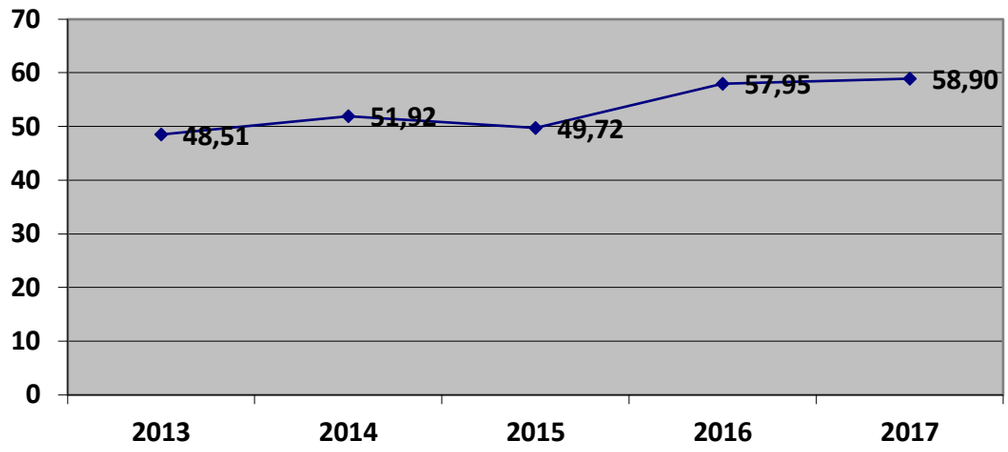

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.216 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Tahun 2013-2017

2.5.3.2 Pertanian

2.5.3.2.1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontirbusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 15,22 persen dan cenderung menurun menjadi 14,35 persen pada tahun 2017. Kontribusi sektor pertanian pangan cenderung menurun dari 16,57 persen pada tahun 2013 menjadi 14,57 persen pada tahun 2017. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tertinggi pada tahun 2017 yaitu cabai rawit sebesar 66.696,43 dan yang terendah yaitu pisang sebesar 4.008,53.

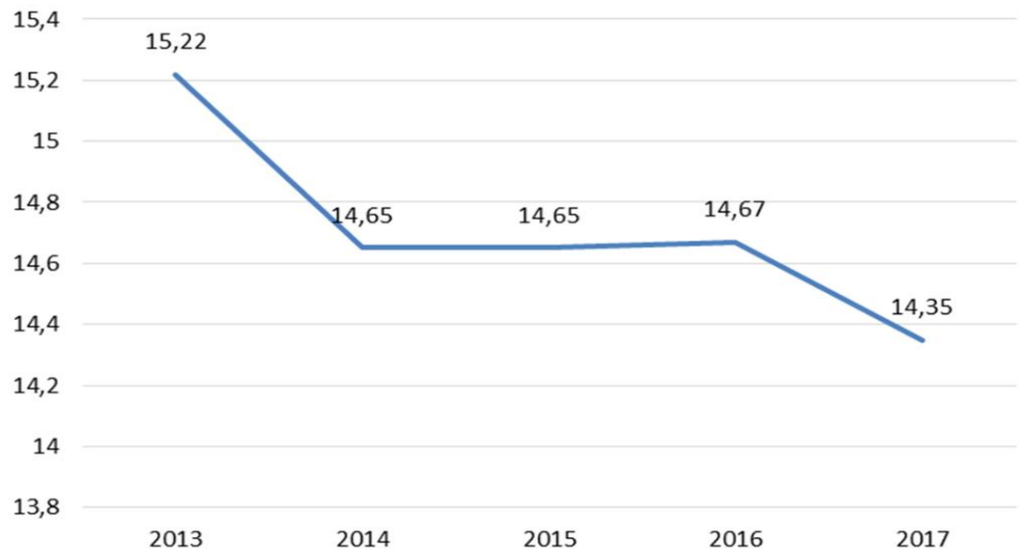

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.217 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

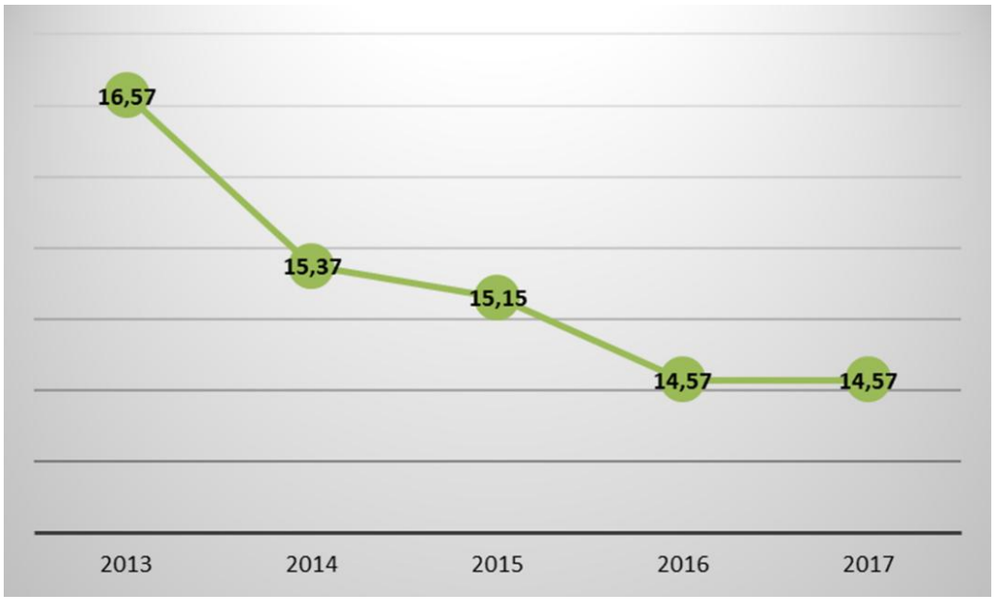

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.218 Kontribusi Sektor Pertanian Pangan Terhadap PDRB Tahun 2013-2017

Tabel 2.85 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

ADHB(%) (harga)	2013	2104	2015	2016	2017
Tanaman Pangan (Rp/Kg)					
Beras	10.807,22	8.292,91	10.084,20	10.290,00	10.500,00
Jagung	4.114	4.331	4.419,00	4.805,56	5.250,00
Kedelai	6.662	7.013	7.156,00	7.616,30	7.903,00
Bawang merah	22.946,46	13.081,89	14.973,59	23.244,42	25.227,68
Cabai Besar	12.907,65	9.892,48	12.069,35	19.439,78	24.958,40
Cabai Rawit	15.879,48	13.490,51	20.737,46	25.623,39	66.696,43
Kentang	6.532,53	6.640,17	7.008,55	9.045,55	9.752,63
Pisang	5.295,92	5.784,15	5.351,37	5.351,37	4.008,53
Jeruk Siam/keprok	6.006,18	6.157,38	5.358,43	5.358,43	7.714,22
Salak	3.270,74	4.514,11	3.812,35	3.812,35	6.287,82
Manggis	7.126,04	8.218,47	5.168,73	5.168,73	14.757,53
Mangga	4.046,05	5.943,52	6.243,34	6.243,34	12.786,42
Anggur	5.017,60	6.356,41	8.131,54	8.131,54	8.106,42

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.2.2 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB

Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan dari 2,52 persen pada tahun 2013 menjadi 1,93 persen pada tahun 2017.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.219 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Tahun 2013-2017

2.5.3.2.3 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDR

Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 1,48 persen, kontribusi tersebut mengalami penurunan menjadi 1,38 persen pada tahun 2014. Namun, cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 1,47 persen pada tahun 2016. Kontribusi tersebut mengalami penurunan menjadi 1,43 persen pada tahun 2017.

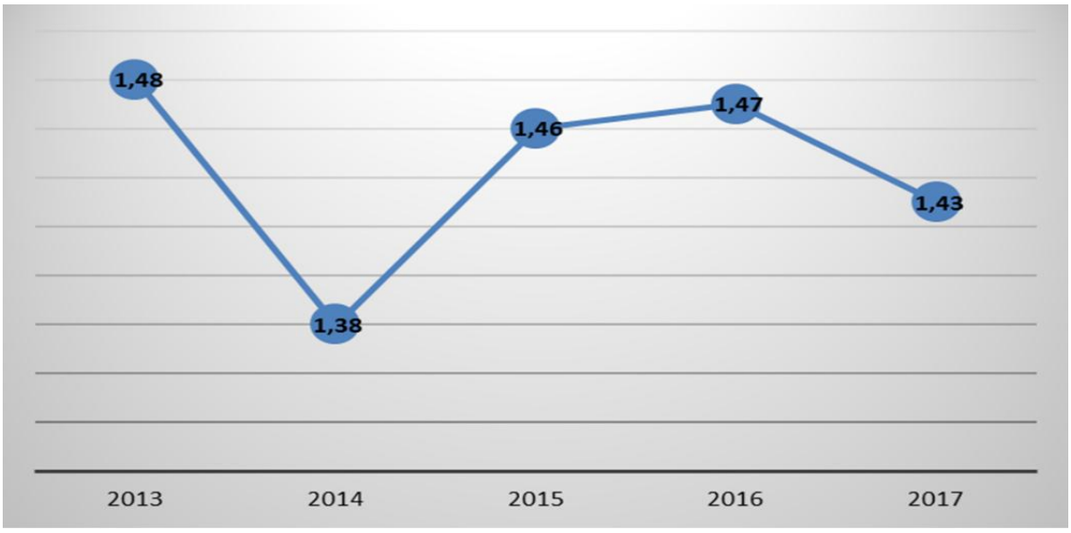

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.220 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB tahun 2013-2017

2.5.3.2.4 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai 2015 mencapai 62,14 per hektar, mengalami penurunan mencapai 60,42 pada tahun 2017. Produktivitas jagung bervariasi pada tahun 2013 sampai 2017, yaitu 31,59 per hektar, 24,34 per hektar, 26,46 per hektar, 33,17 per hektar, dan 31,22 per hektar. Produktivitas kedelai pada tahun 2013 sebesar 13,26 per hektar dan meningkat menjadi 15,28 per hektar pada tahun 2014. Namun, mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 mencapai 12,92 per hektar.

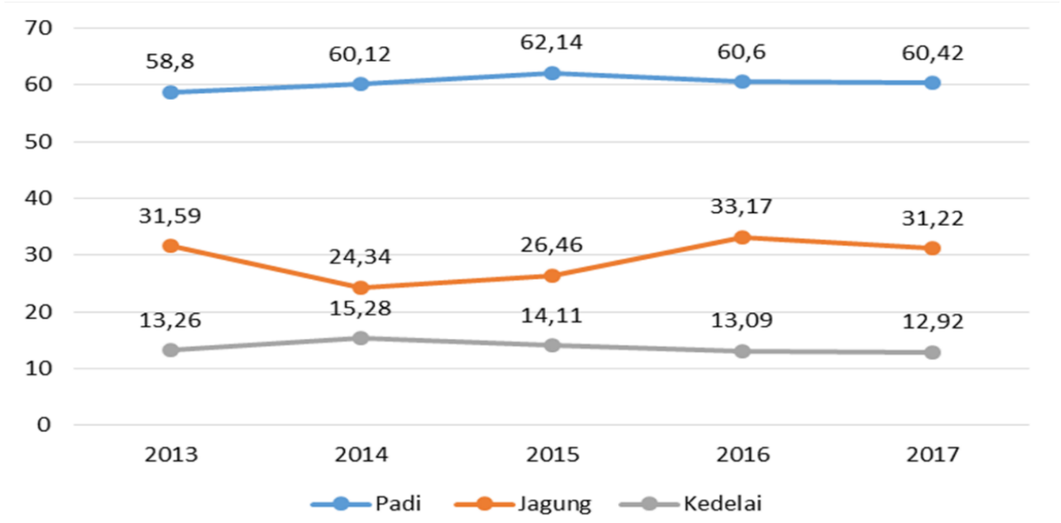

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.221 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2013-2017

2.5.3.2.5 Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani pada tahun 2013 sebesar 8,961 dan meningkat menjadi 9,011 pada tahun 2017.

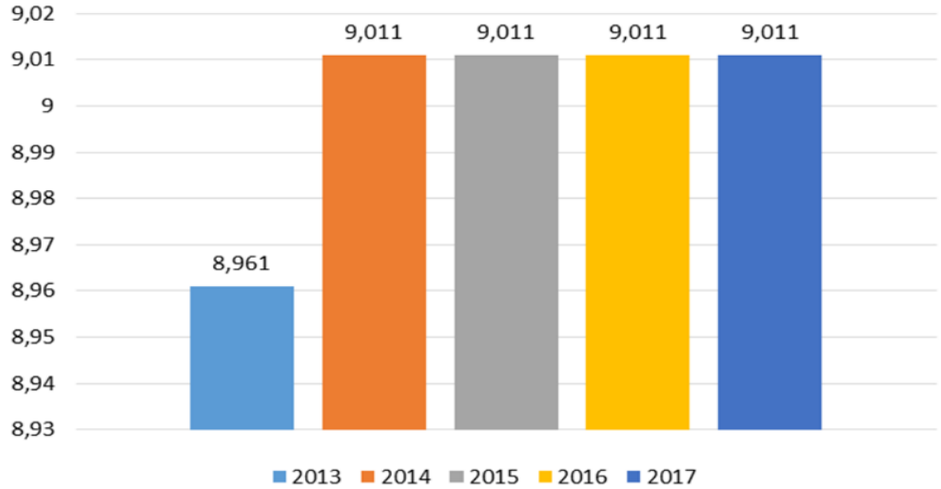

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.222 Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2013-2017

2.5.3.3 Peternakan

2.5.3.3.1 Kelompok Ternak

Jumlah kelompok ternak yang paling banyak di Provinsi Bali yaitu kelompok ternak sapi, yaitu sebanyak 390 kelompok pada tahun 2017. Kelompok pengolah pakan ternak meningkat dari 8 kelompok pada tahun 2013 menjadi 22 kelompok pada tahun 2015. Namun, mengalami penurunan menjadi 10 kelompok pada tahun 2016 dan 2017. Kelompok sarana dan prasarana ternak mengalami penurunan dari 74 kelompok pada tahun 2013 menjadi 25 kelompok pada tahun 2016. Namun, mengalami peningkatan menjadi 64 kelompok pada athun 2017. Jumlah pasar ternak selama kurun waktu 2013 sampai 2017 yaitu sebanyak 12 pasar.

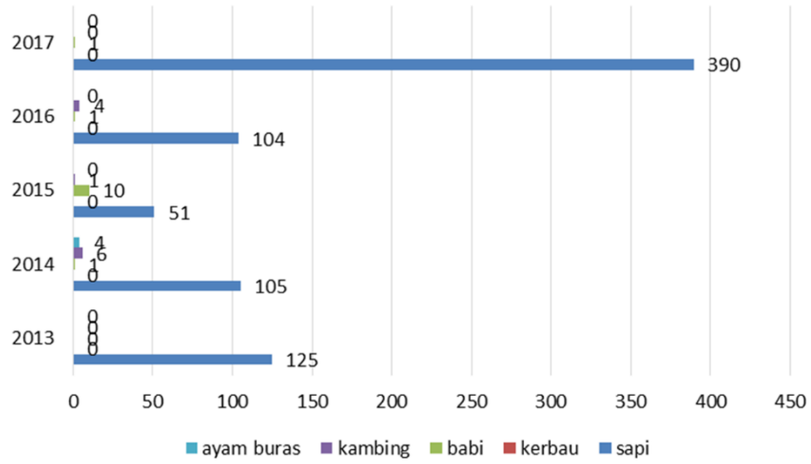

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.223 Jumlah Kelompok Ternak Pembibitan Tahun 2013-2017

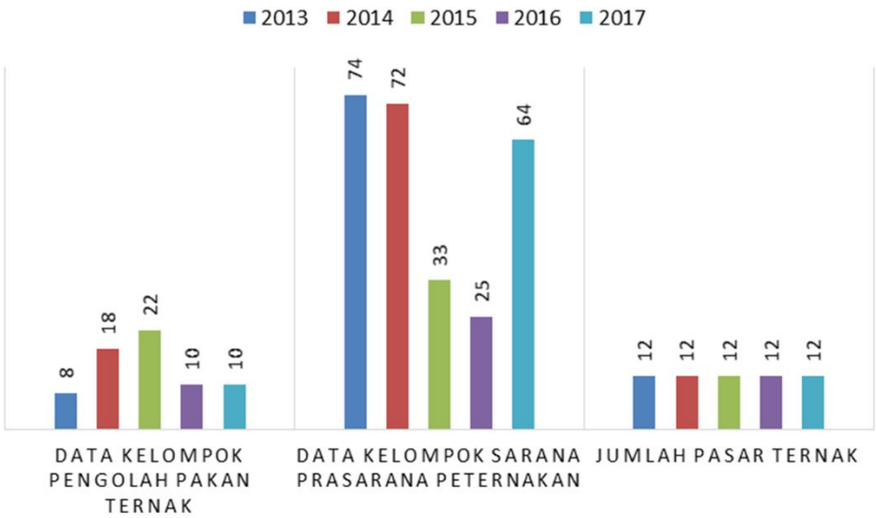

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.224 Jumlah Kelompok Pengolah Pakan Ternak, Sarana Prasarana Ternak, dan Pasar Ternak Tahun 2013-2017

2.5.3.3.2 Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak

Ketersediaan daging cenderung meningkat dari 138.032,06 ton pada tahun 2013 menjadi 188.090,36 pada tahun 2016. Naum, mengalami penurunan menjadi 149.091,72 ton pada tahun 2017. Kebutuhan hasil daging selama kurun waktu 2013 sampai 2017 masih dapat dipenuhi oleh ketersediaan daging di Provinsi Bali. Kebutuhan telur dan susu selama lima tahun dari 2013 sampai 2017 juga telah mampu dipenuhi oleh ketersediaan telur di Provinsi Bali.

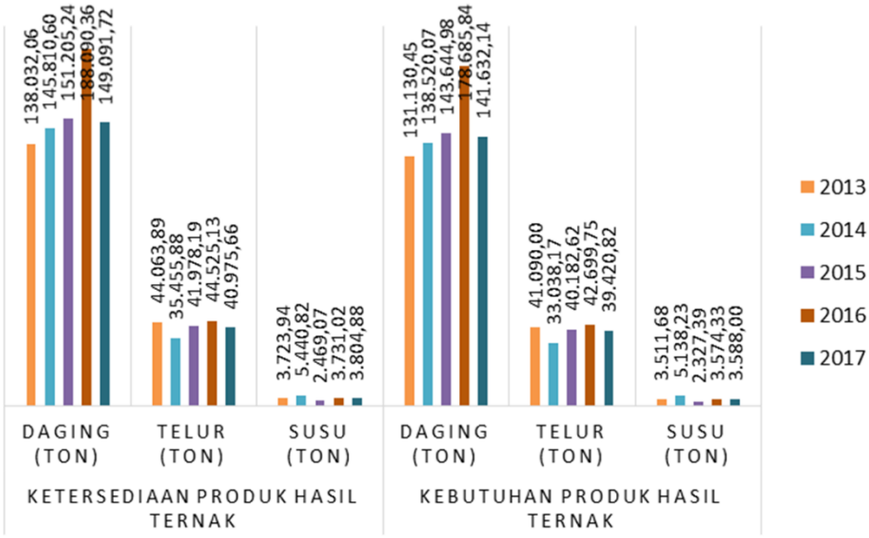

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.225 Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak Tahun 2013-2017

2.5.3.3.3 Rumah Potong Hewan dan Unggas

Rumah potong hewan selama lima tahun berjumlah 7 RPH. Sedangkan untuk rumah potong unggas berjumlah 3 RPU dan laboratorium berjumlah 1 lab. Pada tahun 2017, jumlah ternak yang paling banyak dipotong yaitu jenis ayam ras pedagingan sebanyak 13.040.227 ekor dan yang paling sedikit yaitu kerbau hanya 62 ekor.

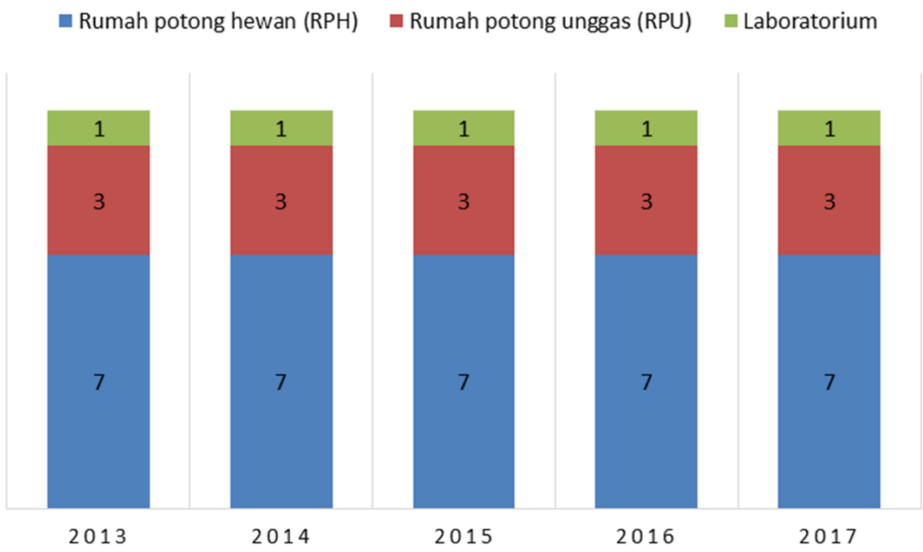

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.226 Rumah Potong Hewan dan Unggas Tahun 2013-2017

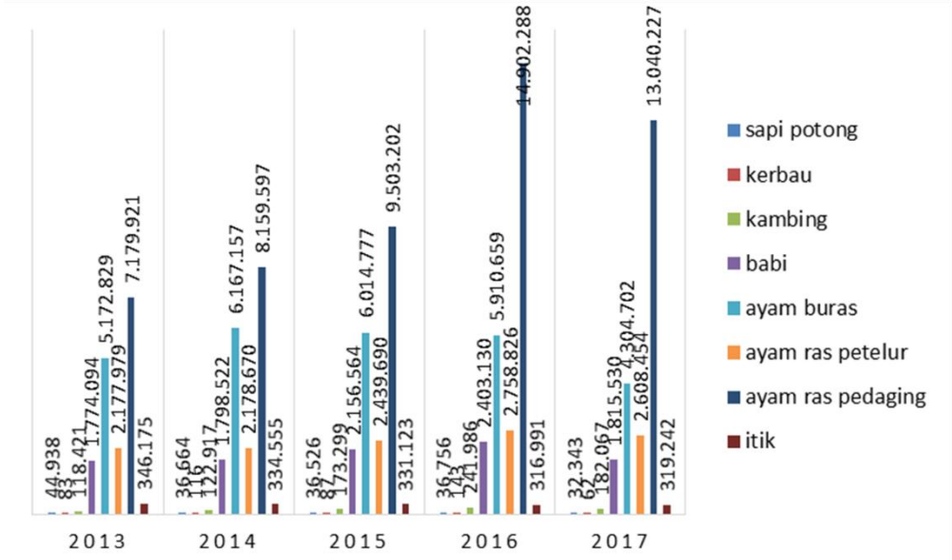

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.227 Jumlah Pemotongan Ternak Tahun 2013-2017

2.5.3.3.4 Jumlah Kasus Penyakit Hewan

Penyakit hewan yang paling banyak terjadi pada tahun 2017 yaitu colibasilosis yaitu sebanyak 27.971.

Tabel 2.86 Jumlah Penyakit Hewan

No	Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
		Kasus	Kasus	Kasus	Kasus	Kasus
1	Septicaemia Epizootica (SE)	433	48	139	81	217
2	Penyakit Jembrana (JA)	-	-	-	-	-
3	Bali Ziekte (BZ)	345	-	199	350	367
4	ORG	-	-	-	-	-
5	Scabies (SC)	-	-	-	4,639	16,881
6	New Castle Disease (ND)	2,415	328	2,955	1,110	214
7	Snot	-	-	-	-	-
8	Kesus Mencret Menular (DGS)	74	89	126	33	99
9	Rabies	121	44	529	206	92
10	Bophin Ephermal Fever (BEF)	5,449	-	3,255	5,897	4,053
11	Collibacilosis (CB)	11,192	-	14,531	32,459	34,493
12	Pink Eye	-	-	-	-	-
13	Chronic Respiratory Disease (CRD)	4,536	-	-	-	-
14	Hog Cholera (HC)	301	297	375	304	185
15	Avian Influenza	36	4	5	2	4

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.3.5 Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali

Pemasukan ternak besar dan kecil ke bali yang paling banyak yaitu untuk kambing potong. Pemasukan kambing potong meningkat dari 635 pada athun 2014 menjadi 186.975 pada tahun 2016. Namun, mengalami penurunan menjadi 52.321 pada tahun 2017. Untuk pemasukan bahan asal ternak ke Bali pada tahun 2017 yang terbesar yaitu susu sebanyak 3.626.200 liter.

Tabel 2.87 Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Babi Potong	-	-	-	-	-
Kambing Potong	-	635	1,355	186,975	52,321
Babi Bibit	-	-	-	-	-
Kambing Bibit	60	170	-	50	42
Kerbau Potong	-	6	17	-	-

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.88 Pemasukan Bahan Asal Ternak ke Bali (kg) Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Daging Sapi Beku	914,270	1,843,885	913,324	1,981,124	1,382,533
Daging Sapi Beku Untuk Industri	-	-	-	-	-
Daging Kambing/Daging Beku	233,340	272,300	228,880	157,100	127,425
Daging Ayam Beku	-	-	364,200	1,159,300	309,300
Daging Olahan	-	-	-	-	1,530,479
Daging Babi Beku	4,000	-	-	-	-
Daging Kalkun Beku	43,650	-	-	1,200	-
Daging Itik	125,750	97,800	100,000	863,200	-
Mentega	193,205	397,840	215,712	319,408	58,800
Cream	40,000	69,800	4,200	-	-
Susu (Liter)	1,904,006	2,331,160	2,205,872	3,814,940	3,626,200
Yogurt	248,950	169,460	146,508	191,500	189,700
Cheese	193,205	-	277,221	-	408,835

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.3.6 Pengeluaran Ternak dari Bali

Pengeluaran ternak dari Bali terbesar pada tahun 2017 yaitu ayam bibit/DOC sebanyak 19.779.200 ekor. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 19.042.200 ekor. Sedangkan pengeluaran bahan asal ternak yang terbesar pada tahun 2017, yaitu telur konsumsi sebanyak 157.153.980 butir.

Tabel 2.89 Pengeluaran Ternak dari Bali Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi Potong	57,810	58,920	53,730	44,865	52,513
Sapi Bibit	362	20	54	82	280
Babi Potong	15,230	3,075	10,720	16,360	30,980
Ayam Afkir	221,283	274,785	341,206	352,605	380,240
Babi Bibit	137	820	870	109	-
DOC Jantan	2,534,696	1,485,700	200,000	140,500	53,400
Jumlah Ayam Bibit/DOC	23,629,738	20,715,100	19,018,223	19,042,200	19,779,200

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.90 Pengeluaran Bahan Asal Ternak dari Bali Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Daging Sapi Beku (Kg)	542,054	344,470	711,751	296,436	63,553
Daging Sapi Olahan (Kg)	1,199,115	576,020	2,067,452	1,183,198	1,445,188
Daging Babi Beku (Kg)	1,032,545	380,955	582,444	291,985	644
Daging Ayam Beku (Kg)	675,456	480,800	382,284	583,952	803,688
Daging Olahan Babi (Kg)	2,288,690	1,314,835	2,202,323	1,400,946	1,583,906
Daging Ayam Olahan (Kg)	1,072,970	506,307	1,918,184	934,351	1,291,008
Daging Kalkun (Kg)	96,000	-	195,000	342,000	-
Telur Konsumsi (butir)	148,264,300	85,001,100	115,458,100	126,535,700	157,153,980
Keju (Kg)	306	330	5,125	69,055	92,975

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.3.7 Jumlah SDM Peternakan

Jumlah peternak terbanyak pada tahun 2017 yaitu peternak sapi potong sebanyak 1.168 peternak. Jumlah peternak lain yang jumlahnya di atas seribu yaitu peternak babi campuran sebanyak 1.050 peternak dan peternak ayam ras pedaging sebanyak 1.158 peternak. Berdasarkan kelas kelompoknya peternak sapi memiliki kelas terbanyak dengan jumlah 463 pada tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 286 kelas pemula, 136 kelas lanjut, 33 kelas madya, dan 8 kelas utama.

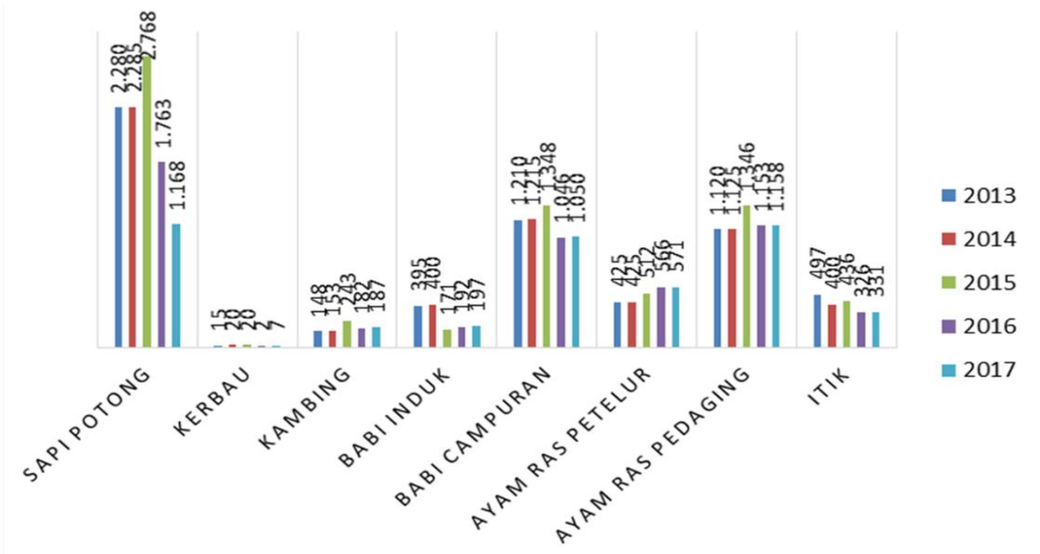

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.228 Jumlah Peternak Tahun 2013-2017

Tabel 2.91 Kelas Kelompok Peternak

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
sapi					
pemula	323	342	331	324	286
lanjut	181	181	183	112	136
madya	44	43	43	40	33
utama	8	6	6	6	8
Jumlah	**556**	**572**	**563**	**482**	**463**
kambing					
pemula	4	4	4	4	4
lanjut	1	1	1	1	1
madya	2	2	2	2	2
utama	0	0	0	0	0
Jumlah	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
ayam buras					
pemula	0	13	13	13	13
lanjut	0	5	5	4	4
madya	0	9	9	10	10
utama	0	6	6	16	16
Jumlah	**0**	**33**	**33**	**43**	**43**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Jumlah petugas medic veteriner pada tahun 2017 ada di Provinsi Bali yaitu 9 petugas. Sedangkan untuk petugas paramedic pada tahun 2017 yaitu di Provinsi Bali dengan 6 petugas. Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana pada tahun 2017 tidak memiliki petugas paramedik. Jumlah tenaga IB sempat mengalami penurunan dari 290 petugas pada tahun 2015 menjadi 245 petugas pada tahun 2016. Namun, kembali meningkat menjadi 282 petugas pada tahun 2017. Jumlah tenaga PKB selama tahun 2013 sampai 2016 yaitu 58 petugas, mengalami peningkatan menjadi 80 pada tahun 2017. Pada tahun 103 sampai 2015, jumlah ATR sebanyak 18 dan meningkat menjadi 23 pada tahun 2016 dan 2017

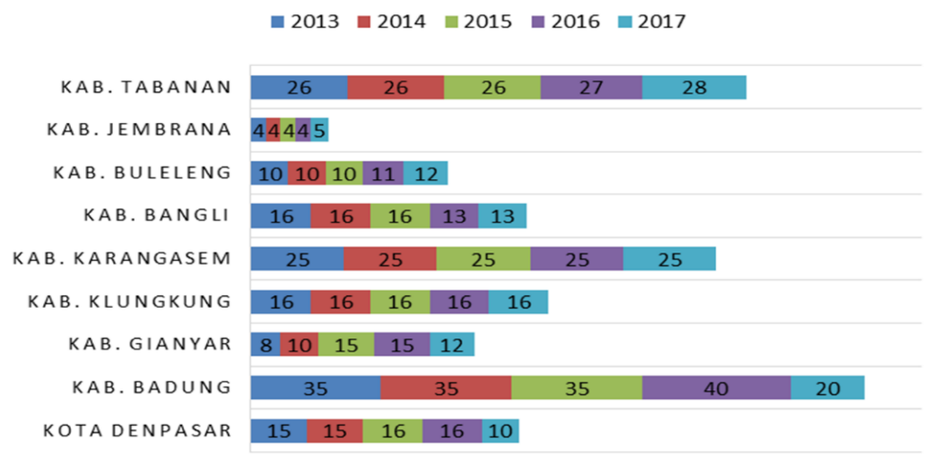

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.229 Jumlah Petugas Medik Veteriner Tahun 2013-2017

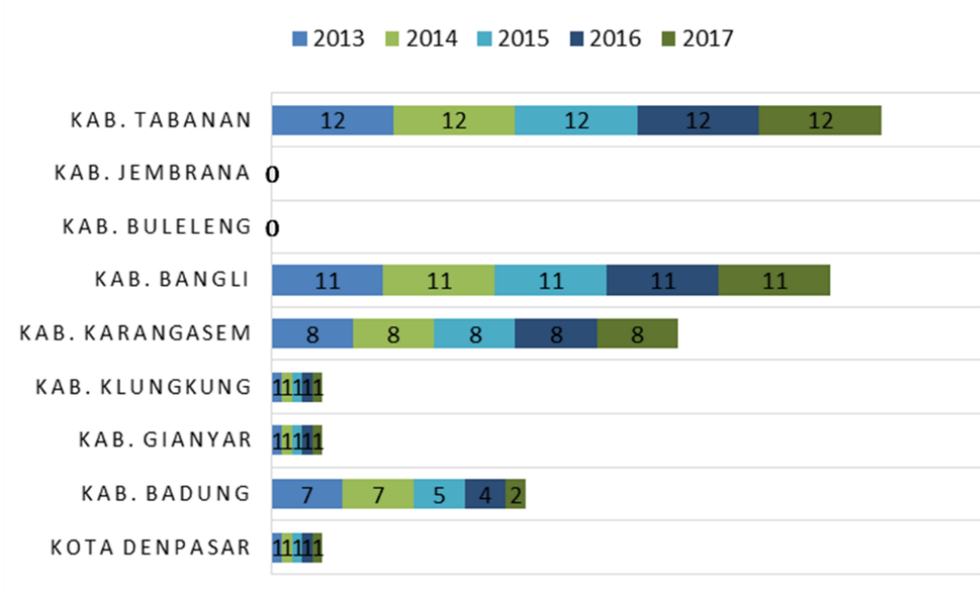

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.230 Jumlah Petugas Paramedik Tahun 2013-2017

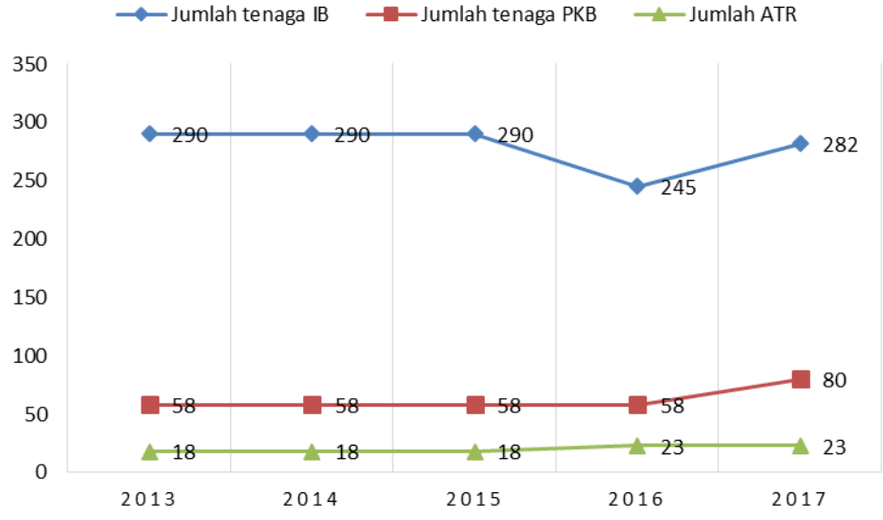

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.231 Jumlah Tenaga IB, PKB, dan ATR tahun 2013-2017

2.5.3.3.8 Situasi Harga dan Hasil Ternak

Harga hasil peternakan sangat bervariasi setiap tahunnya. Harga hasil peternakan dengan jelas dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 2.92 Pasar Hasil Peternakan Tahun 2013-2017

No	Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
I	TERNAK						
1	Sapi Potong Berat 375-400 kg	Kg/Berat/Hidup	35,590	39,000	37,500	43,000	43,000
2	Sapi Bibit Jantan Umur 2 Th	ekor	6,893,750	7,000,000	10,000,000	10,000,000	11,000,000
3	Sapi Bibit Betina Umur 2Th	ekor	5,606,250	5,500,000	6,000,000	6,500,000	8,500,000
4	Kerbau Umur 7 Bln	ekor	4,500,000	-	-	-	-
5	Kambing PE Berat 40 kg	ekor	1,980,000	2,000,000	2,000,000	-	-
6	Kambing PE Bibit Umur 4-5 Bln	ekor	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-
7	Kambing Kacang Umur 6 Bln	ekor	638,800	900,000	-	-	-
8	Babi Potong Berat 100 Kg	Kg/Berat/Hidup	20,800	32,000	24,000	24,000	24,500
9	Babi Landrace Bibit Berat 12 Kg	Kg/Berat/Hidup	37,140	70,000	55,000	65,000	60,000
10	DOC Layer	ekor	5,580	5,100	5,500	5,500	5,150
11	DOC Broiler	ekor	5,590	2,500	4,000	5,000	5,000
12	DOD	ekor	4,200	5,000	5,000	5,500	5,500
13	Broiler Kg/BH	Kg/Berat/Hidup	19,020	18,000	19,400	20,000	22,000
14	Ayam Buras	ekor	48,000	60,000	60,000	50,000	55,000
15	Itik Bali Dewasa	ekor	56,000	70,000	70,000	50,000	55,000
16	Entog Betina	ekor	75,700	90,000	90,000	90,000	100,000
17	Entog Jantan	ekor	107,400	110,000	110,000	110,000	110,000
II	HASIL TERNAK						
1	Daging Ayam Broiler	Kg	29,020	28,000	31,100	33,000	33,500
2	Daging Ayam Buras	Kg	47,200	50,000	65,000	65,000	60,000
3	Daging Sapi kwalitas I	Kg	83,100	90,000	90,000	95,000	100,000
4	Daging Kambing	Kg	74,800	125,000	125,000	125,000	115,000
5	Daging Babi kwalitas I	Kg	43,550	60,000	60,000	60,000	55,000
6	Telur Ayam Ras	Butir	1,230	1,200	1,300	1,350	1,250
7	Telur Ayam Buras	Butir	1,610	2,000	1,600	1,650	1,500
8	Telur Itik	Butir	1,950	2,000	2,000	2,500	2,000

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.4 Kehutanan

2.5.3.4.1 Luas Kawasan Hutan

Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Bali tersebar pada 22 (dua puluh dua) Register Tanah Kehutanan (RTK), untuk kawasan hutan terluas di Bali adalah Kawasan Hutan Bali Barat yang meliputi Kabupaten Buleleng dan Jembrana yaitu 62,00% dari luas kawasan hutan secara keseluruhan. Beberapa kawasan hutan yang luasnya di atas seribu hektar yaitu Gunung Batukaru, Gunung Abang, Gunung Agung, Penulisan Kintamani, Yeh Leh-Yeh Lebah, Gunung Batur Bukit Payang, Prapat Benoa, Gunung Mungsu dan Gunung Seraya.

Tabel 2.93 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali

no	kabupaten	fungsi hutan							jumlah
		hutan lindung	hutan produksi terbatas	hutan produksi tetap	Hutan Konservasi				
					cagar alam	taman nasional	taman wisata alam	taman hutan raya	
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	jembrana	32.974,97	2.610,20	383,1		6.188,00			42.156,67
2	buleleng	31.936,32	3.207,95	1.524,00	1.004,40	12.814,89	948,65		51.436,21
3	tabanan	8.668,24			758,4		542,51		9.969,15
4	badung	1.126,90					13,97	639	1.779,87
5	denpasar							734,5	734,50
6	gianyar								
7	bangi	6.239,01	453				2.649,27		9.341,28
8	klungkung	804,50	244						1.048,50
9	karangasem	14.016,12	204,11						14.220,23
	jumlah	**95.766,06**	**6.719,26**	**1.907,10**	**1.762,80**	**19.002,89**	**4.154,40**	**1.373,50**	**130.686,01**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.4.2 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis

Jumlah lahan kritis cenderung mengalami penurunan mulai dari 44.669,78 ha pada tahun 2013 menjadi 40.568,35 ha pada tahun 2017. Lahan yang telah berhasil direhabilitasi yaitu sebesar 1,6 persen pada tahun 2013, 2,72 persen pada tahun 2014, 2,63 persen pada tahun 2015, 2,57 persen pada tahun 2016, dan 1,48 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.94 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis di provinsi Bali Tahun 2013-2017

LUAS REHABILITASI HUTAN PROVINSI BALI	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas (Ha)	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.528,22
Luas hutan (dalam dan luar kawasan)	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.528,22
Luas lahan kritis	44.669,78	43.956,35	42.762,35	41.638,35	39.623,03
Lahan yang direhabilitasi	713,43	1.194,00	1.124,00	1.070,00	1.646,75
% Lahan yang direhabilitasi	1,6	2.72	2,63	2,57	1,48
Jumlah Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Bali	713,43	1.194,00	1.124,00	1.070,00	1.646,75

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.4.3 Kerusakan Kawasan Hutan

Pencurian pohon di Provinsi Bali mengalami penurunan, mulai dari 27,25 M^3 pada tahun 2013 menjadi 4,75 M^3 pada tahun 2016. Total luas kerusakan hutan mengalami peningkatan dari 159,5 ha pada tahun 2013 menjadi 696 ha pada tahun 2014. Namun, mulai mengalami penurunan sampai dengan 92 ha pada tahun 2017.

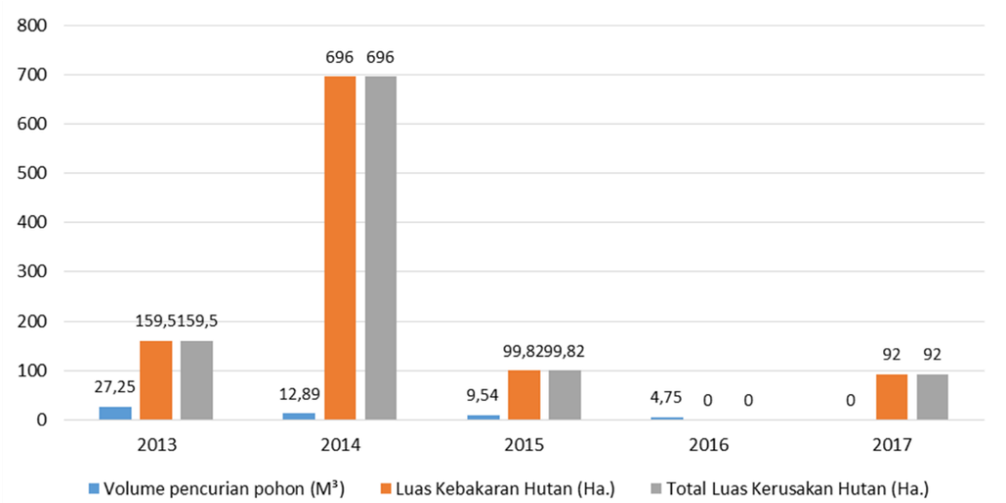

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.232 Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.3.5 Energi Sumber daya Mineral

2.5.3.5.1 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 389,6 juta rupiah, meningkat menjadi 403,349 juta rupiah pada tahun 2014. Namun, mengalami penurunan menjadi 376,832 juta rupiah pada tahun 2015 dan perlahan mulai meningkat kembali menjadi 378,382 juta rupiah pada tahun 2017. Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 13,01 persen pada tahun 2016.

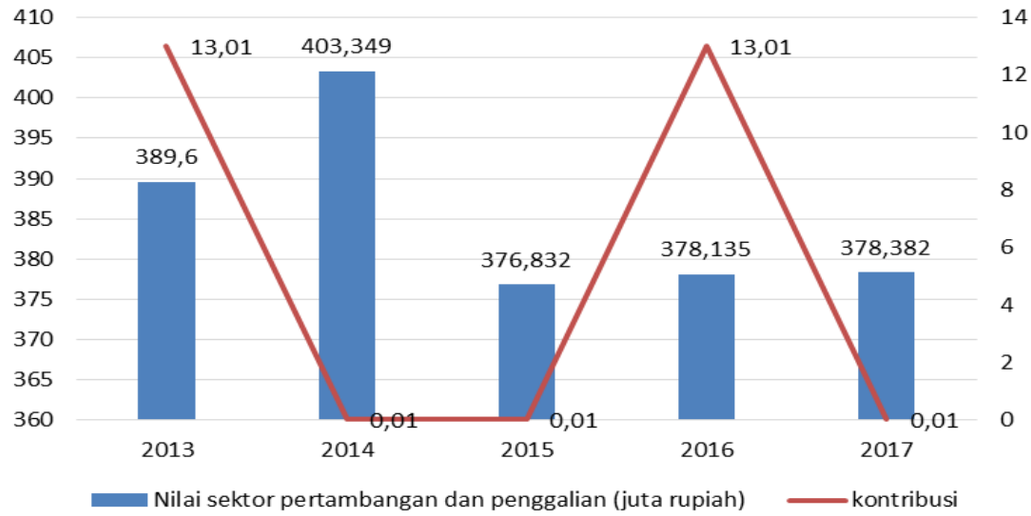

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.233 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Tahun 2013-2017

2.5.3.5.2 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik cenderung meningkat dari 99,41 persen pada tahun 2013 menjadi 99,85 persen pada tahun 2017.

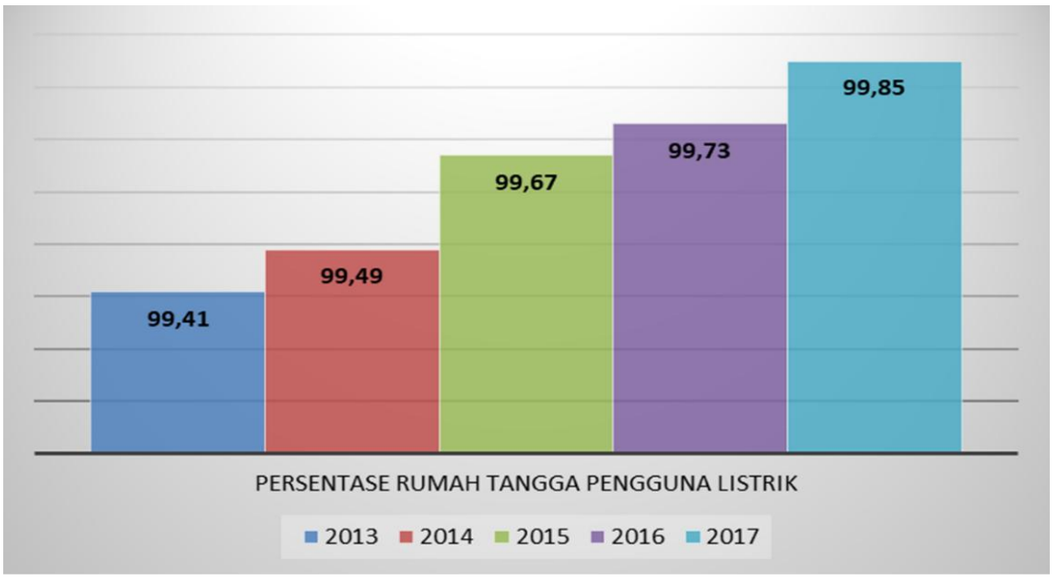

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.234 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2017

2.5.3.5.3 Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Persentase pertambangan liar yang telah ditertibkan menunjukkan peningktan dari 45 persen pada tahun 2013 menjadi 70 persen pada tahun 2017.

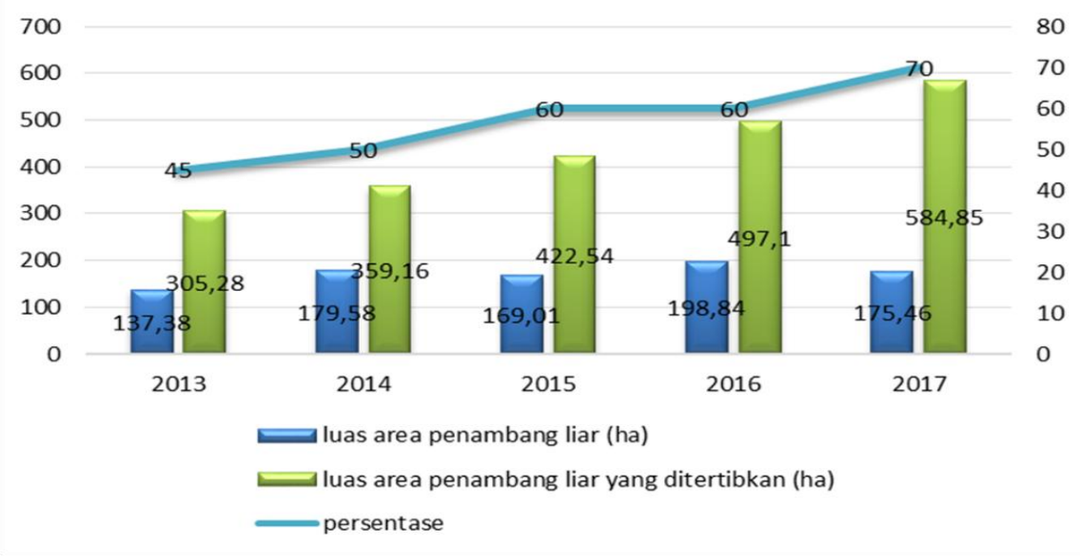

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.235 Persentase Penambangan Liar Tahun 2013-2017

2.5.3.6 Perdagangan

2.5.3.6.1 Nilai Perdagangan

Nilai sektor perdaganagn ADHB menunjukkan peningkatan dari 11.173464,30 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 16.209.453,20 juta rupiah pada tahun 2016. Sektor perdagangan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 8,31 persen pada tahun 2013 dan mengalami penurunan menjadi 8,27 persen pada tahun 2014. Kontribusi sektor perdagangan kembali meningkat menjadi 8,31 persen pada tahun 2015, namun kembali mengalami penurunan menjadi 8,3 pada tahun 2016.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.236 Nilai Perdagangan Tahun 2013-2016

2.5.3.6.2 Nilai Ekspor

Nilai ekspor berfluktuatif selama kurun waktu 2013 sampai 2018, sebesar 486.063.655,35 USD; 503.826.213,14 USD; 481.402.783,80 USD; 574.276.900,25 USD; 679.594.478,52 USD; dan 839.440.122,90 USD.

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.237 Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi Bali Tahun 2013-2018

2.5.3.6.3 Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri

Jumlah ijin usaha perdagangan luar negeri berfluktuatif selama kurun waktu 2013 sampai 2017, yaitu 89; 36; 21; 202; dan 118.

Tabel 2.95 Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri	89	36	21	202	118

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.6.4 Kinerja Perlindungan Konsumen

Jumlah kabuptaen/kota yang memiliki badan penyelesaian sengketa konsumen meningkat dari 1 pada tahun 2013 menjadi 3 pada tahun 2016. Selama kurun waktu 2013 sampai 2017 jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebanyak 1. Selama lima tahun terakhir, penyelesaian

sengketa konsumen melalui sistem pengawasan perlindungan konsumen telah mencapai 100 persen.

Tabel 2.96 Kinerja Perlindungan Konsumen Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
jumlah kab/kota memiliki badan penyelesaian sengketa konsumen/BPSK kab/kota	1	2	2	3	
Jumlah kab/kota memiliki lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat/LPKSM kab/kota	1	1	1	1	1
persentase penyelesaian sengketa konsumen melali sistem pengawasan perlindungan konsumen (%)	100%	100%	100%	100%	100%
jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) (jenis)	4	6	8	12	14
persentase penyidikan terhadap hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidik (%)	0	0	0	0	0
persentase SPBU yang telah dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan	100%	100%	100%	100%	

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.6.5 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat

Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat Provinsi Bali pada tahun 2015 sebanyak 36 Pasar(4.85%) dari jumlah pasar sebanyak 371 Pasar Rakyat dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 9.7% , Tahun 2017 pasar yang dibina 12.4% dan tahun 2018 pasar yang dibina sebanyak 56 pasar (15,09%).

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.238 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat Tahun 2015-2018

2.5.3.7 Perindustrian

2.5.3.7.1 Nilai Perindustrian

Nilai sektor perindustrian ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) mengalami peningkatan dari 8.656.357,70 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 12.423.278,90 juta rupiah pada tahun 2016. Sektor perindustrian berkontribusi sebesar 6,36 persen pada tahun 2017 terhadap pembentukan PDRB.kontribusi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 6,52 persen.

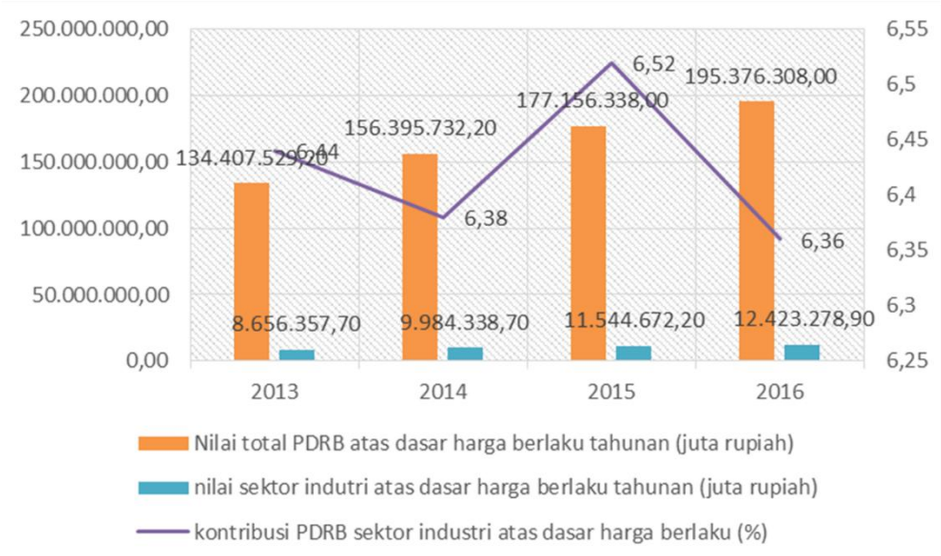

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.239 Nilai Perindustrian Tahun 2013-2016

2.5.3.7.2 Jumlah Industri

Jumlah industri kecil dan menengah mengalami peningkatan dari 11.905 unit usaha pada tahun 2013 menjadi 14.992 unit usaha pada tahun 2017. Pertumbuhan industri kecil dan menengah mencapai 17,77% persen pada tahun 2017.

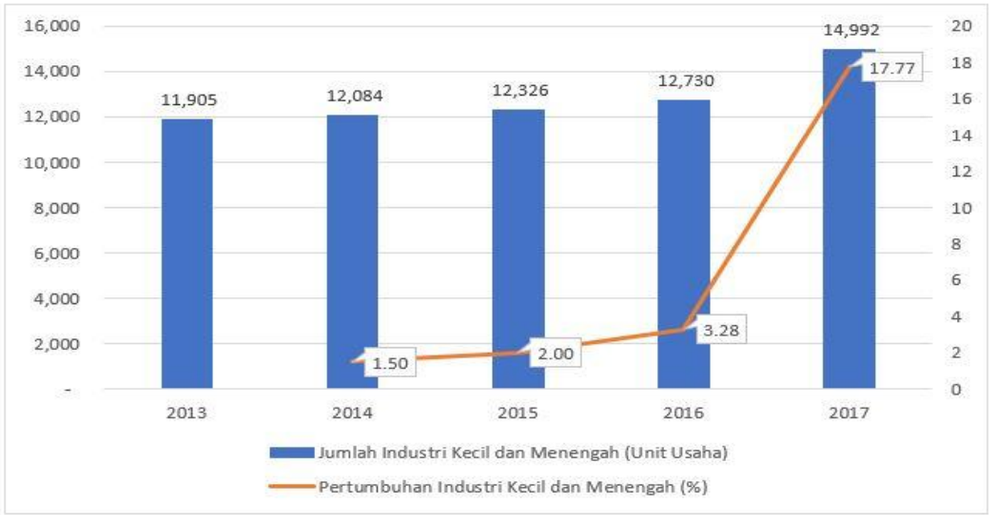

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.257 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2013-2017

2.5.3.7.3 Cakupan Bina Perajin

Cakupan bina Perajin pada tahun 2013 sebesar 3,99 persen dan mengalami penurunan menjadi 3,93 persen pada tahun 2014. Namun, kembali meningkat menjadi 4.62 persen pada tahun 2015, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 3,53 persen pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 3 persen, dan pada tahun 2018 cakupan bina perajin meningkat menjadi 3,35 persen.

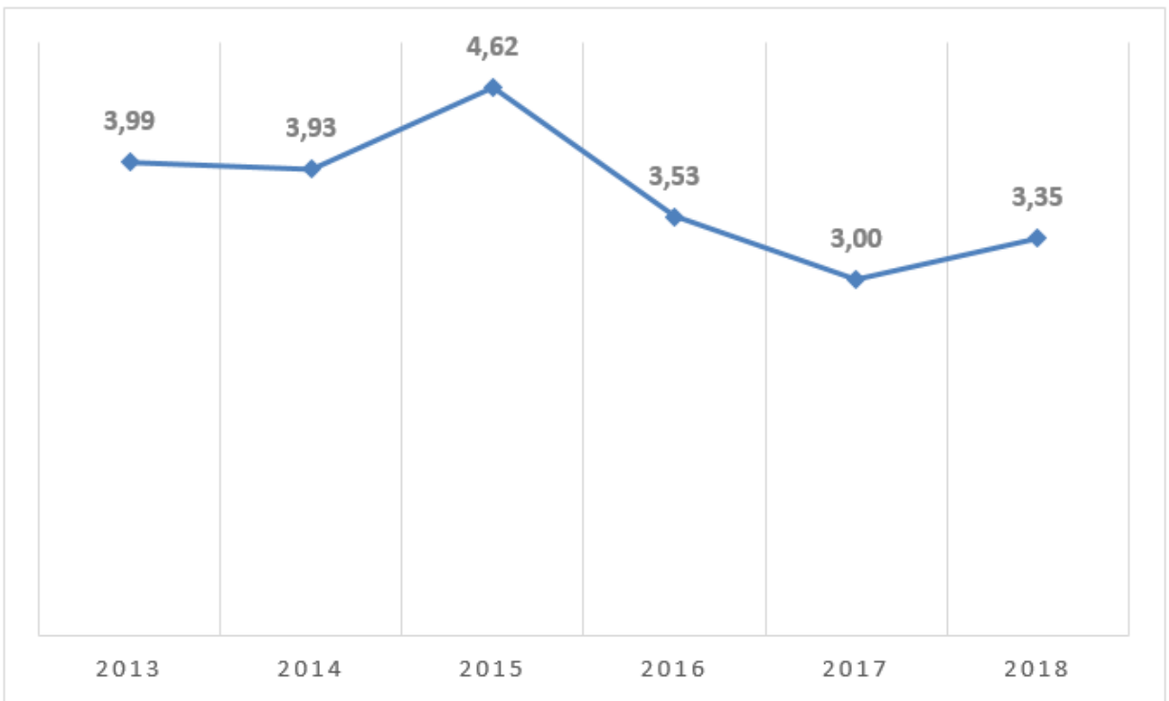

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.258 Cakupan Bina Perajin Tahun 2013-2018

2.5.3.8 Transmigrasi

2.5.3.8.1 Capaian Pengiriman Transmigrasi

Jumlah KK transmigrasi pada tahun 2013 sebanyak 74 KK, jumlah tersebut telah melebihi kuota pusat yaitu sebesar 50 KK. Tahun 2014, jumlah transmigrasi dan kuota yang ditetapkan sama yaitu 10 KK. Sebanyak 20 KK transmigrasi pada tahun 2015, angka tersebut telah melebihi kuota yang ditetapkan. Pada tahun 2016, jumlah transmigrasi dan kuota yang ditetapkan sama yaitu 43 KK, namun pada tahun 2017 jumlah transmigrasi di bawah kuota yang ditetapkan.

Tabel 2.97 Capaian Pengiriman Transmigrasi Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kuota/Target Pusat (KK)	50 KK	10 KK	10 KK	43 KK	25 KK
Jumlah KK	74 = 285	10 = 44	20 = 64	43 = 148	17 = 68

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.8.2 Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU)

Jumlah calon transmigrasi yang mendapat PDU berfluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2017, yaitu 74 KK, 10 KK, 20 KK, 43 KK, dan 17 KK.

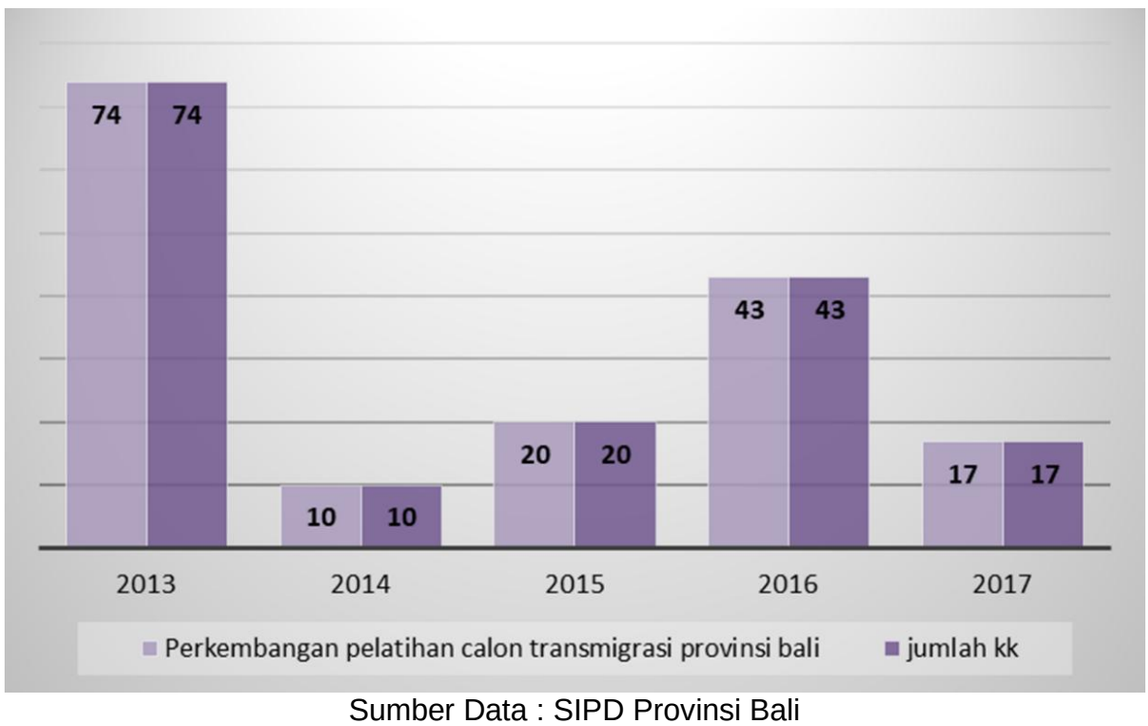

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.240 Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU) Tahun 2013-2017

2.5.3.9 Kelautan dan Perikanan

2.5.3.9.1 Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 118.241,05 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 160.378,60 ton. Jumlah produksi kelautan dan perikan pada tahun 2013 sebesar 263.970,45 ton dan mengalami penurunan menjadi 220.706,45 ton pada tahun 2014. Namun, mengalami peningkatan sampai dengan 229.403,58 ton pada tahun 2016 dan kembali menurun menjadi 113.734,46 ton pada tahun 2017

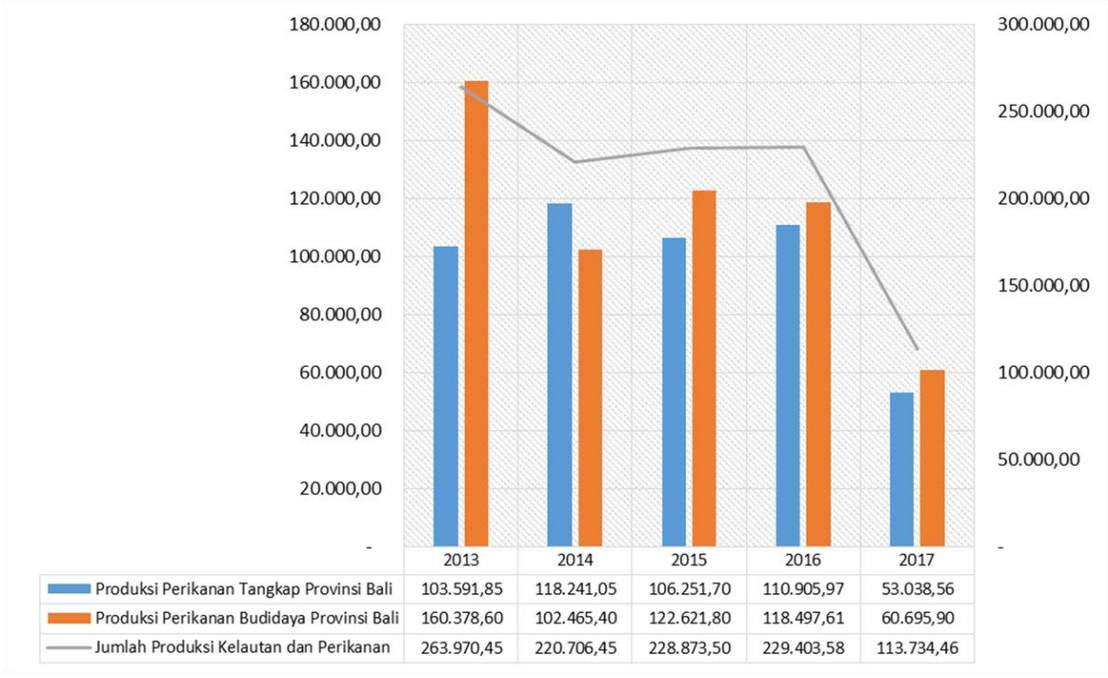

	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Bali	103.591,85	118.241,05	106.251,70	110.905,97	53.038,56
Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Bali	160.378,60	102.465,40	122.621,80	118.497,61	60.695,90
Jumlah Produksi Kelautan dan Perikanan	263.970,45	220.706,45	228.873,50	229.403,58	113.734,46

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.241 Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.3.9.2 Konsumsi ikan

Tingkat konsumsi ikan terus mengalami peningkatan dari 30,61 ton per kapita pada tahun 2013 menjadi 33,52 ton per kapita pada tahun 2017

Tabel 2.98 Konsumsi Ikan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	30,61	31,17	32,20	32,38	33,52

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.9.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 70 pada tahun 2015 menjadi 90 pada tahun 2017

Tabel 2.99 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	50	60	70	80	90

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.9.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 104,60 pada tahun 2015 menjadi 105,19 pada tahun 2017.

Tabel 2.100 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	84,7	106,21	104,60	102,70	105,19

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.9.5 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman setiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi masih pada batas penangkapan tidak melebihi potensi lesatri sehingga potensi perikan laut masih dalam batasan biologis yang aman.

Tabel 2.101 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada dalam batasan biologis yang aman	TAHUN					SATUAN
	2013	2014	2015	2016	2017	%
	69,42	79,38	72,14	75,30	75,78	

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.3.9.6 Nilai Tukar Nelayan

Rata-rata nilai tukar nelayan dan pembudidayaan ikan berfluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2017

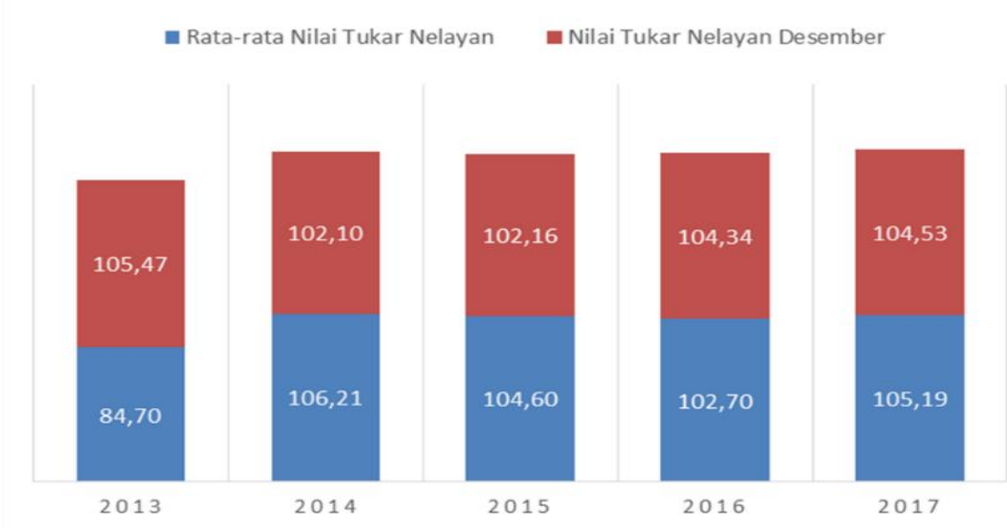

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.242 Nilai Tukar Nelayan

2.5.4 Penunjang Urusan

2.5.4.1 Perencanaan Pembangunan

2.5.4.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi PERDA. Dokumen perencanaan yang dimaksud, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

2.5.4.1.2 Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dokumen perencanaan terkait dengan tata ruang dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang RTRWP Bali 2009-2029, didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan karena itu sekurang kurangnya harus memuat:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi system perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;

c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;

d. Penetapan kawasan strategis provinsi;

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

2.5.4.1.3 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD pada tahun 2015 mencapai 92,17 persen, pada tahun 2016 sebesar 84,64 persen, dan 98,58 persen pada tahun 2017.

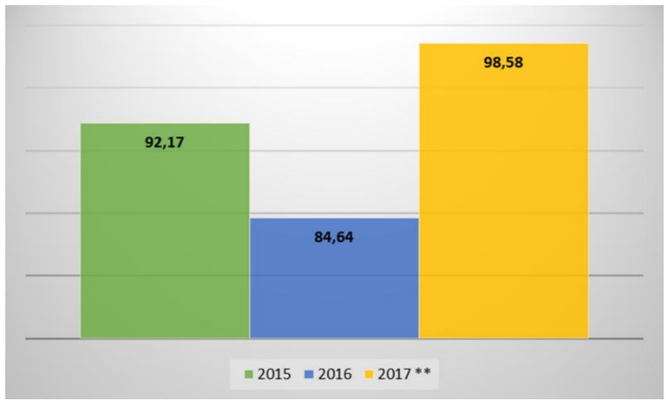

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.243 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2015-2017

2.5.4.1.4 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Tabel 2.102 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017 **
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Diambil dari LKjlF	90%	93%	95%	96%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.1.5 Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW telah mencapai 100 persen selama kurun waktu 2013 sampai 2017.

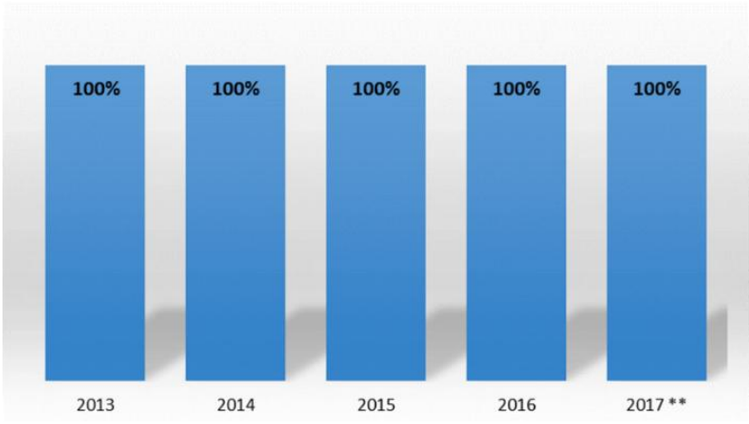

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.244 Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW Tahun 2013-2017.

2.5.4.2 Keuangan

2.5.4.2.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Bali semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Berikut disampaikan capaian opini BPK dari tahun 2013-2017.

Tabel 2. 103 Opini BPK Tahun 2013-2017

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP.DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Capain Opini WTP selama 4 kali berturut-turut bukan tanpa kekurangan, masih ada permasalahan yang masih menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Bali konsen dalam mengurangi jumlah temuan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksanaan tersebut. Opini WTP merupakan wujud dari kinerja dan komitmen kita terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik. Oleh karena itu, komitmen dan semangat untuk terus menunjukkan kinerja yang positif tersebut harus terus dipupuk agar pencapaian ini tetap dapat dipertahankan.

2.5.4.2.2 Persentase SiLPA

Realisasi SiLPA dapat disebabkan karena pelampauan target pendapatan, tidak tercapainya target realisasi belanja, serta sisa anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Meskipun realisasi pembiayaan menunjukkan hasil positif, namun sejak tahun 2014 persentase SiLPA Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan penurunan realisasi mencapai 6.73% di tahun 2017 dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 11,81%. Kecenderungan penurunan realisasi SiLPA tersebut disebabkan karena berkurangnya realisasi pendapatan Provinsi Bali sebagai dampak dari penataan organisasi dan penataan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menurunnya realisasi penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

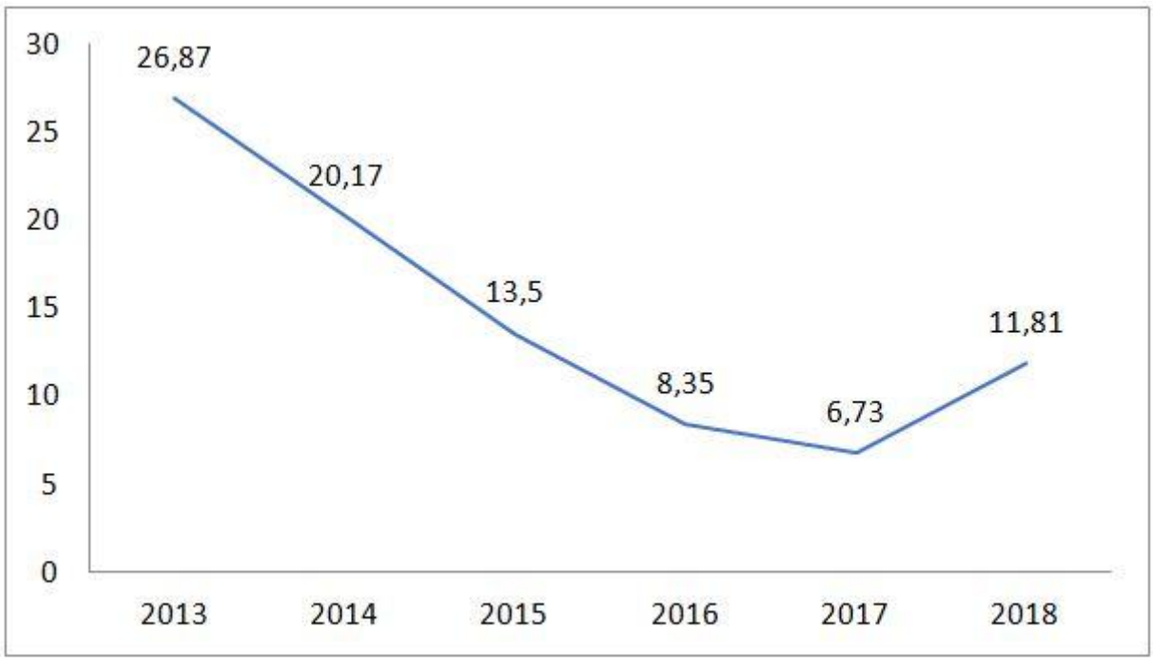

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.245 Persentase SiLPA Tahun 2013-2018

2.5.4.2.3 Persentase SILPA Terhadap APBD

Adanya SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tidak sepenuhnya merupakan dana menganggur (idle) mengingat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan atau untuk pengeluaran pembiayaan, investasi atau dana cadangan pada tahun berjalan. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Berikut disampaikan persentase SiLPA terhadap APBD tahun 2013-2018.

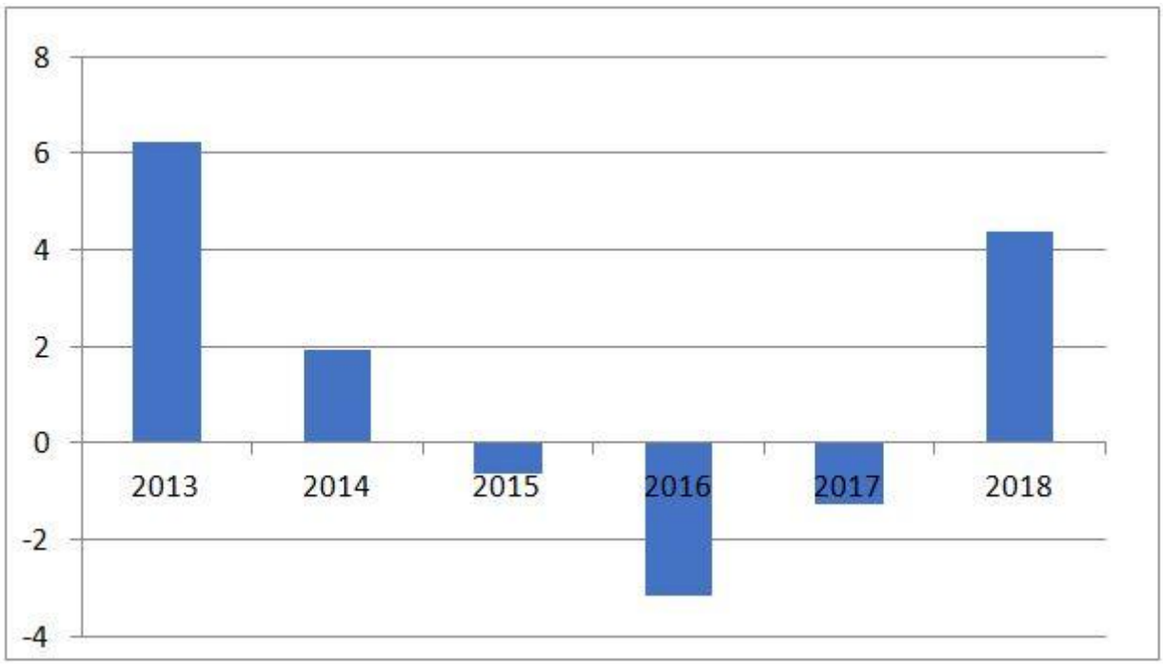

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.265 Persentase SILPA Tahun 2013-2018

Berdasarkan perhitungan persentase SiLPA terhadap APBD, pada tahun 2013-2014 menunjukkan persentase yang positif, dengan tren penurunan. Namun pada tahun 2015-2017, persentase SiLPA menunjukkan persentase negatif. Namun persentase negatif tersebut masih mampu ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. Pada tahun 2018 SiLPA kembali menunjukan persentase yang positif hingga sebesar 4.37%.

2.5.4.2.4 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Provinsi Bali dan DPA SKPD seluruhnya telah dilaksanakan setiap tahunnya. Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Gubernur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bali Mandara. Pelaksanaan penatausahaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIPKD. Untuk pelaksanaan evaluasi capaian atas output dan outcome program dan kegiatan telah dilakukan monitoring dengan menggunakan aplikasi e-RKPD, Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) dan e-Sakip.

Tabel 2.104 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana
Tahun 2013-2018

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.2.5 Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Bab VII Pasal 81 Ayat (1) tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan grafik, sejak tahun 2013-2018 Pemerintah Provinsi Bali telah kosisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kuranganya sebesar 20% dari total anggaran belanja darah dalam APBD.

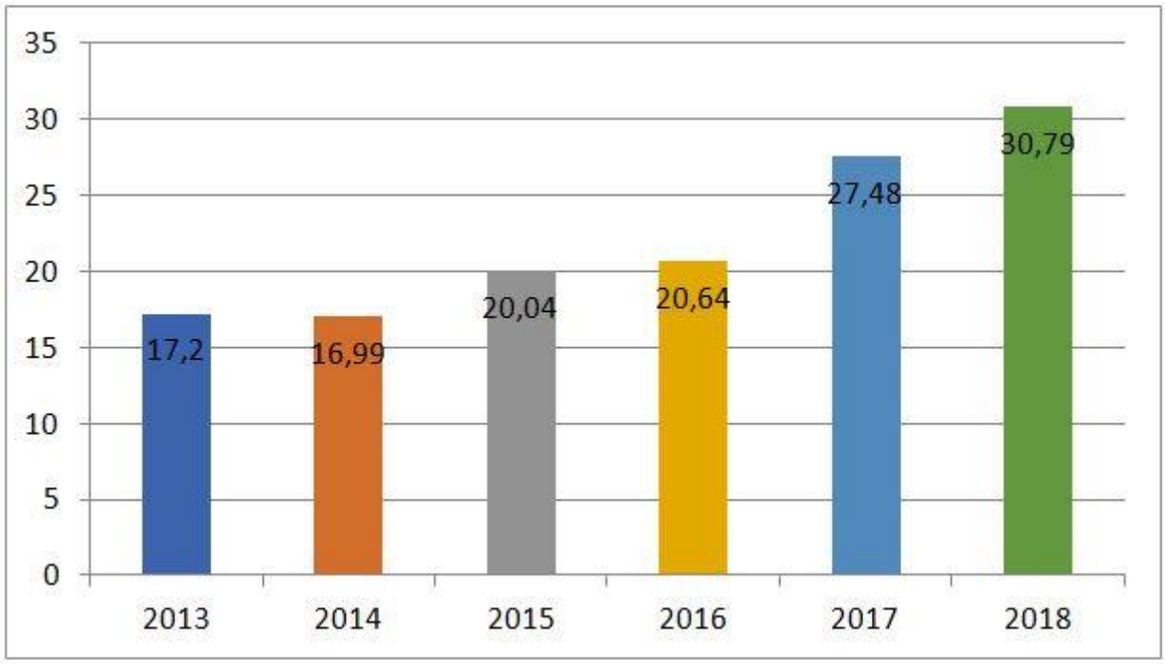

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.246 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2013-2018

2.5.4.2.6 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten dan berkesinambungan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kuranganya sebesar 10% dari total anggaran belanja daerah dalam APBD. Sesuai data pada grafik, sejak tahun 2013 – 2018 Pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan

belanja kesehatan diatas 10%. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

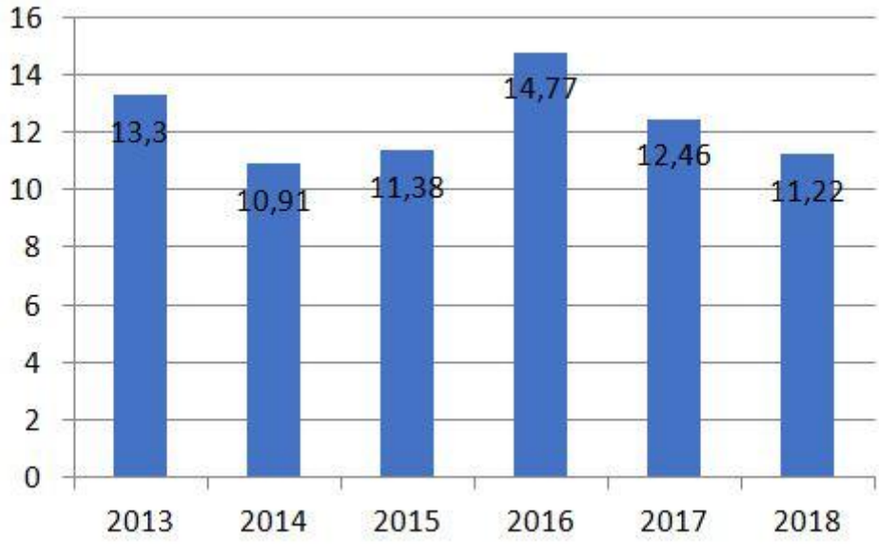

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.247 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2013-2018

2.5.4.2.7 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan tabel, proporsi Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung tidak mencerminkan belum berkualiltasnya APBD Provinsi Bali. Faktor paling penting adalah pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Tabel 2.105 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2018

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	45,77 : 63,50	31,78 : 68,21	30.58 : 69,41	29,38 : 70,61	25,51 : 64,42	25,05 : 74,71

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.2.8 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pemungutan pajak, retribusi raerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas sumber pendanaan tersebut. Kebijakan belanja bagi hasil pajak dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh kabupaten/kota di Bali. Berdasarkan tabel, sejak tahun 2013 persentase bagi hasil pajak kepada Kabupten/Kota dan Desa menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan dana bagi hasil pajak tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan ke masyarakat di wilayah masing-masing.

Tabel 2.106 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2013-2018

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN					
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	17,36%	20,26%	21,77%	18,93%	0,18%	19,87%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.2.9 Penetapan APBD

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Penyusunan APBD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) Penetepan prioritas dan plafon sementara anggaran (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (5) Penyusunan Rencana Perda APBD (6) Penetapan APBD. Penetapan APBD dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Sesuai tabel diatas, penetapan APBD selama periode 5 tahun dari tahun 2013-2018 telah sesuai ketentuan peraturan perundangan ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 2.107 Penetapan APBD

URUSAN/ JENIS DATA	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PenetapanAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	28/12/ 2012	27/12/ 2013	29/12/ 2014	11/12/ 2015	30/12/ 2016	
	No. 11 Tahun 2012	No. 60 Tahun 2013	No. 9 Tahun 2014	No. 11 Tahun 2015	No.12 Tahun 2016	
	4.316.449.110.647 ,76	4.489.667.042.279 ,90	4.989.465.099.189 ,07	5.704.727.109.732 ,32	6.654.312.296.707 ,50	

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali berubah nama menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (BPSDM Provinsi Bali) yang merupakan Badan Daerah Provinsi Bali dengan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan.

Program Prioritas pada BPSDM Provinsi terdiri dari 3 Program, yaitu Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.5.4.3.1 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.108 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

URUSAN/JENIS DATA	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20	20	20	20	20

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa lama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbeda-beda berdasarkan jenis diklat yang dilaksanakan. Bagi Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis dilaksanakan antara 11 hari sampai dengan 15 hari kerja. Bagi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan lamanya pelaksanaan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara mengenai pembelajaran dalam kelas (klasikal) dan pelaksanaan implementasi di perangkat daerah masing-masing (non klasikal) dengan rincian sebagai berikut, Diklat

Kepemimpinan Tingkat II dengan jumlah hari klasikal 27 hari dan non klasikal 74 hari, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan jumlah hari klasikal 31 hari dan non klasikal 67 hari**,** Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan jumlah hari klasikal 36 hari dan non klasikal 67 hari**,** Pelatihan Dasar CPNS Gol. I, II dan III dengan jumlah hari klasikal 33 hari dan non klasikal 80 hari**,** sedangkan bagi Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III dari Tenaga Honorer K1/K2 dengan jumlah hari klasikal 7 hari. Capaian tiap tahun seperti tabel diatas diperoleh dengan merata-ratakan jumlah hari pembelajaran dalam kelas (klasikal) sehingga di dapat 20 hari.

2.5.4.3.2 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat dari 60 persen pada tahun 2013 menjadi 80 persen pada tahun 2014. Namun, terus mengalami penurunan hingga mencapai 3 persen pada tahun 2017.

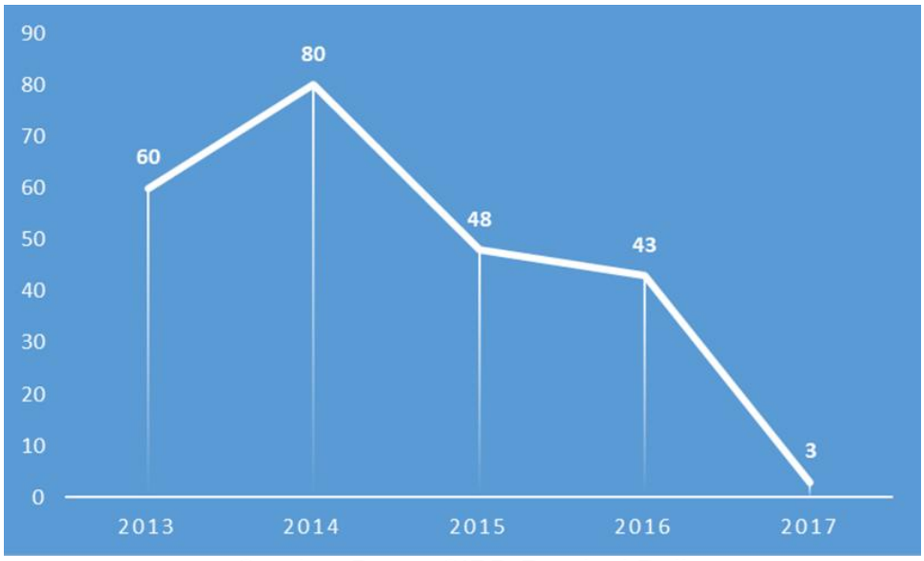

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.248 Pesentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.4.3.3 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.109 Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	11,71	10,07	36,95	15,88	18,32

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel diatas berdasarkan jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II dan III dibagi jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dimana jumlah peserta diklat tahun 2013 sebanyak 35 orang dari 299 orang jumlah pejabat struktural. Tahun 2014 jumlah peserta diklat sebanyak 30 orang dari 298 orang jumlah pejabat struktural. Tahun 2015 jumlah peserta diklat sebanyak 75 orang dari 203 orang jumlah pejabat struktural. Tahun 2016 jumlah peserta diklat sebanyak 47 orang dari 296 orang jumlah pejabat struktural. Sedangkan tahun 2017 jumlah peserta diklat sebanyak 59 orang dari 312 orang jumlah pejabat struktural. Data tertuang dalam gambar berikut ini :

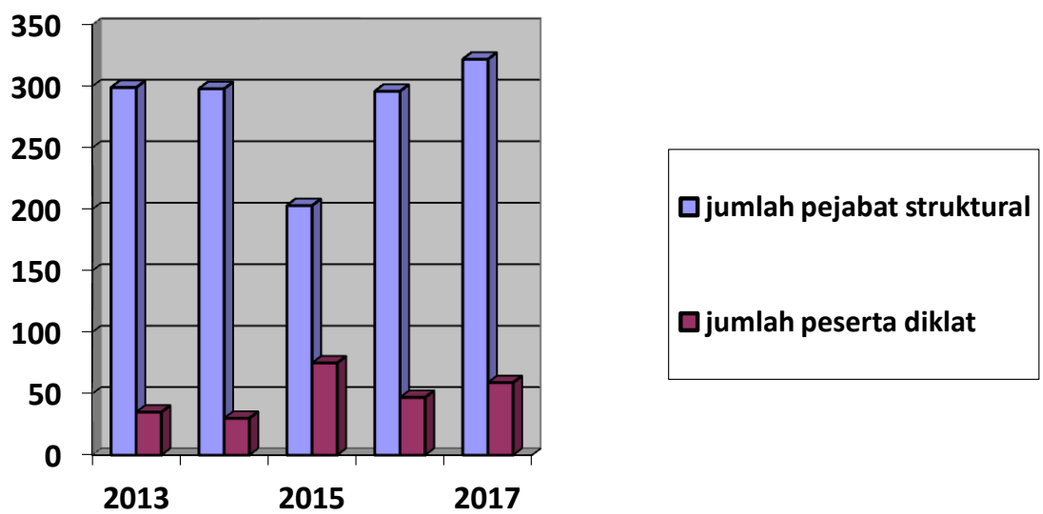

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.249 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.4.3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah meningkat dari 43 pada tahun 2013 menjadi 52 pada tahun 2017. Jumlah jabatan administrasi cenderung mengalami penurunan dari 256 pada tahun 2013 menjadi 247 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah jabatan administrasi meningkat menjadi 270. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu mengalami peningkatan dari 1.329 pada tahun 2013 menjadi 6.869 pada tahun 2017.

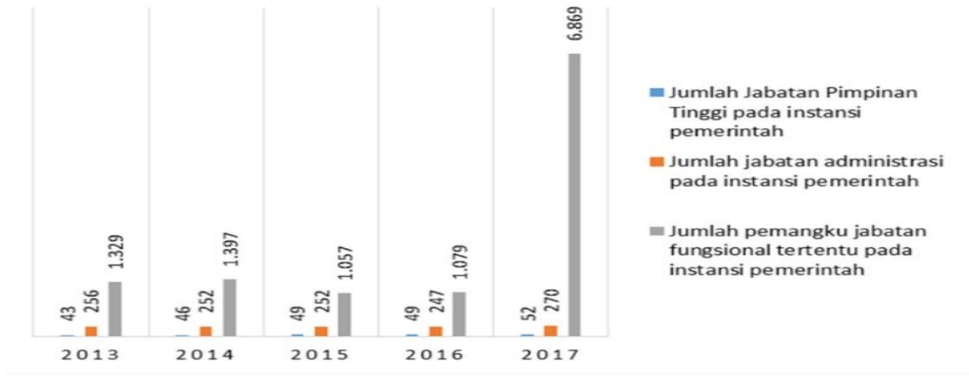

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.250 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.4.3.5 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah cenderung meningkat dari 13,6 persen pada tahun 2013 menjadi 14 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.110 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	14% 7/50

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.3.6 Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah cenderung meningkat dari 66,6 persen pada tahun 2013 menjadi 70 persen pada tahun 2017

Tabel 2.111 Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	66,6 % 6/9	66,6 % 6/8	66,6 % 6/8	66,6 % 6/8	70% 7/8

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.4 Pengawasan

2.5.4.4.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan di pengawasan Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan dari 51 pada tahun 2013 menjadi 16 pada tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan menjadi 27 pada tahun 2016 dan 45 pada tahun 2017.

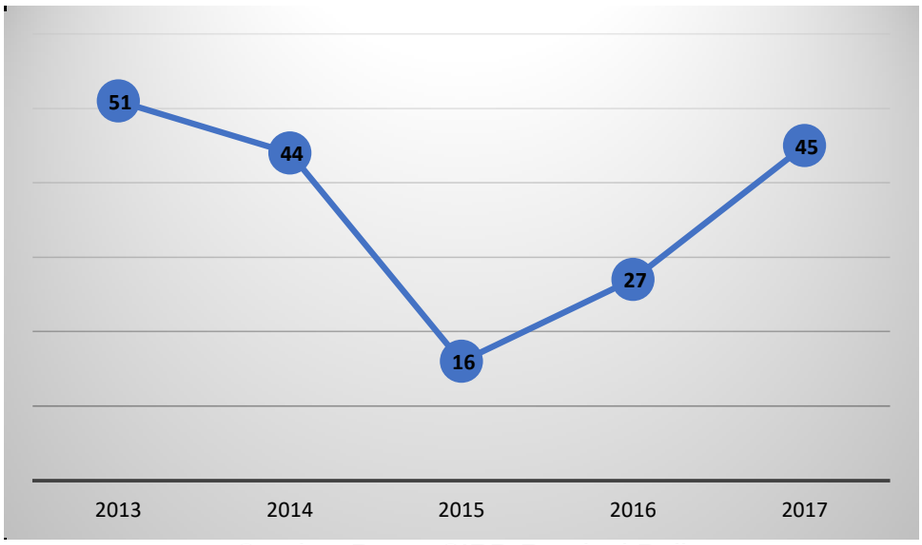

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.251 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.4.4.2 Persentase Pelanggaran Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali telah melaksanakan Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang mengacu pada ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari Tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 16 penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari :

1. Hukuman disiplin ringan : 2 (dua) surat keputusan yang merupakan hukuman disiplin teguran tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang : 5 (lima) surat keputusan yang terdiri dari :
    - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebanyak 3 surat keputusan.
    - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) surat keputusan.
3. Hukuman disiplin berat : 9 (sembilan) surat keputusan yang terdiri dari :
    - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebanyak 8 (delapan) surat keputusan.
    - Pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 1 (satu) surat keputusan.

Dari 16 penjatuhan hukuman disiplin tersebut, 31,25% (5 kasus) merupakan pelanggaran karena kasus tindak pidana korupsi, dan 68,75% (11 kasus) merupakan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan jam kerja. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 prosentase penjatuhan hukuman disiplin mengalami fluktuasi naik turun yang tidak jauh berbeda, dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan 25% (dari 4 kasus di tahun 2013 menjadi 3 kasus di tahun 2014), dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 33,33% (dari 3 kasus di tahun 2014 menjadi 4 kasus di tahun 2015), dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunuan sebesar 50% (dari 4 kasus di tahun 2015 menjadi 2 kasus di tahun 2016), dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 50% (dari 2 kasus di tahun 2016 menjadi 3 kasus di tahun 2017).

Dibandingkan dengan jumlah PNS per tahunnya bahwa prosentase penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 2013 sebesar 0.062% (4 kasus dari 6.448 jumlah PNS), tahun 2014 sebesar 0.048% (3 kasus dari 6.283 jumlah PNS), tahun 2015 sebesar 0.066% (4 kasus dari 6.023 PNS), tahun 2016 sebesar 0.033% (2 kasus dari 5.995 PNS), tahun 2017 sebesar 0.025% (3 kasus dari12.103 PNS).

Secara keseluruhan rata-rata penjatuhan hukuman disiplin PNS dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 0,047% dibandingkan dengan jumlah PNS.

Tabel 2.112 Persentase Pelanggaran Pegawai

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pelanggaran Pegawai	0.062%	0.048%	0.066%	0.033%	0.025%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.4.3 Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK mengalami penurunan selama kurun waktu 2013 sampai 2017 dari 58 temuan menjadi 10 temuan.

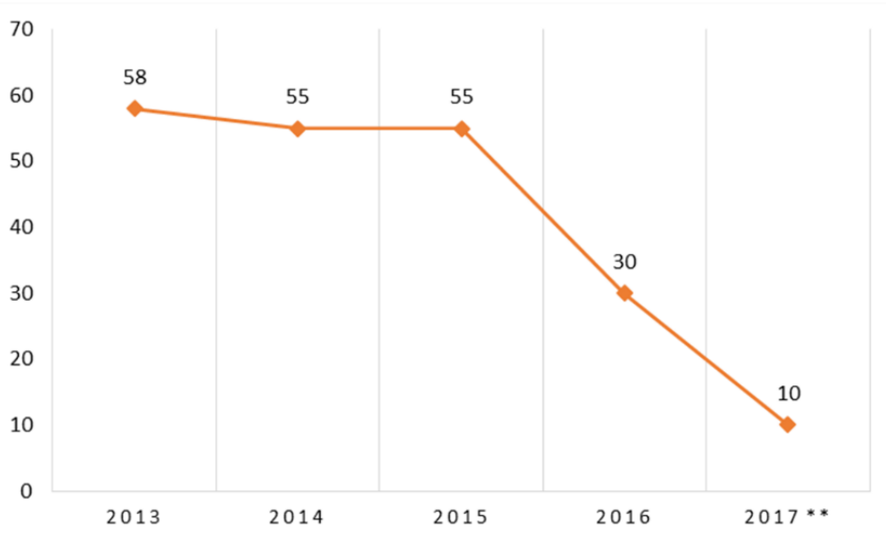

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.252 Jumlah Temuan BPK di provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.5.4.4.4 Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev

Jumlah LHP pemeriksaan regular, khusus dan kasus di Provinsi Bali sebesar 60 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 103 pada tahun 2015. Angka tersebut turun menjadi 50 pada tahun 2016. Jumlah rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selama tahun 2013 sampai 2017, yaitu 767; 728; 1553; dan 1153. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP sebesar 46 pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017. Sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 53. Jumlah laporan hasil review laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1 laporan pada tahun 2013 sampai 2017. Jumlah laporan hasil monev Inpres 5 Tahun 2004 pada tahun 2017 sebanya 1 laporan.

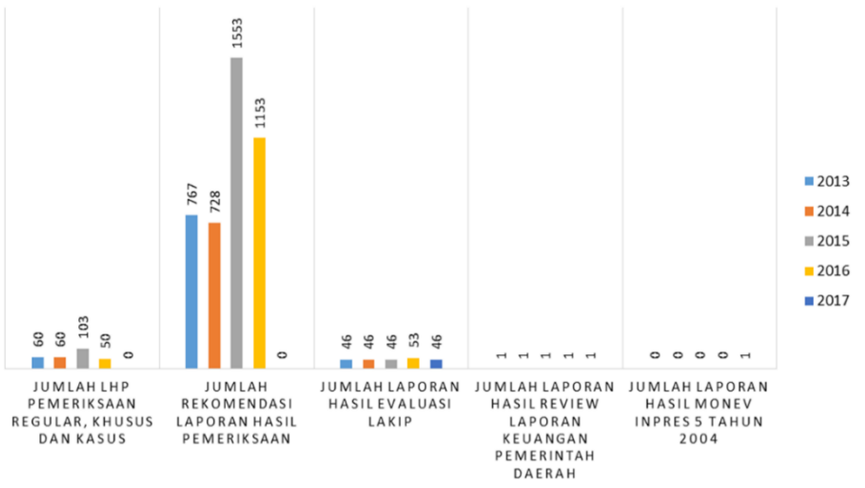

Sumber : Data SIPD Tahun 2017

Gambar 2.253 Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev Tahun 2013-2017

2.5.4.5 Sekretariat DPRD

2.5.4.5.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Tabel 2.113 Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rencana Kerja Tahunan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Data SIPD Tahun 2017

2.5.4.5.2 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tabel 2.114 Fungsi Pegawasan, Pembentukan dan Fungsi Anggaran

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Fungsi Pengawasan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Data SIPD Tahun 2017

2.5.4.5.3 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.115 Fungsi Pengawasan

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Fungsi Pengawasan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Data SIPD Tahun 2017

2.5.4.6 Bencana

2.5.4.6.1 Jumlah Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut dengan tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko terkena bencana. Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat. Pembentukan UPT. Pusdalops PB dibantu oleh Palang Merah Perancis (FRC) melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Palang Merah Perancis tanggal 25 Agustus 2008 sedangkan BPBD Provinsi Bali mulai diisi personil pada tanggal 18 Januari 2012. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali yang baru berdiri hanya memiliki sistem peringatan dini yang jumlahnya belum banyak sehingga dalam tabel dibawah tertuang banyak tahun jumlah sistem peringatan dini masih kosong. Berikut jumlah sistem peringatan dini yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali.

Tahun	Uraian	Banjir	Gunung Meletus	Longsor	Gempa	Tsunami	Lainnya
2013	Jumlah system elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A
	Jumlah peringatan dini tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2014	Jumlah system elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A
	Jumlah peringatan dini tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	Jumlah system elektronik	1	N/A	N/A	N/A	6	N/A
	Jumlah peringatan dini tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	Jumlah system elektronik	1	N/A	1	N/A	9	N/A
	Jumlah peringatan dini tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	Jumlah system elektronik	1	6	1	N/A	9	N/A
	Jumlah peringatan dini tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Data SIPD Tahun 2018

Gambar 2.254 Jumlah Sistem Peringatan Dini

2.5.4.6.2 Jumlah Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan suatu kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis. Sering kali terjadinya bencana di Provinsi Bali ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang karakteristik wilayah yang rawan terjadinya bencana. Berikut jumlah kawasan rawan bencana sesuai wilayah dan jenis bencana.

Tabel 2.116 Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali Tahun 201-2017

Tahun	Uraian	Kab. Jembrana	Kab. Tabanan	Kab. Badung	Kab. Gianyar	Kab. Klungkung	Kab. Bangli	Kab. Karangasem	Kab. Buleleng	Kot. Denpasar
2013	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A
	Longsor	5	10	4	4	5	4	8	9	N/A
	Gempa Bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
	Kebakaran	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A
2014	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A
	Longsor	5	10	4	4	5	4	8	9	N/A
	Gempa Bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
	Kebakaran	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A
2015	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A
	Longsor	5	10	4	4	5	4	8	9	N/A
	Gempa Bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
	Kebakaran	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A
2016	Banjir	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A
	Longsor	5	10	4	4	5	4	8	9	N/A
	Gempa Bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
	Kebakaran	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A
2017	Banjir	N/A	3	N/A	N/A	2		8	4	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1		N/A
	Longsor	5	10	4	4	5	4	8	9	N/A
	Gempa Bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	1	1	1	1	1		1	1	1
	Kebakaran	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A

Sumber : Data SIPD Tahun 2018

2.5.4.6.3 Jumlah Korban Bencana

Jumlah korban bencana dari semua jenis bencana yang sering terjadi di Bali sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kateristik wilayah masing-masing. Meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat juga penggunaan lahan di setiap wilayah di Provinsi Bali sehingga turut merupakan faktor penyebab terjadinya bencana dan timbulnya jumlah korban. Berikut tabel jumlah korban menurut jenis bencana dan Data tertanganinya bantuan pasca bencana.

Tabel 2.117 Jumlah Korban Bencana

Tahun	Uraian	Banjir	Gunung Meletus	Longsor	Gempa	Tsunami	Kebakaran
2013	Meninggal	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A
	Luka-Luka	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
2014	Meninggal	N/A	N/A	3	N/A	N/A	1
	Luka-Luka	N/A	N/A	4	N/A	N/A	21
2015	Meninggal	4	N/A	2	N/A	N/A	N/A
	Luka-Luka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	Meninggal	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
	Luka-Luka	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
2017	Meninggal	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A
	Luka-Luka	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A

Sumber : Data SIPD Tahun 2018

Tabel 2.118 Data Tertanganinya Bantuan Pasca Bencana (Semua Jenis Bencana) Tahun 2013-2016

Data tertanganinya bantuan pasca bencana	2013	2014	2015	2016
Korban Meninggal	55 orang	30 orang	32 orang	49 orang
Korban Luka Berat	32 orang	52 orang	25 orang	20 orang
Korban Luka Ringan	56 orang	51 orang	18 orang	85 orang

Sumber : Data SIPD Tahun 2018

2.5.4.6.4 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana

Jumlah pengungsi akibat bencana belum ada pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan jumlah pengungsi akibat bencana pada tahun 2017

Tabel 2.119 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pengungsi akibat bencana banjir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pengungsi akibat bencana gunung meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	43.358 Data sampai tanggal 29 November 2017
Jumlah pengungsi akibat bencana longsor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pengungsi akibat bencana gempa bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pengungsi akibat bencana tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pengungsi akibat bencana kebakaran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Data SIPD Tahun 2018

2.5.4.6.5 Jumlah Kerugian Akibat Bencana

Jumlah kerugian akibat bencana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sesuai dengan jenis bencana dari tahun 2013 sampai semester I tahun 2017 dan Data Kerusakan dan kerugian pasca bencana.

Tabel 2.120 Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Tahun 201-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kerugian akibat bencana banjir	N/A	Rp. 991.000.000	N/A	N/A	Rp. 775.000.000
Jumlah kerugian akibat bencana gunung meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah kerugian akibat bencana longsor	N/A	Rp. 809.500.000	Rp. 367.000.000	Rp. 887.000.000	Rp. 1.053.000.000
Jumlah kerugian akibat bencana gempa bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp. 15.000.000
Jumlah kerugian akibat bencana tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah kerugian akibat bencana kebakaran	2N/A	Rp. 713.500.000	Rp. 628.000.000	Rp. 1.208.737.000	Rp. 469.000.000
Jumlah kerugian akibat bencana lain-lain (bencana angin puting beliung dan hujan deras)	Rp. 1.986.500.000	Rp. 670.000.000	Rp. 1.401.500.000	Rp. 611.000.000	Rp. 665.000.000

	Data Kerusakan dan kerugian pasca bencana	2013	2014	2015	2016	2017
a.	Sarana prasarana Perekonomian	-	-	-	-	
b.	Rumah Masyarakat	65	185	170	169	
c.	Fasilitas Umum	51	53	76	67	

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.5.4.6.6 Jumlah Kejadian Bencana

Jumlah Kejadian Bencana yang merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan kerugian psikologis. Berikut tabel jumlah kejadian bencana sesuai jenis bencana.

Tabel 2.121 Jumlah Kejadian Bencana

	Data kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan informasi dan tanggap darurat :	2013	2014	2015	2016	2017
a.	Gempa Bumi	1	-	-	-	
b.	Tsunami	-	-	-	-	
c.	Kebakaran	335	500	597	345	
d.	Banjir	138	61	34	72	
e.	Tanah Longsor	245	191	87	176	
f.	Puting Beliung	92	26	67	39	
g.	Gunung Meletus	-	-	-	-	
h.	Kecelakaan	16	24	12	3	
i.	Pohon Tumbang	222	195	346	426	
j.	Bangunan Roboh	15	22	7	17	
k.	Kekeringan	15	1	38	3	
l.	Orang Hilang	8	3	15	5	
m.	Orang Tenggelam	15	3	8	12	
n.	Kapal Tenggelam	-	1	-	1	
o.	Penemuan Mayat	5	9	2	10	
p.	Pembunuhan	2	1	-	0	
q.	Konflik Sosial	1	0	1	0	
r.	Lain-lain	105	75	162	209	

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.122 Data Lainnya

	2013	2014	2015	2016	2017
Data Peningkatan Kapasitas Aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana					
Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	N/A	450 org.	450 org.	450 org.	450 org.
PRB kepada Aparatur, Akademis dan Tokoh Adat	25 org.	150 org.	200 org.	100 org.	N/A
Peningkatan kapasitas ESR	56 org	56 org	56 org	56 org	55 org.
Pelatihan Tim Reaksi Cepat	N/A	40 org.	16 org.	30 org.	N/A
Gladi Penanggulangan Bencana	N/A	2.200 org.	1.800 org.	1.400 org.	N/A
Data Dokumen Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					
Dokumen rencana terkait Penanggulangan Bencana	N/A	2 dokumen	2 dokumen + 20 buku	2 dokumen + 20 buku	N/A
Pembuatan dan Pemasangan Tanda/Rambu Rawan Bencana Kab/Kota se-Bali Catatan : ditambah dengan dana pusat (APBN) untuk 1.022 rambu evakuasi	3 peta	4 peta dan 27 rambu	3 peta dan 30 rambu	30 rambu	N/A
Peta evakuasi Tsunami	N/A	3 peta	3 peta	1 peta	N/A
Data Pembentukan Desa Tangguh Bencana					
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Catatan : ditambah dengan dana pusat (APBN) untuk 12 desa/kelurahan	N/A	1 desa	2 desa	1 desa	2 desa
Data Pembentukan Sekolah Aman Bencana					
Sekolah Aman Bencana Catatan : ditambah dengan dana pusat (APBN) untuk 1 sekolah Aman Bencana	N/A	N/A	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.6 Aspek Daya Saing

2.6.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita berfluktuasi selama kurun waktu 2013 sampai 2016, yaitu 994.069,88 tahun 2013, 1.097.749,27 tahun 2014, 1.045.144,90 tahun 2015, dan 1.099.561,31 tahun 2016.

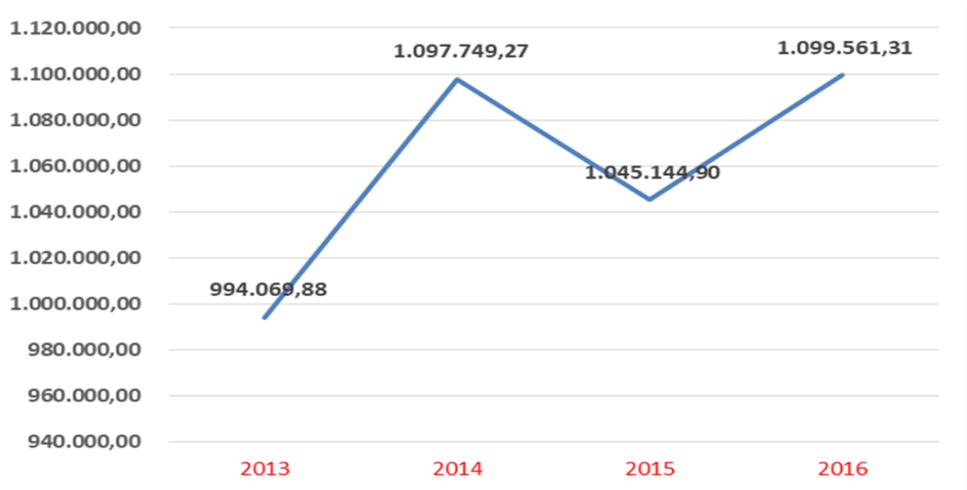

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.255 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2013-2016

2.6.2 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani cenderung mengalami penurunan dari 103,48 pada Januari 2017 menjadi 103,18 pada April 2018. Nilai tukar petani cenderung meningkat menjadi 103,70 pada Oktober 2018, namun mengalami penurunan mencapai 103,15 pada November 2018 dan pada Desember 2018 mengalami peningkatan menjadi 103,87.

Tabel 2.123 Nilai Tukar Petani

Bulan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	107,57	103,61	104,18	104,96	106,25	103,48
Februari	107,42	103,55	103,90	105,42	105,79	103,88
Maret	106,94	104,33	103,41	104,86	104,72	103,50
April	106,84	103,82	103,05	104,81	104,98	103,18
Mei	107,74	104,44	103,05	105,94	104,57	103,23
Juni	108,36	104,58	103,93	106,58	104,49	103,54
Juli	106,64	105,14	104,60	106,67	104,14	103,40
Agustus	106,66	105,21	104,25	106,66	103,94	103,54
September	106,82	106,02	104,54	107,44	104,45	103,28
Oktober	107,00	107,06	104,91	107,13	104,49	103,70
November	107,43	106,06	105,41	107,06	104,51	103,15
Desember	103,37	104,19	105,13	106,74	103,93	103,87

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.6.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran perkapita non makanan meningkat dari 571.880 pada tahun 2013 menjadi 639.026 pada tahun 2014. Namun, mengalami penurunan menjadi 623.568 pada tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 633.569. Pengeluaran perkapita makanan meningkat dari 422.190 pada tahun 2013 menjadi 458.723 pada tahun 2014. Namun, mengalami penurunan menjadi 421.577 pada tahun 2015. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 465.993 pada tahun 2016.

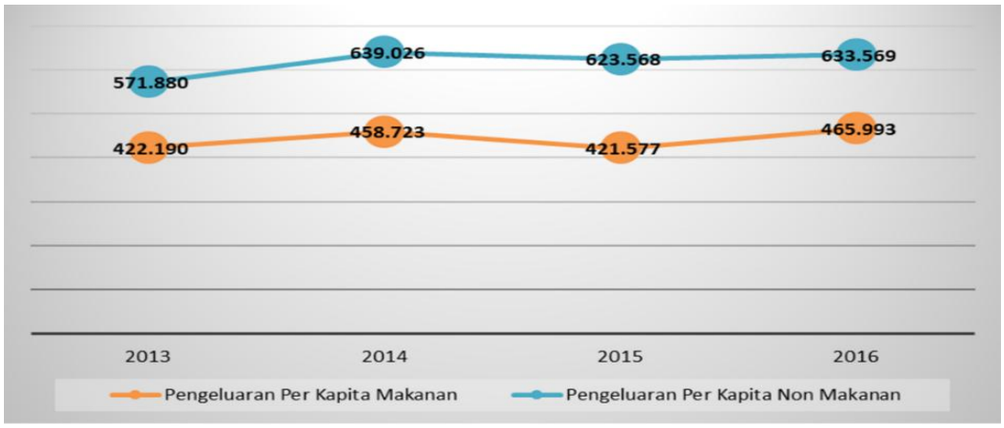

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.256 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2013-2016

2.6.4 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio ekspor impor terhadap PDRB pada tahun 2013 dan 2014 yaitu -0,13 persen dan -0,82 persen. Pada tahun 2015, ekspor impor terhadap PDRB sebesar 1,12 persen dan menurun menjadi 0,73 persen pada tahun 2016 dan 2017.

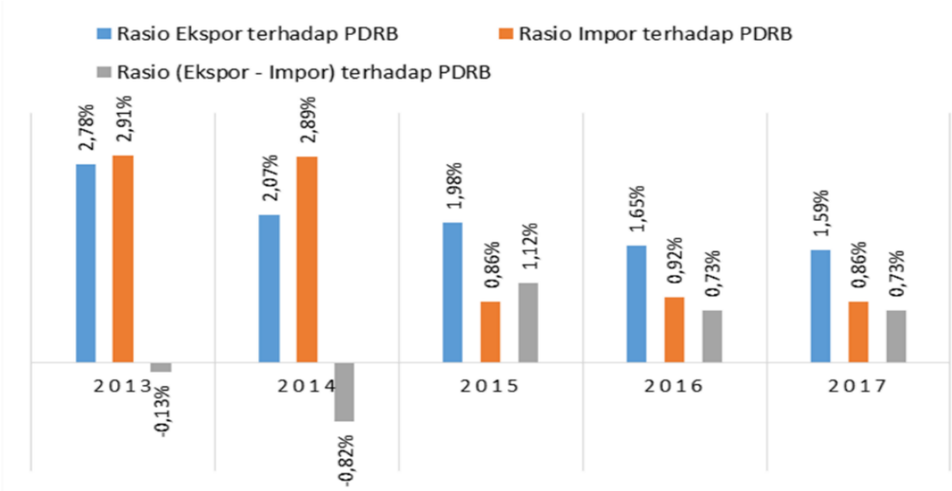

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.257 Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

2.6.5 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum cenderung meningkat dari 94,29 persen pada tahun 2013 menjadi 109,14 persen pada tahun 2016. Namun mengalami penurunan menjadi 104,74 persen pada tahun 2017.

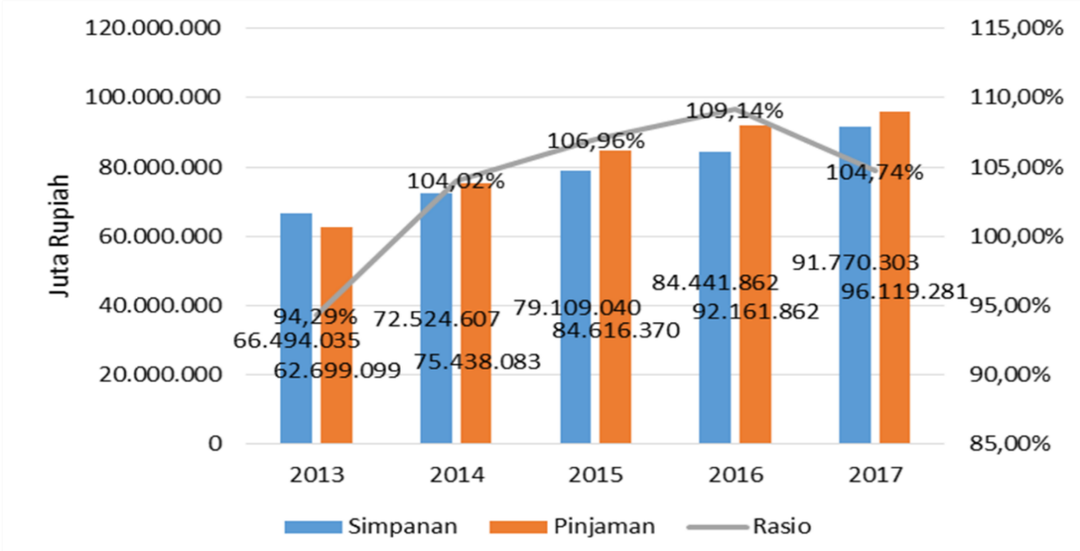

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.258 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Tahun 2013-2017

2.6.6 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR

Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR tahun 2013 sebesar 121,55 persen dan meningkat menjadi 132,38 persen pada tahun 2014. Rasio tersebut cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2017 menjadi 99,80 persen.

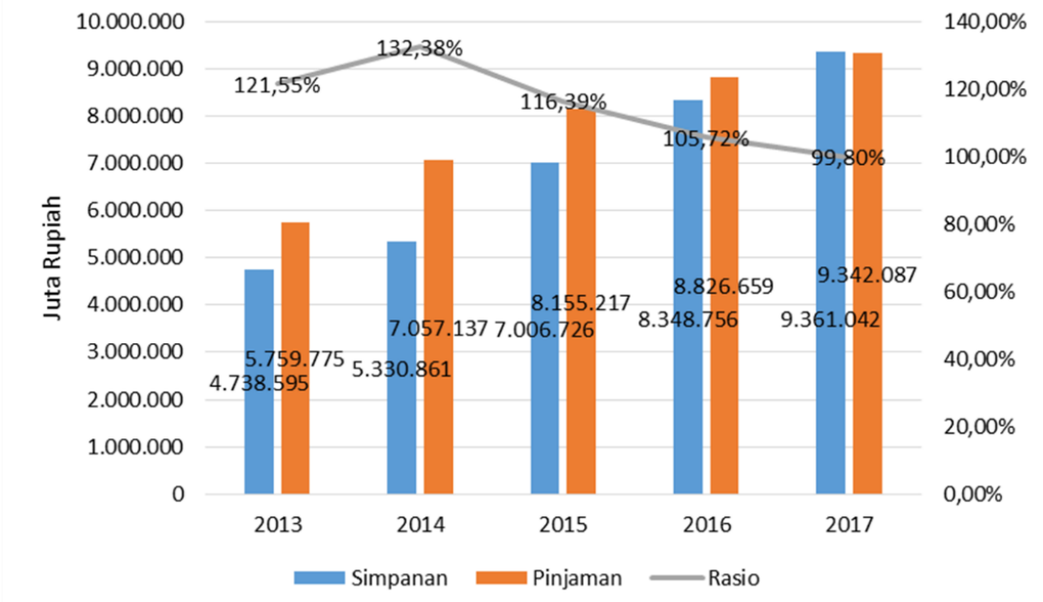

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 2.259 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR Tahun 2013-2017

2.6.7 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Indikator pidana yang diselesaikan selama kurun waktu 2013 sampai 2016 berfluktuasi, yaitu 6.014; 5.525; 5.506; dan 4.607. Sepanjang tahun 2017, jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan tinggi Bali sebanyak 2.41 kasus atau meningkat 6,43 persen dari tahun lalu yang mencapai 2.271 kasus. Pada bagian lain, jumlah perkara pidana yang diputuskan mencapai 2.351 kasus atau naik 11,32 persen dari tahun lalu sebanyak 2.112 kasus.

Tabel 2.124 Banyaknya Perkara Pidana yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Negeri Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali, 2017

Kabupaten/ Kota	Sisa Perkara Bulan Lalu (Akhir Des. 2016)	Perkara yang Masuk 2017	Perkara yang Diputus 2017	Sisa Akhir Bulan Desember 2017
Jembrana	22	144	148	17
Tabanan	17	137	137	16
Gianyar	37	216	212	41
Klungkung	11	92	86	17
Bangli	10	68	73	5
Karangasem	30	129	126	19
Buleleng	48	246	235	49
Denpasar	296	1385	1334	344
Jumlah / Total :	471	2417	2351	508
2016	349	2271	2112	528
2015	270	2119	2040	349
2014	415	2029	2053	343
2013	353	2266	2321	299

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

2.7 Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan /atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan Kerja Sama Antar Daerah (selanjutnya disingkat KSAD) semakin dirasakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh

semakin banyaknya lembaga-lembaga KSAD yang telah ada, akan dibentuk dan dikembangkan. Keinginan dan inisiasi untuk membentuk lembaga KSAD ini didorong oleh tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah, bahwa mereka tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan hanya bersandar pada kemampuannya sendiri, tetapi juga tergantung kepada daerah lain, khususnya daerah-daerah tetangga.

KSAD telah dipandang sebagai salah satu bentuk solusi untuk meningkatkan kapasitas potensi daerah melalui pengembangan kinerja dengan memadukan potensi beberapa daerah dalam satu ikatan kerjasama. Pada era otonomi, setiap daerah dituntut untuk mampu berkompetisi dan bersaing dengan daerah lain agar mampu menarik investor dan mengoptimalkan pemanfaatan potensinya. Selain berkompetisi, peningkatan kapasitas daerah dapat dilakukan dengan bentuk lain. KSAD mampu menawarkan alternatif lain disamping dengan berkompetisi tersebut, yaitu dengan bekerja sama membangun dan memanfaatkan potensi masing-masing secara bersama. Kerjasama ini dilakukan untuk membangun potensi kewilayahan yang lebih besar, di dalam kerangka berkompetisi pada skala yang lebih luas. Melalui KSAD, daerah diajak untuk tidak hanya memandang potensi untuk berkompetisi melalui potensinya sendiri, tetapi memandangnya sebagai bagian dari sinergi kewilayahan yang lebih luas dan besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 bahwa untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga.

Selain KSAD juga dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri. Adapun Peraturan yang mendasari pelaksanaan kerjasama luar negeri adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang – undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri, dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini

menunjukkan adanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan dengan luar negeri, bahwa hubungan luar negeri tidak lagi merupakan monopoli negara (State Actor) tetapi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam mengimplementasikan KSAD terutama untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, menentukan kebijakan lebih lanjut, dilakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

1. Program dan Kegiatan.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah berupa kegiatan :

- Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
- Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Mitra Praja Utama (MPU);
- Peningkatan Kerjasama Kawasan Nusa Tenggara;

2. Realisasi Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan program peningkatan kerjasama antar daerah sebagai berikut :

1). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat.

2). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

3). Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

4). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Jembrana.

5). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Tabanan.

6). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Klungkung.
7). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Karangasem.
8). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kota Denpasar.
9). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Badung.
10). Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
11). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kabupaten Badung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali.
12). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kabupaten Tabanan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali.
13). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara.
14). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanu.
15). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Bangli, Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Pemerintah Kota Denpasar tentang Pembiayaan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sehat (JKN-KBS).

2.8 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

1). Kebijakan dan Kegiatan

a). Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

b). Kegiatan

1. Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha/Swasta

2). Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan program peningkatan kerjasama daerah dengan badan usaha/swasta sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali.

2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Warmadewa tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Udayana tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Sinar Roda Utama tentang Pelayanan Hemodialisis di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
5. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Tentang Pembekalan dan Layanan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa persiapan Pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.
7. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kanwil DJP Provinsi Bali tentang Addendum/Perubahan atas PKS tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram tentang Praktek Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
9. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali tentang Kegiatan Praktik Klinik Keperawatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keshatan Wira Medika Bali di Provinsi Bali.
10. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang tentang Praktik Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
11. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan tentang Praktik Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan di Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Bali.
12. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Nikki Puri Medika tentang Layanan Pemerkasan Laboratorium.

13. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Yayasan Senyum Bali tentang Pelaksanaan Operasi Deformitas pada Wajah.
14. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Deasar tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar di UPT. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
15. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dengan CV Taman Aguna, CV Amerta Jaya, CV Dharma Pertiwi, CV Anantha Winangun, CV Dharma Kerti Sedana, CV Setiawan, Koperasi Tani Nadhi, Koperasi Panca Kawi Artha, YPST. Tentang Penyediaan Pupuk Organik Bersubsidi oleh Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018.
16. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan PT. Global Sentra Gravika tentang Penyediaan Kartu Identitas Berobat dan Stiker Barcode Pasien.
17. Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar tentang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
18. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyimpanan Uang Daerah.

2.9 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Kebijakan

Sesuai dengan pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur dibantu oleh Instansi Vertikal, yang dilakukan dengan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Hubungan kerja ini selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan

proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.

2. Realisasi dan pelaksanaan Kegiatan

Adapun realisasi kerjasama antar daerah dan dengan Instansi Vertikal adalah sebagai berikut;

a). Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda), kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka lebih memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala informasi dan masukan dari anggota Fokorpimda yang memberikan manfaat terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

b). Koordinasi dengan Kantor Pertanahan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah pemerintah daerah maupun dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah.

c). Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, dimaksudkan dalam rangka penyediaan data dan kontribusi sektor ekonomi serta data Provinsi Bali di berbagai sektor. Melalui kegiatan ini dihasilkan antara lain penyusunan Buku PDRB, Buku Bali dalam Angka Tahun 2017 yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi, income perkapita serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu juga senantiasa dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal lainnya termasuk dengan BUMN, BUMD yang ada di daerah.Melalui kegiatan koordinasi ini pemerintah daerah dapat melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi vertikal dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

2.10 Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.125 Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**Pendidikan**									
1.1	Pendidikan Menengah	a.Standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c.Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
1.2	Pendidikan Khusus	a.Standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b.Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
2	**Kesehatan**									
2.1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanan provinsi	a. Standar Jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. standar jumlah dan kualitas personel / sumber daya manusia kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100

2.2	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	a. Stándar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas personel / sumber daya manusia kesehatan;	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tatacaa pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
3.1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten / kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
3.2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic dengan sistem pengelolaan air limbah domestic regional lintas kabupaten / kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
4	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**									
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencanan provinsi	a. standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pemerintah provinsi	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b.Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**									
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100

6	**Sosial**									
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pegemis di dalam panti	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100

2.11 Prediksi Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2018-2023

Prediksi kondisi makro ekonomi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan hasil analisis Tim Makro Ekonomi Provinsi Bali adalah seperti disajikan pada Tabel 4.1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dalam 5 tahun ke depan dengan memakai model makro ekonomi diperkirakan akan terus menunjukkan akselerasi sejalan dengan perkiraan peningkatan kunjungan wisatawan yang ditargetkan sebanyak 20 juta orang pada tahun 2019 dimana 40% diantaranya akan dikotribusikan oleh Bali. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor yaitu peningkatan kapasitas Pelabuhan Benoa dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, pertemuan IMF World Bank 2018, penambahan jumlah *direct flight* dari dan ke Bali serta pengembangan Bali dan *Beyond*. Faktor pendorong lainya adalah: a)upaya pengembangan pasar alternatif untuk produk ekspor yaitu ke Rusia, Timur Tengah dan Amerika Selatan; b)rencana pembangunan dan operasional beberapa bendungan untuk penyediaan air minum dan irigasi untuk pertanian; serta c)upaya peningkatan konektivitas antar destinasi wisata melalui pembangunan infrastruktur. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkiraan moderat pertumbuhan ekonomi diprediksikan sebesar 6,4% (tahun 2019), 6,60% (tahun 2020), 6,80% (tahun 2021), 7,00% (tahun 2022) dan 7,20% (tahun 2023).

Berkaitan dengan inflasi, data empat tahun terakhir (2014-2017) menunjukan bahwa inflasi Bali lebih rendah dari nasional. Rata- rata inflasi Bali selama 4 tahun terakhir tercatat sebesar 4,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama, yang sebesar 4,58% (yoy). Sumber penyebab inflasi di Provinsi Bali adalah administered prices dan volatile food. Peningkatan indeks harga pada kelompok volatile food biasanya didorong oleh peningkatan permintaan bahan makanan terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan dan periode liburan. Faktor lainnya adalah terjadinya anomali cuaca yang berdampak pada ketersediaan pasokan komoditas holtikultura yang juga ikut mendorong peningkatan indeks harga bahan makanan. Selain itu seperti daerah-daerah di kawasan timur Indonesia pada umumnya, inflasi Provinsi Bali juga sangat rentan terhadap gejolak dari sisi suplai. Secara fundamental tekanan inflasi tercatat cukup stabil dan masih berada dalam tren penurunan karena berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah yang secara berkesinambungan dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali. Berdasarkan kondisi tersebut inflasi Provinsi Bali di perkirakan 3,50±1% (tahun 2019), 3,00±1% (tahun 2020), 3,00±1% (tahun 2021), 3,00±1% (tahun 2022) dan 3,00±1% (tahun 2023).

Berkaitan dengan kemiskinan, persentase penduduk miskin adalah terendah kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Namun kecenderungannya dalam 5 tahun terakhir relatif tetap yaitu 4,49% (tahun 2013), 4,76% (tahun 2014), 5,25% (tahun 2015), 4,15% (tahun 2016) dan 4,14% (tahun 2017). Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan agak sulit untuk diturunkan oleh karena persentasenya sudah rendah yang dikenal dengan istilah hard rock poverty, yaitu suatu fenomena dimana penurunan akan sulit dilakukan bila suatu kondisi telah mencapai tingkatan yang cukup rendah dan penduduk miskin tersebut termasuk kelompok yang sangat sulit untuk dientaskan. Namun berdasarkan perkembangan pull factor dan push facktor yang cenderung bergerak kearah positif, diperkirakan angka kemiskinan dapat diturunkan relatif signifikan ditahun 2018-2023 meliputi 3,91% (tahun 2018), 3,85% (tahun 2019), 3,72% (tahun 2020), 3,59% (tahun 2021), 3,46% (tahun 2022), dan 3,34% (tahun 2023).

Kondisi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali dari tahun 2013-2017 diangka dibawah 2% dan terendah nasional secara rinci TPT Provinsi Bali dari tahun 2013-2017 yaitu : 1,83% (tahun 2013), 1,90% (tahun 2014), 1,99% (tahun 2015), 1,89% (tahun 2016) dan 1,48% (tahun 2017). Capaian TPT sejalan dengan tren positif petumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan Provinsi Bali. Kondisi ini akan berdampak terhadap turunnya tingkat pengangguran terbuka baik dilihat dari sisi penawaran, khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor makanan minum, transportasi dan jasa kontruksi. Dari sisi permintaan kecendrungan meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto dan konsumsi pemerintah turut mendukung perluasan dan kesempatan kerja. Walupun capaian TPT Provinsi Bali relatif rendah bahkan terendah nasional, namun dari sisi struktur TPT Provinsi Bali masih ada persoalan yang harus segera di selesaikan, dimana struktur TPT Provinsi Bali masih didominasi oleh pengangguran pendidik (SMK, DIPLOMA I,II,III dan sarjana). Hal ini disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi dari tenaga kerja yang ada. Masalah ini disebabkan oleh belum sinkronnya kurikulum dimasing-masing institusi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu kedepan harus dilakukan kearah sinkronisasi melalui perubahan kurikulum sesuai dengan dinamika pasar kerja.

Tabel 2.126 Prediksi Makro Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Indikator Makro Ekonomi						
Uraian	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	4,292,20	4,336,90	4,380,80	4,423,80	4,465,90	4,506,90
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35 (6,20-6,40)	6,4 (6,20-6,60)	6,6 (6,40-6,80)	6,8 (6,60-7,00)	7,0 (6,80-7,20)	7,2 (7,00-7,50)
PDRB Perkapita Riil (ADHK)	34 juta – 38 juta	35 juta – 39 juta	37 juta – 41 juta	40 juta – 44 juta	42 juta – 46 juta	44 juta – 48 juta
PDRB Perkaipta Nominal (ADHB)	50 juta – 55 juta	53 juta – 58 juta	56 juta – 61 juta	59 juta – 64 juta	62 juta – 67 juta	66 juta – 71 juta
Inflasi	3,50±1%	3,50±1%	3,00±1%	3,00±1%	3,00±1%	3,00±1%
Tingkat Kemiskinan (%)	3,91	3.85	3,59	2,95	1,9	1,00-1,50
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	171,76	166.91	162.78	120	80	42,00-61,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,37	1,28 (1,73-0,95)	1,17 (1,61-0,86)	1,07 (1,49-0,78)	0,98 (1,38-0,70)	0,90 (1,29-0,63)
Gini Ratio	0,364	0,3582	0,3264	0,3081	0,2800	0,2500
IPM	74,45 (74,35-74,50)	75,07 (74,97-75,17)	75,31 (75,21-75,41)	75,61 (75,41-75,61)	78,25 (75,61-78,25)	80 (75,56-80)
Investasi (Triliun Rp,)	18	19,22	20,10	22,50	25,15	28,10
Jumlah Ekspor (juta US$)	547,711,309,30 (872.788.034,23-343.711.951,33)	572,712,445,40 (916.046.832,34-358.059.799,49)	598,854,797,30 (961.650.486,41-372.928.702.60)	626,190,457,59 (1.009.730.024,81 - 388.335.970,54)	654,773,896,68 (1.060.423.728,26 – 404.299.568,51)	684,662,071,38 (1.113.877.535,58 – 420.838.141,56)

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 2.127
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2013-2018

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	6,65	6,73	6,03	6,33	5,57	6,35	6,6-7,2	▼
2	Laju Inflasi	4,71	8,43	2,75	2,94	3,38	3,4	5,35-5,76	●
3	PDRB per kapita	20,8	38,10	42,48	46,21	50,29	54,62	43,04-45,11	●
4	Indeks Gini	0,402	0,415	0,399	0,374	0,379	0,364	0,330-0,350	▼
5	Kelompok 40% terbawah	16,32	15,49	17,84	18,07	17,85	17,45	17,45	●
6	Kelompok 40% sedang	36,79	36,54	37,35	37,96	38,00	37,84	37,84	●
7	Kelompok 20% tertinggi	46,9	47,98	44,81	43,96	45,36	44,71	44,71	●
8	Persentase penduduk miskin	3,95	4,75	5,25	4,15	4,14	3,91	2,8-2,6	▼
9	Rasio kesenjangan kemiskinan	0,16	0,16	0,26	0,14	0,09	0,05	0,05	●
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,49	72,48	73,27	73,27	74,30	74,45	74,03-74,47	●
11	Angka Melek Huruf	91,03	92,56	92,77	92,82	92,90	89,17	90,42	▼
12	Angka rata-rata lama sekolah	8,10	8,11	8,26	8,36	8,55	9,72	8,11	●
13	Angka usia harapan hidup	71,11	71,20	71,35	71,4	71,46	71,4	71,51-71,58	▼
14	Persentase balita gizi buruk	3%	3%	1,6%	1%	2%	2%	1,20%	●
15	Prevalensi balita gizi kurang	13,20%	13,20%	9%	9,10%	8,60%	13,10%	13,1	●
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	67,23%	92,20%	93,72%	98,60%	100%	100%	100%	●
17	Angka partisipasi angkatan kerja	2.283.896	2.316.758	2.372.015	2.463.039	2.434.450	2.478.567	2.478.567	●
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,93	74,91	75,51	77,24	75,24	75,51	95,00	●
19	Tingkat pengangguran terbuka	1,83	1,90	1,99	1,89	1,48	1,40	2,2 - 2,0	▼
20	Rasio penduduk yang bekerja	98,17	98,10	98,01	98,11	98,52	98,60	99,25	▼
21	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	19,41	19,69	20,00	20,30	20,60	15,92	15,92	●
	1. tenaga kerja berusaha sendiri	309.058	317.218	315.131	382.948	353.850	366.169	366.169	●
	2. pekerja bebas	207.112	203.142	229.079	196.060	167.900	161.639	161.639	●
22	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	516.170	520.360	544.210	579.008	521.750	527.808	527.808	●
23	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	17,39	16,35	13,9	13,9	14,2	-	5	●
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	72,48	75	75	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
25	Jumlah PAD terhadap pendapatan (Rp. Triliyun)	2.529	2.920	3.041	3.041	3.041	3.701	3.701	
26	Opini BPK	WTP.DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum	WTP	
27	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,40	94,40	94,57	95,30	95,60	95,90	95,90	
28	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	16,57	15,37	15,15	14,57	14,57	14,38	-	
	1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	15,22	14,65	14,65	14,67	14,35			
	2. Kontribusi sektor pertanian pangan terhadap PDRB	16,57	15,37	15,15	14,57	14,57			
29	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	2,52	2,25	2,20	2,10	1,93	2,52	-	
30	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,48	1,38	1,46	1,47	1,43	1,48	-	
31	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	39,36	37,96	39,65	39	39	16,84	-	
32	Cakupan Bina Kelompok Petani	8.961	9.011	9.011	9.011	9.011			
33	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	13,01	0,01	0,01	13,01	0,01	-	-	
34	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	48,51	51,92	49,72	57,95	58,9	45	-	
35	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,31	8,27	8,31	8,3	8,5	-	-	
36	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,44	6,38	6,52	6,36	6,4	-	-	
37	Pertumbuhan Industri	-	1,5	2	3,28	3,3	-	-	
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita	994.069,88	1.097.749,27	1.045.144,90	1.099.561,31	1.099.561,31	-	-	
2	Nilai Tukar Petani (NTP)								
	1. Januari	107,57	103,61	104,18	104,96	106,25	103,48	103,48	
	2. Februari	107,42	103,55	103,9	105,42	105,79	103,88	103,88	
	3. Maret	106,94	104,33	103,41	104,86	104,72	103,5	103,5	
	4. April	106,84	103,82	103,05	104,81	104,98	103,18	103,18	
	5. Mei	107,74	104,44	103,05	105,94	104,57	103,23	103,23	
	6. Juni	108,36	104,58	103,93	106,58	104,49	103,54	103,54	
	7. Juli	106,64	105,14	104,6	106,67	104,14	103,4	103,4	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	8. Agustus	106,66	105,21	104,25	106,66	103,94	103,54	103,54	
	9. September	106,82	106,02	104,54	107,44	104,45	103,28	103,28	
	10. Oktober	107	107,06	104,91	107,13	104,49	103,7	103,7	
	11. November	107,43	106,06	105,41	107,06	104,51	103,15	103,15	
	12. Desember	103,37	104,19	105,13	106,74	103,93	103,87	103,87	
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	571.880	639.026	623.568	633.569	-	-	-	
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	65,50%	62,92%	63,72%	49,45%	50,30%	52,42%	52,42%	
5	Rasio Pinjaman terhadap simpanan di Bank umum	76,68%	81,14%	83,25%	86,16%	84,21%	81,90%	81,90%	
6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	119,04%	120,47%	118,12%	105,73%	99,80%	92,53%	92,53%	
7	Angka kriminalitas	21.00	7.356	7.164	4.250	N/A	4.607	10	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	**Pendidikan**								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58,64	67,92	71,21	74,41	75,84	79,1	94,43	
1.2	Angka Partisipasi Kasar								
	1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI	108,52	107,97	104,35	109,84	107,99	105,9	112	
	2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	103,51	106,74	106,64	113,75	113,37	106,95	110	
	3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	92,40	101,40	100,30	100,89	104,42	100,4	95	
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan								
	1. Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	24,36	21,66	22,73	27,06	21,48	24,55	27,55	
	2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS	10,93	17,54	13,27	16,88	17,54	11,73	11,28	
	3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA	21,76	30,60	30,73	31,05	31,70	23,41	23,08	
1.4	Angka Partisipasi Murni								
	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,50	97,21	92,70	97,24	95,70	96,06	97,25	
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,89	86,85	86,91	84,87	84,36	84,54	84,70	
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	65,98	76,13	75,64	69,45	72,61	73,15	70,00	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.5	Angka Partisipasi Sekolah								
	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	98,50	99,36	99,41	99,35	99,44	99,56	99,00	
	2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	82,89	97,23	97,41	97,55	97,72	97,92	83,59	
	3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	65,98	76,13	75,64	66,28		82,35	66,58	
1.6	Angka Putus Sekolah								
	1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12	0,09	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	
	2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,31	0,15	0,14	0,11	0,11	0,1	0,26	
	3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,23	0,46	0,38	0,26	0,26	0,25	0,18	
1.7	Angka Kelulusan								
	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,61	99,98	99,99	100	100	100	99,75	
	3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,97	99,82	99,99	100	99,99	99,99	99,95	
1.8	Angka Melanjutkan (AM)								
	1. Angka Kelulusan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	80,00	103,20	96,50	96,49	97,11	96,24	80,00	
	2. Angka Kelulusan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	70,00	95,27	96,20	95,67	96,88	95,85	70,00	
1.9	Fasilitas Pendidikan								
	1. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	56,03	74,36	75,00	77,57	76,55	93,28	90,23	
	2. Sekolah Pendidikan SMP/ MTs kondisi bangunan baik	84,23	68,24	85,80	68,24	67,24	92,07	92,07	
	3. Sekolah Pendidikan SMA/ SMK/MA kondisi bangunan baik	50,58	90,29	94,16	92,94	91,49	96	81,45	
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	49,45	50,84	48,5	51,99	51,68	63,77	62,80	
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	20,07	21,15	20,69	20,11	20,04	18,12	60	
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	58,89	59,07	59,25	59,43	59,62	60,61	42,23	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah								
	1. SMA/MA (per 1000 murid)	78,18	80,84	84,19	83,21			78,88	
	2. SMK (per 1000 murid)	68,35	71,59	86,38	82,85			70,05	
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata								
	1. SD/MI	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	
	2. SMP/MTS	0,14	0,11	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	
	3. SMA/SMK/MA	0,20	0,16	0,16	0,15	0,14	0,1	0,1	
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	90,42	
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	91,03	92,26	92,77	92,82	92,9	92,98	92,98	
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV								
	1. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	26,56	39,76	46,78	57,02	73,81	87,96	87,96	
	2. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	73,31	86,6	87,33	90,74	92,23	93,16	93,16	
	3. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	89,52	92,87	93,52	94,02	95,07	95,91	95,91	
	4. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	70	95,05	95,32	96,8	97,06	96,39	95	
2	**Kesehatan**								
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,50	5,99	5,70	6,01	4,80	4,55	10,00	
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	5,94	6,67	6,40	6,83	5,60	5,17	5,17	
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3,47	4,50	4,41	4,22	3,19	3,20	3,20	
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	72,10	70,50	83,41	78,72	68,64	54,03	54,03	
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	14,04	1,46	1,47	1,47	1,45	1,45	14,038	
2.6	Rasio Puskesmas, Klinik, pustu per satuan penduduk (dirinci)								
	1. Rasio Puskesmas	0,03	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,031	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	2. Rasio Klinik	0,032	0,011	0,021	0,021	0,021	0,021	0,033	
	3. Rasio Puskesmas Pembantu	0,13	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,131	
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,013	0,13	0,12	0,012	0,014	0,016	0,014	
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	2.568	2.192	3.621	4,102	2.991	0,35	0,35	
2.9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk								
	1. Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	832	740	631	605	544	1,85	1,85	
	2. Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	1.441	1.473	1.283	1.245	947	1,07	1,07	
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75,60	76,40	74,96	77,60	74,89	86,53	80	
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96,52	97,54	97,49	96,4	93,6	95,97	100	
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	95,9	98,5	98,7	98,7	99	99,16	100	
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	
2.14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	99,09	101,85	100,55	99,98	99,98	97,4	97,4	
2.15	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	3,9	4,1	3,2	3,7	2,4	3,4	3,4	
2.16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	13,63	12,44	5,32	96,68	96,68	64,25	64,25	
2.17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	78	60	56	59,4	27	30	70	
2.18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	72,58	73,91	69,30	74,59	74,59	87	87	
2.19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3,17	2,14	2,14	3,66	3,66	8,4	8,4	
2.20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	11,82	11,38	18,15	39,51	39,51	98,1	98,1	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	74,97	76,12	70,37	77,59	77,59	88	88	
2.22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	
2.23	Penderita diare yang ditangani	109,4	79,48	89,18	62,67	55,2	70,2	70,2	
2.24	Angka kematian Malaria	0,002	0,01	0,003	0,0024	0,20	0	0	
2.25	Tingkat kematian akibat malaria	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0	0	
2.26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	100	100	100	
2.27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,50%	0,47%	0,46%	0,45%	0,49%	0,50%	-	
2.28	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	55%	56%	56,50%	57%	57,50%	55%	-	
2.29	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	20,90%	21%	21,50%	22%	22,20%	21	21	
2.30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	
2.31	Cakupan kunjungan bayi	97,36	100,03	99,01	96,17	96,4	102,92	102,92	
2.32	Cakupan Puskesmas	93,1	94,1	93	91,4	89,7	94,49	94,49	
2.33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95,33	96,51	95,92	94,71	91,9	96,81	96,81	
2.34	Cakupan Pelayanan nifas	70,82	69,43	69,67	66,79	62,6	100	100	
2.35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	81,94	94,99	94,18	96,28	117	100	100	
2.36	Cakupan pelayanan anak balita	81,94	94,99	94,18	96,28	117	100	100	
2.37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	
2.38	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	-	100%	100%	100%	100%	100	100	
2.39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	**Pekerjaan Umum:**								
3.1.1	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	79,53	82,64	82,65	82,72	83,58	80,81	85,54	
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00209	0,00207	0,00204	0,00202	0,00200	0,00198	0,00198	
3.1.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	62,41	63,66	64,93	66,23	91,07	92,07	67,55	
3.1.6	Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	53,2	56,85	61,39	65,08	68,62	71,51	75	
3.1.7	Persentase capaian air minum Persentase penduduk yang berakses air minum aman di Provinsi Bali	-	-	68,48	76,36	84,24	86	90	
3.2	**Penataan Ruang:**								
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	20	18	20	21	21	21	22	
3.2.3	Ketaatan terhadap RTRW	22%	33%	67%	67%	68%	68%	67%	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
4.1	Jumlah rumah tidak layak huni	-	-	-	-	-	52.425 Unit	52.425 Unit	
4.2	Luas kawasan kumuh	-	-	-	-	-	586,1969	586,1969	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	56,72	58,1	56,69	55,69	55,69	29,83	60,21	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100	100	
5.3	Persentase Penegakan PERDA	100	100	97	100	100	100	100	
6	**Sosial**								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3,81	6,42	4,22	4,7	1,84	0,58	15	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	5,42	3,3	3,02	3,21	2,7	0,67	12,9	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2,97%	2,73%	2,42%	2,40%	1,87	0,41	9,83	●
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	5	5	5	3,8	3,8	3,8	21,4	▼
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	25	25	25	25	25	25	25	●
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	●
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	60,03	66,08	▼
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	**Tenaga Kerja**								
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,11	30 kasus 100%	56 kasus 100%	50 kasus 100%	46	43	1,55	▼
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	94	155	26	21	22	18	18	●
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	64,79	59,15	67,49	68,31	52,43	47,57	95,00	▼
1.4	Keselamatan dan perlindungan	123	146	183	226	350	400	400	●
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	89.506	92.630	96.050	110.075	116.922	594.557	594.557	●
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	440	575	690	780	920	2.794	2.794	●
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	145	183	226	226	216	174	174	●
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	280	368	32	540	100	126	1.446	▼

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	200	75	90	30	30	240	665	
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	70	75	261	350	42	20	20	
1.11	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,13	0	7,73	7,92	7,31	7,13	-	
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	43,73%	43,75%	44,15%	45,22%	41,70%	46,03%	39,80%	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	7,27%	7,90%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	45,50%	44,39%	45,05%	45,70%	46,10%	46,78%	46,78%	
2.4	Rasio KDRT	0,07%	0,053%	0,057%	0,048%	0,049%	0,056%	0,056%	
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	66,52%	67,26%	67,24%	70,56%	67,70%	72,55%	56,00%	
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	88%	86%	80%	87,50%	88,50%	88,50%	88,50%	●
2.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0,98	0,98	0,98	0,97	1,01	1,01	1,01	●
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,05	1,03	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	●
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	0,88	0,89	0,83	0,91	0,94	0,94	0,94	●
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	0,79	0,84	0,89	0,92	0,93	0,93	0,93	●
2.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,90	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	●
2,17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	23,64	25,6	25,00	25,53	25,53	-	-	●
3	**Pangan**								
3.1	Ketersediaan Pangan Utama								
3.1.1	Beras	539.640	549.638	542.221	489.217	470.080	449.187	449.187	●
3.1.2	Jagung	61.873	66.355	76.883	55.705	4.531	43.892	72.014	▼
3.1.3	Kedelai	8.210	5.550	7.259	6.990	5.191	2.500	9.107	▼
3.1.4	Kacang Tanah	11.616	13.010	66.608	6.437	5.897	4.408	12.090	▼
3.1.5	Ubi Kayu	147.201	163.741	86.070	87.599	101.169	53.267	160.178	▼
3.1.6	Kacang Hijau	1.529	0,750	0,941	0,595	54	170	919	▼
3.1.7	Ubi Jalar	65.132	70.318	36.665	30.470	91.549	25.042	91.549	▼
4	**Lingkungan Hidup**								
4.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	-	-	-	-	Ya	Ya	Ya	Tercapai
4.2	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	6 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	15 Dokumen	●
4.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	●
4.4	Peningkatan Indeks Kualitas Air	-	61,59	61,82	64,5	62,67	63,17	63,17	●
4.5	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	-	82,02	83,98	87,58	88,39	91,89	91,89	●
4.6	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	36	36	36,02	36,38	38,57	38,57	●
4.7	Laporan Inventarisasi GRK	2	2	2	2	2	1	6	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4.8	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan pengolahan limbah B3	50 perusahaan	29 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	27 perusahaan	15 perusahaan	181 perusahaan	●
4.9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	90 Kawasan & 164 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	17 perusahaan	162 Kawasan & 382 perusahaan	●
4.10	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	●
4.11	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	80 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	30 Orang	30 Orang	260 Orang	●
4.12	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	80 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	30 Orang	30 Orang	260 Orang	●
4.13	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	30 Adiwiyata, 3 Kota Adipura	30 Adiwiyata, 3 Kota Adipura	30 Adiwiyata, 6 Kota Adipura	30 Adiwiyata, 4 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata, 4 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru	180 Adiwiyata, 22 Kota Adipura, 3 Kalpataru	●
4.14	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	157 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	20 Kasus	15 Kasus	242 Kasus	●
4.15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (volume timbulan sampah m3)	9.809,64 m3/hari	10.005,84 m3/hari	10.266,4 m3/hari	11.806,36 m3/hari	12.833,12 m3/hari	13.854,64 m3/hari	13.854,64 m3/hari	●
4.16	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi	67,10	68,00	70,00	75,00	75,00	73,00	75,00	●
4.17	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	10,00	12,00	13,00	15,00	17,00	18,00	18,00	●
4.18	Persentase jumlah sampah yang tertangani	50	52	55	58	61	65,00	75,00	▼
5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
5.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	0,37	0,49	0,73	0,80	0,91	0,93	0,93	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	7,50	10,32	18,49	43,80	81,30	84,17	84,17	
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	2,75	3,14	14,59	17,90	31,79	40,38	40,38	
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	
6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
6.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7,96%	15,92%	23,88%	31,84%	39,80%	43,78%	43,78%	
6.2	Persentase LPM Berprestasi	2,37%	4,74%	7,12%	9,49%	11,84%	14,24%	14,24%	
6.3	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.4	Persentase Posyandu aktif	69,25%	66,55%	68,74%	68,71%	68,71%	69,80%	69,80%	
6.5	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	85,39%	91,25%	176,19%	176,88%	833,14%	526,28%	526,28%	
6.6	Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah dibina	12,02%	12,01%	12,01%	12,01%	12,29%	12,29%	12,29%	
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,3	2,2	2,2	2,3	2,21	2,1	2,1	
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	-	-	30,95	25,49	-	-	
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
7.5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,14	2,3	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
7.6	Ratio Akseptor KB	85,11	83,59	81,12	116,36	97,40	85,11	85	
7.7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	57,9	79,95	67,76	67,07	81,44	57,9	-	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
7.8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	48	40	32	19,48	23,87	36	36	●
7.9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	-	-	36,42	-	-	35,12	-	
7.10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,99%	4,79%	5,60%	5,69%	5,61%	5,13%	5,13%	●
7.11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,30	50,86	40,62	48,10	47,49	43,46	43,46	●
7.12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	85,11	83,59	79,95	87,83	92,39	90,2	91,12	●
7.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	71,70%	91,16%	91,42%	88,90%	87,7	99,6	▼
7.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	72,07%	53,40%	65,67%	81,70%	85,2	95,7	▼
7.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	70,48%	34,82%	62,64%	84,60%	70,48	99,5	▼
7.16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	-	-	-	88,6	82,5	94,7	▼
7.17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	614	592	557	567	539	100	100	●
7.18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	88,82	89,44	88,51	82,83	88,6	88,6	88,6	●
7.19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
7.20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	157.094	288.920	265.218	128.215	219.681	157.094	-	
7.21	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	22,7	-	-	21,64	22,7	-	
8	**Perhubungan**								
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum								
8.1.1	Angkutan Darat	n/a	16,110	16,110	16,110	17,086	351.739	16.110	
8.1.2	Angkutan Laut	10.643.550	11.294.889	11.948.037	7.868.197	11.691.046	6.358.176	13.396.762,00	
8.1.3	Angkutan Udara	15655557,74	17064557,93	18600368,14	19966415	21051094	23.644.307	26.255.938	
8.2	Jumlah ijin trayek	n/a	231	00:00,0	231	217	141	231	
8.3	Jumlah uji kir angkutan umum	86.745	107.299	104.483	110.407	113.858	146.324	146.324	
8.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis								
8.4.1	Jumlah Pelabuhan	6	6	6	7	8	8	8	
8.4.2	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1	1	3	
8.4.3	Jumlah Terminal Bis	20	20	20	20	20	20	2	
8.5	Persentase layanan angkutan darat	0,02	0,0245	0,02	0,03	0,03	3	3	
8.6	Pemasangan Rambu-rambu (%)	0,262	0,034	0,094	0,017	0,048	25,41	25,41	
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:396,99	1:416,63	1:412,95	1:438,79	1:460,19	1:470,20	1:200	
8.8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum								
8.8.1	Angkutan Darat								
	- Orang	81.456	107.114	110.215	113.065	115.865	115.865	115.865	
	- Barang	-	146.738	151.429	121.818	121.818	121.818	121.818	
8.8.2	Angkutan Laut								
	- Orang	5.769.326	6.145.932	6.100.596	5.789.098	2.152.043	2.152.043	2.152.043	
	- Barang	475.727.259	22.217.802	4.403.570	4.368.215	2.758.093	2.758.093	2.758.093	
8.8.3	Angkutan Udara								
	- Orang	4.243.722	4.516.553	8.501.343	10.010.772	10.085.537	23.644.307	23.644.307	
	- Barang	6.271.733	5.522.961	18.276.474	32.912.181	41.850.386	73.379.502	73.379.502	
8.9	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun								

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
8.9.1	Dermaga								
	- Orang	11.773.328	12.572.272	12.303.651	8.844.707	6.358.176	6.358.176	6.358.176	●
	- Barang	483.238.509	168.975.121	12.366.418	11.622.564	8.291.379	8.291.379	8.291.379	●
8.9.2	Bandara								
	- Orang	15.634.200	17.290.082	17.112.073	19.986.415	14.481.013	23.644.307	23.644.307	●
	- Barang	185.504.351	175.391.334	176.185.683	202.366.091	148.610.379	73.379.502	73.379.502	●
8.9.3	Terminal								
	- Orang / Barang	966.649	849.601	851.860	852.314	851.464	351.739	351.739	●
9	**Komunikasi dan Informatika**								
9.1	Cakupan layanan telekomunikasi	48,5	49,05	49,2	49,35	49,5	50	50	●
9.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	91,43	91,22	92,64	92,36	93,43	93,62	93,62	●
9.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	10,23	9,88	8,34	7,47	6,24	5,34	5,34	●
9.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	-	-	28,78	33,87	39,49	46,42	46,42	●
9.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	23,16	25,89	27,79	29,15	27,11	33,25	33,25	●
10	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**								
10.1	Persentase Koperasi Aktif	90,29	88,92	88,18	89,53	86,79	87,42	94	▼
10.2	Jumlah UMKM	261.411	265.558	265.558	265.558	300.650	312.967	312.967	●
11	**Penanaman Modal**								
11.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	110	171	86	136	100	166	603	●
11.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (trilyun rupiah)	2,24	6,75	3,81	6,97	5,55	4,46	25,32	▼
12	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
12.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	75,27%	75,27%	75,27%	75,27%	75,27%	76,00%	76,00%	●
12.2	Persentase Wirausaha Muda	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,82%	0,82%	●
12.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	25,61%	39,53%	41,86%	44,18%	48,83%	51,20%	51,20%	●
12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	22,22%	26,66%	32,60%	38,76%	38,46%	38,88%	38,88%	●
12.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	6,58%	6,42%	2,58%	2,66%	3,11%	3,31%	3,31%	●
12.6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	148	152	146	148	168	180	924	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
12.7	Jumlah prestasi Olahraga (Cabor)	15	18	16	17	18	20	20	
13	**Statistik**								
13.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	9	9	9	9	9	9	9	
13.2	Buku "PDRB"	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
14	**Persandian**								
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	80,95%	83,33%	85,71%	90,47%	86,95%	91,30%	91,30%	
14	**Kebudayaan**								
14.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	2	2	3	3	3	3	
14.2	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	17.595	17.595	19.790	20.168	20.377	20.377	
14.2.1	Benda Cagar Budaya	-	17.053	17.053	18.796	19.150	19.336	19.336	
14.2.2	Bangunan Cagar Budaya	-	-	-	95	96	97	97	
14.2.3	Situs Cagar Budaya	-	537	537	582	599	611	611	
14.2.4	Kawasan Cagar Budaya	-	5	5	5	5	5	5	
14.2.5	Struktur Cagar Budaya	-	-	-	312	318	328	328	
14.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.1	Benda Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.2	Bangunan Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.3	Situs Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.4	Kawasan Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	
14.4	Jumlah Karya Budaya Yang Diinventarisasi	78	80	121	162	206	233	233	
15	**Perpustakaan**								
15.1	Perentase Pengunjung perpustakaan per tahun (%)	8,59	8,59	7,14	7,62	7,76	7,72	7,72	
15.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	214.853	216.649	219.752	223.850	224.950	225.450	3.500	
15.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	49,660	56,248	54,965	62,868	62.110	61,823	61,723	
15.4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	140	148	157	167	177	124	124	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
16	**Kearsipan**								
16.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100	18	15	20	20	42	20	
16.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	100	35	30	45	45	70	45	
	LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	**Pariwisata**								
1,1	Kunjungan Wisatawan								
1.1.1	Wisatawan Nusantara	7.548.156	6,394,307	7.147.100	8.643.680	8,735,633	9.757.991	8.100.000	
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	3.728.598	3.766.638	4.001.835	4.927.937	5,697,739	6.070.473	4.400.000	
1,2	Rata-rata Lama Tinggal								
1.2.1	Wisatawan Nusantara	3,70	3,80	4,00	3,80	4,30	4	4	
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	9,60	9,11	9,87	10,08	10,45	10,45	10,45	
1,3	PAD Sektor Pariwisata	48,51	51,92	49,72	57,95	57,95	68,97	69,00	
2	**Pertanian**								
2,1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	16,84	16,44	15,11	14,73	14,02	13,81	13,81	
2,2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	2,52	2,25	2,20	2,10	1,93	2,52	-	
2,3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	1,48	1,38	1,46	1,47	1,43	1,48	-	
2,4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	16,84	16,44	15,11	14,73	14,02	13,81	13,81	
2,5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar								
2.5.1	Padi	58,09	60,12	62,14	60,60	58,80	60,70	61,50	
2.5.2	Jagung	61.873	66.355	76.883	55.705	55.042	43.892	43.892	
2.5.3	Kedelai	7.433	8.188	7.259	6.784	5.405	2.687	2.687	
2,6	Cakupan Bina Kelompok Petani	8.961	9.011	9.011	9.011	9.011	9.011	900	
3	**Kehutanan**								
3,1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	44.669,78	1.194	1.124	1.070	1.646,75	1.592,50	46.768,81	
3,2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	12.400	524	99,82	0	185	105,5	12.650	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
4,1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99,41	99,49	99,67	99,73	99,85	100	100	
4,3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	70	64,8	60	54	40	30	40	
5	**Perdagangan**								
5,1	Nilai Ekspor (USD)	486.063.655,35	503.826.213,14	481.402.783,80	574.276.900,25	679.594.478,52	839.440.122,90	839.440.122,90	
5,2	Cakupan Pembinan Pasar Rakyat	-	-	4,85	9,7	12,4	15,09	15,09	
6	**Perindustrian**								
6,1	Cakupan Bina Perajin	3,99	3,93	4,62	3,53	3,00	3,35	3,35	
7	**Kelautan dan Perikanan**								
7.1	Produksi Perikanan (Ton)	415,513,00	220.706,50	228.873,48	229.403,59	130.075,46	136.496,55	217,290,46	
7.2	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	30,61	31,17	32,2	32,38	33,52	34,56	32,38	
7.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	50	60	70	80	90	100	100	
7.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	84,7	106,21	104,6	102,7	105,19	107,36	100	
7.5	Nilai Tukar Nelayan	105,47	102,1	102,16	104,34	104,53	104,64	104,64	
	PENUNJANG URUSAN								
1	**Perencanaan Pembangunan**								
1,1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1,2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1,3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1,4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1,4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2	**Keuangan**								
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP.DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	Tercapai
2,2	Persentase SiLPA	26,87%	20,17%	13,50%	8,35%	6,73%	11,81%	11,81%	
2,3	Persentase SILPA terhadap APBD	6,22%	1,92%	-0,62%	-3,17%	-1,29%	4,37%	4,37%	
2,4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2,5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	17,20%	16,99%	20,04%	20,64%	27,48%	30,79%	30,79%	
2,6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	13,30%	10,91%	11,38%	14,77%	12,46%	11,22%	11,22%	
2,7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	32,59 : 67,41	29,85 : 70,15	30,32 : 69,68	26,84 : 71,16	28,37 : 71,63	25,05 : 74,71	25,05 : 74,71	
2,8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	17,36%	20,26%	21,77%	18,93%	18,10%	19,87%	19,87%	
2,9	Penetapan APBD	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	
		28/12/2012	27/12/2013	29/12/2014	11/12/2015	30/12/2016	27/12/2017		
		Perda No 11 Tahun 2012	Perda No. 60 Tahun 2013	Perda No. 9 Tahun 2014	Perda No 11 Tahun 2015	Perda No. 12 Tahun 2016	Perda No. 12 Tahun 2017		
		4.316.449.110.647,76	4.489.667.042.279,90	4.989.465.099.189,07	5.704.727.109.732,32	6.654.312.296.707,50	6.664.144.528.047,54		
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
3.1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	80	48	43	3	32	-	Lebih kecil
3.2	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	11,71	10,07	36,95	15,88	18,32	7,61	7,61	
3.3	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	43	46	49	49	52	45	45	
3.4	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	5.119	4.920	5.101	4.899	5.172	4.355	4.355	
3.5	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	1.329	1.397	1.057	1.079	6.880	6.924	6.924	
4	**Penelitian dan Pengembangan**								
4.1	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	13,6% 6/44	13,6% 6/44	13,6% 6/44	13,6% 6/44	14% 7/50	13,6% 6/44	-	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai 2. Akan tercapai 3. Tidak tercapai
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4.2	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	66,6% 6/9	66,6% 6/8	66,6% 6/8	66,6% 6/8	70% 7/8	66,6% 6/9	-	
5	**Pengawasan**								
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	51	44	16	27	27	9	9	
5.2	Jumlah Temuan BPK	58	55	55	30	10	14	14	
5.3	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,062	0,048	0,066	0,033	0,025	0,06	0,06	
5.4	Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev								
5.5	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
5.6	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
5.7	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
6	**Bencana**								
6.1	Jumlah Sistem Peringatan Dini	6	6	7	11	17	17	17	
6.2	Jumlah Kawasan Rawan Bencana	64	64	64	65	65	65	65	
6.3	Jumlah Korban Bencana	3	29	6	154	286	140	140	
6.4	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	43358	0	0	
6.5	Jumlah Kerugian Akibat Bencana	1.986.500.000	3.184.000.000	2.396.500.000	2.706.437.000	2.977.000.000	2.960.000.000	2.960.000.000	
6.6	Jumlah Kejadian Bencana	1.110	1.112	1.376	1.318	2.310	2.514	2.514	

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2013 - 2018)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bali disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat meliputi: dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, Transfer Antar Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan Bantuan Keuangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai sumber pendapatan Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pendapatan asli Daerah (PAD) yaitu: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Realisasi pendapatan daerah selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,18%. Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2013-2017 seperti disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018

KODE REK.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.109.377.804.800,09**	**4.577.678.390.572,03**	**4.967.966.966.800,82**	**5.249.017.754.255,86**	**5.992.161.668.458,44**	**6.242.865.041.085,27**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.529.976.146.703,70**	**2.920.416.697.074,56**	**3.041.298.422.524,52**	**3.041.195.258.456,21**	**3.398.472.278.306,41**	**3.701.996.021.038,27**
4.1.1.	Pajak Daerah	2.202.392.550.315,00	2.517.432.371.210,00	2.571.035.790.941,00	2.593.093.540.850,00	2.872.354.212.630,00	3.214.431.690.523,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	32.012.802.223,60	71.324.627.598,00	59.882.722.001,00	63.858.566.092,00	46.431.881.689,84	47.408.007.913,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	106.105.513.384,09	89.747.348.503,02	105.388.683.319,25	172.408.361.957,52	188.456.139.544,28	170.219.137.368,48
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	189.465.280.781,01	241.912.349.763,54	304.991.226.263,27	211.834.789.556,69	291.230.044.442,29	269.937.185.233,79
4.2.	**Dana Perimbangan**	**980.714.799.525,00**	**1.018.431.008.887,00**	**1.070.197.147.350,00**	**1.867.010.930.284,00**	**2.535.995.754.659,00**	**2.493.979.973.047,00**
4.2.1.	Dana Bagi Hasil ajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	144.513.543.525,00	144.532.785.887,00	104.103.308.350,00	171.994.343.152,00	169.597.184.795,00	182.554.549.512,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	792.365.876.000,00	832.297.473.000,00	831.597.268.000,00	850.144.224.000,00	1.260.842.523.000,00	1.268.585.388.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43.835.380.000,00	41.600.750.000,00	134.496.571.000,00	844.872.363.132,00	1.105.556.046.864,00	1.042.840.035.535,00
4.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**598.686.858.571,39**	**638.830.684.610,47**	**856.471.396.926,30**	**340.811.565.515,65**	**57.693.635.493,03**	**46.889.047.000,00**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	25.414.713.000,00	4.750.840.000,00	4.750.699.000,00	4.890.000.000,00	15.654.526.300,77	5.389.047.000,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	373.403.477.500,00	380.534.120.132,00	525.595.974.868,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	41.500.000.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	199.868.668.071,39	248.646.797.983,47	326.124.723.058,30	330.921.565.515,65	34.539.109.192,26	0,00
4.3.8.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	0,00	4.898.926.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**data un-audited*

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun selalu mencapai target kecuali di Tahun 2017. Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada diatas target selama empat tahun terakhir, yakni tahun 2013 sebesar 112,13 persen dari target, tahun 2014 sebesar 107,98 persen, tahun 2015 sebesar 101,37 persen, serta tahun 2016 sebesar 100,59 persen sedangkan di tahun 2017 hanya mencapai sebesar 95,92 persen.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

NO	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)	BERTAMBAH BERKURANG
1	**2013**	3.763.503.621.336,40	4.109.377.804.800,09	109,19	345.874.183.463,69
2	**2014**	4.231.297.026.615,49	4.577.678.390.572,03	108,19	346.381.363.956,54
3	**2015**	4.900.892.440.866,50	4.967.966.966.800,82	101,37	67.074.525.934,32
4	**2016**	5.218.112.635.741,73	5.249.017.754.255,86	100,59	30.905.118.514,13
5	**2017**	6.222.692.203.496,19	5.992.161.668.458,44	96,3	(230.530.535.037,75)
6	**2018***	6.199.821.643.405,00	6.242.865.041.085,27	100,69	43.043.397.680,27

**data un-audited*

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Berikut diuraikan target dan realisasi unsur-unsur pendapatan daerah dari tahun 2013-2017.

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 – 2017

Secara umum, kinerja pendapatan daerah Provinsi Bali periode 2012-2017, rata-rata tumbuh sebesar 10,32% (yoy). Pendapatan daerah Provinsi Bali terutama dikontribusikan oleh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen dengan share terbesar yaitu mencapai 60,18% (rata-rata 2012-2017), kemudian diikuti oleh Dana Perimbangan dengan share terbesar ke-dua (29,20%) dan komponen lain-lain PAD yang sah sebagai komponen terbesar ke-tiga (10,61). Perkembangan komponen PAD menunjukkan tendensi pertumbuhan yang melambat (tabel3.2), terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan pendapatan pajak daerah, yang dikontribusikan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat), sehingga berdampak pada pendapatan pajak daerah yang terkait dengan kendaraan, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB) juga ikut tertahan realisasinya. Ketiga komponen pajak yang terkait dengan kendaraan tersebut, merupakan komponen utama pendapatan pajak daerah dan PAD. Perkembangan tersebut berdampak pada perkembangan pertumbuhan PAD mengalami tren penurunan (tabel 3.3).

Tabel 3.3 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Growth PAD (% ; yoy)	13,11	11,40	8,53	5,66	14,16	4,18
Growth Dana Perimbangan (% ; yoy)	7,96	3,85	5,08	74,45	35,83	(1,66)
Growth Lain-lain Pendapatan yang sah (%; yoy)	(12,30)	6,71	34,07	(60,21)	(83,07)	(18,73)
Growth Belanja Tidak Langsung (% ; yoy)	7,29	20,83	10,54	10,75	12,72	3,00
Growth Belanja Langsung (% ; yoy)	11,38	6,32	13,08	3,13	10,17	(11,95)

**data un-audited*

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Bila dianalisa lebih lanjut, terkait dengan perkembangan struktur PAD (periode 2013-2017), terlihat bahwa *share* realisasi pendapatan pajak daerah menunjukkan tren penurunan sejalan perlambatan pertumbuhan pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2012, share realisasi pendapatan pajak daerah terhadap PAD sebesar 88,80%, lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2017 yang menjadi sebesar 85,16% (tabel 3.4). Komponen terbesar kedua dalam PAD adalah lain-lain PAD yang sah dengan share mencapai 7,81% pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang tercatat sebesar 4,97% sejalan dengan tren peningkatan sub komponen lain-lain pendapatan yang sah (tabel 3.4). Adapun beberapa sub komponen utama dari komponen lain-lain PAD yang sah terdiri atas: pendapatan bunga atas penempatan dana pemerintah di

perbankan, pendapatan denda atas pajak dan pendapatan atas pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Sementara itu, komponen dengan share terbesar ketiga pada PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan share pada tahun 2017 terhadapa PAD tercatat sebesar 5,64%, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 3,76%. Kondisi ini didorong oleh tren peningkatan pertumbuhan komponen ini. Adapun sub komponen utama dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah laba dari penyertaan modal dalam BUMD.

Tabel 3.4 Struktur dan Perkembangan Pendapatan Asli daerah

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2013		2014		2015		2016		2017		2018*	
	Realisasi (Rp)	Share (%)	Realisasi (Rp)	Share (%)	Realisasi (Rp)	Share (%)	Realisasi (Rp)	Share (%)	Realisasi (Rp)	Share (%)	Realisasi (Rp)	Share (%)
Pendapatan Pajak Daerah	2.202.392.550.315,00	87,05	2.517.432.371.210,00	86,21	2.571.035.790.941,00	84,54	2.593.093.540.850,00	85,27	2.872.354.212.630,00	84,52	3.214.431.690.523,00	86,83
Growth (% ; yoy)	21,45		14,3		2,13		0,86		10,77		11,91	
Retribui Daerah	32.012.802.223,60	1,27	71.324.627.598,00	2,44	59.882.722.001,00	1,97	63.858.566.092,00	2,10	46.431.881.689,84	1,36	47.408.007.913,00	1,28
Growth (% ; yoy)	(36,67)		122,80		(16,04)		6,64		(27,29)		2,1	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	106.105.513.384,09	4,19	89.747.348.503,02	3,07	105.388.683.319,25	3,47	172.408.361.957,52	5,67	188.456.139.544,28	5,55	170.219.137.368,48	4,60
Growth (% ; yoy)	38,34		(15,42)		17,43		63,59		9,31		(9,68)	
Lain-lain pendapatan yang sah	189.465.280.781,01	7,49	241.912.349.763,54	8,28	304.991.226.263,27	10,02	211.834.789.556,69	6,96	291.230.044.442,29	8,57	269.937.185.233,79	7,29
Growth (% ; yoy)	86,66		27,68		26,08		(30,54)		37,48		(7,31)	
total pendapatan asli daerah	2.529.976.146.703,70	100,00	2.920.416.697.074,56	100,00	3.041.298.422.524,52	100,00	3.041.195.258.456,21	100,00	3.398.472.278.306,41	100,00	3.701.996.021.038,27	100,00

**data un-audited*

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

NO	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)	BERTAMBAH BERKURANG
1	**2013**	2.039.176.474.775,00	2.529.976.146.703,70	124,069	490.799.671.928,70
2	**2014**	2.597.040.772.570,49	2.920.416.697.074,56	112,45	323.375.924.504,07
3	**2015**	2.988.114.689.337,25	3.041.298.422.524,52	101,78	53.183.733.187,27
4	**2016**	3.171.734.921.968,73	3.041.195.258.456,21	95,88	(130.539.663.512,52)
5	**2017**	3.539.275.624.403,93	3.398.472.278.306,41	96,02	(140.803.346.097,52)
6	**2018***	3.566.962.941.605,00	3.701.996.021.038,27	103,79	135.033.079.433,27

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Dari Tabel 3.5. terlihat bahwa realisasi PAD berada diatas target yang ditetapkan pada tahun 2013-2015, dengan angka capaian pada tahun 2013 sebesar 123,67 persen dari target, tahun 2014 sebesar 112,12 persen dan tahun 2015 sebesar 101,78 persen. Namun realisasi pendapatan belum mampu mencapai target yang ditentukan pada tahun 2016 yang realisasinya hanya mencapai 95,88 persen dan tahun 2017 hanya mencapai 92,83 persen.

Tren penurunan realisasi pendapatan Tahun 2016, 2017 merupakan dampak sistemik perlambatan Ekonomi Global, Regional dan Nasional. Tren penurunan realisasi pendapatan Tahun 2016, 2017 merupakan dampak sistemik perlambatan Ekonomi Global, Regional dan Nasional.

3.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan hasil review terhadap komponen pendapatan daerah, komponen terbesar kedua dalam struktur pendapatan daerah adalah komponen dana perimbangan dengan kecenderungan eningkat. Share komponen dana perimbangan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan (tabel 3.6), terutama dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2016-2017), sejalan dengan peningkatan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan ini antara laoin didorong oleh adanya kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan gaji guru SMU/SMK dan sederajat dari sebelumnya pada Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi (tahun 2017). Peningkatan share komponen ini juga sejalan dengan perkembangan pertumbuhan komponen dana perimbangan pada 2 tahun terakhir (2016-2017), yang tumbuh signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Adapun sub komponen utama dari komponen dana perimbangan adalah DAU, terutama dialokasikan untuk belanja gaji pegawai. Sementara sub komponen lainnya dari dana perimbangan adalah dana DAK, yang terutama dipergunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional.

Tabel 3.6 Struktur Realisasi Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Share PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	61,57	63,80	61,22	57,94	56,72	59,30
Share Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	23,87	22,25	21,54	35,57	42,32	39,95
Share lain-lain pendapatan yang sah terhadap Total Pendapatan Daerah	14,57	13,96	17,24	6,49	0,96	0,75
Share Belanja tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)	67,41	70,15	69,68	71,16	71,63	74,71
Share Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)	32,59	29,85	30,32	28,84	28,37	25,29

**data un-audited*

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

NO	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6=(4)-(3)
1	2013	989.421.661.597,40	980.714.799.525,00	99,12	(8.706.862.072,40)
2	2014	1.054.231.694.045,00	1.018.431.008.887,00	96,60	(35.800.685.158,00)
3	2015	1.133.802.634.000,00	1.070.197.147.350,00	94,39	(63.605.486.650,00)
4	2016	1.752.129.594.784,00	1.867.010.930.284,00	106,56	114.881.335.500,00
5	2017	2.636.242.669.900,00	2.535.995.754.659,00	96,20	(100.246.915.241,00)
6	2018*	2.586.468.701.800,00	2.493.979.973.047,00	96,42	(92.488.728.753,00)

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa realisasi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada tahun 2014-2015 belum mampu melebihi target yang direncanakan. Pada tahun 2014 sebesar 96,60 persen dari target yang ditetapkan dan tahun 2015 sebesar 94,39persen. Realisasi pada tahun 2016 mampu melampaui target yang ditentukan, dengan capaian realisasi 106,55%. Penyebab belum memenuhinya target realisasi dana perimbangan adalah karena regulasi dari pemerintah pusat yang terus berubah (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden) serta efisiensi Anggaran dari APBN dan Pengadaan lelang gagal (barang tidak cocok dan tidak sesuai) yang mempengaruhi belum tercapainya target realisasi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer.

3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan pendapatan yang sah merupakan komponen dengan share terbesar ketiga dari sisi pendapatan daerah (tabel 3.8), yang cenderung menurun sejalan dengan penurunan pertumbuhan komponen ini. Share komponen lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2017 tercatat sebesar 0.80%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang tercatat sebesar 14.57%. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya komponen ini yaitu dari terkontraksi sebesar 12.30% (yoy) pada tahun 2012 menjadi terkontraksi semakin dalam sebesar 86.17% (yoy) pada tahun 2017. Adapun sub komponen utamadari komponen ini adalah bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya (data 2017) yang antara lain berupa bantuan dari dana bagi hasil pajak hotel dan restauran dari Pemerintah kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

KETERANGAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Growth Pendapatan Daerah (%;yoy)	13,13	11,40	8,53	5,66	14,16	4,18
Growth Belanja Daerah (%;yoy)	8,59	16,10	11,30	8,44	11,98	(1,24)

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

3.1.4 Perkembangan pertumbuhan realisasi belanja daerah

Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2018 mengalami tantangan yang cukup berat, khususnya terkait dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang masih menunjukkkan ketidakpastian. Hal ini berpengaruh terhadap tekanan terhadap pendapatan APBN, dimana berpengaruh terhadap dana tansfer ke daerah. Dampak dari erupsi Gunung Agung pada Akhir Tahun 2017 serta masa recovery pasca erupsi juga meberikan tekanan terhadap realisasi pendapatan serta realisasi belanja itu sendiri. Sesuai tabel 3.8 realiasi belanja daerah pada tahun 2018 sebesar Rp6,07 triliun, turun sebesar 1,24% jika dibandingan dengan kinerja belanja daerah pada tahun sebelumnya sebesar Rp5,995 triliun. Pertumbuhan negatif tersebut pertama terjadi dalam waktu 6 tahun terakhir. Perttumbuhan negatif pada tahun 2018 kontradiftif dengan pertumbuhan belanja pada tahun 2017 yang mampu mencapai angka 11,98% (yoy). Komponen yang mendorong pertumbuhan negatif tersebut adalah penurunan realisasi belanja langsung sebesar Rp1,722 triliun pada tahun 2018, turun menjadi Rp1,516 triliun pada tahun 2018. Pertumbuhan negatif sebesar 1,24% pada tahun 2018 masih didukung pertumbuhan positif belanja tidak langsung sebesar Rp4,478 triliun lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp4,348 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ke-13 serta Tunjangan Hari Raya dan tunjangan kinerjanya.

Pertumbuhan belanja pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 11,98% (yoy). Angka pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi kedua dalam rentang 6 tahun terakhir. Pencapaian signifikan ini didorong oleh perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat yang memindahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Pemindahan wewenang tersebut diiukuti oleh pemindahan status kepegawaian Guru PNS dan tenaga non PNS ke Pemerintah Provinsi Bali. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari DAU, serta linier dengan peningkatan pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi Belanja tidak langsung sebesar Rp3,857 triliun pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp4,348 triliun pada tahun 2017. Realisasi tersebut

didorong oleh penambahan pembayaran gaji guru SMK/SMA serta tenaga non PNS. Selain itu sebagai dampak dari perpindahan wewenangan pengelolaan SMA/SMK juga mendorong pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa dari Rp735 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp1,048 triliun pada tahun 2017, meningkat sebesar 42,49%.

Pengelolaan belanja APBD pada tahun 2016 mengalami tekanan yang kuat sebagai akibat dari tidak tercapainya target pendapatan asli daerah. Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah strategis dengan melakukan rasionalisasi terhadap belanja daerah. Hal ini mendorong dilakukan pemotongan anggaran pada program dan kegiatan di hampir semua perangkat daerah. Pertumbuhan realisasi belanja daerah pada tahun 2016 hanya sebesar 8,44% (yoy) turun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai angka pertumbuhan 11,30% (yoy). Pertumbuhan tersebut dipicu oleh kenaikan belanja tidak langsung yang meningkat dari Rp3,483 triliun pada 2015 menjadi Rp3,857 triluin pada tahun 2016. Peningkatan ini dipicu oleh meningkatkan alokasi belanja hibah kepada masyarakat. Realisasi belanja hibah pada tahun 2016 sebesar Rp1,116 triliun meningkat sebesar 38% dibandingkan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp809 milyar. Sedangkan untuk pertumbuhan belanja langsung pada tahun 2016 cenderung stagnan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, pertumbuhan belanja meningkat sebesar 11,30% (yoy). Pertumbuhan belanja didorong oleh belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota/desa/partai politik. Selain ini pada belanja langsung juga didorong oleh belanja pegawai dan belanja modal. Pertumbuhan belanja masih menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2016 sebesar 8,44. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya belanja hibah dan belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota/desa/partai politik. Sedangkan untuk porsi belanja lain rata-rata menunjukkan pertumbuhan positif namun tidak signifikan.

Belanja daerah didominasi oleh komponen belanja tidak langsung dengan share yang terus meningkat. Pada tahun 2013, belanja daerah tercatat tumbuh sebesar 8,59% (yoy). Pertumbuhan belanja pada tahun 2014 tumbuh sebesar 16,10% (yoy). Pertumbuhan signifikan ini didorong oleh pertumbuhan belanja tidak langsung yang tumbuh 20,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatkan realiasi belanja pegawai, belanja hibah, serta belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi masih mempunyai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas dari belanja daerah dalam mendukung berbagai program prioritas penyelenggaraaan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai upaya, seperti

kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan belanja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu evaluasi triwulan atas kinerja perangkat daerah juga efektif untuk mengejar ketepatan waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ada.

Tabel 3.9 Perkembangan Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

KETERANGAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Pagu (%)	109,19	108,19	101,37	100,59	96,30	100,69
Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap Pagu (%)	84,79	88,93	89,90	93,20	89,93	90,90

*data un-audited
Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Pada periode 2013-2018, rata-rata capaian realisasi belanja Pemerintah Provinsi Bali sebesar 89,61%. Hal ini menunjukkan kinerja pelaksaan APBD masih belum optimal karena masih terjadi deviasi atas capaian realisasi belanja. Realiasi belanja daerah sejak tahun 2013-2018 menunjukkan tren kenaikan, namun masih belum mampu mencapai 100%. Belum optimalnya kinerja realisasi belanja daerah disebabkan karena perencanaan program dan kegiatan yang belum optimal sehingga sering dilakukan revisi. Revisi anggaran menyebabkan ketidakpastian dan tertundanya keputusan alokasi anggaran. Penyebab lainnya adalah efisiensi pengandaan barang dan jasa dalam pelaksanaan belanja kegiatan. Meskipun belum optimal, namun dalam rentang 6 tahun terakhir persentase realisasi belanja daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Realisasi belanja daerah pada tahun 2014 sebesar 88,93% meningkat sebesar 4,14% jikan dibandingangan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipicu oleh peningkatan realisasi belanja hibah, dari Rp689 milyar pada tahun 2013 meningkat sebesar 25,76% menjadi Rp867 milyar. Peningkatan ini sebagai akibat dari peningkatan alokasi belanja hibah kepada masyarakat yang dirancang dalam APBD. Komponen lainyang mendorong pertumbuhan adalah peningkatan realisasi belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar 35,55% dari tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp910 milyar pada tahun 2014 meningkatkan dari tahun 2013 sebesar Rp671 milyar. Pada Tahun 2015 peningkatan kinerja realisasi belanja tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Realisasi belanja darah hanya tumbuh 0,97% menjadi 89,90%. Kondisi yang ekonomi yang stabil pada tahun 2015 mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan realisasi belanja langsung. Belanja langsung tumbuh positif sebesar 13,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2014 sebesar Rp1,340 triliun meningkat menjadi 1,515 triliun pada tahun 2015.

Realisasi belanja pada tahun 2016 mampu tercapai 93,20%, tertinggi dalam rentang 2013-2018. Hal ini disebabkan karena terjadi rasionalisasi anggaran sebagai akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah. Selain dalam hal persentase, total angka realisasi juga mengalami peningkatan. Realisasi belanja APBD tahun 2015 sebesar Rp4,999 triliun meningkat menjadi Rp5,420 triliun. Dengan memperhatikan indikator ekonomi di Bali pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Bali menurunkan target pendapatan pada tahun dari Rp5,376 triliun menjadi Rp5,218 triliun. Mekipun terjadi rasionalisasi anggaran, namun Pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen melaksanakan program-program prioritas yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh realisasi belanja hibah kepada masyarakat pada tahun 2016 sebesar Rp1,116 triliun meningkat dari realiasi tahun sebelumnya sebesar Rp809 milyar, atau sebesar 38% (yoy). Sedangkan dari komponen belanja langsung, komponen yang mempunyai kontribusi dalam pertumbuhan realisasi belanja adalah komponen belanja modal yang meningkat hampir 30% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 realisasi belanja modal sebesar Rp730 milyar, meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp562 milyar.

Pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2017 mengalami kontraksi sebesar -3,27% setelah pada tahun 2016 mencapai 93,20%. Pada tahun 2017 realisasi belanja mencapai persentase kinerja sebesar 89,93%. Angka ini melanjutkan tren pertumbuhan positif dari tahun 2013. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali dihadapkan pada permasalah perubahan wewenang pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Bali, namun dengan kebijakan pengelolaan belanja yang baik, realisasi belanja masih menunjukkan kinerja yang positif. Komponen dominan yang mendorong pertumbuhan belanja terjadi pada komponen belanja pegawai pada belanja tidak langsung serta belanja barang dan jasa pada belanja langsung. Belanja pegawai tumbuh sangat signifikan sebesar 98,14%. Realisasi belanja pegawai belanja tidak langsung pada tahun 2017 sebesar Rp1,493 triliun meningkat dari tahun 2016 yang hanya Rp753 milyar. Komponen lain yang tumbuh positif adalah belanja barang dan jasa dengan realisasi sebesar Rp1,048 triliun pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp735 milyar, atau sebesar 42,49%. Pada tahun 2018 pertumbuhan realisasi belanja hanya tumbuh 0,97% dari tahun sebelumnya menjadi 90,9%. Angka pertumbuhan belanja pada tahun 2018 masih merupakan angka un-audited. Pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2018 sangat bervariasi serta tumbuh melambat.

Bila direview lebih lanjut terkait realisasi komponen belanja, realisasi belanja tidak langsung mendominasi dibandingkan dengan realisasi belanja langsung. Pada tabel 3.10 realisasi Belanja Tidak Langsung didominasi oleh komponen belanja pegawai,

belanja hibah, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Sedangkan untuk belanja langsung didominasi oleh belanja barang dan jasa.

Tabel 3.10 Struktur Realisasi Belanja Daerah

Struktur Realisasi Belanja Daerah	2013		2014		2015		2016		2017		2018*	
	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share
Belanja	3.868.740.441.639,69	100	4.491.645.550.255,46	100	4.999.030.923.541,54	100	5.420.933.529.303,53	100	6.070.536.923.735,28	100	5.995.230.518.749,36	100
Belanja Tidak Langsung	2.607.826.785.797,38	67,41	3.151.101.685.660,05	70,15	3.483.142.654.558,28	69,68	3.857.588.696.862,33	71,16	4.348.259.186.136,59	71,63	4.478.794.934.131,77	74,71
Belanja Pegawai	624.347.012.336,89	23,94	715.280.039.489,66	22,70	733.564.305.772,00	21,06	753.993.266.108,00	19,55	1.493.989.761.722,94	34,36	1.571.379.882.668,00	35,08
Belanja Subsidi	3.999.800.000,00	0,15	10.000.000.000,00	0,32	9.819.600.000,00	0,28	9.990.000.000,00	0,26	10.000.000.000,00	0,23	9.566.400.000,00	0,21
Belanja Hibah	689.580.542.541,79	26,44	867.202.764.000,00	27,52	809.295.976.000,00	23,23	1.116.809.328.526,00	28,95	1.122.239.172.548,00	25,81	1.072.780.454.888,96	23,95
Belanja Bantuan Sosial	144.236.452.020,00	5,53	147.024.713.119,00	4,67	151.729.624.621,00	4,36	155.774.827.000,00	4,04	11.143.000.000,00	0,26	3.189.000.000,00	0,07
Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	671.432.090.241,47	25,76	910.123.409.935,70	28,88	1.088.091.711.891,51	31,24	1.026.250.937.576,02	26,60	1.098.555.278.556,60	25,26	1.191.151.306.164,59	26,61
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	472.642.327.657,23	18,12	497.128.612.920,25	15,78	690.452.391.273,77	19,82	794.578.160.468,85	20,60	612.177.419.409,05	14,08	630.540.390.410,22	14,08
Belanja Tidak Terduga	1.588.561.000,00	0,06	4.342.146.195,44	0,13	189.045.000,00	0,01	192.177.183,46	0,00	154.553.900,00	0,00	187.500.000,00	0,00
Belanja Langsung	1.260.913.655.842,31	32,59	1.340.543.864.595,41	29,85	1.515.888.268.983,26	30,32	1.563.344.832.441,20	28,84	1.722.277.737.598,69	28,37	1.516.435.584.617,59	25,29
Belanja Pegawai	41.906.917.420,00	3,32	62.150.384.900,00	4,64	83.696.355.968,00	5,52	96.558.764.493,00	6,18	13.311.657.356,00	0,77	18.996.106.794,00	1,25
Belanja Barang dan Jasa	764.537.190.295,31	60,64	907.808.175.083,53	67,72	869.956.280.003,14	57,39	735.861.830.573,66	47,07	1.048.533.246.877,49	60,88	1.053.614.499.449,19	69,48
Belanja Modal	454.469.548.127,00	36,04	370.585.304.611,88	27,64	562.235.633.012,12	37,09	730.924.237.374,54	46,75	660.432.833.365,20	38,35	443.824.978.374,40	29,27

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Share belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan dengan share belanja langsung. Perbandingan rata-rata share rata-rata belanja tidak langsung terhadap belanja dari tahun 2013-2018 sebesar 70,79%, dibandingkan dengan share rata-rata belanja langsung yang hanya 29,21%. Komponen belanja tidak langsung dengan share tinggi adalah pada komponen belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik. Pada komponen belanja tidak langsung, share belanja pegawai terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, sejalan dengan kebijakan penerimaan PNS, perpanjangan batas usia pensiun ASN, perpindahan wewenang ASN SMA/SMK. Peningkatan realisasi belanja pegawai secara signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, sebagai akibat pengalihan ASN SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Bali dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Share belanja hibah menunjukkan tren kenaikan baik secara proporsi dan nominal. Rata-rata share belanja hibah dari tahun 2013-2018 sebesar 25,98%. Bila dirinci lebih lanjut terkait dengan belanja hibah, pada tahun 2017 sub komponen utama yang mengkontribusi adalah belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat dan belanja hibah bantuan operasional sekolah (BOS). Selain hibah, komponen lain yang berkontribusi signifikan terhadap realisasi belanja tidak langsung adalah belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dengan rata-rata realisasi sebesar 27,39%. Realisasi ini sebagai dampak langsung dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Komponen Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik juga mempunyai

share tinggi dengan rata-rata realisasi dari tahun 2013-2028 sebesar 17,08%. Belanja ini didominasi oleh belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota serta desa di Bali.

Komponen belanja langsung merupakan komponen dengan share rata-rata sebesar 29,21% dibandingkan dengan belanja daerah. Rata-rata perbandingan realisasi komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal pada rentang tahun 2013-2018 masing-masing sebesar 4:60:36. Belanja barang dan jasa dominan dalam realisasi belanja karena langsung berkaitan dengan belanja kegiatan perangkat daerah. Belanja pegawai yang ditopang oleh honorarium ASN menunjukkan share penurunan meskipun secara nominal menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan positif dalam rentang tahun 2013-2018. Rata-rata proporsi belanja barang dan jasa dibandingkan dengan anggaran belanja sebesar 60%. Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2016 menunjukkan persentase sebesar 46,75%, hal ini disebabkan kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Realisasi anggaran belanja pada tahun 2018 menunjukkan persentase sebesar 69,48% atau sebesar Rp1,053 triliun atau meningkat 8,6%. Untuk komponen belanja modal cenderung menunjukkan tren penurunan pada tahun 2013-2018. Pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen untuk melakukan belanja modal yang langsung bekaitan dengan kepentingan masyarakat serta yang mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan belanja modal untuk pembangunan 2 rumah sakit yaitu Rumas Sakit Bali Mandara dan Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Persentase belanja modal cenderung menurun sampai dengan tahun 2018, dikarenakan ada kebijakan untuk melakukan saving atas belanja dalam rangkan persiapan pilkada pada tahun 2018.

Tabel 3.11 Perkembangan Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Struktur Realisasi Belanja Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Belanja Tidak Langsung	7,29	20,83	10,54	10,75	12,72	3,00
Belanja Pegawai	7,30	14,56	2,56	2,78	98,14	5,18
Belanja Subsidi	11,28	150,01	(1,80)	1,74	0,10	(4,34)
Belanja Hibah	(13,61)	25,76	(6,68)	38,00	0,49	(4,41)
Belanja Bantuan Sosial	471,70	1,93	3,20	2,67	(92,85)	(71,38)
Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	(19,47)	35,55	19,55	(5,68)	7,05	8,43
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	162,37	5,18	38,89	15,08	(22,96)	3,00
Belanja Tidak Terduga	(79,79)	173,34	(95,65)	1,66	(19,58)	21,32
Belanja Langsung	11,38	6,32	13,08	3,13	10,17	(11,95)
Belanja Pegawai	5,24	48,31	34,67	15,37	(86,21)	42,70
Belanja Barang dan Jasa	2,13	18,74	(4,17)	(15,41)	42,49	0,48
Belanja Modal	32,25	(18,46)	51,72	30,00	(9,64)	(32,80)

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Realiasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cenderung menunjukkan tren kenaikan. Belanja daerah pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp3,868 triliun dan meningkat menjadi Rp5,995 triliun pada tahun 2018, dengan persentase pertumbuhan sebesar 54,97%. Pemerintah Provinsi Bali mengandalkan sektor tersier seperti pariwisata dan perdagangan dalam menunjang PDRB Provinsi Bali. Perkembangan pertumbuhan realisasi belanja langsung dan tidak langsung sangat bervariasi namun masih menunjukkan kecenderungan rata-rata pertmbuhan yang positif setiap tahunnya. Perkembangan belanja tidak langsung cenderung lebih signifikan jika dibandingkan dengan belanja langsung. Komponen belanja yang mencatat pertumbuhan yang tinggi terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik. Persentase belanja tidak langsung pada tahun 2014 tumbuh sebesar 20,83% (yoy). Hal ini didorong oleh kebijakan penambahan alokasi belanja hibah kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan prioritas seperti bantuan hibah atas usulan masyarakat, serta pelaksanaan bedah rumah bagi masyarakat miskin. Dalam rentang tahun 2015-2017 pertumbuhan belanja tumbuh flat di kisaran 11%. Hal ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang memungkinkan peningkatan kapasitas komponen belanja tidak langsung itu sendiri. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada tahun 2018, dimana pertumbuhan belanja tidak langsung hanya sebesar 3% (yoy). Penurunan tersebut merupakan bagian dari

kebijakan pengendalian defisit anggaran untuk melakukan alokasi strategis dalam menopang program dan kegiatan prioritas.

Pertumbuhan belanja pegawai pada tahun 2014 tumbuh sebesar 14,56% (yoy). Realisasi belanja pegawai tahun 2014 meningkat menjadi Rp715 milyar, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp624 milyar. Perningkatan ini dipergunakan untuk membiayaan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS daerah. Perkembangan selanjutnya dalam rentang tahun 2015-2016, persentase pertumbuhan belanja pegawai cendeung stagnan di angka rata-rata 2,6%. Pertumbuhan signifikan terjadi pada tahun 98,14% (yoy). Peningkatan signifikan ini dipicu oleh peralihan wewenang pengolaan SMA/SMK ke dalam lingkup Provinsi Bali. Peralihan ini menyebabkan terjadinya peralihan personil guru PNS dan tenaga administrasi ke Pemerintah Provinsi Bali. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp1,493 triliun, dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya Rp753 milyar. Untuk pertumbuhan belanja pada tahun 2018 terjadi kontraksi yang cukup dalam jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan sebesar 5.18% (yoy) masih tergolong normal dan sesuai dengan perkembangan tren.

Belanja subsidi meningkat signifikan pada tahun 2014 sebesar Rp10 milyar, meningkat sebesar 150,01% (yoy) dibandingkan dengan belanja tahun 2013 yang sebesar Rp4 milyar. Pertumbuhan belanja subsidi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan tambahan subsidi kepada lembaga/perusahaan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk, sehingga harg apupuk yang diterima petani menjadi lebih murah. Meskipun angka pertumbuhan belanja subsidi dalam rentang tahun 2014-2018 menunjukkan angka yang bervariasi, namun belanja subsidi ditetapkan sebesar Rp10 milyar per tahun.

Penyerapan anggaran terhadap belanja hibah pada tahun 2014 tercatat tumbuh sebesar 25,76% (yoy) dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun sebelumnya. Realisasi belanja hibah pada tahun 2014 sebesar Rp867 milyar yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp689 milyar. Komponen belanja hibah terdiri dari belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat serta hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota serta swasta. Komponen belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi mengalami peningkatan sebagai akibat pada tahun 2013 tidak semua proposal yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Bali dapat dicairkan. Belanja hibah, baik hibah kepada masyarakat maupun hibah BOS mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar -6,68%. Realisasi belanja hibah pada tahun 2015 sebesar Rp809 milyar, lebih rendang dibandingkan realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp867 milyar. Pertumbuhan belanja hibah pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 38% (yoy). Pertumbuhan ini

lebih banyak disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja hibah BOS. Belanja BOS pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp753 milyar, sedangkan belanja hibah masyarakat sebesar Rp362 milyar. Pertumbuhan untuk tahun 2017 masih menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,49%. Meskipun demkian belanja hibah untuk organisasi kemasyarakat menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar Rp511 milyar. Pertumbuhan belanja hibah pada tahun 2018 menunjukkan kontraksi sebesar -4,41% (yoy). Hal ini didorong oleh kebijakan pengetatan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2018.

Perkembangan pertumbuhan belanja bantuan sosial cenderung menunjukkan tren penurunan. Belanja bantuan sosial diperuntukkan kepada masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinan dengan terjadinya peristiwa yang membuat masyarakat terperosok ke garis kemiskinan. Pertumbuhan negatif terhadap belanja bantuan sosial menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Bali semakin meningkat, hal ini juga didukung oleh indikator makro pertumbuhan ekonomi Bali yang mempu berada di atas rata-rata nasional.

Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Des, yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota menunjukkan tren pertumbuhan yang menurun, namun demikian realisasi belanja nya mencatat peningkatan nominal. Realisasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota ditentukan oleh bagi hasil dari Pemerintah Pusat serta realisasi pendapata asli daerah dari sektor pajak. Pada tahun 2013 realisasi belanja hasil bagi pajak yang dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar Rp671 milyar, dan sampai dengan tahun 2018 meningkat menjadi Rp1,191 triliun. Dalam rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, belanja bagi hasil pajak yang dibagikan kepada kabupaten/kota telah tumbuh sebesar 77,40%. Pada tahun 2016, realisasi belanja bagi hasil pajak menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -5,68% (yoy). Hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi menurunkan target pendapatan daerah sebagai akibat menurunkan pendapatan pajak dari sumber-sumber pendapatan yang ada.

Komponen belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, didominasi oleh belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta kepada desa. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa pakraman/desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan untuk operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Secara tidak langsung desa adat/desa pakraman berperan dalam mempertahankan kelestarian pariwisata budaya yang menjadi andalan perekonomian

di Bali. Bantuan keuangan yang dibagikan kepada kabupaten/kota merupakan usaha Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pemerataan hasil pembangunan kepada pemeirintah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena masih tingginya kesenjangan antara daerah dengan pertumbuhan pariwisata yang tingi seperti Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, serta Kota Denpasar, dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pada tahun 2015 pertumbuhan belanja bantuan kepada kabupaten/Kota dan desa meningkat sebsesar 38,89% (yoy). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mendistribusikan pendapatan yang diperoleh Provinsi Bali serta dari Kabupaten Badung kepada kabupaten/Kota dan Desa guna mendukung pemerataan pembangunan. Pada tahun 2017, pertumbuhan belanja bantuan keuangan tercatat menunjukkan pertumbuhan negarif sebesar 19,58% (yoy). Hal ini disebabkan karena Kabupaten Badung mengeluarkan kebijakan untuk menyalurkan sendiri PHR kepada kabupaten lain. Sebelumnya penyaluran PHR dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penyaluaran komponen bantuan keuangan PHR kepada kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar Rp293 milyar. Realisasi belanja tersebut turun pada tahun 2017 sebesar Rp64 milyar.

Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pertumbuhan belanja tidak terduga menunjukkan realiasi belanja yang menurun. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah berkomimen untuk meningkat anggaran belanja tidak terduga setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bal telah menganggarkan belanja tidak terduga sebesar Rp15 milyar, dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp4,5 milyar. Hal ini sebagai persiapan peristiwa erupsi gunung agung yang erupsi pada tahun 2017. Namun demikian dana tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan. Realisais belanja tidak terduga pada tahun 2018 sebesar Rp187 juta.

Belanja pegawai pada belanja langsung tumbuh hampir positif dalam rentang tahun 2013-2018, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 86,21% (yoy). Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan karena kebijakan pengetatan anggaran oleh TAPD Provinsi Bali yang didorong oleh penurunan pendapatan daerah serta penghematan belanja dalam rangka persiapan pelaksaaan pilkada pada tahun 2018. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal pertumbuhan belanja bervariasi disesuaikan dengan kondisi keuangan dan perekonomian Pemerintah Provinsi Bali. Belanja barang dan jasa cenderung tumbuh positif. Belanja barang dan jasa pada tahun 2018 mencapai Rp1,053 triliun meningkat tipis jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp1.048 triliun, atau hanya tumbuh 0,48% (yoy). Sedangkan untuk belanja modal cenderung tumbuh

negatif, namun masih diprioritasnya untuk memenuhi kebutuhan belanja modal yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat serta memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

Tabel 3.12 Perkembangan Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Secara Triwulanan

Triwulan I	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Pagu (%)	23,99	24,83	25,87	20,87	21,42	18,91
Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap Pagu (%)	8,24	8,5	6,53	7,87	5,93	8,74
Triwulan II	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Pagu (%)	53,01	53,33	49,38	49,3	48,87	52,8
Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap Pagu (%)	27,35	25,36	25,15	31,05	26,04	27,63
Triwulan III	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Pagu (%)	80,59	80,24	72,83	71,32	71,98	79,2
Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap Pagu (%)	46,54	49,78	47,46	55,89	57,02	59,01
Triwulan IV	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Pagu (%)	109,19	108,19	101,37	100,59	95,23	100,69
Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap Pagu (%)	84,79	88,93	89,9	93,2	90,27	90,90

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Bila dianalisis lebih lanjut, perkembangan persentase realisasi belanja daerah secara triwulan setiap tahun (tabel 3.12) menunjukkan realisasi belanja yang lebih lambat dibandingkan pendapatan. Dari sisi pendapatan terlihat kecenderungan bahwa persentase realisasi pendapatan dapat terealisasi secara proporsional setiap triwulan, persentase realisasi setiap akhir tahun juga selalu dapat melampaui pagu anggaran (kecuali 2017 akibat melambatnya PAD). Rata-rata proporsi realisasi pendapatan dalam setiap triwulan dalam rentang waktu 6 tahun sekali adalah masing-masing 23:51:76:102. Sedangkan dari sisi belanja daerah, terlihat kecenderungan persentase realisasi belanja yang selalu kecil pada awal periode (triwulan I) setiap tahun, kemudian baru mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan pada trwiulan II dan III setiap tahunnya dan persentase realisasi tertinggi selalu terjadi pada triwulan IV setiap tahunnya. Selain itu target pagu anggaran juga selalu tidak pernah tercapai setiap

tahun. Rata-rata realisasi belanja daerah dalam rentang waktu 6 tahun terakhir adalah 8:27:53:89.

Analisis terhadap pola penyerapan anggaran pada triwulan I dalam rentang waktu 2013-2018 menunjukkan rata-rata realisasi pendapata sebesar 23%, sedangkan rata-rata realisasi belanja sebesar 8%. Kesenjangan tersebut disebabkan lambatnya dikarenakan lambatnya penetapan anggaran bagi perangkat daerah, belum dimulainya pekerjaan fisik, serta pola kegiatan serta program yang memang lebih banyak terkonsentrasi pada triwulan III dan IV.

Pada triwulan II rata-rata penyerapan anggaran pendapatan daerah mencapai angka proporsional sebesar 51%. Sedangkan realisasi belanja daerah hanya mampu terserap 27%. Perlambatan ini menandakan kegiatan fisik maupun kegiatan dengan pagu anggaran yang besar mulai dilaksanakan, meskipun demikian penyerapan anggaran tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Hal ini berpotensi meninbulkan pembengkakan anggaran idle. Penyebab lain perlambatan pada triwulan II juga dapat disebabkan karena terlambatnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini memberikan efek penyerapan anggaran baru dimulai pada triwulan II.

Pertumbuhan pendapatan pada triwulan III rata-rata sebesar 76%. Hal ini melanjutkan pertumbuhan proporsional dalam waktu 6 tahun terakhir. Dibandingkan dengan realisasi belanja, penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali dalam rentang 6 tahun terakhir sebesar 53%. Sedangkan pada tiwulan IV, rata-rata realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran masing-masing 102% dan 89%. Hal ini menunjukkan kualitas penyerapan anggaran masih terus ditingkatkan. Pola konsumsi pemerintah daerah yang berkualitas adalah proporsional dalam setiap triwulan. Pola realisasi belanja ini menyebabkan efek multiplier dan nilai tambah konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pada beberapa lapangan usaha utama Bali tidak dapat optimal, karena distribusi realisasinya yang selalu besar akhir tahun.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada APBD Provinsi Bali Tahu 2013-2018

NO	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6=(4)-(3)
1	2013	92.549.495.000,00	189.465.280.781,01	204,72	96.915.785.781,01
2	2014	130.199.804.041,47	241.912.349.763,54	185,80	111.712.545.722,07
3	2015	170.791.011.567,00	304.991.226.263,27	178,58	134.200.214.696,27
4	2016	236.316.683.046,73	211.834.789.556,69	89,64	(24.481.893.490,04)
5	2017	284.005.848.060,93	291.230.044.442,29	102,54	7.224.196.381,36
6	2018*	249.170.667.875,00	269.937.185.233,79	108,33	20.766.517.358,79

**data un-audited*

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Dari Tabel 3.13 realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2013, 2014, 2015 berada diatas target yang ditetapkan, masing-masing 204,71 persen, 185,80 persendan 178,57persen.

Dalam komposisi pendapatan asli daerah ada dua sumber pendapatan yang menonjol yaitu pajak dan retribusi daerah yang dijelaskan berikut ini.

a. Pajak Daerah

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Pajak Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahu 2013-2018

NO	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6=(4)-(3)
1	2013	1.822.245.384.751,00	2.202.392.550.315,00	120,86	380.147.165.564,00
2	2014	2.319.637.193.750,00	2517432371210,00	108,53	197.795.177.460,00
3	2015	2.666.464.220.853,00	2.571.035.790.941,00	96,42	(95.428.429.912,00)
4	2016	2.712.178.524.265,00	2.593.093.540.850,00	95,61	(119.084.983.415,00)
5	2017	3.020.547.168.164,00	2.872.354.212.630,00	95,09	(148.192.955.534,00)
6	2018*	3.098.174.893.828,00	3.214.431.690.523,00	103,75	116.256.796.695,00

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Pada Tabel 3.14. terlihat bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2013 dan tahun 2014 mampu melampaui target yang ditentukan, dengan angka capaian pada tahun 2013 sebesar 120,86 persen dari target serta tahun 2014 sebesar 108,53 persen. Capaian realisasi pajak daerah mengalami penurunan selama kurun waktu

tahun 2015 sampai tahun 2017. Realisasi tahun 2015 hanya mampu mencapai 96,42 persen, tahun 2016 sebesar 95,61 persen dan tahun 2017 sebesar 92,07 persen.

b. Retribusi Daerah

Realisasi penerimaan dari retribusi daerah selama empat tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan lebih besar dari target yang ditetapkan, tahun 2013 sebesar 166,71 persen dari target, tahun 2014 sebesar 122,33 persen, tahun 2015 sebesar 131,30 persen, tahun 2016 sebesar 131,30 persen dan tahun 2017 sebesar 100 persen.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahu 2013-2018

NO	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6=(4)-(3)
1	2013	19.202.601.050,00	32.012.802.223,60	166,71	12.810.201.173,60
2	2014	58.591.462.700,00	71.324.627.598,00	121,73	12.733.164.898,00
3	2015	45.583.066.200,00	59.882.722.001,00	131,37	14.299.655.801,00
4	2016	50.302.452.700,00	63.858.566.092,00	126,95	13.556.113.392,00
5	2017	46.826.152.658,00	46.431.881.689,84	99,16	(394.270.968,16)
6	2018*	48.433.097.608,00	47.408.007.913,00	97,88	(1.025.089.695,00)

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

3.12 Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada saat berakhirnya tahun anggaran. Posisi aset adalah memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

daerah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pada tabel dibawah dapat dijelaskan Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi asset lancar dan asset non lancar. Aset lancer terdiri dari kas atau asset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, asset tetap dan asset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancer dan ekuitas dana investasi. Neraca dan LRA adalah laporan yang wajib disusun oleh SKPD, sedangkan PPKD selaku BUD hanya menyusun LAK dan Konsolidasi Neraca SKPD dan LRA SKPD menjadi Neraca Pemda dan LRA Pemda. Transaksi yang menjadi sumber dari mutasi rekening-rekening Neraca.

Pertumbuhan aset Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 1,93%. Rendahnya pertumbuhan aset disebabkan oleh rendahnya kinerja pertumbuhan komponen neraca. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Pada tahun 2017 aset lancar Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp668 milyar, lebih rendah dari realisasi tahun 2016 atau turun sebesar -26,06%. Komponen lain yang menyumbang perlambatan pertumbuhan aset Pemerintah Provinsi Bali adalah menurunnya jumlah investasi jangka panjang, yang turun sebesar -14,96% dari semula Rp1,409 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp1,198 trilin pada tahun 2017. Komponen yang menunjang pertumbuhan aset terjadi pada komponen aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,85%, sedangkan aset lainnya tumbuh 3,80%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adalah peningkatan sarana dan prasaran fisik pemerintah.

Tabel 3.16 Neraca Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2016 dan 2017

Uraian		2016	2017	Pertumbuhan (3-2)	% PERTUMBUHAN
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah		396.093.082.203,76	312.003.933.166,37	-84.089.149.037,39	-21,23
Kas di Bendahara Pengeluaran		173.588.883,06	23.207.346,14	-150.381.536,92	-86,63
Kas di Bendahara Penerimaan		8.111,00	60.304.200,00	60.296.089,00	743386,62
Kas di Rekening BLUD		52.394.704.259,27	58.901.539.842,57	6.506.835.583,30	12,42
Kas lainnya		0	33.247.346.813,66	33.247.346.813,66	100
Investasi Jangka Pendek		0	0	0,00	0,00
Piutang Pajak		101.867.109.803,00	30.905.709.993,00	-70.961.399.810,00	-69,66
	Penyisihan Piutang Pajak	(803.226.409,45)	(332.022.393,97)	471.204.015,48	-58,66
	Piutang Pajak Netto	101.063.883.393,56	30.573.687.599,03	-70.490.195.794,53	-69,75
Piutang Retribusi		63.465.500,00	89.738.700,00	26.273.200,00	41,40
	Penyisihan Piutang Retribusi	-22.078.503,00	-42.766.106,00	-20.687.603,00	93,70
	Piutang Retribusi Netto	41.386.997,00	46.972.594,00	5.585.597,00	13,50
Piutang Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipisahkan		188.456.139.543,90	170.569.499.720,35	-17.886.639.823,55	-9,49
	Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-942.280.697,72	-852.847.498,60	89.433.199,12	-9,49
	Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto	187.513.858.846,18	169.716.652.221,75	-17.797.206.624,43	-9,49
Piutang Lain-lain PAD yang sah		19.944.605.543,53	30.372.121.251,93	10.427.515.708,40	52,28
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	-5.396.973.442,85	-15.068.816.020,56	-9.671.842.577,71	179,21
	Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto	14.547.632.100,68	15.303.305.231,37	755.673.130,69	5,19
Beban Dibayar dimuka		79.867.488.255,82	4.546.934.658,32	-75.320.553.597,50	-94,31
	Beban dibayar dimuka (Beban Sharing JKBM)	79.804.571.589,15	4.484.017.991,65	-75.320.553.597,50	-94,38
	BebanSewa Dibayar Dimuka Dispenda	62.916.666,67	62.916.666,67	0,00	0
	Penyisihan Beban Dibayar dimuka	0	0	0,00	0,00
	Beban Dibayar dimuka Netto	79.867.488.255,82	4.546.934.658,32	-75.320.553.597,50	-94,31
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		4.100.211.518,00	4.075.501.518,00	-24.710.000,00	-0,60
	Penyisihan Piutang TGKD	-20.501.057,59	-407.550.151,80	-387.049.094,21	1887,95
	bagian ancar TGKD netto	4.079.710.460,41	3.667.951.366,20	-411.759.094,21	-10,09
Bagian Lancar tagihan Leasing Traktor		13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0
	PenyisihanPiutangTagihan Leasing Traktor	-13.900.000,00	-13.900.000,00	0,00	0

Uraian		2016	2017	Pertumbuhan (3-2)	% PERTUMBUHAN
	Bagian Lancar tagihan Leasing Traktor Netto	0	0	0,00	0
Piutang Lain-Lain		34.539.109.192,26	0,00	-34.539.109.192,26	-100
	Penyisihan Piutang Lainnya	-172.695.545,96	0,00	172.695.545,96	-100
	Piutang lainnya Netto	34.366.413.646,30	0,00	-34.366.413.646,30	-100
Persediaan		33.876.068.583,25	40.304.251.639,64	6.428.183.056,39	18,98
Jumlah Aset Lancar		**904.017.825.740,19**	**668.396.086.679,05**	**-235.621.739.061,14**	**-26,06**
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)		74.722.302.840,14	40.796.809.651,65	-33.925.493.188,49	-45,40
Investasi Permanen (Penyertaan Modal)		1.334.676.593.742,39	1.157.772.789.163,03	-176.903.804.579,36	-13,25
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**1.409.398.896.582,53**	**1.198.569.598.814,68**	-210.829.297.767,85	-14,96
ASET TETAP					
Tanah		2.879.856.373.328,50	2.849.775.124.677,50	-30.081.248.651,00	-1,04
Peralatan dan Mesin		860.874.168.739,05	1.152.140.607.540,79	291.266.438.801,74	33,83
Gedung dan Bangunan		1.663.752.512.533,93	1.802.111.239.476,13	138.358.726.942,20	8,32
Jalan, Irigasi, danJaringan		2.546.801.726.575,57	2.833.083.049.516,85	286.281.322.941,28	11,24
Aset Tetap Lainnya		47.365.814.570,67	56.059.465.908,67	8.693.651.338,00	18,35
Konstruksi Dalam Pengerjaan		23.344.265.767,00	15.111.756.633,00	-8.232.509.134,00	-35,27
Akumulasi Penyusutan		-2.217.898.872.962,98	-2.506.572.007.867,48	-288.673.134.904,50	13,02
Jumlah Aset Tetap		**5.804.095.988.552,72**	**6.201.709.235.885,46**	397.613.247.332,74	6,85
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan		0	0	0,00	0
Jumlah Dana Cadangan		**0**	**0**	0,00	0
ASET LAINNYA					
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		567.171.384.903,97	584.210.079.735,89	17.038.694.831,92	3,00
Aset Tak Berwujud		12.596.301.150,00	8.512.544.250,00	-4.083.756.900,00	-32,42
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-9.166.931.689,33	-4.261.762.803,00	4.905.168.886,33	-53,51
Aset Lain-lain		63.408.616.058,06	73.918.750.853,45	10.510.134.795,39	16,58
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		-6.263.354.575,57	-10.774.595.573,15	-4.511.240.997,58	72,03
Jumlah Aset Lainnya		**627.746.015.847,13**	**651.605.016.463,00**	23.859.000.615,87	3,80

Uraian		2016	2017	Pertumbuhan (3-2)	% PERTUMBUHAN
JUMLAH ASET		**8.554.849.314.153,75**	**8.720.279.937.842,38**	**165.430.623.688,63**	**1,93**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0	0	0,00	0
Pendapatan diterima dimuka		22.453.895.402,00	19.106.470.340,01	-3.347.425.061,99	-14,91
Utang Belanja		321.295.815.335,83	104.218.106.248,07	-217.077.709.087,76	-67,56
Utang Jangka Pendek Lainnya		21.500.000,00	43.923.961,52	22.423.961,52	104,30
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**343.771.210.737,83**	**123.368.500.549,60**	-220.402.710.188,23	-64,11
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Luar Negeri		0	0	0,00	0
Utang DalamNegeri		0	0	0,00	0
Utang Jangka Panjang lainnya		0	0	0,00	0
Jumlah Utang Jangka Panjang		**0**	**0**	0,00	0
JUMLAH KEWAJIBAN		**343.771.210.737,83**	**123.368.500.549,60**	**-220.402.710.188,23**	**-64,11**
EKUITAS		0			
Ekuitas		8.211.078.103.415,92	8.596.911.437.293,60	385.833.333.877,68	4,70
JUMLAH EKUITAS		**8.211.078.103.415,92**	**8.596.911.437.293,60**	**385.833.333.877,68**	**4,70**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**8.554.849.314.153,75**	**8.720.279.937.843,20**	**165.430.623.689,45**	**1,93**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

1. Permasalahan dan Solusi

Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendapatan daerah yaitu:

a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap pendapatan daerah.
b. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan perlu ditingkatkan.

c. Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.

Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
b. Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi.
c. Mengoptimalkan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk pendanaan pembangunan daerah.
d. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat.
e. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah
f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
g. Melaksanakan evaluasi dan pemutahiran data secara berkesinambungan.
h. Mengoptimalkan pendapatan dari piutang pajak daerah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Dalam Periode 2013-2018)

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013-2018, demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, disamping untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas alokasi dana serta adanya transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2014-2016, berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun 2014-2018, maka alokasi anggaran belanja daerah diarahkan untuk mengatasi masalah pembangunan yang bersifat mendasar meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan dan bidang infrastruktur dengan tujuan untuk mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Disamping itu penyusunan belanja daerah juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsí Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran sebelumnya, telah ditetapkan prioritas pembangunan adalah: penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, pertanian dan ketahanan pangan, industri kecil, pariwisata, investasi, UMKM dan koperasi, ketentraman dan ketertiban, pengamanan terpadu berstandar internasional, reformasi birokrasi dan tata kelola.

Pada tahun 2015 penggunaan belanja untuk aparatur sekitar 69,09 % dari total belanja daerah dan walaupun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2016 menjadi sebesar 68,77 %. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan masih dominannya persentase belanja aparatur dibandingkan belanja sektor publik. Kedepan perlu diformulasikan kembali agar proporsi belanja publik lebih besar persentase-nya dibandingkan belanja aparatur. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Bali terhadap total pengeluaran seperti tampak pada Tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Bali Tahun 2013-2018

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Belanja Pegawai) (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 %
1	Tahun 2013	796.933.028.222,07	4.662.706.195.022,90	17,09
2	Tahun 2014	918.630.388.022,27	5.271.006.963.462,39	17,43
3	Tahun 2015	985.859.970.339,59	5.760.963.656.157,19	17,11
4	Tahun 2016	945.998.378.791,62	5.866.331.660.212,32	16,13
5	Tahun 2017	1.697.826.157.562,70	6.750.176.103.311,42	25,15
6	Tahun 2018	1.688.861.346.404,54	6.596.102.545.306,96	25,60

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 3.17 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2013-2018, rata-rata pertumbuhan belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur mengalami tren kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup besar, hal ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan disebabkan oleh rasionalisasi anggaran dikarenakan tidak terpenuhinya target pendapatan. Proporsi belanja aparatus pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 25,15% dari total belanja pengeuaran. Penyebab utamanya adalah perubahan kebijakan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Perpindahan tersebut diikuti dengan meningkatnya belanja pegawai untuk membiayai gaji dan tunjangan guru serta tenaga non PNS pada SMA/SMK terebut. Selain itu, peningkatan belanja aparatur yang terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018 disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan Gaji ke-13 dan THR kepada ASN .

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tak langsung. Berikut disajikan total belanja daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Tabel 3.10 menunjukkan bahwa total belanja daerah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun realisasi cenderung lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan. Terlihat pada tabel dibawah realisasi belanja daerah Provinsi Bali berada pada tren dibawah 90% penyebabnya adalah efisiensi anggaran, tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan kurangnya perencanaan penyerapan anggaran yang baik.

Tabel 3.18Proporsi Penggunaan Anggaran APBD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

NO	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6=(4)-(3)
1	2013	4.562.576.195.022,90	3.868.740.441.639,69	84,79	(693.835.753.383,21)
2	2014	5.051.006.963.462,39	4.491.645.550.255,46	88,93	(559.361.413.206,93)
3	2015	5.560.963.656.157,19	4.999.030.923.541,54	89,90	(561.932.732.615,65)
4	2016	5.816.331.660.212,32	5.420.933.529.303,53	93,20	(395.398.130.908,79)
5	2017	6.750.176.103.311,42	6.070.536.923.735,28	89,93	(679.639.179.576,14)
6	2018*	6.595.712.545.306,96	5.995.230.518.749,36	90,90	(600.482.026.557,60)

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; danKlasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga; dan

b. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja PD berkenaan, terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Guna mendukung Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelumnya, maka alokasi anggaran untuk belanja langsung diarahkan pada program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin, pengangguran dan pemberdayaan masyarakat, menjamin ketahanan pangan, pelestarian dan pengembangan budaya, peningkatan pengelolaan insfrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.19 Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
2	BELANJA DAERAH	4.562.576.195.022,90	5.051.006.963.462,39	5.560.963.656.157,19	5.816.331.660.212,32	6.750.176.103.311,42	6.595.712.545.306,96
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.084.266.106.859,42	3.489.555.457.653,98	3.824.186.026.087,29	4.143.049.704.850,67	4.774.215.646.165,42	4.832.361.135.476,87
2.1.1	Belanja Pegawai	748.959.371.602,07	853.071.267.862,27	895.238.148.344,59	843.935.668.125,62	1.683.091.478.013,85	1.668.370.778.230,54
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	958.782.689.247,91	901.627.620.000,00	831.164.601.000,91	1.165.670.599.868,91	1.172.844.000.000,00	1.219.363.228.700,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	148.722.366.300,00	156.441.220.000,00	159.328.476.000,00	158.419.640.000,00	12.640.400.000,00	12.760.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa	685.584.473.629,37	1.019.636.090.410,48	1.217.053.686.264,82	1.159.397.161.773,69	1.256.727.191.129,92	1.249.485.906.460,99
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi / Kab/ Kota dan Pemerintahan Desadan Parpol.	510.340.167.608,37	525.144.647.423,25	699.615.226.032,69	801.374.463.398,85	634.330.014.799,12	657.307.202.110,00
2.1.8	Belanja Tidak terduga	27.877.038.471,70	23.634.611.957,98	11.785.888.444,28	4.252.171.683,60	4.582.562.222,53	15.074.019.975,34
2.2	BELANJA LANGSUNG						
2.2.1	Belanja Pegawai	1.478.310.088.163,48	1.561.451.505.808,41	1.736.777.630.069,90	1.673.281.955.361,65	1.975.960.457.146,00	1.763.351.409.830,09
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	47.973.656.620,00	65.559.120.160,00	90.621.821.995,00	102.062.710.666,00	14.734.679.548,85	20.490.568.174,00
2.2.3	Belanja Modal	942.302.514.946,48	1.067.296.041.355,41	1.010.322.403.367,90	803.093.217.384,65	1.216.374.076.983,15	1.194.161.092.523,72

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa belanja

pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk belanja gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja. Oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi APBD Provinsi Bali tahun 2013 – tahun 2017 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah disajikan dalam Tabel 3.19 Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa anggaran belanja daerah Provinsi Bali mengalami perubahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah Penerimaan PAD yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Produk Domestik Bruto, pembagian DAU yang diluar target yang direncanakan sehingga kedepannya diharapkan melakukan pembenahan serta perancanaan yang matang dalam penyusunan APBD serta perencanaan serapan anggaran yang baik.

1. Defisit Riil Anggaran

Dalam penggunaan anggaran belanja daerah Provinsi Bali dari tahun 2014 s/d tahun 2017, defisit anggaran yang terjadi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Penutupan defisit anggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Struktur APBD yang berbasis kinerja, memungkinkan terdapat SILPA pada akhir tahun anggaran dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan penerimaan Tahun anggaran. Dalam periode Tahun 2015 s/d 2017 Defisit Riil Anggaran mengalami tren penurunan. Tahun 2015 Defisit Riil Anggaran sebesar Rp231 milyar, selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar Rp221 milyar, dan di tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi Rp78 milyar. Secara rinci disajikan pada Tabel 3.20 di bawah ini.

Tabel 3.20 Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018* (Rp)
1.	RealisasiPendapatan Daerah	4.109.377.804.800,09	4.577.678.390.572,03	4.967.966.966.800,82	5.249.017.754.255,86	5.992.161.668.458,44	6.242.865.041.085,27
	Dikurangirealisasi:						
2.	Belanja Daerah	3.868.740.441.639,69	4.491.645.550.255,46	4.999.030.923.541,54	5.420.933.529.303,53	6.070.536.923.735,28	5.995.230.518.749,36
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	100.130.000.000,00	220.000.000.000,00	200.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	390.000.000,00
	Defisit riil	140.507.363.160,40	(133.967.159.683,43)	(231.063.956.740,72)	(221.915.775.047,67)	(78.375.255.276,84)	247.244.522.335,91

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Untuk menutup defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.21 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2018

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2016 (%)	2017 (%)	2018* (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	304,02	557,68	165,14
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 3.21, defisit yang terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017 mampu ditutupi oleh komponen SiLPA pada APBD. Proporsi penutupan defisit riil tergolong tinggi yaitu 304,02% pada tahun 2016 serta 557,68% pada tahun 2017. Proporsi tersebut menurun pada tahun 2018 dikarenakan APBD Tahun 2018 terjadi surplus sebesar Rp247 milyar. Analisis pembiayan ini penting untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.22 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2018

No.	Uraian	2016		2017		2018*	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	674.677.370.022,76	100	452.761.594.975,09	100	408.311.832.886,74	100
2.	Pelampauanpenerimaan PAD	53.183.733.187,27	7,88	(130.539.663.512,52)	-28,83	(140.803.346.097,52)	-34,48
3.	Pelampauanpenerimaandanaperimbangan	(63.605.486.650,00)	-9,43	114.881.335.500,00	25,37	(100.246.915.241,00)	-24,55
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	77.496.279.397,05	11,49	46.563.446.526,65	10,28	10.519.726.301,00	2,58
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	561.932.732.615,65	83,29	395.398.130.908,79	87,33	679.639.179.576,14	166,45
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0,00		0,00		0,00
7.	Kegiatanlanjutan	0	0,00		0,00		0,00
8	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.670.111.472,79	6,77	26.458.345.552,17	5,84	-40.796.811.651,88	-9,99

*data un-audited

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Dari tabel 3.22 di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2016-2018), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 masih dijumpai permasalahan seperti diuraikan dibawah ini.

1) Kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan karena dalam pelaksanaan belanja daerah pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis namun secara fisik program, kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Hanya saja ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kegagalan dalam proses lelang.

2) Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum di bidang pendapatan, tetapi baru dilaksanakan sebatas pembinaan dan belum sampai pada pengenaan sanksi.(Narasi disesuaikan dg Tahun).
3) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam Tata Kelola Keuangan Daerah.
4) Belum tergalinya sumber-sumber pendapatan sebagai alternatif pendanaan pembangunan.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi:

1) Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi serta mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
2) Mengembangkan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam Tata Kelola Keuangan Daerah.
3) Pengelolaan Aset secara optimal dengan membentuk BUMD Aset.
4) Belum tergalinya sumber-sumber pendapatan sebagai alternatif pendanaan pembangunan.
5) Mengembangkan kerjasama dengan privat sektor khususnya yang bersumber dari Coorporite Social Responsibility (CSR)
6) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan.
7) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
8) Mengadakan penagihan tunggakan pajak.
9) Mengusulkan untuk online dengan BPD Bali.
10) Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana dan prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBD Bali 2019-2023

Berdasarkan hasil analisis dari data realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali (data realisasi tahun 2012-2017), maka dapat kami informasikan asumsi dan beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyususnan proyeksi APBD Provinsi Bali 2019-2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyusunan proyeksi realisasi APBD Provinsi Bali (Pendapatan Belanja Daerah) pada tahun 2019-2023 disusun mengacu kepada realisasi APBD Provinsi Bali pada tahun 2018, mengacu kepada pagu anggaran 2018 yang telah diterima dari BPKAD Provinsi Bali. Sementara itu, realisasi mengacu kepada persentase realisasi APBD Bali Tahun 2017.
- Penyusunan proyeksi APBD dilakukan berdasarkan asumsi konservatif dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pada kurun wakyu 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) dan prakiraan realisasi tahun 2018.

- Penyusunan proyeksi realisasi APBD telah mempertimbangkan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali, meskipun dalam kurun waktu rata-rata 5 tahun terakhir (2012-2016) menunjukkan kinerja yang signifikan yaitu tumbuh sebesar 6.53% (yoy), namun bila melihat kinerja ekonomi Bali dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2015-2016), kinerja ekonomi Bali cenderung tumbuh di bawah pertumbuhan rata-ratanya, bahkan pada tahun 2017 kinerja ekonomi Bali diperkirakan kembali tumbuh lebih rendah dan melambat dalam kisaran 5.70% (yoy) -6.10% (yoy), sebagai dampak peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung. Dengan kondisi tersebut, penyusunan proyeksi APBD mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang relative moderat. Selain itu, tingkat inflasi diasumsikan cukup terkendali dalam periode 2019-2023.
- Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini juga belum mempertimbangkan bila terjadi kondisi force majeur, seperti bencana alam yang tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi Bali, khususnya industry pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi, sehingga pada gilirannya akan memepngaruhi seluruh kinerja komponen pendapatan daerah khusunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen lain-lain pendapatan yang sah maupun realisasi belanja daerah secara umum.
- Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini, belum mempertimbangkan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 2019-2023 yang akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, anatara lain kebijakan dana perimbangan, retribusi, perpajakan, bantuan keuangan dan pengelolaan cashflow anggaran dari sisi pendapatan, termasuk dari sisi belanja (kebijakan pengembangan infrastruktur, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja barang dan jasa serta bantuan social).
- Penyusunan proyeksi APBD tahun 2019-2023 disusun dengan skema pendekatan pesimis dan optimis, sebagai range dalam proyeksi realisasi APBD ini.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mendorong peningkatan realisasi pendapatan daerah dan mendorong peningkatan nilai tambah serta kontribusi realisasi belanja terhadap ekonomi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Dalam rangka mendorong peningkatan PAD, perlu dirumuskan strategi dan langkah-langkah progresif dalam upaya untuk mendorong sumber-sumber PAD baru. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi:
  - ✓ Untuk mengurangi ketergantungan pendapatan pajak dari pajak kendara bermotor yang berpotensi ke depan akan terus menurun, maka pengembangan

destinasi wisata danau dan sungai seperti kegiatan wisata arung jeram dan pemancingan serta kegiatan water sport yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak air permukaan sebagai salah satu komponen dari pendapatan pajak daerah dapatmenjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan.

- ✓ Mendorong peningkatan peran dan pengembangan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendorong peningkatan laba BUMD tersebut. Peningkatan peran dan pengembangan ini dapat dilakukan antara lain dengan keterlibatan BUMD terkait dalam pengelolaan aset-aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan (dengan persetujuan DPRD Provinsi Bali). Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan aser tersebut dapat dipergunkan sebagai tujuan daerah destinasi wisata untuk kegiatan Meetings, Incentives, Conventions, and Events (MICE) seperti kawasan Wisata Nusa Dua maupun pengembangan pusat pengembangan kawasan industry teknologi informasi, sejalan dengan posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Tentunya dibutuhkan kerjasama yang strategis antara BUMD dengan pihak swasta untuk mewujudkan hal ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD khususnya untuk sub komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui pendapatan laba dari penyertaan modal pada BUMD.
- ✓ Pengembangan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Provinsi bali untuk paket wisata kesehatan. Tentunya hal ini merupakan usulan fungsi tambahan uyang dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisman eke Bali dengan memanfaatkan infrastruktur kesehatan yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Wisata kesehatan dapat difokuskan untuk pengobatan berbagai macam penyakit yang dikombinasikan dengan paket wisata termasuk dalamnya pelayanan kesehatan untuk manula. Strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah khususnya untuk sub komponen lain-lain PAD yang sah.
- ✓ Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, khusunya terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tersebut, baik melalui pengembangan aplikasi non tunai (mobile aplikasi) mupun memperbanyak distribusi layanan antara lain melalui kerjasama dengan PT. POS Indonesia yang memiliki jaringan kantor yang tersebar luas, maupun Lembaga Perkreditan Desa(LPD) selain peningkatan frekuensi kegiatan samsat keliling.

- Untuk mendorong peningkatan kontribusi dan nilai tambah realisasi belanja daerah terhadap kinerja ekonomi Bali, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan tahapan untuk mendorong percepatan realisasi belanja daerah sesuai dengan targetnya. Persentase realisasi yang besar dan signifikan diupayakan untuk dapat dilakukan lebih awal dibandingkan periode sebelumnya khususnya untuk komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan ini tentunya memerlukan upaya percepatan tahapan pengadaan (barang dan jasa serta modal), antara lain melalui percepatan tahapan pengadaan yang dapat dilakukan pada tahun sebelum masa anggaran dimulai ataupun pada periode awal masa anggaran, sehingga realisasi pengadaan dan belanja dapat dipercepat.
- Dalam rangka mendorong akselerasi kinerja ekonomi Bali, maka prioritas anggaran pembangunan dapat ditujukan untuk mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, diharapkan prioritas anggaran pembangunan dapat difokuskan pada pengembangan produk olahan untuk hilirisasi hasil pertanian dalam arti luas, yang berorientasi ekspor seperti kopi dan kakao serta pengembangan komoditas perikanan yang berorientasi ekspor baik hasil budidaya maupun komoditas olahan hasil perikanan tangkap.
- Dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, prioritas anggaran pembangunan juga dapat dialokasikan untuk mendorong peningkatan konektivitas anatara Bali Selatan dengan Wilayah Bali lainnya, antara lain melalui pembangunan jalan tol, kereta api dan shortcut jalan. Pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur ini juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui skema public private partnership.
- Untuk mendorong nilai tambah ekspor terhadap ekonomi Bali, maka perlu dilakukan upaya pengembangan pelabuhan ekspor dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas produk ekspor Bali, sehingga pada gilirannya akan mendorong peningkatan nilai tambah komoditas ekspor Bali pada kinerja ekonomi Bali.

Sedangkan kapasitas riil keuangan Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 disajikan pada Tabel 3.23 di bawah ini.

Tabel 3.23 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Tahun Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**	**6.323.498.505.003**	**6.762.859.708.258**	**7.216.869.063.732**	**7.707.117.795.627**	**8.238.430.171.596**
	a. Pendapatan Asli Daerah	3.587.699.210.503	3.918.126.137.849	4.203.363.118.218	4.514.751.365.285	4.855.018.972.768
	b. Dana Perimbangan	2.662.026.888.500	2.796.942.592.409	2.964.759.147.954	3.142.644.696.831	3.331.203.378.641
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.772.406.000	47.790.978.000	48.746.797.560	49.721.733.511	52.207.820.187
2	**BELANJA PEMERINTAH PROVINSI**	**6.833.565.626.694**	**8.128.465.923.026**	**8.419.026.636.736**	**8.756.893.387.948**	**9.230.372.436.896**
	a. Belanja Tidak Langsung	4.702.083.968.693	5.174.239.720.503	5.425.247.853.224	5.694.207.964.396	5.982.574.215.605
	b. Belanja Langsung	2.131.481.658.001	2.954.226.202.523	2.993.778.783.512	3.062.685.423.552	3.247.798.221.291
3	**SURPLUS/DEFISIT (1 - 2)**	**-510.067.121.691**	**-1.365.606.214.768**	**-1.202.157.573.004**	**-1.049.775.592.321**	**-991.942.265.300**
4	**PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI (a - b)**	**510.757.121.691**	**1.365.606.214.768**	**1.202.157.573.004**	**1.049.775.592.321**	**991.942.265.300**
	a. Penerimaan	510.757.121.691	1.365.606.214.768	1.202.157.573.004	1.049.775.592.321	991.942.265.300
	b. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut berupa total penerimaan/pendapatan yang direncanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai Tabel 3.23, dalam tahun anggaran 2019 s/d 2023, pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali sebesar 15,36% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Belanja langsung dan Belanja tidak langsung menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah "Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,

Bansos dan Bagi Hasil Kab/Kota. Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Data Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.23 diatas. Angka tersebut merupakan prediksi yang dihitung berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai dengan urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II, Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah dan kebijakan nasional yang definitive harus dilaksanakan oleh kepala daerah pada tahun rencana, seperti untuk prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen). Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat serta merupakan prioritas belanja wajib yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan prioritas II merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing PD di Provinsi Bali. Program prioritas kedua ini sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bansos organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kab/kota dan pemerintah desa serta bidang belanja tak terduga.

Berikut kami sajikan data Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali sesuai perhitungan dari Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No.	Jenis Dana	Proyeksi Anggaran (Rp x juta)				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Prioritas I	1.303.042	1.352.497	1.404.335	1.458.465	1.514.998
2	Prioritas II	651.521	676.249	702.168	729.232	757.499
3	Prioritas III	977.281	1.014.373	1.053.251	1.093.849	1.136.248
Total		2.961.458	3.073.857	3.191.671	3.314.693	3.443.177

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 3.24 yang menyajikan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023, diketahui bahwa Alokasi Kapasitas Riil dialokasikan untuk mendanai Prioritas I, disusul Prioritas III dan Prioritas II dengan persentase Prioritas I sebesar 44%, Prioritas III 33% dan Prioritas II 22% konsisten dalam lima Tahun kedepan Tahun 2019-2023.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini mengacu pada kondisi capaian pembangunan periode 2013-2018 maupun permasalahan dimasa yang akan datang difokuskan pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu: Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Berdasarkan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" 3 (tiga) dimensi utama permasalahan pembangunan Bali diuraikan kedalam beberapa sub permasalahan pembangunan sesuai masing-masing dimensi sebagai berikut :

1. Alam Bali

- ☐ Lahan pertanian semakin berkurang (4 dan 5)
- ☐ Menurunnya jumlah subak (2,3,4 dan 5)
- ☐ Pantai semakin rusak akibat abrasi (4,5 dan 6)
- ☐ Sumber mata air yang aktif semakin berkurang (4 dan 5)
- ☐ Memudarnya kesucian, keagungan, dan taksu alam bali (2,3,4 dan 5)
- ☐ Rusaknya ekosistem laut, danau dan sungai (4,5 dan 6)
- ☐ Munculnya kriminal dan masalah sosial lainnya (4 dan 5)
- ☐ Kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah (badung, denpasar dan gianyar) (1,2,4 dan 5)
- ☐ Masalah lingkungan lainnya (1,2,4,5 dan 6)

2. Krama (Manusia) Bali

- ☐ Mengalami perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif (2,3,4 dan 5)
- ☐ Cenderung pragmatis (2,3,4 dan 5)
- ☐ Konsumtif (2,3,4 dan 5)
- ☐ Moralitas menurun (2,3,4 dan 5)
- ☐ Kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal (2,3,4 dan 5)
- ☐ Melemahnya kohesi sosial (ikatan manyama braya/solidaritas) (2,3,4 dan 5)

3. Kebudayaan Bali

Eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas:

- ☐ Kelembagaan (1,2,3,4 dan 5)
- ☐ Sarana dan prasarana (1,2,3,4 dan 5)
- ☐ Sumber daya manusia (2,3,4 dan 5)
- ☐ Sistem nilai (2,3,4 dan 5)
- ☐ Pranata budaya (1,2,3,4 dan 5)

Berdasarkan sub permasalahan pembangunan sesuai 3 (tiga) dimensi utama pembangunan Bali kedepan dikaitkan dengan analisis gambaran umum kondisi daerah pada Bab II dapat ditarik permasalahan pembangunan Bali 5 (lima) tahun kedepan periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Kesenjangan

Kesenjangan masih menjadi permasalahan pembangunan yang harus diatasi di Provinsi Bali. Kesenjangan yang dimaksud, yaitu kesenjangan dari sisi penduduk, antar wilayah, antar sektor, dan gender.

- Kesenjangan Penduduk: Aspek kependudukan dalam pembangunan dapat menjadi peluang dan menjadi permasalahan dalam pembangunan. Penduduk dapat menjadi aset berharga dalam mendukung pembangunan jika dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan jika tidak diberdayakan secara optimal. Dalam hal ini, masalah meningkatnya jumlah penduduk dan ketimpangan penduduk akan menjadi sumber berbagai masalah pembangunan yang sudah dan akan terjadi di Provinsi Bali, yaitu masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jumlah penduduk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun, jumlah penduduk tidak merata diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kota Denpasar yang luas wilayahnya terkecil di Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 914,3 ribu jiwa pada tahun 2017. Besarnya jumlah penduduk Kota Denpasar, terlampau jauh dengan Kabupaten Klungkung yang memiliki jumlah penduduk terendah di Provinsi Bali yaitu 177,4 ribu jiwa pada tahun 2017.

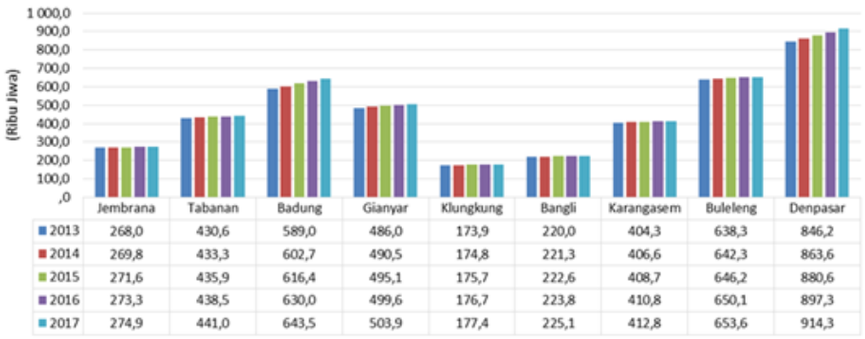

	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
2013	268,0	430,6	589,0	486,0	173,9	220,0	404,3	638,3	846,2
2014	269,8	433,3	602,7	490,5	174,8	221,3	406,6	642,3	863,6
2015	271,6	435,9	616,4	495,1	175,7	222,6	408,7	646,2	880,6
2016	273,3	438,5	630,0	499,6	176,7	223,8	410,8	650,1	897,3
2017	274,9	441,0	643,5	503,9	177,4	225,1	412,8	653,6	914,3

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki pertumbuhan penduduk di atas 1,5 persen pada tahun 2015-2016. Sedangkan Kabupaten lainnya memiliki pertumbuhan penduduk di bawah 1 persen. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran. Dalam 10 tahun terakhir TFR (angka kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya persentase pasangan usia subur yang sedang memakai alat kontrasepsi (*current use*) dan berubahnya pola pemilihan metode kontrasepsi dari metode jangka panjang yang tingkat kelangsungan pemakaiannya (*continuation rate*) lebih tinggi ke metode jangka pendek yang tingkat kelangsungannya lebih pendek. Migrasi yang masuk ke Kota Denpasar dan Kabupaten Badung disebabkan karena pesatnya perkembangan sektor pariwisata di dua Kabupaten/Kota tersebut yang menjadi daya tarik bagi pencari kerja sehingga terjadi perpindahan penduduk. Hal tersebut berarti akan terkait dengan kesenjangan antar sektor dan antar wilayah.

- Kesenjangan Antar Sektor: Selain kesenjangan penduduk, masih adanya kesenjangan antar sektor dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Bali. Sektor yang dimaksud yaitu antara sektor pariwisata dan pertanian. Hal tersebut terlihat dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) memberikan kontribusi paling dominan sebesar 22,82 persen pada tahun 2016, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 14,74 persen. Sektor pertanian awalnya adalah penggerak perekonomian Provinsi Bali sebelum sektor pariwisata mendominasi. Perlambatan sektor pertanian disebabkan oleh cenderung menurunnya hasil produksi karena kapasitas produksi yang cenderung stagnan. Selain itu, dipengaruhi juga oleh penurunan keterlibatan petani. Hal tersebut juga tidak dapat terlepas dari semakin meningkatnya sektor pariwisata.

Meningkatnya sektor pariwisata dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain keramahtamahan, kebersihan lingkungan, daya tarik objek wisata, ketersediaan berbagai fasilitas pariwisata, dan lainnya. Dampak dari meningkatnya sektor pariwisata yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut akan berpengaruh pada terjadinya alih profesi dari sektor pertanian ke sektor pariwisata.

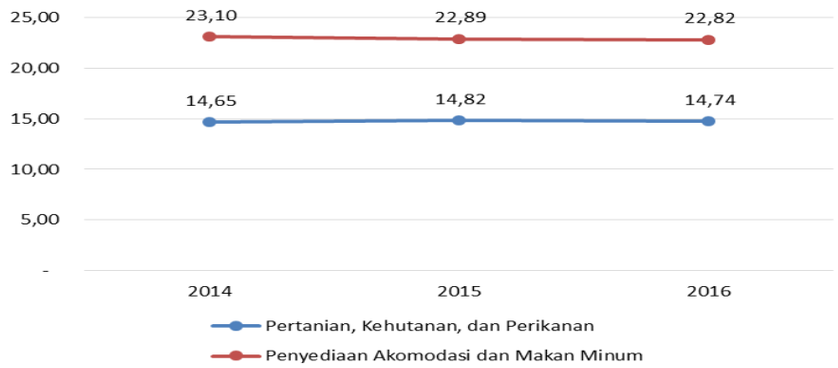

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.2 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2014-2016

- Kesenjangan Antar Wilayah: Kesenjangan antar wilayah juga masih terjadi, yaitu Kabupaten Badung menjadi daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 73.251.000, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bangli yaitu Rp. 24.743.000. Penyebab kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali apabila dikaitkan dengan struktur perekonomian adalah persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpangan dalam menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata. Sektor pariwisata di Provinsi Bali masih terkonsentrasi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar, sehingga berpengaruh terhadap tingginya pendapatan per kapita di daerah tersebut.

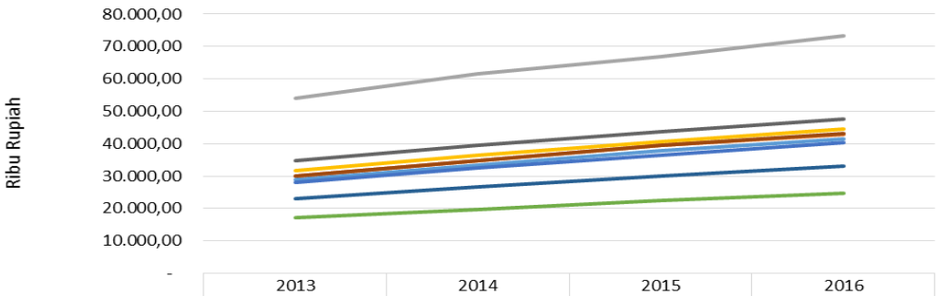

	2013	2014	2015	2016
Kab. Jembrana	28.991,99	33.431,41	37.825,45	41.360,00
Kab. Tabanan	30.114,49	34.770,82	39.465,52	42.805,00
Kab. Badung	53.972,89	61.495,41	66.974,17	73.251,00
Kab. Gianyar	31.620,98	36.510,81	40.502,24	44.470,00
Kab. Klungkung	28.176,41	32.473,79	36.496,65	40.292,00
Kab. Bangli	17.179,49	19.799,59	22.418,77	24.743,00
Kab. Karangasem	22.985,55	26.525,16	30.104,79	33.017,00
Kab. Buleleng	29.992,66	34.779,91	39.448,77	43.176,00
Kota Denpasar	34.730,86	39.613,09	43.679,00	47.632,00

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.3 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

- Kesenjangan Gender: Kesenjangan gender juga masih terjadi di Provinsi Bali. Selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan angkatan kerja perempuan mencapai 45,67 persen pada tahun 2015. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 50 persen dan menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan masih di bawah angkatan kerja laki-laki. Angkatan kerja perempuan ini bekerja di berbagai sektor pembangunan seperti sebagai ASN, pegawai swasta, perdagangan dan lainnya. Keterlibatan perempuan sebagai tenaga professional juga masih dibawah laki-laki yaitu 45,46 persen pada tahun 2015, dan sumbangan pendapatan perempuan baru sebesar 36,39 persen pada tahun 2015. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif hanya mencapai 7,27 persen dan pada Pemulihan Umum Legislatif tahun 2014 meningkat menjadi 7,90 persen. Walaupun terjadi peningkatan, namun masih jauh dari 30 persen kuota yang di tetapkan dalam Undang–Undang Pemilu. Proporsi perempuan pekerja bebas non pertanian Provinsi Bali pada tahun 2016 sebatas 25,53% dari total 129.932 orang pekerja bebas non pertanian. Artinya penduduk laki-laki masih mendominasi pekerja bebas non pertanian di Provinsi Bali. Dari sisi pendidikan, terlihat bahwa angka melek huruf pada tahun 2016 sebesar 96,37% penduduk laki-laki dan 89,23% untuk perempuan. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Provinsi Bali.

  Perkembangan gender dapat dilihat secara nasional dengan menggunakan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 62,99, hal ini menunjukan hasil yang kurang menggembirakan. Capaian tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi se Pulau

Jawa dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat, bahkan sempat turun pada tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Jika diperbandingkan dengan beberapa Provinsi se Pulau Jawa, maka nampak posisi Provinsi Bali berada paling bawah dan jaraknya cukup jauh. Artinya para perempuan Bali dalam hal kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih di bawah dari para perempuan di provinsi se Pulau Jawa.

Tabel 4.1 Rumusan Permasalahan Kesenjangan

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Kesenjangan Penduduk	Tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran
Kesenjangan Antar Sektor	Terjadinya perlambatan sektor pertanian dan sektor pariwisata yang berkembang pesat
Kesenjangan Antar Wilayah	Persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpangan dalam menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata
Kesenjangan Gender	Belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Provinsi Bali

2. Lingkungan Hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Bali pada akhir RPJMD 2013-2018 menunjukkan angka yang cukup baik, yaitu sebesar 62,48. Meskipun capaian cukup baik, namun belum dapat mencapai target Bali *Green Province*, yaitu sebesar 70. Hal tersebut disebabkan karena tingkat tutupan lahan masih relatif kecil, yaitu 37,20. Tingkat tutupan lahan yang relatif kecil disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan yang cukup tinggi dan kondisi lahan kritis yang berbatu dan kritis air. Permasalahan tersebut juga disebabkan karena laju percepatan kematian pohon yang ditanam lebih besar dari tingkat tanaman yang hidup. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi bukan pertanian mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah subak. Selain permasalahan tutupan lahan, permasalahan lingkungan yang lain yaitu rusaknya pantai akibat abrasi, sumber mata air yang aktif semakin berkurang, rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai.

Penanganan masalah sampah juga menjadi perhatian yang penting. Jumlah timbulan sampah semakin meningkat dari 9.809,64 m^3/hari pada tahun 2013 menjadi

12.892,12 m^3/hari pada tahun 2017. Hal tersebut memerlukan penanganan yang serius, karena sampah dapat menimbulkan dampak negatif lainnya yang tidak diinginkan. Penanganan sampah di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan dari 67,1 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 75 persen pada tahun 2016. Meskipun menunjukkan peningkatan, namun penangan sampah selama kurun waktu 2014 sampai 2016 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 76 persen pada tahun 2016.

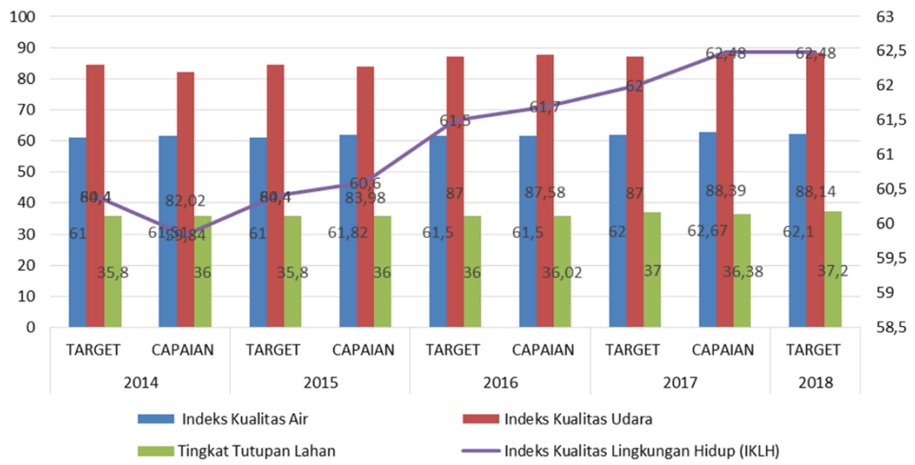

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.4 Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2014-2018

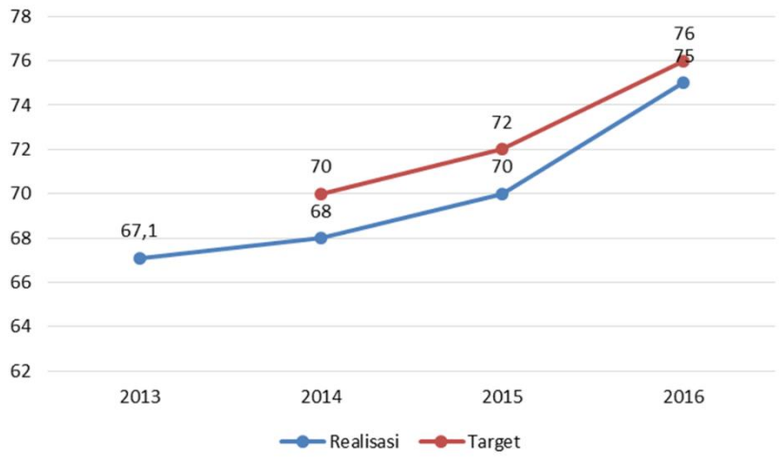

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.5 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

Tabel 4.2 Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Tingkat tutupan lahan yang relatif kecil	• Terjadinya alih fungsi lahan yang cukup tinggi dan kondisi lahan kritis yang berbatu dan kritis air • Laju percepatan kematian pohon yang ditanam lebih besar dari tingkat tanaman yang hidup
Penurunan jumlah subak	Terjadin alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
Rusaknya pantai akibat abrasi, sumber mata air yang aktif semakin berkurang, rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai	• Pembangunan yang masif tanpa memperhatikan tata ruang • Kesadaran dan perilaku masyarakat yang kurang menjaga lingkungan/alam • Perubahan iklim dan bencana
Penanganan sampah	• Meningkatnya jumlah penduduk dan wisatawan • Belum efektifnya penangan sampah melalui 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) • Infrastruktur penanganan sampah yang masih kurang

3. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali cenderung meningkat selama kurun waktu 2013 sampai 2015 mencapai 5,25 persen. Angka tersebut mulai mengalami penurunan menjadi 4,15 persen pada tahun 2016. Capaian jumlah penduduk miskin tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 3,83-3,75 persen pada tahun 2016. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, hanya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang persentase kemiskinannya di bawah 3 persen. Persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota lainnya masih diatas 3 persen, bahkan ada sampai 6 persen yaitu di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali tahun 2016 sebesar 77,24 persen. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 90 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali cenderung meningkat sebesar 1,79 persen pada tahun 2013 menjadi 1,99 persen pada tahun 2015. Tingkat pengangguran terbuka mulai mengalami penurunan mencapai 1,89 persen pada tahun 2016. Kecenderungan peningkatan tingkat pengangguran salah satunya disebabkan karena terjadi *mismatch* (tenaga kerja dengan lapangan kerja). Dalam hal ini, karena lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Bali hanya terpusat di Kabupaten Badung dan sebagian besar dari sektor jasa dan pariwisata. Sementara lulusan sekolah berasal dari semua jenis jurusan yang ada, seperti ekonomi, teknik, MIPA, hukum, dan lain-lain.

Persentase wirausaha muda masih belum terlalu besar hanya sebesar 0,81 persen selama tahun 2013 sampai 2017. Angka tersebut masih belum ideal, yaitu minimal jumlah wirausaha sebesar 2 persen. Jumlah wirausaha muda ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut karena semakin banyak wirausaha, maka peluang lapangan kerja akan semakin besar sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang terjadi.

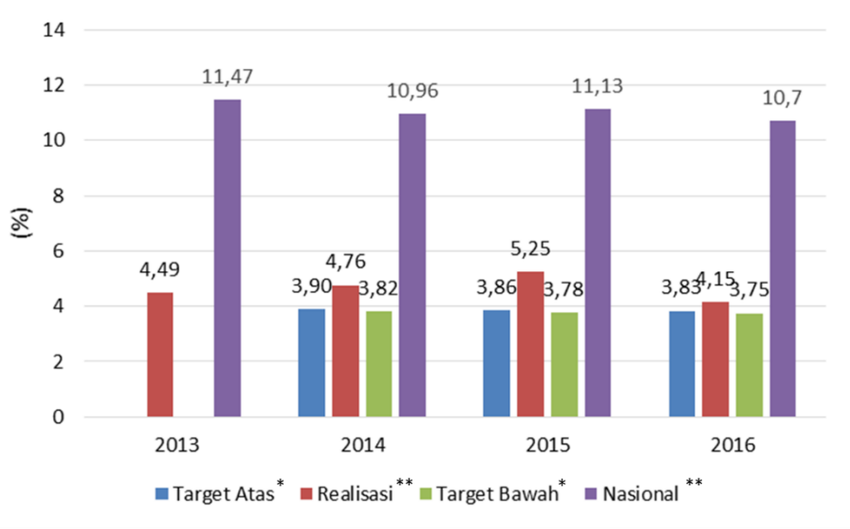

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 2013-2016

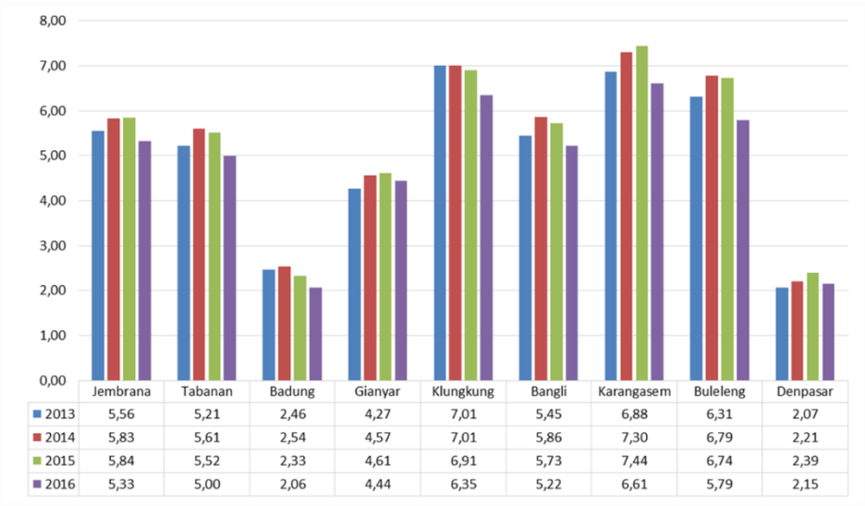

	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
2013	5,56	5,21	2,46	4,27	7,01	5,45	6,88	6,31	2,07
2014	5,83	5,61	2,54	4,57	7,01	5,86	7,30	6,79	2,21
2015	5,84	5,52	2,33	4,61	6,91	5,73	7,44	6,74	2,39
2016	5,33	5,00	2,06	4,44	6,35	5,22	6,61	5,79	2,15

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.7 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

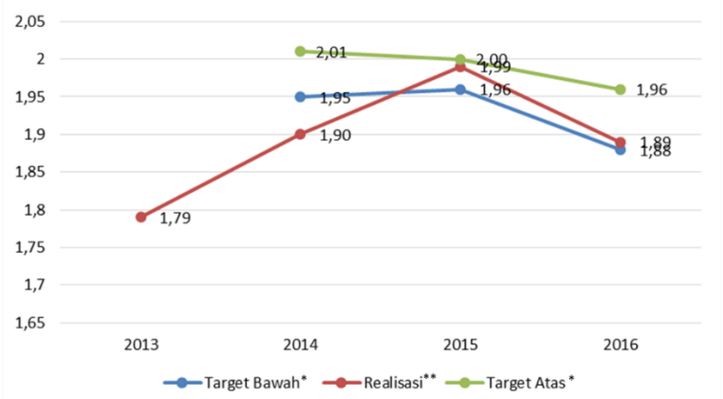

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.8 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

Tabel 4.3 Rumusan Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Kemiskinan dan pengangguran	• Terjadi *mismatch* (tenaga kerja dengan lapangan kerja) • Persentase wirausaha muda masih belum terlalu besar

4. Kualitas SDM

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan yang terjadi dari sisi pendidikan yaitu terkait dengan rata-rata lama sekolah. Meskipun rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 8,36 pada tahun 2016, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 9,37. Adapun penyebab rata-rata lama sekolah ini dikarenakan berkaitan dengan putus sekolah, seperti tidak melanjutkan sekolah, DO (*Drop Out*), dikeluarkan dari sekolah. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, rata-rata lama sekolah juga belum merata. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 11,14 di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Karangasem 5,48 pada tahun 2016. Selain rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD yaitu 26,63, SMP yaitu 11,75, dan SMA yaitu 23,35. Capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan untuk SD yaitu 96,9, SMP yaitu 100, dan SMA yaitu 97,5.

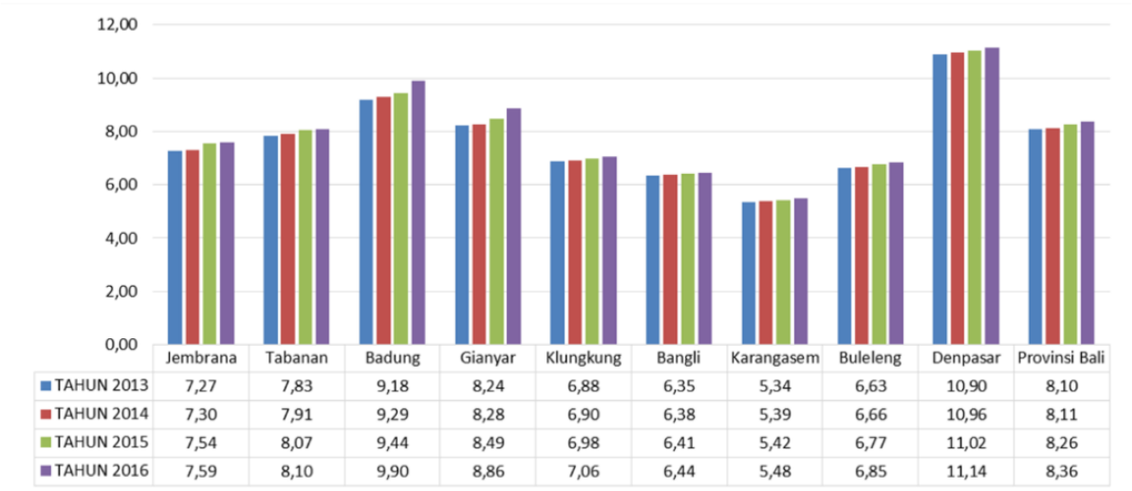

	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar	Provinsi Bali
TAHUN 2013	7,27	7,83	9,18	8,24	6,88	6,35	5,34	6,63	10,90	8,10
TAHUN 2014	7,30	7,91	9,29	8,28	6,90	6,38	5,39	6,66	10,96	8,11
TAHUN 2015	7,54	8,07	9,44	8,49	6,98	6,41	5,42	6,77	11,02	8,26
TAHUN 2016	7,59	8,10	9,90	8,86	7,06	6,44	5,48	6,85	11,14	8,36

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.9 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

Permasalahan dari sisi kesehatan yaitu angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH) cenderung meningkat dari 5,49 pada tahun 2013 menjadi 6,01 pada tahun 2016. Pada tahun 2016, AKB tertinggi ada di Kabupaten Gianyar sebesar 12,98, sedangkan terendah ada di Kota Denpasar yaitu 0,95. Permasalahan yang berkaitan dengan kematian bayi di Provinsi Bali antara lain adalah penyebab kematian masih didominasi oleh karena BBLR dan asfiksia, masih adanya disparitas angka kematian bayi antar kabupaten/kota.

Selain itu, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup juga cenderung meningkat dari 5,94 pada tahun 2013 menjadi 6,99 pada tahun 2016. Angka kematian balita tertinggi pada tahun 2016 yaitu ada di Kabupaten Gianyar sebesar 16,43. Sedangkan, angka kematian balita terendah ada di Kota Denpasar yaitu 1,09. Kematian balita disebabkan oleh BBLR dan asfiksia yang masih cenderung tinggi, penyakit infeksi lainnya, trauma/kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya balita.

Jumlah balita gizi buruk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013 sampai 2016. Pada tahun 2013, jumlah balita gizi buruk sebesar 86 balita terus meningkat menjadi 102 balita pada tahun 2016.

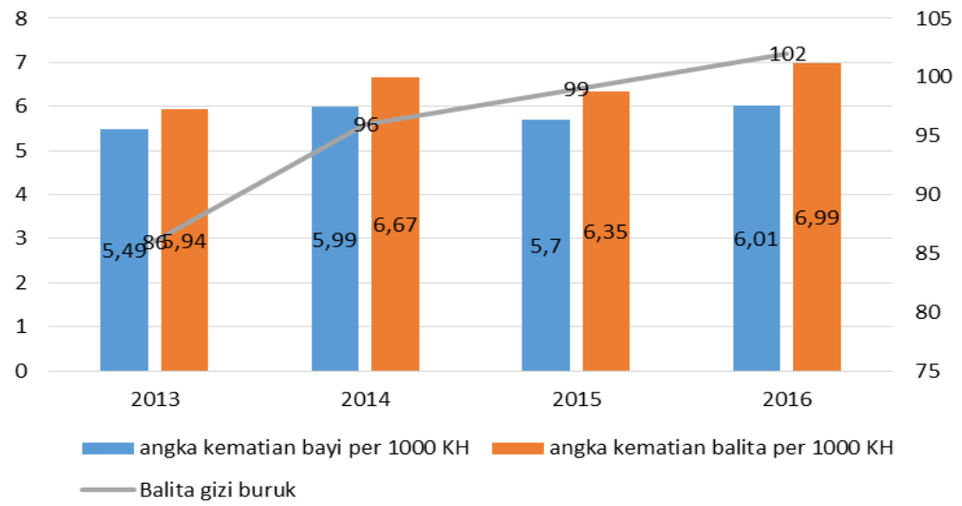

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.10 Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2013-2016

Jika dilihat dari jumlah tenaga kesehatan, cenderung mengalami penurunan dan terjadinya kesenjangan antar Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah dokter terbesar pada tahun 2017 yaitu Kota Denpasar sebesar 419 dokter dan yang terendah yaitu Kabupaten Klungkung sebesar 34 dokter. Rasio tenaga perawat selama kurun waktu 2013 sampai 2017 terus mengalami penurunan. Rasio tenaga perawat tahun 2013 sebesar 832 terus mengalami penurunan menjadi 544 pada tahun 2017. Rasio tenaga bidan cenderung mengalami penurunan dari 1.441 tahun 2013 menjadi 947 pada tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah perawat terbesar ada di Kota Denpasar yaitu 2.444 perawat dan yang terendah ada di Kabupaten Jembrana yaitu 302 perawat. Tenaga bidan terbesar pada tahun 2017 ada di Kota Dengan yaitu 916 bidan dan yang terendah ada di Kabupaten Klungkung yaitu 248 bidan.

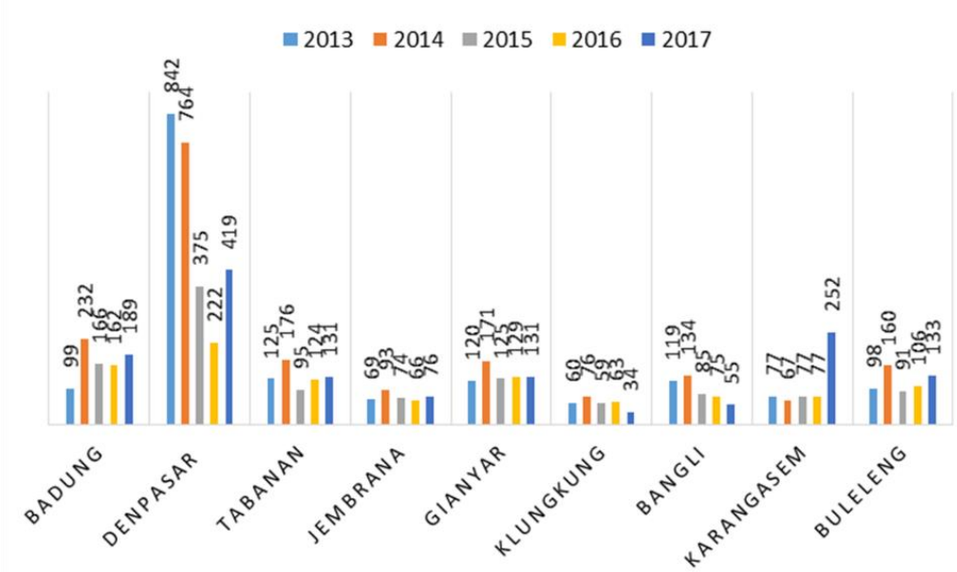

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.11 Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

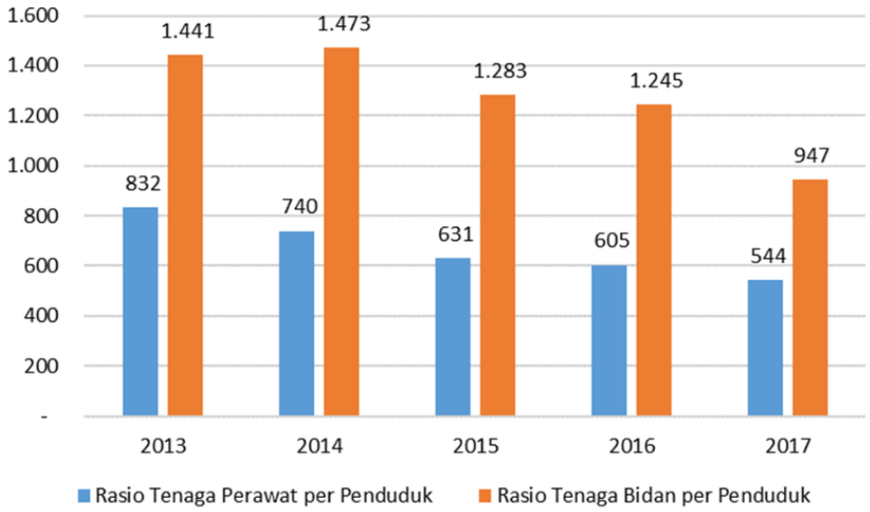

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.12 Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Selain dari sisi pendidikan dan kesehatan, permasalahan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali yaitu terjadinya perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif. Manusia Bali dahulu terkenal karena *jemet* (rajin, tekun), *seken, saja, beneh, luwih,* serta *undagi* (kreatif), sehingga menghasilkan karya-karya berbasis budaya tinggi. Perilaku Manusia Bali dahulu juga bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, dengan ciri yang rendah hati seperti *tragia, ipil-ipil* (sedikit demi sedikit tetapi konsisten), *lascarya* (tulus dan ikhlas), *lemuh tusing elung* (luwes tetapi tidak mudah patah), *dabdab* (teratur, sopan, dan matang), loyal serta berdedikasi tinggi. Manusia Bali saat ini memiliki cenderung konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal. Selain itu, manusia Bali dahulu sangat kuat dalam kohesi sosial yang ditunjukkan dengan ikatan *menyama braya* atau solidaritas. Namun saat ini ikatan *menyama braya* cenderung melemah.

Tabel 4.4 Rumusan Permasalahan Kualitas SDM

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Rata-rata lama sekolah yang belum mencapai target dan belum merata	Masih adanya putus sekolah, seperti tidak melanjutkan sekolah, DO (Drop Out), dikeluarkan dari sekolah
Cenderung meningkatnya kematian bayi, balita dan gizi buruk	Kuantitas tenaga kesehatan dan penyebaran yang belum merata
Terjadinya perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif	• Cenderung konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan local • ikatan *menyama braya* cenderung melemah

5. Sarana dan Prasarana

Permasalahan sarana dan prasarana yang terjadi di Provinsi Bali yaitu persentase panjang jalan provinsi dalm kondisi mantap dan jumlah rumah tidak layak huni. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 79,53 dan meningkat menjadi 83,58 pada tahun 2017. Namun, mengalami penurunan menjadi 80,81 pada tahun 2018. Selama kurun waktu 2013 sampai 2018, persentase panjang jalan dalam kondisi mantap belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85,54 pada tahun 2018. Kendala yang dihadapi yaitu volume/beban kendaraan yang melintas dan perbaikan utilitas yang jaringannya dibawah jalan serta keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan yang sifatnya berkala.

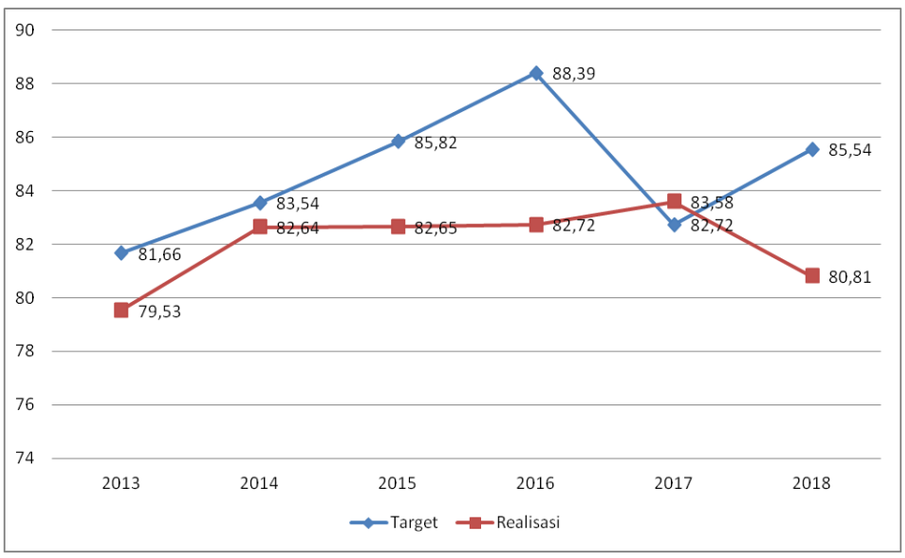

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.13 Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2016

Di Provinsi Bali, Jumlah rumah tidak layak huni terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah rumah tidak layak huni yang dihimpun dari kabupaten kota sebanyak 52.425 unit. Kendala yang dihadapi adalah masih perlunya kajian yang komprehensif guna memperoleh data yang akurat terkait penanganan di bidang perumahan (jumlah rumah tidak layak huni, ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau, kesesuaian rumah yang bercirikan adat dan budaya).

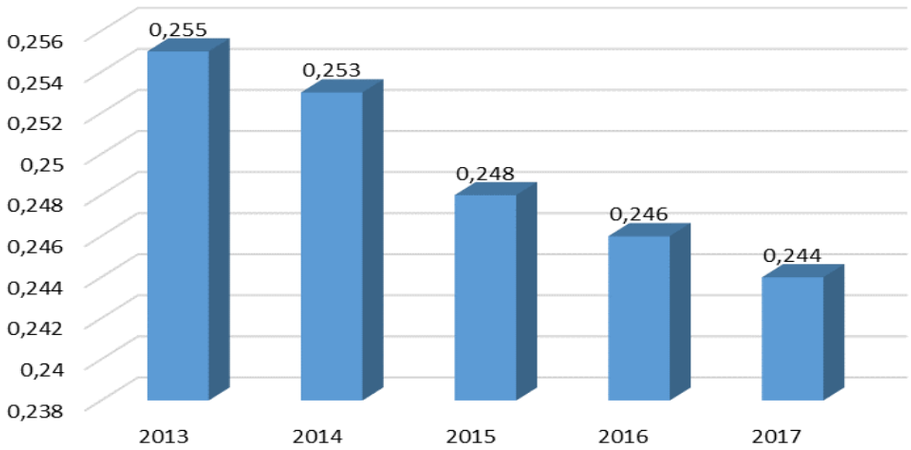

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.14 Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Tabel 4.5 Rumusan Permasalahan Sarana dan Prasarana

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Terjadi penurunan persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dan belum mencapai target	Volume/beban kendaraan yang melintas dan perbaikan utilitas yang jaringannya dibawah jalan serta keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan yang sifatnya berkala
Rasio rumah layak huni cenderung mengalami penurunan	Masih perlunya kajian komprehensif dilakukan guna memperoleh data akurat terkait penanganan di bidang perumahan (jumlah rumah tidak layak huni, ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau, kesesuaian rumah yang bercirikan adat dan budaya)

6. Pariwisata

Jumlah daya tarik wisata (DTW) dapat dikatakan stagnan yaitu berjumlah 233 DTW selama tahun 2015 sampai 2017. Bahkan sempat mengalami penurunan dari 216 DTW pada tahun 2013 menjadi 197 DTW pada tahun 2014. Pada tahun 2017, jumlah daya tarik wisata yang terbesar yaitu daya tarik wisata alam sebesar 132, kemudian diikuti oleh DTW budaya sebesar 88, dan DTW buatan sebesar 13. Jumlah DTW terbanyak menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2017 yaitu ada di Kabupaten Gianyar dengan 61 DTW dan yang terendah ada di Kota Denpasar yaitu 9 DTW. Berdasarkan data tersebut, DTW perlu dipertahankan dan ditingkatkan jumlahnya. Selain itu, masing-masing Kabupaten/Kota agar lebih menggali lagi potensi DTW yang terdapat di daerahnya masing-masing, terutama daerah-daerah yang masih memiliki jumlah DTW sedikit.

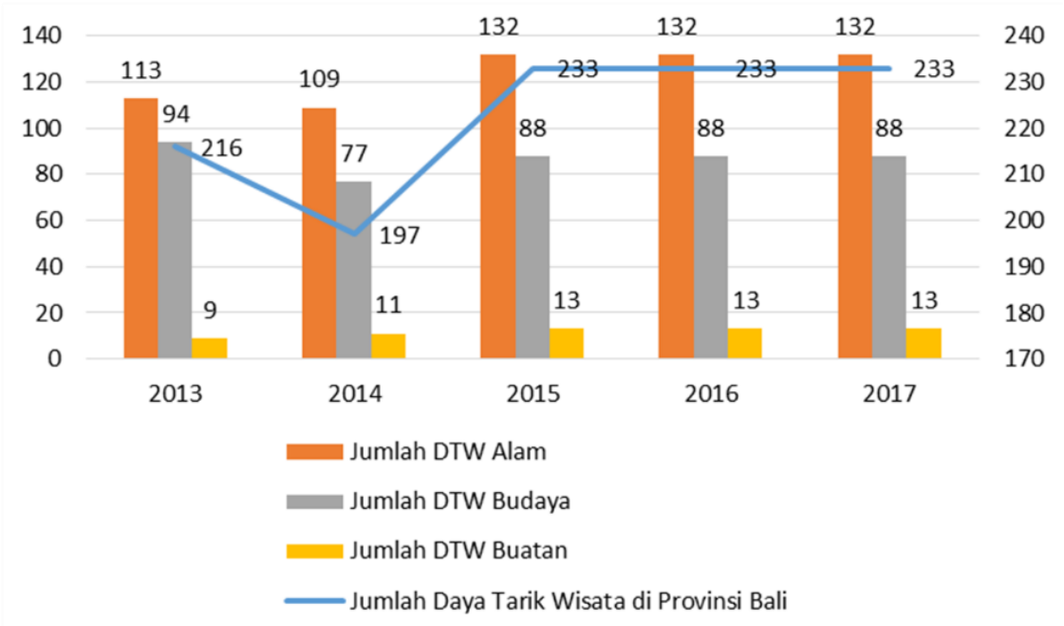

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.15 Jumlah DTW di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

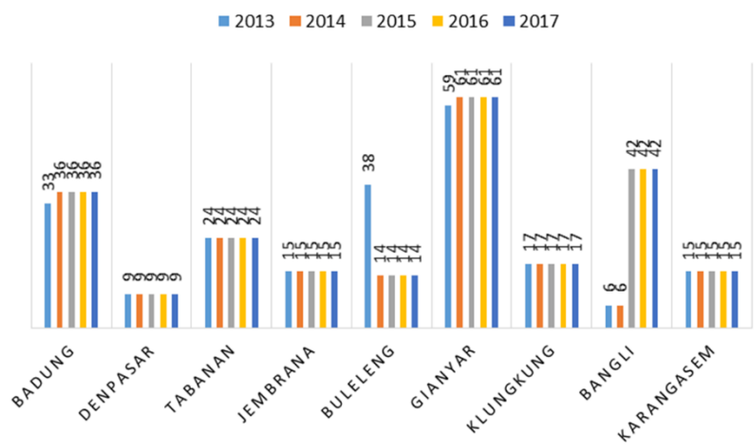

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.16 Jumlah DTW Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Jumlah akomodasi pariwisata di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 2.573 akomodasi pada tahun 2013 menjadi 4.883 akomodasi pada tahun 2016. Namun, jumlah akomodasi mengalami penurunan hingga mencapai 4.290 akomodasi pada tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah akomodasi terbanyak ada di Kabupaten Gianyar dengan 1.294 akomodasi yang terdiri atas 16 hotel bintang, 199 hotel melati, dan 1.079 pondok wisata. Sedangkan jumlah akomodasi terendah ada di Kabupaten Bangli dengan 28 akomodasi yang terdiri atas 6 hotel melati dan 22 pondok wisata.

Tabel 4.6 Rumusan Permasalahan Pariwisata

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Jumlah DTW yang stagnan dan akomodasi yang belum merata	• Tidak meratanya DTW alam karena faktor bentang alam • Belum optimalnya menggali potensi DTW yang ada

7. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembenahan terklait dengan birokrasi dan layanan umum. Meskipun sudah mulai ada perubahan, namun masih perlu dioptimalkan. Perlu adanya pengembangan ASN agar kualitas ASN dalam menjalankan tugas dapat lebih optimal. Berdasarkan data, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal menunjukkan penurunan dari 80 persen pada tahun 2014 menjadi 3 persen pada tahun 2017.

Selain itu, permasalahan lainnya yang belum optimal yaitu tindak lanjut temuan di pengawasan Provinsi Bali. Persentase tindak lanjut temuan di pengawasan Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan dari 51 pada tahun 2013 menjadi 16 pada tahun 2015. Namun, sudah mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 menjadi 27.

Tabel 4.7 Rumusan Permasalahan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas ASN dalam menjalankan tugas	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami penurunan

8. Bencana dan Perubahan Iklim

Sistem peringatan dini adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut dengan tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko terkena bencana. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali yang baru berdiri hanya memiliki sistem peringatan dini yang jumlahnya belum banyak.

Hal yang sama juga terjadi pada jumlah transportasi tanggap darurat yang jumlahnya belum banyak dan untuk transportasi udara tanggap darurat belum ada. Untuk jumlah peralatan komunikasi, hanya memiliki 20 HT pada tahun 2017. Radio pemancar dan peralatan komunikasi lainnya pada tahun 2017 belum tersedia. Jumlah peralatan kesehatan, peralatan air bersih, MCK mobil, peralatan berat, peralatan hunian sementara, dan peralatan kebakaran belum tersedia pada tahun 2017. Namun, pada

tahun 2016 telah terdapat 1 buah tandu dan 3 tabung oksigen, dan 1 unit mobil tangki air.

Bencana alam belakangan ini sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, gempa bumi, puting beliung, erupsi gunung berapi, arus laut dan gelombang tinggi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selain itu provinsi Bali juga rawan untuk terjadinya tsunami. Pada tahun 2016, kejadian bencana yang jumlahnya diatas 100 kejadian yaitu pohon tumbang dengan 426 kejadian, kebakaran sebesar 345 kejadian, dan tanah longsong sebanyak 176 kejadian. Di masa yang akan datang, perubahan iklim akan mempengaruhi terjadinya bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 4.8 Rumusan Permasalahan Bencana dan Perubahan Iklim

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya penanganan bencana	• Sistem peringatan dini dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas

9. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas tanaman pangan utama menjadi salah satu permasalahan pembangunan. Hal tersebut terlihat dari data produktivitas padi yang cenderung menurun dari 62,14 per hektar pada tahun 2015 menjadi 60,42 pada tahun 2017. Produktivitas jagung juga mengalami penurunan dari 33,17 per hektar pada tahun 2016 menjadi 31,22 per hektar pada tahun 2017. Produktivitas kedelai pada tahun 2014 sebesar 15,28 per hektar dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 mencapai 12,92 per hektar.

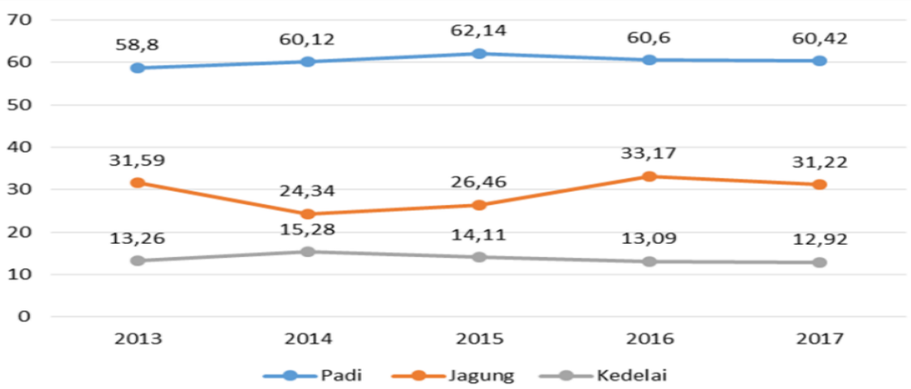

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.17 Produktivitas Bahan Pangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

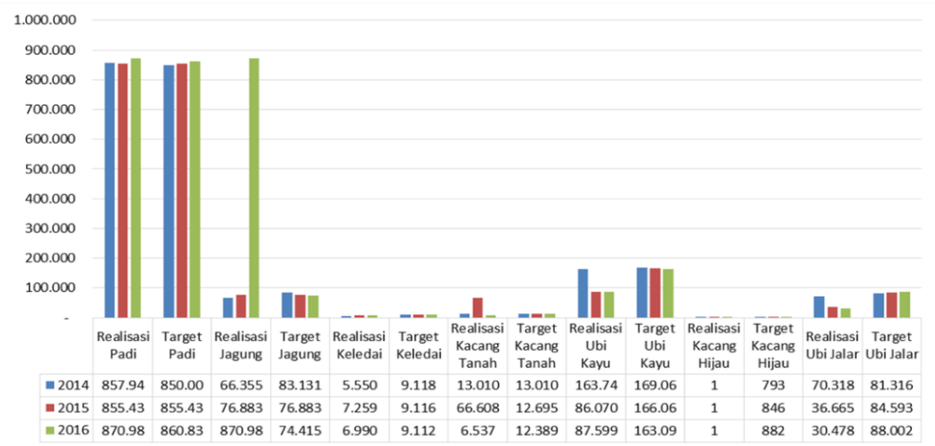

	Realisasi Padi	Target Padi	Realisasi Jagung	Target Jagung	Realisasi Keledai	Target Keledai	Realisasi Kacang Tanah	Target Kacang Tanah	Realisasi Ubi Kayu	Target Ubi Kayu	Realisasi Kacang Hijau	Target Kacang Hijau	Realisasi Ubi Jalar	Target Ubi Jalar
2014	857.94	850.00	66.355	83.131	5.550	9.118	13.010	13.010	163.74	169.06	1	793	70.318	81.316
2015	855.43	855.43	76.883	76.883	7.259	9.116	66.608	12.695	86.070	166.06	1	846	36.665	84.593
2016	870.98	860.83	870.98	74.415	6.990	9.112	6.537	12.389	87.599	163.09	1	882	30.478	88.002

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.18 Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2014-2016

Ketersediaan beberapa bahan pangan utama masih belum mencapai target yang ditetapkan. Ketersediaan kedelai pada tahun 2016 sebesar 6.990 ton, angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 9.112 ton. Ketersediaan kacang tanah baru sebesar 6.537-ton pada tahun 2016 dan belum mencapai target sebesar 12.389 ton. Hal yang sama juga terjadi pada ubi kayu, ketersediaan ubi kayu sebesar 87.599-ton sedangkan target yang ditetapkan sebesar 163,09 ton. Ketersediaan kacang hijau baru mencapai 1-ton pada tahun 2016, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 882 ton. Ubi jalar pada tahun 2016 sebesar 30.478 ton, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 88.002 ton. Permasalahan produktivitas dan produksi bahan pangan di Provinsi Bali disebabkan oleh penurunan luas lahan pertanian dan sektor pertanian mulai ditinggalkan oleh petani. Selain itu, pengelolaan pertanian hingga saat ini masih dikelola secara tradisional sehingga hasil produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Untuk mempertahankan produksinya tanaman pangan lebih banyak bergantung pada peningkatan produktivitas mengingat kapasitas lahan yang sulit ditingkatkan.

Selain penurunan produktivitas tanaman pangan utama, jumlah produksi kelautan dan perikan juga mengalami penurunan. Jumlah produksi kelautan dan perikanan pada tahun 2016 sebesar 229.403,58-ton dan mengalami penurunan menjadi 113.734,46-ton pada tahun 2017. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya jumlah kapal yang digunakan sebagai sarana menangkap ikan. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan tidak ada perpanjangan moratorium izin usaha kapal eks. asing. Selain itu, penyebab menurunnya produksi karena berkurangnya kapal–kapal bergroup dan adanya peraturan terkait pelarangan pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal pengangkut. Pelarangan pemindahan hasil tangkapan tersebut secara otomatis mengakibatkan merosotnya hasil produksi perikanan tangkap, dan

armada lokal tidak memiliki marka ikan yang bisa langsung digunakan menangkap dan menyimpan ikan.

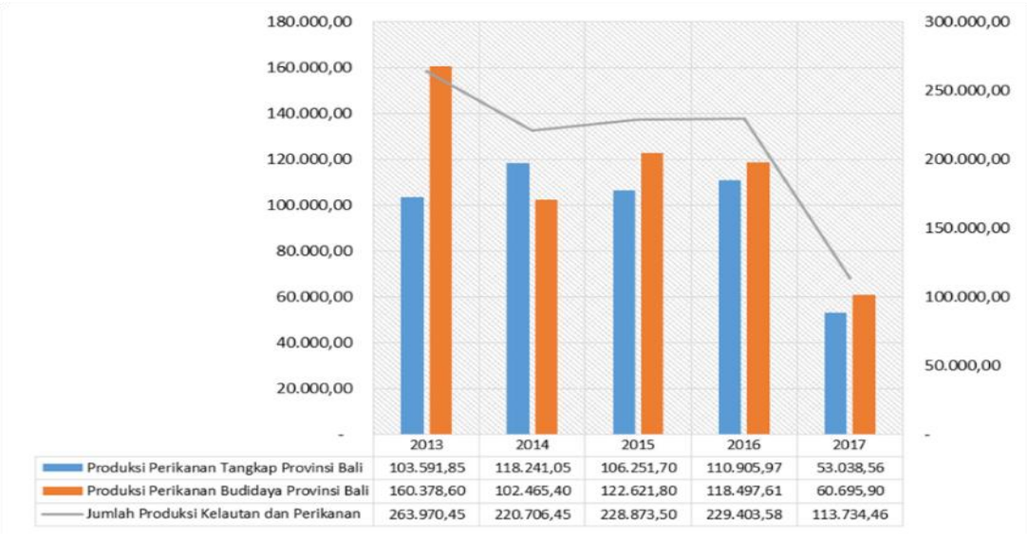

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.19 Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali Tahun 2013-2017

Tabel 4.9 Rumusan Permasalahan Rendahnya Produktivitas

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Penurunan produktivitas tanaman pangan	• Penurunan luas lahan pertanian • Sektor pertanian mulai ditinggalkan oleh petani • Pengelolaan pertanian hingga saat ini masih dikelola secara tradisional sehingga hasil produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim
Penurunan jumlah produksi kelautan dan perikanan	• Berkurangnya jumlah kapal yang digunakan sebagai sarana menangkap ikan • Adanya kebijakan tidak ada perpanjangan moratorium izin usaha kapal eks. Asing • Berkurangnya kapal–kapal bergroup dan adanya peraturan terkait pelarangan pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal pengangkut • Armada lokal tidak memiliki marka ikan yang bisa langsung digunakan menangkap dan menyimpan ikan

10. Kebudayaan Bali

Kebudayaan Bali adalah aset yang sangat penting dan berharga, sehingga pembangunan kebudayaan Bali tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Akan tetapi, pembangunan kebudayaan Bali saat ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan

karena politik legislasi dan politik anggaran yang kurang memadai. Budaya lokal tidak mengalami kemajuan yang berarti kecuali hanya untuk sarana komoditas ekonomi dan pariwisata saja. Selain itu, arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan kurang kuat. Permasalahan lainnya adalah eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas, baik itu kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, dan pranata budaya.

Tabel 4.10 Rumusan Permasalahan Kebudayaan Bali

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan Bali	• Politik legislasi dan politik anggaran kurang memadai • Arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan kurang kuat

4.2 Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis adalah situasi aspek internal dan eksternal baik itu yang statis maupun yang dinamis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Analisis lingkungan strategis perlu diperhatikan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan interaksi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan daerah, sehingga dapat mempertajam arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Analisis lingkungan strategis secara singkat dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.11 Analisis Lingkungan Strategis

ANALISIS INTERNAL	ANALISIS EKSTERNAL
Strenghts (kekuatan): 1. **Sinergitas alam dan budaya** 2. **Wilayah relatif kecil dan penduduk yang homogen** 3. **Bali sebagai "*brand*" yang sudah mapan:** • **Keramahan (*hospitality*)** • **Budaya yang kuat (*culture*)** • **Alam yang asri (*nature*)** 4. **Infrastruktur sudah memadai** 5. **Besarnya penduduk usia produktif**	***Opportunity* (Peluang):** 1. Globalisasi produk dan tenaga kerja 2. Perkembangan teknologi terutama *e-commerce* 3. Berkembangnya gaya hidup *back to nature*: • Pariwisata berbasis budaya dan alam • Produk pangan organik • *Hand-made products*
Weaknesses (Kelemahan): 1. **Kualitas SDM (pendidikan & kesehatan)** 2. **Produktifitas relatif rendah** 3. **Kesenjangan antar wilayah, antar**	***Threats* (Ancaman):** 1. Perubahan iklim global dan bencana alam 2. Penetrasi budaya luar 3. Dinamika politik nasional/internasional

	sektor dan jender	4. Berkembangnya tujuan wisata baru nasional dan internasional
4.	**Birokrasi belum berfungsi secara optimal**	

4.3 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada, dan melihat Bali sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia serta sebagai etalase bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan. Terdapat enam rumusan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Enam isu strategis yang dimaksud, yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, *sustainability*/keberlangsungan, reformasi birokrasi dan layanan umum, serta perubahan iklim dan penanganan bencana.

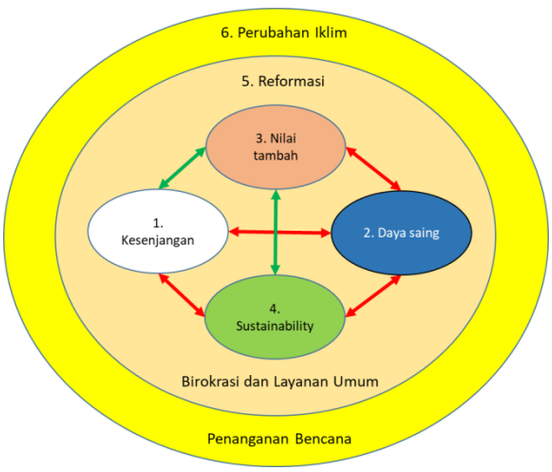

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Gambar 4.20 Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Berdasarkan gambar isu strategis, terdapat empat isu strategis di tataran program Pemerintah Provinsi Bali yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Empat isu strategis yang dimaksud yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, dan keberlangsungan (*sustainability*). Keempat isu strategis tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nantinya program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan keempat isu strategis tersebut tidak dapat dilakukan terpisah harus saling terintegrasi melalui pendekatan THIS (*Targetted*, *Holistic*, *Integrated,* dan *Spatial*). Dalam hal ini, *targetted* berarti harus ada target yang dapat diukur, dapat dicapai, dan waktu pencapaiannya jelas. *Holistic* dan *integrated* berarti program yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari hulu sampai hilir maupun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, *spatial* berarti adanya detail

lokasi dan pemanfaatan tata ruangnya. Untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keempat isu strategis tersebut, sangat tergantung dari kapasitas dan kualitas dari birokrasi. Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi dan layanan umum untuk menunjang pelaksanaannya agar keempat isu strategis tersebut dapat ditangani dengan baik. Selain itu, perlu juga memperhatikan faktor ekternal yaitu kondisi geografis Provinsi Bali dan perubahan iklim yang menyebabkan besarnya risiko bencana yang dapat terjadi. Faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi keempat isu strategis tersebut.

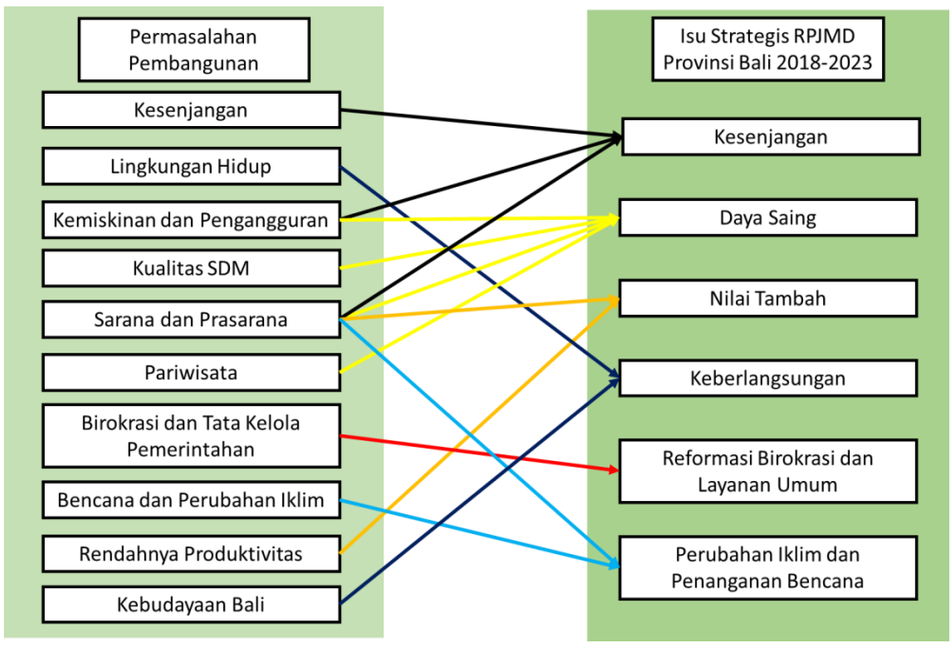

Gambar 4.21 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali 2018-2013

Enam isu strategis tersebut terkait dengan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran, serta sarana dan prasarana sangat terkait dengan isu strategis kesenjangan. Sedangkan isu strategis daya saing terkait dengan permasalahan pembangunan kemiskinan dan pengangguran, kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta pariwisata. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta rendahnya produktivitas terkait dengan isu strategis nilai tambah. Permasalahan pembangunan lingkungan hidup dan kebudayaan Bali terkait erat dengan isu strategis keberlangsungan. Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang menjadi permasalahan pembangunan sangat terkait dengan isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta bencana dan perubahan iklim memiliki keterkaitan dengan isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana.

Isu strategis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, namun berkaitan juga dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Permaslahan yang dimaksud yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Isu strategis keberlangsungan sangat terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana erat kaitannya dengan permasalahan alam Bali. Sedangkan isu strategis daya saing sangat terkait dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis nilai tambah terkait dengan permasalahan manusia dan kebudayaan Bali. Isu strategis kesenjangan erat kaitannya dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis yang terakhir yaitu reformasi birokrasi dan layanan umum terkait dengan isu strategis yang lainnya dan terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Enam isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya telah sinkron dengan lima prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali. Lima prioritas dan sasaran pembangunan tersebut, yaitu (1) pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar, (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, (3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, (4) menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, (5) peningkatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berkualitas. Keterkaitan isu strategis dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.12 Relasi Isu Strategis Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali

ISU STRATEGIS	LINGKUP	PRIORITAS	PENDUKUNG
Kesenjangan	• Antar Wilayah (utara vs selatan) • Antar Sektor (pariwisata vs pertanian)	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar • pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Nilai Tambah & Produktivitas	• Produktivitas produksi, budaya dan lahan	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Daya Saing	• Destinasi & atraksi wisata • Produk lokal (*Made in Bali*) • Sumber Daya Manusia • Investasi	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar	• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
***Sustainability*/ Keberlangsungan**	• Daya Dukung Lingkungan • Ketahanan Budaya • Kualitas Sumber Daya Manusia	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum	• Reformasi Birokrasi • Administrasi Publik • Tata Kelola • Ketertiban	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas	
Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana	• Mitigasi dampak perubahan iklim • Penataan lingkungan	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • menjaga ketentraman dan ketertiban serta	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • peningkatan

	• Kebencanaan	pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas	pelayanan dasar

4.3.1 Kesenjangan

Isu strategis kesenjangan terkait dengan kesenjangan antar wilayah (utara dengan selatan) dan antar sektor (pariwisata dengan pertanian). Isu strategis kesenjangan ini juga telah sinkron dengan prioritas pembangunan, yaitu pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, peningkatan pelayanan dasar, pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif. Isu strategis kesenjangan ini meliputi:

- belum optimalnya kapasitas infrastruktur dan transportasi darat,
- belum optimalnya tertib pengaturan, pelaksanaan, dan pemanfaatan ruang,
- masih adanya *backlog* kepemilikan rumah,
- belum optimalnya layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan pemenuhan hak pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas,
- belum optimalnya pelayanan kesehatan paripurna,
- kesenjangan rata-rata lama sekolah dan pendapatan antara laki-laki dan perempuan,
- kesenjangan antar wilayah desa dan kota,
- belum memadainya infrastruktur desa, masih tingginya ketimpangan penduduk antar kabupaten/kota,
- ketimpangan pembangunan pariwisata, serta belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.

4.3.2 Daya Saing

Isu strategis daya saing ini melingkupi destinasi & atraksi wisata, produk lokal (*made in Bali*), sumber daya manusia, dan investasi. Isu strategis daya saing terkait dengan menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, dan peningkatan pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Bali. Isu strategis daya saing yang muncul antara lain:

- rendahnya kualitas sumber daya manusia,
- manajemen dan pemasaran yang belum optimal,
- belum otimalnya akses permodalan dan implementasi teknologi,
- rendahnya nilai ekspor,
- lemahnya daya saing produk,

- masih adanya tenaga kerja yang belum tersertifikasi dan terjadi *mismatch* (tenaga kerja dengan lapangan kerja),
- jaminan kualitas pelayanan pendidikan masih rendah,
- belum optimalnya penanganan kesehatan,
- kurangnya minat kerja di sektor informal,
- kurangnya pemahaman sejarah dan pelestarian adat
- belum optimalnya peran lembaga adat tradisional.

4.3.3 Nilai Tambah

Lingkup isu strategis nilai tambah adalah produktifitas produksi, budaya, dan lahan. Isu strategis ini juga terkait dengan prioritas pembangunan diantaranya pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya. Isu strategis nilai tambah yang teridentifikasi yaitu:

- berkurangnya luasan dan kualitas lahan serta air untuk pertanian,
- belum optimalnya produktivitas ternak,
- menurunnya kualitas ekosistem perairan umum, pesisir, dan laut,
- kurangnya pemahaman sejarah dan pelestarian adat tradisi,
- belum optimalnya peran lembaga tradisional.

4.3.4 Keberlangsungan/*Sustainability*

Isu strategis keberlangsungan memiliki lingkup daya dukung lingkungan, ketahanan budaya, dan kualitas sumber daya manusia. Prioritas isu strategis keberlangsungan yang sesuai dengan prioritas pembangunan yaitu pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, peningkatan pelayanan dasar. Isu strategis keberlangsungan yang muncul antara lain:

- belum optimalnya pengelolaan sampah,
- menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air,
- meningkatnya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas tanah,
- menurunnya sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati,
- menurunnya kualitas udara, sumber daya pesisir dan lautan,
- berkembangnya bangunan baru yang tidak sesuai dengan kearifan lokal,
- belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan,
- berkurangnya penggunaan bahasa dan sastra daerah,
- meningkatnya penggunaan air tanah,

- masih rendahnya kualitas penduduk,
- belum optimalnya dan kurangnya pemahaman terhadap seni dan cagar budaya serta museum,
- meningktanya penetrasi pengaruh negatif pendatang terhadap lunturnya budaya,
- rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan.

4.3.5 Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum

Lingkup isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum yaitu reformasi birokrasi, administrasi publik, tata kelola dan ketertiban. Prioritas pembangunan yang menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi dan layanan umum adalah menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, birokrasi dan tata kelola yang berkualitas. Isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum yang muncul antara lain:

- belum optimalnya penyebarluasan informasi program dan kebijakan pemerintah,
- tuntutan akan keterbukaan informasi publik dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,
- tuntutan penggunaan persandian untuk keamanan data dan informasi,
- tingginya urbanisasi berpotensi terhadap gangguan ketertiban dan keamanan,
- masih lemahnya penegakan perda,
- masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat,
- kurangnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia,
- kemajuan teknologi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman,
- masih tingginya *Unmeet need*,
- belum optimalnya kualitas rancangan produk hukum daerah,
- rendahnya tata kelola dan jangkauan pelayanan BUMD.

4.3.6 Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana

Lingkup isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana yaitu mitigasi dampak perubahan iklim, penataan lingkungan, kebencanaan. Adapun yang menjadi prioritas yang sesuai dengan prioritas pembangunan dalam isu strategis ini yaitu pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, birokrasi dan tata kelola yang berkualitas. Isu strategis perubahan iklim dan penangan bencana yang muncul yaitu:

- belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana disetiap fase,
- kondisi geologis Pulau Bali yang rawan terhadap bencana,
- masih rendahnya kapasitas, ketangguhan, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana,
- kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi.

4.4 Penyelarasan Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Dengan RPJMN 2015-2019

Isu strategis dalam RPJMN 2015-2019 dirumuskan dengan pendekatan tantangan utama pembangunan yang meliputi stabilitas politik dan keamanan, tata kelola birokrasi efektif dan efisien, pemberantasan korupsi, pertumbuhan ekonomi, percepatan pemerataan dan keadilan, keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. Isu-isu strategis dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2019 telah memperhatikan dan selaras dengan isu strategis RPJMN 2015-2019. Isu strategis kesenjangan yang ada dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 selaras dengan isu strategis percepatan pemerataan dan keadilan serta kesenjangan antar wilayah yang ada dalam RPJMN 2015-2019. Isu strategis daya saing dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 selaras dengan pertumbuhan ekonomi, percepatan pemerataan dan keadilan, dan peningkatan kualitas SDM. Isu strategis nilai tambah terkait dengan isu strategis pertumbuhan ekonomi, percepatan pemerataan dan keadilan, serta percepatan pembangunan kelautan. Isu strategis keberlangsungan selaras dengan isu strategis keberlanjutan pembangunan dan percepatan pembangunan kelautan. Isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum selaras dengan isu strategis stabilitas politik dan keamanan, tata kelola birokrasi efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi. Isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana terkait dengan isu strategis keberlanjutan pembangunan dan percepatan pembangunan kelautan.

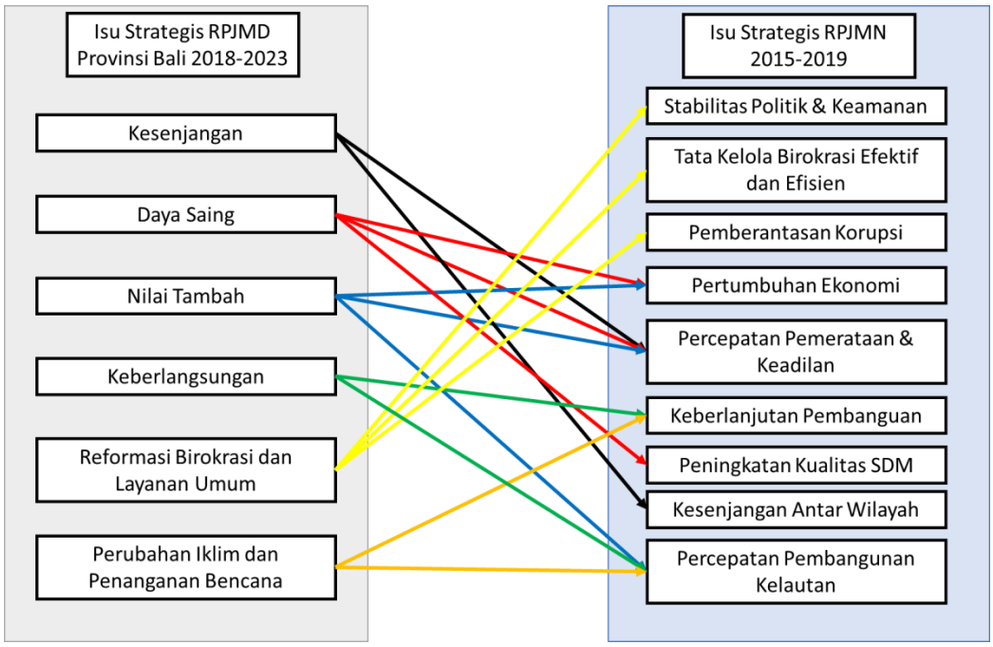

Gambar 4.22 Penyelarasan Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Dengan RPJMN 2015-2019

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini akan membahas terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2018-2023. Visi adalah gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023) yang nantinya diwujudkan ke dalam misi. Penyusunan visi dan misi Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

5.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:

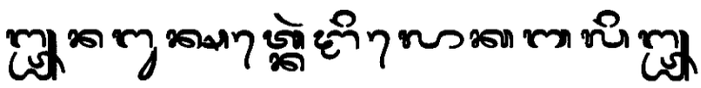

"*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*"

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, Krama

(manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang bisa disebut dengan Genuine Bali.

Sebagaimana halnya manusia biasa, Krama Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3(tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kebudayaan Bali harus ditempatkan sebagai hulu pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara konprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bali. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi Krama Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak

dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya: Atita (masa lalu), Nagata (masa kini), dan Wartamana (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja*, *gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :
   a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
   b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain,

gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.

c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Bali:

a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.

b. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri Krama Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas Krama Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktvitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.

b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.

c. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan.

1) Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali.

3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi Krama Bali.

5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan Krama Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.
   1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
   2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
   3) Peningkatan daya saing Krama Bali.
   4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
   5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif Krama Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan Krama Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

5.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi **"*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**, maka ditempuh dengan 22 misi sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali.

Misi 2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Misi 3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan *Krama* Bali Berbasis Kecamatan.

Misi 4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil, Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.

Misi 5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di *Desa Pakraman/Desa Adat*.

Misi 6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas: Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Krama* Bali.

Misi 7. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan *Krama* Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.

Misi 8. Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.

Misi 9. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi *Krama* Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.

Misi 10. Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya *Krama* Bali.

Misi 11. Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali Secara *Sakala* Dan *Niskala* Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat *Sad Kertih* Yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih,* Dan *Jagat Kertih*.

Misi 12. Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi *Desa Pakraman*/*Desa Adat* Dalam Menyelengarakan Kehidupan *Krama* Bali Yang Meliputi *Parahyangan, Pawongan,* Dan *Palemahan*.

Misi 13. Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.

Misi 14. Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Baru.

Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Konprehensif.

Misi 16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kabupaten/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.

Misi 17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (*Branding* Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian *Krama* Bali.

Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.

Misi 19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.

Misi 20. Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.

Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.

Misi 22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

5.3 Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

5.3.1 Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala dan Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali

dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, suskses dan rahayu.

5.3.2 Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

5.3.3 Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

5.3.4 Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5.3.5 Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

5.3.6 Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

5.3.7 Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sector, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

5.4 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 memiliki kesamaan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2023. Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 terkait dalam hal mendukung visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2023. Adapun visi RPJPD Semesta Berencana

Provinsi Bali tahun 2005-2025 yaitu "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

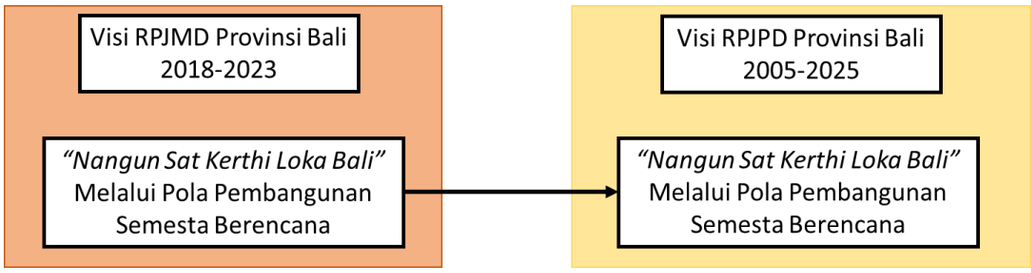

Gambar 5.1 Keterkaitan Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Terdapat dua puluh dua misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Dua puluh dua misi tersebut sama dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025.

MISI RPJMD SB Provinsi Bali 2018-2023
MISI 1
MISI 2
MISI 3
MISI 4
MISI 5
MISI 6
MISI 7
MISI 8
MISI 9
MISI 10
MISI 11
MISI 12
MISI 13
MISI 14
MISI 15
MISI 16
MISI 17
MISI 18
MISI 19
MISI 20
MISI 21
MISI 22

MISI RPJPD SB Provinsi Bali 2005-2025
MISI 1
MISI 2
MISI 3
MISI 4
MISI 5
MISI 6
MISI 7
MISI 8
MISI 9
MISI 10
MISI 11
MISI 12
MISI 13
MISI 14
MISI 15
MISI 16
MISI 17
MISI 18
MISI 19
MISI 20
MISI 21
MISI 22

Gambar 5.2 Keterkaitan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025

5.5 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2015-2019

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yaitu **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**. Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 yaitu ***"Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.** Visi dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 sangat terkait dengan visi RPJMN 2015-2019. Hal tersebut karena makna yang tersirat dalam visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 yaitu menggunakan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Prinsip Trisakti Bung Karno tersebut terkait dan selaras dengan yang ada dalam visi RPJMN 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam mewujudkan visi RPJMN 2015-2019 ditempuh melalui 7 misi pembangunan. Dua puluh dua misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 terkait dengan Ketujuh misi tersebut. Selain visi dan misi, dalam RPJMN tahun 2015-2019 terdapat 9 agenda prioritas atau yang disebut dengan Nawa Cita. Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 juga memiliki keterkaitan dengan 9 agenda prioritas tersebut. Keterkaitan visi misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 dengan visi misi dan agenda prioritas RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

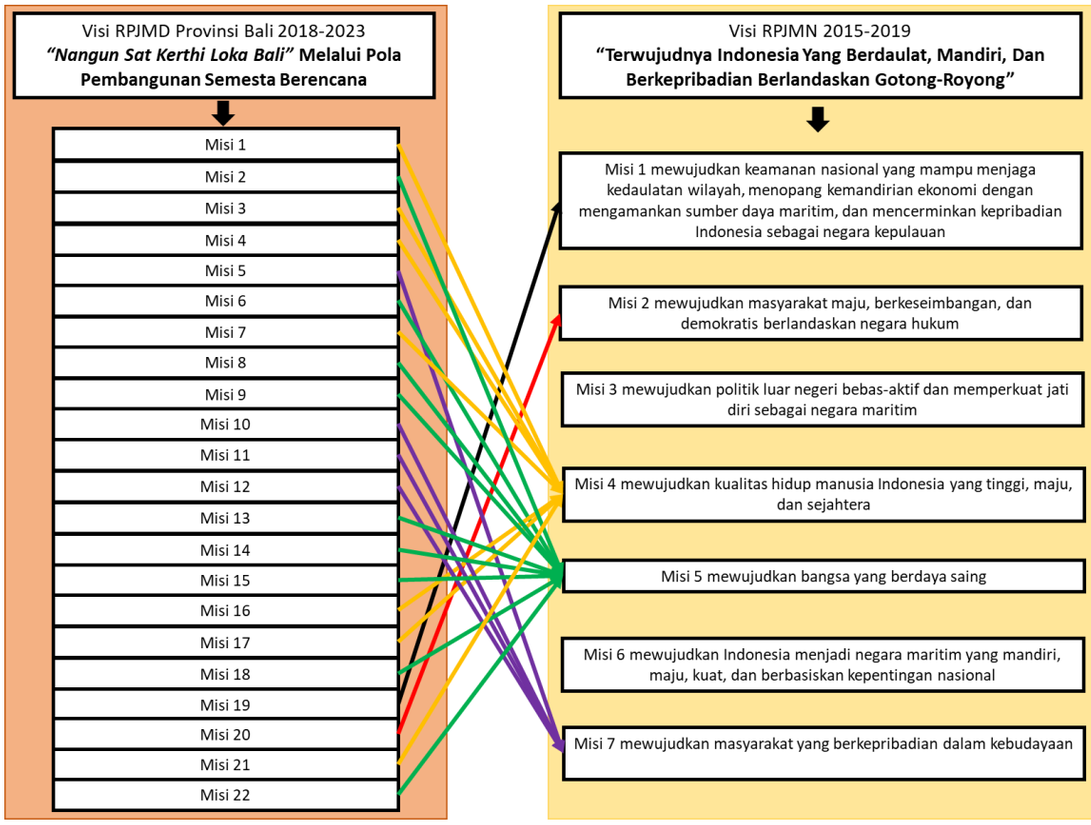

Gambar 5.3 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2005-2025

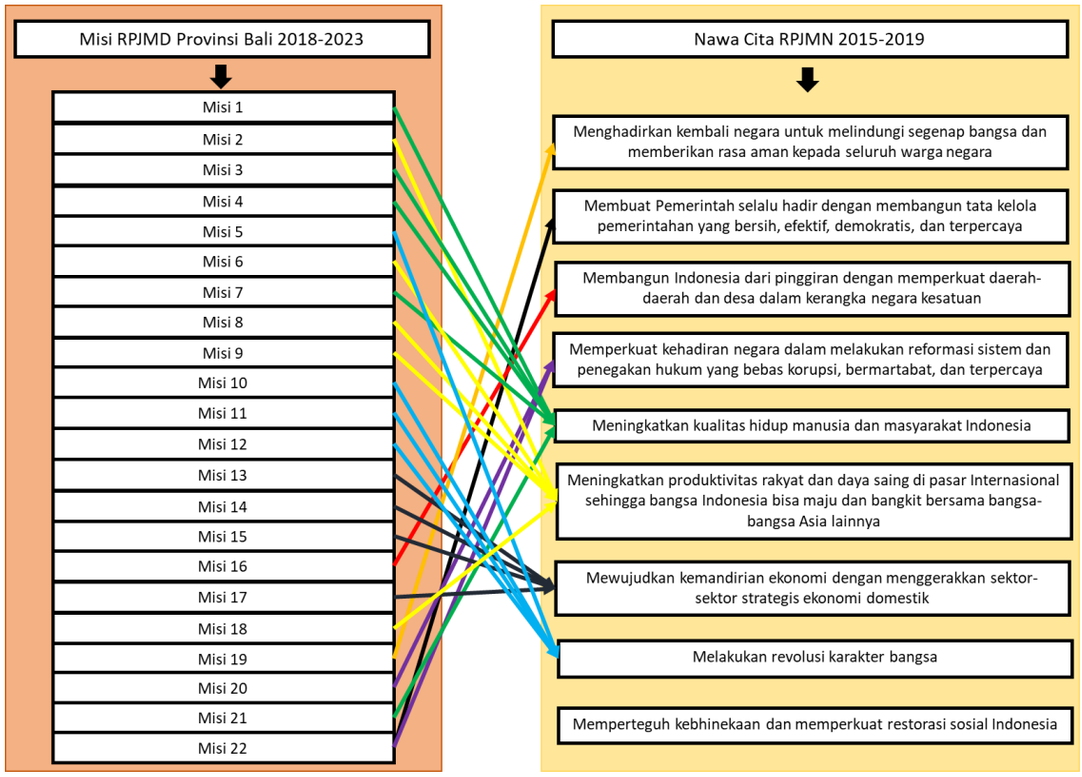

Gambar 5.4 Keterkaitan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Nawa Cita RPJMN Tahun 2005-2025

5.6 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan yang dalam hal ini yaitu lima tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/Pperangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran adalah wujud operasional dari visi dan misi. Dalam menyusun tujuan dan sasaran tetap memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Selain itu, tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu lima tahun. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Misi 1 : Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak

Sasaran :
1. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
3. Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni
4. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan

2. Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian

Sasaran :
1. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal
2. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali
3. Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali

3 Misi 3 : Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali Berbasis Kecamatan.

Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali

Sasaran :
1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali
2. Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali
3. Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat

4 Misi 4 : Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.

Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas

Sasaran :
1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
2. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun

5 Misi 5 : Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di Desa Adat/Desa Pakraman.

Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal

Sasaran : Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman

6 Misi 6 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintergritas; Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krama Bali

Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi

Sasaran : Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali

7 Misi 7 : Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.

Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali

Sasaran : Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali

8 Misi 8 : Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.

Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing

Sasaran : 1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
2. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri

9 Misi 9 : Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi Krama Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.

Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

10 Misi 10 : Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya Krama Bali.

Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali

Sasaran : Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.

11 Misi 11 : Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sat Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih.

Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi

Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi

12 Misi 12 : Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali Yang Meliputi Parhyangan, Pawongan, Dan Palemahan.

Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi

Sasaran : Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak

13 Misi 13 : Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kab/Kota Se-Bali.

Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas
2. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali

14 Misi 14 : Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luarnegeri Secara Bersinergi Antar Kab/Kotase-Bali Dengan Mengembangkan Kreativitas Inovasi

Tujuan : Meningkatnya pasar pariwisata Bali

Sasaran : Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global

15 Misi 15 : Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Komprehensif

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan

Sasaran :
1. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan
2. Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata

16 Misi 16 : Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kab/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali

Sasaran :
1. Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali
2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal

17 Misi 17 : Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali.

Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor
2. Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali

18 Misi 18 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Dan Terkoneksi Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.

Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi

19 Misi 19 : Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.

Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

Sasaran : Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

20 Misi 20 : Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.

Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali

Sasaran : Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

21 Misi 21 : Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis

Sasaran : Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan

Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah

Sasaran : Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan

22 Misi 22 : Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Secara umum penjabaran visi misi tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 mengacu pada pendekatan architecture kinerja pembangunan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dirumuskan penjabarannya menjadi jumlah misi 22, jumlah tujuan 24, dan jumlah sasaran 38. Lebih lanjut akan diuraikan dalam Tabel 5.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPJMD Semesta Berencana.

TABEL 5.1
RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD SEMESTA BERENCANA

NO	MISI / TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Misi 1 : MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI**									
	Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak									
	Indikator Tujuan : 1 Tingkat Inflasi Bali		**Persentase (%)**	**3,5% ±1%(yoy)**	**3,5% ±1%(yoy)**	**3,00%**	**3,00%**	**3,00% ±1%(yoy)**	**3,00%**	**3,00%**
	: 2 Ketersediaan pangan utama		**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Sasaran :									
	1 Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Persentase stok pangan aman	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20
	2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase (%)	5,83	10,35	10,19	10,11	9,60	8,58	8,58
	3 Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	98	98,20	98,40	98,60	98,80	99	99
	4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Inflasi Pangan Bali	Persentase (%)	5,60	5,75%±1%(yoy)	5,65%±1%(yoy	5,50%±1%(yoy)	5,40%±1%(yoy)	5,40%±1%(yoy	5,40%±1%(yoy)
2	**Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.**									
	Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian									
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		**Persentase (%)**	**15**	**16**	**17**	**20**	**22**	**25**	**25**
	Sasaran :									
	1 Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	27	29	31	33	35	35
	2 Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1 Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103,48	104,1	104,5	105	105,5	106	106
		2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	116,6	117,3	117,9	118,5	119,2	119,2
	3 Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian	Persentase (%)	75	75	76	77	78	79	79
3	**Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.**									
	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali									
	Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)		**Dalam tahun**	**71,4**	**71,8**	**72**	**72,3**	**72,5**	**72,5**	**72,5**
	Sasaran :									
	1 Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali	Persentase (%)	88	89	89,5	90	90,75	91,47	91,47
	2 Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Persentase (%)	85	85	86	86	86	86	86
	3 Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Persentase (%)	85	95	95	95	100	100	100

NO	MISI / TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	**Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.**									
	Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas									
	Indikator Tujuan : 1 Rata-rata lama sekolah		**Tahun**	**9,72**	**10**	**10,28**	**10,56**	**10,84**	**11,40**	**11,40**
	2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16 -18 tahun		**Persentase (%)**	**82,35**	**82,54**	**82,73**	**82,92**	**83,11**	**83,3**	**83,3**
	Sasaran :									
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,21	13,49	13,63	13,77	13,91	14,05	14,05
	2 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18	Persentase (%)	82,35	82,54	82,73	82,92	83,11	83,3	83,3
5	**Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN.**									
	Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal									
	Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu		**Persentase (%)**	**2,8**	**20**	**35**	**50**	**65**	**70**	**70**
	2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat		**Persentase (%)**	**0,20**	**2,36**	**3,00**	**3,64**	**4,29**	**4,93**	**4,93**
	Sasaran :									
	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu	Jumlah	21	33	42	51	60	69	69
6	**Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI**									
	Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi									
	Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		**Persentase (%)**	**74,45 (74,35-74,50)**	**75,07 (74,97-75,17)**	**75,31 (75,21-75,41)**	**75,61 (75,41-75,61)**	**78,25 (75,61-78,25)**	**80 (75,56-80)**	**80 (75,56-80)**
	Sasaran:									
	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	65	65	67	70	73	75	75
7	**Misi 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.**									
	Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali									
	Indikator Tujuan : Persentase Kemiskinan		**Persentase (%)**	**3,91**	**3,85**	**3,59**	**2,95**	**1,90**	**1,00-1,50**	**1,00-1,50**
	Sasaran :									
	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	75	76	77	78	79	80	80

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
8	**Misi 8 : MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.**									
	Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing									
	Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka		**Persentase (%)**	**1,37**	**1,28**	**1,17**	**1,07**	**0,98**	**0,9**	**0,9**
	Sasaran :									
	1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	75,24	75,77	76,03	76,3	76,55	76,8	76,8
	2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase (%)	3,88	3,78	3,68	3,59	3,5	3,41	3,41
9	**Misi 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.**									
	Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan									
	Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan		**Persentase (%)**	**23,87**	**27**	**45**	**50**	**55**	**75**	**75**
	Sasaran :									
	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaa	23,87	27	45	50	55	75	75
10	**Misi 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.**									
	Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali									
	Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju		**Jumlah**	**19.782**	**19.807**	**19.832**	**19.857**	**19.880**	**19.905**	**19.905**
	Sasaran :									
	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	Jumlah	19.745	19.765	19.785	19.805	19.825	19.845	19.845
		2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia	Jumlah	37	42	47	52	55	60	60

NO	MISI / TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
11	**Misi 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.**										
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi										
	Indikator Tujuan : Indeks Kebahagiaan			**Indeks**	**72,48 (2017)**	**72,48**	**73,98**	**73,98**	**73,98**	**74,98**	**74,98**
	Sasaran :										
	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala	Persentase (%)	40	40	50	60	70	80	80
		2	Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual	Persentase (%)	73	73	76	79	82	85	85
12	**Misi 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN.**										
	Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi										
	Indikator Tujuan : 1 Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis			**Persentase (%)**	**30**	**30**	**60**	**90**	**100**	**100**	**100**
	2 Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis			**Persentase (%)**	**35**	**35**	**55**	**75**	**100**	**100**	**100**
	Sasaran :										
	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	1	Jumlah desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	448	448	896	1.344	1.493	1.493	1.493
		2	Jumlah Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	954	954	1.499	2.045	2.726	2.726	2.726
13	**Misi 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI.**										
	Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas										
	Indikator Tujuan : Realisasi PMDN dan PMA di Sektor Pariwisata			**Persentase (%)**	**19,7**	**19,8**	**19,9**	**20**	**20,1**	**20,2**	**100**
	Sasaran :										
	1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas		Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Destinasi	100	0	2	2	2	2	108
	2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	1	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	110	0	3	3	3	3	12
		2	Jumlah produk pariwisata berkualifikasi Indie 4.0	Produk	27	0	4	4	4	5	17

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14	**Misi 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI**									
	Tujuan : Meningkatnya pasar pariwisata Bali									
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		**(Persentase%)**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
	Sasaran :									
	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	6.000.000	0	8.542.500	9.620.000	10.732.500	12.015.000	54.385.000
		2 Persentase promosi pariwisata menerapkan Indie 4.0	Persentase (%)	40	0	50	60	70	80	80
15	**Misi 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF**									
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan									
	Indikator Tujuan : Indeks kepuasan wisatawan		persentase (%)	75	77	79	81	83	85	85
	Sasaran :									
	1 Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase (%)	40 dan 60	40 dan 60	40 dan 60	40 dan 60	40 dan 60	40 dan 60	40 dan 60
	2 Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Persentase (%)	40	41	42	43	44	45	45
16	**Misi 16 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS.**									
	Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali									
	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)	6,35 (6,20-6,40)	6,4 (6,20-6,60)	6,60 (6,40-6,80)	6,80 (6,60-7,00)	7,00 (6,80-7,20)	7,20 (7,00-7,50)	7,20 (7,00-7,50)
	Sasaran :									
	1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA	Persentase (%)	2,97	2,22	2,64	3,12	3,70	4,39	16,07
	2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda)	Persentase (%)	10	10	15	20	25	30	30
		2 Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	10	10	15	20	25	30	30
		3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah (Toko)	40	40	40	40	40	40	200
		4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah (Toko)	100	100	50	50	50	50	300

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
17	**Misi 17 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI.**									
	Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali									
	Indikator Tujuan : 1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali		**Persentase (%)**	2	2	3	3	4	4	4
	2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali		**Persentase (%)**	10	11	11,5	12	12,5	13	13
	Sasaran :									
	1 Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri	Persentase (%)	2	2,01	2,02	2,03	2,04	2,05	2,05
		2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0	Persentase (%)	100	_	25	25	25	25	200
	2 Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi	Jumlah	9	12	15	17	19	22	22
18	**Misi 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT,LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI.**									
	Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru									
	Indikator Tujuan : Indeks konektivitas		**Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)**	**2.74**	**2.7**	**2,6**	**2,5**	**2,4**	**2,3**	**2,3**
	Sasaran :									
	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)	Indeks	60	62	63	75	81,25	82	82
19	**Misi 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN.**									
	Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan									
	Indikator Tujuan : Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum		Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran :									
	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1. Angka kriminalitas	Kasus	4.607	4.138	3.669	3.200	2.731	2.262	2.262
		2. Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan	Persentase (%)	70	70	74	78	80	82	82
		3. Persentase penanganan bencana	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
20	**Misi 20 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.**									
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali									
	Indikator Tujuan : 1 Indeks demokrasi		**Persentase (%)**	**78,8**	**79**	**80**	**81**	**81**	**81**	**81**
	2 Indeks pemberdayaan gender		**Indeks**	63,79	64,23	64,55	64,75	64,9	65	65
	Sasaran :									
	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada	Persentase (%)	70,5	73,81	73,81	73,81	75,00	75	75
21	**Misi 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.**									
	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis									
	Indikator Tujuan : Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)		**Persentase (%)**	**14,35**	**14,71**	**15,06**	**15,53**	**15,9**	**16,28**	**16,28**
	Sasaran :									
	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	16,93	17,11	17,29	17,46	17,64	17,82	17,82
	Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah									
	Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Persentase (%)	61,51	62,08	62,64	63,21	63,77	64,34	64,34
	Sasaran :									
	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	1 Indeks kualitas air	Indeks	63,17	64,67	66,17	67,67	69,17	70,67	70,67
		2 Indeks kualitas udara	Indeks	91,98	92,39	92,89	93,39	93,89	94,39	94,39
		3 Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	38,57	39,57	40,57	41,57	42,57	43,57	43,57
		4 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	8,38	9,38	10,38	11,38	12,29	12,29	12,29
		5 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	0,40	0,43	1,10	7,14	13,79	20	20

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
22	**Misi 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.**									
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
	Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik		**Indeks**	**75**	**77**	**79**	**80**	**81**	**82**	**82**
	Sasaran :									
	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	77	79	80	81	82	82
	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan									
	Indikator Tujuan : 1 Indeks Reformasi Birokrasi		**Indeks**	**66,16**	**68**	**70**	**72**	**74**	**76**	**76**
	2 Opini BPK		Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Persentase (%)	76,37	77	78	79	80	81	81
	Sasaran :									
	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	66,16	68	70	72	74	76	76
	2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0,78	2,53	7,13	7,28	7,41	7,54	7,54

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali selama lima tahun mendatang (2018-2023). Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

6.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023

VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI		
T. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1. Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1. Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
		2. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1. Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
		2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang
	3. Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki	1. Mempermudah sistem investasi pembangunan

	rumah layak huni	rumah murah layak huni Krama Bali
		2. Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
	4. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	1. Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
		2. Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI		
T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
		2. Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali
		3. Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport
	4. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1. Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
		2. Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3. Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.		
T. Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2. Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	
	3. Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN		

T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT		
T. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI		
T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA		
T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
	2. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI		
T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1. Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
		2. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan

		budaya masyarakat Bali
		3. Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
		4. Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH		
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1. Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura
		2. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN		
T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI		
T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU		
T. Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF		
T. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2. Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
		2. Memperkuat dukungan regulasi perlidungan tenaga kerja lokal dan

		mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS		
T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1. Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI		
T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1. Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2. Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	1. Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
		2. Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI		
T. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
		2. Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN		

T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1. Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
		2. Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI		
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	1. Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
		2. Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH		
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH		
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"					
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi					
3	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali					
4	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin					
5	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali					
6	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)					
7	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali					
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1. Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi					
		2. Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi					
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi					

	lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali					
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport	1. Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor					
		2. Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan					
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor					
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan					
13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1. Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian					
		2. Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan eksport produk hasil pertanian dalam arti luas					
		3. Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani					
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali					
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali					
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional					

		2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik					
17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali					
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan kepemerintah pusat					
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur	1. Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan					
		2. Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali					
		3. Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri					
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1. Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali					
		2. Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali					
		3. Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)					
21	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja					
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan	1. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali					

	dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan						
		2. Membangun hubungan kerjasama antara *Government to Government* (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri					
23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali					
24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi					
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya					
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik					
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura	1. Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan					
		2. Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku					
		3. Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu					
		4. Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura					
		5. Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya					
		6. Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)					

28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama					
29	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak	1. Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa					
		2. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususya pendidikan non-formal)					
		3. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)					
		4. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen					
		5. Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi					
		6. Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi					
		7. Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya					
		8. Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat					
		9. Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)					

		10. Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali					
30	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis					
31	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah					
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali					
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali					
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1. Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara					
		2. Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara					
		3. Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta					
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali					
36	Mengembangkan Bali Timur dan Bali	Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi					

	Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali						
37	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal	Mempermudah akses permodalan dan memperluas pemasaran produk ekonomi local					
38	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor	Meningkatkan kerja sama promosi produk branding Bali					
39	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	1. Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi					
		2. Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi					
		3. Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi					
40	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)					
41	Pembangunan	Pembangunan infrastruktur					

	infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	darat , laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia					
42	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali					
43	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali					
44	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan					
45	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali					
46	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI					
47	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1. Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan					
		2. Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangunan dan pertumbuhan ekonomi Baru					
48	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan prilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali					
49	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan					

50	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya					
51	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah					

Tema fokus pembangunan dan perumusan arah kebijakan tahun 2019 adalah “Memperkuat Sinergi Dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata Dan Berdaya Saing Menuju Pembangunan Berkelanjutan”. Sedangkan tema fokus pembangunan dan perumusan arah kebijakan tahun 2020-2023 adalah “Peningkatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Bali Didukung Pemajuan Kebudayaan melalui Sinergi Kebijakan Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola”.

TEMA FOKUS PEMBANGUNAN				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Memperkuat Sinergi Dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata Dan Berdaya Saing Menuju Pembangunan Berkelanjutan .	**Peningkatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Bali Didukung Pemajuan Kebudayaan melalui Sinergi Kebijakan Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola**	**Peningkatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Bali Didukung Pemajuan Kebudayaan melalui Sinergi Kebijakan Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola**	**Peningkatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Bali Didukung Pemajuan Kebudayaan melalui Sinergi Kebijakan Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola**	**Peningkatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Bali Didukung Pemajuan Kebudayaan melalui Sinergi Kebijakan Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola**
1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali
2. Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Jasa Produktif	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali

2019	2020	2021	2022	2023
4. Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban serta Pelestarian Adat dan Budaya	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan
	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, sehingga menjadi program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan tiap tahunnya. Berdasarkan hasil penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Program Pembangunan Daerah Berjumlah 134, ter-*maping* dalam 38 sasaran dan 24 tujuan. Berikut secara rinci diuraikan dalam Tabel 6.3. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

TABEL 6.3
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD SEMESTA BERENCANA

NO	MISI / TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Misi 1 : MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI**															
	Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak															
	Indikator Tujuan : 1 Tingkat Inflasi Bali		**Persentase (%)**	**3,5% ±1%(yoy)**	**3,5% ±1%(yoy)**		**3,00% ±1%(yoy)**		**3,00% ±1%(yoy)**		**3,00% ±1%(yoy)**		**3,00% ±1%(yoy)**		**3,00% ±1%(yoy)**	
	: 2 Ketersediaan pangan utama		**Persentase (%)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Persentase stok pangan aman	Persentase (%)	20	20	3.537.783.656	20	12.548.914.489	20	14.117.020.313	20	15.698.787.440	20	17.496.642.343	20	
	Program :															
	1 Peningkatan ketersediaan pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal per kapita per hari	2,646	2,647	340.000.000	2,648	391.000.000	2,649	449.650.000	2,650	517.097.500	2,650	594.662.126	2,650	Dinas Ketahanan Pangan
	2 Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Persentase lahan pertanian produktif	Persentase (%)	75	76,95	0	77,45	4.792.052.610	77,95	5.271.257.871	78,45	5.798.383.658	78,95	6.378.222.024	78,95	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3 Peningkatan sarana produksi pertanian	Persentase sarana produksi pertanian dalam kondisi baik dan siap pakai	Persentase (%)	75	76	1.437.783.656	77	2.948.417.579	78	3.243.259.337	79	3.567.585.271	80	3.924.343.798	80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	4 Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	17.535,70	17.886,41	150.000.000	18.244,14	902.152.000	18.609,02	1.052.690.000	18.981,20	1.240.862.500	19.360,82	1.476.078.125	19.360,82	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5 Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	97.157,60	99.100,75	550.000.000	101.082,77	809.857.300	103.104,42	1.012.321.625	105.166,51	1.265.402.031	107.269,84	1.581.752.539	107.269,84	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6 Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	Jumlah populasi ternak lokal Bali	Satuan ternak	582.199	-	-	446,893	1.500.000.000	455,831	1.600.000.000	464.948	1.700.000.000	474.247	1.800.000.000	474.247	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	7 Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyangga Stock Pangan Daerah	Jumlah Lumbung yang masih berfungsi baik	Unit	15	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	75	Dinas Ketahanan Pangan
	8 Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	Persentase (%)	80	80	360.000.000	85	414.000.000	90	475.900.000	95	547.515.000	95	629.642.251	95	Dinas Ketahanan Pangan
	9 Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar yang bersertifikat mutu	Persentase (%)	7	8,47	200.000.000	22	291.435.000	27	511.941.480	32	561.941.480	39	611.941.480	39	Dinas Ketahanan Pangan
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase (%)	5,83	10,35	742.150.000	10,19	1.961.675.000	10,11	1.856.200.000	9,60	2.113.225.000	8,58	2.270.250.000	8,58	
	Program :															
	1 Pemenuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	Persentase (%)	1	15,21	342.150.000	17,21	461.675.000	17,54	456.200.000	17,87	513.225.000	18,21	570.250.000	18,21	Dinas Sosial
	2 Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh	Jumlah Unit Usaha	5	5	150.000.000	7	500.000.000	9	400.000.000	11	600.000.000	13	700.000.000	13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3 Peningkatan Aksessibilitas Produk Sandang Lokal Bali	Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	Jumlah (Toko)	20	20	250.000.000	40	1.000.000.000	60	1.000.000.000	80	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Sasaran :															
	3 Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	98	98,20	8.560.000.000	98,40	30.880.000.000	98,60	33.930.000.000	98,80	35.450.000.000	99	41.560.000.000	99	
	Program :															
	1 Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	Persentase	8,20	8	3.060.000.000	7,70	4.580.000.000	7,20	7.630.000.000	6,60	9.150.000.000	5,60	15.260.000.000	5,60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2 Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	77,59	78,86	5.500.000.000	83,40	26.300.000.000	88,24	26.300.000.000	93,08	26.300.000.000	97,93	26.300.000.000	97,93	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sasaran :															
	4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Inflasi Pangan Bali	Persentase (%)	5,60	5,75%±1%(yoy)	300.000.000	5,65%±1%(yoy)	500.000.000	5,50%±1%(yoy)	600.000.000	5,40%±1%(yoy)	650.000.000	5,40%±1%(yoy)	700.000.000	5,40%±1%(yoy)	
	Program :															
	1 Stabilisasi harga Pangan	Harga GKP lebih besar dari HPP	Rupiah	> Rp. 3700	> Rp. 3700	300.000.000	> Rp.3700	500.000.000	> Rp. 3700	600.000.000	> Rp. 3700	650.000.000	> Rp. 3700	700.000.000	> Rp. 3700	Dinas Ketahanan Pangan
	2 Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	N/A	100	0	100	500.000.000	100	525.000.000	100	550.000.000	100	575.000.000	100	Biro Perekonomian

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2	**Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.**															
	Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian															
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		**Persentase (%)**	**15**	**16**		**17**		**20**		**22**		**25**		**25**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	27	1.850.000.000	29	12.218.231.553	31	13.440.054.708	33	14.784.060.179	35	16.262.466.197	35	
	Program :															
	1 Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	PPH Konsumsi	Nilai	95,6	95,6	635.000.000	95,7	688.250.000	95,8	783.987.500	95,9	894.085.625	96	943.133.218	96	Dinas Ketahanan Pangan
	2 Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Jumlah Kelompok pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan	Kelompok	2	1	500.000.000	1	2.667.324.253	1	2.934.056.678	1	3.227.462.346	1	3.550.208.581	7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3 Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian yang dibangun dan berproduksi	Industri	1	1	800.000.000	1	5.955.907.300	1	6.551.498.030	1	7.206.647.833	1	7.927.312.616	6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	4 Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	Kawasan	4	1	550.000.000	1	3.595.000.000	1	3.954.500.000	1	4.349.950.000	1	4.784.945.000	9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1 Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103,48	104,1	713.351.696.398	104,5	1.555.173.514.009	105	1.566.266.578.858	105,5	1.529.670.741.365	106	1.560.198.196.972	106	
		2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	116,6		117,3		117,9		118,5		119,2		119,2	
	Program :															
	1 Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten	Jumlah unit taman gumi banten yang produktif	Unit	7	1	2.697.294.308	1	8.334.047.478	1	9.167.452.226	1	10.084.197.448	1	11.092.617.193	12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	2 Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persentase produktivitas pertanian	Persentase (%)	2	2,2	250.000.000	2,4	4.278.758.236	2,6	4.628.415.444	2,8	4.983.038.373	3	5.343.123.594	3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3 Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Kelompok yang menerapkan agribisnis peternakan yang baik	Jumlah Kelompok	27	35	462.641.864	35	665.000.000	35	790.000.000	35	906.000.000	35	1.130.000.000	175	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	4 Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	Sertifikat	134	142	200.000.000	149	270.000.000	149	270.000.000	149	270.000.000	151	290.000.000	151	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5 Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	Jumlah pertanian Hidroponic perkotaan yang produktif	Unit Kawasan	1	1	400.000.000	1	2.645.639.502	1	2.910.203.452	1	3.201.223.797	1	3.521.346.177	5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Sasaran :															
	3 Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian	Persentase (%)	75	75	200.000.000	76	800.000.000	77	880.000.000	78	968.000.000	79	1.064.800.000	79	
	Program :															
	1 Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Jumlah Kelompok tani yang bersertifikasi	kelompok	45	10	200.000.000	15	800.000.000	20	880.000.000	25	968.000.000	30	1.064.800.000	75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.**															
	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali															
	Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)		**Dalam tahun**	**71,4**	**71,8**		**72**		**72,3**		**72,5**		**72,5**		**72,5**	
	Sasaran :															
	1 Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	**Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali**	**Persentase (%)**	**88**	**89**	**3.935.241.182**	**89,5**	**3.595.199.190**	**90**	**3.868.873.390**	**90,75**	**4.193.873.390**	**91,47**	**4.493.873.390**	**91,47**	
	Program :															
	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	rasio	0,001	0,001	3.600.918.782	0,001	3.305.356.790	0,001	3.568.873.390	0,001	3.868.873.390	0,001	4.168.873.390	0,001	Dinas Kesehatan
	2 Pengembangan Sistem Database Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase (%)	0	20	334.322.400	30	289.842.400	40	300.000.000	50	325.000.000	60	325.000.000	60	Dinas Kesehatan
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan**	**Persentase (%)**	**85**	**85**	**55.445.445.120**	**86**	**80.483.798.495**	**86**	**60.320.351.607**	**86**	**57.654.341.516**	**86**	**60.210.347.251**	**86**	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Program :															
	1 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Persentase (%)	49	50	16.602.813.824	60	17.802.110.043	65	17.852.110.043	70	17.852.110.043	75	17.852.110.043	75	Dinas Kesehatan
	2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	Persentase (%)	86	90	1.076.610.600	92	1.556.000.000	94	2.090.000.000	96	2.190.000.000	100	2.290.000.000	100	Dinas Kesehatan
		2 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persentase (%)	5,0	4,8	674.573.000	4,6	560.000.000	4,4	1.100.000.000	4,3	1.200.000.000	4,2	1.300.000.000	4,2	Dinas Kesehatan
		3 Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,310	0,35	3.647.439.916	0,40	7.769.409.942	0,45	7.909.262.942	0,50	8.989.262.942	0,55	10.049.262.942	0,55	Dinas Kesehatan
	3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Cakupan ODGJ berat yang dilayani	persentase (%)	35	40	29.374.149.728	45	48.063.403.560	50	25.339.713.332	55	21.048.968.531	60	21.698.974.266	60	Dinas Kesehatan
	4 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase WUS 30-50 Tahun yang mendapatkan Deteksi Dini Kanker	Persentase (%)	17,7	27	396.704.500	32	436.374.950	37	1.485.765.290	42	1.500.000.000	47	1.600.000.000	47	Dinas Kesehatan
	5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	kasus rabies	250	200	3.673.153.552	150	4.296.500.000	100	4.543.500.000	75	4.874.000.000	50	5.420.000.000	50	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			kasus flu burung	6	6		5		4		3		2		2	
	Sasaran :															
	3 Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	**Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)**	**Persentase (%)**	**85**	**95**	**91.670.000**	**95**	**200.000.000.000**	**95**	**250.000.000.000**	**100**	**250.000.000.000**	**100**	**250.000.000.000**	**100**	
	Program :															
	1 Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	Persentase (%)	85	85	91.670.000	86	200.000.000.000	86	250.000.000.000	86	250.000.000.000	86	250.000.000.000	86	Dinas Kesehatan
4	**Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.**															
	Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas															
	Indikator Tujuan : Rata-rata lama sekolah		**Tahun**	**9,72**	**10**		**10,28**		**10,56**		**10,84**		**11,40**		**11,40**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,21	13,49	1.101.784.168	13,63	2.398.453.267	13,77	2.524.372.063	13,91	2.650.590.666	14,05	2.783.120.199	14,05	
	Program :															
	1 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai	84	84,5	1.101.784.168	85	2.398.453.267	85,5	2.524.372.063	86	2.650.590.666	86,5	2.783.120.199	86,5	Dinas Pendidikan
	Sasaran :															
	2 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18	Persentase (%)	82,35	82,54	142.773.432.074	82,73	145.363.777.584	82,92	147.457.999.555	83,11	149.636.058.636	83,3	151.850.941.856	83,3	
	Program :															
	1 Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) Menengah	Persentase (%)	73,15	100,00	107.037.405.972	100,00	108.916.405.972	100,00	110.828.391.085	100,00	112.823.302.124	100,00	114.854.121.562	100,00	Dinas Pendidikan
		Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase (%)	34,96	36,24		37,51		38,79		40,06		41,34		41,34	
	2 Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Persentase (%)	15,14	15,23	35.736.026.102	15,32	36.447.371.612	15,41	36.629.608.470	15,50	36.812.756.512	15,59	36.996.820.294	15,59	Dinas Pendidikan
5	**Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN.**															
	Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal															
	Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu		**Persentase (%)**	**2,8**	**20**		**35**		**50**		**65**		**70**		**70**	
	2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat		**Persentase (%)**	**0,20**	**2,36**		**3,00**		**3,64**		**4,29**		**4,93**		**4,93**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu	Jumlah	21	33	500.000.000	42	518.000.000	51	536.000.000	60	554.000.000	69	554.000.000	69	
	Program :															
	1 Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	1 Persentase widya pasraman yang tumbuh dan berkembang di Desa Adat	Persentase (%)	1,41	2,21	500.000.000	2,81	518.000.000	3,42	536.000.000	4,02	554.000.000	4,62	554.000.000	4,62	Dinas Pendidikan
6	**Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI**															
	Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi															
	Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		**Persentase (%)**	**74,45 (74,35-74,50)**	**75,07 (74,97-75,17)**		**75,31 (75,21-75,41)**		**75,61 (75,41-75,61)**		**78,25 (75,61-78,25)**		**80 (75,56-80)**		**80 (75,56-80)**	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	17
	Sasaran:															
	1 Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	65	65	4.100.482.000	67	4.814.810.000	70	4.944.624.000	73	5.061.012.000	75	5.194.902.000	75	
	Program :															
	1 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	Persentase (%)	33,35	38,15	4.100.482.000	43,44	4.814.810.000	49,26	4.944.624.000	55,65	5.061.012.000	62,69	5.194.902.000	62,69	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	2 Pengembangan pemuda	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase (%)	0,81	3,70	557.943.248	3,85	1.730.000.000	4,00	1.875.000.000	4,15	1.970.000.000	4,30	2.065.000.000	4,30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	3 Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali yang diperoleh Atlit pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	11	85	8.602.627.080	90	16.150.000.000	95	13.501.500.000	100	10.250.000.000	110	17.000.000.000	480	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	**Misi 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.**															
	Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali															
	Indikator Tujuan : Persentase Kemiskinan		**Persentase (%)**	**3,91**	**3,85**		**3,59**		**2,95**		**1,90**		**1,00-1,50**		**1,00-1,50**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	75	76	5.356.898.800,0	77	11.327.909.800,0	78	12.618.509.800,0	79	14.157.818.400,0	80	15.717.235.980,0	80	
	Program :															
	1 Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	Persentase (%)	16,87	9,58	886.500.000	20,43	3.280.210.000	21,87	3.550.830.000	23,31	3.956.450.000	24,80	4.382.000.000	24,80	Dinas Sosial
	2 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%)	14,78	15,41	397.200.000	19,55	795.000.000	20,62	870.000.000	21,68	940.000.000	22,74	1.020.000.000	22,74	Dinas Sosial
	3 Peningkatan Pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%)	10,26	2,03	300.634.000	20,15	1.329.000.000	22,57	1.464.000.000	23,92	1.554.000.000	25,01	1.602.000.000	25,01	Dinas Sosial
	4 Pelayanan Sosial	Persentase penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase (%)	95	95	3.772.564.800	95	5.923.699.800	95	6.733.679.800	95	7.707.368.400	95	8.713.235.980	95	Dinas Sosial
	5 Penanganan Fakir Miskin	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	Laporan	1	1	70.000.000	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	5	Dinas Sosial
8	**Misi 8 : MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.**															
	Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing															
	Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka		**Persentase (%)**	**1,37**	**1,28**		**1,17**		**1,07**		**0,98**		**0,9**		**0,9**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	75,24	75,77	7.140.616.700	76,03	14.840.574.200	76,3	18.198.544.480	76,55	19.243.626.008	76,8	20.258.187.279	76,8	
	Program :															
	1 Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	Persentase Lulusan BLK yang bekerja	Persentase (%)	93	90	4.100.482.000	90	4.814.810.000	90	4.944.624.000	92	5.061.012.000	90	5.194.902.000	90	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	2 Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	Persentase (%)	93	90	3.040.134.700	90	10.025.764.200	90	13.253.920.480	92	14.182.614.008	90	15.063.285.279	90	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase (%)	3,88	3,78	4.442.778.900	3,68	14.988.482.600	3,59	15.179.640.800	3,5	15.395.343.500	3,41	15.579.383.350	3,41	
	Program :															
	1 Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang	1.621	1.821	3.357.022.000	2.035	13.550.000.000	2.250	13.590.000.000	2.385	13.660.000.000	2.512	13.685.000.000	12.624	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	2 Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	Jumlah	4	1	1.085.756.900	1	1.438.482.600	1	1.589.640.800	1	1.735.343.500	1	1.894.383.350	9	Dinas Tenaga Kerja ESDM

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
9	**Misi 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.**															
	Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan															
	Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan		**Persentase (%)**	**23,87**	**27**		**45**		**50**		**55**		**75**		**75**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaan	23,87	27	350.000.000	45	390.000.000	50	450.000.000	55	500.000.000	75	600.000.000	75	
	Program :															
	1 Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	Persentase (%)	4,74	5,23	200.000.000	5,72	220.000.000	6,22	250.000.000	6,71	280.000.000	7,20	350.000.000	7,20	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	2 Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah Perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang -lingkungan kerja serta kesehatan kerja	Perusahaan	330	60	150.000.000	70	170.000.000	80	200.000.000	90	220.000.000	90	250.000.000	720	Dinas Tenaga Kerja ESDM
10	**Misi 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.**															
	Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali															
	Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju		**Jumlah**	**19.782**	**19.807**		**19.832**		**19.857**		**19.880**		**19.905**		**19.905**	
	Sasaran :															
	1 Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	Jumlah	19.745	19.765	2.400.000.000	19.785	4.050.000.000	19.805	5.500.000.000	19.825	6.950.000.000	19.845	10.400.000.000	19.845	
		2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia	Jumlah	37	42	34.400.000.000	47	54.335.000.000	52	49.000.000.000	55	55.825.000.000	60	63.850.000.000	60	
	Program :															
	1 Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persentase	5	5	2.150.000.000	5	3.650.000.000	5	2.900.000.000	5	3.300.000.000	5	4.900.000.000	25	Dinas Kebudayaan
	2 Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase	5	5	21.650.000.000	5	35.635.000.000	5	28.600.000.000	5	32.575.000.000	5	36.550.000.000	30	Dinas Kebudayaan
	3 Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	Jumlah	410	410	2.400.000.000	515	4.050.000.000	520	5.500.000.000	525	6.950.000.000	1.430	10.400.000.000	3.400	Dinas Kebudayaan
	4 Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persentase	5	5	10.600.000.000	5	15.050.000.000	5	17.500.000.000	5	19.950.000.000	5	22.400.000.000	25	Dinas Kebudayaan
11	**Misi 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.**															
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi															
	Indikator Tujuan : Indeks Kebahagiaan		**Indeks**	**72,48 (2017)**	**72,48**		**73,98**		**73,98**		**73,98**		**74,98**		**74,98**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1 Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala	Persentase (%)	40	40	58.522.785.368	50	155.267.628.992	60	119.232.649.153	70	79.803.611.085	80	62.724.241.693	80	
		2 Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual	Persentase (%)	73	73	8.977.786.568	76	15.850.000.000	79	16.350.000.000	82	16.850.000.000	85	17.350.000.000	85	
	Program :															
	1 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Atma Kerthi	Indek Kepuasan pelayanan Atma Kerthi	Indeks	N/A	72	8.977.786.568	74	15.850.000.000	76	16.350.000.000	78	16.850.000.000	80	17.350.000.000	80	Biro Kesehjateraaan Rakyat
	2 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jana Kerthi	Persentase mahasiswa S1, S2, S3 yang berprestasi di bidang penerapan nilai-nilai Jana Kerthi	Persentase (%)	0,03	0,03	1.704.000.000	0,05	3.408.000.000	0,06	4.172.000.000	0,07	4.936.000.000	0,07	5.010.000.000	0,07	Dinas Pendidikan

NO	MISI / TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Persentase kerusakan kawasan hutan	Persentase (%)	5,56	4,93	4.379.064.000	4,30	4.816.970.000	3,67	5.298.667.000	3,04	5.828.534.000	2,41	6.411.387.000	2,41	Dinas Kehutanan
	4 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi	Jumlah danau alam dalam kondisi baik	Jumlah	4	4	675.000.000	4	2.251.396.100	4	2.536.593.210	4	2.490.722.531	4	1.189.664.784	4	Dinas Lingkungan Hidup
	5 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	Panjang pantai terabrasi	Kilometer	118,69	118,39	802.600.000	118,09	29.000.000.000	117,79	38.000.000.000	117,64	16.117.926.600	117,49	16.129.719.260	117,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	84	87	50.962.121.368	88,75	115.791.262.892	90	69.225.388.943	91,25	50.430.427.954	92,5	33.983.470.649	92,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	**Misi 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN.**															
	Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi															
	Indikator Tujuan : 1 Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis		**Persentase (%)**	**30**	**30**		**60**		**90**		**100**		**100**		**100**	
	2 Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis		**Persentase (%)**	**35**	**35**		**55**		**75**		**100**		**100**		**100**	
	Sasaran :															
	1 Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	1 Jumlah desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	448	448	4.450.000.000	896	6.950.000.000	1.344	9.650.000.000	1.493	12.350.000.000	1.493	15.050.000.000	1.493	
		2 Jumlah Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	954	954	3.300.000.000	1.499	5.500.000.000	2.045	7.700.000.000	2.726	9.900.000.000	2.726	12.100.000.000	2.726	
	Program :															
	1 Penguatan Desa Adat	Jumlah Desa Adat berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	Jumlah	523	523	4.450.000.000	821	6.950.000.000	1.120	9.650.000.000	1.493	12.350.000.000	1.493	15.050.000.000	1.493	Dinas Kebudayaan
	2 Penguatan Subak	Jumlah Subak berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	Jumlah	1.090	1.090	3.300.000.000	1.636	5.500.000.000	2.181	7.700.000.000	2.453	9.900.000.000	2.726	12.100.000.000	2.726	Dinas Kebudayaan
13	**Misi 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI.**															
	Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas															
	Indikator Tujuan : Realisasi PMDN dan PMA di Sektor Pariwisata		**Persentase (%)**	**19,7**	**19,8**		**19,9**		**20**		**20,1**		**20,2**		**100**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Destinasi	100	0	0	2	2.580.000.000	2	3.050.000.000	2	3.475.000.000	2	3.820.000.000	108	
	Program :															
	1 Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	Destinasi	146	0	0	4	2.580.000.000	4	3.050.000.000	5	3.475.000.000	5	3.820.000.000	164	Dinas Pariwisata
	Sasaran :															
	2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	1 Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	110	0	0	3	542.943.248	3	725.000.000	3	865.000.000	3	930.000.000	12	Dinas Pariwisata
		2 Jumlah produk pariwisata berkualifikasi Indie 4.0	Produk	27	0	0	4	1.500.000.000	4	1.650.000.000	4	1.815.000.000	5	1.996.500.000	17	Dinas Pariwisata
	Program :															
	1 Pengembangan Produk Pariwisata	Jumlah Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	Daya Tarik wisata	27	0	0	84	2.042.943.248	90	2.375.000.000	95	2.680.000.000	100	2.926.500.000	369	Dinas Pariwisata
14	**Misi 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI**															
	Tujuan : Meningkatnya pasar pariwisata Bali															
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		**(Persentase%)**	**45**	**45**		**45**		**45**		**45**		**45**		**45**	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	6.000.000	0	0	8.542.500	2.600.000.000	9.620.000	2.900.000.000	10.732.500	3.200.000.000	12.015.000	3.500.000.000	54.385.000	
		2 Persentase promosi pariwisata menerapkan Indie 4.0	Persentase (%)	40	0	0	50	1.195.000.000	60	1.445.000.000	70	1.600.000.000	80	1.800.000.000	80	
	Program :															
	1 Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Orang	6.070.473 dan 9.757.991	7.100.000 dan 8.200.000	3.365.720.800	8.000.000 dan 8.395.000	3.795.000.000	8.950.000 dan 8.585.000	4.345.000.000	9.997.000 dan 8.775.000	4.800.000.000	11.156.000 dan 8.970.000	5.300.000.000	44.800.000 dan 51.200.000	Dinas Pariwisata
15	**Misi 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF**															
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan															
	Indikator Tujuan : Indeks kepuasan wisatawan		persentase (%)	75	77		79		81		83		85		**85**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	**Persentase (%)**	40 dan 60	40 dan 60	682.943.248	40 dan 60	1.047.000.000	40 dan 60	1.147.000.000	40 dan 60	1.249.000.000	40 dan 60	1.354.000.000	40 dan 60	Dinas Pariwisata
	Program :															
	1 Pengembangan Standar Industri Pariwisata	Jumlah Industri Pariwisata yang bersertifikat usaha	Usaha	248	0	432.943.248	10	447.000.000	20	522.000.000	30	599.000.000	40	679.000.000	100	Dinas Pariwisata
	2 Pengembangan Informasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	Orang	2.800.000	3.825.000	250.000.000	4.098.750	600.000.000	4.383.750	625.000.000	4.693.000	650.000.000	5.031.500	675.000.000	24.000.000	Dinas Pariwisata
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Persentase (%)	40	41	1.187.943.248	42	1.390.000.000	43	1.565.000.000	44	1.737.000.000	45	1.915.000.000	45	Dinas Pariwisata
	Program :															
	1 Pengembangan SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang Bersertifikat Kompetensi Pariwisata	Orang	4.851	200	1.187.943.248	300	1.390.000.000	400	1.565.000.000	500	1.737.000.000	600	1.915.000.000	6.851	Dinas Pariwisata
16	**Misi 16 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS.**															
	Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali															
	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi		**Persentase (%)**	6,35 (6,20-6,40)	6,4 (6,20-6,60)		6,60 (6,40-6,80)		6,80 (6,60-7,00)		7,00 (6,80-7,20)		7,20 (7,00-7,50)		7,20 (7,00-7,50)	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA	Persentase (%)	2,97	2,22	675.000.000	2,64	700.000.000	3,12	750.000.000	3,70	800.000.000	4,39	850.000.000	16,07	
	Program :															
	1 Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian	Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru diluar SARBAGITA.	Jumlah Kawasan	9	9	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2 Pengembangan investasi	Nilai Investasi	Nilai (Triliun)	29,39	14,87	175.000.000	15,21	200.000.000	15,56	250.000.000	15,91	300.000.000	16,27	350.000.000	77,85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda)	Persentase (%)	10	10	1.076.000.000	15	1.550.000.000	20	1.780.000.000	25	2.060.000.000	30	2.320.000.000	30	
		2 Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	10	10		15		20		25		30		30	
		3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah (Toko)	40	40		40		40		40		40		200	
		4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah (Toko)	100	100		50		50		50		50		300	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Program :															
	1 Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	produk	90	96	526.000.000	111	1.000.000.000	126	1.125.000.000	141	1.250.000.000	156	1.400.000.000	156	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2 Penguatan distribusi produk lokal	Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	Persentase (%)	20	20	550.000.000	25	550.000.000	30	655.000.000	35	810.000.000	40	920.000.000	40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	**Misi 17 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI.**															
	Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali															
	Indikator Tujuan : 1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali		**Persentase (%)**	2	2		3		3		4		4		4	
	2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali		**Persentase (%)**	10	11		11,5		12		12,5		13		13	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri	Persentase (%)	2	2,01	3.626.000.000	2,02	7.475.000.000	2,03	8.078.000.000	2,04	8.639.480.000	2,05	9.272.020.000	2,05	
		2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0	Persentase (%)	100	–		25		25		25		25		200	
	Program :															
	1 Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Persentase (%)	1,5	1,5	3.200.000.000	1,5	3.500.000.000	1,5	3.600.000.000	1,5	3.700.000.000	1,5	3.800.000.000	7,5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2 Peningkatan ekspor industri kreatif	Persentase Nilai ekspor industri kreatif	Persentase (%)	$ 818.902.508	2	426.000.000	2	3.975.000.000	3	4.478.000.000	4	4.939.480.000	4	5.472.020.000	4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi	Jumlah	9	12	5.155.580.282,00	15	8.145.012.570,00	17	9.091.186.422,00	19	14.509.110.564,00	22	15.229.377.153,00	22	Dinas Koperasi dan UKM
	Program :															
	1 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	Persentase (%)	73,58	78,93	1.616.274.064	84,28	1.817.901.471	89,62	1.999.691.618	94,97	2.199.660.780	100	2.419.626.858	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani	Jumlah subak sebagai koperasi tani	Unit	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	Dinas Koperasi dan UKM
	3 Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Jumlah koperasi tenun yang aktif	Unit	2	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	7	Dinas Koperasi dan UKM
	4 Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bankable	Unit	154	52	859.672.462	58	1.550.500.000	64	1.860.600.000	71	2.015.650.000	77	2.170.700.000	322	Dinas Koperasi dan UKM
	5 Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Unit	62	104	199.910.798	104	481.079.202	126	642.256.527	126	5.403.433.851	128	5.464.611.176	128	Dinas Koperasi dan UKM
	6 Penciptaan Iklim Usaha Dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Jumlah UMKM yang bankable	Unit	70	169	541.779.710	180	1.630.000.000	185	1.780.000.000	190	1.920.000.000	195	2.070.000.000	919	Dinas Koperasi dan UKM
	7 Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Jumlah Pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	Unit	550	50	387.943.248	50	1.015.531.897	50	1.108.638.277	50	1.220.365.933	50	1.354.439.119	800	Dinas Koperasi dan UKM
	8 Pengembangan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang dikembangkan	Jumlah	8	8	250.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	450.000.000	8	450.000.000	8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18	**Misi 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT,LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI.**															
	Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru															
	Indikator Tujuan : Indeks konektivitas		**Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)**	**2.74**	**2.7**		**2,6**		**2,5**		**2,4**		**2,3**		**2,3**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)	Indeks	60	62	338.306.628.920	63	393.424.448.022	75	439.971.621.680	81,25	484.839.741.847	82	534.147.932.532	82	
	PROGRAM :															
	1 Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita	Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita	Indeks	N/A	60	6.004.806.384	65	6.605.287.022	70	7.265.815.725	75	7.992.397.297	79	8.791.637.027	79	Dinas Perhubungan

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 Pengembangan infrastruktur transportasi publik	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	Jumlah	9	9	53.812.000	10	1.750.000.000	10	3.250.000.000	11	4.000.000.000	12	4.750.000.000	12	Dinas Perhubungan
	3 Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi	Tingkat pelayanan simpang	Klasifikasi	C	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	752.650.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	1.956.700.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2.144.570.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2.454.985.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2.874.700.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	Dinas Perhubungan
	4 Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	Persentase (%)	40	40	306.572.080	40	900.000.000	50	1.500.000.000	55	2.000.000.000	60	2.500.000.000	60	Dinas Perhubungan
	5 Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	77,44	77,44	331.188.788.456	77,71	382.212.461.000	77,98	425.811.235.955	78,11	468.392.359.550	78,25	515.231.595.505	78,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	**Misi 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN.**															
	Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan															
	Indikator Tujuan : Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum		Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Sasaran :															
	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1. Angka kriminalitas	Kasus	4.607	4.138	1.470.000.000	3.669	3.455.000.000	3.200	3.935.000.000	2.731	4.420.000.000	2.262	4.685.000.000	2.262	
		2. Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan	Persentase (%)	70	70	21.762.000.000	74	23.600.000.000	78	26.015.000.000	80	28.551.500.000	82	31.550.300.000	82	
		2. Persentase penanganan bencana	Persentase (%)	100	100	10.505.686.584	100	30.556.254.140	100	13.711.879.554	100	15.083.067.509	100	15.381.374.260	100	
	Program :															
	1 Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	Persentase (%)	N/A	0	0	66,6	1.600.000.000	77	1.800.000.000	88	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Pengendalian Bencana	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	Persentase (%)	100	100	10.505.686.584	100	30.556.254.140	100	13.711.879.554	100	15.083.067.509	100	15.381.374.260	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kapasitas Sumber Daya Keamanan yang terlatih	Persentase (%)	1,5	4	1.170.000.000	4	1.355.000.000	4	1.435.000.000	4	1.520.000.000	4	1.585.000.000	4	Satuan Polisi Pamong Praja
	4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	Persentase Sumber Daya Keamanan Tradisional yang terlatih	Persentase (%)	0,9	0,9	300.000.000	1,3	500.000.000	1,3	700.000.000	1,3	900.000.000	1,3	1.100.000.000	6,2	Dinas Kebudayaan
	5 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	pelanggaran	247	235	20.340.000.000	225	22.100.000.000	215	24.315.000.000	205	26.651.500.000	200	29.200.300.000	200	Satuan Polisi Pamong Praja
	6 Peningkatan Keamanan Lingkungan	Persentase Sarana Prasarana Keamanan Lingkungan berstandar	Persentase (%)	6,9	6,5	1.422.000.000	6	1.500.000.000	5,5	1.700.000.000	5	1.900.000.000	4,5	2.350.000.000	4,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	**Misi 20 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.**															
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali															
	Indikator Tujuan : 1 Indeks demokrasi		**Persentase (%)**	**78,8**	**79**		**80**		**81**		**81**		**81**		**81**	
	2 Indeks pemberdayaan gender		**Indeks**	63,76	64,23		64,55		64,75		64,9		65		65	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada	Persentase (%)	70,5	73,81	2.555.000.000	73,81	2.860.000.000	73,81	3.260.000.000	75,00	3.610.000.000	75	4.010.000.000	75	
	Program :															
	1 Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase (%)	77.5	77.5	705.000.000	77.5	900.000.000	78	1.100.000.000	78	1.250.000.000	78	1.450.000.000	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	Persentase (%)	100	33,3	690.000.000	16,6	800.000.000	16,6	1.000.000.000	16,6	1.200.000.000	16,6	1.400.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	Persentase (%)	98,45	98,55	1.160.000.000	98,65	1.160.000.000	98,70	1.160.000.000	98,75	1.160.000.000	98,80	1.160.000.000	98,80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	**Misi 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.**															
	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis															
	Indikator Tujuan : Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)		**Persentase (%)**	**14,35**	**14,71**		**15,06**		**15,53**		**15,9**		**16,28**		**16,28**	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	16,93	17,11	12.242.595.013	17,29	77.110.914.176	17,46	79.647.579.144	17,64	57.909.434.157	17,82	77.623.239.073	17,82	
	Program :															
	1 Peningkatan kualitas penataan ruang	Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persentase (%)	90	91	2.012.344.633	92	3.583.880.000	93	3.785.305.000	94	3.942.690.000	95	4.121.550.000	95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2 Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase (%)	5,02	4,99	3.366.210.000	4,95	3.702.831.000	4,89	4.073.114.000	4,83	4.480.425.000	4,75	4.928.468.000	4,75	Dinas Kehutanan
	3 Perlindungan Sumber Daya Air	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persentase (%)	68	68,5	2.855.312.400	69,4	30.248.856.100	70,3	40.643.799.210	70,6	19.808.649.131	72,3	19.119.384.044	72,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4 Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	58	60	4.008.727.980	64	39.575.347.076	68	31.145.360.934	72	29.677.670.026	75	49.453.837.029	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah															
	Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Persentase (%)	61,51	62,08		62,64		63,21		63,77		64,34		64,34	
	Sasaran :															
	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	1 Indeks kualitas air	Indeks	63,17	64,67	4.335.853.000	66,17	12.294.080.000	67,67	10.034.488.000	69,17	10.991.836.800	70,67	11.937.220.480	70,67	
		2 Indeks kualitas udara	Indeks	91,98	92,39		92,89		93,39		93,89		94,39		94,39	
		3 Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	38,57	39,57		40,57		41,57		42,57		43,57		43,57	
		4 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	8,38	9,38		10,38		11,38		12,29		12,29		12,29	
		5 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	0,40	0,43	1.320.999.664	1,10	1.625.000.000	7,14	1.850.000.000	13,79	2.125.000.000	20	2.500.000.000	20	
	PROGRAM :															
	1 Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	Persentase (%)	100	100	205.000.000	55	1.294.700.000	65	1.424.170.000	75	1.566.587.000	90	1.723.245.700	90	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase (%)	7,21	6,64	282.500.000	6,06	799.380.000	5,47	879.318.000	4,87	967.249.800	4,31	1.063.974.780	4,31	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	Persentase (%)	100	100	3.696.353.000	100	9.250.000.000	100	6.681.000.000	100	7.258.000.000	100	7.925.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
	4 Peningkatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase (%)	18	20	152.000.000	22	950.000.000	24	1.050.000.000	26	1.200.000.000	27	1.225.000.000	27	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase (%)	73	73		75		74		73		72		72	Dinas Lingkungan Hidup
	5 Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW	4,3	5	1.320.999.664	15	1.625.000.000	90	1.850.000.000	185	2.125.000.000	300	2.500.000.000	300	Dinas Tenaga Kerja ESDM
		Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	Persentase (%)	55	60		65		70		75		80		80	Dinas Tenaga Kerja ESDM
22	**Misi 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.**															
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik															
	Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik		**Indeks**	**75**	**77**		**79**		**80**		**81**		**82**		**82**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	77	7.873.967.400	79	10.535.865.000	80	12.563.451.000	81	14.756.795.800	82	18.227.476.080	82	
	PROGRAM :															
	1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,22	1,35	5.588.967.400	1,72	7.720.865.000	2,18	9.482.951.000	2,52	11.289.245.800	3	14.365.171.080	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	68	71	1.050.000.000	74	1.155.000.000	77	1.270.500.000	79	1.397.550.000	81	1.537.305.000	81	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	200.000.000	86,5	200.000.000	87	225.000.000	87,5	250.000.000	88	275.000.000	88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks	76,25	76,50	150.000.000	77,00	175.000.000	77,50	200.000.000	78,00	225.000.000	78,50	250.000.000	78,50	Badan Pendapatan Daerah
	5 Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	Indeks	10	10	885.000.000	11	1.285.000.000	20	1.385.000.000	28	1.595.000.000	33	1.800.000.000	33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	6 Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP-el yang mencapai target	Persentase (%)	88.89	88.89	950.000.000	88,89	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.050.000.000	100	1.185.000.000	100	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan															
	Indikator Tujuan : 1 Indeks Reformasi Birokrasi		**Indeks**	**66,16**	**68**		**70**		**72**		**74**		**76**		**76**	
	2 Opini BPK		Status	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Persentase (%)	76,37	77		78		79		80		81		81	
	Sasaran :															
	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	66,16	68	165.266.949.450	70	287.338.765.023	72	228.927.446.220	74	236.426.986.454	76	251.219.050.347	76	
	PROGRAM :															
	1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	Persentase (%)	82	5	108.777.898.692	5	142.590.256.242	5	122.855.688.561	5	126.000.655.028	5	132.300.687.780	100	Sekretariat DPRD
	2 Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rencana Kelitbangan yang diimplementasikan	Persentase (%)	80	70	13.831.215.392	70	15.214.336.931	75	16.735.770.624	75	18.409.347.687	80	20.250.282.455	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	3 Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral yang valid	Persentase (%)	100	100	724.206.200	100	50.800.000.000	100	5.800.000.000	100	6.000.000.000	100	7.000.000.000	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	4 Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	Persentase perencanaan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase (%)	100	100	6.000.000.000	100	6.600.000.000	100	7.260.000.000	100	7.986.000.000	100	8.784.600.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persentase (%)	100	100	6.000.000.000	100	6.600.000.000	100	7.260.000.000	100	7.986.000.000	100	8.784.600.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	6 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase (%)	100	100	1.700.000.000	100	1.870.000.000	100	2.057.000.000	100	2.262.700.000	100	2.488.970.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	7 Peningkatan Pengolahan Arsip	Nilai Evaluasi Kearsipan	Nilai	67	70	2.950.000.000	71	2.950.000.000	72	2.950.000.000	73	2.950.000.000	74	2.950.000.000	74	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	8 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Persentase (%)	100	100	1.079.193.750	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	9 Pengembangan Manajemen Karir	Persentase peningkatan manajemen karier	Persentase (%)	3,50	3,50	2.508.495.000	6,50	8.387.220.000	6,90	8.387.220.000	12,60	8.387.220.000	25,20	8.387.220.000	25,20	Badan Kepegawaian Daerah
	10 Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi kriteria Penilaian dan penghargaan	Persentase (%)	88,67	88,67	937.850.000	90,00	3.040.000.000	92,00	3.040.000.000	93,67	3.040.000.000	96,00	3.040.000.000	96,00	Badan Kepegawaian Daerah
	11 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif	Persentase ASN dan legislatif yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	Persentase (%)	42	43	1.358.300.000	44	2.518.800.000	46	2.118.800.000	47	2.528.800.000	48	2.228.800.000	48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	12 Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah	Persentase (%)	100	0	0	100	3.743.656.595	100	4.118.022.254,5	100	4.529.824.479,95	100	4.982.806.927,95	100	Biro Hukum dan HAM
	13 Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peringkat	15	0	0	10	1.200.000.000	9	1.400.000.000	8	950.000.000	7	950.000.000	7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	14 Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat daerah melaksanakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik dengan baik	Persentase (%)	75	77	361.014.000	79	397.115.400	81	436.826.940	83	480.509.634	85	528.560.597	85	Biro Organisasi
	15 Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat daerah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	Persentase (%)	75	77	952.856.000	79	1.695.000.000	81	1.864.500.000	83	2.050.950.000	85	2.256.045.000	85	Biro Organisasi
	16 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase (%)	75	77	718.130.000	79	1.405.000.000	81	1.545.500.000	83	1.700.050.000	85	1.870.055.000	85	Biro Organisasi
	17 Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Jumlah Informasi yang diberitakan media	Tayang/berita	3.151	4.800	13.858.300.000	4.850	12.550.000.000	4.950	12.785.000.000	5.050	12.950.000.000	5.150	13.450.000.000	5.150	Biro Humas dan Protokol
	18 Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Persentase (%)	100	0	0	100	7.506.978.297	100	7.927.676.127	100	8.720.443.740	100	9.592.488.114	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	19 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Level Kematangan Kelembagaan UKPBJ	Level	Level 3	0,00	0	Level 4	1.804.389.100	Level 4	2.314.828.010	Level 4	2.546.310.811	Level 5	2.800.941.892	Level 5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	20 Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Indeks pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase (%)	100	0	0	100	947.573.000	100	1.042.330.300	100	1.146.563.330	100	1.261.219.663	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	21 Peningkatan Kapabilitas APIP	Level APIP	Level	3	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.100.000.000	3	1.500.000.000	3	1.800.000.000	3	Inspektorat
	22 Peningkatan Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	2.220.000.000	3	4.970.000.000	3	5.545.000.000	4	3.000.000.000	4	3.200.000.000	4	Inspektorat
	23 Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan	Persentase kepuasan pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase (%)	100	100	0	100	8.030.000.000	100	8.833.000.000	100	9.716.300.000	100	10.687.930.000	100	Biro Umum
	24 Peningkatan administrasi pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase (%)	50	54	289.490.416	65	318.439.458	76	350.283.403	87	385.311.744	100	423.842.918	100	Biro Administrasi Pembangunan
	25 Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	Indeks	60	75	1.630.000.000	80	1.725.000.000	85	1.890.000.000	90	1.975.000.000	90	7.220.000.000	90	Badan Penghubung
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0,78	2,53	1.888.313.500,00	7,13	2.327.144.850,00	7,28	2.574.211.291,00	7,41	2.840.771.415,00	7,54	3.128.770.330,00	7,54	Badan Pendapatan Daerah
	Program :															
	1 Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	57,53	57,55	1.888.313.500,00	57,94	2.077.144.850,00	58,24	2.274.211.291,00	58,58	2.490.771.415,00	58,93	2.728.770.330,00	58,93	Badan Pendapatan Daerah
	2 Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	5	0	0	5	250.000.000	6	300.000.000	7	350.000.000	8	400.000.000	8	Biro Perekonomian

6.4 Kegiatan Indikatif

Komitmen besar Visi, Misi dan Program Pembangunan Bali Tahun 2018-2023 bermuara pada Visi" Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Komitmen besar ini memuat 3 (tiga) dimensi utama meliputi Alam Bali, Manusia Bali dan Kebudayaan Bali, yang secara detail dan lengkap tertuang sebagai penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Bali Tahun 2018-2023.

Untuk menjamin penjabaran secara utuh baik substansi serta konsistensi dan keselarasan maka dilakukan perumusan kegiatan indikatif yang bersumber dari intisari perumusan visi misi tersebut. Hal ini sangat penting mengingat pembangunan Bali 5 (lima) tahun kedepan didorong untuk menuju Bali Era Baru yang diwujudkan kedalam 3 (tiga) dimensi meliputi: Pertama, terpeliharanya keseimbangan alam, krama dan kebudayaan Bali (*Genuine Bali*); Kedua, terpenuhinya kebutuhan harapan dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; Ketiga, teratisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif.

Berdasarkan perumusan kegiatan indikatif yang dilakukan, keseluruhan terdapat 518 kegiatan indikatif yang diampu 37 (tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah, yang ter-maping kedalam 15 (lima belas) status tindak lanjut meliputi Usulan DAK, Regulasi, Program Unggulan, *One Island One Managent One Commando*, Kerjasama, Kegiatan Unggulan, Hibah *Top Down*, Hibah, BKK Desa Pakraman, Bantuan Sosial dan Belanja Langsung. Secara terinci kegiatan indikatif tertuang pada Tabel 6.4.

TABEL 6.4

KEGIATAN INDIKATIF SESUAI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
1	*2*	*3*	*4*	17	
1	**Misi 1 : MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI**				
	Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak				
	Indikator Tujuan : 1 Tingkat Inflasi Bali		**Persentase (%)**		
	: 2 Ketersediaan pangan utama		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	**Persentase stok pangan aman**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan				
	1 Studi pemetaan potensi pertanian	Jumlah studi pemetaan potensi pertanian	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Penyediaan bibit pertanian bermutu sebagai sumber pangan pokok	Jumlah bibit pertanian bermutu yang disediakan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	3 Penyediaan obat-obatan tani bermutu	Jumlah obat-obatan tani bermutu yang disediakan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	4 Penyusunan master Plan pemenuhan pangan sehat yang bernilai gizi cukup bagi Krama Bali	Jumlah master plan pemenuhan pangan sehat yang bernilai gizi cukup bagi Krama Bali yang tersusun	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	5 Penetapan regulasi tentang Peran Kabupaten/Kota se Bali sebagai Sumber Pangan Pokok sesuai Potensi Daerah	Jumlah regulasi peran Kab/Kota sebagai sumber pangan pokok yang ditetapkan	Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	6 Pembinaan dan pengawasan pengembangan sumber pangan pokok sesuai potensi daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Pengembangan sumber pangan pokok	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	7 Pengendalian dan pengawasan penggunaan pestisida / bahan kimia berbahaya pada pertanian pangan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan penggunaan pestisida / bahan kimia berbahaya pada pertanian pangan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	8 Pemetaan daerah rentan pangan dan konsumsi pangan sehat, bernilai gizi cukup rumah tangga Krama Bali	Jumlah daerah rentan pangan dan konsumsi pangan sehat, bernilai gizi cukup rumah tangga Krama Bali yang dipetakan	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	9 Penyusunan standar pelayanan minimal pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali	Jumlah standar pelayanan minimal pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali yang disusun	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	10 Sosialisasi, komunikasi, informasi edukasi terintegrasi tentang pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali	Jumlah peserta sosialisasi komunikasi, informasi edukasi terintegrasi tentang pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	11 Peningkatkan layanan gizi masyarakat kurang mampu	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mendapatkan layanan gizi	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	12 Penyusunan agenda tahunan daerah objek, komoditi pangan murah Kabupaten/Kota	Jumlah even promosi objek, komoditi pangan murah Kabupaten/Kota	Jumlah	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	13 Kerjasama pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota pada sektor produsen pangan murah	Jumlah kerjasama antara provinsi dengan Kabupaten/Kota pada sektor produsen pangan murah yang ditetapkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	14 Penyusunan perda dan peraturan turunannya terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah jenis peraturan daerah dan turunannya yang tersusun	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	15 Studi pemetaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Bali	Jumlah luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipetakan untuk dilindungi	Ha	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	16 Pemberian insentif lahan pertanian petani yang lahannya berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah petani yang lahannya berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mendapatkan insentif	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BKK
	17 Pemberdayaan BUMD untuk memasarkan produksi pertanian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang difasilitasi pemasarannya oleh BUMD	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	18 Peningkatan produksi pertanian lokal untuk pemenuhan swasembada beras	Jumlah Produksi Pertanian Lokal untuk pemenuhan swasembada beras	Jumlah	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	19 Penyediaan obat-obatan tani bermutu	Jumlah obat-obatan tani bermutu yang disediakan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	20 Pengembangan produksi peternakan komuditas lokal	Jumlah produksi perternakan komuditas lokal	Ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	21 Pengembangan Budidaya ikan konsumsi dan ikan hias di Kabupaten Buleleng	Jumlah budidaya ikan konsumsi dan ikan hias yang diproduksi	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	22 Pegembangan Budidaya ikan tawar di Kabupaten Bangli dan Tabanan	Jumlah ikan budidaya tawar yang diproduksi	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	23 Pengembangan budidaya ikan laut, udang galah, di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan dan Jembrana	Jumlah ikan budidaya laut dan udang galah yang diproduksi	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	24 Pengembangan pasar ikan di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Badung dan Klungkung	Jumlah pasar ikan yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	25 Penyediaan benih perikanan bermutu	Jumlah benih perikanan bermutu yang disediakan	Jumlah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	26 Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Badung dan Klungkung	Jumlah jenis produksi Perikanan Tangkap yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	27 Pengembangan industri pengolahan perikanan tangkap untuk pasar ekspor	Jumlah jenis industri pengolahan perikanan tangkap	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	28 Pembinaan dan pengawasan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak yang tersertifikasi. Terseleksinya ternak sapi unggul. Terseleksinya petugas berprestasi. Terbentuknya kelompok anjing belang	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	29 Pengembangan Ternak Ruminansia	Jumlah kelompok peternak yang memahami budidaya ternak ruminansia. Jumlah kelompok peternak yang mengembangkan ternak kambing.	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	30 Pengembangan Ternak Non Ruminansia	Jumlah pengembangan ternak babi dan itik lokal Bali di lokasi sentra	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	31 Pendataan lumbung yang masih berfungsi	Jumlah lumbung berfungsi baik yang terdata	Unit	Dinas ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	32 Studi revitalisasi lumbung sebagai penyangga stok pangan daerah	Jumlah studi revitalisasi lumbung sebagai penyangga stok pangan daerah	Jumlah	Dinas ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	33 Pemberdayaan fungsi lumbung di masyarakat	Jumlah lumbung masyarakat yang diberdayakan	Jumlah	Dinas ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	34 Penataan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pelaku usaha PSAT yang mendapatkan pembinaan	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	35 Pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase peningkatan sampel pangan segar yang aman dikonsumsi	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	36 Peningkatan penyebaran informasi penanganan keamanan pangan dan mutu pangan segar	Persentase peningkatan kelompok pengusaha pangan segar yang dibina	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	37 Peningkatan registrasi sertifikasi dan keamanan pangan segar	Persentase peningkatan PSAT yang ter-registrasi dan ter-sertifikasi prima	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	38 Penerapan jaminan mutu keamanan pangan segar	Persentase peningkatan PSAT yang menerapkan sistem jaminan mutu keamanan pangan	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	**Persentase pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin**	**Persentase (%)**		

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	Kegiatan :				
	1 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten / Kota untuk penyediaan sarana prasarana melalui pemberdayaan komunitas/ lembaga Badan usaha desa (BUD) untuk menyediakan sandang gratis dan murah bagi Krama Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	2 Kerjasama antar pemerintah daerah , pemerintah dengan swasta dan swasta dengan swasta dalam pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali gratis/ murah			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	3 Penyediaan bahan baku tenun	Jumlah bahan baku tenun yang tersedia	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	4 Pembentukan koperasi usaha sandang Bali Krama Bali	Jumlah koperasi usaha sandang krama Bali yang dibentuk	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	5 Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan swasta dengan swasta dalam pemenuhan bahan baku industri sandang Bali	Jumlah kerjasama dalam bidang sandang	Jumlah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	6 Pemberian insentif kepada Krama Bali yang berusaha dibidang industri sandang berorientasi ramah lingkungan dan berlokasi di Bali Barat, Timur dan utara	Jumlah Krama Bali yang berusaha dibidang industri sandang yang mendapat insentif	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Hibah Top Down
	7 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kesetaraan sandang dan pendapatan pelaku usaha sandang Krama Bali.	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan kesetaraan sandang dan pendapatan pelaku usaha sandang	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	8 Pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam pemberian kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha sandang Bali untuk Krama Bali	Jumlah Pelaku Usaha Sandang Bali yang mendapatkan kredit mudah dan murah dari BPD	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	9 Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam pemberian kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha sandang Krama Bali	Jumlah Pelaku usaha sandang bali yang difasilitasi kredit mudah dan murah oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	10 Bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudahan akses permodalan pelaku usaha sandang Krama Bali	Jumlah laporan bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudahan akses permodalan pelaku usaha sandang Krama Bali	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	11 Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan swasta dengan swasta pelaku usaha sandang Branding Bali Krama Bali dalam peningkatan promosi dan pemasaran terintegrasi dengan produk Krama Bali lainnya melalui media cetak dan elektronik, pameran, penyelenggaraan event-event terintegrasi dengan promosi daerah lainnya di dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan swasta dengan swasta pelaku usaha sandang Branding Bali Krama Bali	Jumlah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	12 Pembangunan sarana prasarana pemasaran online terintegrasi produk sandang Bali	Jumlah sarana prasarana pemasaran produk sandang bali secara online	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung
	13 Penyusunan buku biru rencana strategis pengembangan usaha "Sandang Bali Krama Bali" menjadi unggulan pasar lokal dan ekspor.	Jumlah komuditas usaha sandang krama Bali yang menjadi uanggulan pasar lokal dan eksport berdasarkan buku biru rencana strategis	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	3 Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	**Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Penyusunan standar rumah layak huni minimal Krama Bali - SLM-KB	Jumlah Standar rumah layak huni minimal krama bali yang tersedia	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	2 Pemetaan kebutuhan rumah layak huni masyarakat miskin	Jumlah pemetaan kebutuhan rumah layak huni masyarakat miskin	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung
	3 Penyusunan Master Plan pencapaian dan realisasi kebutuhan rumah layak huni masyarakat miskin	Jumlah Master plan pencapaian dan realisasi kebutuhan rumah layak huni masyarakat miskin	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung
	4 Mendorong pemerintah pusat melaksanakan program sejuta rumah sebagai salah satu sumber rumah murah layak huni Krama Bali di Provinsi Bali			Dinas Perumahan dan Permukiman	Usulan DAK
	5 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pemenuhan dan realisasi kebutuhan rumah masyarakat miskin	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/ Kota pemenuhan dan realisasi kebutuhan rumah masyarakat miskin	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung
	6 Penetapan regulasi kredit kepemilikan perumahan murah layak huni Krama Bali melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan sumber pendanaan lainnya.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	7 Peningkatan kepemilikan rumah Krama Bali melalui kredit rumah murah	Jumlah kepemilikan rumah krama Bali melalui kredit rumah murah	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung
	8 Pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu sumber pendanaan mudah dan rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali	Jumlah LPD yang memberikan layanan kredit rumah layak huni kepada Krama Bali	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	9 Pembangunan sistem data base Krama Bali yang terintegrasi dengan data base kependudukan Krama Bali untuk sasaran bantuan rumah layak huni kab/Kota di Provinsi Bali dan menyusun skala prioritas bantuan	Jumlah integrasi sistem database kependudukan untuk sasaran bantuan rumah layak huni	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	10 Pemberian bantuan Rp.50.000.000.,-pembangunan rumah layak huni Krama Bali yang memenuhi sarana sumur bor, instalasi dan sanitasi rumah layak huni			Dinas Perumahan dan Permukiman	Hibah Top Down
	11 Bimbingan dan pengawasan Pemberdayaan dana desa untuk mengembangkan lingkungan dan drainase sehat dilingkungan rumah layak huni Krama Bali	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pemberdayaan dana desa untuk mengembangkan lingkungan dan drainase sehat dilingkungan rumah layak huni Krama Bali	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	12 Pengendalian dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan bantuan pembangunan rumah layak huni Krama Bali	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan rumah layak huni Krama Bali yang terbangun	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	**Inflasi Pangan Bali**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Stabilisasi harga jual hasil-hasil pertanian	Tingkat stabilitas harga jual hasil pertanian	Rupiah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	2 Operasi pasar penggunaan zat berbahaya pada makanan secara berkesinambungan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar penggunaan zat berbahaya pada makanan secara berkesinambungan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
2	**Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.**				
	Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian				
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	**Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)**	**Persentase (%)**		

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	Kegiatan :				
	1 Pemetaan potensi komoditi pertanian dalam arti luas pasar lokal dan export	Jumlah jenis potensi komuditas pertanian dalam arti luas untuk pemenuhan pasar lokal dan eksport yang dipetakan	Jumlah Jenis	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Penetapan Regulasi penyaluran hasil pertanian lokal Bali ke hotel, restoran, usaha dan jasa pariwisata.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	3 Pengembangan pasar sentra daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	Jumlah pasar sentra daging yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	4 Pendampingan teknologi pembibitan, peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dalam arti luas	Jumlah teknologi pembibitan untuk peningkatan produktifitas pertanian yang diberikan kepada petani	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	5 Kerja sama dengan pemerintah kab/Kota dalam pemberian bantuan benih unggul secara berkala dan terstruktur serta pendampingan pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	6 Sistem pertanian terpadu Semesta Berencana **(Sipardu SB)** yang berisi pemberian bantuan sapi untuk menghasilkan produk organik dan biogas kepada petani yang tinggal disawah/kebun berdasarkan hasil pemetaan	Jumlah Sistem pertanian terpadu Semesta Berencana **(Sipardu SB)** yang dikembangkan	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kegiatan Unggulan
	7 Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyangga kebutuhan pangan dan penyaluran hasil produksi pangan Krama Bali	Jumlah penyaluran hasil produksi pangan krama Bali melalui BUMD	Ton	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	8 Pemberian insentif bagi Krama Bali agar memanfaatkan lahan pekarangan perumahannya untuk budidaya tanaman sarana upakara Krama Bali dan kebutuhan pangan keluarga	Jumlah krama bali yang mendapatkan insentif	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BKK

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	9 Pemberian bibit tanaman tumpangsari dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan bahan upakara Krama Bali	Jumlah bibit tanaman tumpangsari dan peternakan yang terpenuhi untuk kebutuhan bahan upakara	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	BKK
	10 Pemberian insentif bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian olahan bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BKK
	11 Penyusunan studi kelayakan Pembangunan Kebun Raya Gumi Banten Bali dan Tanaman Langka Bali	Jumlah jenis varietas tanaman langka dan bernilai tinggi yang dibangun dikebun raya Gumi Banten sesuai dengan hasil penyusunan studi kelayakan	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	12 Pembangunan Kebun Raya Gumi Banten Bali dan Tanaman Langka	Jumlah kebun raya Gumi Banten Bali dan tanaman langka yang dibangun	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kegiatan Unggulan
	13 Pemberian insentif kepada Desa Dinas dan atau Desa Adat yang mengembangkan Taman Gumi Banten		Juta Rupiah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BKK
	14 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan usaha pertanian dalam arti luas	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan usaha pertanian dalam arti luas	Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	15 Pendampingan tenaga ahli untuk mengembangkan koperasi Subak bidang usaha komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Jumlah koperasi Subak bidang usaha komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkembang	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	16 Peningkatan produktivitas tanaman pangan berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah	Jumlah produksi tanaman pangan yang meningkat berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah	Ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	17 Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pemberian bantuan bibit unggul tanaman hortikultura			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	18 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pertumbuhan usaha komoditi tanaman hortikultura	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pertumbuhan usaha komoditi tanaman hortikultura	Laporan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	19 Pengendalian dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap dalam peningkatan peran Subak sebagai mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan peran Subak sebagai mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	2 Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	**1 Nilai Tukar Petani (NTP)**	**Persentase (%)**		
		2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Pembangunan sistem irigasi untuk pertanian.	Persentase irigasi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	2 Pembangunan jalan usaha tani.	Panjang jalan usaha tani	Kilometer	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	3 Pembangunan jalan produksi.	Panjang jalan produksi yang dibangun	Kilometer	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	4 Pembangunan waduk, bendungan, dan embung.	Jumlah waduk, bendungan, dan embung yang dibangun	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan DAK
	5 Pengembangan Industri pengolahan buah-buahan di Kabupaten Buleleng.	Jumlah jenis industri pengelolaan buah yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	6 Pengembangan Industri pengolahan kopi, tanaman obat (simplicia) dan sayur-sayuran di Kabupaten Bangli.	Jumlah jenis industri pengelolaan buah yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	7 Pengembangan Industri pengolahan daging di Kabupaten Badung.	Jumlah jenis industri pengelolaan buah yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	8 Pengembangan Industri pengolahan pertanian di Kabupaten Tabanan.	Jumlah jenis industri pengelolaan pertanian yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	9 Pengembangan Industri pengolahan ikan di Kabupaten Jembrana.	Jumlah jenis industri pengelolaan ikan yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	10 Pengembangan Industri pengolahan pakan ternak di Kabupaten Tabanan.	Jumlah jenis industri pengelolaan pakan ternak yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	11 Pengembangan Industri pengolahan garam di Kabupaten Buleleng.	Jumlah jenis industri pengelolaan garam yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	12 Pengembangan Industri pengolahan sampah di Kota Denpasar.	Jumlah jenis industri pengelolaan sampah yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	13 Penerapan sistem pertanian organik di daerah tangkapan air danau, waduk, bendungan, dan embung di Bali.	Jumlah penerapan sistem pertanian organik di daerah tangkapan air danau, waduk, bendungan, dan embung di Bali	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	14 Penyusunan master plan dan Pemetaan daerah sebagai pilot project, pengembangan usaha pertanian organik	Jumlah pilot project pengembangan usaha pertanian organik berdasarkan master plan	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	15 Kerja Sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan pilot project mengembangan pertanian organik di kab/Kota Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	16 Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan koperasi Subak produk pertanian organik yang terintegrasi dengan koperasi bidang usaha komoditas hortikultura			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	17 Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pemberian bantuan pengembangan usaha pertanian organik di kab/Kota Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	18 Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pemberian bantuan pengembangan usaha peternakan dan perikanan organik di kab/Kota Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	19 Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pertumbuhan usaha pertanian berwawasan lingkungan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pertumbuhan usaha pertanian berwawasan lingkungan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	20 Penyusunan bisnis plan Badan usaha milik daerah (BUMD)	Jumlah bisnis plan Badan usaha milik daerah (BUMD) yang disusun	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	21 Pengembangan Badan usaha milik daerah (BUMD) membangun mitra kerja dengan pelaku usaha pertanian	Jumlah pelaku usaha pertanian yang bekerja sama dengan BUMD	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	3 Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	**Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Penyusunan "cetak biru" rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen "cetak biru" rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam arti luas yang tersusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Pengembangan balai latihan kerja (BLK) terintegrasi dengan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian dalam arti luas berdasarkan "cetak biru"	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertanian dalam arti luas	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	3 Pelatihan, magang pelatih dan penyuluh di dalam dan luar negeri terintegrasi dengan pengembangan produk pertanian dalam arti luas berdasarkan "cetak biru"	Jumlah peserta pelatihan, magang pelatih dan penyuluh di dalam dan luar negeri yang mengembangkan produk pertanian dalam arti luas	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	4 Bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota pertumbuhan jumlah sumber daya manusia pertanian dalam arti luas sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Jumlah laporan bimbingan dan pengawasan pertumbuhan jumlah sumber daya manusia pertanian dalam arti luas sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	5 Pendampingan dan pelatihan kepada petani.	Jumlah petani yang mendapatkan pendampingan dan pelatihan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	6 Pelatihan terintegrasi kepada petani untuk peningkatan hasil produktivitas lahan pertanian dalam arti luas	Jumlah petani yang mendapat pelatihan terintegrasi	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	7 Pemberdayaan dan pembinaan komunitas sosial kemasyarakatan petani Sekaa Manyi	Jumlah komunitas sosial kemasyarakatan tani (sekaa manyi) yang diberdayakan dan dibina	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Unggulan
	8 Pelatihan secara terintegrasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas	jumlah produktifitas pertanian dalam arti luas yang meningkat	Ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	9 Pelatihan terpadu komunitas Subak dengan program peningkatan produktivitas lahan pertanian	Jumlah Komunitas subak yang terlatih	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	10 Pelatihan usaha pertanian organik	Jumlah usaha pertanian organik yang dilatih	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
3	**Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.**				
	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali				
	Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)		**Dalam tahun**		
	Sasaran :				
	1 Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	**Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Peningkatan kualitas jalan untuk pelayanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada masyarakat kab/Kota	Panjang jalan untuk pelayanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang dibangun	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	2 Pengembangan Rumah Sakit Khusus berstandar internasional	Jumlah Rumah Sakit Khusus berstandar internasional yang dibangun	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	3 Pembangunan Pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana			Dinas Sosial	Usulan DAK
	4 Pemetaan ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga medis dan para medis berdasarkan standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah sarana prasarana kesehatan, tenaga medis dan para medis yang dipetakan sesuai standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	5 Pemetaan rasio Poskedes, Polides/Pustu/ penduduk setiap Desa /Kelurahan Kab/Kota Provinsi Bali	Rasio Poskesdes/Polides/Pustu yang dipetakan	Rasio	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	6 Penyediaan kebutuhan tenaga medis dan paramedis diseluruh lembaga pelayanan kesehatan daerah berdasarkan standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah tenaga medis dan paramedis pada lembaga pelayanan kesehatan daerah berdasarkan SPM KBS yang tersedia	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	7 Kerja sama pemerintah daerah dengan universitas yang memiliki fakultas kedokteran dalam pemenuhan kebutuhan Dokter Spesialis Kandungan dan Anak melalui pola pemberian beasiswa			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	8 Pengembangan pelayanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada masyarakat kab/Kota Provinsi Bali	Jumlah jenis layanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada masyarakat yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	9 Kerjasama pemerintah Kabupaten /Kota dalam pembangunan sarana prasarana pelayanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Krama Bali			Dinas Kesehatan	One Island One Management and One Commando
	10 Pembentukan komunitas sosial kemasyarakatan pemerhati kesehatan lingkungan Krama Bali	Jumlah komunitas sosial kemasyarakatan pemerhati kesehatan lingkungan Krama Bali yang dibentuk	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	11 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha peternakan di lingkungan pemukiman yang berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	12 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan derajat pelayanan kesehatan Krama Bali	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalampeningkatan derajat pelayanan kesehatan Krama Bali	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	13 Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan swasta di bidang pelayanan kesehatan			Dinas Kesehatan	One Island One Management and One Commando
	14 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Usada Bali).	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Usada Bali) yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	15 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan promosi terintegrasi dan berkesinambungan kampanye pola dan lingkungan hidup sehat Krama Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	16 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pembentukan komunitas Krama Bali Mandiri pemerhati kesehatan lingkungan hidup dan pola hidup sehat			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	17 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota pembentukan komunitas Krama Bali Mandiri pemerhati kesehatan lingkungan hidup dan pola hidup sehat	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota pembentukan komunitas Krama Bali Mandiri pemerhati kesehatan lingkungan hidup dan pola hidup sehat	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	18 Mendorong pemerintah pusat membangun pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA yang dibangun	Jumlah	Dinas Sosial	Usulan DAK
	19 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah laporan	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	2 Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Penetapan regulasi pelayanan kesehatan GRATIS sesuai dengan standar pelayanan kesehatan Krama Bali Sehat (KBS)		Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Regulasi

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	2 pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan minimal kesehatan Provinsi Bali	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan minimal kesehatan Provinsi Bali	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	3 Pembangunan sistem standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah sistem standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS) yang terbangun	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	4 Penetapan regulasi sistem standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5 Penetapan regulasi ketersediaan sarana prasarana kesehatan berkualitas International Organization for Standardization (ISO)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	6 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan sarana prasarana lembaga kesehatan pemerintah daerah berdasarkan standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	7 Pembinaan dan pengawasan (Binwas) Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pelayananan kesehatan Krama Bali untuk memenuhi standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah laporan pebinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayananan kesehatan Krama Bali	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	8 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pengembangan standar pelayanan minimal kesehatan berkualitas International Organization for Standardization (ISO)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	Sasaran :				
	3 Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	**Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Pembangunan Sistem riwayat kesehatan Elektronik Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Krama Bali	Jumlah sistem riwayat kesehatan Elektronik Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Krama Bali yang dibangun	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung
	2 Kerjasama membentuk lembaga dan manajemen antar pemerintah daerah pengelola sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali terintegrasi seluruh Kabupaten/Kota			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	3 Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan sistem pengelola sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali terintegrasi seluruh Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan sistem pengelola sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali terintegrasi	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung
	4 Penetapan regulasi mengembangkan data base riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5 Pelatihan pengoperasian sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali terintegrasi	Jumlah peserta pelatihan pengoperasian sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung
4	**Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.**				
	Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas				
	Indikator Tujuan : Rata-rata lama sekolah		**Tahun**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	**Angka harapan lama sekolah**	**Tahun**		
	Kegiatan :				
	1 Penetapan regulasi SPM pendidikan menengah Provinsi Bali	Jumlah regulasi SPM pendidikan menengah Provinsi Bali yang ditetapkan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Regulasi

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	2 Pengintegrasian pendidikan pertanian organik dalam kurikulum muatan lokal	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan pertanian organik dalam kurikulum muatan lokal	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	3 Pembentukan ekstra kurikuler Gerakan Siswa Pencinta Pertanian Organik (GSP2O)	Jumlah sekolah yang membentuk ekstra kurikuler Gerakan Siswa Pencinta Pertanian Organik (GSP2O)	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	4 Pemetaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Provinsi Bali	Persentase pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Provinsi Bali	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	5 Pemetaan pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik dan pendukung pendidikan usia dini, Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum, kejuruan dan sederajat lainnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Krama Bali	Persentase pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik dan pendukung pendidikan usia dini, Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum, kejuruan dan sederajat lainnya	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	6 Pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Krama Bali sekolah menengah Provinsi Bali	Persentase Pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Krama Bali sekolah menengah Provinsi Bali	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	7 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan dan pengembangan laboratorium dan sarana prasarana ekstrakuriluler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan standar pelayanan pendidikan minimal (SPM) Krama Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	8 Pembangunan sistem monev berbasis informasi teknologi kondisi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Krama Bali sekolah menengah Provinsi Bali	Persentase terbangunnya sistem monev berbasis informasi teknologi tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	9 Monitoring dan evaluasi berkesimambungan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di seluruh sekolah menengah Provinsi Bali secara berkesinambungan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di seluruh sekolah menengah	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	10 Pendidikan dan pelatihan berkesinambungan kepada guru untuk mata pelajaran tertentu	Jumlah guru yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mata pelajaran tertentu	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	11 Pertukaran guru untuk mata pelajaran tertentu khususnya pada daerah-daerah pencapaian Ujian Nasional (UN)	Persentase pertukaran guru untuk mata pelajaran tertentu khususnya pada daerah-daerah pencapaian Ujian Nasional (UN)	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	12 Pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi			Dinas Pendidikan	Hibah Top Down
	Sasaran :				
	2 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Pengadaan sarana dan prasarana untuk pendidikan menengah	Jumlah sarana dan prasarana untuk pendidikan menengah yang diadakan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	2 Pemberian bea siswa kepada anak dari kelompok masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan (SMK)	Jumlah siswa dari kelompok masyarakat kurang mampu yang mendapat beasiswa	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	3 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten /Kota dalam pemberian beasiswa bagi siswa/siswi Sekolah Pendidikan Dasar/sederajat dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	4 Penetapan regulasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota tercapainya pelaksanaan program pemerintah Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota tercapainya pelaksanaan program pemerintah Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
5	**Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN.**				
	Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal				
	Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu		**Persentase (%)**		
	2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	**Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu**	**Jumlah**		
	Kegiatan :				
	1 Penyelenggaraan pendidikan non formal berbasis keagamaan Hindu	Jumlah pendidikan non formal berbasis keagamaan Hindu yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	2 Penyusunan buku panduan pelaksanaan penataran, pelatihan tentang implementasi nilai-nilai Sad Kertih	Jumlah buku panduan pelaksanaan penataran, pelatihan tentang implementasi nilai-nilai Sad Kertih	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	3 Penataran, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Sat Kerthi	Jumlah peserta Penataran, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Sat Kerthi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	4 Penguatan internalisasi nilai-nilai Sat Kerthi melalui sistem pendidikan formal, informal dan non formal.	Jumlah peserta internalisasi nilai-nilai Sat Kerthi melalui sistem pendidikan formal, informal dan non formal.	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	5 Penyediaan kebutuhan tenaga pendidik untuk proses belajar mengajar Seni, Sastra dan Budaya di sekolah, sanggar - sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat	Jumlah tenaga pendidik untuk proses belajar mengajar Seni, Sastra dan Budaya yang disediakan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	6 Pengangkatan Guru Kontrak yang bertugas untuk mengajar Seni, Sastra dan Budaya serta Agama Hindu di sekolah	Jumlah Guru Kontrak yang bertugas untuk mengajar Seni, Sastra dan Budaya serta Agama Hindu di sekolah	Jumlah	Badan Kepegawaian Daerah	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	7 Penataran penghayatan nilai-nilai Tri Hita Karana pada penduduk usia kerja	Jumlah peserta penghayatan nilai-nilai Tri Hita Karana pada penduduk usia kerja	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	8 Mendorong pemerintah pusat agar pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional			Biro Hukum dan HAM	Usulan DAK
	9 Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah berbasis Agama Hindu			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	10 Kerjasama dengan Parisada Hindu Darma dan pihak terkait lainnya yang kompeten dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	11 Kerjasama dengan desa Adat dalam penetapan penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu dalam bentuk Pasraman			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	12 Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik pendidikan dan manajemen penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu	Jumlah jenis sistem pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik pendidikan dan manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	13 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Agama Hindu pada tingkat sekolah dasar			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	14 Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengadaan tenaga pendidik pendidikan berbasis Agama Hindu			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	15 Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	16 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan menengah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan menengah	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
6	**Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI**				
	Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi				
	Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		**Persentase (%)**		
	Sasaran:				
	1 Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	**Indeks Daya Saing SDM Bali**	**Indeks**		
	Kegiatan :				
	1 Pemetaan potensi usaha berbasis unggulan/ potensi daerah sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor di Provinsi Bali	Jumlah potensi usaha berbasis unggulan/ potensi daerah sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor di Provinsi Bali yang dipetakan	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Kerjasama pelatihan/magang tenaga kerja Krama Bali dengan perusahaan dalam dan luar negeri dalam pengembangan usaha unggulan Provinsi Bali			Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Kerja Sama
	3 Pembangunan pusat pengembangan dan pelatihan pelaku usaha pemula ekonomi kreatif berbasis inovasi, teknologi dan berorientasi ramah lingkungan terintegrasi dengan pelatihan pelaku usaha lainnya	Jumlah pusat pengembangan dan pelatihan pelaku usaha pemula ekonomi kreatif berbasis inovasi, teknologi dan berorientasi ramah lingkungan terintegrasi dengan pelatihan pelaku usaha lainnya yang dibangun	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	4 Pengembangan fasilitas dan tenaga pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai kompetensi sesuai hasil pemetaan pengembangan usaha, industri dan usaha produk unggulan terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah fasilitas dan tenaga pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai kompetensi sesuai hasil pemetaan pengembangan usaha, industri dan usaha produk unggulan terintegrasi antar kab/Kota yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	5 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota dalam peningkatan wirausaha baru	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota dalam peningkatan wirausaha baru	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	6 Pengembangan sistem Link and Match antara kompetensi kewirausahaan Krama Bali dengan dunia usaha dan industri	Jumlah jenis sistem Link and Match antara kompetensi kewirausahaan Krama Bali dengan dunia usaha dan industri yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	7 Penetapan regulasi penerapan nilai-nilai Tri Hita Karana menjadi budaya kerja pada pelaku usaha, manajemen dan karyawan/ti perusahaan yang berusaha di Provinsi Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	8 Pengembangan Kawasan pedangang kaki lima (PKL) yang berciri khas Bali untuk pekerja sektor informal	Jumlah kasawan pedangang kaki lima (PKL) yang berciri khas Bali untuk pekerja sektor informal yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	9 Pemberian insentif kepada pelaku wirausaha baru sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu			Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Hibah Top Down
	10 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menumbuh-kembangkan wirausaha baru	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	One Island One Management and One Commando
7	**Misi 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.**				
	Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali				
	Indikator Tujuan : Persentase Kemiskinan		**Persentase (%)**		

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	**Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) keluarga Krama Bali sejahtera (KKBS)	Jumlah jenis standar pelayanan minimal (SPM) keluarga Krama Bali sejahtera (KKBS)	Jumlah	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Belanja Langsung
	2 Pemetaan kondisi sosial ekonomi keluarga Krama Bali yang berpotensi untuk mendapatkan bantuan sosial	Jumlah Krama Bali yang mendapatkan bantuan sosial sesuai pemetaan	Jumlah	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Belanja Langsung
	3 Penetapan regulasi standar pelayanan minimal (SPM) keluarga Krama Bali sejahtera (KKBS)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	4 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten / Kota dalam mengurangi dampak kemiskinan melalui menyalurkan bantuan sosial Keluarga Krama Bali Sejahtera (KKBS)	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten / Kota dalam mengurangi dampak kemiskinan melalui menyalurkan bantuan sosial Keluarga Krama Bali Sejahtera (KKBS)	Jumlah	Dinas Sosial	Belanja Langsung
	5 Pemberian bantuan pelaksanaan upacara massal Pitra Yadnya dan Manusa Yadnya Krama Bali			Biro Kesra	Hibah Top Down
	6 Pemetaan potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR)	Jumlah potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipetakan	Jumlah	Dinas Sosial	Belanja Langsung
	7 Pembentukan lembaga pengelola Corporate Social Responsibility (CSR)	Jumlah unsur Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan sebagai pengelola	Jumlah	Dinas Sosial	Belanja Langsung
	8 Penetapan regulasi tentang pengelola Corporate Social Responsibility (CSR)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	9 Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR)			Dinas Sosial	Bansos

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	10 Pemberian bantuan Santunan Kematian Masyarakat (Santimas) Krama Bali Provinsi Bali dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu sumber pendanaannya (Unggulan)			Dinas Sosial	Bansos
	11 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos) penunjang masyarakat Difabel			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
8	**Misi 8 : MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.**				
	Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing				
	Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	**Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Penyediaan sarana prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK)	Jumlah sarana prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) yang disediakan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	2 Pengembangan pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi penderita cacat permanen	Jumlah penderita cacat permanen yang mendapat pelatihan BLK	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	3 Sertifikasi instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan	Jumlah instruktur BLK yang disertifikasi sesuai kompetensi teknis yang dibutuhkan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	4 Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja melalui inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja	Jumlah angkatan kerja yang ditingkatkan kompetensinya melalui inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja	Orang	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	5 Kerjasama kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan industri dalam memperluas akses peluang kerja melalui bursa tenaga kerja			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	6 Kerjasama kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja Krama Bali melalui pemagangan			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	7 Pengembangan sistem Link and Match antara kompetensi tenaga kerja Krama Bali dengan dunia usaha dan industri	Jumlah jenis sistem Link and Match antara kompetensi tenaga kerja Krama Bali dengan dunia usaha dan industri yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	8 Pengembangan jaringan informasi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal dan internasional melalui online, lembaga pemerintah, pelaku usaha dalam dan luar negeri	Jumlah jaringan informasi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal dan internasional melalui online, lembaga pemerintah, pelaku usaha dalam dan luar negeri yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	9 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan lapangan kerja Krama Bali	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan lapangan kerja Krama Bali	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	**Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja paripurna (dilatih, disertifikasi dan ditempatkan) berdasarkan buku biru pengembangan sumber daya manusia Krama Bali sesuai dengan kebutuhan pasar domestik dan global	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan tenaga kerja paripurna	Orang	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	2 Pengembangan Bank pembangunan daerah (BPD) sebagai sumber pendanaan mudah dan murah bagi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat akses bantuan pendanaan mudah dan murah dari BPD	Orang	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	3 Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai sumber pendaanaan mudah dan murah bagi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat akses bantuan pendanaan mudah dan murah dari LPD	Orang	Biro Perekonomian	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	4 Penetapan regulasi mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan rasio tertentu pada tingkat manajamen dan staf di Kabupaten/Kota Provinsi Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5 Penetapan regulasi pengendalian tenaga kerja KTP non domisili Bali dengan ketentuan-ketentuan tertentu			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	6 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penurunan angka pencari kerja Krama Bali	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penurunan angka pencari kerja Krama Bali	Laporan	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
9	**Misi 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.**				
	Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan				
	Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	**Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan**	**Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaan**		
	Kegiatan :				
	1 Pengembangan Jaminan sosial Kesehatan pekerja Krama Bali berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)	Jumlah pekerja Krama Bali yang mendapatkan jaminan sosial kesehatan berdasarkan SPM KBS	Orang	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	2 Kerjasama dengan klinik penyelenggara layanan BPJS Kesehatan dalam jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	3 Penetapan regulasi kepesertaan tenaga kerja sektor informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	4 Pemberian insentif keikutsertaan pekerja di sektor informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja ESDM	Bansos
	5 Kerjasama kemitraan Pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam perluasan jaminan untuk tenaga kerja informal			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	6 Pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	Laporan	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	7 Penetapan regulasi jaminan tenaga kerjaan dan menjadi bagian dari kontrak kerjasama tenaga kerja bekerja di luar negeri.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	8 Pembinaan dan pengendalian terintegrasi agen tenaga kerja asing yang memenuhi regulasi tentang ketenagakerjaan.	Jumlah laporan pembinaan dan pengendalian terintegrasi agen tenaga kerja asing yang memenuhi regulasi tentang ketenagakerjaan.	Laporan	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	9 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi tenaga kerja Krama Bali yang bekerja di luar negeri			Dinas Tenaga Kerja ESDM	One Island One Management and One Commando
	10 Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten / Kota dalam peningkatan pelindungan tenaga kerja Krama Bali yang bekerja diluar negeri (sesuai kewenangan)	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten / Kota dalam peningkatan pelindungan tenaga kerja Krama Bali yang bekerja diluar negeri	Laporan	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
10	**Misi 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.**				
	Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali				
	Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju		**Jumlah**		
	Sasaran :				
	1 Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	**1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali**	**Jumlah**		
		2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia	**Jumlah**		
	Kegiatan :				
	1 Pemeliharaan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali.	Jumlah adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali yang dipelihara	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	2 Pemberian penghargaan kepada para pelaku Seni, Sastra, dan Budaya.	Jumlah pelaku seni sastra dan budaya yang mendapat penghargaan	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	3 Pembangunan Gedung Opera	Jumlah gedung opera yang dibangun	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Usulan DAK
	4 Revitalisasi gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan seni, sastra dan budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan seni, sastra dan budaya yang direvitalisasi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Usulan DAK
	5 Pembangunan panggung terbuka berkapasitas besar dan sedang Gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan Seni, Sastra dan Budaya, Bali Convention Center di Kabupaten/Kota	Jumlah gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan seni, sastra dan budaya yang dibangun	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Usulan DAK
	6 Apresiasi pelaku dan karya seni, sastra dan budaya	Jumlah pelaku dan karya seni, sastra dan budaya yang diapresiasi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	7 Pembudayaan nilai- nilai tradisi, seni, dan budaya pada pendidikan formal dan non formal untuk memperkokoh jati diri Krama Bali	Persentase pendidikan formal dan non formal yang membudayakan nilai-nilai tradisi, seni, dan budaya	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	8 Integrasi nilai-nilai Sad Kerthi ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai menengah atas	Persentase kurikulum pendidikan dasar sampai menengah atas yang mengintegrasikan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	9 Pengangkatan Guru Kontrak untuk mengajar Seni, Sastra dan Budaya di Sekolah serta membina Sanggar - Sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat.	Jumlah guru kontrak yang diangkat untuk mengajar Seni, Sastra dan Budaya di Sekolah serta membina Sanggar - Sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat	Orang	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	10 Promosi tradisi, seni dan budaya dalam tata kehidupan Krama Bali	Jumlah tradisi, seni dan budaya dalam tata kehidupan Krama Bali yang dipromosikan	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	11 Peringatan hari-hari suci keagamaan Hindu secara sekala dan niskala bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kerthi meliputi Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kerthi, Jana Kerthi dan Jagat Kerthi.	Jumlah hari-hari suci keagamaan Hindu bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kerthi yang diperingati	Rahina suci	Biro Kesra	Belanja Langsung
	12 Pengembangan sistem kehidupan kebudayaan Bali sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali	Persentase sistem kehidupan kebudayaan Bali sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali yang dikembangkan	Persentase (%)	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	13 Penguatan kelembagaan Majelis Pertimbangan Dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBYA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali			Dinas Kebudayaan	Hibah Top Down
	14 Pembentukan lembaga sertifikasi dan akreditasi di bidang kebudayaan (sesuai kewenangan)	Jumlah lembaga sertifikasi dan akreditasi di bidang kebudayaan yang dibentuk	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	15 Penetapan regulasi Standarisasi san sertifikasi pada pelaku, hasil karya Seni, Sastra, dan Budaya.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	16 Penyusunan standar kualitas dan kompetensi pelaku, hasil karya Seni, Sastra, dan Budaya.	Jumlah jenis standar kualitas dan kompetensi pelaku, hasil karya Seni, Sastra, dan Budaya yang disusun	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	17 Penetapan regulasi pentas Seni, dan Budaya Bali sebagai salah satu yang harus disajikan /diselenggaran pada pentas di Hotel dan Restoran			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	18 Kerjasama antar pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan swasta dalam pembangunan sarana prasarana , karya seni dan budaya			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	19 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pembangunan/revitalisasi Gedung - Gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan Seni, Sastra dan Budaya	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota membangun/merevitalisasi Gedung - Gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan Seni, Sastra dan Budaya	Laporan	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	20 Pembangunan balai budaya kepemudaan di Kota Denpasar	Jumlah balai budaya kepemudaan di Kota Denpasar yang dibangun	Jumlah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan DAK
	21 Penetapan regulasi Rahina Mebasa Bali, Busana Bali pada hari Kamis, Purnama, Tilem, Hari Jadi Pemprov Bali dan Hari Jadi Kabupaten/Kota.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	22 Penetapan regulasi Aksara Bali sebagai identitas dalam penamaan fasilitas publik, jalan, perkantoran, toko, dan sejenisnya			Biro Hukum dan HAM	Regulasi

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	23 Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali	Jumlah even-even Bulan Bahasa Bali yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	24 Kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan data base benda cagar budaya			Dinas Kebudayaan	One Island One Management and One Commando
	25 Penyusunan master plan restorasi dan revitalisasi benda cagar budaya	Jumlah master plan restorasi dan revitalisasi benda cagar budaya yang disusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	26 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelestarian peninggalan benda Cagar Budaya			Dinas Kebudayaan	One Island One Management and One Commando
11	**Misi 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.**				
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi				
	Indikator Tujuan : Indeks Kebahagiaan		**Indeks**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	**1 Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala**	**Persentase (%)**		
		2 Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Penyusunan standar minimal fasilitas sarana prasarana kawasan suci	Jumlah jenis standar minimal fasilitas sarana prasarana kawasan suci yang disusun	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	2 Rehabilitasi Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa).	Jumlah Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa) yang direhabilitasi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	3 Bantuan sarana peribadatan Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa)			Biro Kesra	Hibah Top Down
	4 Penataan kawasan/lingkungan Pura agar menjadi tempat yang bersih, hijau, indah dan lestari. (Disesuaikan dg kewenangan)	Jumlah kawasan/lingkungan Pura yang ditata agar menjadi tempat yang bersih, hijau, indah dan lestari	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	5 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju Pura (Sat Kahyangan, Dang Kahyangan dan Kahyangan jagat)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	6 Kerjasama dengan Kabupaten /Kota dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Desa untuk pembangunan/pengembangan taman, tempat parkir, kios, fasilitas MCK dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	7 Pembinaan dan pengawasan pemerintah kab/Kota dalam pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju Pura	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah kab/Kota dalam pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju Pura	Jumlah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	8 Penetapan regulasi Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	9 Pelindungan simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota).			Biro Hukum dan HAM	(REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan) termasuk sertifikasi
	10 Pemberdayaan sulinggih dan pemangku untuk memberikan dharmawacana nilai-nilai ajaran Agama Hindu Dharma pada upacara keagamaan Krama Bali	Jumlah sulinggih dan pemangku yang diberdayakan untuk memberikan dharmawacana nilai-nilai ajaran Agama Hindu Dharma pada upacara keagamaan Krama Bali	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	11 Penyelenggaraan dharmawacana di Pura, di Desa Adat, atau di tempat umum lainnya	Persentase penyampaian dharmawacana yang diselenggarakan di Pura, Desa Adat, atau di tempat umum lainnya	Persentase (%)	Biro Kesra	Belanja Langsung
	12 Penyebarluasan buku pendidikan keagamaan untuk umat Hindu di Desa Adat.	Jumlah buku pendidikan keagamaan untuk umat Hindu di Desa Adat yang disebarluaskan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	13 Peningkatan pemahaman dan pelatihan keagamaan kepada umat Hindu terutama generasi muda	Persentase generasi muda umat Hindu yang mendapat pelatihan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan	Persentase (%)	Biro Kesra	Belanja Langsung
	14 Peningkatan budaya kebersamaan dan hubungan sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai nilai Sad Kerthi	Persentase budaya kebersamaan dalam hubungan sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase (%)	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	15 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan sradha dan bhakti	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan sradha dan bhakti	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	16 Penyusunan Purana Pura di Kabupaten/Kota	Jumlah purana Pura di Kab/Kota yang disusun	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	17 Pemberdayaan dan bantuan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali			Biro Kesra	Hibah Top Down
	18 Pembangunan kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia di Kabupaten/Kota			Biro Kesra	Hibah Top Down
	19 Pelestarian, pemanfaatan dan tata kelola Kawasan Pesisir berdasarkan konsep Segara Kertih	Jumlah Kawasan Pesisir berdasarkan konsep Segara Kertih yang dilestarikan, dimanfaatkan dan dikelola	Jumlah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
12	**Misi 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN.**				
	Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi				
	Indikator Tujuan : 1 Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis		**Persentase (%)**		
	2 Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	**1 Jumlah desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**	**Jumlah**		
		2 Jumlah Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	**Jumlah**		
	Kegiatan :				
	1 Studi Kajian awig-awig dan pararem sebagai hukum positif	Jumlah awig-awig dan pararem yang dikaji sebagai hukum positif	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	2 Pemberdayaan sekaa teruna-teruni melalui pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal Bali	Jumlah sekaa teruna-teruni yang diberdayakan melalui pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal Bali	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	3 Penguatan dan pemberdayaan organisasi pecalang Desa Adat			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Pakraman
	4 Pengembangan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point berbasis teknologi	Jumlah wantilan Desa Adat yang dikembangkan sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point berbasis teknologi	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung
	5 Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat: Banjar, Sekaa teruna - teruni, sekaa dan lembaga lainnya			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat
	6 Pemberdayaan dan penguatan Hukum Adat	Jumlah hukum adat yang ditetapkan sebagai hukum positif	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	7 Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Desa Adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali	Jumlah jenis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Desa Adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali yang disusun	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	8 Penetapan regulasi tentang norma, standar, prosedur dan kriteria Desa Adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali			Biro Kesra	Regulasi
	9 Pemberdayaan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat
	10 Pemenuhan kebutuhan Prajuru (Prajuru Desa Desa Adat dan Prajuru Banjar) yang dipilih sesuai dengan Awig-awig/Perarem yang berlaku di wilayah Desa-Desa Adat			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat
	11 Pemberdayaan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni	Jumlah Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	12 Peningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas Prajuru melalui pelatihan nilai-nilai Tri Hita Karana berdasarkan Sad Kertih	Jumlah prajuru yang mengikuti pelatihan nilai-nilai Tri Hita Karana berdasarkan Sad Kertih	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	13 Pemberdayaan Desa Adat sebagai tempat pengembangan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen)	Jumlah Desa Adat yang diberdayakan untuk pengembangan perekonomian rakyat	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	14 Peningkatan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan Prajuru			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat
	15 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam monitoring dan evaluasi desa adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali yang sudah menjalankan lembaganya berdasarkannorma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan			Biro Kesra	One Island One Management and One Commando
	16 Penetapan regulasi unifikasi awig-awig sumber tata kehidupan adat istiadat Krama Bali yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	17 Penyusunan regulasi urusan pemerintahan dibidang budaya dan adat istiadat Bali dan kewenangan berdasarkan jenjang lembaga adat			Biro Kesra	Regulasi
	18 Penyusunan norma, standar, prosedur dan keriteria penyelenggaraan tata kelola desa adat	Jumlah jenis norma, standar, prosedur dan keriteria penyelenggaraan tata kelola desa adat yang disusun	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	19 Pemberian bantuan atribut pecalang sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan Pakem (tata busana, estetika, dan atribut lainnya) yang berlaku di Desa Adat			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat
	20 Peningkatan kompetensi Pecalang di bidang keamanan di wilayah/wewidangan Desa	Jumlah pecalang yang ditingkatkan kompetensinya di bidang keamanan	Jumlah	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Langsung
	21 Pembinaan pecalang Desa Adat dalam membangun kerjasama dengan aparatur lembaga Kepolisian	Jumlah kerjasama aktifitas pengamanan pecalang dengan kepolisian	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	22 Peningkatan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan Pecalang			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat
	23 Penetapan regulasi tentang aset desa adat			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	24 Penetapan regulasi tentang kriteria krama tamyu dan tamyu di lingkungan wewidangan Desa Pakraman/Desa Adat (masuk dalam muatan Ranperda Desa Adat)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	25 Penyusunan Kajian pemanfaatan kawasan pesisir untuk kepentingan desa adat	Jumlah kajian kawasan pesisir yang disusun untuk dimanfaatkan oleh desa adat	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
13	**Misi 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/Kota SE-BALI.**				
	Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas				
	Indikator Tujuan : Realisasi PMDN dan PMA di Sektor Pariwisata		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	**Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas**	**Destinasi**		
	Kegiatan :				
	1 Studi pengembangan destinasi wisata baru	Jumlah Studi pengembangan destinasi wisata baru	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Pengembangan wisata pedesaan, wisata budaya kab/Kota di provinsi Bali	Jumlah wisata pedesaan, wisata budaya kab/Kota yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	3 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan kawasan destinasi wisata terpadu	Jumlah kawasan destinasi wisata terpadu antar Kabupaten/Kota yang dibangun	Jumlah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	4 Penyusunan buku biru "Bali New Eyes"	Jumlah konten central of excelent yang disusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	5 Penetapan regulasi seni budaya Bali menjadi atraksi wisata dan produk wisata			Biro Kesra	Regulasi
	6 Pengembangan seni budaya Bali sebagai distinasi pariwisata dan produk wisata	Jumlah seni budaya Bali sebagai distinasi pariwisata dan produk wisata yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	7 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan even, atraksi,pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat yang dilakukan oleh komunitas desa adat sesuai "Bali New Eyes "			Dinas Kebudayaan	One Island One Management and One Commando
	8 Identifikasi potensi investasi daerah untuk destinasi pariwisata baru di Kabupaten/Kota	Jumlah potensi investasi daerah untuk destinasi pariwisata baru di Kabupaten/Kota yang diidentifikasi	Jumlah	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	9 Penyusunan Master Plan Promosi investasi destinasi baru	Jumlah jenis investasi destinasi baru sesuai master plan promosi investasi yang disusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	10 Penyelenggaraan event - event terintegrasi dengan promosi pariwisata berbasis komunitas adat dan budaya	Jumlah event - event terintegrasi dengan promosi pariwisata berbasis komunitas adat dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	11 Penyelenggaraan pameran potensi baru destinasi pariwisata terintegrasi di dalam dan luar negeri	Jumlah konten potensi baru destinasi pariwisata terintegrasi di dalam dan luar negeri yang dipamerkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	12 Pengembangan upacara Pitrayadnya sebagai produk wisata yang terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah upacara Pitra Yadnya yang dikembangkan sebagai produk wisata terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	13 Pengembangan upacara Mepandes sebagai produk wisata yang terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah upacara Mepandes yang dikembangkan sebagai produk wisata yang terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	14 Pengembangan Wisata Spiritual	Jumlah Wisata Spiritual yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	15 Pengembangan wisata alam	Jumlah wisata alam yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	16 Pengembangan wisata Pantai	Jumlah wisata pantai yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	17 Pengembangan wisata Minat Khusus	Jumlah wisata Minat Khusus yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	18 Penyusunan Master Plan percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas destinasi wisata baru Bali Timur dan Bali Utara sesuai dengan hasil "Bali New Eyes"	Jumlah konten infrastruktur aksesibilitas destinasi wisata baru Bali Timur dan Bali Utara sesuai dengan master plan yang disusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	19 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sarana prasarana sebagai penunjang usaha produk pariwisata baru berdasarkan hasil pemetaan			Dinas Pariwisata	One Island One Management and One Commando
	20 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan kebutuhan Air Bersih untuk Industri Jasa Pariwisata			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	One Island One Management and One Commando

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	21 Kerjasama dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan swasta dalam percepatan pembangunan usaha industri pariwisata			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	22 Kerjasama dengan pemerintah kab/Kota dalam pengembangan Pusat Kuliner Bali (PKB) di Gianyar, Badung, dan Denpasar bernuansa Bali dan ramah lingkungan			Biro Hukum dan HAM	One Island One Management and One Commando
	23 Pengembangan taman tematik berbasis Kabupaten/Kota			Dinas Kehutanan	Usulan DAK
	24 Pemberian bantuan dan pembinaan pembangunan Batur UNESCO Global Geopark di Kabupaten Bangli (Kewenangan pemerintah pusat)			Dinas Pariwisata	Hibah
	25 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan destinasi dan produk wisata baru	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan destinasi dan produk wisata baru	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali	**1 Jumlah produk pariwisata berbasis budaya**	**Produk Wisata**		
		2 Jumlah produk pariwisata berkualifikasi Indie 4.0	**Produk**		
	Kegiatan :				
	1 Kerjasama Pembangunan taman kunjungan wisata Disneyland/ universal Studio dengan karakter budaya Bali (Kerja Sama)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	2 Pengembangan produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	3 Pengembangan wisata pedesaan /wisata Budaya	Jumlah wisata pedesaan /wisata Budaya yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	4 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan pusat kuliner, cinderatama kekhususan wisata daerah di destinasi wisata, desa-desa berciri khas Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
14	**Misi 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KotaSE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI**				
	Tujuan : Meningkatnya pasar pariwisata Bali				
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		**(Persentase%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	**1 Jumlah devisa sektor pariwisata**	**USD**		
		2 Persentase promosi pariwisata menerapkan Indie 4.0	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Pengembangan agenda tahunan event pariwisata Provinsi Bali "Bali Karya Maha Agung"	Jumlah agenda tahunan event pariwisata Provinsi Bali "Bali Karya Maha Agung" yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	2 Penyelenggaraan event-event adat dan Budaya Provinsi Bali "Bali Karya Maha Agung"	Jumlah event-event adat dan Budaya Provinsi Bali "Bali Karya Maha Agung" yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	3 Pengembangan pemasaran dan promosi wisata digital "Bali Karya Maha Agung"	Jumlah pemasaran dan promosi wisata digital "Bali Karya Maha Agung" yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	4 Pemetaan kegiatan budaya, adat istiadat dan keagamaan yang dapat dikembangkan menjadi event pariwisata "Bali Karya Maha Agung"	Jumlah kegiatan budaya, adat istiadat dan keagamaan yang dapat dikembangkan menjadi event pariwisata "Bali Karya Maha Agung" yang dipetakan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	5 Kerjasama dengan pelaku industri pariwisata dalam pengembangan even pariwisata "Bali Karya Maha Agung"			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	6 Penyediaan sarana dan prasarana untuk operasional Bali Incorporated	Jumlah sarana dan prasarana untuk operasional Bali Incorporated yang disediakan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	7 Pengembangan sistem promosi berbasis teknologi informasi khusus Provinsi Bali dan networking dengan pelaku usaha industri lokal dan internasional	Jumlah konten promosi berbasis teknologi informasi dan networking dengan pelaku usaha industri lokal dan internasional yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	8 Kerjasama Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, dengan pelaku usaha industri pariwisata dan kerjasama antara pelaku industri pariwisata di Bali dengan pelaku usaha di luar negeri /global dengan wadah/ media Bali Incorporated			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	9 Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan Bali Incorporated melalui produk pariwisata baru berbasis potensi adat istiadat dan budaya potensi daerah "Bali Karya Maha Agung"			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	10 Kerjasama pemerintah daerah dengan perwakilan-2 pemerintah dan komunitas-2 masyarakat Indonesia di luar negeri serta pelaku usaha industri pariwisata, untuk promosi pariwisata			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama promosi
	11 Penyelenggaraan hot deals, incentive sales, bulan promosi wisata	Jumlah promosi wisata yang menghasilkan hot deals, incentive sales yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	12 Pameran khusus industri pariwisata di negara negara dengan jumlah wisatawan 3 (tiga) terbesar	Jumlah konten industri pariwisata di negara negara dengan jumlah wisatawan 3 (tiga) terbesar yang dipamerkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	13 Pemberian kemudahan/pelayanan/acara khusus waktu kunjungan wisatawan			Dinas Pariwisata	Regulasi
	14 Penetapan regulasi untuk pencegahan praktek Kartel dan sindikat pelaku industri pariwisata			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	15 Peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha industri pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah usaha industri pariwisata yang diawasi dan dikendalikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
15	**Misi 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF**				
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan				
	Indikator Tujuan : Indeks kepuasan wisatawan		persentase (%)		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	**Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Pengawasan dan pengendalian kepatuhan pelaku usaha industri pariwisata di Provinsi Bali terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Regulasi)	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian kepatuhan pelaku usaha industri pariwisata terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Belanja Langsung
	2 Penetapan regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pariwisata Provinsi Bali			Biro Perekonomian	Regulasi
	Sasaran :				
	2 Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	**Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Pelatihan kepada pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang dilatih	Jumlah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Langsung
	2 Penyusunan SPM dengan memasukkan nilai-nilai Tri Hita Karana pada pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang memasukkan nilai-nilai Tri Hita Karana pada SPM yang disusun	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	3 Penetapan regulasi sertifikasi kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bidang pariwisata			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	4 Kerjasama dengan pemerintah pusat dalam pembangunan pelatihan bersertifikat untuk tenaga kerja pada industri pariwisata			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	5 Pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	6 Penetapan regulasi standarisasi tarif hotel di Provinsi Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM) kepariwisataan	Jumlah usaha pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah	Biro Perekonomian	Kerja Sama
	8 Kerjasama pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) Pariwisata Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	9 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pembangunan infrastruktur untuk destinasi dan produk wisata sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) Pariwisata Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	10 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan destinasi pariwisata yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan destinasi pariwisata yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	11 Pelatihan pemasar produk paket wisata "Bali Karya Maha Agung"	Jumlah pemasar produk paket wisata "Bali Karya Maha Agung" yang dilatih	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	12 Pemberian insentif kepada kelompok masyarakat/perorangan pelaku usaha produk wisata baru di wilayah Bali Barat, Timur dan Utara			Dinas Pariwisata	Hibah Top Down
	13 Integrasi pelatihan sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha di bidang pengembangan perekonomian Bali dengan masyarakat pelaku industri pariwisata	Jumlah pelatihan yang diIntegrasikan	Jumlah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
16	**Misi 16 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/Kota DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS.**				
	Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali				
	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	**Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata	Jumlah kawasan ekonomi berbasis pariwisata yang dikembangkan	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Penyusunan buku biru pengembangan Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan kawasan Sarbagita terintegrasi dengan buku biru Bali New Eyes	Jumlah kawasan pertumbuhan ekonomi baru diluar SARBAGITA dan di SARBAGITA sesuai Buku Biru Bali New Eyes	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	3 Penetapan regulasi moratorium pengalihan investasi dalam jumlah tertentu ke Bali Barat, Timur dan Bali Utara			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	4 Penetapan regulasi moratorium pengalihkan investasi dalam jumlah tertentu dan berwawasan lingkungan di Kawasan Sarbagita			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5 Peningkatkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru sesuai dengan potensi daerahnya dan pada kawasan berwawasan lingkungan di Provinsi Bali	Jumlah investasi pada pusat-pusat perekonomian baru yang dikembangkan	Triliun (Rp)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	6 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten di luar SARBAGITA dalam penyiapan pelayanan perijinaan terpadu satu pintu yang mudah, cepat dan berbiaya murah			Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	One Island One Management and One Commando
	7 Penetapan regulasi pemberian insentif kepada investor yang berinvestasi pada industri berskala besar pengolahan hasil pertanian pangan dalam arti luas di wilayah Bali Barat, Timur dan Utara	Jumlah investor yang berinvestasi di Bali Barat, Bali Timur dan Bali Utara yang mendapatkan insentif	Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Regulasi

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	8 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan aksesibilitas di Kabupaten/Kota se-Bali	Persentase pengembangan sarana dan prasarana di Bali Barat, Timur dan Utara	Jumlah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	9 Penyusunan Master Plan Promosi peluang investasi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru	Jumlah peluang investasi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru sesuai Master Plan Promosi yang disusun	Jumlah	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	10 Pembangunan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota se Bali	Jumlah kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota se-Bali yang dibangun	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	11 Promosi investasi potensi daerah Kabupaten/Kota terintegrasi dengan program promosi investasi daerah lainnya berdasarkan "cetak biru" dan percepatan pembangunan Provinsi Bali	Persentase peningkatan investasi daerah lainnya	Persentase (%)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	12 Penetapan regulasi pembangunan infrastruktur kab/Kota Provinsi Bali memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur			Biro Perekonomian	Regulasi
	13 Penyelenggaraan pameran potensi investasi daerah terintegrasi dengan pameran wisata di dalam dan luar negeri	Jumlah konten potensi investasi daerah terintegrasi dengan pameran wisata yang dipamerkan di dalam dan luar negeri	Jumlah	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	**1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda)**	**Persentase (%)**		
		2 Persentase Pertokoan Milik UMKM	**Persentase (%)**		
		3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	**Jumlah (Toko)**		
		4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	**Jumlah (Toko)**		
	Kegiatan :				
	1 Pembentukan lembaga industri kerajinan rakyat yang berorietasi ekspor	Jumlah lembaga industri kerajinan yang berorientasi ekspor yang dibentuk		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	2 Peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi peluang kerja pada rencana investasi yang dikembangkan	Jumlah tenaga kerja yang terserap untuk memenuhi peluang kerja pada rencana investasi yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	3 Penetapan regulasi pemberian insentif bagi investor untuk usaha agroindustri, agribisnis menengah dan besar ramah lingkungan di Wilayah Bali Barat, Timur dan Utara			Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi
	4 Pemberian insentif bagi koperasi, UKM, IKM untuk berusaha berbasis pengembangan sumberdaya potensi daerah			Dinas Koperasi dan UKM	Hibah Top Down
	5 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	6 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan usaha berbasis sumberdaya potensi daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan usaha berbasis sumberdaya potensi daerah	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	One Island One Management and One Commando
	7 Pemberian insentif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu untuk berinvestasi di Bali Barat, Utara dan Timur			Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi
17	**Misi 17 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI.**				
	Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali				
	Indikator Tujuan : 1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali		**Persentase (%)**		
	2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	**1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri**	**Persentase (%)**		
		2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0	**Persentase (%)**		

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	Kegiatan :				
	1 Pengembangan pelatihan instruktur dari dalam dan luar negeri untuk pelaku usaha mikro, kecil	Jumlah pelaku usaha mikro, kecil yang diberikan pelatihan instruktur dari dalam maupun luar negeri	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	2 Pengembangan usaha, desain, produk yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik	Jumlah pemenuhan usaha desain produk lokal yang berkualitas untuk pasar domestik	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	3 Pengembangan usaha, desain, produk yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor	Jumlah pemenuhan usaha desain produk lokal yang berkualitas untuk pasar ekspor	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	4 Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan sesama swasta pelaku usaha sandang Bali dalam peningkatan daya saing di bidang disain dan kualitas sandang produk Branding Bali yang berorientasi ekspor			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	5 Peningkatan sarana prasarana dan sertifikasi produk yang memenuhi International Organization for Standardization (ISO)	Jumlah sarana prasarana dan sertifikasi produk yang memenuhi International Organization for Standardization (ISO)	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	6 Pemberian insentif kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sandang Branding Bali yang berorientasi ekspor, ramah lingkungan dan berlokasi di Bali Barat, Utara dan Timur			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Hibah Top Down
	7 Bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pangsa pasar lokal	Jumlah laporan bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pangsa pasar lokal	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	8 Pengembangan koperasi kunjungan Objek Wisata Tour	Jumlah koperasi kunjungan Objek Wisata Tour yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	9 Pemberdayaan Bumdes Desa Pakraman/Desa Adat	Jumlah BUMDes Desa Pakraman/Desa Adat yang diberdayakan	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	10 Penguatan Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian dan industri kerajinan rakyat	Jumlah Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian dan industri kerajinan rakyat yang diperkuat	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	11 Pengembangan unit usaha sesuai potensi dan komoditi unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha sesuai potensi dan komoditi unggulan Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	12 Pembentukan koperasi/lembaga penjamin bagi produk-produk/komuditas lokal.	Jumlah koperasi/lembaga penjamin bagi produk-produk/komoditas lokal yang dibentuk	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	13 Penetapan regulasi seluruh jenis produk yang dihasilkan di wilayah Provinsi Bali menggunakan Branding Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	14 Kerjasama dengan pelaku usaha dalam promosi pengenalan persepsi Branding Bali untuk pasar lokal dan ekspor			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kerja Sama
	15 Penyelenggaraan event-event perdagangan untuk promosi pengenalan persepsi Branding Bali pada pelaku usaha pasar lokal dan ekspor	Jumlah event-event perdagangan untuk promosi pengenalan persepsi Branding Bali pada pelaku usaha pasar lokal dan ekspor yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	16 Penyelenggaraan event-event untuk kelompok masyarakat tertentu (seperti generasi milenial) sebagai media untuk mempercepat pengenalan persepsi produk Branding Bali	Jumlah event-event untuk kelompok masyarakat tertentu yang diselenggarakan untuk mempercepat pengenalan produk Branding Bali	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	17 Pelatihan dan pendampingan melakukan pemasaran melalui E-Commerce bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Brand Bali	Jumlah tenaga kerja pemasaran melalui E-Commerce bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Brand Bali yang dilatih	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	18 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan kepada pelaku usaha menggunakan "Branding Bali" setiap produk yang dihasilkan di daerahnya.			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	One Island One Management and One Commando
	19 Bimbingan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk pemberian label "Branding Bali " dari setiap produk yang dihasilkan diwilayahnya			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	One Island One Management and One Commando
	20 Pembangunan Sentra Pemasaran dan Promosi Kerajinan Rakyat di Kabupaten Badung, Gianyar dan Denpasar	Jumlah Sentra Pemasaran dan Promosi Kerajinan Rakyat di Kabupaten Badung, Gianyar dan Denpasar yang dibangun	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	21 Penetapan regulasi tentang kerjasama kemitraan terintegrasi antara Usaha mikro, Kecil dan Menengah (MUKM) dengan Usaha /industri besar (Perda)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	22 Pembangunan pasar produk UKM-kerajinan masyarakat Bali	Jumlah pasar produk UKM-kerajinan masyarakat Bali yang dibangun	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	23 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sentra promosi dan pemasaran produk-produk kerajinan masyarakat pelaku usaha UKM, IKM dan Koperasi kab/Kota			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	Sasaran :				
	2 Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	**Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi**	**Jumlah**		
	Kegiatan :				
	1 Pengembangan Pasar Buah di Kota Denpasar	Jumlah pasar buah di Denpasar yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	2 Pengembangan Pasar Agro di Kabupaten Tabanan	Jumlah Pasar Agro di Kabupaten Tabanan yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	3 Pengembangan Pasar Ikan di Kabupaten/Kota	Jumlah pasar ikan yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	4 Revitalisasi Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri di Kabupaten Buleleng	Persentase Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri di Kabupaten Buleleng yang direvitalisasi	Persentase (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	5 Revitalisasi Pasar Kintamani, Pasar Kayu Ambua, Pasar Kidul Bangli di Kabupaten Bangli	Persentase Pasar Kintamani, Pasar Kayu Ambua, Pasar Kidul Bangli di Kabupaten Bangli yang direvitalisasi	Persentase (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	6 Pembangunan Terminal Agro/Pasar Agro dan kawasan Agro Industri	Jumlah Terminal Agro/Pasar Agro dan kawasan Agro Industri yang dibangun	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	7 Pengembangan pasar hasil pertanian lokal dan kerajinan rakyat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	8 Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis budaya dengan "Branding Bali"	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah berbasis budaya dengan branding Bali yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	9 Pemberian insentif bagi pelaku usaha mikro/skala kecil dan koperasi yang baru tumbuh, dalam jangka waktu tertentu			Dinas Koperasi dan UKM	Hibah Top Down
	10 Pengembangan lembaga pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) terintegrasi berbasis pengembangan inovasi/kreatif, teknologi, dan metode produksi	Jumlah lembaga pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) terintegrasi berbasis pengembangan inovasi/kreatif, teknologi, dan metode produksi yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	11 Penyelenggaraan pelatihan khusus dan berkesinambungan sesuai dengan produk yang dikembangkan bagi pelaku usaha mikro/skala kecil yang baru tumbuh, dalam jangka waktu tertentu	Jumlah pelaku usaha mikro/skala kecil yang baru tumbuh yang dilatih khusus dan berkesinambungan sesuai dengan produk yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	12 Pemberian insentif pajak dan retribusi, ekspor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	13 Pembentukan asosiasi percepatan pengurusan HAKI bagi seniman, budayawan, dan pengerajin lokal Bali	Jumlah asosiasi percepatan pengurusan HAKI bagi seniman, budayawan, dan pengerajin lokal Bali	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	14 Pemberian insentif untuk diversifikasi, pengkayaan desain, packaging, kualitas produk, pengembangan produk yang prospek tinggi di pasar internasional untuk meningkatkan jumlah produk ekspor			Biro Hukum dan HAM	Hibah Top Down
	15 Pendampingan tenaga ahli koperasi dalam bidang usaha sumber bahan baku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Jumlah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mendapatkan pendampingan tenaga ahli	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	16 Penguatan hubungan industrial antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah (MUKM) dan Koperasi sebagai mitra kerja terintegrasi	Jumlah usaha mikro, usaha kecil dan menengah (MUKM) dan Koperasi sebagai mitra kerja terintegrasi dengan pelaku usaha besar memlalui hubungan industrial yang diperkuat	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	17 Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan dan ekspor produk mikro, usaha kecil dan menengah (MUKM) dan Koperasi.	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan peningkatan pendapatan dan ekspor produk mikro, usaha kecil dan menengah (MUKM) dan Koperasi.	Laporan	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	18 Pembinaan pengembangan Bumdes Desa Pakraman/Desa Adat untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan rumah tangga Krama Bali	Persentase berkembangnya Bumdes Desa Pakraman/Desa Adat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga Krama Bali	Persentase (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	19 Kerjasama dengan lembaga keuangan milik pemerintah Bank dan Non Bank dalam penyaluran kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	20 Pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi	Persentase pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi yang mendapat kredit mudah dan murah	Persentase (%)	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	21 Pemberdayaan lembaga perkreditan desa (LPD) dalam penyaluran kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil, Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan Koperasi	Persentase pelaku usaha industri kecil, Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan Koperasi yang mendapat kredit mudah dan murah	Persentase (%)	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	22 Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan rumah tangga berbasis budaya	Persentase sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan rumah tangga berbasis budaya yang dikembangkan	Persentase (%)	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	23 Pembinaan kemitraan antara industri kecil menengah (IKM) dengan BUMN dan industri besar dalam pengembangan produk dan pemasaran sesuai hasil bisnis plan			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kerja Sama
	24 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan pasar produk UKM-kerajinan masyarakat Bali sesuai bisnis plan			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	25 Pembangunan sentra pemasaran produk Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan hasil bisnis plan	Persentase peningkatan pembangunan sentra pemasaran produk Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase (%)	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	26 Pembinaan pengembangan koperasi sebagai mitra usaha menengah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah koperasi yang dibinan sebagai mitra usaha menengah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
18	**Misi 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT,LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI.**				
	Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru				
	Indikator Tujuan : Indeks konektivitas		**Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	**Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)**	**Indeks**		
	Kegiatan :				
	1 Pengembangan Jalan Penghubung (Jalan Singkat/Shortcut) Antar Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Penghubung (Jalan Singkat/Shortcut) yang dikembangkan	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	One Island One Management and One Commando
	2 Pembangunan Jalan Tol Lingkar Bali			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan DAK
	3 Pengembangan angkutan publik yang menggunakan gas atau listrik	Jumlah angutan publik ramah lingkungan yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perhubungan	Belanja Langsung
	4 Promosi potensi investasi transportasi ramah lingkungan di Kawasan Sarbagita	Jumlah potensi investasi transportasi ramah lingkungan di Kawasan Sarbagita yang dipromosikan	Jumlah	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	5 Mendorong pemerintah pusat dalam pengembangan Pelabuhan Bongkar Muat Celukan Bawang Buleleng berstandar internasional			Dinas Perhubungan	Usulan DAK

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	6 Mendorong pemerintah pusat melanjutkan Pembangunan Pelabuhan Gunaksa			Dinas Perhubungan	Usulan DAK
	7 Mendorong pemerintah pusat untuk Pembangunan Bandar Udara berstandar internasional di Kubutambahan Buleleng			Dinas Perhubungan	Usulan DAK
	8 Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam Pembangunan Pelabuhan Sanur			Dinas Perhubungan	Usulan DAK
	9 Mendorong pemerintah pusat untuk Pengembangan Pelabuhan Kapal Pesiar berstandar internasional : Pelabuhan Benoa di Denpasar, Pelabuhan di Amed dan di Tanah Ampo Kabupaten Karangasem			Dinas Perhubungan	One Island One Management and One Commando
	10 Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur transportasi	Jumlah jenis standar pelayanan minimal infrastruktur transportasiyang diterapkan	Persentase (%)	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	11 Pembinaan dan pengawasan (Binwas) pemerintah Kabupaten/Kota pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian Kabupaten/Kota	Laporan pembinaan dan pengawasan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian	Laporan	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	12 Pembangunan Kereta Api Lingkar Bali			Dinas Perhubungan	Usulan DAK
	13 Pemberian kemudahan investasi modal transportasi berbahan bakar listrik ramah lingkungan	Persentase peningkatan nvestasi modal transportasi ramah lingkungan	Persentase (%)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi
	14 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos) penunjang masyarakat Difabel			Dinas Sosial	One Island One Management and One Commando
	15 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan (Binwas) pembangunan infrastrktur jalan lingkungan dan utilitas lingkungan melalui dana Desa			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	16 Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan sarana jalan dan transportasi publik dari dan ke wilayah Bali Barat, Utara dan Timur			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	17 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan Binwas dana desa pembangunan infrastruktur penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasos dan Fasum) di lingkungan pemukiman			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	One Island One Management and One Commando
	18 Pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada pemerintah Kabupaten / Kota untuk pembangunan aksesibilitas antar wilayah di daerahnya.	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan pembangunan aksesibilitas antar wilayah	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	19 Pembangunaan transportasi ramah lingkungan di kawasan Sarbagita	Jumlah transportasi ramah lingkungan di kawasan Sarbagita yang dibangun	Jumlah	Dinas Perhubungan	Belanja Langsung
19	**Misi 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN.**				
	Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan				
	Indikator Tujuan : Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum		Persentase (%)		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	**1. Angka kriminalitas**	**Kasus**		
		2. Persentase penanganan bencana	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Pelembagaan pecalang sebagai penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan pemukiman Krama Bali	Persentase terlembaganya pecalang Bali	Persentase (%)	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	2 Deteksi dini pencegahan terjadinya potensi pelanggaran hukum	Persentase menurunnya pelanggaran hukum	Persentase (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	3 Pencegahan dan penegakkan Perda Provinsi	Persentase menurunnya pelanggaran Perda Provinsi	Persentase (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Langsung
	4 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan pecalang sebagai pengamanan lingkungan pemukiman Krama Bali			Satuan Polisi Pamong Praja	One Island One Management and One Commando
	5 Pembinaan dan pengawasan (Bimwas) Pemerintah Kabupaten/Kota penegakkan Peraturan Daerah (Perda)	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penegakkan Peraturan Daerah (Perda)	Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Langsung
	6 Pembangunan Command Center yang terintegrasi se-Bali	Jumlah Command Center yang dibangun terintegrasi	Jumlah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Langsung
	7 Pengembangan unit reaksi cepat di wilayah strategis objek wisata di Bali	Persentase pengembangan unit reaksi cepat di wilayah strategis objek wisata	Persentase (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Langsung
	8 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan (Binwas) pengendalian keamanan wisatawan			Satuan Polisi Pamong Praja	One Island One Management and One Commando
	9 Penetapan Regulasi pemberlakuan asuransi kecelakaan berlalu lintas kepada wisatawan yang berwisata di Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	10 Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah terkait (Jiwa Sraya) / pihak ketiga (Lembaga Asuransi) dalam pemberlakuan asuransi kecelakaan berlalu lintas kepada wisatawan yang berwisata di Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	11 Monitoring dan evaluasi wisatawan yang tercover/terlindungi dengan asuransi kecelakaan berlalulintas	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi wisatawan yang tercover/terlindungi dengan asuransi kecelakaan berlalulintas	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
20	**Misi 20 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.**				
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali				
	Indikator Tujuan : 1 Indeks demokrasi		**Persentase (%)**		
	2 Indeks pemberdayaan gender		**Indeks**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	**Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Peningkatan tranparansi yang berkeadilaan dalam pengambilan keputusan hukum adat	Persentase pengambilan keputusan hukum adat yang transparan dan berkeadilan	Persentase (%)	Biro Hukum dan HAM	Belanja Langsung
	2 Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi yang diberdayakan	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belanja Langsung
	3 Pencegahan perkawinan usia dini	persentase penurunan perkawinan usia dini	Persentase (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belanja Langsung
	4 Pembentukan masyarakat Madani	Jumlah masyarakat madani yang dibentuk	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	5 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota (Binwas) dalam Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belanja Langsung
	6 Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penguatan dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas Krama Bali penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak ditingkat desa kab/Kota Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
21	**Misi 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.**				
	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis				
	Indikator Tujuan : Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)		**Persentase (%)**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	**Daya dukung lingkungan**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Kerjasama pemenuhan Kebutuhan Air Bersih untuk rumah tangga Krama Bali			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kerja Sama
	2 Pemetaan kawasan pesisir dengan citra satelit	Persentase kawasan pesisir yang dipetakan dengan citra satelit	Persentase (%)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	3 Penyusunan buku biru tata ruang Bali berlandaskan Sat Kerthi terintegrasi dengan Bali New Eyes yang mengakomodasi Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan Lingkungan	Jumlah buku biru tata ruang Bali yang tersusun	Buku	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	4 Penetapan regulasi tataruang wilayah Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan Lingkungan buku biru terintegrasi dengan Bali New Eyes			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5 Monitoring dan evaluasi penyesuaian tata ruang berlandaskan wilayah Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan Lingkungan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyesuaian tata ruang wilayah sesuai dokumen tata ruang	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	6 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota penyesuaian tata ruang Bali berlandaskan Sat Kerthi yang mengakomodasi Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan Lingkungan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyesuaian tata ruang Bali berlandaskan Sat Kerthi	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	7 Pendataan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain	Persentase sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain yang terdata	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	8 Perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain	Persentase sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain yang terlindungi	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	9 Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyediaan Energi Listrik	Persentase peningkatan energi listrik	Persentase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	10 Penyusunan kajian pembangkit Listrik Tenaga Air: air laut, air terjun, danau, matahari	Jumlah kajian pembangkit listrik tenaga air: air laut, air terjun, danau, matahari yang tersusun	Jumlah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	11 Penyusunan master plan pembangunan pembangkit listrik	Jumlah master plan pembangunan pembangkit listrik yang tersusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah				
	Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Persentase (%)		
	Sasaran :				
	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	**1 Indeks kualitas air**	**Indeks**		
		2 Indeks kualitas udara	**Indeks**		
		3 Indeks kualitas tutupan lahan	**Indeks**		
		4 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	**Persentase (%)**		
		5 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	**Persentase (%)**		

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	Kegiatan :				
	1 Penyusunan Master Plan Provinsi Bali sebagai Green Island	Persentase penyusunan master plan	Persentase (%)	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Promosi investasi daerah pengelolahan sampah dengan metoda zero Waste	Jumlah jenis investasi pengelolaan sampah dengan metode Zero Waste yang dipromosikan	Ton	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	3 Pengembangan sistem pengolahan dan penanganan limbah B3 terpadu kab/Kota/provinsi	Persentase sistem pengolahan dan penanganan limbah B3 terpadu kab/Kota/provinsi yang dikembangkan	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	4 Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kab/Kota di Provinsi Bali	Jumlah sistem pengelolaan persampahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kab/Kota di Provinsi Bali yang dikembangkan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	5 Penyediaan fasilitas peralatan pengolahan sampah di masyarakat kab/Kota Provinsi Bali	Jumlah fasilitas pengolahan sampah yang berfungsi	Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	6 Pendampingan dan bantuan Pengolahan sampah di lingkungan pemukiman Krama Bali	Jumlah sampah yang dikelola dengan baik	Ton	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	7 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten Kota dalam pengendalian dan pengelolaan sampah di daerahnya.	Jumlah laporan pengelolaan sampah di kab/Kota yang dibina dan dikendalikan	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	8 Penataan jalur jalan provinsi untuk memperindah dan kenyamanan pemakai lalu lintas jalan	Persentase jalur jalan provinsi yang indah dan nyamanan bagi pemakai lalu lintas jalan	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	9 Pengendalian dan pengawasan pemakaian bahan plastik dalam kehidupan masyarakat sehari hari	Jumlah laporan hasil pengendalian pemakaian bahan plastik dalam kehidupan masyarakat sehari hari	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	10 Pengawasan dan pengendalian perusakan lingkungan oleh pelaku usaha tambang	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha tambang	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	11 Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia berbahaya dan usaha/ kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan kualitas hidup	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia berbahaya dan usaha/kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan kualitas hidup	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	12 Pengawasan dan pengendalian pencemaran sumber daya air (SDA)	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pencemaran sumber daya air (SDA)	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	13 Internalisasi budaya sadar kebersihan lingkungan hidup Krama Bali melalui pengelolaan dan pemrosesan sampah dini	Persentase pengelolaan dan pemrosesan sampah dini	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	14 Penegakan hukum berkesinambungan kepada pelaku perusak lingkungan hidup	Persentase penegakan hukum berkesinambungan kepada pelaku perusak lingkungan hidup	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	15 Pemetaan kawasan danau di Kabupaten/Kota dan pemanfaatan kawasan danau untuk kepentingan desa adat berdasarkan konsep Danu Kertih	Persentase pemetaan kawasan danau dan pemanfaatannya untuk kepentingan desa adat berdasarkan konsep Danu Kertih	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	16 Pelestarian, pemanfaatan dan tata kelola Danau berdasarkan konsep Danu Kertih	Persentase pelestarian, pemanfaatan dan tata kelola danau berdasarkan konsep Danu Kertih	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	17 Pemetaan kawasan danau dengan citra satelit	Persentase pengelolaan kawasan yang sesuai pemetaan	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	18 Revitalisasi Danau Batur sesuai dengan fungsinya	Persentase luas kerusakan lingkungan danau yang tertangani	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan DAK
	19 Revitalisasi Danau Beratan, Buyan dan Tamblingan	Persentase luas kerusakan lingkungan danau yang tertangani	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan DAK
	20 Pelestarian, pemanfaatan dan tata kelola Hutan berdasarkan konsep Wana Kertih	Jumlah hutan yang dikelola menerapkan konsep Wana Kertih	Jumlah	Dinas Kehutanan	Belanja Langsung
	21 Revitalisasi lahan kritis	Persentase lahan kritis yang tertangani	Persentase (%)	Dinas Kehutanan	Belanja Langsung
	22 Penyusunan master plan pembangunan pembangkit listrik dan sumber energi lainnya sesuai hasil "Bali New Eyes" untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Bali	Jumlah potensi sesuai master plan pembangunan pembangkit listrik dan sumber energi lainnya yang disusun sesuai hasil "Bali New Eyes" untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Bali	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	23 Pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi	Jumlah infrastruktur pendukung penyediaan energi listrik yang dibangun dalam rangka kemandirian energi	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	24 Kerjasama dengan pemerintah pusat dalam pembangunan pembangkit listik untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Bali			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan DAK
	25 Pembentukan Hub LNG di wilayah Gerokgak, Buleleng untuk distribusi LNG Jawa Timur dan Wilayah Indonesia bagian tengah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan DAK
22	**Misi 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.**				
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
	Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik		**Indeks**		
	Sasaran :				
	1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**Indeks**		
	Kegiatan :				
	1 Kerjasama yang berkesinambungan dengan Lembaga pemerintah dalam penyelenggara pelayanan publik bersama	Jumlah kerjasama	Kerjasama	Biro Organisasi	One Island One Management and One Commando
	2 Pemberian Ijin usaha gratis untuk usaha dan industri kecil dan menengah, koperasi yang berorientasi ekspor dan ramah lingkungan	Jumlah UMKM yang mendapat ijin usaha gratis	Unit	Dinas Koperasi dan UKM	Regulasi
	3 Simplifikasi prosedur penyelenggaraan pelayanan publik terpadu antar intansi lembaga pemerintah	Jumlah SOP Pelayanan Publik yang disederhanakan	SOP	Biro Organisasi	Belanja Langsung
	4 Pembangunan sistem cepat tanggap pengaduan masyarakat secara online	Kecepatan tanggapan terhadap pengaduan dari masyarakat	Menit	Inspektorat	Belanja Langsung
	5 Penetapan lama waktu dan biaya standar setiap jenis pelayanan publik.	Persentase kepatuhan pelayanan publik terhadap SOP	Persentase (%)	Biro Organisasi	Belanja Langsung
	6 Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah	Jumlah pemanfaatan aset untuk sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Langsung
	7 Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang etika, integritas dan profesional sebagai pelaku pelayanan publik	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan etika, integritas dan profesionalitas	Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	8 Pengembangan budaya kerja S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timebond) pada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh lembaga pemerintah Provinsi Bali	Persentase pengembangan budaya kerja SMART pada ASN	Persentase (%)	Biro Organisasi	Belanja Langsung
	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				
	Indikator Tujuan : 1 Indeks Reformasi Birokrasi		**Indeks**		
	2 Opini BPK		Status		
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Persentase (%)		
	Sasaran :				
	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi**	**Indeks**		
	Kegiatan :				
	1 Sensus pembangunan semesta berencana	Jumlah jenis data yang dihasilakn dari sensus pembangunan Semesta Berencana	Persentase (%)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung
	2 Pengembangan manajemen pengelolaan data terintegrasi	Jumlah jenis manajemen pengelooan data terintegrasi yang dikembangkan	Persentase (%)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung
	3 Penetapan regulasi bagi penduduk pendatang non domisili Bali		Persentase (%)	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Regulasi
	4 Pengendalian jumlah penduduk non domisili di Bali dengan ketentuan-ketentuan tertentu	jumlah laporan hasil pengendalian jumlah penduduk non domisili di Bali dengan ketentuan-ketentuan tertentu	Persentase (%)	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Belanja Langsung
	5 Penerapan manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penerapan manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan	Persentase (%)	Badan Kepegawaian Daerah	Belanja Langsung
	6 Internalisasi pendekatan Merit System dalam rangka pembinaan ASN	Persentase Internalisasi pendekatan Merit Sistem dalam rangka pembinaan ASN	Persentase (%)	Badan Kepegawaian Daerah	Belanja Langsung

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	7 Manajemen penggajian dan pengupahan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan	Persentase kepatuhan pelaksanaan regulasi terkait sistem penggajian dan pengupahan ASN	Persentase (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Langsung
	8 Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan berdasarkan pendekatan Merit System	Persentase penerapan Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan evaluasi jabatan	Persentase (%)	Biro Organisasi	Belanja Langsung
	9 Pembangunan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif sesuai dengan jumlah dan area pelayanan publik dan potensi ekonomi daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan efektivitas	Jumlah OPD	Biro Organisasi	Belanja Langsung
	10 Pembentukan Badan Riset dan Inovasi	Persentase riset dan inovasi yang diterapkan	Persentase (%)	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	Sasaran :				
	2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**Persentase (%)**		
	Kegiatan :				
	1 Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam peningkatan produktivitas aset sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase produktivitas aset	Persentase (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Langsung
	2 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber-pajak daerah dan retribusi dengan menggunakan sistem informasi teknologi	Persentase penerapan sistem IT terkait peningkatan PAD	Persentase (%)	Badan Pendapatan Daerah	Belanja Langsung
	3 Restrukturisasi Bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengembangkan perusahaan induk BUMD sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD	Persentase (%)	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	4 Peningkatan kontribusi Bank Pembangunan Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kontribusi BPD terhadap PAD	Persentase (%)	Biro Perekonomian	Belanja Langsung

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Dalam Bab ini akan diuraikan terlebih dahulu kerangka pendanaan pembangunan. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun (2018-2023) ke depan. Selanjutnya akan dijabarkan indikasi rencana program prioritas disertai dengan kebutuhan pendanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Proyeksi belanja daerah periode 2019-2023 dirancang dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi defisit menurun setiap tahunnya. Tahun 2019 defisit dirancang sebesar 8 persen. Tahun 2020 merupakan langkah percepatan pembangunan dimana defisit dirancang menjadi sebesar 20 persen dan terus menurun di tahun 2021, 2022, 2023 masing-masing 17 persen, 14 persen, dan 12 persen. Perhitungan besaran defisit tersebut dipengaruhi oleh :

a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

   1) Belanja Pegawai

      Proyeksi belanja pegawai telah memperhitungkan pemberian Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari

APBN melalui DAK Fisik. Belanja pegawai direncanakan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD, kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.

2) Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan /lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, belanja subsidi diproyeksikan sama setiap tahun selama periode 2019 – 2023.

3) Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan ursan pemerintah daerah. Belanja hibah telah memperhitungkan belanja hibah yang bersumber dari APBN melalui Dana BOS diproyeksikan sama setiap tahunnya untuk periode 2019-2023.

4) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Berdasarkan hal tersebut, dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023, belanja batuan sosial diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

5) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proyeksi belanja bagi hasil dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023 didasarkan atas proyeksi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah Tahun 2019-2023.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja bantuan keuangan diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga diproyeksikan sama setiap tahunnya dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam belanja langsung dipergunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023, belanja pegawai diproyeksikan sama setiap tahunnya yang didasarkan atas pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pemerintah Provinsi Bali mengupayakan untuk memproritaskan alokasi belanja modal dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023 yang dialokasikan sebesar 15% dari total proyeksi belanja daerah

untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Tahun Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**	**6.323.498.505.003**	**6.762.859.708.258**	**7.216.869.063.732**	**7.707.117.795.627**	**8.238.430.171.596**
	a. Pendapatan Asli Daerah	3.587.699.210.503	3.918.126.137.849	4.203.363.118.218	4.514.751.365.285	4.855.018.972.768
	1) Pajak Daerah	3.069.236.425.328	3.308.381.265.432	3.518.837.222.652	3.745.628.376.418	3.990.137.168.884
	PKB	1.350.331.823.000	1.531.149.541.365	1.661.297.252.382	1.802.507.518.835	1.955.720.657.935
	BBNKB	1.100.000.000.000	1.122.000.000.000	1.150.050.000.000	1.178.801.250.000	1.208.271.281.250
	PBBKB	380.000.000.000	392.136.400.000	431.350.040.000	474.485.044.000	521.933.548.400
	Pajak AP	3.600.000.000	3.672.000.000	3.745.440.000	3.820.348.800	3.896.755.776
	Pajak Rokok	235.304.602.328	259.423.324.067	272.394.490.270	286.014.214.783	300.314.925.523
	2) Retribusi Daerah	49.803.474.650	53.397.490.112	56.067.364.618	58.870.732.849	61.814.269.492
	3) Hasil Pengelolaan keakayaan daerah yang dipisahkan	170.885.580.850	226.819.174.040	249.501.091.444	274.451.200.588	301.896.320.647
	4) Lain-Lain PAD yang sah	297.773.729.675	329.528.208.265	378.957.439.504	435.801.055.430	501.171.213.745
	b. Dana Perimbangan	2.662.026.888.500	2.796.942.592.409	2.964.759.147.954	3.142.644.696.831	3.331.203.378.641
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.772.406.000	47.790.978.000	48.746.797.560	49.721.733.511	52.207.820.187
2	**BELANJA PEMERINTAH PROVINSI**	**6.833.565.626.694**	**8.128.465.923.026**	**8.419.026.636.736**	**8.756.893.387.948**	**9.230.372.436.896**
	a. Belanja Tidak Langsung	4.702.083.968.693	5.174.239.720.503	5.425.247.853.224	5.694.207.964.396	5.982.574.215.605
	1) Belanja Pegawai	1.732.663.072.601	1.839.378.782.999	1.931.347.722.149	2.027.915.108.257	2.129.310.863.669
	2) Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	3) Belanja Subsidi	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	4) Belanja Hibah	962.216.359.000	962.216.359.000	962.216.359.000	962.216.359.000	962.216.359.000
	5) Belanja Bantuan Sosial	4.220.000.000	14.067.900.000	14.771.295.000	15.509.859.750	16.285.352.738
	6) Belanja Bagi Hasil	1.167.612.768.530	1.702.672.669.256	1.797.918.066.903	1.900.172.786.199	2.010.028.403.889
	7) Belanja Bantuan Keuangan	812.927.388.562	630.904.009.248	693.994.410.172	763.393.851.190	839.733.236.309
	8) Belanja Tidak Terduga	12.444.380.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	b. Belanja Langsung	2.131.481.658.001	2.954.226.202.523	2.993.778.783.512	3.062.685.423.552	3.247.798.221.291
	1) Belanja Pegawai	19.652.247.328	17.971.062.328	17.971.062.328	17.971.062.328	17.971.062.328
	2) Belanja Barang dan Jasa	1.327.789.645.194	818.541.465.610	976.595.762.169	1.149.349.758.437	1.339.695.957.973
	3) Belanja Modal	784.729.765.479	1.075.294.693.613	1.147.482.181.133	1.225.431.729.505	1.309.910.397.283
3	**SURPLUS/DEFISIT (1 - 2)**	**-510.067.121.691**	**-1.365.606.214.768**	**-1.202.157.573.004**	**-1.049.775.592.321**	**-991.942.265.300**
4	**PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI (a - b)**	**510.757.121.691**	**1.365.606.214.768**	**1.202.157.573.004**	**1.049.775.592.321**	**991.942.265.300**
	a. Penerimaan	510.757.121.691	1.365.606.214.768	1.202.157.573.004	1.049.775.592.321	991.942.265.300
	b. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

Tabel 7.2A
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	01		**Pendidikan**					
1	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	88,87	88.5	182,992,987,502	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Bahasa	Angka Partisipasi Kasar (APK) PLB	15.14	71.5	14,201,550,106	Dinas Pendidikan
				Persentase karya Bahasa, Aksara dan Sastra yang teridentifikasi		50	21,534,475,996	
1	01	03	Program Pembinaan SMA	APM SMA		34.78	95,993,576,904	Dinas Pendidikan
1	01	04	Program Pembinaan SMK	APM SMK		39.22	107,037,405,972	Dinas Pendidikan
1	01	05.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/S2	95	98.5	1,101,784,168	Dinas Pendidikan
1	01	06	Program Pengembangan Teknologi Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Pembelajaran Berbasis TIK		72	3,859,800,000	Dinas Pendidikan
1	**02**		**KESEHATAN**					
1	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai SAKIP	81.46	82	5,723,781,011	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial		95	15,197,754,416	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	49	50	16,725,383,024	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar		85	3,600,918,782	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (/100.000 Kelahiran Hidup)		69	8,812,806,684	Dinas Kesehatan
1	02	06	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan		77.77	648,975,416	Dinas Kesehatan
1	02	07	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Case Detection Rate TB (%)	27	30	11,199,972,328	Dinas Kesehatan
1	02	08	Program Penguatan Surveilans dan Imunisasi	Persentase Kejadian Luar Biasa Yang Ditangani		100	341,448,000	Dinas Kesehatan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	09	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk Diatas Atau Sama Dengan Dari Usia 18 Tahun		19.5	1,161,270,500	Dinas Kesehatan
1	02	10	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan laboratorium kesehatan		80	11,362,014,904	Dinas Kesehatan
1	02	11	Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Persentase Kelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan		100	10,774,466,000	Dinas Kesehatan
1	02	12	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga		2	2,692,552,824	Dinas Kesehatan
1	02	13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPT RSUD Bali Mandara	Persentase Pelayanan Yang Memenuhi SPO Pada UPT RSUD Bali Mandara	100	100	271,211,812,560	UPT RSUD Bali Mandara
1	02	14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT RSUD Bali Mandara	Indeks Kepuasan Pelanggan		80	26,000,000,000	UPT RSUD Bali Mandara
1	02	15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Persentase Peningkatan Pasien Yang Dilayani Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali		2	31,500,000,000	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
1	02	16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80	29,374,149,728	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
1	02	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	30,000,000,000	Rumah Sakit Mata Bali Mandara
1	02	18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Persentase Pasien yang Dilayani Rumah Sakit Mata Bali Mandara		0.5	10,996,127,832	Rumah Sakit Mata Bali Mandara
1	**03**		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
1	03	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	78	70	6,508,835,277	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	02	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	71.51	72.01	13,108,986,398	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	55	57.46	2,855,312,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali	100	100	1,211,416,292	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	58	60	27,039,537,980	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	100	100	443,771,287	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Pemberdayaan sumber daya manusia jasa konstruksi di 9 Kabupaten/kota	100	100	1,528,546,741	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase kondisi jalan dan jembatan provinsi mantap	80.81	77.44	350,219,523,456	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	85	87	49,656,226,418	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Persentase penduduk yang berakses sanitasi layak di Provinsi Bali	75	87	1,305,894,950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program Pengawasan Tata Ruang	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang	100	100	314,857,054	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Alat Berat	Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100	100	2,126,646,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100	100	21,729,314,416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100	100	13,239,450,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**04**		**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
1	04	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	80	80	2,256,095,602	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	12	12	783,147,400	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	12	12	1,521,334,830	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**05**		**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	05	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP	86	86.5	3,229,810,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM/SDA Pol PP	100	100	330,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan NonYustisi	543	350	870,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Kemampuan Tenaga Perlindungan Masyarakat dan Informasi Rawan Bencana Kebakaran		2.8% dan 20%	670,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	05	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	247	235	17,972,257,100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**06**		**SOSIAL**					
1	06	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	12 bulan	A	2,079,705,200	Dinas Sosial

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	02	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1	1	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	03	Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	725	400	5,500,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	1421 orang, 7 paket	2000	886,500,000	Dinas Sosial
1	06	05	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	387 orang, 70 lembaga, 1 TMP, 12 Bulan, 1 Laporan	510	300,634,000	Dinas Sosial
1	06	06	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	696	740	397,200,000	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pelayanan Sosial	Jumlah penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	195	200	3,772,564,800	Dinas Sosial
1	**07**		**BENCANA**					
1	07	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	82.93	82.93	4,118,316,611	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	07	02	Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang di Bina dalam Menghadapi Bencana	100	100	1,525,997,805	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	07	03	Program Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100	100	1,200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	07	04	Program Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100	100	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	07	05	Program Pengendalian Bencana	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	100	100	10,505,685,584	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2			**URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR**					
2	**01**		**TENAGA KERJA**					

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	01	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Prosentase Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	100 persen	100 persen	4,529,618,736	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	02	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap (ditempatkan) dan perluasan kesempatan kerja	4.570 orang	4.570 orang	3,357,022,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	03	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang kompetensi dan tersertifikat	358 orang	358 orang	4,100,482,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	04	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang mendapatkan perlindungan tenaga kerja	250 perusahaan	250 perusahaan	874,429,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	05	Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten	112 orang	112 orang	3,090,134,700	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	06	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang diuji lingkungan kerjanya serta kesehatan kerja bagi tenaga kerja	60 perusahaan	60 perusahaan	1,085,756,900	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**02**		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
2	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	A	A	2,102,879,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	02	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk Perempuan yang Bekerja	98.45	98.55	262,838,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100	100	396,838,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	04	Program Perlindungan Anak	Persentase Kab/kota Layak Anak Minimal predikat Madya	22	44	1,011,676,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**03**		**PANGAN**					
2	03	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	71	72	2,022,019,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	02	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	100	100	340,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	03	Program Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Kedaulatan Beras	Persentase Stabilitas Harga Pangan	lebih kecil dari 10%	lebih kecil dari 10%	260,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	03	04	Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Persentase Pangan B2SA (Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi)	95.6	95.6	635,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	05	Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar aman dikonsumsi	13.5	13.5	360,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	06	Program Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Persentase Sertifikasi Mutu Pangan Segar	8.47	8.47	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**04**		**PERTANAHAN**					
2	04	01	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase data informasi pertanahan yang handal	0	5	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	**05**		**LINGKUNGAN HIDUP**					
2	05	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	100	1,591,361,832	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	02	Program Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan peraturan lingkungan hidup	100	100	205,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	03	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan; Terpantaunya kualitas air; Terpantaunya kualitas udara; Terkelola dan lestarinya ekosistem pesisir dan laut	1% ; 9 Kab./Kota; 13 Kawasan	1% ; 9 Kab./Kota; 13 Kawasan	282,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	04	Program Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase tercapainya pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	100	100	152,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	05	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	90	90	340,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	06	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan pada TPA Regional	2 TPA Regional	2 TPA Regional	3,696,646,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**06**		**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
2	06	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) - Nilai Evaluasi Laporan Manajemen Kinerja	100	100	2,023,510,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	06	02	Program Kependudukan	Persentase lembaga yang menggunakan KTP elektronik berbasis NIK	100	100	950,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
2	06	03	Program Peningkatan Pencatatan Sipil	persentase penduduk yang memiliki catatan sipil	100	100	550,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
2	**07**		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
2	07	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	82	82	4,016,881,956	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	02	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Persentase Perkembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)	78.93	78.93	1,616,274,064	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	03	Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna	Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan	47.01	47.01	1,283,722,664	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	04	Program Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	65	65	8,067,698,460	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	05	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	40.09	40.09	2,441,710,668	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**08**		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
2	08	01	Program Keluarga Berencana	Angka TFR (Total Fertility Rate)	100% (2,1)	100% (2,1)	400,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
2	**09**		**PERHUBUNGAN**					
2	09	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100	100	2,474,850,816	Dinas Perhubungan
2	09	02	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	100	674,634,576	Dinas Perhubungan
2	09	03	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran	Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional	100	100	306,572,080	Dinas Perhubungan
2	09	04	Program Peningkatan Pengawasan LLAJ	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	100	100	990,601,904	Dinas Perhubungan
2	09	05	Program Perencanaan Pengembangan Aksesibilitas	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan	3	3	804,044,080	Dinas Perhubungan
2	09	06	Program Pengendalian Persimpangan Berbasis APILL	Tingkat pelayanan di persimpangan	C	C	752,650,000	Dinas Perhubungan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	09	07	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita	Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	60	60	6,004,806,384	Dinas Perhubungan
2	09	08	Program Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Tingkat pelayanan ruas jalan	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	1,126,844,160	Dinas Perhubungan
2	09	09	Program Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	1 tahun	1 tahun	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	**10**		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
2	10	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	80.5	80.5	4,525,891,986	Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
2	10	02	Program Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	100	100	1,050,000,000	Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
2	10	03	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	100	100	1,693,906,300	Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
2	10	04	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100	100	8,441,636,040	Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
2	10	05	Program Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi	90	90	500,000,000	Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
2	**11**		**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					
2	11	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LKjIP]	82.15	82.15	2,161,826,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	02	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas	210 Unit	210 Unit	381,935,798	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	11	03	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah kelompok masyarakat/anggota koperasi yang mendapat penyuluhan dan jumlah koperasi yang ijinnya diverifikasi	50 Unit	50 Unit	505,682,462	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	04	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	104 Unit	104 Unit	394,330,798	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	05	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya dan jumlah KUMKM yang mendapat pendampingan konsultan PLUT	204 UMKM	204 UMKM	924,792,710	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	06	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM	Jumlah SDM KUKM yang berkompeten	50 KUKM	50 KUKM	5,856,773,248	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**12**		**PENANAMAN MODAL**					
2	12	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)	95	95	2,952,782,696	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	02	Program Pengembangan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase nilai investasi (%)	29.39	14.87	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	03	Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	32.33	13.43	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	04	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100	100	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100	100	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	06	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88	88	54,904,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	07	Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**13**		**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**					
2	13	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	70	70	2,492,872,592	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	13	02	Program Pembudayaan Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	30	30	536,257,664	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	03	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar di tingkat regional, nasional dan internasional	177	177	8,602,627,080	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	04	Program Pemberdayaan Pemuda	Persentase Pemuda yang Menjadi Anggota Aktif Organisasi Kepemudaan	77	77	2,324,769,248	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	05	Program Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	62.59	62.59	557,943,248	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**14**		**STATISTIK**					
2	14	01	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan Data Statistik Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	100	100	640,380,200	Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
2	**15**		**PERSANDIAN**					
2	15	01	Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100	100	790,482,340	Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
2	**16**		**KEBUDAYAAN**					
2	16	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	79	79	5,578,618,928	Dinas Kebudayaan
2	16	02	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Persentase Komunitas Seni Yang Dilestarikan	5	5	16,612,876,656	Dinas Kebudayaan
2	16	03	Program Penguatan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang Diperkuat dan Diberdayakan	4219	4219	2,369,457,736	Dinas Kebudayaan
2	16	04	Program Pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra	Persentase Pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra	5	5	4,949,943,248	Dinas Kebudayaan
2	16	05	Program Pelestarian Nilai Tradisi	Jumlah Nilai Tradisi yang Diinventarisasi dan Ditetapkan	50	50	1,000,398,848	Dinas Kebudayaan
2	16	06	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman Yang Dilestarikan	5	5	622,572,080	Dinas Kebudayaan
2	16	07	Program Peningkatan Kualitas UPTD. Taman Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya	75	75	6,172,400,000	UPTD. Taman Budaya
2	16	08	Program Peningkatan Kualitas UPTD. Museum Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75	75	3,734,190,000	UPTD. Museum Bali
2	16	09	Program Peningkatan Kualitas UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75	75	5,415,023,000	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	17		**PERPUSTAKAAN**					
2	17	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	76	76	1,660,127,700	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	02	Program Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan	10	10	185,700,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	03	Program Pengembangan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	3	3	146,350,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	04	Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	48	48	237,100,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**18**		**KEARSIPAN**					
2	18	01	Program Peningkatan Pengembangan Kearsipan	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	25	25	203,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	02	Program Pengembangan dan Peningkatan Pengolahan Arsip	Persentase Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah Mengelola Arsip dengan Baik	20	20	215,381,300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3			**URUSAN PILIHAN**					
3	**01**		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
3	01	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	84.40	84.40	2,185,183,288	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	02	Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Ekosistem	1 Kawasan	1 Kawasan	2,891,518,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	03	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	99.100 ton	99.100 ton	148,742,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	04	Program Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	17.886,41 Ton	17.886,41 Ton	211,624,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	05	Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	142 SKP	142 SKP	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	06	Program Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha taat hukum	75	75	55,524,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	07	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	238,500,000	284,400,000	1,083,032,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	08	Program Peningkatan Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	187,500,000	362,000,000	1,063,768,344	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	09	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola (kawasan)	1 Kawasan	1 Kawasan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	10	Program Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan	3500 Ton	3500 Ton	126,976,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	**02**		**PARIWISATA**					
3	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	80	81	2,501,572,080	Dinas Pariwisata
3	02	02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	10,45 hari dan 4 hari	9,87 hari dan 4,5 hari	542,943,248	Dinas Pariwisata
3	02	03	Program Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kualitas sumber daya pariwisata	748 orang	748 orang	1,187,943,248	Dinas Pariwisata
3	02	04	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	6.070.473 orang dan 9.757.991 orang	7.100.000 orang dan 8.200.000 orang	3,516,572,080	Dinas Pariwisata
3	02	05	Program Industri Pariwisata	Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	118,98 USD dan Rp. 454.000,-	145,00 USD dan Rp. 463.000,-	432,943,248	Dinas Pariwisata
3	**03**		**PERTANIAN**					
3	03	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	81	81	3,181,192,736	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	02	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pemanfaatan Lahan Sawah Dua Kali Tanam Padi Se-tahun	76.95	76.95	1,012,030,908	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	03	Program Peningkatan Produksi dan Pengembangan Agribisnis Komoditas Perkebunan	Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan	98,524 ton	98,524 ton	2,697,294,308	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	04	Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Padi ; Palawija (ton) ; Kawasan Pelaksanaan Pertanian Organik Sempadan Danau	843.468 ; 168.000 ; 1 Kawasan Danau Tamblingan	843.468 ; 168.000 ; 1 Kawasan Danau Tamblingan	1,245,473,492	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Jumlah Produksi Sayuran; Buah-buahan (ton)	208.000 ; 429312 ton	208.000 ; 429312 ton	889,284,744	
3	03	05	Program Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Benih Padi ; Palawija (ton) ; Sayuran (ton) ; Buah-Buahan dan Tanaman Hias (phn)	6,1 ;1,8 ; 26 ;10.000	6,1 ;1,8 ; 26 ;10.000	3,476,490,324	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	06	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Luas Serangan Maksimum Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)	5	5	2,609,092,736	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	03	07	Program Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah pengawasan peredaran sertifikasi dan mutu benih (ton); sayuran (ton) dan buah-buahan (btg).	Benih padi bersertifkat : 50 ha (20 unit)= 150 ton ; Benih hortikultura bersertifikt = 200 unit (70.	Benih padi bersertifkat : 50 ha (20 unit)= 150 ton ; Benih hortikultura bersertifikt = 200 unit (70.	999,513,576	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	08	Program Pengembangan Pertanian Gumi Banten	Jumlah unit taman gumi banten yang produktif	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 ros/30.000 phn/1.500 btr/500.000 kg/580.000 ros/7.638.500 phn/240.000	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 ros/30.000 phn/1.500 btr/500.000 kg/580.000 ros/7.638.500 phn/240.000	3,889,078,156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	09	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan	65	65	5,495,242,099	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	10	Program Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani	1 unit, 1 paket, 1 paket ; 100 kelompok	1 unit, 1 paket, 1 paket ; 100 kelompok	4,717,451,282	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	11	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	76	76	2,336,901,700	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	12	Program Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (satuan ternak)	438,131	442,512	660,332,080	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	13	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok yang menerapkan Agribisnis Peternakan (kelompok)	27	35	518,777,448	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (kasus)	250 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	200 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	3,248,153,552	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	15	Program Pengembangan Semen	Jumlah Produksi Semen	101.000 dosis	101.000 dosis	3,367,062,484	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	16	Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	82.5	82.5	1,406,999,984	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	04		**KEHUTANAN**					
3	04	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	100	100	1,190,908,996	Dinas Kehutanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	04	02	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	1,65% (680 Ha)	1,65% (680 Ha)	95,000,000	Dinas Kehutanan
3	04	03	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Persentase kerusakan kawasan hutan	8,33% (50 Ha)	8,33% (50 Ha)	385,000,000	Dinas Kehutanan
3	04	04	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	200 Ha (29,41%)	200 Ha (29,41%)	773,787,000	Dinas Kehutanan
3	04	05	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	341,243,252	Dinas Kehutanan
3	04	06	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	200 Ha (29,41%)	200 Ha (29,41%)	629,896,700	Dinas Kehutanan
3	04	07	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	255,154,300	Dinas Kehutanan
3	04	08	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	200 Ha (29,41%)	200 Ha (29,41%)	623,787,000	Dinas Kehutanan
3	04	09	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	217,379,000	Dinas Kehutanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	04	10	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	200 Ha (29,41%)	200 Ha (29,41%)	410,500,000	Dinas Kehutanan
3	04	11	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	180,698,000	Dinas Kehutanan
3	04	12	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	406,657,000	Dinas Kehutanan
3	**05**		**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**					
3	05	01	Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	Terkelolanya dan terlaksananya pengembangan usaha-usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	RE (100 persen) ; ESDM (70 persen); Rektek (500 buah); 1 Perda RUED	RE (100 persen) ; ESDM (70 persen); Rektek (500 buah); 1 Perda RUED	1,320,999,664	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
3	**06**		**PERDAGANGAN**					
3	06	01	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Pangan	<15%	<10%	97,178,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	02	Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	2.22	2	426,600,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	03	Program Perlindungan Konsumen	Indeks Pemberdayaan Konsumen	-	2	115,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	04	Program Pengembangan Pelayanan Penguji Mutu Barang	Jumlah Barang Yang Tersertifikasi	45	45	486,995,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**07**		**PERINDUSTRIAN**					
3	07	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	82.1	82.1	2,073,653,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	02	Program Pengembangan Industri	Indeks Peningkatan Produksi	-	3.5	3,595,460,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	03	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	Jumlah Komoditi Olahan Pangan Yang Tumbuh dan Berkembang	5	5	196,864,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**08**		**TRANSMIGRASI**					
3	08	01	Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	Jumlah dokumen laporan evaluasi ketransmigrasian	4	4	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
4			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**					

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**01**		**PERENCANAAN**					
4	01	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Meningkatnya Nilai LKjIP Bappeda Litbang Provinsi Bali	Nilai B (80)	Nilai B (80)	4,643,672,182	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	01	02	Program Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Daerah	100	100	4,417,653,790	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	01	03	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kesesuaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	1,088,628,832	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	01	04	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	1,556,144,356	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	01	05	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kesesuaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	1,313,709,078	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	**02**		**KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**					
4	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	84.4	84.4	2,972,746,984	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	02	02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase regulasi penyusunan APBD (Induk dan Perubahan) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun tepat waktu	100	100	6,019,264,364	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	02	03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100	100	4,957,082,144	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	02	04	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan	75	75	956,009,416	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah serta pertanggungjawaban APBD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota tepat waktu	100	100	580,825,016	
4	02	05	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase utilisasi aset terhadap total aset daerah	80	80	1,060,334,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	**03**		**KEUANGAN SUB PENGELOLAAN PENDAPATAN**					
4	03	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	87	87	15,620,785,522	Badan Pendapatan Daerah
4	03	02	Program Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan pendapatan daerah yang tepat	90	90	1,195,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4	03	03	Program Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	59.3	56.81	1,888,313,500	Badan Pendapatan Daerah
4	03	04	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Samsat dan Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	90	90	1,187,150,000	Badan Pendapatan Daerah
4	03	05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (1)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	76.25	76.5	3,639,835,068	Badan Pendapatan Daerah
4	03	06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (2)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (2)	76.25	76.5	1,457,266,552	Badan Pendapatan Daerah
4	03	07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (3)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	76.25	76.5	1,973,448,540	Badan Pendapatan Daerah
4	03	08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (4)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (4)	76.25	76.5	3,538,752,624	Badan Pendapatan Daerah
4	03	09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (5)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (5)	76.25	76.5	3,963,456,193	Badan Pendapatan Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	03	10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (6)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	76.25	76.5	2,763,197,548	Badan Pendapatan Daerah
4	03	11	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (7)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (7)	76.25	76.5	1,776,627,328	Badan Pendapatan Daerah
4	03	12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (8)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	76.25	76.5	2,087,790,303	Badan Pendapatan Daerah
4	03	13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (9)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (9)	76.25	76.5	1,505,260,836	Badan Pendapatan Daerah
4	**04**		**KEPEGAWAIAN**					
4	04	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	100	100	2,167,728,776	Badan Kepegawaian Daerah
4	04	02	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi ASN	Persentase peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan ASN	20.33	20.33	4,286,945,158	Badan Kepegawaian Daerah
4	04	03	Program Pengembangan Manajemen Karier	Persentase peningkatan manajemen karier	3.5	3.5	2,508,495,000	Badan Kepegawaian Daerah
4	04	04	Program Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi kriteria Penilaian dan penghargaan	88.67	88.67	937,850,000	Badan Kepegawaian Daerah
4	**05**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
4	05	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	76	76	6,041,956,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	05	02	Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	5	5	1,713,186,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	05	03	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat manajerial dan fungsional	100	100	51,164,413,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	05	04	Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural	Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test	100	100	3,425,888,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	**06**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
4	06	01	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	15,513,695,948	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**07**		**SEKRETARIAT DPRD**					
4	07	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali	10	10	20,392,101,308	Sekretariat DPRD
4	07	02	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD Provinsi Bali	5	5	108,777,898,692	Sekretariat DPRD
4	07	03	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	3	3	10,330,000,000	Sekretariat DPRD
4	**08**		**SEKRETARIAT DAERAH**					
4	08	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	20	20	751,338,832	Biro Hukum dan HAM
4	08	02	Program Pengembangan Produk Hukum	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum	20	20	3,127,457,828	Biro Hukum dan HAM
4	08	03	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase pelayanan permasalahan hukum dan HAM	20	20	2,728,268,816	Biro Hukum dan HAM
4	08	04	Program Pembinaan dan Dokumentasi Hukum	Persentase penyebarluasan informasi hukum	20	20	512,341,004	Biro Hukum dan HAM
4	08	05	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	persentase pelaporan dan capaian kinerja yang ditangani	4 laporan	4 laporan	894,893,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	08	06	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase implementasi kerjasama pemerintah daerah	2 draf	2 draf	1,219,468,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	08	07	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Rumusan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20	20	574,352,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	08	08	Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan	Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan	20	20	546,528,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	08	09	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Indek Kepuasan Pelayanan ke Tatausahaan Perangkat daerah	86	86	768,000,000	Biro Organisasi
4	08	10	Program Peningkatan Ketatalaksana dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Baik	77	77	361,014,000	Biro Organisasi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	08	11	Program Peningkatan Dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi yang Baik	77	77	952,856,000	Biro Organisasi
4	08	12	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (Right Sizing)	77	77	718,130,000	Biro Organisasi
4	08	13	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100	100	1,333,871,144	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	08	14	Program Pengembangan dan Peningkatan Kebijakan Daerah Bagian Agama	Persentase Peningkatan Kehidupan Beragama	100	100	8,977,786,568	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	08	15	Program Pengembangan dan Peningkatan Kebijakan Daerah Bagian Kepemudaan dan Olahraga,Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Kebudayaan	2 kebijakan	2 kebijakan	563,872,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	08	16	Program pengembangan dan peningkatan kebijakan daerah bagian pendidikan dan kesehatan,sosial,tenaga kerja dan transmigrasi	Jumlah Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 kebijakan	2 kebijakan	3,449,691,288	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	08	17	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase peningkatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provinsi Bali	82.64	82.64	592,536,000	Biro Perekonomian
4	08	18	Program Pemberdayaan Perekonomian	LPD sehat dan berdaya saing	865	877	150,000,000	Biro Perekonomian
				Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil	4.5	4.5	150,000,000	
				BUMD Sehat dan Berdaya Saing	7	7	200,000,000	
				Jumlah Kebijakan di Bidang Ekonomi	2 kebijakan (peraturan) dibidang ekonomi	2 kebijakan (peraturan) dibidang ekonomi	85,000,000	
4	08	19	Program Pengembangan Produksi Daerah	Jumlah Kebijakan Produksi Daerah	2 kebijakan (peraturan) Produksi Daerah	2 kebijakan (peraturan) Produksi Daerah	120,000,000	Biro Perekonomian
				Tingkat Harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan â‰¤ HET	HET Rp.14.500	HET Rp.14.500	70,546,416	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	08	20	Program Pengembangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan	Jumlah Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber daya Air serta Kehutanan	2 kebijakan (peraturan) dibidang lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan	2 kebijakan (peraturan) dibidang lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan	110,546,416	Biro Perekonomian
4	08	21	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	persentase pelaporan dan capaian kinerja yang ditangani	100	100	571,854,416	Biro Administrasi Pembangunan
4	08	22	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase Kesesuaian Rencana dengan Realisasi Pembangunan	100	100	295,804,832	Biro Administrasi Pembangunan
4	08	23	Program Pelayanan Aparatur	Persentase Laporan Pembangunan yang disampaikan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	54	54	436,814,416	Biro Administrasi Pembangunan
4	08	24	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	50	50	289,490,416	Biro Administrasi Pembangunan
4	08	25	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase layanan administrasi yang ditangani	100	100	36,337,397,680	Biro Umum
4	08	26	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	indeks kepuasan pelayananan pengelola keuangan setda	100	100	1,278,050,912	Biro Umum
4	08	27	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	Persentase Pelayanan administrasi yang ditangani dengan Baik	100	100	7,300,000,000	Biro Umum
4	08	28	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Prosentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100	100	2,680,592,000	Biro Humas dan Protokol
4	08	29	Program Kehumasan	Prosentase Peningkatan Kegiatan Publikasi Pemprov Bali	100	100	13,858,300,000	Biro Humas dan Protokol
4	08	30	Program Keprotokolan	Prosentase Kegiatan Keprotokolan Yang Ditangani	100	100	3,040,422,416	Biro Humas dan Protokol
4	08	31	Program Peningkatan Layanan Informasi	Prosentase Updating Data dan Informasi	100	100	3,831,087,408	Biro Humas dan Protokol
4	08	32	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	100	100	9,962,477,600	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	08	33	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase tingkat penyelesaian pengadaan barang/jasa	100	100	6,471,798,452	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	08	34	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan level kematangan lembaga pengadaan barang/jasa	100	100	1,663,081,000	Biro Administrasi Barang/Jasa

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	08	35	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Indeks pelayanan pengadaan barang/jasa	100	100	1,191,430,000	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	**09**		**INSPEKTORAT**					
4	09	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Terlayaninya Administrasi perkantoran	100	100	4,353,880,720	Inspektorat
4	09	02	Program Monitoring Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti	90	90	714,314,416	Inspektorat
4	09	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Level APIP	WTP, APIP Level 3	WTP, APIP Level 3	4,190,433,696	Inspektorat
4	**10**		**KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT**					
4	10	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	77	77	2,648,841,256	Badan Penghubung
4	10	02	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	70	70	830,679,744	Badan Penghubung
4	**11**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**					
4	11	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	80	80	2,233,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	11	02	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana Keamanan Lingkungan	5.90	5.90	1,422,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	11	03	Program pendidikan politik masyarakat	Pencapaian Indek Demokrasi di Provinsi Bali	80	80	705,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	11	04	Program Bina Ideologi dan Pemantapan wawasan Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat yang terdaftar di kesbang yang mendapat pembinaan bina ideologi	20	20	690,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH							2,131,481,658,001	

Tabel 7.2B
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**													
1	01		**Pendidikan**													
1	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88,87	88,89	181.195.484.600	88,90	181.398.208.254	88,91	181.601.158.717	88,92	181.804.336.244	88,92	725.999.187.815	Dinas Pendidikan
1	01	02*	Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) Menengah	73,15	100,00	108.916.405.972	100,00	110.828.391.085	100,00	112.823.302.124	100,00	114.854.121.562	100,00	447.422.220.743	Dinas Pendidikan
				Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	34,96	37,51		38,79		40,06		41,34		41,34		
1	01	03*	Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	15,14	15,32	36.447.371.612	15,41	36.629.608.470	15,50	36.812.756.512	15,59	36.996.820.294	15,59	146.886.556.888	Dinas Pendidikan
1	01	04*	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84,00	85,00	2.398.453.267	85,50	2.524.372.063	86,00	2.650.590.666	86,50	2.783.120.199	86,50	10.356.536.195	Dinas Pendidikan
1	01	05	Pengembangan Teknologi Pendidikan UPT BPTEKDIK	Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia	29,85	32,84	4.187.500.000	34,33	4.543.021.983	35,82	4.928.728.056	37,31	5.347.180.873	37,31	19.006.430.912	Dinas Pendidikan
1	01	06*	Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	Persentase widya pasraman yang tumbuh dan berkembang di Desa Adat	1,41	2,81	518.000.000	3,42	536.000.000	4,02	554.000.000	4,62	554.000.000	4,62	2.162.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	07*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jana Kerthi	Persentase mahasiswa S1, S2, S3 yang berprestasi di bidang penerapan nilai-nilai Jana Kerthi	0,03	0,05	3.408.000.000	0,06	4.172.000.000	0,07	4.936.000.000	0,07	5.010.000.000	0,07	17.526.000.000	Dinas Pendidikan
1	**02**		**Kesehatan**													
1	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,46	82,5	7.785.557.895	83	7.885.557.895	83,5	7.985.557.895	84	8.085.557.895	84,5	31.742.231.580	Dinas Kesehatan
1	02	02*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	86	92	1.556.000.000	94	2.090.000.000	96	2.190.000.000	100	2.290.000.000	100	8.126.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	5	4,6	560.000.000	4,4	1.100.000.000	4,3	1.200.000.000	4,2	1.300.000.000	4,2	4.160.000.000	
				Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,40	7.769.409.942	0,45	7.909.262.942	0,50	8.989.262.942	0,55	10.049.262.942	0,55	34.717.198.768	
1	02	03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Case Detection Rate TBC (%)	30	32	16.493.740.520	34	17.854.171.660	36	17.854.171.660	38	17.854.171.660	38	70.056.255.500	Dinas Kesehatan
1	02	04	Penguatan Surveilans dan Imunisasi	Persentase Desa UCI	94	95,5	562.300.000	96	675.890.800	96,5	675.890.800	97	675.890.800	97	2.589.972.400	Dinas Kesehatan
1	02	05*	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase WUS 30-50 Tahun yang mendapatkan Deteksi Dini Kanker	17,7	32	436.374.950	37	1.485.765.290	42	1.500.000.000	47	1.600.000.000	47	5.022.140.240	Dinas Kesehatan
				Persentase ODGJ Berat yang tidak ditelantarkan	0,7	0,6	463.355.480	0,55	463.355.480	0,5	473.355.480	0,45	483.355.480	0,45	1.883.421.920	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	06*	Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	85	85	200.000.000.000	85	250.000.000.000	85	250.000.000.000	85	250.000.000.000	85	950.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	07	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentas fasilitas pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	85	95	13.778.349.160	95	14.042.034.000	95	14.072.034.000	95	14.102.034.000	95	55.994.451.160	Dinas Kesehatan
1	02	08*	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	49	60	17.802.110.043	65	17.882.110.043	70	17.932.110.043	75	17.982.110.043	75	71.598.440.172	Dinas Kesehatan
1	02	09*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,001	0,001	3.305.356.790	0,001	3.568.873.390	0,001	3.868.873.390	0,001	4.168.873.390	0,001	14.911.976.960	Dinas Kesehatan
1	02	10*	Pengembangan Sistem Database Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	0	30	289.842.400	40	300.000.000	50	325.000.000	60	325.000.000	60	1.239.842.400	Dinas Kesehatan
1	02	11	Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	0	2	3.332.150.780	3	3.461.611.336	3	3.561.611.336	4	3.661.611.336	4	14.016.984.788	Dinas Kesehatan
1	02	12	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	80	80,5	15.278.182.596	81	16.042.091.726	81,5	16.242.091.726	82	16.442.091.726	82	64.004.457.773	Dinas Kesehatan
1	02	13	Pelatihan Tenaga Kesehatan	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100	100	5.242.198.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	5.500.000.000	100	21.742.198.000	Dinas Kesehatan
1	02	14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara	Persentase Pelayanan Yang Memenuhi SPO Pada UPTD RSUD Bali Mandara	100	100	168.615.822.980	100	194.951.485.278	100	204.951.485.278	100	214.951.485.278	100	783.470.278.814	Dinas Kesehatan
1	02	15*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Cakupan ODGJ berat yang dilayani	35	45	48.063.403.560	50	25.339.713.332	55	21.048.968.531	60	21.698.974.266	60	116.151.059.689	Dinas Kesehatan
1	02	16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Persentase Pasien yang Dilayani UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,5	0,5	2.749.354.520	0,5	3.161.519.520	0,5	3.261.519.520	0,5	3.361.519.520	0,5	12.533.913.080	Dinas Kesehatan
1	02	17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara	80	85	37.345.800.546	90	39.231.090.573	95	41.231.090.573	95	43.231.090.573	95	161.039.072.265	Dinas Kesehatan
1	02	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali	79	80,5	25.500.000.000	81	26.010.000.000	81,5	26.530.000.000	82	27.600.000.000	82	105.640.000.000	Dinas Kesehatan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara	78	80,5	39.000.000.000	81	40.000.000.000	81	41.000.000.000	82	42.000.000.000	82	162.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	**03**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**													
1	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	80	6.500.000.000	80	6.800.000.000	85	7.000.000.000	85	7.500.000.000	85	27.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	71,51	74,26	32.599.280.330	76,8	27.662.003.545	78,54	27.507.003.899	80,87	22.516.904.289	80,87	110.285.192.063	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03*	Perlindungan Sumber Daya Air	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	68	69,4	30.248.856.100	70,3	40.643.799.210	70,6	19.808.649.131	72,3	19.119.384.044	72,3	109.820.688.485	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	Panjang pantai terabrasi (Km)	118,69	118,09	29.000.000.000	117,79	38.000.000.000	116,52	16.117.926.600	116,02	16.129.719.260	117,49	99.247.645.860	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05*	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	80,81	77,71	382.212.461.000	77,98	425.811.235.955	78,11	468.392.359.550	78,25	515.231.595.505	78,25	1.791.647.652.010	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06*	Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	58	64	39.575.347.076	68	31.145.360.934	72	29.677.670.026	75	49.453.837.029	75	149.852.215.065	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	70%	72%	1.678.983.430	74%	1.727.000.000	76%	1.899.700.000	80%	2.089.670.000	80%	7.395.353.430	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan	Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil Pelayanan pengujian laboratorium dan Peralatan	100	100	2.707.500.000	100	2.800.000.000	100	2.850.000.000	100%	2.900.000.000	100%	11.257.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100	100	31.277.500.000	100	51.500.000.000	100	42.500.000.000	100	45.500.000.000	100	170.777.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	100	100	18.190.000.000	100	23.836.000.000	100	19.285.000.000	100	20.320.000.000	100	81.631.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	84	88,75	115.791.262.892	90	69.225.388.943	91,25	50.430.427.954	92,5	33.983.470.649	92,5	269.430.550.438	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12*	Peningkatan kualitas penataan ruang	Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	90	92	3.583.880.000	93	3.785.305.000	94	3.942.690.000	95	4.121.550.000	95	15.433.425.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**04**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**													
1	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	80	3.071.222.837	80	2.913.344.892	85	3.041.881.000	85	3.346.069.000	85	12.372.517.729	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	04	02	Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	N/A	20	3.025.000.000	20	3.327.500.000	20	3.660.250.000	20	4.026.275.000	80	14.039.025.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03*	Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni	77,59	79	11.065.000.000	83	31.940.000.000	88,24	32.915.000.000	93,08	35.817.875.000	97,93	111.737.875.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	04*	Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	8,20	7,7	4.580.000.000	7,2	7.630.000.000	6,6	9.150.000.000	5,6	15.260.000.000	5,6	36.620.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**05**		**Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**													
1	05	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81,5	8.643.500.000	82	5.343.500.000	82,5	5.350.500.000	83	4.600.500.000	83	23.938.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pol PP	Persentase Kapasitas SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya	100	20	600.000.000	20	700.000.000	20	740.000.000	20	800.000.000	20	2.840.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	Penegakan Produk Hukun Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non yustisi	543	340	1.575.000.000	330	1.670.500.000	320	1.800.000.000	310	1.880.000.000	310	6.925.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04*	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kapasitas Sumber Daya Keamanan yang Terlatih	1,5	4	1.355.000.000	4	1.435.000.000	4	1.520.000.000	4	1.585.000.000	4	5.895.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	05*	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	247	225	22.100.000.000	215	24.315.000.000	205	26.651.500.000	200	29.200.300.000	200	102.266.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	06	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	N/A	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	07	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,93	82,93	4.490.902.414	82,93	4.932.992.656	82,93	5.426.291.922	82,93	5.968.921.114	100	20.819.108.106	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	08	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang di Bina dalam Menghadapi Bencana	90	20	1.678.597.585	20	1.846.457.344	20	2.031.103.078	20	2.234.213.386	100	7.790.371.393	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	09	Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100	100	1.320.000.000	100	1.452.000.000	100	1.597.200.000	100	1.756.920.000	100	6.126.120.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	10	Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100	100	495.000.000	100	544.500.000	100	598.950.000	100	658.845.000	100	2.297.295.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	11	Pengendalian Bencana	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	100	100	30.556.254.140	100	13.711.879.554	100	15.083.067.509	100	15.381.374.260	100	74.732.575.463	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**06**		**Sosial**													
1	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	A	4.177.987.000	A	4.523.287.000	A	4.882.117.000	A	5.255.730.000	A	18.839.121.000	Dinas Sosial

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06	02*	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	16,87	20,43	3.280.210.000	21,87	3.550.830.000	23,31	3.956.450.000	24,80	4.382.000.000	24,80	15.169.490.000	Dinas Sosial
1	06	03*	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	14,78	19,55	795.000.000	20,62	870.000.000	21,68	940.000.000	22,74	1.020.000.000	22,74	3.625.000.000	Dinas Sosial
1	06	04*	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	5	106.120.000.000	Dinas Sosial
1	06	05*	Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10,26	20,15	1.329.000.000	22,57	1.464.000.000	23,92	1.554.000.000	25,01	1.602.000.000	25,01	5.949.000.000	Dinas Sosial
1	06	06*	Pemenuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	1	17,21	461.675.000	17,54	456.200.000	17,87	513.225.000	18,21	570.250.000	18,21	2.001.350.000	Dinas Sosial
1	06	07*	Pelayanan Sosial	Persentase penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	95	95	5.923.699.800	95	6.733.679.800	95	7.707.368.400	95	8.713.235.980	95	29.077.983.980	Dinas Sosial
2			**URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR**													
2	**01**		**Tenaga Kerja**													
2	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81,5	4.416.507.000	82	4.545.363.000	82,5	4.548.594.000	83	4.742.500.000	83	18.252.964.000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	02*	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	33,35	43,44	4.814.810.000	49,26	4.944.624.000	55,65	5.061.012.000	62,69	5.194.902.000	62,69	20.015.348.000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	03*	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	Persentase Lulusan BLK yang bekerja	93	90	4.814.810.000	90	4.944.624.000	92	5.061.012.000	90	5.194.902.000	90	20.015.348.000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	04*	Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	93	90	10.025.764.200	90	13.253.920.480	92	14.182.614.008	90	15.063.285.279	90	52.525.583.967	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	05*	Peningkatan kualitas penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	1.621	2.035	13.550.000.000	2.250	13.590.000.000	2.385	13.660.000.000	2.512	13.685.000.000	12.624	54.485.000.000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	06*	Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	4	1	1.438.482.600	1	1.589.640.800	1	1.735.343.500	1	1.894.383.350	9	6.657.850.250	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	01	07*	Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	4,74	5,72	220.000.000	6,22	250.000.000	6,71	280.000.000	7,20	350.000.000	7,20	1.100.000.000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	08*	Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	330	70	170.000.000	80	200.000.000	90	220.000.000	90	250.000.000	720	840.000.000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**02**		**Pemberdayaan dan Perlindungan anak**													
2	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	A	2.510.000.000	A	2.510.000.000	A	2.510.000.000	A	2.510.000.000	A	10.040.000.000	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	02	02*	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98,45	98,65	1.160.000.000	98,70	1.160.000.000	98,75	1.160.000.000	98,80	1.160.000.000	98,80	4.640.000.000	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	02	03	Peningkatan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100	100	1.670.000.000	100	1.710.000.000	100	1.750.000.000	100	1.790.000.000	100	6.920.000.000	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	02	04	Peningkatan Perlindungan Anak	Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya	22	66	4.650.000.000	77	4.650.000.000	100	4.650.000.000	100	4.650.000.000	100	18.600.000.000	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	**03**		**Pangan**													
2	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	72	73	2.395.438.428	74	2.536.488.428	75	2.582.195.928	76	2.633.259.553	76	10.147.382.337	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	02*	Peningkatan ketersediaan pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,646	2,648	391.000.000	2,649	449.650.000	2,650	517.097.500	2,650	594.662.126	2,650	1.952.409.626	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	03*	Stabilisasi harga Pangan	Harga GKP lebih besar dari HPP	> Rp. 3700	> Rp.3700	500.000.000	> Rp. 3700	600.000.000	> Rp. 3700	650.000.000	> Rp. 3700	700.000.000	> Rp. 3700	2.450.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	04*	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	PPH Konsumsi	95,6	95,7	688.250.000	95,8	783.987.500	95,9	894.085.625	96	943.133.218	96	3.309.456.343	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	05*	Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	80	85	414.000.000	90	475.900.000	95	547.515.000	95	629.642.251	95	2.067.057.251	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	06*	Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar yang bersertifikat mutu	7	22	291.435.000	27	511.941.480	32	561.941.480	39	611.941.480	39	1.977.259.440	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	07*	Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyangga Stock Pangan Daerah	Jumlah Lumbung yang masih berfungsi baik	15	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	75	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**04**		**Pertanahan**													
2	04	01	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase data informasi pertanahan yang handal	0	15	400.000.000	30	500.000.000	70	500.000.000	85	500.000.000	85	1.900.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	**05**		**Lingkungan Hidup**													
2	5	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	77	2.961.455.080	78	3.247.600.588	79	3.562.360.647	80	3.908.596.711	80	13.680.013.026	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	02*	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	7,21	6.06	799.380.000	5,47	879.318.000	4,87	967.249.800	4,31	1.063.974.780	4,31	3.709.922.580	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	03*	Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan terhadap ijin lingkungan	100	55	1.294.700.000	65	1.424.170.000	75	1.566.587.000	90	1.723.245.700	90	6.008.702.700	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	90	91	594.172.920	92	653.590.212	93	718.949.233	94	790.844.157	94	2.757.556.522	UPTD Laboratorium Lingkungan
2	05	05*	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100	100	9.250.000.000	100	6.681.000.000	100	7.258.000.000	100	7.925.000.000	100	31.114.000.000	UPTD Pengelolaan Sampah
2	05	06**	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi	Jumlah danau alam dalam kondisi baik	4	4	2.251.396.100	4	2.536.593.210	4	2.490.722.531	4	1.189.664.784	4	8.468.376.625	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	07*	Peningkatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	18	22	950.000.000	24	1.050.000.000	26	1.200.000.000	27	1.225.000.000	27	4.425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	73		74		73		72		72		Dinas Lingkungan Hidup
2	**06**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**													
2	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,59	82,6	1.861.875.400	82.60	2.048.062.940	82,65	2.252.869.234	82,65	2.478.156.157	82,65	8.640.963.731	Dinas Kependudukan,Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
2	06	02	Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	88,89	88,89	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.050.000.000	100	1.185.000.000	100	4.535.000.000	Dinas Kependudukan,Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
2	06	03	Peningkatan Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	88,89	88,89	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	5.000.000.000	Dinas Kependudukan,Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
2	**07**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**													
2	07	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,88	83	4.618.570.152	84	5.080.427.167	85	5.588.469.884	86	6.147.316.872	86	21.434.784.075	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	02	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	31,13	49,05	2.700.000.000	58,01	2.970.000.000	66,98	3.267.000.000	75,94	3.593.700.000	75,94	12.530.700.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	07	03*	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	73,58	84,28	1.817.901.471	89,62	1.999.691.618	94,97	2.199.660.780	100	2.419.626.858	100	8.436.880.727	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	04	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna	Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan	38,05	55,97	1.667.314.030	64,94	1.834.045.433	73,9	2.017.449.976	82,86	2.219.194.974	82,86	7.738.004.413	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	05	Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	60	70	11.677.590.466	75	12.845.349.513	80	14.129.884.464	85	15.542.872.910	85	54.195.697.353	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**08**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana**													
2	08	01	Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	46,2	49,8	505.000.000	51,8	610.000.000	53,2	640.000.000	55,4	695.000.000	55,4	2.450.000.000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
2	**09**		**Perhubungan**													
2	09	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100	100	2.692.000.000	100	2.910.500.000	100	3.150.750.000	100	3.305.000.000	100	12.058.250.000	Dinas Perhubungan
2	09	02*	Pengembangan infrastruktur transportasi publik	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	9	10	1.750.000.000	10	3.250.000.000	11	4.000.000.000	12	4.750.000.000	12	13.750.000.000	Dinas Perhubungan
2	09	03*	Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	40	40	900.000.000	50	1.500.000.000	55	2.000.000.000	60	2.500.000.000	60	6.900.000.000	Dinas Perhubungan
2	09	04	Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	50%	100%	760.000.000	100%	836.000.000	100%	919.600.000	100%	1.011.560.000	100%	3.527.160.000	Dinas Perhubungan
2	09	05	Peningkatan Pengawasan LLAJ	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	C	85%	3.284.590.000	90%	1.819.959.000	95%	1.940.755.000	100%	2.073.631.000	100%	9.118.935.000	Dinas Perhubungan
2	09	06*	Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita	Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita	N/A	65	6.605.287.022	70	7.265.815.725	75	7.992.397.297	79	8.791.637.027	79	30.655.137.071	UPTD Trans Sarbagita
2	09	07*	Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi	Tingkat pelayanan simpang	C	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	1.956.700.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	2.144.570.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	2.454.985.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	2.874.700.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	9.430.955.000	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ
2	09	08	Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Tingkat pelayanan ruas jalan	C	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	4.578.000.000	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	4.978.000.000	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	5.421.000.000	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	5.907.000.000	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	20.884.000.000	UPTD Perlengkapan Jalan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	09	09	Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	0	12 Jam	500.000.000	12 Jam	1.000.000.000	12 Jam	1.000.000.000	12 Jam	1.000.000.000	12 Jam	3.500.000.000	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
2	**10**		**Komunikasi dan Informatika**													
2	10	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,42	81	4.720.366.073	81,50	5.192.402.180	82	5.711.646.498	82,50	6.282.810.348	82,50	21.907.225.099	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	10	02*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	68	74	1.155.000.000	77	1.270.500.000	79	1.397.550.000	81	1.537.305.000	81	5.360.355.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	10	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	100	40	1.007.833.000	60	1.108.617.000	80	1.219.478.000	100	1.341.427.000	100	4.677.355.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	10	04	Pengembangan Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100	40	7.720.865.000	60	9.482.951.000	80	11.289.245.800	100	14.365.171.080	100	42.858.232.880	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	10	05*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,22	1,72	7.720.865.000	2,18	9.482.951.000	2,52	11.289.245.800	3	14.365.171.080	3	42.858.232.880	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**													
2	11	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,15	82,5	2.882.855.756	83	3.341.399.421	83,5	3.879.849.070	84	4.513.005.625	84	14.617.109.872	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	02*	Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	62	104	481.079.202	126	642.256.527	126	5.403.433.851	128	5.464.611.176	128	11.991.380.756	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	03	Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	78 Unit	118 Unit	370.616.276	130 Unit	426.208.718	142 Unit	490.140.026	157 Unit	563.661.029	157 Unit	1.850.626.049	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	04*	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang bankable	70	180	1.630.000.000	185	1.780.000.000	190	1.920.000.000	195	2.070.000.000	919	7.400.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	05*	Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Jumlah Pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	550	50	1.015.531.897	50	1.108.638.277	50	1.220.365.933	50	1.354.439.119	800	4.698.975.226	Dinas Koperasi dan UKM

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	06*	Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani	Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.000.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	07*	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bankable	154	58	1.550.500.000	64	1.860.600.000	71	2.015.650.000	77	2.170.700.000	322	7.597.450.000	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	08*	Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Jumlah koperasi tenun yang aktif	2	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	7	3.200.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
2	**12**		**Penanaman Modal**													
2	12	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86	86,2	3.253.455.072	86,3	3.500.000.000	86,5	4.000.000.000	87	4.250.000.000	87	15.003.455.072	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	02*	Pengembangan investasi	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	29,39	15,21	200.000.000	15,56	250.000.000	15,91	300.000.000	16,27	350.000.000	77,85	1.100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	03	Pengembangan promosi penanaman modal	Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	13,43	15,27	1.000.000.000	18,3	1.200.000.000	22,66	1.300.000.000	30,34	1.400.000.000	30,34	4.900.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	04	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88	89	184.000.000	90	200.000.000	91	210.000.000	92	220.000.000	92	814.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	05*	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	86	86,5	200.000.000	87	225.000.000	87,5	250.000.000	88	275.000.000	88	950.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	06	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100	100	270.000.000	100	300.000.000	100	320.000.000	100	350.000.000	100	1.240.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	07	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100	100	600.000.000	100	610.000.000	100	620.000.000	100	630.000.000	100	2.460.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**13**		**Kepemudaan dan Olah Raga**													
2	13	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	69	71	4.748.450.000	72	4.103.750.000	73	4.220.000.000	74	4.320.000.000	74	17.392.200.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	02	Pemberdayaan Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	77	78	7.025.000.000	79	8.025.000.000	80	8.500.000.000	81	9.275.000.000	81	32.825.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	03*	Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	0,81	3,85	1.730.000.000	4,00	1.875.000.000	4,15	1.970.000.000	4,30	2.065.000.000	4,30	7.640.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	04	Pembudayaan Olahraga	Persentase Masyarakat yang berolahraga	29	31	4.350.000.000	32	5.860.000.000	33	6.825.000.000	34	7.650.000.000	34	24.685.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	13	05*	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali yang diperoleh Atlit pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	11	90	16.150.000.000	95	13.501.500.000	100	10.250.000.000	110	17.000.000.000	480	56.901.500.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**14**		**Statistik**													
2	14	01*	Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	50.800.000.000	100	5.800.000.000	100	6.000.000.000	100	7.000.000.000	100	69.600.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	**15**		**Persandian**													
2	15	01	Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100	40	687.514.000	60	756.265.000	80	831.893.000	100	915.081.000	100	3.190.753.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	**16**		**Kebudayaan**													
2	16	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	80	17.626.804.800	81	19.389.485.280	82	21.328.433.808	83	23.461.277.189	84	81.806.001.077	Dinas Kebudayaan
2	16	02*	Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5	5	3.650.000.000	5	2.900.000.000	5	3.300.000.000	5	4.900.000.000	25	14.750.000.000	Dinas Kebudayaan
2	16	03*	Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5	5	35.635.000.000	5	28.600.000.000	5	32.575.000.000	5	36.550.000.000	30	133.360.000.000	Dinas Kebudayaan
2	16	04*	Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	410	515	4.050.000.000	520	5.500.000.000	525	6.950.000.000	1.430	10.400.000.000	3.400	26.900.000.000	Dinas Kebudayaan
2	16	05*	Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	5	15.050.000.000	5	17.500.000.000	5	19.950.000.000	5	22.400.000.000	25	74.900.000.000	Dinas Kebudayaan
2	16	06*	Penguatan Desa Adat	Jumlah Desa Adat berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	523	821	6.950.000.000	1.120	9.650.000.000	1.493	12.350.000.000	1.493	15.050.000.000	1.493	44.000.000.000	Dinas Kebudayaan
2	16	07*	Penguatan Subak	Jumlah Subak berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	1.090	1.636	5.500.000.000	2.181	7.700.000.000	2.453	9.900.000.000	2.726	12.100.000.000	2.726	35.200.000.000	Dinas Kebudayaan
2	16	08*	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	Persentase Sumber Daya Keamanan Tradisional yang terlatih	0,9	1,3	500.000.000	1,3	700.000.000	1,3	900.000.000	1,3	1.100.000.000	6,2	3.200.000.000	Dinas Kebudayaan
2	16	09	Pengembangan UPTD Taman Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Taman Budaya	N/A	75	14.504.820.000	75	15.955.302.000	75	17.550.832.200	75	19.305.915.420	75	67.316.869.620	Dinas Kebudayaan / UPTD Taman Budaya
2	16	10	Pengembangan UPTD Museum Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	N/A	75	7.702.827.000	75	8.473.109.700	75	9.320.420.670	75	10.252.462.737	75	35.748.820.107	Dinas Kebudayaan / UPTD Museum Bali
2	16	11	Pengembangan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	N/A	75	9.784.575.900	75	10.763.033.490	75	11.839.336.839	75	13.023.270.523	75	45.410.216.752	Dinas Kebudayaan / UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	**17**		**Perpustakaan**													
2	17	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	82	4.378.250.000	83	26.413.500.000	84	9.348.750.000	85	9.684.000.000	85	49.824.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	02*	Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	10	11	1.285.000.000	20	1.385.000.000	28	1.595.000.000	33	1.800.000.000	33	6.065.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	03	Pengembangan Perpustakaan	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan	10	18,85	2.775.000.000	20	3.150.000.000	21,12	3.425.000.000	22,28	3.600.000.000	22,28	12.950.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	04	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	47	49	1.275.000.000	51	1.390.000.000	53	1.485.000.000	55	1.650.000.000	55	5.800.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**18**		**Kearsipan**													
2	18	01*	Peningkatan Pengolahan Arsip	Nilai Evaluasi Kearsipan	67	71	2.950.000.000	72	2.950.000.000	73	2.950.000.000	74	2.950.000.000	74	11.800.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	02	Peningkatan, Pengembangan Kearsipan	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	25	35	1.837.000.000	50	1.880.000.000	75	2.060.000.000	100	2.300.000.000	100	8.077.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3			**URUSAN PILIHAN**													
3	**01**		**Kelautan dan Perikanan**													
3	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	77	12.082.825.000	78	2.318.350.000	79	2.553.875.000	80	2.789.400.000	80	19.744.450.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	02*	Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	97.157,60	101.082,77	809.857.300	103.104,42	1.012.321.625	105.166,51	1.265.402.031	107.269,84	1.581.752.539	107.269,84	4.669.333.495	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	03*	Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	17.535,70	18.244,14	902.152.000	18.609,02	1.052.690.000	18.981,2	1.240.862.500	19.360,82	1.476.078.125	19.360,82	4.671.782.625	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	06	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten/Kota	Jumlah pasar ikan yang direvitalisasi	350	5	978.305.430	5	1.222.881.788	5	1.528.602.234	5	1.910.752.793	370	5.640.542.245	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	01	07	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Laut	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	3 kawasan	3 kawasan	453.100.000	3 kawasan	566.375.000	4 kawasan	707.968.750	5 kawasan	884.960.938	5 kawasan	2.612.404.688	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	08*	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	134	149	270.000.000	149	270.000.000	149	270.000.000	151	290.000.000	151	1.100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	09	Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pelaku Usaha taat hukum		50	200.000.000	25	300.000.000	25	400.000.000	25	500.000.000	200	1.400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	10	Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang diuji	1000 sampel	4850 sampel	978.305.430	4900 sampel	1.222.881.788	4950 sampel	1.528.602.234	5000 sampel	1.910.752.793	5000 sampel	5.640.542.245	UPT. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	01	11	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Jumlah pelabuhan perikanan yang dikelola	2 pelabuhan	2 pelabuhan	126.976.000	2 pelabuhan	126.976.000	2 pelabuhan	126.976.000	2 pelabuhan	126.976.000	2 pelabuhan	507.904.000	UPT. Pelabuhan Perikanan
3	01	12	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	2 kawasan	2 kawasan	500.000.000	3 kawasan	500.000.000	4 kawasan	500.000.000	5 kawasan	500.000.000	5 kawasan	2.000.000.000	UPT. Kawasan Konservasi Perairan Bali
3	01	13	Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	1 komoditas (pembenihan udang galah)	3 komoditas (udang galah, udang vaname dan rumput laut)	1.095.978.750	2 komoditas (udang vaname dan udang galah)	1.369.973.438	2 komoditas (udang vaname dan udang galah)	1.712.466.797	2 komoditas (udang vaname dan udang galah)	2.140.583.496	3 komoditas (udang galah, udang vaname dan rumput laut)	6.319.002.480	UPT. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
3	**02**		**Pariwisata**													
3	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	82	2.919.244.641	83	3.449.093.569	84	2.501.572.080	85	2.501.572.080	85	11.371.482.370	Dinas Pariwisata
3	02	02*	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	146	4	2.580.000.000	4	3.050.000.000	5	3.475.000.000	5	3.820.000.000	164	12.925.000.000	Dinas Pariwisata
3	02	03*	Pengembangan SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang Bersertifikat Kompetensi Pariwisata	4.851	300	1.390.000.000	400	1.565.000.000	500	1.737.000.000	600	1.915.000.000	6.851	6.607.000.000	Dinas Pariwisata
3	02	04*	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	6.070.473 dan 9.757.991	8.000.000 dan 8.395.000	3.795.000.000	8.950.000 dan 8.585.000	4.345.000.000	9.997.000 dan 8.775.000	4.800.000.000	11.156.000 dan 8.970.000	5.300.000.000	44.800.000 dan 51.200.000	18.240.000.000	Dinas Pariwisata
3	02	05*	Pengembangan Produk Pariwisata	Jumlah Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	27	84	2.042.943.248	90	2.375.000.000	95	2.680.000.000	100	2.926.500.000	369	10.024.443.248	Dinas Pariwisata
3	02	06**	Pengembangan Standar Industri Pariwisata	Jumlah Industri Pariwisata yang bersertifikat usaha	248	10	447.000.000	20	522.000.000	30	599.000.000	40	679.000.000	100	2.247.000.000	Dinas Pariwisata
3	02	07**	Pengembangan Informasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	2.800.000	4.098.750	600.000.000	4.383.750	625.000.000	4.693.000	650.000.000	5.031.500	675.000.000	24.000.000	2.550.000.000	Dinas Pariwisata
3	**03**		**Pertanian**													
3	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	82	3.494.312.010	83	3.838.743.211	84	4.217.617.532	85	4.634.379.285	85	16.185.052.038	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
3	03	03*	Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten	Jumlah unit taman gumi banten yang produktif	7	1	4.167.023.739	1	4.583.726.113	1	5.042.098.724	1	5.546.308.597	12	19.339.157.173	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan	N/A	98,799	4.167.023.739	99.074	4.583.726.113	99,349	5.042.098.724	99.624	5.546.308.597	99.624	19.339.157.173	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	06*	Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Persentase lahan pertanian produktif	75	77,45	4.792.052.610	77,95	5.271.257.871	78,45	5.798.383.658	78,95	6.378.222.024	78,95	22.239.916.163	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	07*	Peningkatan sarana produksi pertanian	Persentase sarana produksi pertanian dalam kondisi baik dan siap pakai	75	77	2.948.417.579	78	3.243.259.337	79	3.567.585.271	80	3.924.343.798	80	13.683.605.984	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	03	11*	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Jumlah Kelompok pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan	2	1	2.667.324.253	1	2.934.056.678	1	3.227.462.346	1	3.550.208.581	7	12.379.051.858	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	12*	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian yang dibangun dan berproduksi	1	1	5.955.907.300	1	6.551.498.030	1	7.206.647.833	1	7.927.312.616	6	27.641.365.779	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	13*	Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	4	1	3.595.000.000	1	3.954.500.000	1	4.349.950.000	1	4.784.945.000	9	16.684.395.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	14*	Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	Jumlah pertanian Hidroponic perkotaan yang produktif	1	1	2.645.639.502	1	2.910.203.452	1	3.201.223.797	1	3.521.346.177	5	12.278.412.929	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	15*	Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Jumlah Kelompok tani yang bersertifikasi	45	15	800.000.000	20	880.000.000	25	968.000.000	30	1.064.800.000	75	3.712.800.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	16	Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Pengawasan Peredaran Serifikasi dan Mutu Benih (ton) ; Sayuran (ton) dan Buah-buahan (btg)	N/A	155 ; 55 ; 71.000	2.097.673.793	165 ; 65 ; 72.000	2.048.634.046	160 ; 60 ; 73.000	2.000.352.969	165 ; 65 ; 74.000	1.868.996.087	165 ; 65 ; 74.000	8.015.656.896	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	17	Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Luas Serangan Maksimum Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)	0	4,5	2.713.210.869	4	2.725.724.830	3,5	2.745.152.832	3	2.688.275.936	3	10.872.364.467	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	22	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persentase produktivitas pertanian	2	2,4	6.434.324.286	2,6	6.818.949.589	2,8	7.247.700.065	3	7.641.077.894	3	28.142.051.834	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	23	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	76	77	2.612.390.000	78	2.979.228.000	79	3.478.727.000	80	3.914.411.000	80	12.984.756.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	24*	Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	Jumlah populasi ternak lokal Bali	438.131	446,893	1.500.000.000	455,831	1.600.000.000	464.948	1.700.000.000	474.247	1.800.000.000	474.247	6.600.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	25*	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok yang menerapkan Agribisnis Peternakan yang baik (Jumlah kelompok)	27	35	665.000.000	35	790.000.000	35	906.000.000	35	1.130.000.000	175	3.491.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	26*	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	250 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	150 kasus rabies dan 5 kasus flu burung	4.296.500.000	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	4.543.500.000	75 kasus rabies dan 3 kasus flu burung	4.874.000.000	50 kasus rabies dan 2 kasus flu burung	5.420.000.000	50 kasus rabies dan 2 kasus flu burung	19.134.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	27	Pengambangan Semen	Jumlah produksi semen (dosis)	100.000 Dosis	102.000 Dosis	3.156.860.259	103.000 Dosis	2.822.083.000	104.000 Dosis	2.965.868.000	105.000 Dosis	3.422.811.000	105.000 Dosis	12.367.622.259	UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	03	28	Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	82,50	83,30	1.674.500.000	84,13	1.900.026.000	84,97	2.176.629.000	85,81	2.543.854.000	85,81	8.295.009.000	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	**04**		**Kehutanan**													
3	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	77	5.486.312.000	78	6.034.943.000	79	6.638.438.000	80	7.302.282.000	80	25.461.975.000	Dinas Kehutanan
3	04	02*	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5,02	4,95	3.702.831.000	4,89	4.073.114.000	4,83	4.480.425.000	4,75	4.928.468.000	4,75	17.184.838.000	Dinas Kehutanan
3	04	03*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Persentase kerusakan kawasan hutan	5,56	4,3	4.816.970.000	3,67	5.298.667.000	3,04	5.828.534.000	2,41	6.411.387.000	2,41	22.355.558.000	Dinas Kehutanan
3	04	04	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5,02	4,95	1.375.000.000	4,98	1.512.500.000	4,83	1.663.750.000	4,75	1.830.125.000	4,75	6.381.375.000	UPTD KPH Bali Barat
3	04	05	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Persentase kerusakan kawasan hutan	5,56	4,30	3.410.000.000	3,67	3.751.000.000	3,04	4.126.100.000	2,41	4.530.870.000	2,41	15.817.970.000	UPTD KPH Bali Barat
3	04	06	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5,02	4,95	1.375.000.000	4,89	1.512.500.000	4,83	1.663.750.000	4,75	1.830.125.000	4,75	6.381.375.000	UPTD KPH Bali Utara
3	04	07	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Persentase kerusakan kawasan hutan	5,56	4,30	3.410.000.000	3,67	3.751.000.000	3,04	4.126.100.000	2,41	4.530.870.000	2,41	15.817.970.000	UPTD KPH Bali Utara
3	04	08	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5,02	4,95	1.375.000.000	4,89	1.512.500.000	4,83	1.663.750.000	4,75	1.830.125.000	4,75	6.381.375.000	UPTD KPH Bali Selatan
3	04	09	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Persentase kerusakan kawasan hutan	5,56	4,30	3.410.000.000	3,67	3.751.000.000	3,04	4.126.100.000	2,41	4.530.870.000	2,41	15.817.970.000	UPTD KPH Bali Selatan
3	04	10	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5,02	4,95	1.375.000.000	4,89	1.512.500.000	4,83	1.663.750.000	4,75	1.830.125.000	4,75	6.381.375.000	UPTD KPH Bali Timur

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	04	11	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Persentase kerusakan kawasan hutan	5,56	4,30	3.410.000.000	3,67	3.751.000.000	3,04	4.126.100.000	2,41	4.530.870.000	2,41	15.817.970.000	UPTD KPH Bali Timur
3	04	12	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5,02	4,95	550.000.000	4,89	605.000.000	4,83	665.500.000	4,75	732.050.000	4,75	2.552.550.000	UPTD Tahura Ngurah Rai
3	04	13	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Persentase kerusakan kawasan hutan	5,56	4,30	3.410.000.000	3,67	3.751.000.000	3,04	4.126.100.000	2,41	4.530.870.000	2,41	15.817.970.000	UPTD Tahura Ngurah Rai
3	**05**		**Energi dan Sumber daya Mineral**													
3	05	01*	Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	4,3	15	1.625.000.000	90	1.850.000.000	185	2.125.000.000	300	2.500.000.000	300	8.100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	55	65		70		75		80		80		Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
3	**06**		**Perdagangan**													
3	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	82,1	5.486.312.000	82,1	6.034.943.000	82,1	6.638.438.000	82,1	7.302.282.000	82,1	25.461.975.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	02	Perlindungan Konsumen	Indeks Pemberdayaan konsumen	-	2%	1.300.000.000	2%	1.560.000.000	2%	1.620.000.000	2%	1.780.000.000	10%	6.260.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	03*	Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	90	111	1.000.000.000	126	1.125.000.000	141	1.250.000.000	156	1.400.000.000	156	4.775.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	04*	Penguatan distribusi produk lokal	Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	20	25	550.000.000	30	655.000.000	35	810.000.000	40	920.000.000	40	2.935.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	05	Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Barang yang tersertifikasi	45	48	1.359.254.500	50	890.179.950	53	979.197.945	56	1.077.045.739	46	4.305.678.134	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	06	06*	Pengembangan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang dikembangkan	8	8	350.000.000	8	400.000.000	8	450.000.000	8	450.000.000	8	1.650.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	07*	Peningkatan Aksessibilitas Produk Sandang Lokal Bali	Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	20	40	1.000.000.000	60	1.000.000.000	80	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.000.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	06	08*	Peningkatan ekspor industri kreatif	Persentase Nilai ekspor industri kreatif	$ 818.902.508	2	3.975.000.000	3	4.478.000.000	4	4.939.480.000	4	5.472.020.000	4	18.864.500.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**07**		**Perindustrian**													
3	07	01	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	Jumlah Komoditi olahan pangan yang tumbuh dan berkembang	-	7 Produk Olahan	605.685.000	9 Produk Olahan	671.253.500	10 Produk Olahan	740.378.850	12 Produk Olahan	813.416.735	12 Produk Olahan	2.830.734.085	UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan
3	07	02*	Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,5	1,5	3.500.000.000	1,5	3.600.000.000	1,5	3.700.000.000	1,5	3.800.000.000	7,5	14.600.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	03*	Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh	5	7	500.000.000	9	400.000.000	11	600.000.000	13	700.000.000	13	2.200.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**08**		**Transmigrasi**													
3	08	01	Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	Jumlah dokumen laporan evaluasi ketransmigrasian	4 dokumen	4 dokumen	225.000.000	4 dokumen	250.000.000	4 dokumen	250.000.000	4 dokumen	250.000.000	4 dokumen	975.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
4			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**													
4	**01**		**Perencanaan**													
4	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	82	5.063.376.616	82	5.569.714.277	82	6.126.685.705	82	6.739.354.275	82	23.499.130.873	Bappeda Litbang
4	01	02*	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	4.800.000.000	Bappeda Litbang
4	01	03	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	31.084.336.892	100	31.084.336.892	100	31.084.336.892	100	31.084.336.892	100	124.337.347.568	Bappeda Litbang
4	01	04	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	15.542.168.446	100	15.542.168.446	100	15.542.168.446	100	15.542.168.446	100	62.168.673.784	Bappeda Litbang
4	01	05	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	15.542.168.446	100	15.542.168.446	100	15.542.168.446	100	15.542.168.446	100	62.168.673.784	Bappeda Litbang
4	**02**		**Penelitan dan Pengembangan**													
4	02	01*	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rencana Kelitbangan yang diimplementasikan	80	70	15.214.336.931	75	16.735.770.624	75	18.409.347.687	80	20.250.282.455	80	70.609.737.697	Bappeda Litbang

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	02	02*	Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian	Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru diluar SARBAGITA.	9	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	**03**		**Kepegawaian**													
4	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81,5	1.961.197.200	82	1.961.197.200	82,5	1.961.197.200	83	1.961.197.200	83	7.844.788.800	Badan Kepegawaian Daerah
4	03	02	Peningkatan pelayanan Pengadaan Pemberhentian Informasi dan Fasilitasi ASN	Persentase peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan ASN	20,33	39,16	10.348.021.346	60,02	10.348.021.346	80,46	10.348.021.346	100	10.348.021.346	100	41.392.085.384	Badan Kepegawaian Daerah
4	03	03	Pengembangan Manajemen Karir	Persentase Peningkatan Manajamen Karir	3,5	6,5	8.387.220.000	6,9	8.387.220.000	12,6	8.387.220.000	25,2	8.387.220.000	25,2	33.548.880.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	03	04	Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi kriteria Penilaian dan penghargaan	88,67	90	3.040.000.000	92	3.040.000.000	93,67	3.040.000.000	96	3.040.000.000	96	12.160.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	**04**		**Pendidikan dan Pelatihan**													
4	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	76	77	18.628.555.500	78	9.108.345.000	79	9.630.414.000	80	10.183.272.000	80	47.550.586.500	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	02	Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	5	8	2.595.800.000	10	2.118.800.000	12	2.588.800.000	15	2.228.800.000	15	9.532.200.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	03	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat manajerial dan fungsional	100	100	41.419.260.000	100	40.169.260.000	100	39.819.260.000	100	40.519.260.000	100	161.927.040.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	04	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural	Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test	100	100	4.665.000.000	100	6.255.000.000	100	4.355.000.000	100	3.115.000.000	100	18.390.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	05*	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif	Persentase ASN dan legislatif yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	42	44	2.518.800.000	46	2.118.800.000	47	2.528.800.000	48	2.228.800.000	48	9.395.200.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	**05**		**Sekretariat Daerah**													
4	05	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81,5	715.265.100	82	786.791.610	82,5	865.470.771	83	952.017.848	83	3.319.545.329	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	02	Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase implementasi kerjasama pemerintah daerah	100	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000	100	6.400.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	05	03	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000	100	6.400.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	04*	Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15	10	1.200.000.000	9	1.400.000.000	8	950.000.000	7	950.000.000	7	4.500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	05	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	87	1.115.913.800	88	1.227.505.180	89	1.350.255.698	90	1.485.281.268	90	5.178.955.946	Biro Organisasi
4	05	06*	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat daerah melaksanakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik dengan baik	75	79	397.115.400	81	436.826.940	83	480.509.634	85	528.560.597	85	1.843.012.571	Biro Organisasi
4	05	07*	Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat daerah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	75	79	1.695.000.000	81	1.864.500.000	83	2.050.950.000	85	2.256.045.000	85	7.866.495.000	Biro Organisasi
4	05	08*	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	75	79	1.405.000.000	81	1.545.500.000	83	1.700.050.000	85	1.870.055.000	85	6.520.605.000	Biro Organisasi
4	05	09	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81	21.508.932.000	82	23.659.827.000	83	26.025.811.000	84	28.628.392.000	84	99.822.962.000	Biro Umum
4	05	10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks kepuasan pelayanan pengelola keuangan setda	100	100	1.439.721.000	100	1.576.693.000	100	1.734.362.300	100	1.907.798.530	100	6.658.574.830	Biro Umum
4	05	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100	100	8.030.000.000	100	8.833.000.000	100	9.716.300.000	100	10.687.930.000	100	37.267.230.000	Biro Umum
4	05	12	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81,5	3.500.500.000	82	4.493.000.000	82,5	4.723.200.000	83	4.961.870.000	83	17.678.570.000	Biro Humas dan Protokol
4	05	13	Peningkatan pelayanan Keprotokolan	Indeks kepuasan pimpinan dan tamu VIP/VVIP terhadap pelayanan keprotokolan	75	79	3.830.000.000	80	4.118.000.000	81	4.542.300.000	82	5.006.530.000	82	17.496.830.000	Biro Humas dan Protokol
4	05	14	Peningkatan Layanan Informasi	Indeks kepuasan pinpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	75	79	4.400.000.000	80	4.475.000.000	81	4.650.000.000	82	4.825.000.000	82	18.350.000.000	Biro Humas dan Protokol

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	05	15*	Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Jumlah Informasi yang diberitakan media	3.151	4.850	12.550.000.000	4.950	12.785.000.000	5.050	12.950.000.000	5.150	13.450.000.000	5.150	51.735.000.000	Biro Humas dan Protokol
4	05	16	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	100	6.570.177.000	100	7.227.217.272	100	7.945.098.939	100	8.739.608.632	100	30.482.101.843	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	05	17*	Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100	100	7.506.978.297	100	7.927.676.127	100	8.720.443.740	100	9.592.488.114	100	33.747.586.278	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	05	18*	Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Indeks pelayanan pengadaan barang/jasa	100	100	947.573.000	100	1.042.330.300	100	1.146.563.330	100	1.261.219.663	100	4.397.686.293	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	05	19*	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Level Kematangan Kelembagaan UKPBJ	Level 3	Level 4	1.804.389.100	Level 4	2.314.828.010	Level 4	2.546.310.811	Level 5	2.800.941.892	Level 5	9.466.469.813	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	05	20	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81,5	881.446.100	82	969.590.710	82,5	1.066.549.781	83	1.173.204.759	83	4.090.791.350	Biro Hukum dan HAM
4	05	21*	Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah	100	100	3.743.656.595	100	4.118.022.254,5	100	4.529.824.479,95	100	4.982.806.927,95	100	17.374.310.257	Biro Hukum dan HAM
4	05	22	Pengembangan Produk Hukum	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum	20	20	996.000.000	20	1.095.600.000	20	1.205.160.000	20	1.325.676.000	100	4.622.436.000	Biro Hukum dan HAM
4	05	23	Bantuan Hukum dan HAM	Persentase pelayanan permasalahan hukum dan HAM	20	20	2.636.238.332	20	2.899.862.165,20	20	3.189.848.381,72	20	3.508.833.219,89	100	12.234.782.099	Biro Hukum dan HAM
4	05	24	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,54	82,74	785.950.000	82,84	790.000.000	82,94	795.000.000	83	800.000.000	83	3.170.950.000	Biro Perekonomian
4	05	25	Pemberdayaan Perekonomian	Jumlah LPD yang Sehat	865	889	200.000.000	901	225.000.000	913	250.000.000	923	275.000.000	923	950.000.000	Biro Perekonomian
4	05	26	Pengembangan Produksi Daerah	Jumlah Kebijakan Produksi Daerah	N/A	4	1.250.000.000	4	750.000.000	4	800.000.000	4	1.250.000.000	16	4.050.000.000	Biro Perekonomian

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	05	27	Pengembangan Industri Pariwisata dan Perhubungan	Jumlah kebijakan di bidang industri pariwisata dan perhubungan	N/A	2	400.000.000	2	450.000.000	2	475.000.000	2	500.000.000	8	1.825.000.000	Biro Perekonomian
4	05	28*	Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	N/A	100	500.000.000	100	525.000.000	100	550.000.000	100	575.000.000	100	2.150.000.000	Biro Perekonomian
4	05	29*	Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5	5	15.250.000.000	6	20.300.000.000	7	25.350.000.000	8	25.400.000.000	8	86.300.000.000	Biro Perekonomian
4	05	30	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	100	1.351.950.000	100	1.390.000.000	100	1.434.550.000	100	1.491.250.000	100	5.667.750.000	Biro Kesehjateraaan Rakyat
4	05	31*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Atma Kerthi	Indeks kepuasan pelayanan atma kertih	N/A	74	15.850.000.000	76	16.350.000.000	78	16.850.000.000	80	17.350.000.000	80	66.400.000.000	Biro Kesehjateraaan Rakyat
4	05	32	Peningkatan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar	Prosentase Capaian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar	N/A	95	790.000.000	95	845.000.000	95	900.000.000	95	950.000.000	95	3.485.000.000	Biro Kesehjateraaan Rakyat
4	05	33	Peningkatan Kesejahteraan Pelayanan Dasar	Prosentase Capaian Kesejahteraan Pelayanan Dasar	N/A	90	6.800.000.000	90	7.300.000.000	90	7.800.000.000	90	7.800.000.000	90	29.700.000.000	Biro Kesehjateraaan Rakyat
4	05	34	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81,5	629.039.858	82	691.943.844	82,5	761.138.228	83	837.252.051	83	2.919.373.981	Biro Administrasi Pembangunan
4	05	35	Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	50	65	325.385.315	76	357.923.847	87	393.716.231	100	433.087.855	100	1.510.113.248	Biro Administrasi Pembangunan
4	05	36*	Peningkatan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50	65	318.439.458	76	350.283.404	87	385.311.744	100	423.842.919	100	1.477.877.525	Biro Administrasi Pembangunan
4	05	37	Pelayanan Aparatur	Persentase laporan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50	65	480.495.858	76	528.545.443	87	581.399.988	100	639.539.986	100	2.229.981.275	Biro Administrasi Pembangunan
4	**06**		**Inspektorat**													
4	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	85	5.110.000.000	90	5.930.000.000	90	6.000.000.000	90	6.200.000.000	90	23.240.000.000	Inspektorat
4	06	02	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Dengan Baik	75	79	1.075.000.000	81	1.250.000.000	83	900.000.000	85	950.000.000	85	4.175.000.000	Inspektorat

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	06	03*	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level APIP	3	3	1.000.000.000	3	1.100.000.000	3	1.500.000.000	3	1.800.000.000	3	5.400.000.000	Inspektorat
4	06	04*	Peningkatan Maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3	3	4.970.000.000	3	5.545.000.000	4	3.000.000.000	4	3.200.000.000	4	16.715.000.000	Inspektorat
4	**07**		**Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri**													
4	07	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81	2.058.000.000	82	2.058.000.000	83	2.058.000.000	84	2.058.000.000	84	8.232.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	02*	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	77.5	77.5	900.000.000	78.0	1.100.000.000	78.0	1.250.000.000	78.0	1.450.000.000	78.0	4.700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	03*	Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	100	16,6	800.000.000	16,6	1.000.000.000	16,6	1.200.000.000	16,6	1.400.000.000	100	4.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	04*	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	33,3	66,6	1.600.000.000	77,0	1.800.000.000	88,0	2.000.000.000	100,0	2.000.000.000	100	7.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	**08**		**Sekretariat Dewan**													
4	08	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	83	20.857.605.976	84	22.491.311.437	85	40.470.248.700	86	44.517.273.570	86	128.336.439.683	Sekretariat DPRD
4	08	02*	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali	82	5	142.590.256.242	5	122.855.688.561	5	126.000.655.028	5	132.300.687.780	100	523.747.287.611	Sekretariat DPRD
4	08	03	Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	87	3	11.626.364.000	3	11.363.000.000	3	12.499.300.000	3	13.749.230.000	100	49.237.894.000	Sekretariat DPRD
4	**09**		**Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset**													
4	09	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	85,8	3.000.000.000	87,2	3.000.000.000	88,6	3.000.000.000	90	3.000.000.000	90	12.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	09	02*	Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	Persentase perencanaan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	100	100	6.600.000.000	100	7.260.000.000	100	7.986.000.000	100	8.784.600.000	100	30.630.600.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	09	03*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100	100	6.600.000.000	100	7.260.000.000	100	7.986.000.000	100	8.784.600.000	100	30.630.600.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	09	04*	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	100	100	1.870.000.000,00	100	2.057.000.000,00	100	2.262.700.000,00	100	2.488.970.000,00	100	8.678.670.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	09	05	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	_	87	16.715.364.073,00	88	18.854.400.479,00	88	20.225.591.529,00	88	22.762.399.580,00	88	78.557.755.661	Badan Pendapatan Daerah
4	09	06	Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan pendapatan daerah tepat waktu	_	91	1.258.500.000	92	1.283.670.000	93	1.309.343.400	94	1.335.530.268	94	5.187.043.668	Badan Pendapatan Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	09	07*	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	57,55	57,94	2.077.144.850	58,24	2.274.211.291	58,58	2.490.771.415	58,93	2.728.770.330	58,93	9.570.897.886	Badan Pendapatan Daerah
4	09	08	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Samsat dan Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	_	91	1.305.865.000	92	1.436.451.500	93	1.580.096.650	94	1.738.106.315	94	6.060.519.465	Badan Pendapatan Daerah
4	09	09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (1)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77	4.003.818.575	77,50	4.404.200.432	78	4.844.611.477	78,50	5.329.082.522	78,50	18.581.713.006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (1)	_	1		1		1		1		1		
4	09	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77,00	1.602.993.207,00	77,50	1.763.292.529,00	78,00	1.939.621.781,00	78,50	2.133.583.958,00	78,50	7.439.491.475,00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (2)	_	90		90		90		90		90		
4	09	11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (3)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77,00	2.170.793.394,00	77,50	2.387.872.734,00	78,00	2.626.660.007,00	78,50	2.889.326.008,00	78,50	10.074.652.143,00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (3)	_	90		90		90		90		90		
4	09	12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (4)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77,00	3.892.627.886,00	77,50	4.281.890.675,00	78,00	4.710.079.743,00	78,50	5.181.087.716,00	78,50	18.065.686.020,00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (4)	_	90		90		90		90		90		
4	09	13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (5)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77,00	4.359.801.813,00	77,50	4.795.781.993,00	78,00	5.275.360.192,00	78,50	5.802.896.212,00	78,50	20.233.840.210,00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Denpasar
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (5)	_	90		90		90		90		90		
4	09	14	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (6)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77,00	3.039.517.303,00	77,50	3.343.469.032,00	78,00	3.677.815.937,00	78,50	4.045.597.529,00	78,50	14.106.399.801,00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (6)	_	90		90		90		90		90		

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	09	15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (7)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77,00	1.964.290.060,00	77,50	2.149.719.067,00	78,00	2.364.690.974,00	78,50	2.601.160.073,00	78,50	9.079.860.174,00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (7)	_	90		90		90		90		90		
4	09	16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (8)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77,00	2.296.569.333,00	77,50	2.526.226.267,00	78,00	2.778.848.893,00	78,50	3.056.733.781,00	78,50	10.658.378.274,00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (8)	_	90		90		90		90		90		
4	09	17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (9)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76,25	77,00	1.655.786.921,00	77,50	1.821.365.611,00	78,00	2.003.502.173,00	78,50	2.203.852.389,00	78,50	7.684.507.094,00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (9)	_	90		90		90		90		90		
4	**10**		**Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah**													
4	10	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	74	80	66.820.000.000	83	3.640.000.000	86	3.502.000.000	89	3.651.000.000	89	77.613.000.000	Badan Penghubung
4	10	02	Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	60	75	1.630.000.000	80	1.725.000.000	85	1.890.000.000	90	1.975.000.000	90	7.220.000.000	Badan Penghubung
Jumlah per tahun							2.954.226.202.523		2.993.778.783.512		3.062.685.423.552		3.247.798.221.291			

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang akan dituangkan dalam Tabel 8.1.

Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terdapat 29 (dua pulus sembilan) Indikator Kinerja Daerah mencakup indikator makro ekonomi diantaranya Tingkat Inflasi Bali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Penggangguran Terbuka yang dalam kurun waktu 2019-2023, yang secara umum penetapan target-target capaiannya cenderung optimis, pilihan ini didasarkan pada analisis kinerja capaian 5 (lima) tahun sebelumnya serta memperhatikan *push* dan *pull* faktor kunci yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pencapaian target-target makro tersebut. Indikator-indikator lainnya yang ditetapkan juga berkaitan langsung untuk mendukung pencapaian indikator makro tersebut serta mengacu pada potensi dan daya saing daerah, antara lain urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menempatkan indikator kinerja utama daerah meliputi rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (APS), Penduduk Usia 16-18 tahun, Umur Harapan Hidup, Angka Stunting. Selain itu ada beberapa prioritas pembangunan yang ditetapkan menjadi IKU Daerah diantaranya terkait peningkatkan daya saing pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani, menempatkan 4 (empat) indikator meliputi ketersediaan pangan utama, nilai tambah produk pertanian (NTTP), nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Bidang prioritas peningkatan daya saing tenaga kerja menempatkan dua indikator meliputi : indeks daya saing SDM Bali dan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Bidang prioritas pariwisata menempatkan tiga indikator meliputi : kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, jumlah devisa sektor pariwisata dan indeks kepuasan wisatawan. Bidang prioritas daya saing industri kreatif, kelestarian lingkungan didukung dengan pengembangan infrastruktur untuk membangun koneksitas dan pengembangan energi terbarukan serta ketentraman, ketertiban dan demokratisasi didukung tata kelola birokrasi secara rinci akan disajikan pada tabel 8.1

Sedangkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode yang akan dituangkan dalam Tabel 8.2.

IKK dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum penetapan target-target IKK cenderung moderat dan mendukung secara langsung capaian IKU Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Tingkat Inflasi Bali	Persentase (%)	3,4% (yoy)	3,5% ±1%(yoy)	3,00% ±1%(yoy)	3,00% ±1%(yoy)	3,00% ±1%(yoy)	3,00% ±1%(yoy)	3,00% ±1%(yoy)
2	Ketersediaan pangan utama	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	15	16	17	20	22	25	25
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	27	29	31	33	35	35
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103,87	104,1	104,5	105	105,5	106	106
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	116,6	117,3	117,9	118,5	119,2	119,2
7	Umur Harapan Hidup (UHH)	Dalam tahun	71,4	71,8	72	72,3	72,5	72,5	72,5
8	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,72	10	10,28	10,56	10,84	11,40	11,40
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16 -18 tahun	Persentase (%)	82,35	82,54	82,73	82,92	83,11	83,3	83,3
10	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,21	13,49	13,63	13,77	13,91	14,05	14,05
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	74,45	75,07 (74,97-75,17)	75,31 (75,21-75,41)	75,61 (75,41-75,61)	78,25 (75,61-78,25)	80 (75,56-80)	80 (75,56-80)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	65	65	67	70	73	75	75
13	Persentase Kemiskinan	Persentase (%)	3,91	3,85	3,59	2,95	1,90	1,00-1,50	1,00-1,50
14	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1,4	1,28	1,17	1,07	0,98	0,9	0,9
15	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	75,51	75,77	76,03	76,3	76,55	76,8	76,8
16	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	72,48	73,98	73,98	73,98	74,98	74,98
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	(Persentase%)	45	45	45	45	45	45	45
18	Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	6.000.000	0	8.542.500	9.620.000	10.732.500	12.015.000	54.385.000
19	Indeks kepuasan wisatawan	persentase (%)	75	77	79	81	83	85	85
20	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	6,35 (6,20-6,40)	6,4 (6,20-6,60)	6,60 (6,40-6,80)	6,80 (6,60-7,00)	7,00 (6,80-7,20)	7,20 (7,00-7,50)	7,20 (7,00-7,50)
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	Persentase (%)	10	11	11,5	12	12,5	13	13
22	Indeks konektivitas	Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)	2.74	2.7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3
23	Angka kriminalitas	Kasus	4.607	4.138	3.669	3.200	2.731	2.262	2.262

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
24	Indeks demokrasi	Persentase (%)	78,8	79	80	81	81	81	81
25	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	63,76	64,23	64,55	64,75	64,9	65	65
26	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	16,93	17,11	17,29	17,46	17,64	17,82	17,82
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase (%)	61,51	62,08	62,64	63,21	63,77	64,34	64,34
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	8,7	9,7	12,3	13,3	14,8	15	15
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	0,40	0,43	1,10	7,14	13,79	20	20
30	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,16	68	70	72	74	76	76

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	Persentase (%)	6.35	6,4 (6,20-6,60)	6,6 (6,40-6,80)	6,8 (6,60-7,00)	7,0 (6,80-7,20)	7,2 (7,00-7,50)	7,2 (7,00-7,50)
2	Laju Inflasi	Pesentase (%)	3.4	3,50±1%	3,00±1%	3,00±1%	3,00±1%	3,00±1%	3,00±1%
3	PDRB per kapita	Jumlah	54,62 juta	53 juta – 58 juta	56 juta – 61 juta	59 juta – 64 juta	62 juta – 67 juta	66 juta – 71 juta	66 juta – 71 juta
4	Indeks Gini	Persentase (%)	0.364	0.3582	0.3264	0.3081	0.28	0.2500	0.2500
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persentase (%)	3.91	3.85	3.59	2.95	1.9	1,00-1,50	1,00-1,50
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	74,45	75,07 (74,97-75,17)	75,31 (75,21-75,41)	75,61 (75,41-75,61)	78,25 (75,61-78,25)	80 (75,56-80)	80 (75,56-80)
7	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	89.17	92.56	92.77	92.82	92.9	92.9	90.42
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9.72	10	10.28	10.56	10.84	11.40	11.40
9	Angka usia harapan hidup	tahun	71.4	71.8	72	72.3	72.5	72.5	72.5
10	Persentase balita gizi buruk	Persentase (%)	2	2	2	1	1	1	1
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase (%)	13.1	13.1	12.5	10.1	8.5	5.6	5.6
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2,478,567	2,533,567	2,588,567	2,653,567	2,723,567	2,793,567	2,793,567
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	75,51	75,77	76,03	76,30	76,55	76,80	76.8
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1,4	1.28	1.17	1.07	0.98	0.9	0.9
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	77	79	80	81	82	82
17	Opini BPK	Status	Belum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	95.90	95.90	96.14	96.38	96.62	96.86	96.86
19	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14.38	15.37	15.15	14.57	14.57	14.57	14.57
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	2.52	2.25	2.20	2.10	1.93	1.93	1.93
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.48	1.38	1.46	1.47	1.43	1.43	1.43
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persentase (%)	16.84	16.44	15.11	14.73	14.38	14.38	19,24-20,88
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persentase (%)	17.45	17.14	16.83	16.52	16.21	15.90	15.59
2	Nilai Tukar Petani	Persentase (%)	103.87	104.10	104.50	105.00	105.50	106.00	106.00
3	Angka kriminalitas	Kasus	4607	4138	3669	3200	2731	2262	2262
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	72.48	73.98	73.98	73.98	74.98	74.98
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	45	45	45	45	45	45	45

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	15	16	17	20	22	25	25
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	**Pendidikan**								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase (%)	79.1	80.1	81.1	82.1	83.1	84.1	84.1
1.2	Angka Partisipasi Kasar								
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	105.9	106.688	107.48	108.264	109.052	109.84	109.84
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106.95	108.31	109.67	111.03	112.39	113.75	113.75
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	100.4	101.20	102.01	102.812	103.616	104.42	104.42
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan								
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	24.55	24.84	25.14	25.43	25.73	26.02	26.02
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persentase (%)	11.73	12.02	12.32	21.61	12.91	13.2	13.2
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	23.41	23.7	24	24.29	24.59	24.88	24.88
1.4	Angka Partisipasi Murni								
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96.06	100	100	100	100	100	100
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	84.54	100	100	100	100	100	100
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	73.15	100	100	100	100	100	100
1.5	Angka Partisipasi Sekolah								
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35
1.6	Angka Putus Sekolah								
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0	0
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20
1.7	Angka Kelulusan								
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	99.99	100	100	100	100	100	100
1.8	Angka Transisi (AT)								
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	96.24	97.3	98.36	99.42	100.47	101.53	101.53
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	95.85	96.91	97.97	99.03	100.47	101.53	101.53
1.9	Fasilitas Pendidikan								
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	93.28	94.03	94.77	95.52	96.26	97.01	97.01
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	92.07	92.82	93.56	94.31	95.05	95.80	95.8
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persentase (%)	96.00	96.47	96.93	97.40	97.87	98.33	98.33
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	63.77	63.82	63.87	63.92	63.97	64.03	64.03
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	18.12	23,61	22,73	24,09	23,95	23,95	23,95
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	60.61	62,36	64,99	65,57	66,09	66,09	66,09
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persentase (%)	61.27	63,82	67,17	66.83	65,37	65,37	65,37
	- SMA/MA (per 1000 murid)		78.88						
	- SMK (per 1000 murid)		70.05						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata								
1.14.1	SD/MI	Persentase (%)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1.14.2	SMP/MTS	Persentase (%)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
1.14.3	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	100.00	106.94	106.94	107.83	108.72	109.61	109.61
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	99.87	99.87	99.88	99.89	99.90	99.91	99.91
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	92.98	92.98	93.06	93.14	93.22	93.30	93.30
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV								
1.18.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	87.96	75.19	75.88	76.57	77.26	77.95	77.95
1.18.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	93.16	94.08	95.00	95.92	96.84	97.76	97.76
1.18.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	95.91	96.42	96.93	97.44	97.95	98.46	98.46
1.18.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	96.39	96.68	96.97	97.26	97.55	97.84	97.84
2	**Kesehatan**								
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4,55	10	10	10	10	10	10
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5.17	6.67	6.35	6.99	6.50	5.50	5.50
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	3.2	4,50	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	54.03	69	68	67	66	65	65
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persentase (%)	1.45	1.46	1.47	1.47	1.45	1.45	1.45
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk								
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persentase (%)	1.17	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029
2.6.2	Rasio klinik	Persentase (%)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persentase (%)	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persentase (%)	0.35	0.36	0.382	0.40	0.40	0.40	0.4
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk								
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persentase (%)	1.85	1.94	2.04	2.1	2.3	2.4	2.4
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persentase (%)	1.07	1.12	1.18	1.20	1.30	1.40	1.40
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	86.53	87.00	87.50	88.00	88.5	88.5	88.5
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	95.97	96	96.5	96.6	96.7	96.8	96.8
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persentase (%)	99.16	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	30	33	34	35	36	37	37
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	89	90	90	90	90	90	90
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	21.1	110	108	106	104	102	102
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	70.20	100	100	100	100	100	100
2.19	Angka kematian Malaria	Persentase (%)	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0.02	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	66.4	70	75	80	85	90	90
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	57.54	55	55	55	55	55	55
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persentase (%)	21	21	21.5	22	22.2	22.2	22.2
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.25	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	102.92	100	100	100	100	100	100
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persentase (%)	80	100	100	100	100	100	100
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persentase (%)	94.49	94.6	95	95.5	96	96.5	96.5
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	Persentase (%)	96.81	97	97.5	98	98.5	99	99
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.33	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persentase (%)	71.51	72.01	74.26	76.80	78.54	80.27	80.27
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persentase (%)	68.00	68.50	69.40	70.30	70.60	72.30	72.30
3.3	Panjang Pantai Terabrasi	Kilometer	118.69	118.39	118.09	117.79	117.64	117.49	117.49
3.4	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	80.81	77.44	77.71	77.98	78.11	78.25	78.25
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	58	60	64	68	72	75	75
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat	Persentase (%)	70	70	72	74	76	80	80
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil Pelayanan pengujian laboratorium dan Peralatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.9	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.10	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	84	87	88.75	90	91.25	92.5	92.5

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.10.1	Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	Persentase (%)	86	87	89	91	93	95	95
3.10.2	Persentase penduduk yang berakses layanan air limbah di Provinsi Bali	Persentase (%)	82	87	88.5	89	89.5	90	90
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase (%)	90	91	92	93	94	95	95
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
	Jumlah rumah terbangun kewenangan Provinsi	Unit	-	0	20	20	20	20	80
4.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase (%)	12	24	36	48	60	72	72
4.6	Persentase kawasan kumuh	Persentase (%)	8.2	8.0	7.7	7.2	6.6	5.6	5.6
5	**Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase (%)	29.83	29.97	30.11	30.32	30.39	30.59	30.59
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	35.54	35.55	35.56	35.57	35.58	35.59	35.59
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	44.62	44.63	44.64	44.65	44.66	44.67	44.67
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	0.58	0,25	0,27	0.29	0.31	0.33	1,82
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	0.67	0,96	0,99	1.02	1.05	1.08	5,55
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	0.41	0.63	0.65	0.67	0.7	0.72	3.68
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase (%)	0.96	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persentase (%)	3,8	60	60	60	60	60	60
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	25	20	20	20	20	20	20
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	60,03	60	60	60	60	60	60
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	**Tenaga Kerja**								

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persentase (%)	43	30 kasus 100%	56 kasus 100%	50 kasus 100%	46	46	1.55
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah	18	155	26	21	22	22	22
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah	4757	4113	9977	2042	1621	1621	1621
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persentase (%)	400	146	183	226	350	350	350
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Jumlah	594,557	92,630	96,050	110,075	116,922	116,922	116,922
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Jumlah	2,794	575	690	780	920	920	920
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Jumlah	174	183	226	226	216	216	216
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	126	368	32	540	100	100	100
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	240	75	90	30	30	30	30
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	20	75	261	350	42	42	42
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persentase (%)	7.13	0	7.73	7.92	7.31	7.31	7.31
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	46.03	46.23	46.43	46.63	46.83	46.95	46.95
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	9.09	9.90	11.90	13.90	15.90	17.90	17.90
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	46.70	47.10	47.60	48.10	48.60	49.10	49.10
2.4	Rasio KDRT	Persentase (%)	0.056	0.049	0.048	0.047	0.046	0.045	0.045
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	72.55	72.65	72.75	72.85	72.95	73	73
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persentase (%)	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persentase (%)	0.97	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persentase (%)	0.94	0.95	0.96	0.97	0.97	1.00	1.00
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persentase (%)	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	1.00	1.00
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persentase (%)	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.98
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-
3	**Pangan**								
3.1	Ketersediaan Pangan Utama								
3.1.1	Padi	Ton	847,523	849,523	851,523	853,523	855,523	857,523	857,523
3.1.2	Jagung	Ton	43,892	44,000	44,500	45,000	45,500	46,000	46,000
3.1.3	Kedelai	Ton	2,500	2,550	2,601	2,653	2,706	2,760	2,760
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4,408	4,596	4,686	4,778	4,871	4,967	4,967
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	53,267	54,000	54,500	55,000	55,500	56,000	56,000
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	170	173	175	177	179	181	181
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	25,042	25,543	26,054	26,575	27,106	27,648	27,648
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2,646	2,647	2,648	2,649	2,650	2,650	2,650
		Gram/Kap/Hari	63	63	63	63	63	63	63
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	80.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00
4	**Pertanahan**								
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persentase (%)	0	0.05	0.15	0.3	0.7	0.85	0.85
5	**Lingkungan Hidup**								
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	63,17	64.67	66.17	67.67	69.17	70.67	70.67
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.89	92.39	92.89	93.39	93.89	94.39	94.39
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	38,57	39.57	40.57	41.57	42.57	43.57	43.57
5.9	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	6	2	2	2	2	2	2
5.10	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	1	1	1	1	6
5.11	Jumlah limbah B3 yag dikelola								
5.12	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.13	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	17 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen
5.14	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	1	1	1	1
5.15	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.16	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.17	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.18	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.19	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	0	30	30	30	30	150
5.20	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	30	40	40	40	30	30	30
5.22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	15 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	9,305,453	945,225,853	961,841,563	975,583,128	991,573,370	1,008,414,118	1,008,414,118
5.25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persentase (%)	73	80	75	74	73	72	72
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persentase (%)	0.93	0.95	0.97	0.99	0.99	1	1
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persentase (%)	84	86.67	89.17	91.67	94.17	96.67	96.67
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase (%)	40	45.38	50.38	55.38	60.38	65.38	65.38
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	94.62	96.5	98.5	99	99.5	100	100
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	33.64	41.5	45.5	49.5	54	58	58
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persentase (%)	43.78	49.06	58.02	66.98	75.94	84.9	84.9
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persentase (%)	12.29	12.29	12.29	12.29	12.29	12.29	12.29
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persentase (%)	14.24	14.1	16.33	18.56	20.79	23.02	23.02
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persentase (%)	60.61	100	100	100	100	100	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persentase (%)	69.8	71.8	73.8	75.8	77.8	79.8	79.8
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	200	225	250	275	300	325	325
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	50	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	2.15	2.15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2.1	2.2	2,2	2.3	2.3	2.3	2.3

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase (%)	29	33	35	40	40	40	40
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase (%)	13.73	15	17	20	25	30	30
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	1	2	2	2	2	2
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	3	3	3	3	6	6	6
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	2	5	6	8	10	12	12
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase (%)	2.02	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	57,9	57,9	57.5	57.3	57	56.5	56.5
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persentase (%)	36	30	29	28.4	28.02	27.66	27.66
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase (%)	35.12	36.15	36.42	37.10	38.20	39.75	39.75
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	18.56	13.53	12.18	10.96	9.86	8.88	8.88
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	43.46	43	42.25	42	41.5	41	41
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	29.6	24.6	24	23.5	23	22.5	22.5
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	87.80	87.70	91,16	91,42	88,9	88,9	88,9
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	85.2	86	87	88	89	90	90
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	70.48	70.48	71.5	72	73	73	73
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	77.2	77.2	80	85	90	100	100
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase (%)	266	466	500	510	520	530	530
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	88.6	90	91	92	93	94	94
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	1	1	1	1	1
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	7	8	10	12	14	16	16
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	22,7	22,7	22,7	22,7	21,64	21,64	21,64
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	9.4	10.2	15.03	15.5	15.5	15.5	15.5
9	**Perhubungan**								
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum								
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	351,739	386,912	422,085	457,258	492,431	527,604	527,604
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	23,779,178	23,800,000	23,900,000	24,000,000	24,500,000	25,000,000	25,000,000
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	141	145	150	155	160	165	165
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	146,324	147,787	150,728	153,742	156,817	158,386	158,386
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis								
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	8	8	8	8	9	9	9
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	2	2	2	2	2	2
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20	20	20	20	20
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	3	3	3	3	3	3	3
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	25.41	26.56	35.00	45.00	55.00	60.00	60.00
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:470	1:400	1:400	1:350	1:350	1:300	1:300
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum								
9.9.1	Angkutan Darat								
	- Orang	Jumlah	351,739	386,912	422,085	457,258	492,431	527,604	527,604
	- Barang	Jumlah	121,818	127,908	134,303	141,018	148,068	155,471	155,471
9.9.2	Angkutan Laut								
	- Orang	Jumlah	13,958,286	14,656,200	15,354,115	16,052,029	16,749,943	17,447,858	17,447,858
	- Barang	Jumlah	543,159,485	570,317,459	597,475,434	624,633,408	651,791,382	678,949,356	678,949,356
9.9.3	Angkutan Udara								
	- Orang	Jumlah	23,779,178	23,800,000	23,900,000	24,000,000	24,500,000	25,000,000	25,000,000
	- Barang	Jumlah	313,520,106	350,096,479	351,597,443	353,113,417	354,644,551	356,190,996	356,190,996
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun								
9.10.1	Dermaga								
	- Orang	Jumlah	13,958,286	14,656,200	15,354,115	16,052,029	16,749,943	17,447,858	17,447,858
	- Barang	Jumlah	543,159,485	570,317,459	597,475,434	624,633,408	651,791,382	678,949,356	678,949,356
9.10.2	Bandara								
	- Orang	Jumlah	23,779,178	23,800,000	23,900,000	24,000,000	24,500,000	25,000,000	25,000,000
	- Barang	Jumlah	313,520,106	350,096,479	351,597,443	353,113,417	354,644,551	356,190,996	356,190,996
9.10.3	Terminal								
	- Orang / Barang	Jumlah	351739 / 121818	386912/ 127908	422085/ 134303	457258/ 141018	492431/ 148068	527604/ 155471	527604/ 155471
10	**Komunikasi dan Informatika**								
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan								
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	50.00	60.00	65.00	75.00	80.00	90.00	90.00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon								
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persentase (%)	93.62	93.75	93.90	94.07	94.20	95.00	95.00
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persentase (%)	5.34	4.48	4.34	3.84	3.44	3.01	3.01
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persentase (%)	46.42	51.23	57.72	62.50	68.41	74.85	74.85
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	33.25	35.50	45.23	47.12	50.00	52.15	52.15
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**								
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	87.42	87.92	88.42	88.92	89.42	89.92	89.92
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persentase (%)	300,650	265,558	265,558	265,558	300,650	300,650	290,000
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	Persentase (%)	70	70	75	80	80	80	80
11.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	312,967	313,467	313,967	314,467	314,967	315,467	315,467
11.5	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal	Persentase (%)	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6
12	**Penanaman Modal**								
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	166	168	170	172	174	176	176
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	4.46	4.63	4.80	4.98	5.16	5.33	5.33
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase (%)	34.16	29.68	29.39	29.10	28.81	28.53	28.53
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persentase (%)	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	86	86	86	86	86
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	76	77	78	79	80	81	81
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.87
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	51.2	52	54	56	58	60	60
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	38.88	40	42	44	46	48	48
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	3.31	5	7.5	10	12.5	15	15
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 Orang	177 Orang	186 Orang	192 Orang	199 Orang	205 Orang	959 Orang
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	22 cabor	24 cabor	26 cabor	28 cabor	30 cabor	30 cabor
14	**Statistik**								
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9	9	9	9	9
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
15	**Persandian**								
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	91.30	91.30	93.48	95.65	97.82	100.00	100.00
16	**Kebudayaan**								
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan								
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	19,336	19,336	19,336	19,336	19,336	19,336
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	97	97	97	97	97
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	631	651	671	691	711	711
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	5	5	5	5	5
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	328	328	328	328	328	328

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu								
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	233	260	287	314	341	368	368
17	**Perpustakaan**								
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persentase (%)	6	6.65	8.5	8.5	8.5	8.5	8.244
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	225.450	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	235.450
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	61.823	30,000	32,000	35,000	38,000	42,000	42,000
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	9,651	500	750	1,000	1,250	1,500	14,651
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	124	25	30	30	35	35	155
18	**Kearsipan**								
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase (%)	42	20%	20%	20%	20%	20%	100%
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	70	30	30	30	30	30	150
LAYANAN URUSAN PILIHAN									
1	**Pariwisata**								
1.1	Kunjungan Wisatawan								
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	9,757,991	8,200,000	8,395,000	8,585,000	8,775,000	8,970,000	8,970,000
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	6,070,473	7,100,000	8,000,000	8,950,000	9,997,000	11,156,000	11,156,000
1.2	Lama Tinggal Wisatawan								
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	4.00	4.50	4.60	4.80	5.00	5.10	5.10
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	10.45	9.8	10.1	10.3	10.6	10.9	10.9
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persentase (%)	48.51	51.92	49.72	57.95	57.95	57.95	57.95
2	**Pertanian**								
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14.38	15.37	15.15	14.57	14.57	14.57	14.57
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	2.52	2.25	2.20	2.10	1.93	1.93	1.93
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.48	1.38	1.46	1.47	1.43	1.43	1.43
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	13.81	16.44	15.11	14.73	14.38	14.38	19,24-20,88
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar								
2.5.1	Padi	Jumlah	60.70	60,12	62,14	60.60	58.80	58.80	61.50
2.5.2	Jagung	Jumlah	43,892	24,34	26,46	33,17	31,22	31,22	31,22
2.5.3	Kedelai	Jumlah	2,687	15,28	14,11	13,09	12,92	12,92	12,92
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase (%)	9,011	9.011	9.011	9.011	9.011	9.011	9.011
3	**Kehutanan**								
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase (%)	1,6%	2,72%	2,63%	2,57%	1,48%	1,48%	1,48%
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	105.5	696	580.00	600	n/a	n/a	250ha

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persentase (%)	60	60	60	60	60	60	60
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase (%)	100	99.49	99.67	99.73	99.85	99.85	99.85
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persentase (%)	80	80	80	80	80	80	80
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persentase (%)	30	50	60	60	70	70	70
5	**Perdagangan**								
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persentase (%)	2	2.44	2.6	2.75	2.85	3	3
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persentase (%)	15.09	18.87	22.64	26.41	30.19	33.96	33.96
6	**Perindustrian**								
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persentase (%)	3.35	3.50	3.64	3.78	3.91	4.04	4.04
7	**Transmigrasi**								
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persentase (%)	40	40	40	40	40	40	40
8	**Kelautan dan Perikanan**								
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	136,496.55	220,706.50	228,873.48	229,403.59	130075.46	130075.46	226,517,79
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	34.56	31,17	32.2	32,38	33.52	33.52	34.86
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase (%)	100	60	70	80	90	90	100
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase (%)	107.36	60	70	80	97	97	100
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	97,157.60	99100.75	101082.77	103104.42	105166.51	107269.84	107269.84
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persentase (%)	80	80	80	80	80	80	80
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persentase (%)	104.64	106.21	104.6	102.7	105.19	106.19	106.19
PENUNJANG URUSAN									
1	**Perencanaan Pembangunan**								
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
2	**Keuangan**								
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SiLPA	Persentase (%)	6	6	6	6	6	6	6
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase (%)	6	6	6	6	6	6	6
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	10	10	10	10	10	10	10
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	26,70 : 73,30	25,21 : 74,78	26,66 : 73,33	28,00 : 71,99	29,28 : 70,71	30,54 : 69,45	30,54 : 69,45
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1,249,485,906,461	1,629,026,199,757	1,702,672,669,256	1,797,918,066,903	1,900,172,786,199	2,010,028,403,889	2,010,028,403,889
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase (%)	32	80	48	43	3	3	3
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase (%)	7.61	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	38.00
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	45	46	49	49	52	52	52
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4,355	252	252	247	270	270	270
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	6,924	1.397	1.057	1.079	6.869	6.869	6.869
4	**Penelitian dan Pengembangan**								
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDa:		-	-	-	-	-	-	-
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	14% 7/50	14% 7/50	14% 7/50
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	66,6% 6/9	66,6% 6/8	66,6% 6/8	66,6% 6/8	70% 7/8	70% 7/8	70% 7/8
5	**Pengawasan**								
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase (%)	9	44	16	27	27	27	27
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase (%)	0.06	5	5	5	5	5	5
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persentase (%)	14	55	55	30	10	10	10
6	**Sekretariat Dewan**								
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IX
PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dapat dimaknai sebagai aturan dalam pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut.

1) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini dengan sebaik-baiknya.
2) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang yang berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-OPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Bappeda Litbang Provinsi Bali berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Semesta Berencana Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Litbang Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.
5) Gubernur Bali berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
6) RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
7) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER